GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran hegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
c. Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Narasi RKPD Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

RKPD 2022
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

BUKU I

SCAN ME

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar x
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Kondisi Geografi II-1
2.1.2 Kondisi Demografi II-3
2.1.3 Kondisi Perekonomian II-7
2.1.4 Kondisi Kemiskinan II-23
2.1.5 Kondisi Sumber Daya Manusia II-34
2.1.6 Kondisi Pangan dan Energi II-75
2.1.7 Kondisi Infrastruktur Wilayah II-90
2.1.8 Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana II-139
2.1.9 Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah II-159
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020 ..... II-166
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-169
a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-169
b. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-173
c. Urusan Pilihan II-178
d. Urusan Pendukung Pemerintahan II-181
e. Urusan Penunjang Pemerintahan II-181
f. Urusan Pengawasan Pemerintahan II-182
g. Urusan Pemerintahan Umum II-182
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah II-183
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-6
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-10
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-14
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya III-17
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah IV-5
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1 Kebijakan Umum V-1
5.1.1 Arah Pengembangan Wilayah V-1
5.1.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang V-3

5.1.3 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya V-4
5.1.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis V-5
5.2 Arah Pengembangan Perwilayahan..... V-7
5.2.1 Integrasi Antar Wilayah Pengembangan..... V-15
5.2.1.1 Integrasi WP dalam *Quirckwin* Kawasan Industri (KI) Kendal V-15
A. WP Kedungsepur V-15
B. WP Banglor V-18
C. WP Wanarakuti V-21
5.2.1.2 Integrasi WP dalam *Quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur V-24
A. WP Purwomanggung..... V-24
B. WP Subosukawonosraten V-27
5.2.1.3 Integrasi WP dalam *Quickwin* Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri (KI) Batang..... V-31
A. WP Bregasmalang..... V-31
B. WP Barlingmascakeb..... V-34
C. WP Petanglong..... V-37
5.2.2 Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi..... V-39
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022..... VI-1
6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-2
A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar VI-3
B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar VI-11
C. Urusan Pilihan VI-25
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan VI-35
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan VI-38
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan VI-41
G. Unsur Pemerintahan Umum VI-42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama..... VII-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VII-1
7.3 Indikator Kinerja Daerah VII-7
7.4 Indikator Kinerja Program..... VII-15
BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah II-3
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Kesesuaian Alamat KK/KTP dengan Tempat Tinggal Hasil Sensus Penduduk 2020..... II-4
Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021 (%) II-9
Tabel 2.4 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021 (Milyar Rupiah) II-10
Tabel 2.5 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021 (Milyar Rupiah) II-10
Tabel 2.6 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021 (%) II-11
Tabel 2.7 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021 (%) II-12
Tabel 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021 (Milyar Rupiah)..... II-13
Tabel 2.9 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Sampai TW II Tahun 2021..... II-13
Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%)..... II-14
Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)..... II-15
Tabel 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2020 di Provinsi Dalam Wilayah Setara II-16
Tabel 2.13 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah)..... II-17
Tabel 2.14 PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2020 (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019 – 2020 di Provinsi Wilayah Setara
II-18
Tabel 2.15 Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini Tahun 2019 – 2020 di Provinsi Wilayah Setara II-21
Tabel 2.16 Jumlah Proyek dan Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi JawaTengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2020..... II-23
Tabel 2.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah sampai TW II Tahun 2021 (%)..... II-24

Tabel 2.18 Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah September 2020 ..... II-28
Tabel 2.19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2019 – 2020..... II-33
Tabel 2.20 Persentase Kemiskinan Tahun 2020 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2019-2020 Di Wilayah Setara II-33
Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi se Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2020..... II-35
Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 dan Perubahan Nilainya Tahun 2019-2020 Di Wilayah Setara..... II-36
Tabel 2.23 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus, SLB, dan Rasio Anak Berkebutuhan Khusus Yang Bersekolah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-42
Tabel 2.24 Rasio Guru:Siswa dan Rombel: Siswa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-45
Tabel 2.25 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-48
Tabel 2.26 Persentase Guru Berkualifikasi SI/D4 Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-50
Tabel 2.27 Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2017-2020..... II-56
Tabel 2.28 Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020..... II-59
Tabel 2.29 Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 –2020..... II-61
Tabel 2.30 Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2016–2020..... II-61
Tabel 2.31 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)..... II-62
Tabel 2.32 Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-63
Tabel 2.33 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-64
Tabel 2.34 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-66
Tabel 2.35 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)..... II-67
Tabel 2.36 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020 (%)..... II-68
Tabel 2.37 Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-69
Tabel 2.38 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021..... II-70
Tabel 2.39 Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja1) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021..... II-71
Tabel 2.40 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-72

Tabel 2.41 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-72
Tabel 2.42 Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.43 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.45 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.46 Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.47 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) II-75
Tabel 2.48 Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2016–2020 ..... II-80
Tabel 2.49 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-80
Tabel 2.50 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-81
Tabel 2.51 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-81
Tabel 2.52 Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019 – 2020 ... II-82
Tabel 2.53 Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel 2.54 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2.55 Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-88
Tabel 2.56 Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2020 ..... II-91
Tabel 2.57 Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-91
Tabel 2.58 Kondisi Lebar Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-93
Tabel 2.59 Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-93
Tabel 2.60 Kondisi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-94
Tabel 2.61 Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-95
Tabel 2.62 Jumlah Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Studi Keandalan II-95
Tabel 2.63 Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-98
Tabel 2.64 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-98
Tabel 2.65 Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-100
Tabel 2.66 Kondisi Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 .... II-102

Tabel 2.67 Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-103
Tabel 2.68 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-103
Tabel 2.69 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-104
Tabel 2.70 Ruas Jalan Provinsi yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2020..... II-104
Tabel 2.71 Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-106
Tabel 2.72 Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-107
Tabel 2.73 Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-108
Tabel 2.74 Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi II-110
Tabel 2.75 Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2017 – 2020 ..... II-111
Tabel 2.76 Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (Online) Tahun 2017-2020..... II-112
Tabel 2.77 Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah..... II-113
Tabel 2.78 Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-114
Tabel 2.79 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-115
Tabel 2.80 Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2019..... II-119
Tabel 2.81 Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020 ... II-120
Tabel 2.82 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-121
Tabel 2.83 Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah... II-122
Tabel 2.84 Penurunan Luasan Daerah Genangan Akibat Banjir (Ha) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020 ..... II-123
Tabel 2.85 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah II-124
Tabel 2.86 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2020..... II-125
Tabel 2.87 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020..... II-125
Tabel 2.88 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-126
Tabel 2.89 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-128
Tabel 2.90 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-129
Tabel 2.91 Persebaran Jumlah RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... II-130
Tabel 2.92 Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-131

Tabel 2.93 Perbandingan Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Jawa Tengah II-134
Tabel 2.94 Rincian Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah II-134
Tabel 2.95 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-135
Tabel 2.96 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota Sampai Dengan Tahun 2020 Di Provinsi Jawa Tengah II-135
Tabel 2.97 Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan Di Provinsi Jateng Tahun 2016-2020 (Penggantian Tanah Kas Desa dan Stimulan Pembuatan Sertifikat Lahan) II-138
Tabel 2.98 Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2020..... II-142
Tabel 2.99 Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-143
Tabel 2.100 Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-145
Tabel 2.101 Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah ... II-145
Tabel 2.102 Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar di Jawa Tengah Tahun 2020..... II-148
Tabel 2.103 Jumlah Data Timbulan Limbah Infeksius COVID-19 Tahun 2020..... II-148
Tabel 2.104 Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-149
Tabel 2.105 Data Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang Menurun Daya Dukungnya..... II-150
Tabel 2.106 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-151
Tabel 2.107 Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat dan Hutan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-151
Tabel 2.108 Jumlah Pengelola Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan di Jawa Tengah Tahun 2016 s.d 2020 ..... II-152
Tabel 2.109 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2020 ..... II-152
Tabel 2.110 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2016-2020..... II-153
Tabel 2.111 Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-154
Tabel 2.112 Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-154
Tabel 2.113 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-155
Tabel 2.114 Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2018..... II-157
Tabel 2.115 Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2016 – 2020..... II-158
Tabel 2.116 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016– 2020 ..... II-158
Tabel 2.117 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ... II-162
Tabel 2.118 Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020..... II-163

Tabel 2.119 Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 ..... II-164
Tabel 2.120 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-165
Tabel 2.121 Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 -2020..... II-166
Tabel 2.122 Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-166
Tabel 2.123 Rekapitulasi Rata-rata Realiasi Ketercapaian Kinerja RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan II-167
Tabel 2.124 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ..... II-168
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022 ... III-5
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020..... III-7
Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020 (%)..... III-8
Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... III-9
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020..... III-10
Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... III-14
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020..... III-15
Tabel 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... III-16
Tabel 3.9 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... III-17
Tabel 3.10 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021 ..... III-18
Tabel 3.11 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... III-20
Tabel 3.12 Rekapitulasi Pelaporan CSR Tahun 2021..... III-21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022..... IV-1
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022 ..... IV-18
Tabel 4.3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022..... IV-36
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2020 ..... V-15
Tabel 5.2 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022 ..... V-17
Tabel 5.3 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2020 ..... V-19
Tabel 5.4 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2022 ..... V-20
Tabel 5.5 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2020 ..... V-22

Tabel 5.6 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2022 ..... V-23
Tabel 5.7 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2020..... V-24
Tabel 5.8 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2022..... V-26
Tabel 5.9 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2020 ..... V-27
Tabel 5.10 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2022 ..... V-29
Tabel 5.11 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2020..... V-31
Tabel 5.12 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022..... V-32
Tabel 5.13 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2020 ..... V-34
Tabel 5.14 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2022 ..... V-35
Tabel 5.15 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2020..... V-37
Tabel 5.16 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022..... V-38
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... VI-2
Tabel 6.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... VI-43
Tabel 6.3 Implementasi Program Unggulan Jawa Tengah Tahun 2022 ..... VI-54
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... VII-2
Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... VII-8
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... VII-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Tahun 2022 ..... I-3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen I-10
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah II-1
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1961-2020 ..... II-5
Gambar 2.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... ..... II-6
Gambar 2.4 Persentase Sebaran Penduduk Jawa Tengah Menurut Wilayah Eks Karesidenan Tahun 2020 (%) II-7
Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2021 (TW II) (%) II-8
Gambar 2.6 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Wilayah Setara Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2020 ..... II-17
Gambar 2.7 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Wilayah Setara Nilai PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2020 dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019-2020..... II-19
Gambar 2.8 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2021 (TW II) (%) II-20
Gambar 2.9 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II)..... II-20
Gambar 2.10 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Wilayah Setara Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini Tahun 2019 - 2020 ..... II-21
Gambar 2.11 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-22
Gambar 2.12 Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) II-25
Gambar 2.13 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2020 ..... II-26
Gambar 2.14 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%) II-26
Gambar 2.15 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Sampai Tahun 2017 – 2021 (TW II)..... II-27
Gambar 2.16 Presentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-32
Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (TW II)..... II-30
Gambar 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-30
Gambar 2.19 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (TW II)..... II-31

Gambar 2.20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-31
Gambar 2.21 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2020 dengan Wilayah Setara..... II-34
Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-35
Gambar 2.23 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 dan Perubahan IPM Tahun 2019-2020 dengan Wilayah Setara..... II-37
Gambar 2.24 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020..... II-37
Gambar 2.25 APK PAUD Usia 3-6 Tahun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) II-39
Gambar 2.26 APK Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-40
Gambar 2.27 APK Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-40
Gambar 2.28 APK Pendidikan Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-41
Gambar 2.29 APM Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-41
Gambar 2.30 APM Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-43
Gambar 2.31 APS Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-44
Gambar 2.32 APS Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-44
Gambar 2.33 Persentase dan Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Sekolah Lagi di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-47
Gambar 2.34 Persentase Akreditasi PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-49
Gambar 2.35 Persentase Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2020..... II-50
Gambar 2.36 Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%) II-51
Gambar 2.37 Kondisi Sarpras Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%) II-52
Gambar 2.38 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-53
Gambar 2.39 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-53
Gambar 2.40 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-54
Gambar 2.41 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-55

Gambar 2.42 Sebaran Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2019 ..... II-56
Gambar 2.43 Persentase Kasus Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-57
Gambar 2.44 IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2020 ..... II-66
Gambar 2.45 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II) (%) II-70
Gambar 2.46 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-76
Gambar 2.47 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-76
Gambar 2.48 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-77
Gambar 2.49 Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-77
Gambar 2.50 Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-78
Gambar 2.51 Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-78
Gambar 2.52 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... II-79
Gambar 2.53 Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Ton) II-82
Gambar 2.54 Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (Kg/Kapita/Tahun) II-83
Gambar 2.55 Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah II-85
Gambar 2.56 Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020 (GWh)..... II-86
Gambar 2.57 Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020..... II-87
Gambar 2.58 Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah II-88
Gambar 2.59 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah II-90
Gambar 2.60 Konsep Pengembangan Infrastruktur Perhubungan di Jawa Tengah..... II-96
Gambar 2.61 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah II-97
Gambar 2.62 Peta Persebaran Kemacetan Mendasarkan Beban Jalan (VCR) II-105
Gambar 2.63 Pelayanan Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini I II-107
Gambar 2.64 Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah . II-109
Gambar 2.65 Launching Layanan BRT Trans Jateng..... II-109
Gambar 2.66 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah II-113
Gambar 2.67 Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional A. Yani Semarang II-115
Gambar 2.68 Apron, Terminal dan Runway Bandara Dewadaru Karimunjawa . II-116
Gambar 2.69 Bandara Tunggul Wulung Kabupaten Cilacap II-116
Gambar 2.70 Ground Breaking Bandara JB Soedirman oleh Presiden pada 23 April 2018..... II-117
Gambar 2.71 Progres Perkembangan Bandara Ngloram Cepu Kabupaten Blora II-117
Gambar 2.72 Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Jawa Tengah II-118

Gambar 2.73 Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah..... II-119
Gambar 2.74 Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020 (%) II-123
Gambar 2.75 Persentase Daerah Bebas Genangan Banjir di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020 (%) II-124
Gambar 2.76 Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2016-2020 ..... II-127
Gambar 2.77 Perkembangan Penanganan Rumah Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-129
Gambar 2.78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020 ..... II-139
Gambar 2.79 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020 ..... II-140
Gambar 2.80 Persebaran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Tahun 2021 ..... II-141
Gambar 2.81 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah..... II-156
Gambar 2.82 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 ..... II-159
Gambar 2.83 Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 (Unit) II-160
Gambar 2.84 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019..... II-160
Gambar 2.85 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Hasil Penilaian Mandiri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2020 ..... II-161
Gambar 2.86 Jumlah Kasus Konflik Bernuansa SARA di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020..... II-164
Gambar 4.1 Asusmsi Efektivitas Respon Kebijakan Kesehatan dan Ekonomi Terhadap Kondisi Pandemi Covid-19..... IV-2
Gambar 5.1 Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah..... V-2
Gambar 5.2 Pengembangan Wilayah Melalui Pembangunan Jaringan Prasarana V-4
Gambar 5.3 Pengembangan Wilayah Melalui Arah Pola Ruang V-5
Gambar 5.4 Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah V-7
Gambar 5.5 Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa-Bali V-8
Gambar 5.6 Pembagian Per Wilayahan..... V-10
Gambar 5.7 Quick Wins Dalam Konstelasi Wilayah Pengembangan Jawa Tengah Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019 ..... V-12
Gambar 5.8 Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah V-13
Gambar 5.9 Konsep Penguatan Konsektivitas Jawa Tengah V-14
Gambar 5.10 Sebaran Proyek Strategis Nasional Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Di Jawa Tengah V-14
Gambar 5.11 Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur V-16
Gambar 5.12 Arah Pengembangan Wilayah Banglor V-20
Gambar 5.13 Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti V-22
Gambar 5.14 Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung V-25
Gambar 5.15 Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten V-28
Gambar 5.16 Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang V-32
Gambar 5.17 Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb V-35
Gambar 5.18 Arah Pengembangan Wilayah Petanglong V-38

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tahun 2022 menjadi tahun keempat dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam pentahapan pembangunan Jawa Tengah jangka menengah tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2022 merupakan tahap ke-4 dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM. Tahap keempat ini menjadi sangat penting untuk memantapkan langkah Jawa Tengah dalam mencapai target pembangunan jangka menengah menjelang berakhirnya periode pembangunan daerah jangka menengah di tahun 2023. RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Tahun 2022 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2022, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu RKPD

Tahun 2022 juga menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

RKPD Tahun 2022 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programme* dan *programme follow result* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dokumen RKPD Tahun 2022 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 meliputi: (1) Persiapan yaitu dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022; (2) Konsultasi Publik sekaligus Pembukaan Masa Musrenbang; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Wilayah; (5) Pra Musrenbang Provinsi/*Desk* Verifikasi Rencana Kerja (Renja); (6) Musrenbang Provinsi; (7) Fasilitasi RKPD Tahun 2022 oleh Kemendagri; (8); Pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan DPRD; dan (9) Penetapan RKPD. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 sebagaimana gambar berikut.

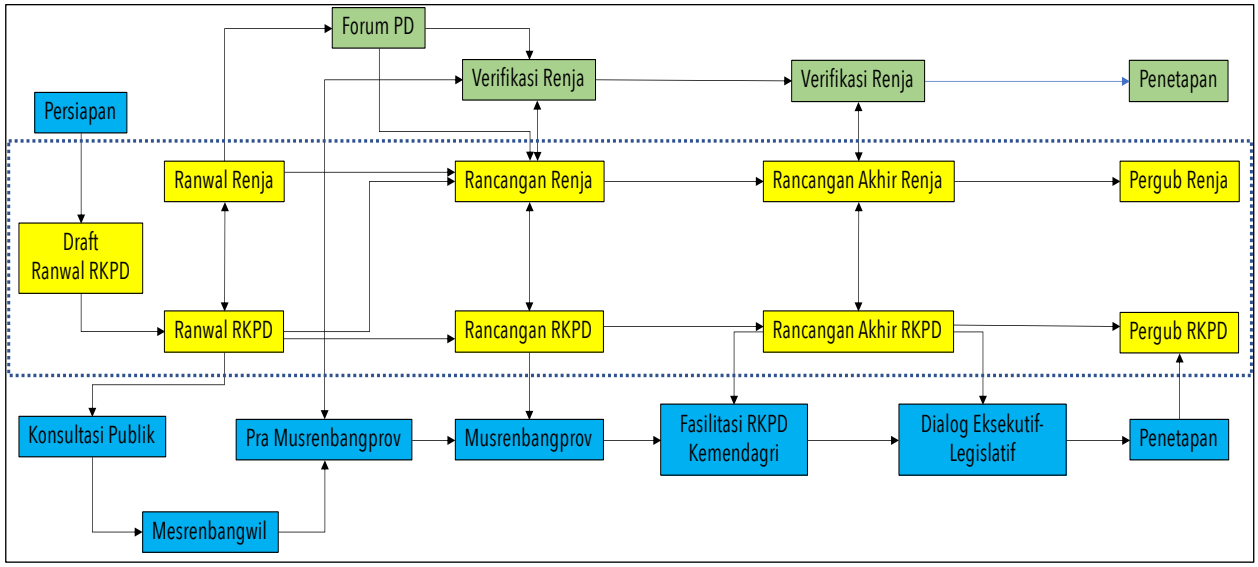

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2022

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan. Sehingga dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Dan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

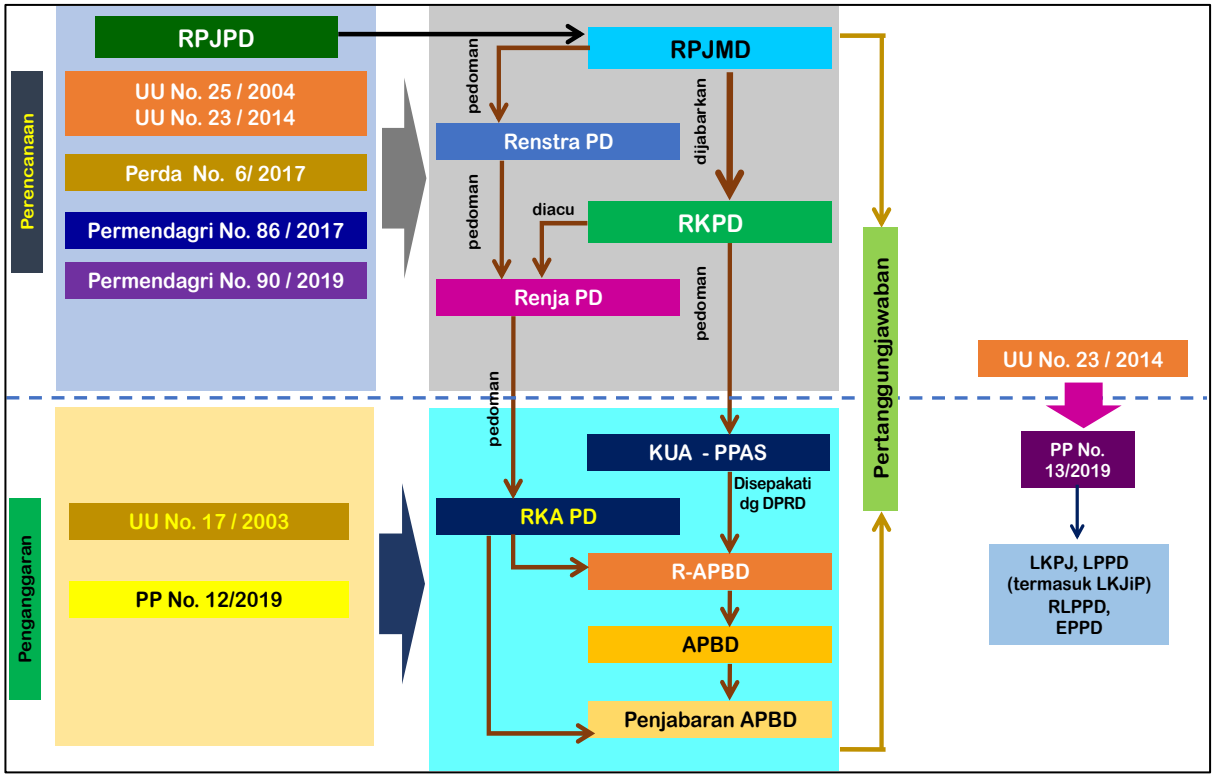

Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah dan memberikan arah program strategis Jawa Tengah di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Jawa Tengah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022

sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2022.

1.5. Sistematika

Sistematika RKPD Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I,** Narasi RKPD Tahun 2022 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2020 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2020; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2022.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, terdiri dari:
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
   c. Urusan Pilihan
   d. Fungsi Lainnya
3. **Buku III**, Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Kondisi Geografi

Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa. dan berada di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau 1,70 persen dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Provinsi Jawa Tengah berada di dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta-Surabaya) dan pusat pariwisata DIY. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, meliputi 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan.

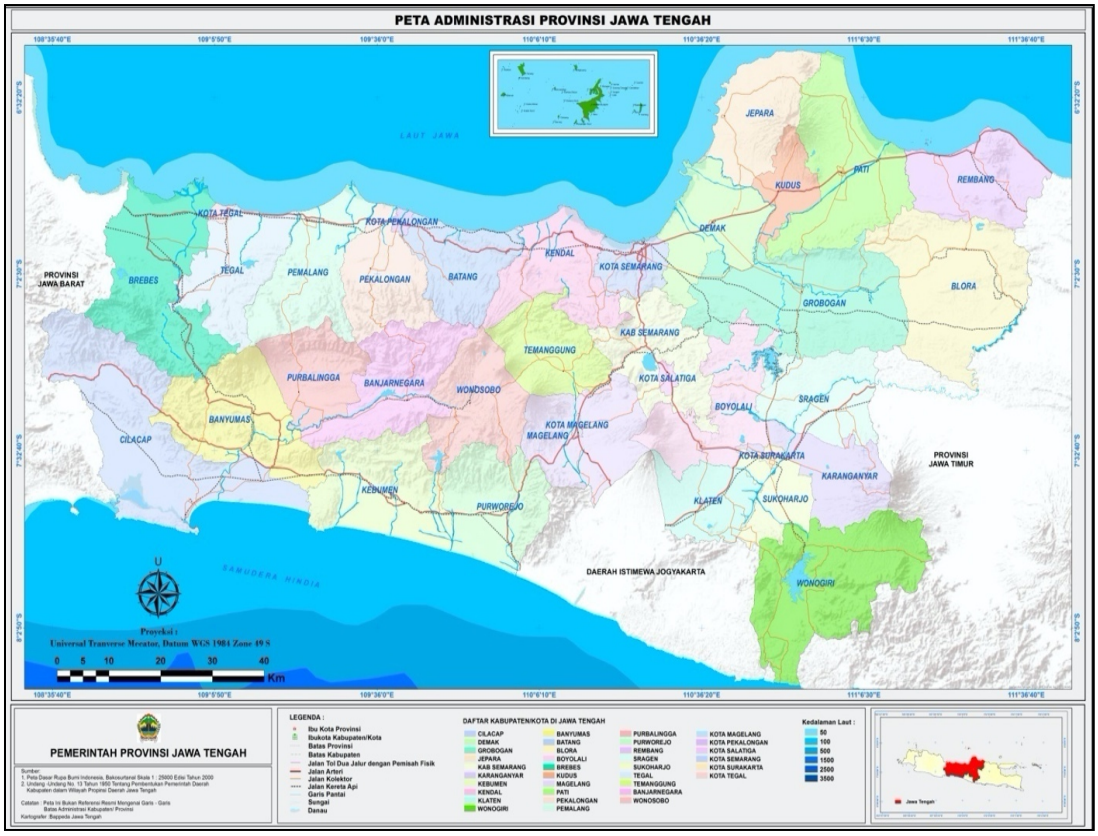

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi *organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol, aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite*, Batuapung, *Trass, Diatome, Marmer*, Batu gamping, *Dolomit, Basal, Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit, Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Selanjutnya dari kondisi hidrologi, Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo,

Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km^2) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km^2). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah

No	Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km^2)
1	**Pusat**	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
		Jratun Seluna	9.576,01
		Bengawan Solo	19.778,00
		Progo Opak Serang	3.238,89
		Serayu Bogowonto	7.344,61
		Citanduy	4.450,44
2	**Provinsi**	Pemali Comal	4.425,36
		Bodri Kuto	1.647,40
3	**Kabupaten/Kota**	Wiso Gelis	654,27

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2020 berkisar antara 24,2°C sampai dengan 28,3°C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 78 persen sampai dengan 85 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di SMPK Sempor Kebumen yaitu sebesar 4.479 mm^3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap sebanyak 210 hari.

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 masih didominasi oleh hutan seluas 873.191,98 hektar atau 25,42 persen dari luas Jawa Tengah. Penggunaan berikutnya adalah sawah tadah hujan seluas 775.493,5 hektar (22,57 persen), permukiman seluas 642.258,47 hektar (18,69 persen), dan kebun seluas 420.462,51 hektar (12,23 persen).

2.1.2. Kondisi Demografi

Hasil sensus penduduk (SP) 2020 sebagaimana dirilis oleh BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah per September 2020 adalah sebanyak 36,52 juta jiwa, terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu tahun 2010 hingga 2020 sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Dari 36,52 juta penduduk Jawa Tengah apabila diselaraskan dengan data administrasi kependudukan diketahui bahwa sejumlah 94,49 persen atau sekitar 34,51 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara 5,51 persen atau sekitar 2,01 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Hal ini

mengindikasikan bahwa penduduk yang bermigrasi dari Satuan Lingkungan Setempat (SLS) tempat tinggal mereka relatif cukup besar. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,17 persen per tahun dimana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 0,37 persen per tahun.

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Kesesuaian Alamat KK/KTP dengan Tempat Tinggal Hasil Sensus Penduduk 2020

No	Kab/Kota	laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sesuai KK/KTP	Tidak Sesuai KK/KTP
1	Cilacap	980.999	963.858	1.944.857	1.873.006	71.851
2	Banyumas	894.695	882.223	1.776.918	1.679.512	97.406
3	Purbalingga	505.281	493.280	998.561	959.040	39.521
4	Banjarnegara	517.056	500.711	1.017.767	985.839	31.928
5	Kebumen	684.346	666.092	1.350.438	1.300.784	49.654
6	Purworejo	385.266	384.614	769.880	724.325	45.555
7	Wonosobo	448.152	430.972	879.124	820.083	59.041
8	Magelang	654.989	644.870	1.299.859	1.195.574	104.285
9	Boyolali	534.658	528.055	1.062.713	1.013.112	49.601
10	Klaten	627.600	632.906	1.260.506	1.168.771	91.735
11	Sukoharjo	454.143	453.444	907.587	817.900	89.687
12	Wonogiri	520.916	522.261	1.043.177	1.013.849	29.328
13	Karanganyar	464.784	467.179	931.963	874.158	57.805
14	Sragen	486.829	490.122	976.951	946.217	30.734
15	Grobogan	729.829	723.697	1.453.526	1.417.896	35.630
16	Blora	442.488	441.845	884.333	835.452	48.881
17	Rembang	324.593	320.740	645.333	615.536	29.797
18	Pati	660.484	663.704	1.324.188	1.283.501	40.687
19	Kudus	423.777	425.407	849.184	812.054	37.130
20	Jepara	596.126	588.821	1.184.947	1.146.066	38.881
21	Demak	607.820	596.136	1.203.956	1.143.262	60.694
22	Semarang	525.064	528.030	1.053.094	972.670	80.424
23	Temanggung	397.451	392.723	790.174	738.580	51.594
24	Kendal	514.795	503.710	1.018.505	923.633	94.872
25	Batang	404.807	396.911	801.718	761.565	40.153
26	Pekalongan	491.607	477.214	968.821	901.737	67.084
27	Pemalang	746.261	725.228	1.471.489	1.408.789	62.700
28	Tegal	809.884	787.112	1.596.996	1.506.768	90.228
29	Brebes	1.003.373	975.386	1.978.759	1.876.781	101.978
30	Kota Magelang	60.234	61.292	121.526	109.091	12.435
31	Kota Surakarta	257.043	265.321	522.364	472.283	50.081
32	Kota Salatiga	95.025	97.297	192.322	173.033	19.289
33	Kota Semarang	818.441	835.083	1.653.524	1.499.337	154.187

No	Kab/Kota	laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sesuai KK/KTP	Tidak Sesuai KK/KTP
34	Kota Pekalongan	155.145	152.005	307.150	279.928	27.222
35	Kota Tegal	138.182	135.643	273.825	254.881	18.944
	Jawa Tengah	**18.362.143**	**18.153.892**	**36.516.035**	**34.505.013**	**2.011.022**
	%	**50,29**	**49,71**	**100**	**94,49**	**5,51**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

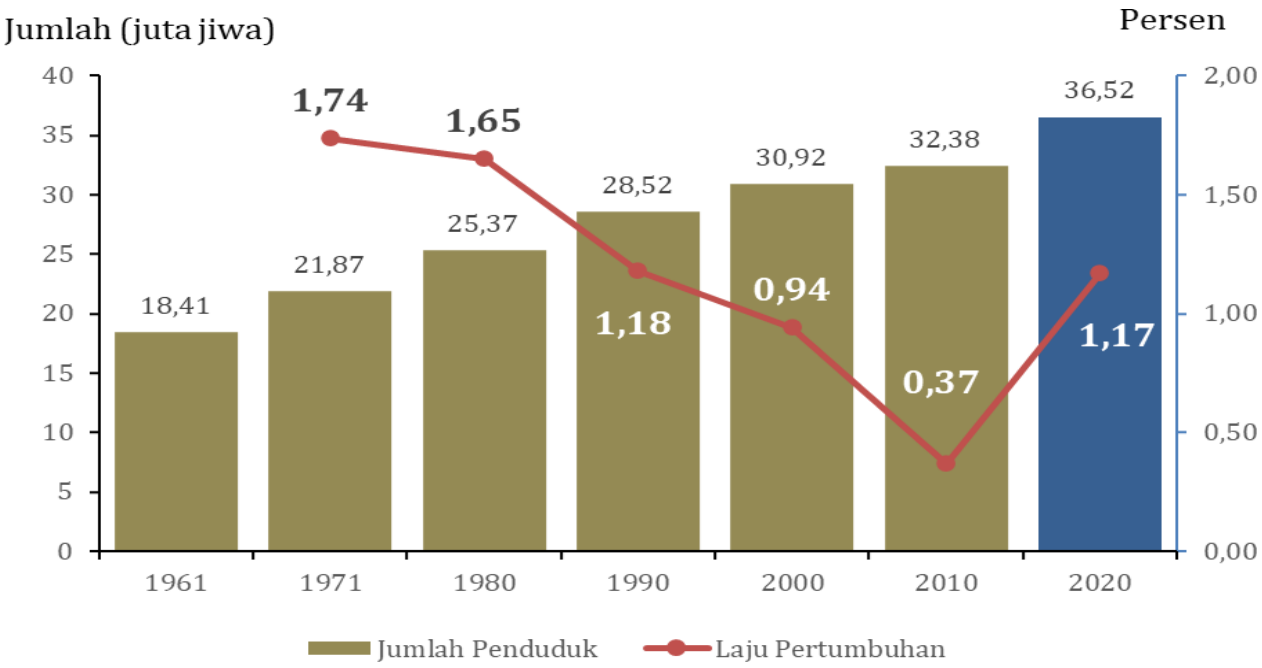

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.2.
Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1961-2020

Pada rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,36 juta jiwa, atau 50,29 persen dari penduduk Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,15 juta jiwa, atau 49,71 persen dari penduduk Jawa Tengah. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah sebesar 101,15. Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia remaja hingga menjelang 30 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tinggi, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

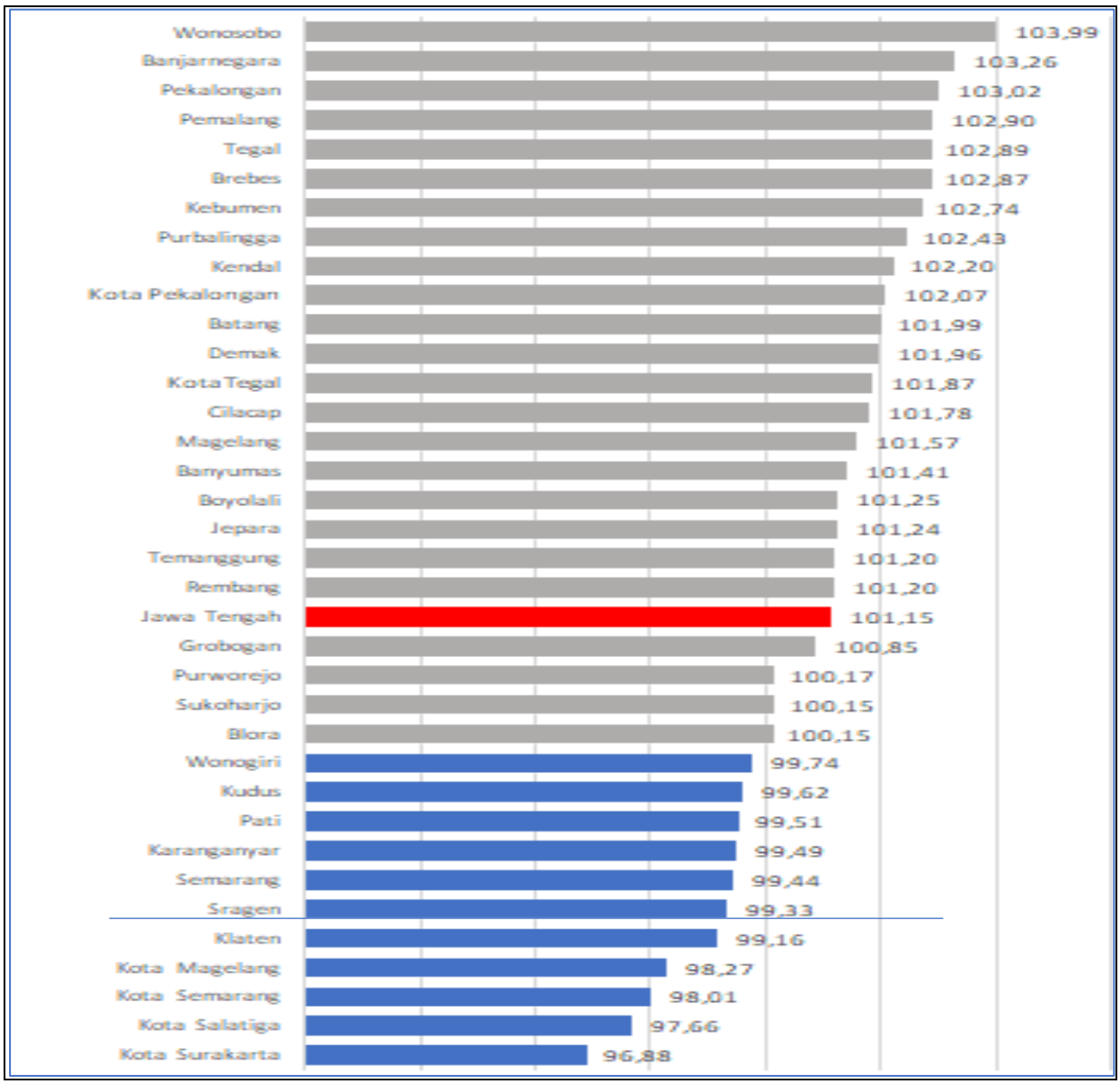

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.3.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sementara itu, sebaran penduduk Jawa Tengah menurut kabupaten/kota bervariasi. Kabupaten/Kota dengan penduduk terbesar mencakup Kabupaten Brebes (1,98 juta jiwa), Cilacap (1,94 juta jiwa), Banyumas (1,78 juta jiwa), dan Kota Semarang (1,65 juta jiwa). Keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk terkecil meliputi Kota Magelang (122 ribu jiwa), Kota Salatiga (192 ribu jiwa), Kota Tegal (274 ribu jiwa), Kota Pekalongan (307 ribu jiwa), dan Kota Surakarta (522 ribu jiwa). Kelima kota tersebut hanya memiliki andil sekitar 4 persen dari total penduduk di Jawa Tengah.

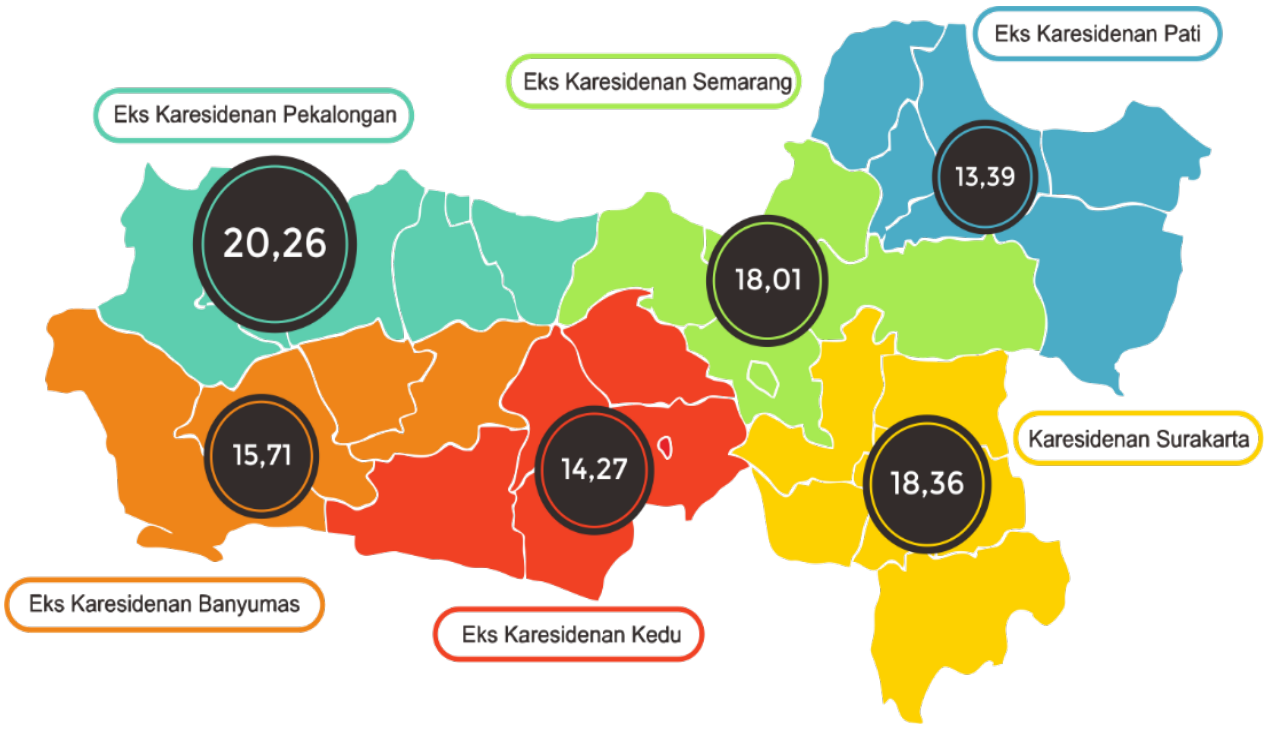

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.4.
Persentase Sebaran Penduduk Jawa Tengah Menurut Wilayah Eks Karesidenan Tahun 2020 (%)

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu potensi saat ini adalah penduduk di Jawa Tengah yang mayoritas usia produktif sehingga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, namun demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas dan produktif akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya perlu antisipasi dengan banyaknya usia produktif maka persaingan antar pencari kerja semakin meningkat namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta angka kriminalitas.

2.1.3. Kondisi Perekonomian

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,66 persen (*y-on-y*), setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 85,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor sebesar 34,43 persen.

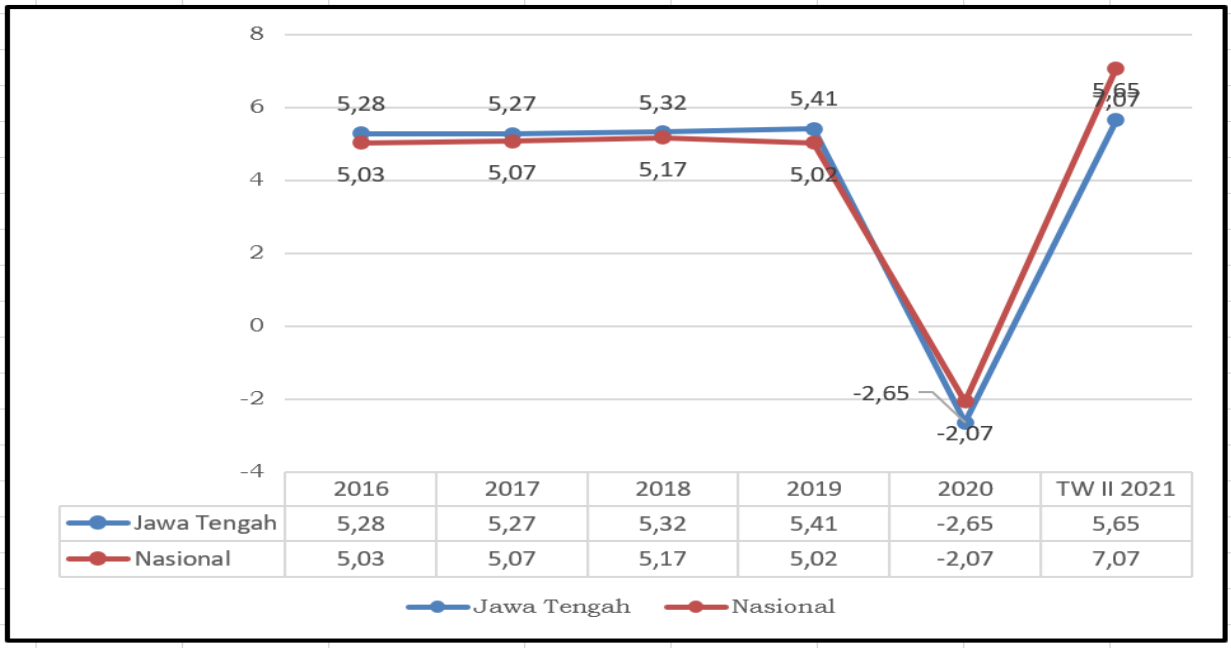

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 - 2021 (TW II) (%)

Selama empat kuartal terakhir tepatnya sejak Triwulan II-2020, perekonomian Jawa Tengah terus-menerus mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yang merupakan imbas dari pandemi Covid-19. Akan tetapi hal yang berbeda mulai terjadi pada Triwulan II-2021 ini. Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II-2021 menunjukkan perubahan yang sangat berarti ditandai dengan pesatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi *year on year* dari -5,91 persen pada Triwulan II-2020 menjadi 5,66 persen pada Triwulan II-2021.

Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 85,43 persen pada Triwulan II-2021, setelah terpuruk hingga mencatatkan kontraksi di angka -62,95 persen pada Triwulan II-2020. Walaupun pada Triwulan II-2021 masih diterapkan pembatasan perjalanan melalui kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, tetapi kebijakan tersebut tidak seketat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun lalu. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara maupun angkutan laut yang berangkat dari Jawa Tengah. Pada periode April-Juni 2020, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Jawa Tengah hanya mencapai 44.406 orang, sedangkan pada April-Juni 2021 meningkat tajam menjadi 197.827 orang. Jumlah penumpang angkutan laut juga meningkat dari 10.640 orang selama periode April-Juni 2020 menjadi 48.975 orang selama April-Juni 2021.

Tabel 2.3.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021 (TW II) (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	TW II 2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,20	1,82	2,62	1,36	2,48	-5,81
Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,80	5,50
Industri Pengolahan	4,10	4,33	4,33	5,19	-3,74	2,94
Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79	4,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,42	2,29	4,79
Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76	8,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,98	-3,80	12,68
Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,30	7,55	8,49	-33,15	85,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,14	-7,98	20,70
Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65	1,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,51	2,03	4,71
Real Estate	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28	3,49
Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19	14,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,31	9,87
Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24	2,31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,60	8,80	6,72	8,19	0,65
Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01	10,45
PDRB	**5,25**	**5,26**	**5,30**	**5,41**	**-2,65**	**5,66**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jika dilihat dari nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, maka diketahui bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2020 sebesar 965.629,09 milyar rupiah menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 991.913,12 milyar rupiah. Demikian juga nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 adalah sebesar 1.348.600,4 milyar rupiah, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 1.361.567,36 milyar rupiah.

Tabel 2.4.

Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021 (TW II) (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**	TW II 2021**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116.331,12	118.450,17	121.554,48	123.195,69	126.256,48	30.848,90
B. Pertambangan dan Penggalian	19.367,60	20.356,48	20.855,98	21.557,11	21.385,27	5.484,60
C. Industri Pengolahan	295.960,84	308.770,22	322.143,29	338.820,38	326.165,24	83.287,07
D. Pengadaan Listrik & Gas	928,11	976,55	1.028,92	1.085,27	1.104,7	272,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	589,81	628,21	658,88	687,51	703,22	183,67
F. Konstruksi	86.589,00	92.762,02	98.393,74	103.262,32	99.380,71	25.541,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	121.970,81	129.133,51	136.581,24	144.729,67	139.226,50	36.837,05
H. Transportasi dan Pergudangan	28.097,07	29.867,33	32.121,01	34.848,12	23.295,96	5.990,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.633,47	28.350,13	30.660,79	33.442,26	30.773,75	8.067,43
J. Informasi dan Komunikasi	35.742,56	40.485,50	45.500,91	50.789,28	58.739,21	15.235,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	23.533,41	24.749,92	25.635,54	26.535,01	27.072,39	6.824,51
L. Real Estate	15.831,48	16.856,96	17.797,50	18.782,40	18.730,35	4.717,70
M,N. Jasa Perusahaan	3.032,33	3.296,65	3.609,30	3.989,82	3.702,92	952,29
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22.720,44	23.304.54	24.137,86	25.033,50	24.705,57	6.724,21
P. Jasa Pendidikan	31.479,47	33.674,58	36.286,32	39.040,75	38.948,07	9.764,46
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.929,49	7.525,67	8.187,91	8.738,36	9.454,46	2.336,50
R,S,T,U. Jasa lainnya	13.362,35	14.561,84	15.937,47	17.375,66	15.984,26	3.935,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**849.099,35**	**893.750,29**	**941.091,14**	**991.913,12**	**965.629,09**	**247.004,14**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Tabel 2.5.

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021 (TW II) (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020 **	TW II 2021**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164.512,01	168.806,52	178.352,88	184.225,13	192.888,91	47.547,13
B. Pertambangan dan Penggalian	27.479,90	29.938,77	32.321,26	33.727,57	33.082,76	8.900,19
C. Industri Pengolahan	377.237,31	405.586,12	436.424,70	468.884,82	465.494,34	120.704,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	988,65	1.128,08	1.225,34	1.294,45	1.309,59	322,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	659,34	706,83	743,87	790,46	855,45	225,43
F. Konstruksi	111.884,55	122.936,71	136.153,70	147.205,58	142.205,67	37.709,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	146.523,16	159.276,19	172.944,07	187.064,45	181.852,59	48.757,70
H. Transportasi dan Pergudangan	33.786,51	36.449,00	39.583,09	43.833,70	29.832,20	7.894,87
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.658,31	36.204,67	39.498,49	43.634,69	40.359,71	10.748,90
J. Informasi dan Komunikasi	33.075,35	39.125,73	43.963,89	49.587,27	57.428,84	14.896,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	31.865,32	34.964,64	37.488,38	39.406,40	40.219,25	10.542,55
L. Real Estate	18.172,33	19.836,97	21.450,33	22.920,25	23.010,53	5.848,83
M,N. Jasa Perusahaan	3.957,05	4.465,11	5.021,62	5.712,08	5.417,73	1.408,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31.233,11	33.086,00	34.653,13	36.431,29	36.457,41	10.117,55
P. Jasa Pendidikan	46.454,03	51.741,34	56.951,69	62.396,85	63.862,38	16.054,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.307,25	10.258,53	11.283,42	12.275,40	13.658,16	3.379,94
R,S,T,U. Jasa lainnya	16.522,48	18.283,30	20.201,31	22.176,97	20.664,88	5.103,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**1.087.316,68**	**1.172.794,52**	**1.268.261,17**	**1.361.567,36**	**1.348.600,40**	**350.161,94**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Sementara itu, struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan II-2021 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 34,47 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,92 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,58 persen; dan Konstruksi sebesar 10,77 persen.

Tabel 2.6.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II) (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**	TW II 2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,13	14,39	14,06	13,53	14,30	13,58
B	Pertambangan dan Penggalian	2,53	2,55	2,55	2,48	2,45	2,54
C	Industri Pengolahan	34,69	34,58	34,41	34,44	34,52	34,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,29	10,48	10,73	10,81	10,55	10,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,48	13,58	13,64	13,74	13,49	13,92
H	Transportasi dan Pergudangan	3,11	3,11	3,12	3,22	2,21	2,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,09	3,11	3,20	2,99	3,07
J	Informasi dan Komunikasi	3,04	3,34	3,47	3,64	4,26	4,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,93	2,98	2,96	2,89	2,98	3,01
L	Real Estate	1,67	1,69	1,69	1,68	1,71	1,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,40	0,42	0,40	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,87	2,82	2,73	2,68	2,70	2,89
P	Jasa Pendidikan	4,27	4,41	4,49	4,58	4,74	4,59
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,86	0,87	0,89	0,90	1,01	0,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,56	1,59	1,63	1,53	1,46
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II-2021 (*y-on-y*), disumbang oleh pertumbuhan Komponen PMTB yang menjadi komponen penyumbang pertumbuhan paling tinggi, sehingga mengangkat ekonomi Jawa Tengah sebesar 2,78 persen; diikuti Komponen PKRT sebesar 2,76 persen dan Komponen PKP sebesar 0,37 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari komponen lainnya (termasuk impor) menekan pertumbuhan sebesar -0,26 persen. Walaupun demikian, pertumbuhan Komponen Ekspor Barang dan Jasa masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Impor Barang dan Jasa, sehingga berdampak positif pada peranannya terhadap pertumbuhan secara keseluruhan.

Tabel 2.7.
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021 (TW II) (%)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**	TW II 2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,56	4,62	4,69	4,62	-1,42	2,76
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,61	4,43	7,62	10,90	-2,98	0,03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,58	3,07	2,98	3,98	-4,30	0,37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,99	7,50	7,68	4,85	-6,98	2,78
Perubahan Inventori	49,25	4,97	4,66	-5,13	-	-
Ekspor Luar Negeri	-3,02	13,54	12,02	4,92	-7,90	10,94
Impor Luar Negeri	-4,37	9,58	32,61	-9,33	-17,65	
Net Ekspor Antar Daerah	2,80	0,60	49,00	-11,75	-23,13	10,04
Total	**5,28**	**5,26**	**5,31**	**5,41**	**-2,65**	**5,66**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran selama tahun 2016-2020 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa PDRB Jawa Tengah sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren konstribusinya fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.8.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II) (Milyar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**	TW II 2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	660.998,58	711.586,51	764.808,38	821.948,11	822.095,50	212.992,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12.256,98	13.168,41	14.491,86	16.443,21	16.224,64	4.355,83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	87.589,15	94.261,56	98.717,17	103.209,51	98.359,80	22.825,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	333.977,42	366.766,47	413.749,15	449.486.05	417.815,40	107.589,02
Perubahan Inventori	7.307,46	10.618,21	17.201,59	11.362,19	12.797,37	3.266,31
Ekspor Luar Negeri	92.562,66	106.463,04	123.867,81	128.554,84	118.335,36	145.456,30
Impor Luar Negeri	134.238,54	160.854,81	234.981,44	203.947,07	157.157,39	
Net Ekspor Antar Daerah	26.872,96	30.785,14	70.600,26	35.170,50	20.129,72	146.333,37
Total PDRB	**1.087.316,68**	**1.172.794,52**	**1.268.454,78**	**1.362.457,38**	**1.348.600,40**	**350.161,94**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Tabel 2.9.
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II) (%)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**	TW II 2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,79	60,67	60,29	60,33	60,96	60,83
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,12	1,14	1,21	1,20	1,24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,06	8,04	7,78	7,59	7,29	6,52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,72	31,27	32,62	32,99	30,98	30,73
Perubahan Inventori	0,67	0,91	1,36	0,83	0,95	0,93
Ekspor Luar Negeri	8,51	9,08	9,77	9,44	8,77	41,54
Impor Luar Negeri	12,35	13,72	18,53	14,97	11,65	-
Net Ekspor Antar Daerah	2,47	2,62	5,57	2,58	1,49	41,79
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keteranga :
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor tak terkecuali kondisi perekonomian daerah dimana pertumbuhan ekonomi provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional mengalami kontraksi sejak triwulan II tahun 2020. Pada akhir tahun 2020 kontraksi terdalam dirasakan oleh Provinsi Banten sebesar minus 3,38 persen dan yang paling dangkal di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar minus 2,36 persen. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (%)

No	Provinsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Banten	5,53	5,75	5,98	5,90	-3,38
2	Jawa Barat	5,67	5,29	5,64	5,07	-2,44
3	DKI Jakarta	5,85	6,20	6,17	5,96	-2,36
4	Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,40	-2,65
5	DIY	5,05	5,26	6,20	6,60	-2,69
6	Jawa Timur	5,55	5,72	5,65	5,54	-2,39
	Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber: BPS, 2021
Keterangan:
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah di tahun 2020 juga mengalami kontraksi sebagai imbas dari terjadinya pandemi Covid-19. Kabupaten Cilacap tercatat daerah yang mengalami kontraksi terdalam di Jawa Tengah yaitu sebesar minus 10,36 persen, diikuti oleh Kabupaten Blora yaitu sebesar minus 4,66 persen. Kedua kabupaten ini merupakan kabupaten yang

salah satu sumber PDRB nya berasal dari migas, yang di tahun 2020 juga mengalami pelambatan. Sementara Kabupaten Demak adalah kabupaten dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar minus 0,23 persen, diikuti Kabupaten Brebes sebesar minus 0,59 persen.

Tabel 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)

Kabupten/Kota		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Kab. Cilacap	5,06	2,58	3,05	2,33	-10,36
2	Kab. Banyumas	6,05	6,34	6,45	6,32	-1,65
3	Kab. Purbalingga	4,78	5,37	5,42	5,65	-1,23
4	Kab. Banjarnegara	5,41	5,65	5,67	5,60	-1,32
5	Kab. Kebumen	4,97	5,15	5,52	5,58	-1,46
6	Kab. Purworejo	5,12	5,27	5,38	5,45	-1,66
7	Kab. Wonosobo	5,13	4,14	5,06	5,61	-1,66
8	Kab. Magelang	5,37	5,50	5,28	5,30	-1,68
9	Kab. Boyolali	5,30	5,80	5,72	5,96	-1,24
10	Kab. Klaten	5,14	5,34	5,47	5,57	-1,18
11	Kab. Sukoharjo	5,71	5,76	5,79	5,92	-1,70
12	Kab. Wonogiri	5,23	5,32	5,41	5,14	-1,41
13	Kab. Karanganyar	5,37	5,77	5,98	5,93	-1,87
14	Kab. Sragen	5,74	5,97	5,75	5,90	-1,81
15	Kab. Grobogan	4,46	5,85	5,83	5,37	-1,59
16	Kab. Blora	23,53	5,98	4,41	4,05	-4,66
17	Kab. Rembang	5,23	6,98	5,89	5,20	-1,49
18	Kab. Pati	5,46	5,67	5,72	5,86	-1,15
19	Kab. Kudus	2,52	3,21	3,24	3,10	-3,53
20	Kab. Jepara	5,02	5,39	5,85	6,02	-1,94
21	Kab. Demak	5,05	5,82	5,40	5,36	-0,23
22	Kab. Semarang	5,27	5,65	5,79	5,59	-2,67
23	Kab. Temanggung	4,98	5,03	5,13	5,05	-2,13
24	Kab. Kendal	5,53	5,78	5,77	5,69	-1,53
25	Kab. Batang	4,98	5,55	5,72	5,39	-1,29
26	Kab. Pekalongan	5,16	5,44	5,76	5,35	-1,89
27	Kab. Pemalang	5,38	5,61	5,70	5,80	-0,66
28	Kab. Tegal	5,92	5,38	5,51	5,58	-1,46
29	Kab. Brebes	5,08	5,65	5,22	5,86	-0,59
30	Kota Magelang	5,17	5,42	5,46	5,44	-2,45
31	Kota Surakarta	5,32	5,70	5,75	5,78	-1,74
32	Kota Salatiga	5,22	5,58	5,84	5,88	-1,68
33	Kota Semarang	5,84	6,70	6,52	6,86	-1,61
34	Kota Pekalongan	5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87
35	Kota Tegal	5,44	5,95	5,87	5,77	-2,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
**) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara*

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi wilayah yang setara di Indonesia tahun 2020 yang hampir semua wilayah mengalami kontraksi, demikian juga dengan ekonomi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah berada pada kelompok wilayah provinsi dengan rentang pertumbuhan ekonomi sebesar -9,31 sampai -2,07 persen yang terdiri dari 11 provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada wilayah provinsi yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020 terkontraksi sebesar –3,33 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi setara. Dan dari sisi perubahan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 – 2020, Jawa Tengah berada pada kelompok wilayah provinsi dengan rentang nilai perubahan -14,91 sampai -7,59 poin yang terdiri dari 11 provinsi. Dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan perubahan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 – 2020, maka diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah berada dalam satu kelompok dengan rentang nilai yang sama dengan 8 Provinsi lain yaitu Bali, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Tabel 2.12.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2020 di Provinsi Dalam Wilayah Setara

Wilayah Setara Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020		**Wilayah Setara Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2020**	
Provinsi	**PE (%)**	**Perubahan (Poin)**	**Provinsi**
Bali	-9,31	-14,91	Bali
Kepulauan Riau	-3,80	-9,28	DI Yogyakarta
Banten	-3,38	-8,67	Banten
Kalimantan Timur	-2,85	-8,64	Kepulauan Riau
DI Yogyakarta	-2,69	-8,18	DKI Jakarta
Jawa Tengah	-2,65	-8,09	Sulawesi Barat
Jawa Barat	-2,44	-8,06	Jawa Tengah
Sulawesi Barat	-2,42	-8,01	Kalimantan Utara
Jawa Timur	-2,39	-7,91	Jawa Timur
DKI Jakarta	-2,36	-7,61	Sulawesi Selatan
Kep. Bangka Belitung	-2,30	-7,59	Kalimantan Timur
Rata-Rata	**-3,33**	**-8,81**	**Rata-Rata**

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

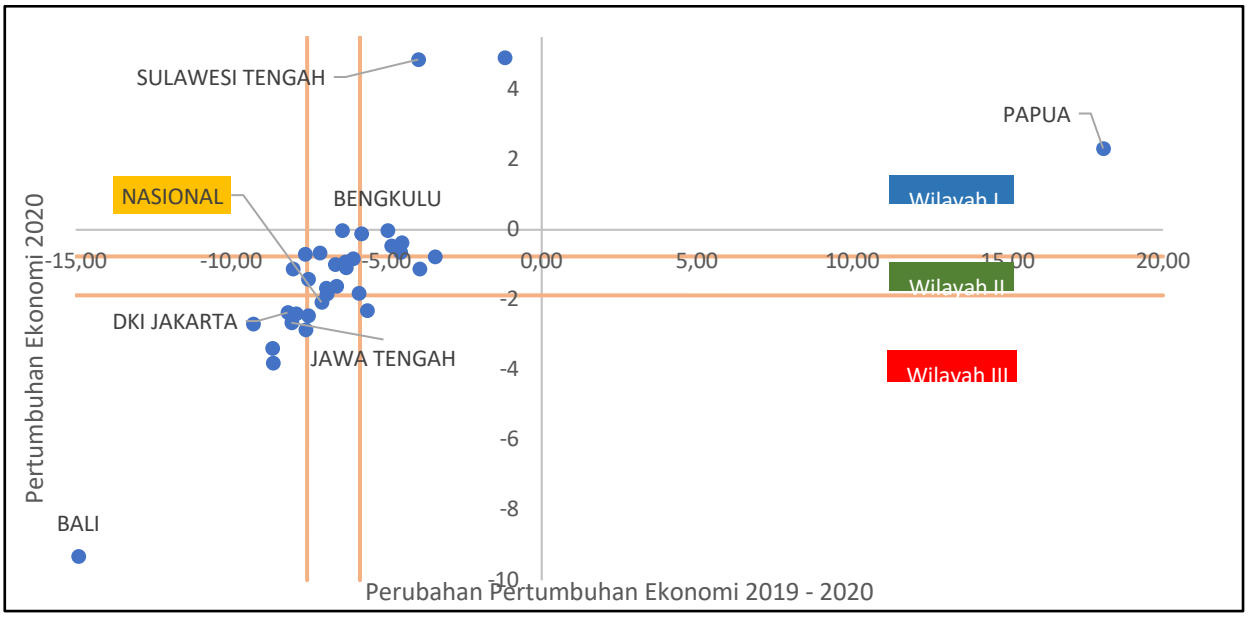

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

Gambar 2.6.
Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Wilayah Setara Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2020

2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar 38,59 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 38,59 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 27,63 juta rupiah.

Tabel 2.13.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
2016	31.961.950	24.959.490
2017	34.234.310	26.088.910
2018	36.770.960	27.287.370
2019	39.217.680	28.575.950
2020	38.597.520	27.636.718

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Apabila dibandingkan dengan wilayah setara di Indonesia dari sisi PDRB ADHK per kapita tahun 2020, diketahui bahwa PDRB ADHK per kapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang sebesar 27,63 juta rupiah lebih tinggi dari rata-rata PDRB ADHK per kapita wilayah setara yang sebesar 24,24 juta rupiah. Sedangkan dari sisi pertumbuhan PDRB ADHK per kapita tahun 2019-2020, diketahui bahwa perubahan PDRB ADHK per kapita Jawa Tengah lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan wilayah setara, dimana perubahan Jawa Tengah sebesar -0,93 persen, dan rata-rata pertumbuhan wilayah setara sebesar -0,87 persen. Dengan melihat dua variabel pembanding yaitu PDRB ADHK per kapita tahun 2020 dan pertumbuhannya dari tahun 2019-2020, maka 3 provinsi berada pada kelompok yang setara Provinsi Jawa Tengah, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat.

Tabel 2.14.

PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2020 (Juta Rupiah) dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019 – 2020 di Provinsi Wilayah Setara

Wilayah Setara Nilai PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2020 (Juta Rupiah)		**Wilayah Setara Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019-2020 (%)**	
Provinsi	**PDRB ADHK Per Kapita**	**Pertumbuhan**	**Provinsi**
Nusa Tenggara Timur	12,41	-1,10	Jawa Barat
Maluku	16,79	-0, 99	DI Yogyakarta
Nusa Tenggaran Barat	18,19	-0,99	Kalimantan Selatan
Maluku Utara	21,79	-0,98	Sulawesi Barat
Sulawesi Barat	22,83	-0,93	Jawa Tengah
Bengkulu	22,94	-0,86	Sulawesi Tenggara
Gorontalo	23,30	-0,83	Kalimantan Barat
Aceh	24,10	-0,83	Sumatera Barat
DI Yogyakarta	26,19	-0,78	Jambi
Kalimantan Barat	26,24	-0,75	Sumatera Utara
Jawa Tengah	27,63	-0,73	Lampung
Rata-Rata	**24,24**	-0,65	Sulawesi Utara
		-0,87	**Rata-Rata**

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

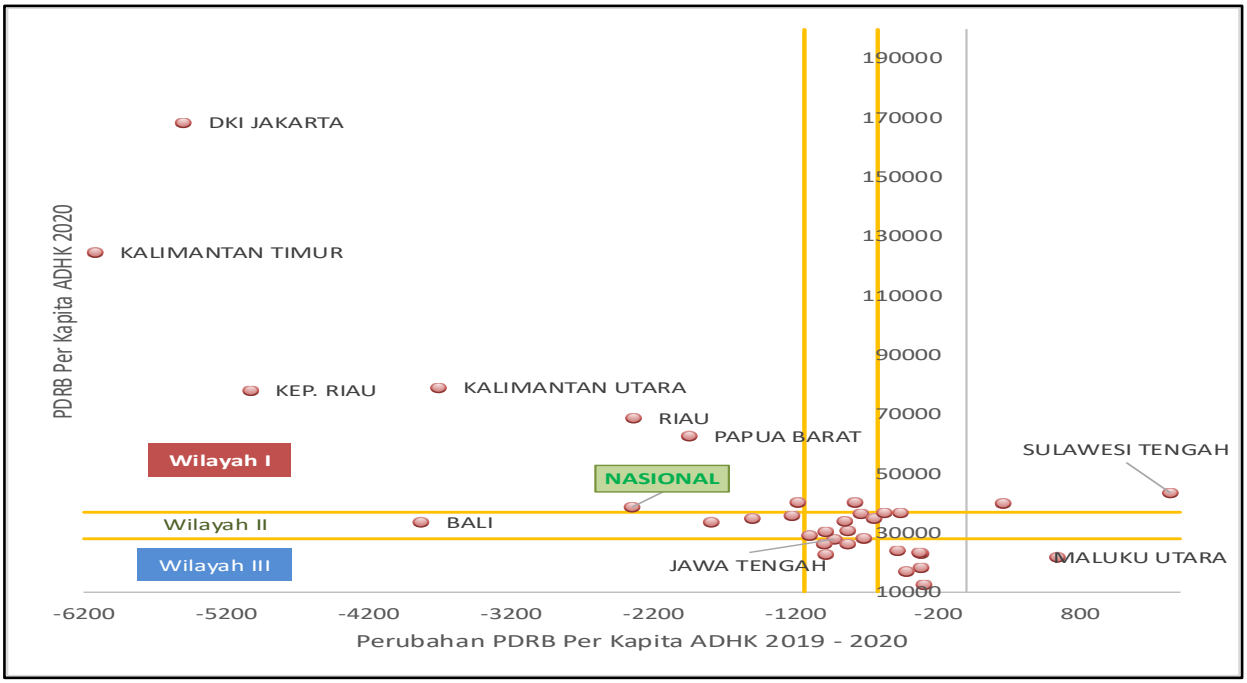

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

Gambar 2.7.
Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Wilayah Setara Nilai PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2020 dan Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2019-2020

3. Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Tingkat inflasi tahun kalender Juli 2021 sebesar 0,57 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,40 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pendidikan sebesar 0,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,13 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,08 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -0,06 persen; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,01 persen.

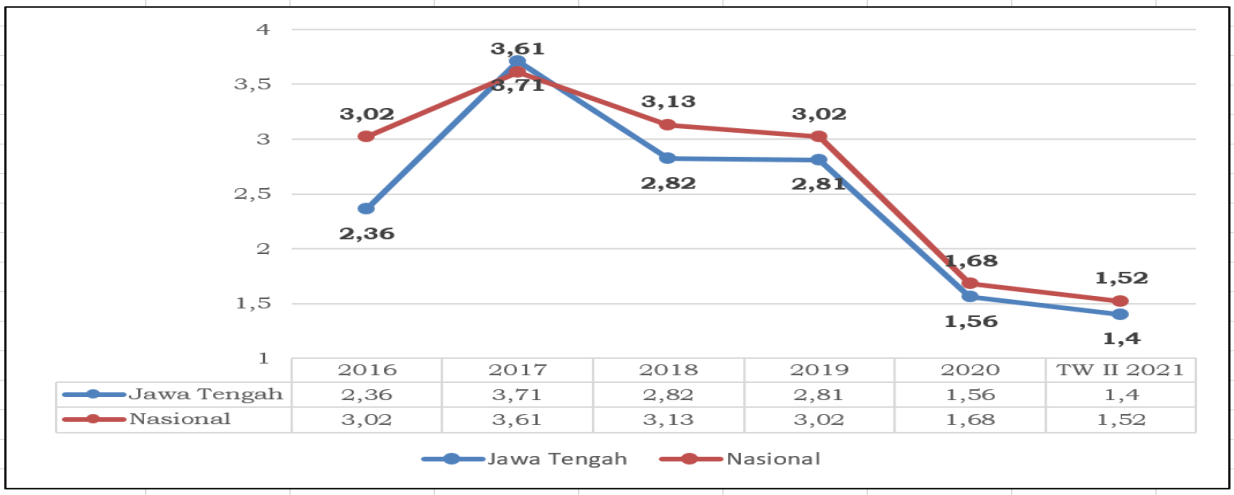

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.8.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 - 2021 (TW II) (%)

4. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi.

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2021 (TW II) perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik, dari 0,366 di tahun 2016 menjadi 0,359 di tahun 2020. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,378 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2020 sebesar 0,359. Namun meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 0,372.

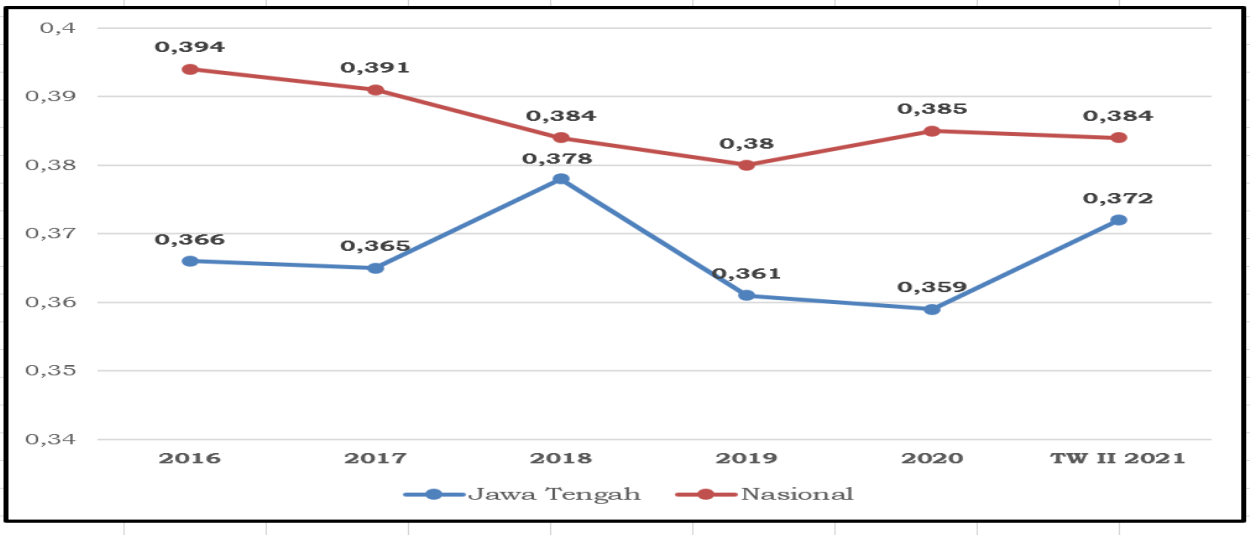

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.9.
Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II)

Jika melihat indeks gini pada wilayah yang setara dengan Jawa Tengah yang dianalisis dari data indeks gini seluruh provinsi di Indonesia tahun 2019 – 2020 periode September, maka diketahui bahwa terdapat 12 provinsi yang berada pada rentang indeks gini yang sama dengan Jawa Tengah, dan 11 provinsi juga yang berada pada rentang perubahan indeks gini tahun 2019-2020 yang sama dengan Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan capaian wilayah setara baik dari nilai indeks gini maupun perubahannya, capaian Jawa Tengah tidak lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Dengan membandingkan indeks gini dan perubahannya di wilayah yang setara, maka terdapat 5 provinsi yang berada pada rentang yang sama dengan Jawa Tengah, yaitu Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Banten.

Tabel 2.15.
Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini Tahun 2019 – 2020
di Provinsi Wilayah Setara

Provinsi	Indeks Gini	Perubahan Indeks Gini Tahun 2019-2020	Provinsi
Bengkulu	0,323	0,001	Jawa Tengah
Kalimantan Barat	0,325	0,001	Nusa Tenggara Timur
Maluku	0,326	0,004	Banten
Kepulauan Riau	0,334	0,004	Papua
Kalimantan Timur	0,335	0,006	Maluku
Sumatera Selatan	0,338	0,007	Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan	0,351	0,008	Kalimantan Utara
Nusa Tenggara Timur	0,356	0,009	DKI Jakarta
Sulawesi Barat	0,356	0,009	DI Yogyakarta
Jawa Tengah	0,359	0,012	Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur	0,364	0,017	Kalimantan Selatan
Banten	0,365	**0,007**	**Rata-Rata**
Rata-Rata	**0,344**		

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)
Keterangan: Angka Indeks Gini per September

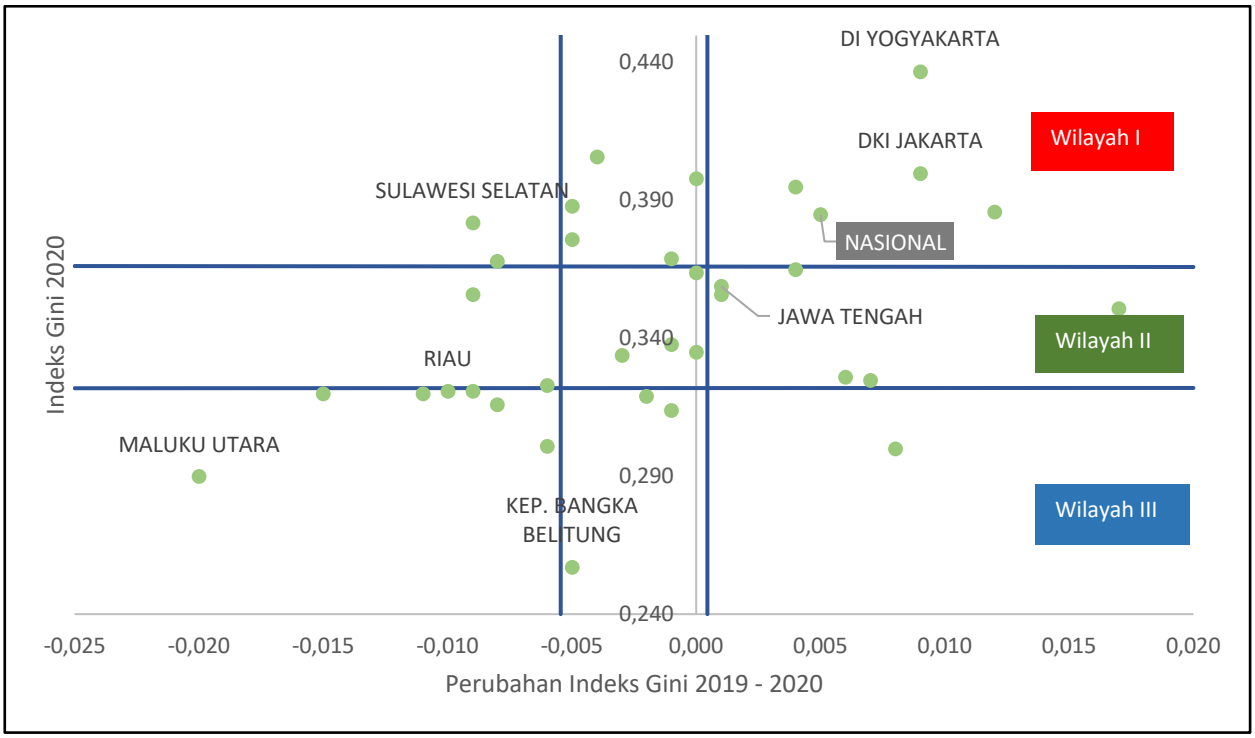

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

Gambar 2.10.
Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Wilayah Setara Indeks Gini dan Perubahan Indeks Gini Tahun 2019 - 2020

Dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,625 menjadi 0,608. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.

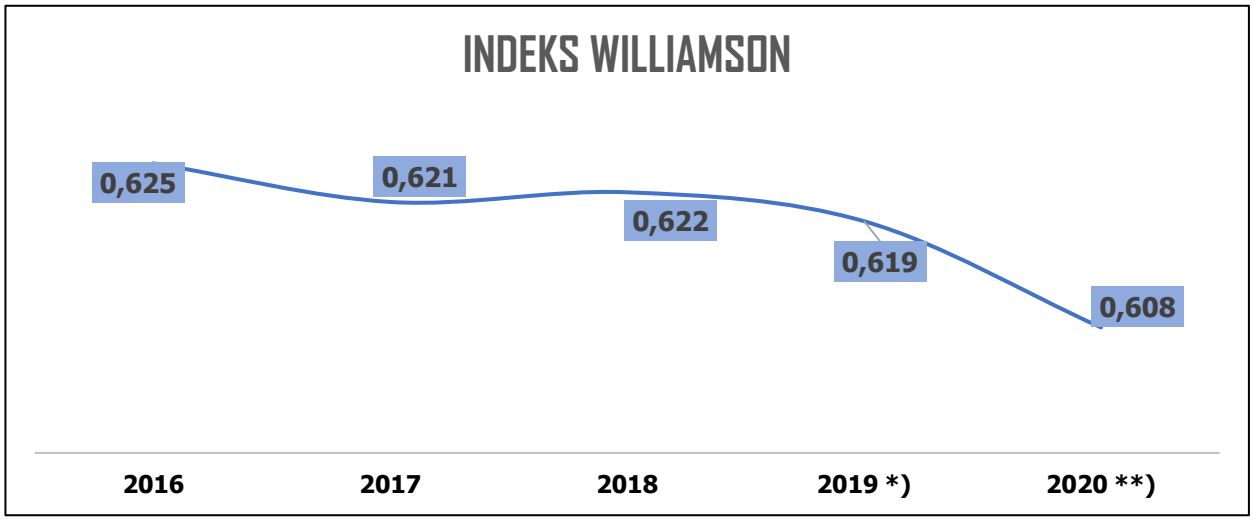

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.11.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

5. Nilai Investasi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 yang dinilai cukup baik dan stabil, salah satunya didukung dengan kinerja penanaman modal di Jawa Tengah. Realisasi investasi PMA/PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp. 50,24 trilyun merupakan rekapitulasi realisasi investasi yang bernilai diatas Rp 500 juta, dengan rincian realisasi PMA sebesar Rp 19,63 trilyun dan realisasi PMDN sebesar Rp 30,61 trilyun. Terdapat penurunan realisasi PMA, sedangkan untuk realisasi PMDN mengalami kenaikan. Hal demikian disebabkan adanya dampak pandemi Covid–19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan kondisi perekonomian global yang cenderung kurang menguntungkan di bidang investasi.

Tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menghitung angka realisasi investasi UMK yang bernilai Rp 500 juta ke bawah. Rencana realisasi investasi sektor UMK sebesar Rp. 14,4 trilyun, meskipun demikian yang tercatat terealisasi adalah sebesar Rp. 5,83 trilyun, yang didominasi dari sektor perdagangan dan reparasi, industri lainnya, hotel dan restoran dan industri makanan. Tahun 2020, jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 11.712 proyek yang terdiri dari Proyek PMDN sebanyak 8.823 proyek dan PMA 2.889 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 170.036 orang. Oleh karena itu, investasi PMDN, termasuk sektor UKM, menjadi sebuah kekuatan baru dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah yang harus didukung dengan program-program prioritas pemerintah dan semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi seperti pengembangan Kawasan Industri, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta komitmen pemerintah daerah yang pro investasi.

Tabel 2.16.
Jumlah Proyek dan Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi JawaTengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Proyek				Nilai Realisasi Investasi (Rp Trilyun)			
	PMA	PMDN	Jumlah	Pertumbu-han (%)	PMA	PMDN	Jumlah	Pertumbu-han (%)
2016	1.060	1.008	2.068	39,64	14,113	24,070	38,183	46,63
2017	955	1.403	2.358	14,02	31,673	19,866	51,539	34,98
2018	1.380	2.273	3.653	54,91	31,794	27,474	59,269	15,00
2019	1.983	3,799	5.782	58,28	40,859	18,655	59,503	0,39
2020	2.889	8.823	11.712	102,6	19,63	30,61	50,24	-15,56

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.1.4. Kondisi Kemiskinan

Pada bulan Maret 2021 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Jawa

Tengah mengalami penurunan yaitu dari 11,84 persen pada bulan September 2020 menjadi 11,79 persen pada bulan Maret 2021, dan secara absolut jumlahnya berkurang sebanyak 10,2 ribu orang yaitu dari 4,12 juta orang menjadi 4,11 juta orang. Selama periode September 2020 – Maret 2021 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik menjadi 10,58 persen yang sebelumnya sebesar 10,57 persen, atau bertambah sebanyak 17,8 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,20 persen pada September 2020 menjadi 13,07 persen pada Maret 2021 atau berkurang sebanyak 28,0 ribu orang.

Tabel 2.17.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021 (TW II) (%)

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu orang)			(%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2016	Maret	1.824,08	2.682,81	4.506,89	11,44	14,89	13,27
	September	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01
	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	Maret	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2021

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun, perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dari 2016 – Maret 2021 sejalan dengan perubahan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar berikut.

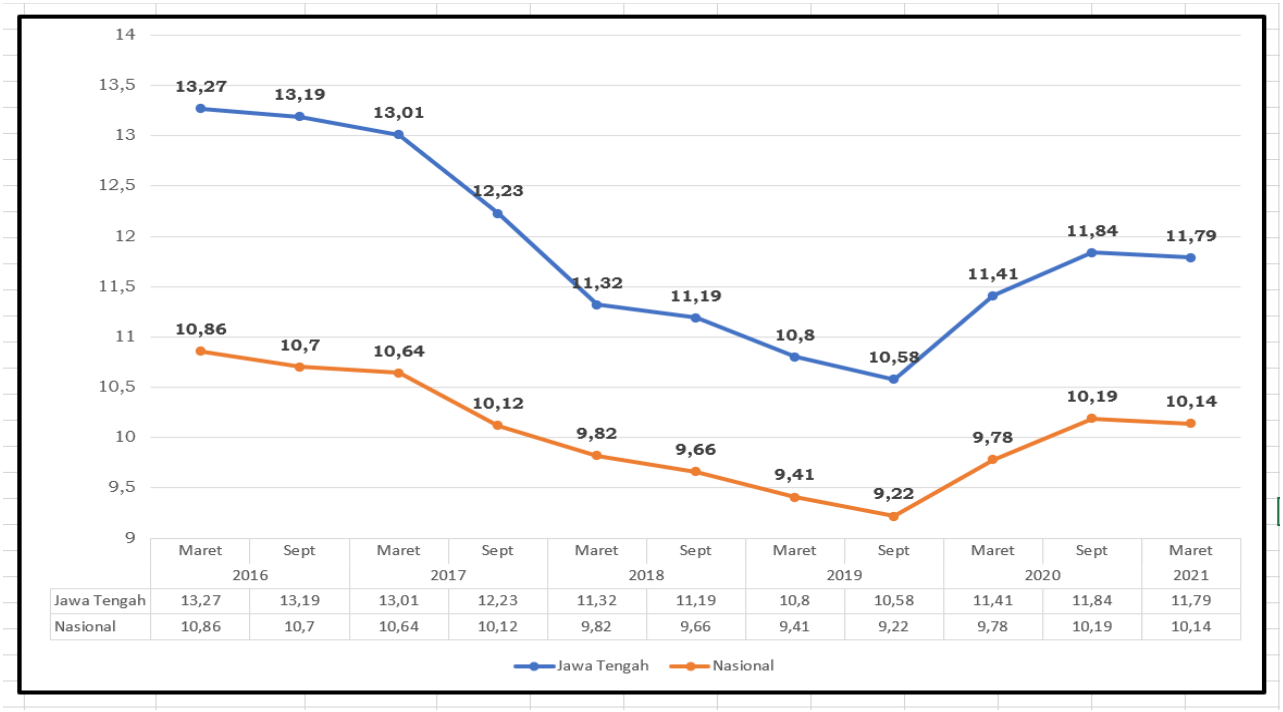

	Maret 2016	Sept 2016	Maret 2017	Sept 2017	Maret 2018	Sept 2018	Maret 2019	Sept 2019	Maret 2020	Sept 2020	Maret 2021
Jawa Tengah	13,27	13,19	13,01	12,23	11,32	11,19	10,8	10,58	11,41	11,84	11,79
Nasional	10,86	10,7	10,64	10,12	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2021

Gambar 2.12.
Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2020 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 8 kabupaten meliputi Kabupaten Temanggung, Kendal, Pati, Boyolali, Pekalongan, Karanganyar, Wonogiri, dan Magelang;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta dan Kabupaten Batang.

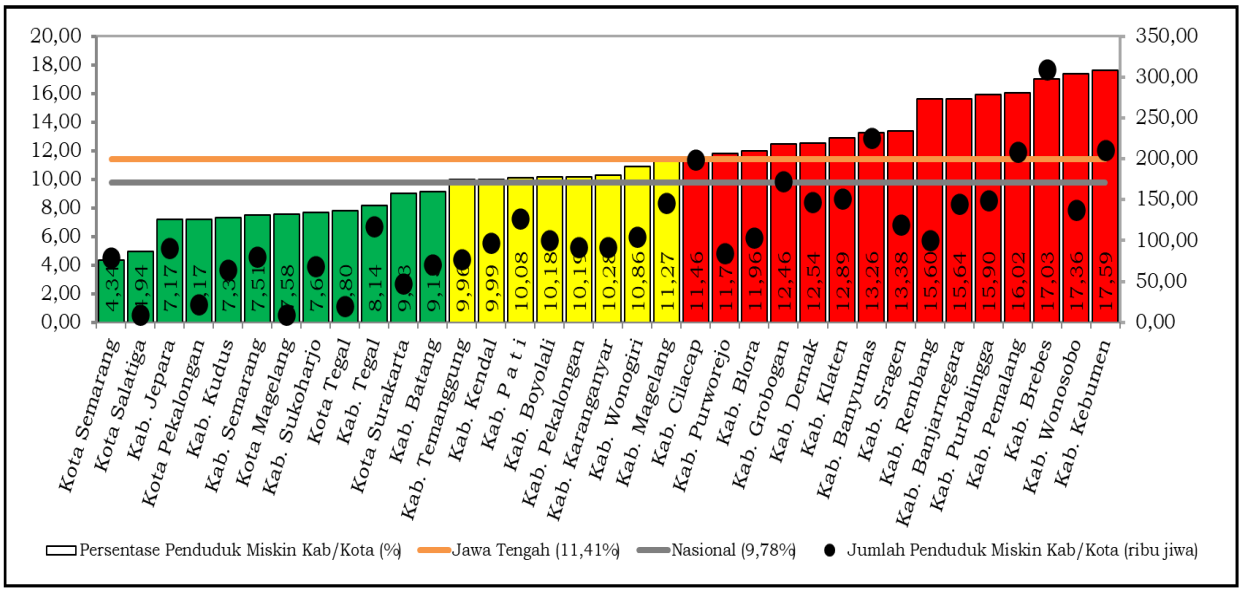

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.13.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2020

DIlihat dari rata-rata kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2016-2020), kabupaten dengan kinerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyumas yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,85 persen. Kinerja tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang dalam gambar berikut.

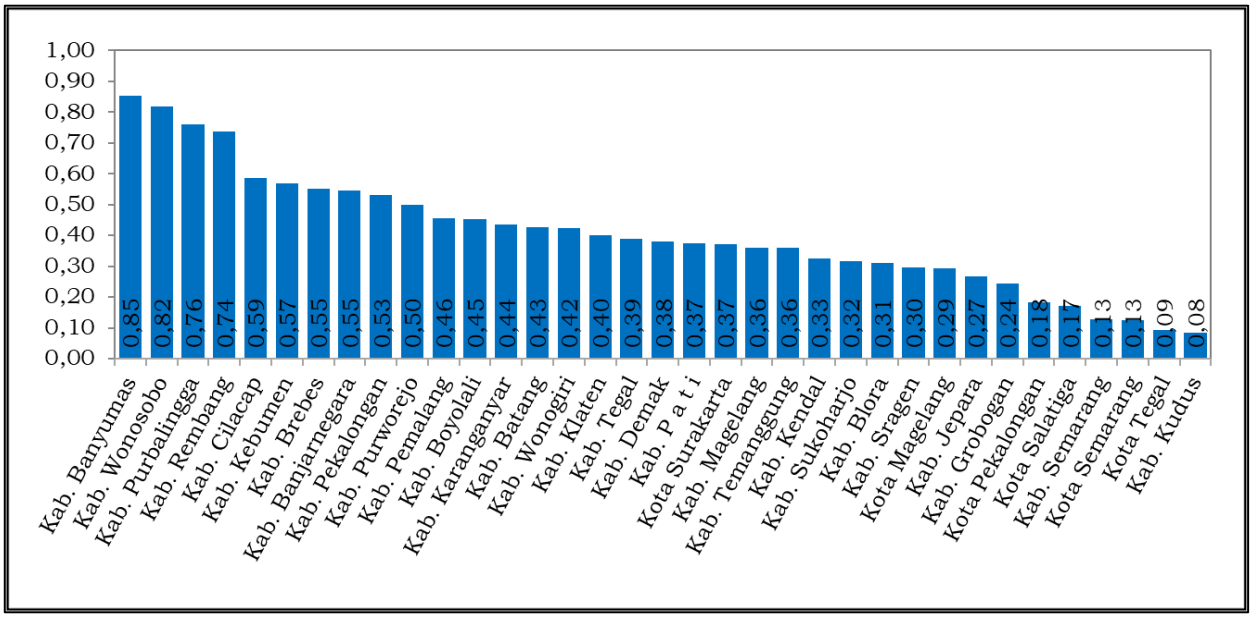

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020

Gambar 2.14.
Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode Maret 2021 sebesar Rp. 416.825,- per kapita per bulan, meningkat 2,69 % dibandingkan dengan September 2020 (Rp. 398.477,- per kapita per bulan). Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan Maret 2021 sebesar Rp. 416.825,- per kapita per bulan atau naik 3,75% dari kondisi Maret 2020 (Rp. 401.771,- per kapita per bulan), sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan Maret 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 3,17% menjadi sebesar Rp. 401.139,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2020 yaitu sebesar Rp. 388.796,- per kapita per bulan.

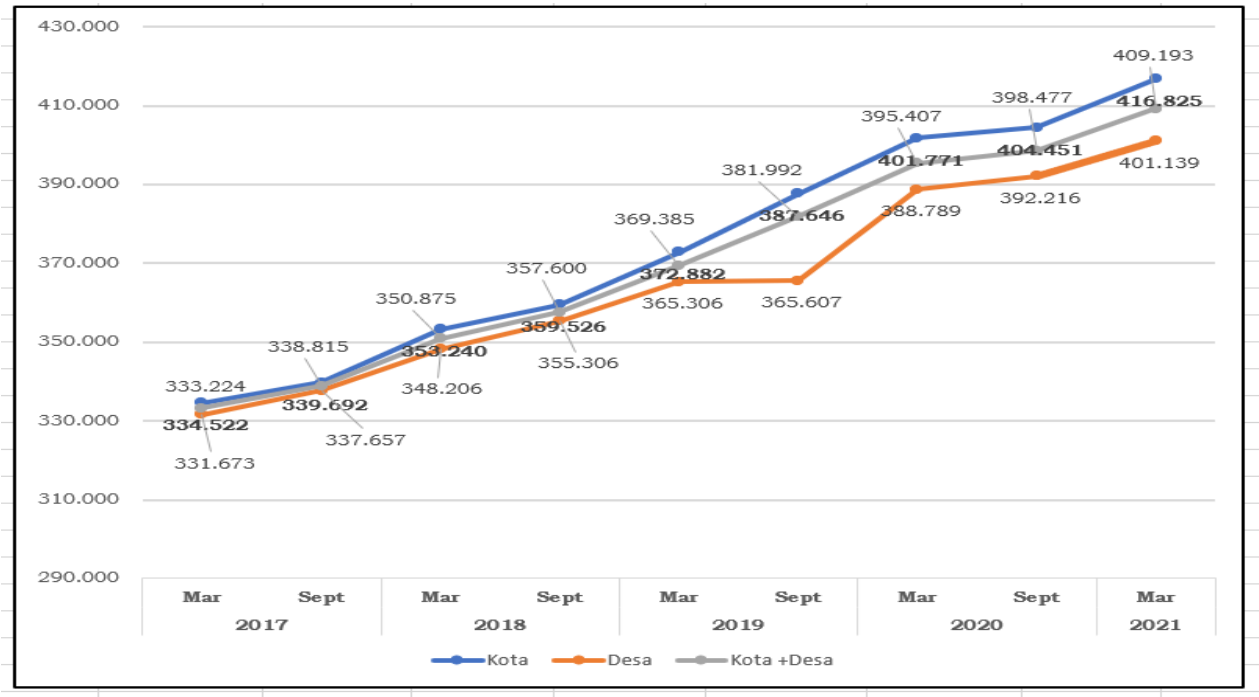

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2021

Gambar 2.15.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Sampai Tahun 2017 – 2021 (TW II)

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2021 (Maret) baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Tabel 2.18.
Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah September 2020

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	**Kontribusi (%)**	**Komoditi**	**Kontribusi (%)**
Makanan	**73,56**	**Makanan**	**75,44**
Beras	16,59	Beras	18,61
Rokok kretek filter	13,95	Rokok kretek filter	10,66
Telur ayam ras	4,04	Telur ayam ras	4,34
Daging ayam ras	3,74	Daging ayam ras	3,65
Gula pasir	3,00	Gula pasir	2,90
Tempe	2,33	Tempe	2,81
Kue basah	2,25	Cabe rawit	2,72
Mie instan	2,18	Kue basah	2,39
Cabe rawit	2,17	Mie instan	2,37
Tahu	1,96	Tahu	2,26
Lainnya	21,35	Lainnya	22,74
Bukan Makanan	**26,44**	**Bukan Makanan**	**24,56**
Perumahan	6,85	Perumahan	6,85
Bensin	4,03	Bensin	3,25
Listrik	2,61	Listrik	1,65
Pendidikan	1,80	Pendidikan	1,35
Perlengkapan mandi	1,46	Kesehatan	1,23
Lainnya	9,69	Lainnya	10,23
Total	100,00	Total	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 18 Kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Magelang, Boyolali, Sragen, Cilacap, Blora, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Tegal, Sukoharjo dan Grobogan.
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 12 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Kendal, Pekalongan, Rembang, Semarang, Banyumas, Jepara, Klaten, Kudus, Brebes, Demak, Pati dan Kota Salatiga.
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 5 Kota, yaitu Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Semarang.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp. 309.202,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp. 522.691,- per kapita per bulan.

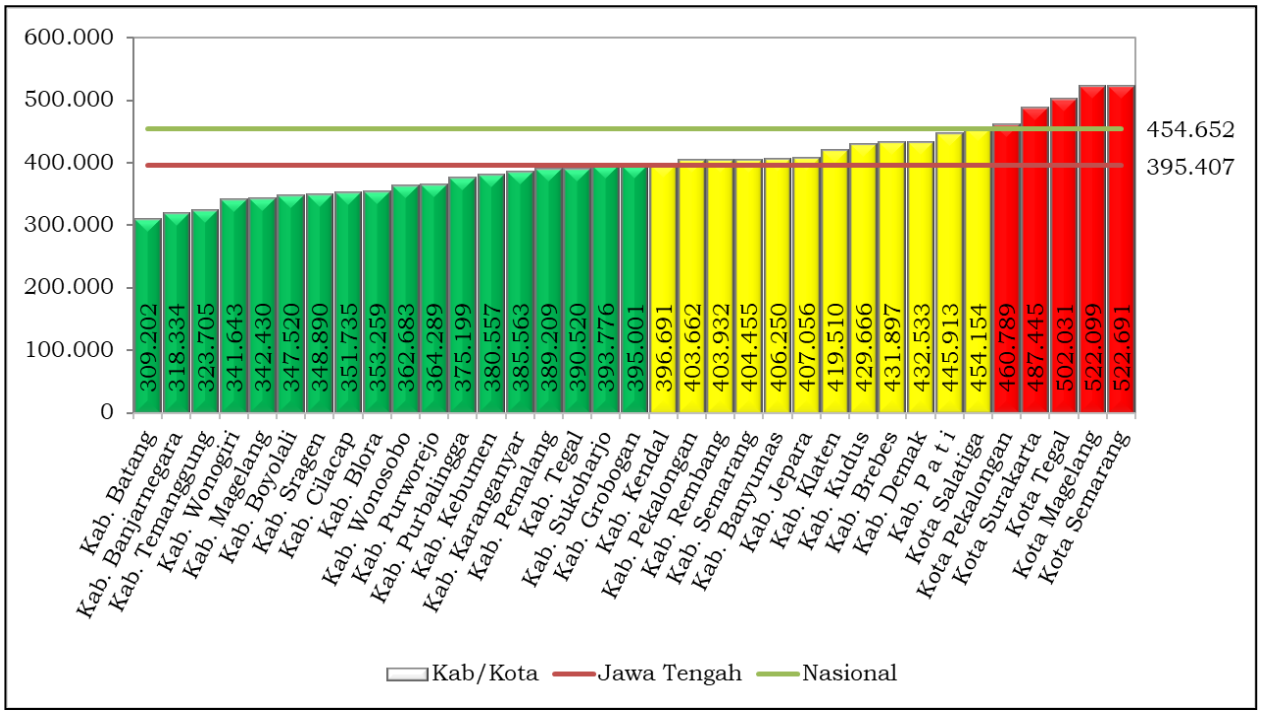

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.16.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2017 – 2021mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari 2,214 menjadi 2,115, namun meningkat lagi pada Maret 2021 menjadi 1,911 (naik 0,190 dibandingkan Maret 2020). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2021 di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,684 dari 1,526 (naik 0,158 dibandingkan Maret 2020) sedangkan di perdesaan mencapai sebesar 2,154 dari 1,924 (naik 0,230 dibandingkan Maret 2020). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

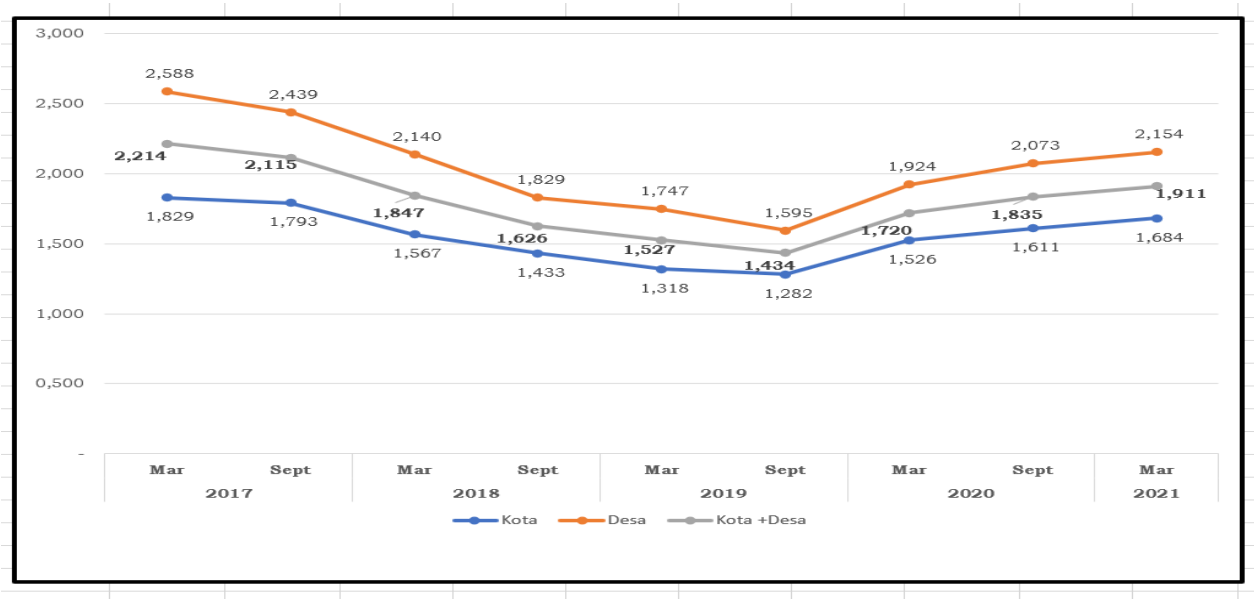

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.17.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (TW II)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2021, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,72 dan P1 Nasional sebesar 1,61 diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 3,01 dan Kota Salatiga terendah sebesar 0,53.

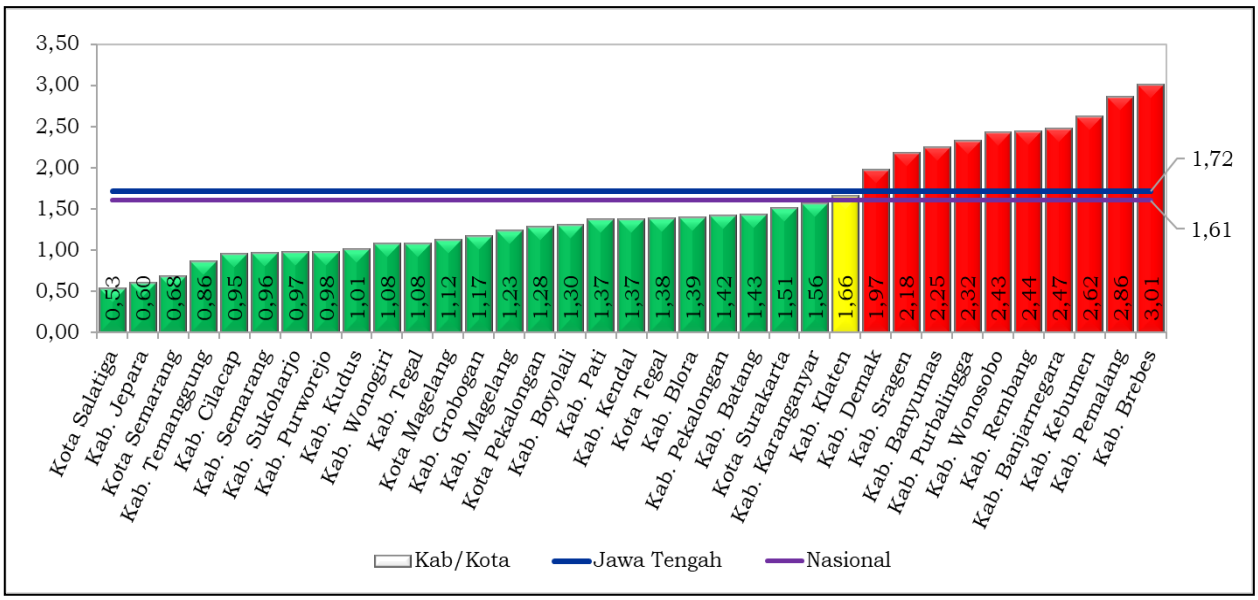

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.18.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputi Kabupaten Demak, Sragen, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Rembang, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak 1 kabupaten yaitu Kabupaten Klaten;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 24 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Jepara, Temanggung, Cilacap, Semarang, Sukoharjo, Purworejo, Kudus, Wonogiri, Tegal, Grobogan, Magelang, Boyolali, Pati, Kendal, Blora, Pekalongan, Batang, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Surakarta.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2016 – 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari 0,539 menjadi 0,279, namun meningkat lagi pada September 2020 menjadi 0,431 (naik 0,152 dibandingkan September 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2020 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk daerah perkotaan sebesar 0,385 dari 0,254 (naik 0,131 dibandingkan September 2019) sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,479 dari 0,305 (naik 0,174 dibandingkan September 2019).

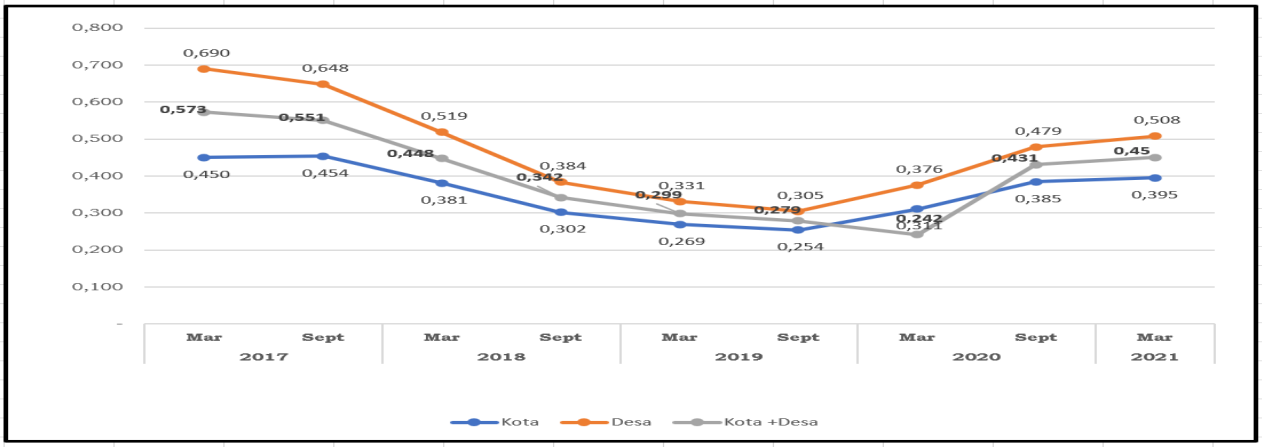

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.19.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (TW II)

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki indeks tertinggi (0,68) dan Kabupaten Jepara terendah (0,07).

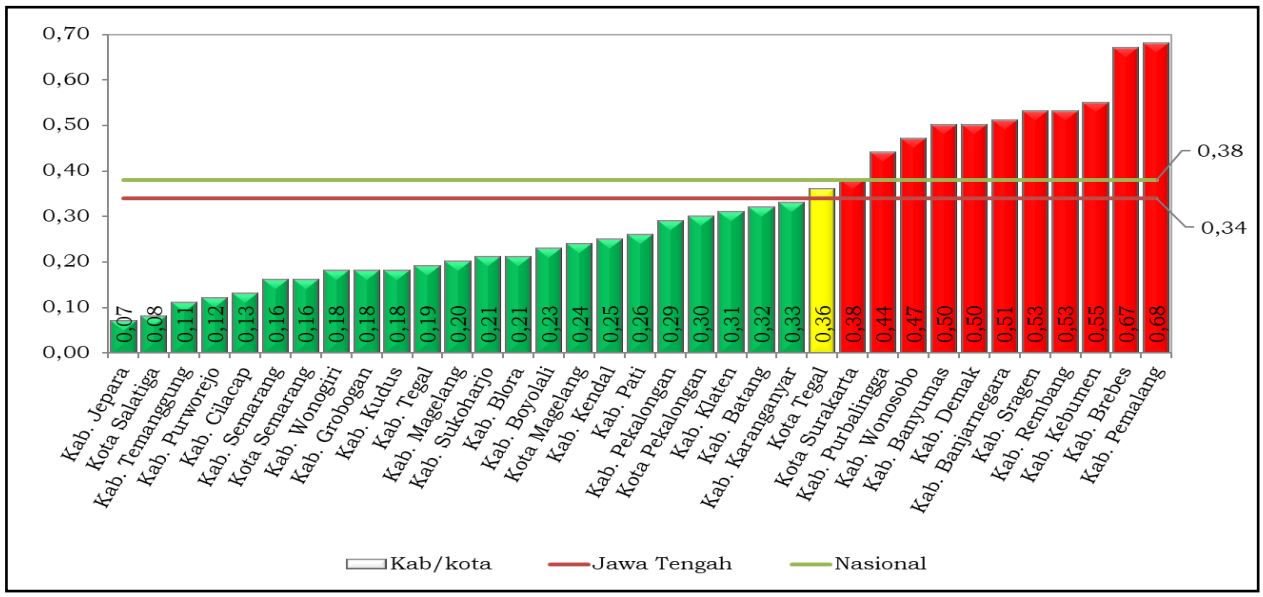

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.20.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten/kota meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Banyumas, Demak, Banjarnegara, Sragen, Rembang, Kebumen, Brebes dan Pemalang.
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 1 kota yaitu Kota Tegal;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 23 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Jepara, Temanggung, Purworejo, Cilacap, Semarang, Wonogiri, Grobogan, Kudus, Tegal, Magelang, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Kendal, Pati, Pekalongan, Klaten, Batang, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Magelang dan Kota Pekalongan

Jika dibandingkan dengan Provinsi se Jawa-Bali, perubahan kenaikan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2019 – September 2020 sebesar 1,26% atau menduduki urutan ke-6 dari 7 Provinsi se Jawa-Bali.

Tabel 2.19.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2019 – 2020

No	Provinsi	Periode				Perubahan Kenaikan	
		September 2019		September 2020			
		(Ribu Org)	(%)	(Ribu Org)	(%)	(Ribu Org)	(%)
1	Banten	641,42	4,94	857,64	6,63	216,22	1,69
2	Jawa Barat	3375,89	6,82	4188,52	8,43	812,63	1,61
3	DIY	440,89	11,44	503,14	12,8	62,25	1,36
4	DKI Jakarta	362,3	3,42	496,84	4,69	134,54	1,27
5	Jawa Timur	4056	10,2	4585,97	11,46	529,97	1,26
6	Jawa Tengah	3679,4	10,58	4119,93	11,84	440,53	1,26
7	Bali	156,91	3,61	196,92	4,45	40,01	0,84

Sumber: BPS, 2020

Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2020 pada rentang persentase 7,24-12,76 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,68 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan persentase penduduk miskin tahun 2019-2020 pada rentang 0,59-1,69 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata penambahan sebesar 1,11 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara. Dan jika membandingkan antara peresentase kemiskinan dan perubahan persentase kemiskinan, ada 4 provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara.

Tabel 2.20.
Persentase Kemiskinan Tahun 2020 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2019-2020 Di Wilayah Setara

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (Poin)	Provinsi
Kalimantan Barat	7,24	0,59	Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Utara	7,41	0,65	Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara	7,78	0,73	Kalimantan Timur
Jambi	7,97	0,84	Bali
Jawa Barat	8,43	0,92	Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan	8,99	1,26	Jawa Tengah
Sumatera Utara	9,14	1,26	Jawa Timur
Jawa Timur	11,46	1,27	DKI Jakarta
Sulawesi Barat	11,5	1,36	DI Yogyakarta
Sulawesi Tenggara	11,69	1,61	Jawa Barat

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (Poin)	Provinsi
Jawa Tengah	11,84	1,69	Banten
Lampung	12,76	**1,11**	**Rata-rata**
Rata-Rata	**9,68**		

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

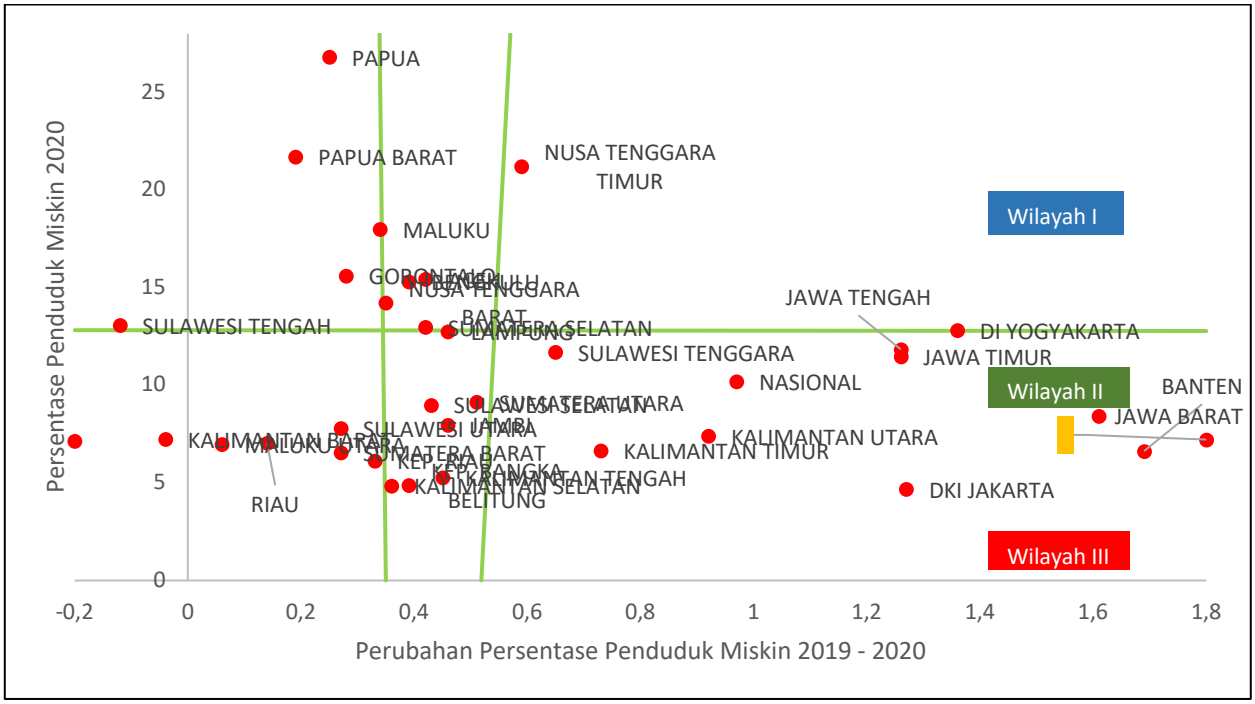

Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)

Gambar 2.21.
Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2020 dengan Wilayah Setara

2.1.5. Kondisi Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

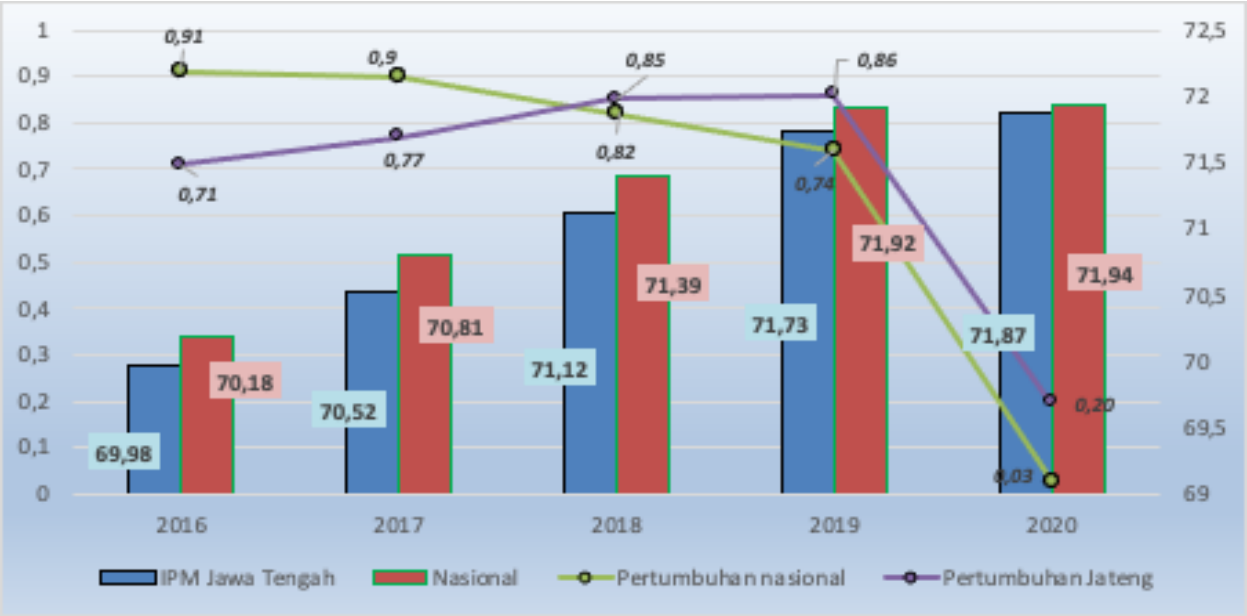

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.22.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori "tinggi". Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020.

Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,14 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,02. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM.

Tabel 2.21.
Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi se Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2020

No.	Provinsi	IPM Tahun 2020	Pertumbuhan IPM Tahun 2020
1.	DKI Jakarta	80,77	0,01
2.	DI Yogyakarta	79,97	-0,02
3.	Banten	72,45	0,01
4.	Jawa Barat	72,09	0,06
5.	Jawa Tengah	71,87	0,14
6.	Jawa Timur	71,71	0,21
	Nasional	**71,94**	**0,02**

Sumber: BPS, 2021

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Tengah maupun nasional. Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan IPM di Pulau Jawa pada kisaran 0,01 hingga 0,21. Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi kelima dari provinsi lain se-Pulau Jawa, dengan tingkat pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan DIY, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Dengan membandingkan Indeks Pembangunan Manusia pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel IPM tahun 2020 pada rentang 69,69 – 71,94, sebanyak 12 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata angka IPM sebesar 71,17. Dalam wilayah yang setara IPM Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara yaitu sebesar 71,87. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan IPM tahun 2019-2020 pada rentang 0,14-0,39 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata penambahan sebesar 0,23 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara. Dan jika membandingkan antara IPM dan perubahannya, ada 7 provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.22.
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 dan Perubahan Nilainya Tahun 2019-2020 Di Wilayah Setara

Provinsi	IPM Tahun 2020	Perubahan IPM (Poin)	Provinsi
Lampung	69,69	0,14	Jawa Tengah
Sumatera Selatan	70,01	0,14	Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara	70,63	0,17	Kep. Bangka Belitung
Kalimantan Selatan	70,91	0,19	Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah	71,05	0,19	Bengkulu
Jambi	71,29	0,19	Gorontalo
Bengkulu	71,40	0,21	Jawa Timur
Sulawesi Tenggara	71,45	0,25	Sulawesi Tenggara
Kep. Bangka Belitung	71,47	0,27	Sulawesi Selatan
Jawa Timur	71,71	0,38	Sulawesi Barat
Sumatera Utara	71,77	0,39	Papua Barat
Jawa Tengah	71,87	**0,23**	**Rata rata**
Sulawesi Selatan	71,93		
Rata-Rata	**71,17**		

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

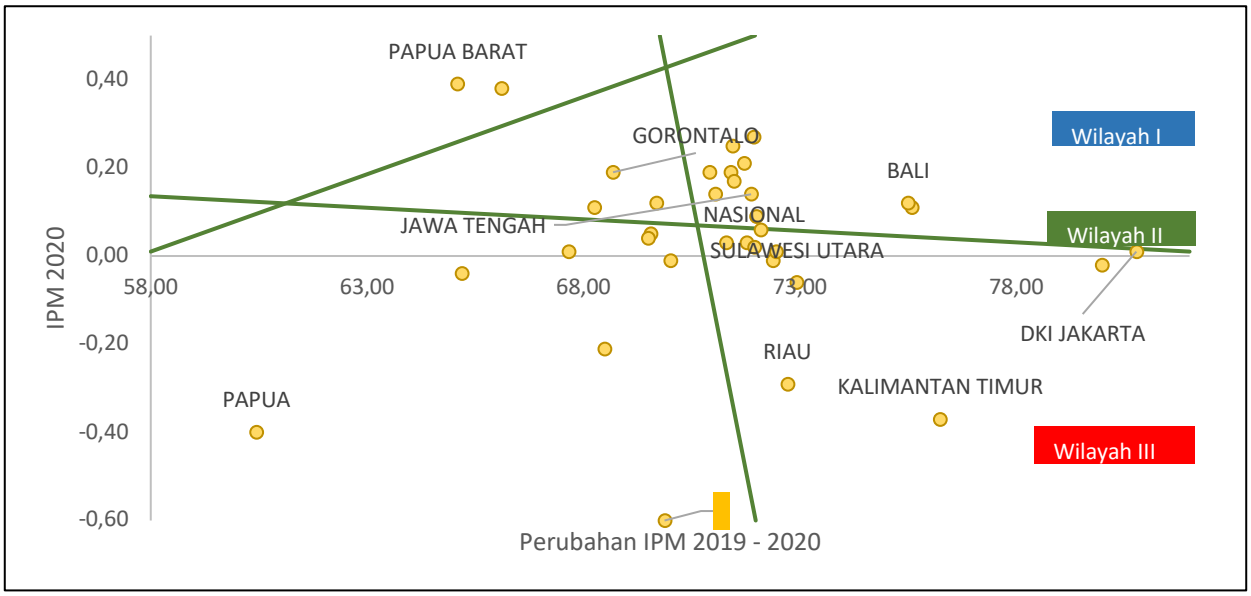

Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

Gambar 2.23.
Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 dan Perubahan IPM Tahun 2019-2020 dengan Wilayah Setara

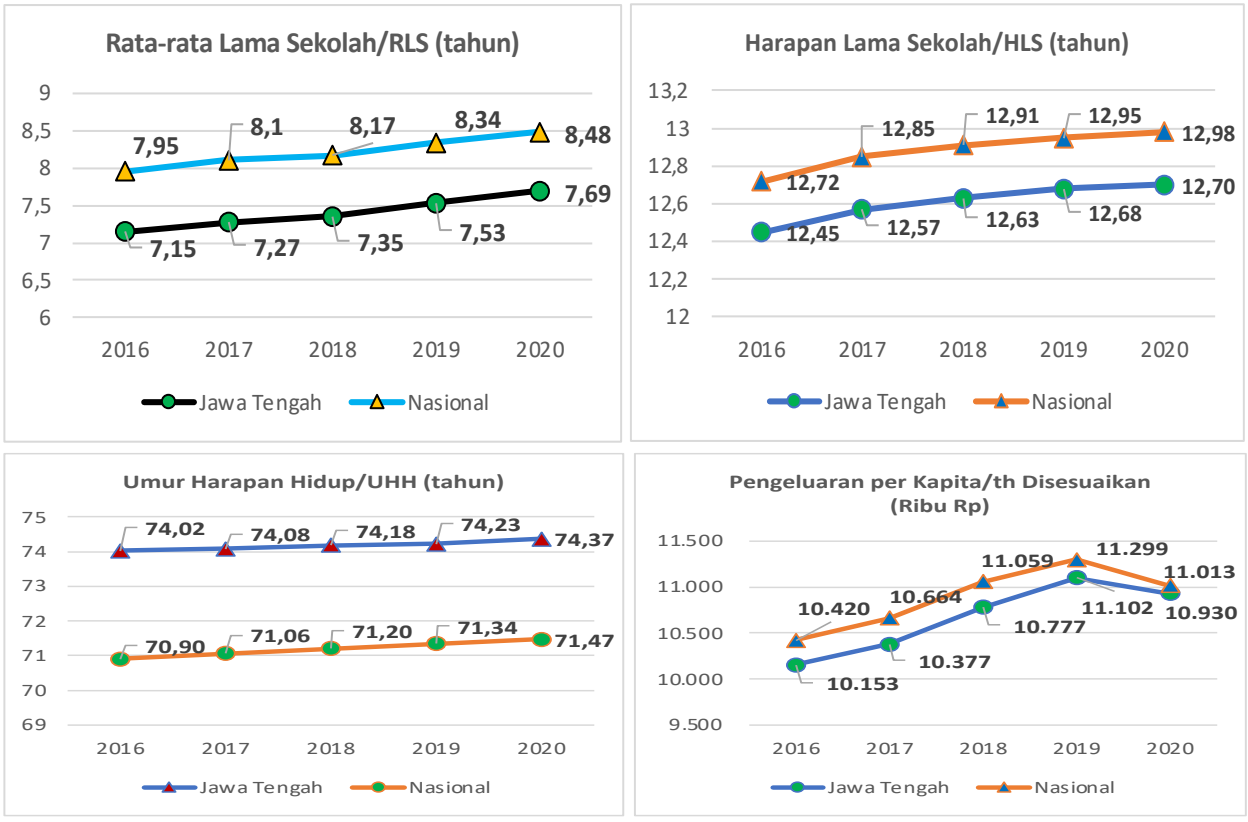

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.24.
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM. Perkembangan UHH di Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 74,02 menjadi 74,37 dan jika dibandingkan capaian nasional, maka Jawa Tengah telah melampaui nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah semakin baik.

Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh indikator komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Namun demikian, jika dibandingkan dengan nasional maka capaian HLS dan RLS Jawa Tengah masih di bawah angka nasional.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Capaian HLS Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada kisaran 12 hingga 13 tahun menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan. Rata-rata Lama Sekolah mempunyai batas maksimum 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. Capaian RLS Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada kisaran 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII atau SMP Kelas I.

Kondisi berbeda ditunjukkan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan di tahun 2020 baik di Jawa Tengah maupun nasional. Pandemi Covid-19 yang melanda nasional dan Jawa Tengah khususnya sejak awal Maret 2020 telah menekan perekonomian dan berdampak pada menurunnya sebagian besar pendapatan masyarakat yang mengakibatkan penurunan pengeluaran rumah tangga.

2. Pendidikan

Kualitas SDM yang baik dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan pendidikan. Pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata menjadi target pelaksanaan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah dan sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian pembangunan pendidikan antara lain meningkatkan

pemerataan dan akses layanan pendidikan; menurunkan angka putus sekolah; serta meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan.

a. Pemerataan dan Akses Layanan Pendidikan

Peningkatan pemerataan dan akses layanan pendidikan dapat dilihat melalui partisipasi pendidikan dari mulai usia dini, jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi. Guna memastikan pemerataan dan akses layanan pendidikan untuk setiap anak usia sekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program-program pendidikan seperti Beasiswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) SMA, SMK dan SLB Swasta, SMK *Boarding* serta Asrama (*Semi Boarding*) bagi siswa miskin.

Peningkatan partisipasi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah. Berikut adalah tolok ukur partisipasi pendidikan.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengetahui partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk mengenyam pendidikan.

Perkembangan anak usia dini dalam partisipasi pendidikan secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan melalui proporsi jumlah penduduk usia 3 tahun hingga 6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah atau Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebagaimana gambar berikut.

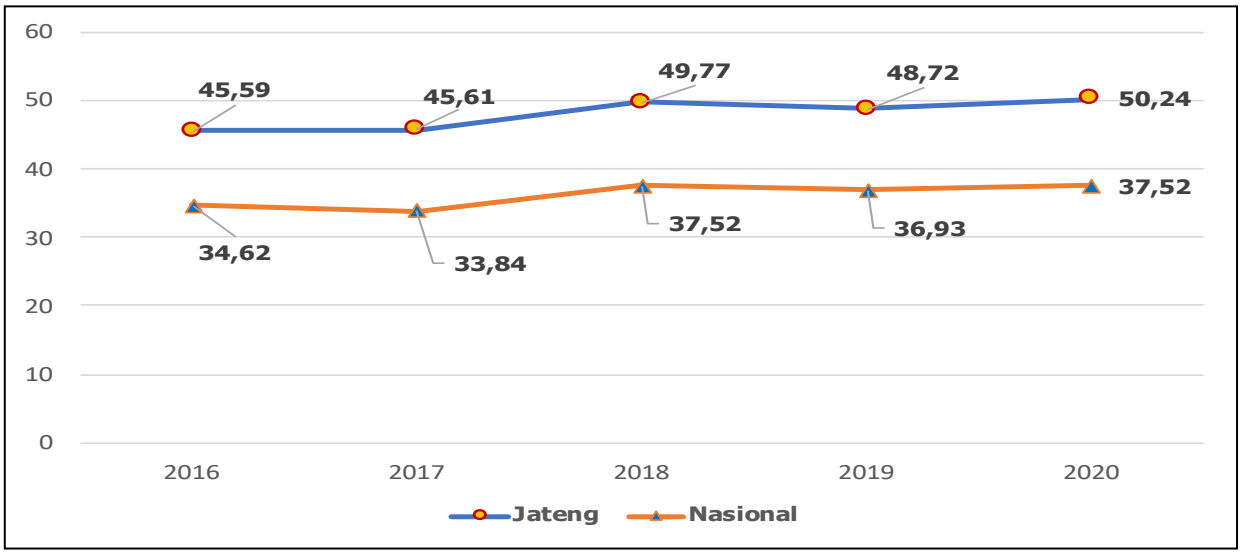

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas, 2021

Gambar 2.25.
APK PAUD Usia 3-6 Tahun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Meskipun partisipasi anak usia dini Jawa Tengah telah melampaui nasional sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, namun baru mencapai 50,24 persen dari seluruh jumlah anak usia tiga hingga enam tahun di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar yaitu antara SD/MI/Paket A menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan SMP/MTs/Paket B baik secara nasional maupun di Jawa Tengah. APK SD/MI/Paket A selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sudah ada kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sesuai rentang usia jenjang SD/MI/Paket A yaitu usia 7-12 tahun. Fenomena berbeda ditunjukkan pada jenjang SMP/MTs/Paket B, bahwa masih terdapat anak usia sekolah 13-15 tahun belum mengenyam pendidikan sesuai jenjang tersebut. Jika dibandingkan dengan nasional, capaian APK pendidikan dasar di Jawa Tengah cenderung lebih baik.

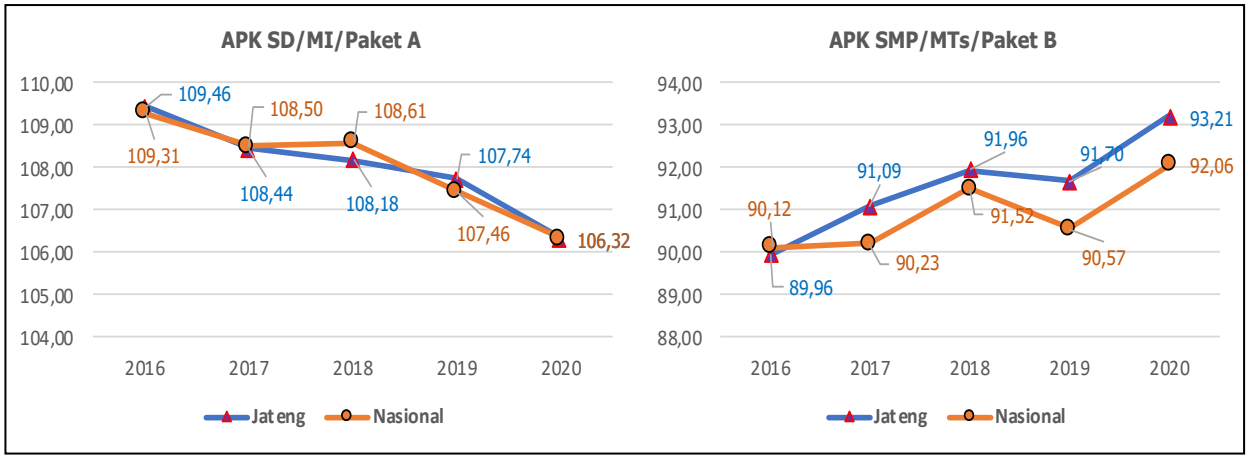

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2021

Gambar 2.26.
APK Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

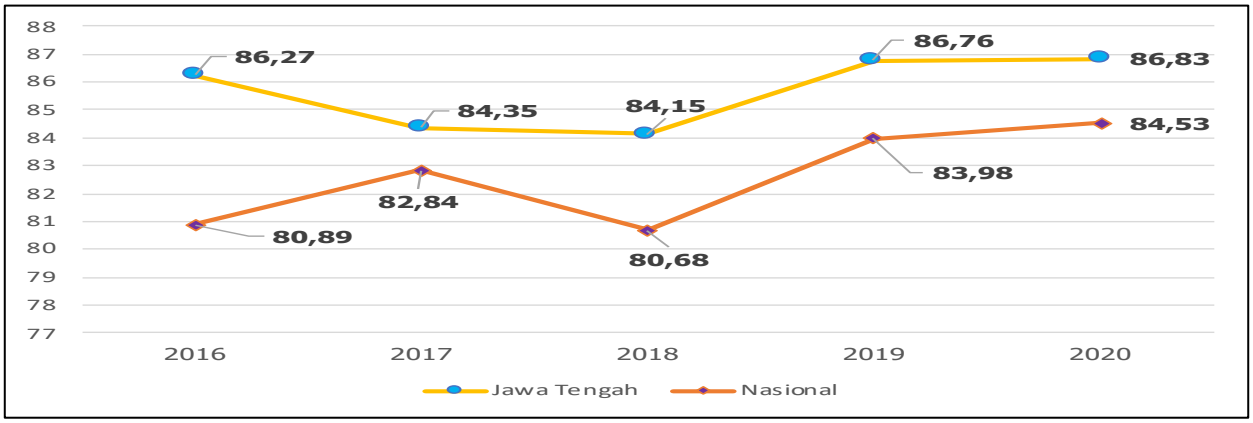

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2021

Gambar 2.27.
APK Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Selama kurun waktu lima tahun terakhir capaian APK pendidikan menengah di Jawa Tengah berada di atas nasional, dan kecenderungan mengalami peningkatan yang fluktuatif.

Angka Partisipasi Pendidikan Khusus di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari sebesar 58 pada tahun 2016 menjadi 84,37 pada tahun 2020. Kenaikan signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan sumber data yang digunakan. Tahun 2016 hingga tahun 2019 data jumlah penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus bersumber dari BPS, namun tahun 2020 data diperoleh dari Dinas Sosial.

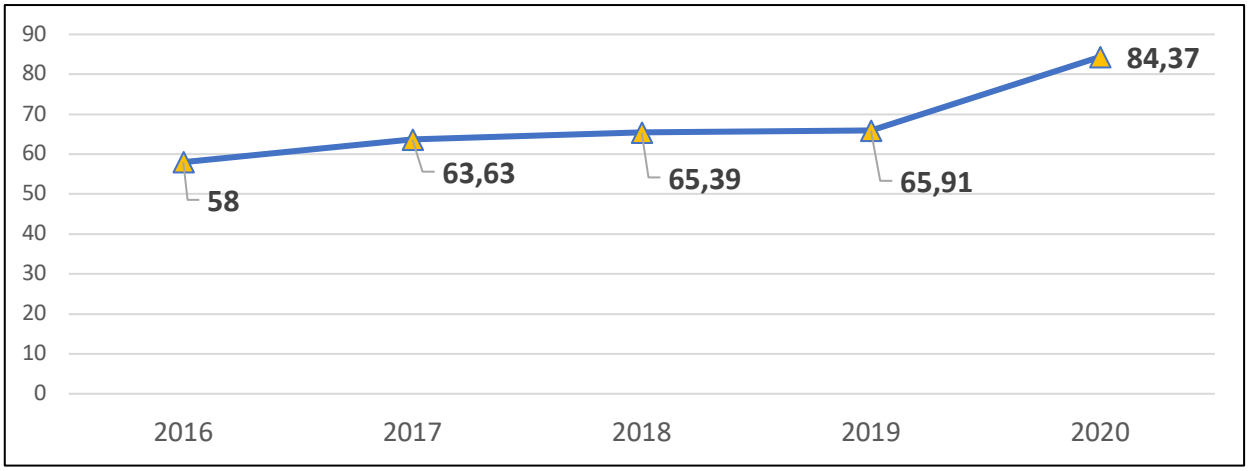

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.28.
APK Pendidikan Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Namun demikian, perkembangan positif ditunjukkan pada jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat semakin baik untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, upaya pemerintah dalam melayani penyelenggaraan pendidikan khusus juga semakin membaik, ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah SLB menjadi 189 unit pada tahun 2020.

Tabel 2.23.
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus, SLB, dan Rasio Anak Berkebutuhan Khusus Yang Bersekolah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus yang sudah sekolah di SLB	15.405	16.618	17.955	18.115	18.741
Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus	35.872	37.085	29.436	27.483	22.561
Jumlah Sekolah Luar Biasa	182	185	187	189	189
Rasio jumlah Anak Usia Sekolah berkebutuhan khusus yang sudah sekolah : Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus	0,429	0,448	0,609	0,659	0,830
Rasio jumlah Anak Berkebutuhan Khusus : Jumlah SLB	197,099	200,459	157,412	145,143	119,370

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2021

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator pembangunan pendidikan yang digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam jenjang pendidikan tertentu adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Pada umumnya nilai APM lebih rendah dibandingkan nilai APK, karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Capaian APM Pendidikan Dasar di Jawa Tengah belum mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia sesuai jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya mengenyam pendidikan sesuai jenjangnya. Namun demikian, tren capaian APM di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung meningkat dan di atas nasional.

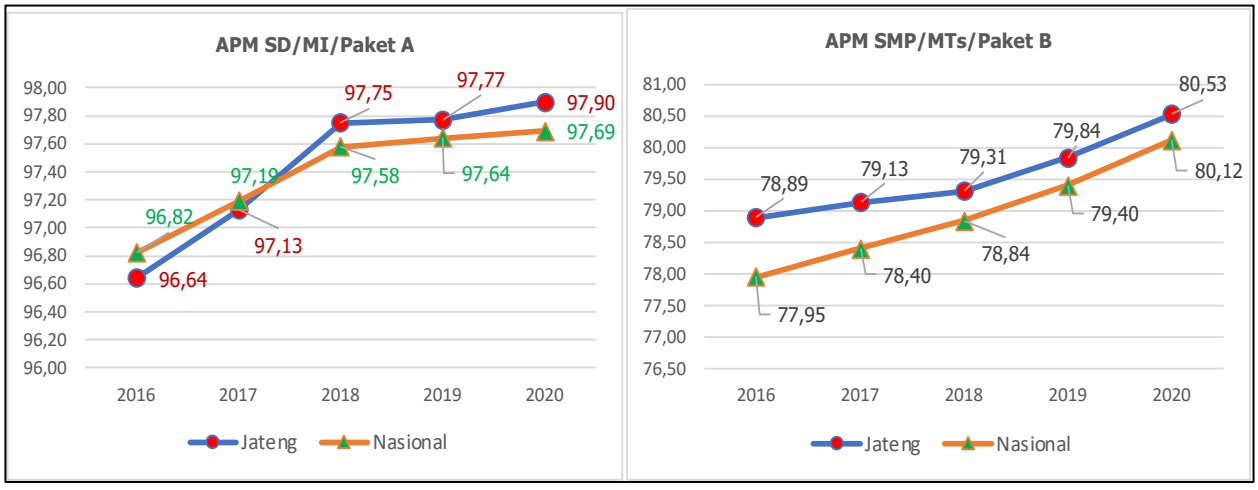

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Gambar 2.29.
APM Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan cukup besar antara capaian APM pada jenjang SD/MI/Paket A dengan jenjang SMP/MTs/Paket B. Capaian APM SD/MI/Paket A pada kisaran angka di atas 95%, namun untuk jenjang SMP/MTs/Paket B masih berada pada kisaran di bawah 80%.

APM pendidikan menengah di Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, namun masih berada di bawah nasional. Capaian APM pendidikan menengah Jawa Tengah yang rendah yaitu di bawah 60%, mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 40% penduduk yang berusia sesuai jenjang pendidikan menengah belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

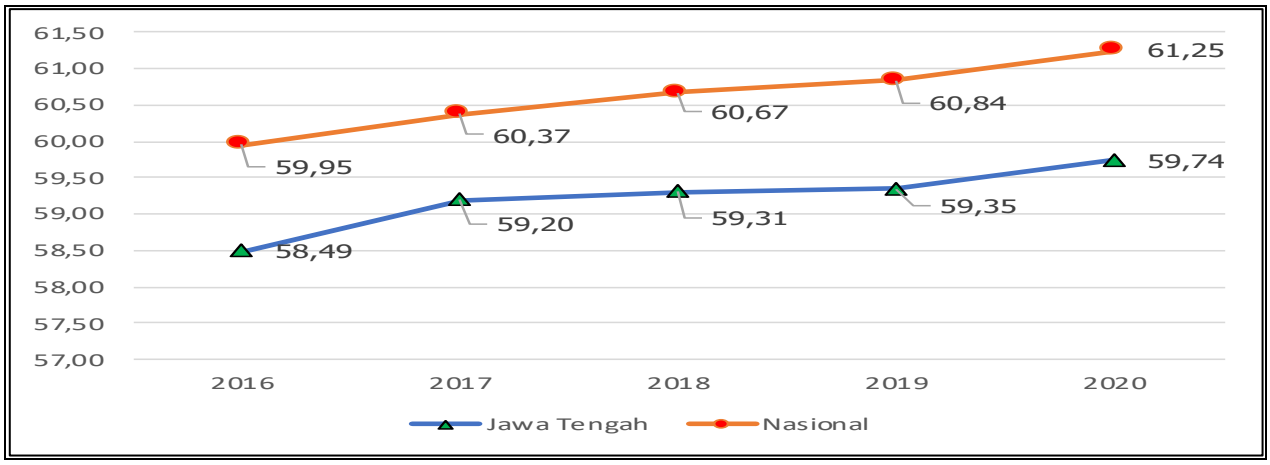

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Gambar 2.30.
APM Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah digunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Perkembangan APS pendidikan dasar di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan, bahkan berada di atas nasional dalam kurun waktu lima tahun. Pada usia 7-12 tahun daya serap sistem pendidikan lebih baik yaitu pada kisaran 99% dibandingkan untuk usia 13-15 tahun yaitu pada kisaran 96%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam daya serap sistem pendidikan antara kelompok usia 7-12 tahun dengan kelompok usia 13-15 tahun.

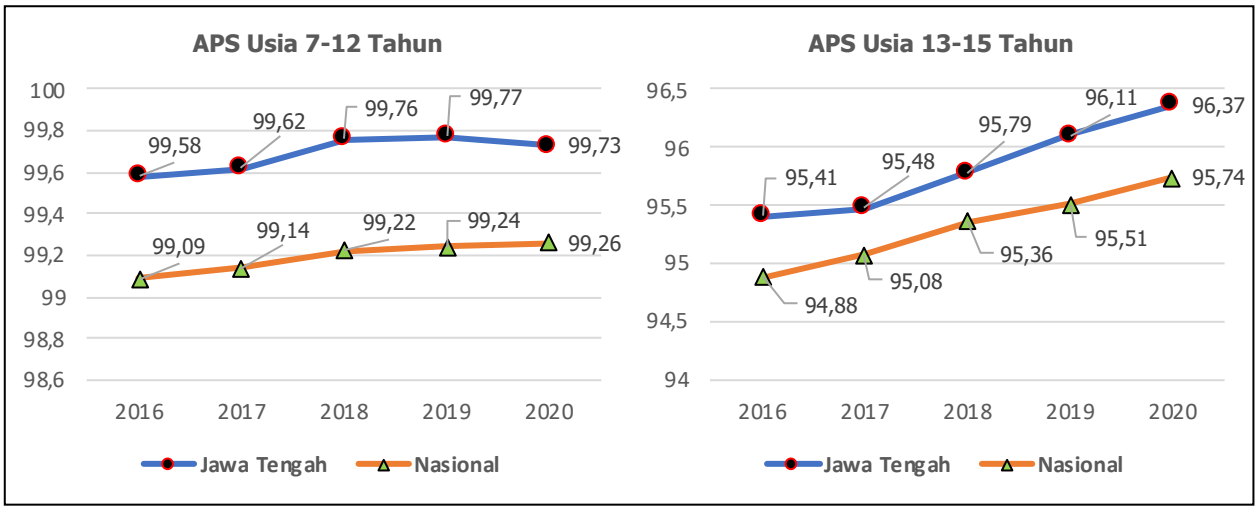

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Gambar 2.31.
APS Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 16-18 tahun atau setara jenjang pendidikan menengah di Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun demikian, jika dibandingkan nasional, Jawa Tengah masih berada di bawah capaian nasional.

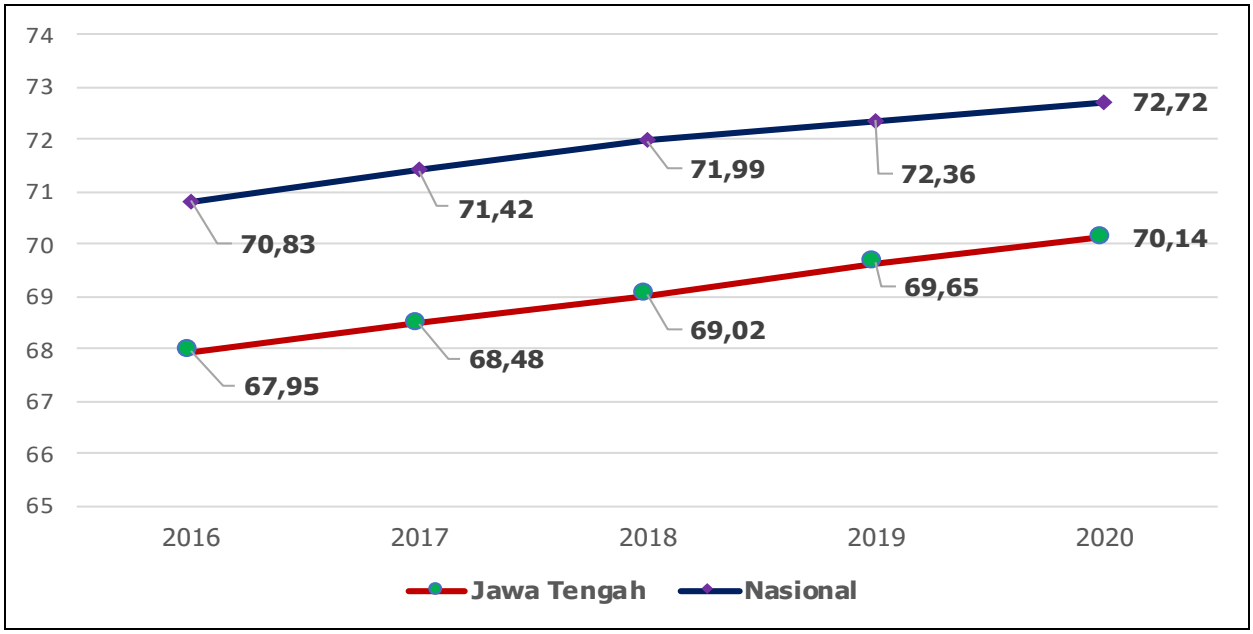

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Gambar 2.32.
APS Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa daya serap pendidikan menengah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Jawa Tengah kurun waktu lima tahun terakhir masih rendah yaitu di bawah 70%,

namun pada tahun 2020 berhasil mencapai angka 70,14%. Secara nasional, partisipasi sekolah pendidikan menengah telah mencapai angka 70% sejak tahun 2016. Capaian APS pendidikan menengah di Jawa Tengah belum mencapai 75% mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 25% anak usia sekolah 16-18 tahun tidak mengenyam pendidikan.

4) Rasio Pendidikan

Pemerataan pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui rasio pendidikan, yaitu Rasio Guru terhadap Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) terhadap Siswa. Rasio pendidikan di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang cukup baik pada rentang waktu 2016 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 terdapat kenaikan signifikan rasio Guru : Siswa dan Rombel : Siswa, yang mengindikasikan bahwa terdapat kekurangan guru dan kelas dalam memberikan akses layanan terhadap siswa SMA.

Tabel 2.24.
Rasio Guru:Siswa dan Rombel: Siswa Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Tahun 2016				
RASIO	SD	SMP	SMA	SMK
Guru : Siswa	1:17	1:18	1:15	1:17
Rombel : Siswa	1:23	1:30	1:30	1:30
Tahun 2017				
RASIO	SD	SMP	SMA	SMK
Guru : Siswa	1:15	1:16	1:16	1:17
Rombel : Siswa	1:22	1:29	1:31	1:29
Tahun 2018				
RASIO	SD	SMP	SMA	SMK
Guru : Siswa	1:19	1:18	1:18	1:19
Rombel : Siswa	1:22	1:29	1:31	1:29
Tahun 2019				
RASIO	SD	SMP	SMA	SMK
Guru : Siswa	1:18	1:17	1:17	1:18
Rombel : Siswa	1:22	1:29	1:31	1:29
Tahun 2020				
RASIO	SD	SMP	SMA	SMK
Guru : Siswa	1:18	1:21	1:42	1:19
Rombel : Siswa	1:23	1:38	1:90	1:34

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

b. Putus Sekolah

Anak usia sekolah baik yang putus maupun tidak mengenyam bangku sekolah atau disebut dengan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pendidikan di Jawa Tengah. Melalui data Susenas yang diterbitkan oleh BPS, maka indikasi ATS di Jawa Tengah yaitu dengan mengelompokkan anak usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sebagai

anak sekolah jenjang pendidikan dasar serta usia 16-18 tahun sebagai jenjang pendidikan menengah, dengan kategori tidak atau belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi.

Secara persentase, maka kategori penduduk usia 7-18 tahun tidak atau belum pernah sekolah di Jawa Tengah cenderung rendah, pada kisaran di bawah 1 persen. Perkembangan positif ditunjukkan pada kelompok usia 16-18 tahun yang mengalami penurunan dari 0,49 persen menjadi 0,28 persen. Namun kondisi berbeda ditunjukkan pada kelompok 7-12 tahun dan 13-15 tahun yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk tidak atau belum pernah sekolah dari 0,05 persen dan 0,11 persen pada 2019 menjadi 0,22 persen dan 0,24 persen pada 2020. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, indikasi ATS dapat dilihat melalui persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah lagi. Meskipun dimungkinkan terjadinya bias, mengingat terdapat anak usia 18 tahun yang sebagian kemungkinan telah menempuh jenjang pendidikan tinggi. Di Jawa Tengah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah lagi sangat sedikit yaitu pada kisaran 0 persen hingga 0,18 persen. Namun kondisi kontras ditunjukkan pada kelompok usia 16-18 tahun untuk penduduk yang tidak sekolah lagi pada kisaran 30 persen.

Secara absolut, akan terlihat bahwa masih banyak anak usia 7-18 tahun di Jawa Tengah yang tidak atau belum pernah sekolah yaitu pada kisaran 4.000 hingga 8.000 jiwa tahun 2020. Sedangkan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah lagi di Jawa Tengah pada kisaran 57.000 jiwa hingga 500.000 jiwa di tahun 2020.

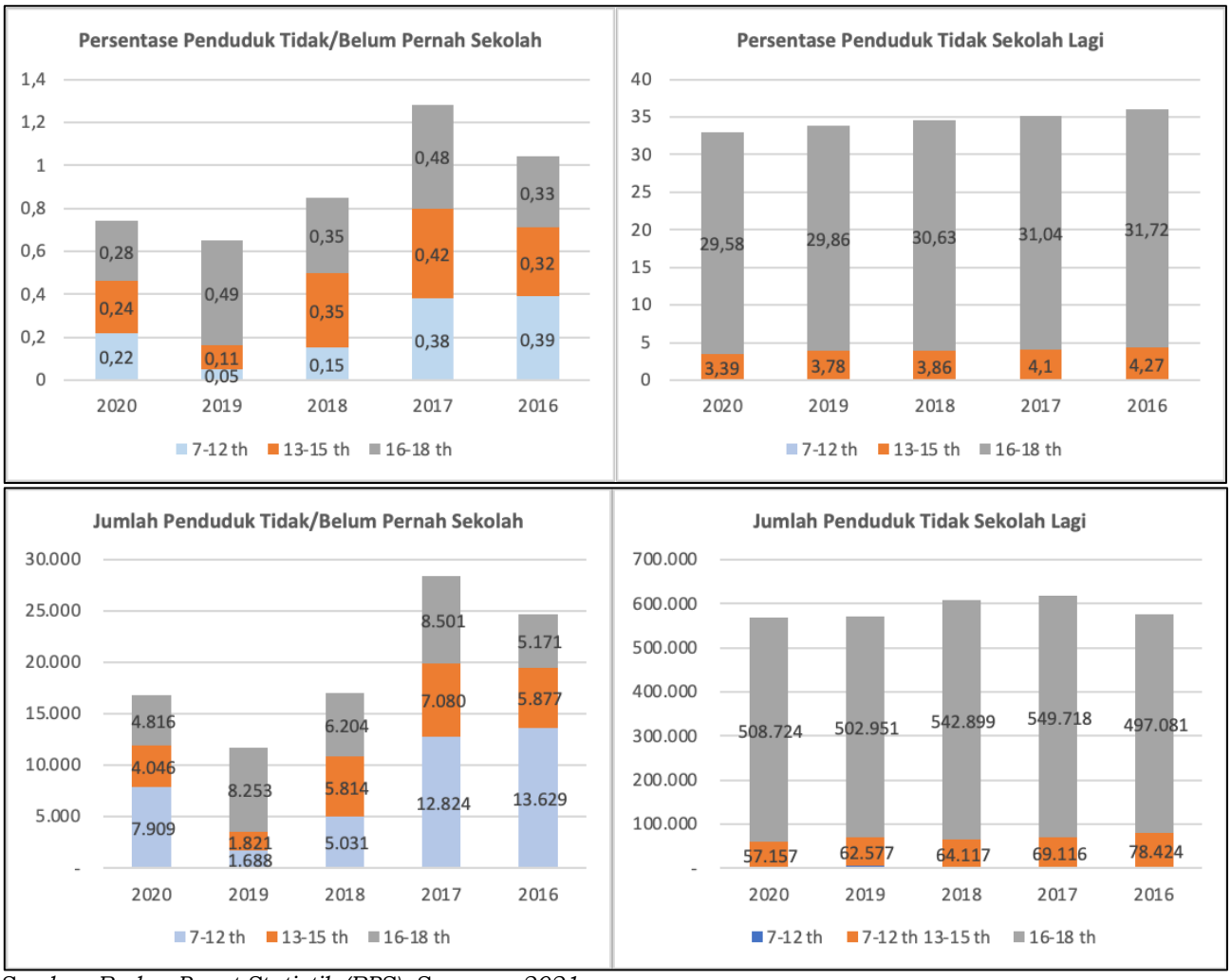

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2021

Gambar 2.33.
Persentase dan Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Sekolah Lagi di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Beberapa intervensi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selain dalam bentuk keringanan pembiayaan sekolah untuk mencegah terjadinya putus sekolah, serta disediakan kemudahan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah seperti pekerja anak dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) salah satunya melalui Sekolah *Virtual*. Tahun 2020, Sekolah *Virtual* dilaksanakan melalui percontohan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Boyolali.

c. Relevansi dan Mutu Pendidikan

Relevansi pendidikan erat kaitannya dengan relevansi lulusan, terutama dalam menjawab tantangan ke depan melalui kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Mutu pendidikan baik secara lembaga maupun individu terus ditingkatkan melalui

akreditasi lembaga, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik serta peningkatan kemampuan dan pengetahuan siswa.

Namun kondisi dan situasi pandemi yang terjadi mulai awal tahun 2020 memaksa sektor pendidikan untuk mengubah metode pembelajaran dari tatap muka (luring) menjadi daring yang dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas hasil pembelajaran, mengingat banyak kendala dijumpai dalam pelaksanaannya.

1) Serapan Tamatan SMK

Fokus utama peningkatan relevansi pendidikan adalah lulusan SMK. Lulusan SMK diharapkan mampu terserap di lapangan pekerjaan yang berorientasi DUDI. Namun data menunjukkan peningkatan lulusan yang belum bekerja dari 17.048 orang tahun 2018 menjadi 21.081 orang tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui Penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Sarpras.

Tabel 2.25.
Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa kelas III/IV	188.970	195.354	164.231	167.751	248.065
Jumlah lulusan	188.308	194.768	164.231	167.751	248.065
- Bekerja	99.558	100.500	111.096	99.278	73.778
- Wirausaha	1.393	1.266	13.159	35.517	1.012
- Melanjutkan	49.412	55.762	22.568	1.720	31.727
- Belum bekerja	37.944	37.240	17.048	21.081	141.548

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2021

2) Akreditasi Satuan dan Lembaga Pendidikan

Akreditas lembaga dan satuan pendidikan di Jawa Tengah baik itu kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota belum menunjukkan kondisi yang baik. Terutama untuk jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan non formal yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Data tahun 2020 memperlihatkan lembaga yang belum terakreditasi untuk PAUD sebanyak 64,39%, sedangkan pada pendidikan non formal berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 80,39%. Kondisi ini menjadi perhatian bersama terutama bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat pendidikan non formal merupakan salah satu ujung tombak dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

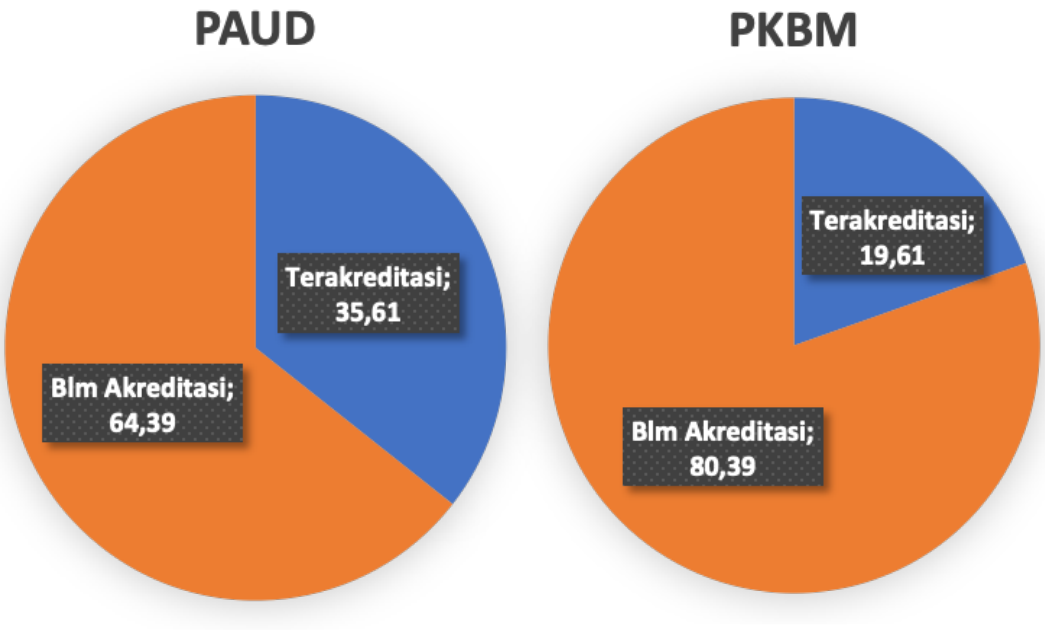

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Gambar 2.34.
Persentase Akreditasi PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Jawa Tengah Tahun 2020

Kondisi lebih baik ditunjukkan pada pendidikan formal SD, SMP, SMA dan SMK. Namun demikian masih ada hal yang perlu perhatian khusus yaitu pada jenjang pendidikan dasar SMP masih terdapat 1,97% sekolah yang belum terakreditasi. Pada jenjang pendidikan menengah yang merupakan kewenangan provinsi, SMK yang belum terakreditasi lebih besar dibandingkan SMA yaitu 1,67%.

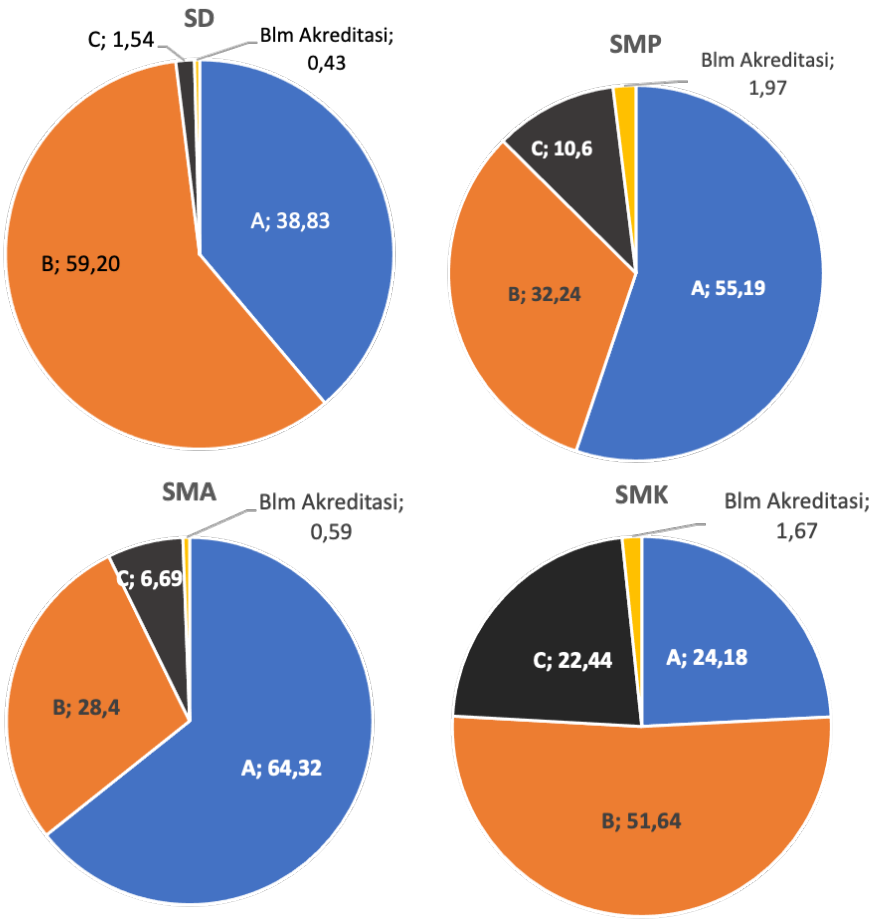

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Gambar 2.35.
Persentase Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2020

3) Kualifikasi Guru

Dua komponen yang dominan dalam penentuan kualitas hasil pembelajaran adalah guru dan siswa. Di Jawa Tengah, guru dengan kualifikasi S1/D4 baik untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah mengalami peningkatan yang cukup baik, sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.26.
Persentase Guru Berkualifikasi SI/D4 Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	91,4	87,8	93,9	94,3	94,3
2	SMP	92,7	94,1	95,8	96,2	96,2
3	SMA	97,3	97,4	98,1	98,2	99,94
4	SMK	94,7	94,5	95,5	96,2	99,91
5	SLB	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

4) Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu kemampuan, pemahamanan dan *skill*/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mutlak diperlukan. Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK di Jawa Tengah jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.

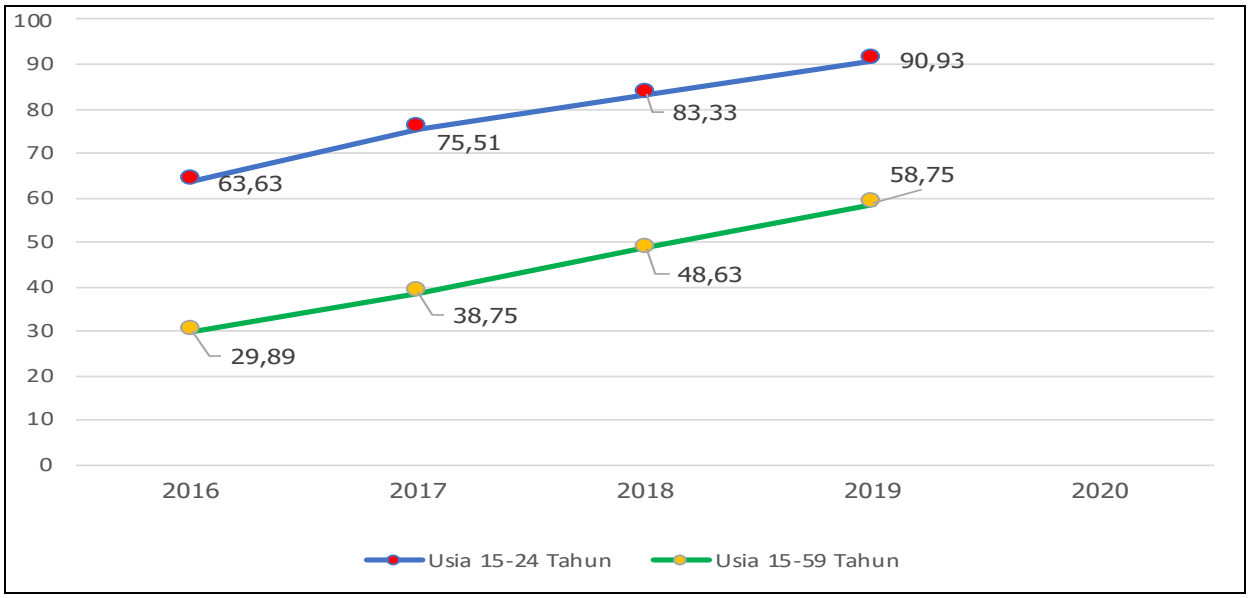

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2020

Gambar 2.36.
Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)

5) Kondisi Sarpras Pendidikan di Jawa Tengah

Kondisi sarana prasarana pendidikan tahun 2016-2020 di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang cukup baik, yaitu persentase sarpras kondisi rusak total dalam kurun waktu 3 tahun terakhir hampir tidak ada (0%). Namun demikian, kondisi menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana pendidikan di Jawa Tengah dalam kondisi rusak ringan, terutama untuk SMA yang mencapai 91,09% tahun 2020.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan antara lain dengan optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD maupun APBN (DAK Sarpras) untuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memberikan perhatian terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan sarpras Pendidikan melalui bantuan keuangan pendidikan.

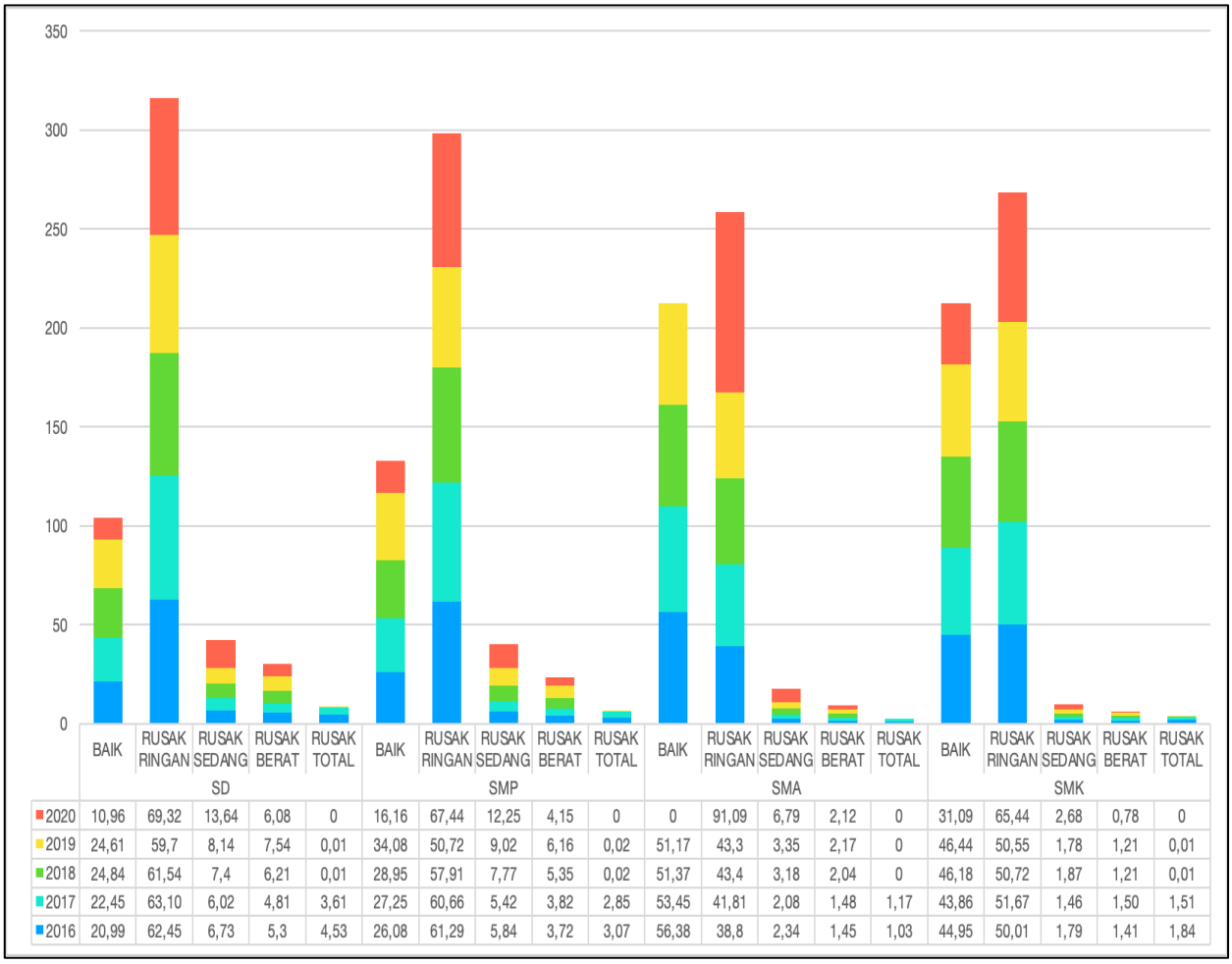

	SD					SMP					SMA					SMK				
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK TOTAL
2020	10,96	69,32	13,64	6,08	0	16,16	67,44	12,25	4,15	0	0	91,09	6,79	2,12	0	31,09	65,44	2,68	0,78	0
2019	24,61	59,7	8,14	7,54	0,01	34,08	50,72	9,02	6,16	0,02	51,17	43,3	3,35	2,17	0	46,44	50,55	1,78	1,21	0,01
2018	24,84	61,54	7,4	6,21	0,01	28,95	57,91	7,77	5,35	0,02	51,37	43,4	3,18	2,04	0	46,18	50,72	1,87	1,21	0,01
2017	22,45	63,10	6,02	4,81	3,61	27,25	60,66	5,42	3,82	2,85	53,45	41,81	2,08	1,48	1,17	43,86	51,67	1,46	1,50	1,51
2016	20,99	62,45	6,73	5,3	4,53	26,08	61,29	5,84	3,72	3,07	56,38	38,8	2,34	1,45	1,03	44,95	50,01	1,79	1,41	1,84

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Gambar 2.37.
Kondisi Sarpras Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)

3. Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Perkembangan Angka Kematian Ibu di Jawa Tengah tahun 2016 – 2020 cenderung menunjukkan perkembangan yang baik dari 109,65 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2016 terus mengalami penurunan menjadi 76,93 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2019, namun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 98,60 per 100.000 Kelahiran Hidup. Dampak Covid-19 mengakibatkan melonjaknya Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 yang disebabkan imunitas ibu hamil mengalami penurunan sehingga mudah tertular atau terinfeksi. Selain itu, gangguan pelayanan kesehatan dan nutrisi esensial bagi ibu, bayi, anak-anak dan remaja berpotensi menyebabkan kesakitan dan kematian ibu, bayi dan anak. Tantangan kesehatan bagi ibu hamil di masa pandemi Covid-19 diperlukan kesadaran dan dukungan berbagai pihak terkait agar ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan rutin, konsultasi *online* dengan dokter atau bidan dan mengikuti *swab* tes sebelum persalinan.

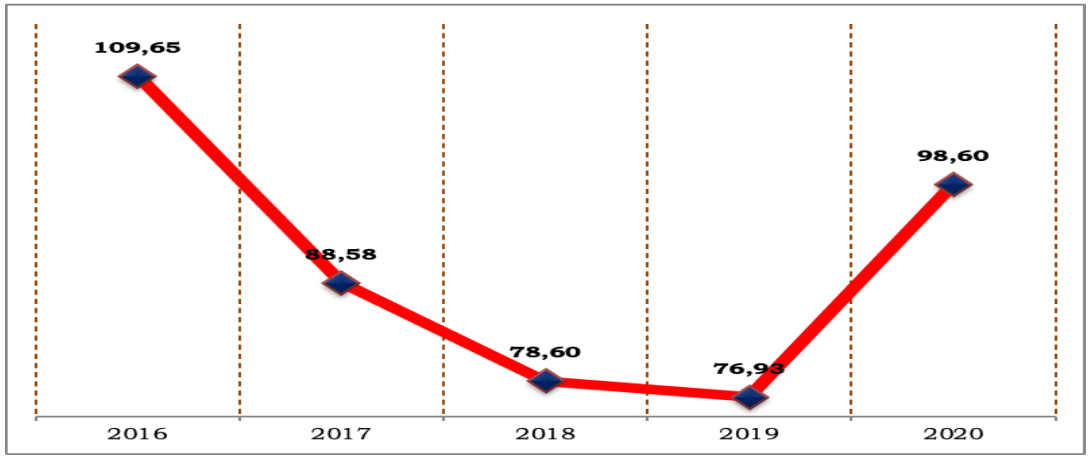

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.38.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Kondisi pandemi Covid-19 memberikan tantangan program "*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*" secara efektif dan efisien dapat mencegah kasus kematian ibu di Jawa Tengah mengingat selain kasus ibu melahirkan posisitf Covid-19, kasus kematian ibu akibat pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme masih ditemukan. Pelayanan persalinan dan rujukan ibu hamil di masa pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian sesuai dengan kondisi ibu hamil.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi di Jawa Tengah periode tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan kecenderungan penurunan yaitu sebesar 9,99 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2016 menjadi sebesar 7,79 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2020.

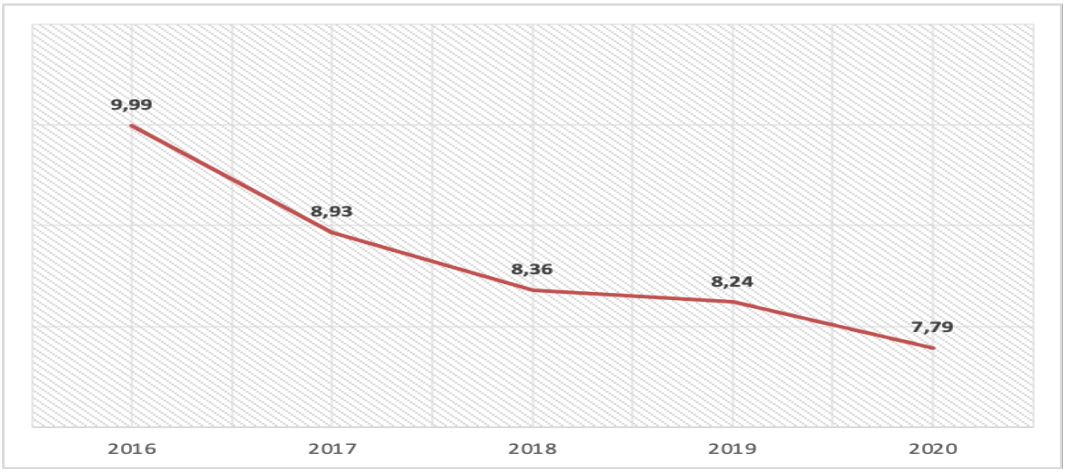

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.39.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Meskipun capaian AKB telah menunjukkan kinerja membaik, namun upaya penurunan AKB perlu terus dilakukan mengingat masih adanya berbagai kasus kematian bayi di Jawa Tengah yang diakibatkan antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi Covid-19.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Perkembangan AKABA di Jawa Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan fluktuatif namun cenderung menurun yaitu sebesar 11,8 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,99 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2020. Capaian tersebut perlu dipertahankan dan terus melakukan upaya penurunan AKABA hingga titik terendah, mengingat masih adanya berbagai kasus kematian balita di Jawa Tengah. Beberapa penyebab kematian balita antara lain dikarenakan *pneumonia*, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis.

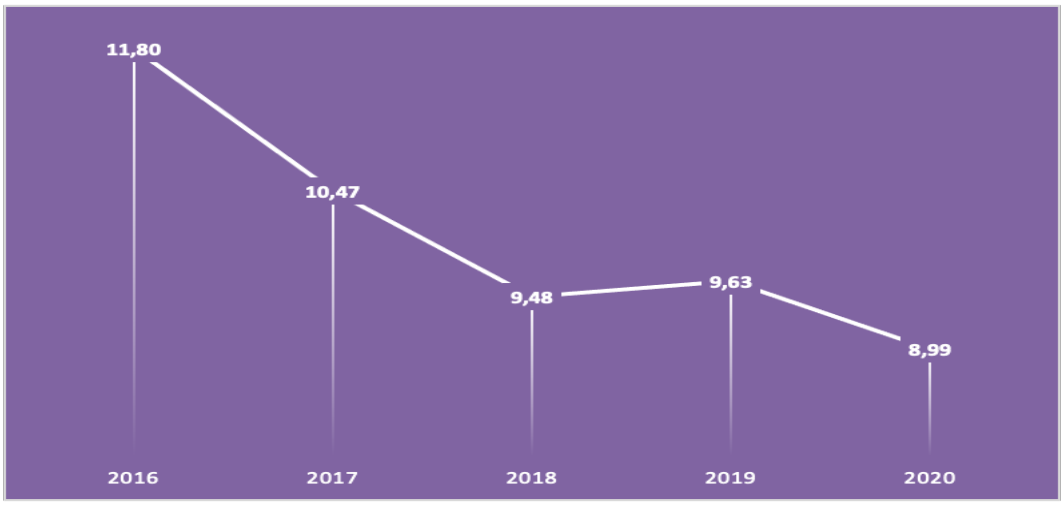

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.40.
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Selain itu upaya pencegahan kematian balita juga tidak terlepas dai pola asuh, oleh sebab itu perlu upaya edukasi dan penyadaran bagi ibu/pengasuh untuk dapat menerapkan pola asuh secara benar kepada balita yang diasuhnya. Keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial anak di tengah pendemi Covid-19 tetap harus dilakukan sebagai upaya menurunkan Angka Kematian Balita, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda untuk mengupayakan kelangsungan pelayanan kesehatan anak dengan bersinergi dengan seluruh pihak baik lintas program dan juga lintas sektor.

d. Kasus Gizi Buruk dan *Stunting*

Anak bebas gizi buruk merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dimana pentingnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta pertanian yang berkelanjutan. Balita dengan gizi buruk mempunyai dampak jangka pendek dan panjang berupa gangguan tumbuh kembang termasuk kognitif/*stunting*, kesakitan, risiko penyakit degeneratif di kemudian hari serta kematian.

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah periode 2016-2020 masih cukup tinggi dan cenderung mengalami kenaikan. Kondisi terendah kasus gizi buruk di Jawa Tengah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 922 kasus setelah mengalami penurunan dari tahun 2016 (982 kasus), sementara sejak tahun tahun 2018 mengalami kenaikan berturut turut yaitu menjadi 961 kasus di tahun 2018, 1216 kasus di tahun 2019 dan 1.421 kasus di tahun 2020.

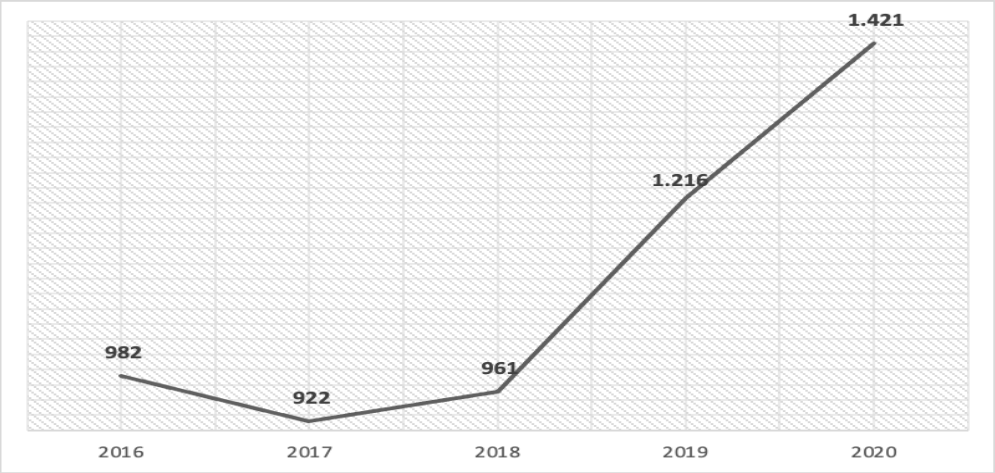

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.41.
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Kemiskinan, fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan karena Covid-19 merupakan faktor penyebab kasus gizi buruk di Jawa Tengah. Daya beli masyarakat menurun mengakibatkan kemampuan masyarakat mengakses asupan makanan syarat gizi menjadi rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat. Beberapa upaya untuk mengurangi kasus gizi buruk antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan cakupan penimbangan balita, intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu dan dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya, pembentukan pusat-pusat pemulihan gizi di fasilitas kesehatan. Selain itu juga dilakukan pemberian makanan tambahan dan pemulihan bagi balita dengan gizi kurang.

Perkembangan *stunting* di Jawa Tengah beberapa tahun kebelakang mengacu dari berbagai sumber, mengingat saat itu data *stunting* belum dilakukan integrasi data. Baru pada tahun 2019 terdapat data *stunting* yang disepakati atau digunakan secara resmi oleh pemerintah pusat yaitu data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang telah diintegrasikan dengan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Tahun 2017, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG), *stunting* di Jawa Tengah sebesar 28,5%, kemudian pada tahun 2018 hasil rilis Riskesdas, *stunting* Jawa Tengah sebesar 31,2 % dan berhasil turun di tahun 2019 menjadi sebesar 27,68%.

Tabel 2.27.
Prevalensi *Stunting* Jawa Tengah Tahun 2017-2020

Tahun	*Stunting*	Sumber
2017	28,5%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	31,2%	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2019	27,68%	Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas)
2020	NA	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pada sebaran kabupaten kota, terdapat 13 kabupaten/kota yang angka *stunting* masih di atas provinsi Jawa Tengah yaitu Kendal, Boyolali, Grobogan, Kota Tegal, Jepara, Magelang, Blora, Sragen, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Demak dan Wonosobo.

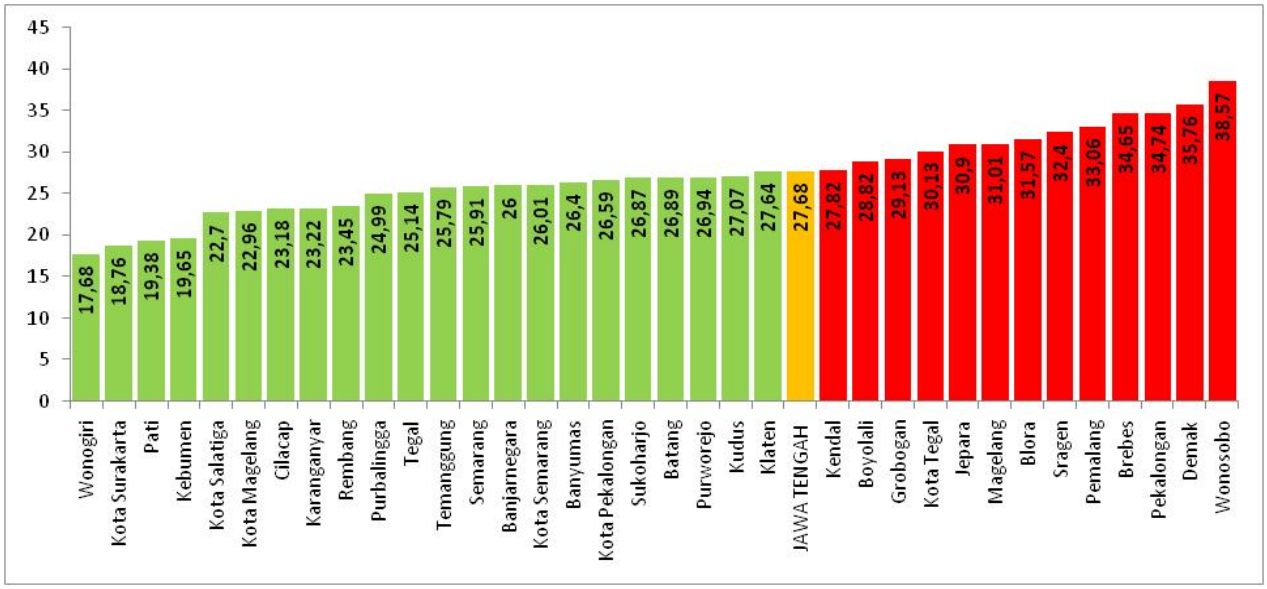

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.42.
Sebaran Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2019

Sementara itu jika mengacu pada sumber data yang lain yaitu data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka *stunting* di Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

menunjukkan perkembangan fluktuatif dan masih di atas rata-rata ambang batas ideal yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 20 persen. Tercatat prevalensi *stunting* pada balita (0-59 bulan) pada tahun 2016 sebesar 23,9 persen, mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 28,5 persen dan menurun menjadi sebesar 24,43 persen di tahun 2018. Sedangkan prevalensi *stunting* tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perkembangan yang membaik yaitu berada di bawah ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 18,18 persen di tahun 2019 dan 14,51 persen ditahun 2020. Jika melihat capaian data ePPGBM, capaian Jawa Tengah terlihat sudah *on the track* bahkan telah melampaui standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu dibawah 20 persen, bahkan tahun 2020 ini sudah mendekati target yang dicanang oleh Presiden sebesar 14 persen. Namun, beberapa kelemahan data ePPGBM perlu mendapat perhatian adalah Pertama, capaian *inputing* ePPGBM tahun 2020 Jawa Tengah masih belum 100 persen atau per Desember 2020 masih 87 persen yang artinya belum menggambarkan data secara keseluruhan. Kedua, data ePPGBM merupakan data *by name by address* yang penginputannya dilakukan langsung oleh kader pada level desa bukan kader profesional, sehingga disinyalir tidak ada standarisasi alat ukur. Ketiga, data penginputan bersifat pasif, dimana kader menerima kunjungan peserta penimbangan bukan melakukan *surveilance*, sehingga disinyalir cakupan penimbangan tidak menggambarkan 100 persen kondisi bayi yang ditimbang. Catatan yang perlu menjadi perhatian ke depan bahwa instrumen ePPGBM ini sebetulnya baik dan dijadikan sumber pengetahuan mengenai kondisi riil prevalensi *stunting* dimasyarakat, namun dalam tataran pelaksanaan masih perlu banyak perbaikan baik pada personil SDM kader maupun ketepatan jadwal penginputan.

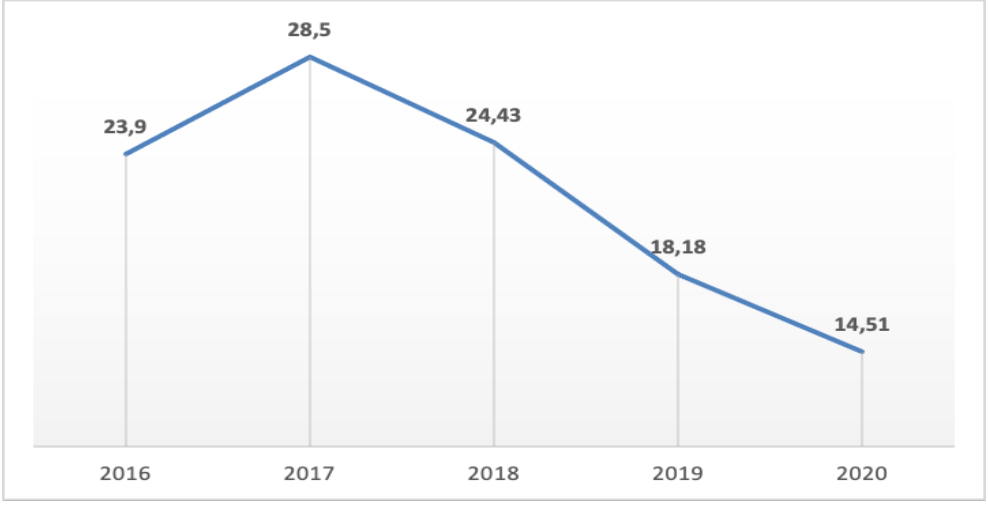

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.43.
Persentase Kasus *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Masih adanya kasus *stunting* di Jawa Tengah disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang,

sehat, dan aman, pola asuh orang tua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Pencegahan *stunting* memerlukan intervensi gizi yang terpadu yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan sasaran kelompok prioritas pada lokasi prioritas. Beberapa upaya dalam rangka perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting* melalui Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi dalam kerangka 1.000 HPK. Selain sasaran prioritas pencegahan *stunting* bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan, terdapat kategori sasaran penting yaitu anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur (WUS), dan remaja putri.

Tantangan dalam penurunan prevalensi *stunting* Jawa Tengah hingga kurang dari 20 persen diperlukan komitmen, komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah, dan desa, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi. Strategi tersebut diselenggarakan dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah, swasta, masyarakat dan komunitas.

e. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

1) Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS dan Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Angka kesakitan DBD (*Incidence Rate*/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup siginifkan di tahun 2020 dibanding tahun 2019 yaitu menjadi 16,30 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya hanya di angka 26,21 per 100.000 penduduk. Dengan penurunan kasus menyebabkan angka kematian DBD meningkat dibanding tahun 2019 yaitu dari 1,4 persen pada tahun 2019 menjadi 1,9 persen pada tahun 2020. Angka ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut angka kematian yang disebabkan oleh DBD, dimana angka kesakitan menurun, namun angka kematian meningkat. Sementara itu ancaman kenaikan kasus kematian dapat terjadi seiring dengan adanya

kenaikan pula pada angka kesakitan DBD (CFR DBD) yaitu dari 1,4 persen di tahun 2019 menjadi 1,9 persen di tahun 2020.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 210,8 persen menjadi 118 persen di tahun 2020 dan harapan penanganan TB juga kian membaik yaitu ditandai dengan naiknya angka keberhasilan pengobatan TB (SRTB) dari tahun 2019 sebesar 83,93 persen menjadi sebesar 84,5 persen di tahun 2020. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakanakannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu diwaspadai secara serius, mengingat terjadi lonjakan angka yang cukup besar, tercatat kasus HIV naik dari 2.704 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.749 kasus di tahun 2020. Sedangkan kasus AIDS menurun dari 2.316 kasus di tahun 2019 menjadi 1.549 kasus di tahun 2020. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanafaatan *Voluntary Conselling Test* (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.28.
Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2016	43,4	1,46	118	68	1.402	1.867
2017	21,6	1,24	121	67,77	2.033	1.296
2018	8,68	1,25	143	77,13	2.654	1.879
2019	26,21	1,4	210,8	83,93	2.704	2.316
2020	16,30	1,9	118	84,5	2.749	1.549

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tantangan besar yang saat ini dihadapi bersama adalah ditemukannya jenis corona virus baru yang menjadi wabah pandemi hampir diseluruh dunia. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2). Penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung yakni percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Penularan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui benda dan permukaan

benda yang terkontaminasi percikan orang yang terinfeksi seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan.

Untuk mengurangi penyebaran kasus yang semakin banyak dan mengurangi kasus kematian akibat Covid-19, berbagai upaya promotif dan preventif terus dilakukan antara lain edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga jarak minimal satu meter, memakai masker, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih. Disamping itu, penanganan kuratif dan rehabilitatif terus dilakukan dengan melakukan tes Covid-19 (*testing*), penelusuran kontak erat (*tracing*), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (*treatment*) di tempat karantina terpusat dan fasilitas kesehatan rujukan Covid-19. Beberapa upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat.

Vaksin diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kontribusi vaksin pada turunnya angka penularan penyakit tertentu sangat besar. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd imunity*), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

2) Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, *diabetes mellitus*, dan kanker. Data menunjukkan bahwa hipertensi menjadi penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita hipertensi mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2.109.523 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.547.416 kasus pada tahun 2020. Sementara itu *diabetes melitus* juga mengalami tren peningkatan dari 411.750 kasus pada tahun 2019 menjadi 481.119 kasus pada tahun 2020. Penyakit kanker juga perlu diwaspadai meskipun mengalami penurunan dari 42.679 kasus di tahun 2019 menjadi 27.559 kasus di tahun 2020.

Tabel 2.29.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2016	30.432	96.968	1.215
2017	94.890	262.327	4.099
2018	971.518	1.463.818	247.603
2019	411.750	2.109.523	42.679
2020	481.119	2.547.416	27.559

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

f. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program *Open Defacation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 kabupaten/kota terdapat 21 kabupaten/kota yang telah ODF yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya belum ODF dan akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2020 terus meningkat yaitu sebanyak 5.836 desa/kelurahan ODF di tahun 2019 menjadi 6.818 desa/kelurahan ODF di tahun 2020.

Tabel 2.30.
Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2016–2020

No	Tahun	Jumlah Kelurahan/ Desa ODF
1	2016	526
2	2017	2.728
3	2018	3.668
4	2019	5.863
5	2020	6.818

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

g. Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka antisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode 2016 sampai 2019, sedangkan data tahun 2020 masih belum rilis. Tahun 2016 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 53,2 persen, sempat mengalami penurunan menjadi 50,44 persen di tahun 2017, dan kembali naik ke angka 58,16 persen di tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 71,29 persen. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

Tabel 2.31.
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020 (%)

No	Tahun	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia
1	2016	53,02
2	2017	50,44
3	2018	58,16
4	2019	71,29
5	2020	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

4. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan strategi dan aktifitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas hidup manusia khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial yang diarahkan kepada jaminan sosial bagi PPKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PPKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan sosial diarahkan pada penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.

Penyesuaian era industri 4.0 menuju industri 5.0 mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan untuk lebih bersaing, terbuka dan bertoleransi terhadap perubahan. Kondisi tersebut dimungkinkan terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia, sehingga dampak permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin berkembang tidak hanya permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru.

Pada masa pandemi Covid-19, upaya pencegahan dilakukan pada seluruh Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta pelibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam mendukung penanganan Covid-19 bagi kelompok rentan yang terdampak Covid-19 berupa Jaringan Pengaman Sosial (JPS), sinkronisasi penerima bantuan sosial melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pendampingan program Bantuan Pemerintah Pusat. Perkembangan jumlah PPKS lima tahun terakhir terlihat bahwa jumlah PPKS cenderung menurun dari tahun 2016 sebanyak 4.948.182 jiwa terus mengalami penurunan menjadi sebanyak 3.042.030 jiwa pada tahun 2020. Sementara itu kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PPKS masih relatif rendah, tercatat tahun 2016 jumlah penanganan sebanyak 35.232 jiwa dan menurun penanganannya menjadi sebanyak 19.214 jiwa pada tahun 2020. Jumlah penanganan ini merupakan akumulasi penerima manfaat dari berbagai program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain KJS, penanganan PPKS dalam panti, dan bantuan sosial lainnya. Penurunan yang signifikan dikarenakan pemberian bantuan usaha kepada kelompok usaha bersama (KUBE) pada tahapan pendataan kelompok usaha bersama (KUBE).

Tabel 2.32.
Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Populasi PPKS	Jumlah Penanganan	Persentase
1	2016	4.948.182 orang	35.232 orang	0,71
2	2017	4.941.435 orang	39.446 orang	0,80
3	2018	4.045.143 orang	60.381 orang	1,49
4	2019	3.042.030 orang	19.214 orang	0,47
5	2020	3.042.030 orang	19.214 orang	0,47

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2021

Sementara itu peningkatan peran penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam pembangunan daerah sangat penting untuk mendapat perhatian bersama. Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan lansia diperlukan keterlibatan semua pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, keluarga, masyarakat, dunia usaha serta organisasi masyarakat lainnya untuk berperan secara aktif utamanya merubah

paradigma penanganan dengan pendekatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan lansia.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun masih di atas rata-rata nasional, yaitu dari sebesar 92,22 pada 2016, turun menjadi sebesar 91,94 di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 91,95, namun kembali turun di tahun 2019 menjadi sebesar 91,89. Pada tahun 2020 IPG Jawa Tengah mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 92,18 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.33.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Tahun	IPG Prov Jateng	IPG Nasional
1	2016	92,22	90,82
2	2017	91,94	90,96
3	2018	91,95	90,99
4	2019	91,89	91,07
5	2020	92,18	91,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Jawa Tengah ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2020, diketahui bahwa hanya komponen Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki.

Pada tahun 2020 AHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,30 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,51 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa suatu saat nanti fenomena *female advantages* bisa jadi tidak lagi muncul di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020, HLS perempuan adalah 12,70 tahun dan laki-laki sebesar 12,79 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2020 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,16 tahun, sedangkan perempuan 7,24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 9,724 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 15,031 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi membawa dampak yang cukup serius pada tatanan kesehatan, perekonomian dan sosial di Jawa Tengah. Perubahan tatanan ini menimbulkan ancaman pada kesetaraan gender. Peranan perempuan dalam *care economy* membutuhkan perhatian lebih untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 bagi perempuan. Selain itu, pemenuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan perlu menjadi perhatian selama masa pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi menyebabkan perempuan pada kondisi yang lebih rentan akibat pemutusan hubungan kerja dan terhentinya aktivitas perekonomian pada sektor yang didominasi oleh perempuan dan mengalami beban ganda dalam rumah tangga. Sementara itu, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya angka KDRT terhadap perempuan dan memperlambat respons penanggulangan kasus KDRT.

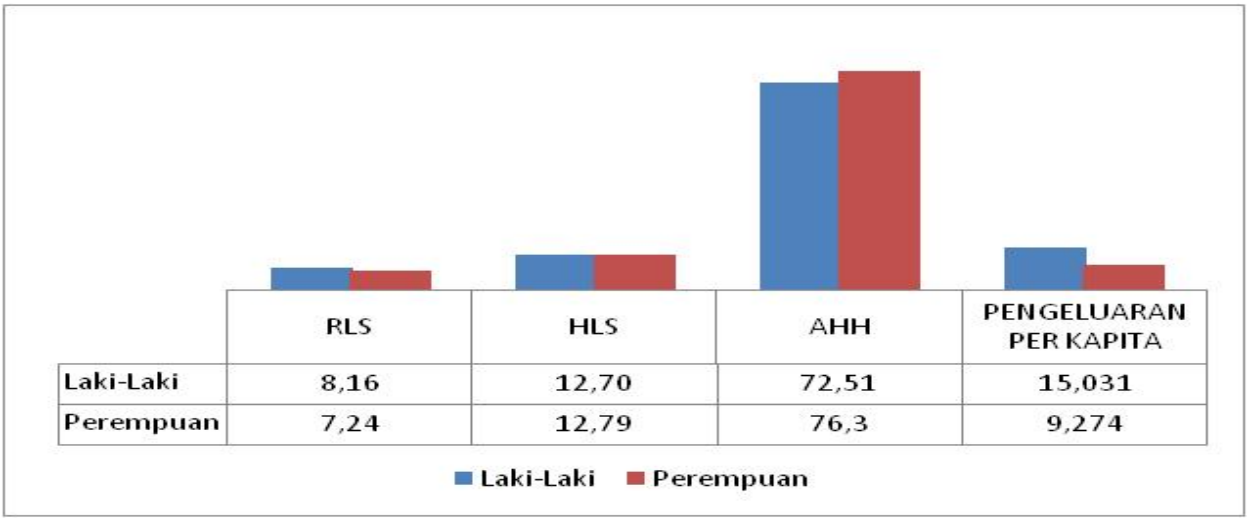

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.44.
IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Tiga komponen pembentuk IDG yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 74,89, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 75,10, kemudian secara berurutan terus mengalami penurunan yaitu di tahun 2018 menjadi sebesar 74,03, tahun 2019 sebesar 72,18 dan tahun 2020 sebesar 71,73. Kondisi tersebut berbeda dengan IDG Nasional yang secara konsiten terus mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2016 sebesar 71,39 menjadi 75,57 di tahun 2020. Penurunan IDG Jawa Tengah tahun 2020 terutama terjadi karena penurunan dua komponen yakni persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menurun dari 19,17 persen pada tahun 2019, menjadi 18,80 persen pada tahun 2020, sedangkan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja menurun dari 34,31 persen menjadi 34,29 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	IDG Prov Jateng	IDG Nasional
1	2016	74,89	71,39
2	2017	75,10	71,74
3	2018	74,03	72,10
4	2019	72,18	75,24
5	2020	71,73	75,57

Sumber: BPS 2016-2020

Gambaran indikator pembentuk IDG provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan Perempuan di parlemen cenderung menurun pada kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2016 sebesar 24 persen menurun menjadi 18,80 persen pada tahun 2020. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2016 hingga 2018, dan kemudian meningkat pada tahun 2019 (20,52 persen) dan tahun 2020 (21,09 persen).

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik dilevel nasional maupun daerah.

Tabel 2.35.
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2016	24	17,32
2	2017	24	17,32
3	2018	22	17,32
4	2019	19,17	20,52
5	2020	18,80	21,09

Sumber: BPS, 2016-2020

b. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi di Provinsi Jawa Tengah, terjadi

pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 49,30 persen turun menjadi 46,97 persen pada tahun 2017, namun kembali meningkat dua tahun berturut-turut hingga menjadi 49,36 persen pada 2019 dan 50,20 persen di tahun 2020. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Nasional yang mengalami fluktuatif tahun 2017 menurun menjadi 46,31 persen dari tahun 2016 yang sebesar 47,59 persen, kemudian naik berturut turut di tahun 2018 (47,02 persen), tahun 2019 (47,46 persen) dan tahun 2020 (48,76 persen).

Tabel 2.36.
Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2016-2020 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2016	49,30	47,59
2	2017	46,97	46,31
3	2018	47,57	47,02
4	2019	49,36	47,46
5	2020	50,20	48,76

Sumber: BPS, 2016-2020

Lonjakan atas indikator ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 48,83 persen perempuan di perkotaan telah mencapai pendidikan SMA ke atas, sementara di pedesaan baru mencapai 23,93 persen. Capaian ini telah merubah posisi perempuan penganggur menjadi bekerja, karyawan menjadi pekerja profesional. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal dapat memperkuat peningkatan indikator ini adalah meningkatnya jumlah PNS perempuan serta jumlah PNS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Terdapat 31,13 persen perempuan yang telah mampu berada di eselon tiga dan dua.

c. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan upah di beberapa sektor di negara-negara Asia bahkan mencapai 40 persen. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan.

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan. Menurut data KPPPA di sektor formal, laki-laki menempati porsi sebesar 65,78 persen dan perempuan 34,22 persen. Pada sektor informal laki-laki sebanyak 57,96 persen dan perempuan 42,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor informal lebih banyak dibanding di sektor formal. Pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

Pekerja perempuan di sektor informal juga berpenghasilan lebih rendah. Banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual. Meskipun jumlah perempuan bekerja di sektor informal lebih tinggi di bandingkan sektor formal, namun hal lain yang menghambat adalah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jenis usaha yang digeluti juga lebih ke arah pekerjaan domestik.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan setelah secara berturut turut sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2020 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Jawa Tengah adalah 34,29 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang mengalami kecenderungan naik dari tahun 2016 (36,42 persen) hingga tahun 2020 (37,26 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37.
Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2016	34,09	36,42
2	2017	34,13	36,62
3	2018	34,28	36,70
4	2019	34,31	37,10
5	2020	34,29	37,26

Sumber: BPS, 2016-2020

6. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat

pengangguran terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 5,96 persen, turun 0,52 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

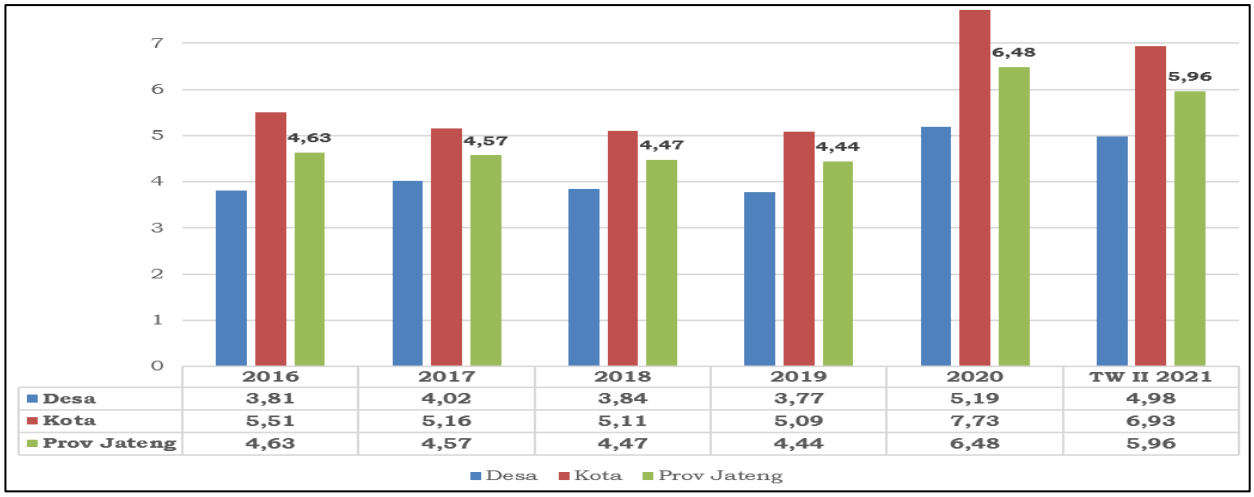

	2016	2017	2018	2019	2020	TW II 2021
Desa	3,81	4,02	3,84	3,77	5,19	4,98
Kota	5,51	5,16	5,11	5,09	7,73	6,93
Prov Jateng	4,63	4,57	4,47	4,44	6,48	5,96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.45.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2021 (TW II) (%)

Dibandingkan dengan keadaan pada Februari 2020, kontribusi penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan 0,11 persen poin, SMA Umum (0,74 persen poin), SMA Kejuruan (0,02 persen poin), dan Diploma I/II/III (0,10 persen poin). Sementara apabila dibandingkan Agustus 2020 kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja turun pada pendidikan SD ke bawah (0,86 persen poin), SMA Umum (0,11 persen poin), dan SMA Kejuruan (0,18 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan Diploma I/II/III dan Universitas mengalami peningkatan kontribusi masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 0,71 persen poin.

Tabel 2.38.
TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021 (TW II) (%)

No.	Tahun	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SMK	Diploma	Univ
1.	2016	2,10	4,68	10,40*	NA	3,96**	
2.	2017	2,35	4,79	7,10	11,08	5,46	3,73
3.	2018	2,14	4,62	6,50	10,60	3,64	5,47
4.	2019	2,09	4,64	6,26	9,92	3,59	5,44
5.	2020	3,70	6,40	8,41	13,20	6,46	7,01
6.	2021	44,11	20,37	12,71	NA	2,52	7,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan:
**) Merujuk data publikasi BPS th 2016 no. 79/11/33/th.x.7 November 2016 data yang dipublikasi hanya untuk tingkat SMA (SMK tidak tersedia secara sendiri)*
***) tingkat diploma dan universitas tidak dipublikasi secara terpisah (yang tersedia data diploma & universitas)*

Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak besar pada sisi tenaga kerja tidak hanya pengangguran, namun juga penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu penganggur, bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020, penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Dari jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah yang mencapai 27,01 juta, terdapat 3,97 juta orang yang terdampak Covid-19 atau sebesar 14,68 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar hampir 1,4 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,99 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan yang sebesar 12,25 persen.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja sebanyak 3,19 juta orang atau sebesar 80,47 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 377 ribu orang atau sekitar 31,06 persen terhadap total penganggur (1,21 juta orang) di Jawa Tengah. Secara umum pada semua kategori tersebut jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

Tabel 2.39.

Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja[1)] Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (rb orang)
	Laki-Laki (rb orang)	Perempuan (rb orang)	Perkotaan (rb orang)	Perdesaan (rb orang)	
Pengangguran[2)] Karena Covid-10	204,18	47,03	153,75	97,46	251,20
Bukan Angkatan Kerja (BAK)[3)] Karena Covid-19	44,35	48,33	58,65	36,30	94,95
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	95,49	45,88	103,01	48,82	141,37
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	1.122,07	882,15	1,289,43	714,79	2.004,22
Total	**1.468,35**	**1.022,39**	**1.594,38**	**897,36**	**2.491,74**
Penduduk Usia Kerja (PUK)	13.361	13.708,48	14.040,38	13.090,67	27.131,04
Persentase PUK Terdampak Covid-19 (%)	10,99	11,36	16,99	6,85	9,18

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan:

1) *Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015*
2) *Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020*
3) *Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 202020*

Tabel 2.40.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
2	2016	16.511.136	25.782.899	64,04
3	2017	17 186 674	26.060.000	65,95
4	2018	17 245 548	26.340.000	69,21
5	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
6.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat, di tahun 2016 sebesar 67,15 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 69,11 persen, kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 69,21 persen, di tahun 2019 meningkat menjadi 69,22 persen dan terus meningkat menjadi 69,43 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tabel 2.41.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
2	2016	25.782.899	17.312.466	67,15
3	2017	26.060.000	18.010.612	69,11
4	2018	26.340.000	18.230.000	68,81
5	2019	26.610.000	18.420.000	68,85
6.	2020	27.010.000	18.750.000	69,43

Sumber: BPS 2020 diolah dari Sakernas
*Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu 2016-2020 cenderung menurun dimana di tahun 2016 sebesar 76,55 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.42.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2016	285.306	218.398	76,55
2017	309.952	210.256	67,84
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.43.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2016	30.094	1.274.715
2	2017	45.121	1.425.903
3	2018	56.574	1.698.265
4	2019	69.866	1.781.754
5	2020	76.196	1.908.465

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2021

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2018 sejumlah 1.465.847 orang menjadi 892.866 pada tahun 2020. Penurunan tersebut tidak lain disebabkan dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.44.
Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2016	170.980
2	2017	150.832
3	2018	1.465.847
4	2019	1.378.435
5	2020	892.866

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan dari 1.285 kasus pada tahun 2016 menjadi 1.927 kasus pada tahun 2017, yang kemudian kembali mengalami penurunan kasus secara terus menerus menjadi 96 kasus di tahun 2020. Namun demikian, semua kasus di setiap tahun semuanya dapat diselesaikan 100 persen, yang antara lain disebabkan adanya peningkatan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Tabel 2.45.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2016	1.285	100% terselesaikan
2	2017	1.927	100% terselesaikan
3	2018	265	100% terselesaikan
4	2019	124	100% terselesaikan
5	2020	96	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2021

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.46.
Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah *NEET*	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2016	NA	5.488.101 orang	NA
2	2017	1.044.465 orang	4.973.428 orang	21,00
3	2018	1.171.567 orang	5.521.380 orang	21,21
4	2019	1.205.564 orang	5.524.810 orang	21,82
5	2020	1.298.297 orang	5.407.899 orang	24,00

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2021

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 menurun dan kembali meningkat pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.47.
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No	Tahun	Jumlah *Peraturan Perusahaan (PP)*	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2016	3.532	782
2	2017	4.557	820
3	2018	4.857	830
4	2019	3.967	579
5	2020	4.230	614

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.1.6. Kondisi Pangan dan Energi

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi NTP antara lain pendapatan, biaya operasional sarana produksi, dan pengeluaran ekonomi rumah tangga.

Pada kurun waktu tahun 2016-2020, NTP per Bulan Desember cenderung fluktuatif. Pada Desember 2016 NTP sebesar 99,35 dan meningkat menjadi 101,49 pada Desember 2020. Pada Desember 2016, NTP turun sebesar 4,51 poin dibandingkan dengan Desember 2019 yang dipengaruhi oleh

penurunan pada sub sektor tanaman pangan. Adapun bila dibandingkan dengan NTP Nasional pada periode tahun 2017–2019, NTP Jawa Tengah lebih baik dibandingkan NTP Nasional. Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian.

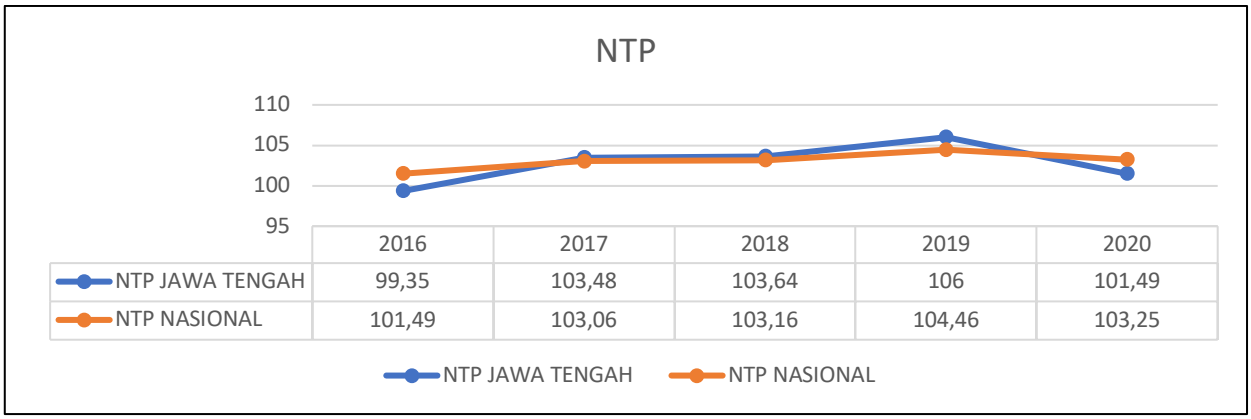

	2016	2017	2018	2019	2020
NTP JAWA TENGAH	99,35	103,48	103,64	106	101,49
NTP NASIONAL	101,49	103,06	103,16	104,46	103,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.46.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2020

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2016-2020, sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan relatif mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang semakin kuat. Namun sebaliknya, sub sektor perkebunan rakyat dan peternakan mengalami penurunan dibawah 100 pada Tahun 2020.

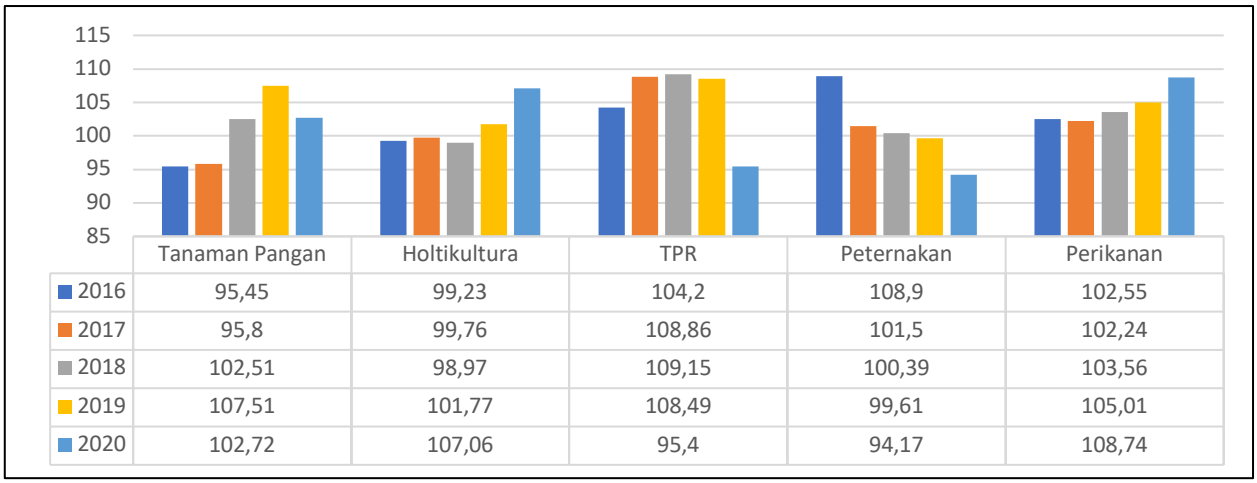

	Tanaman Pangan	Holtikultura	TPR	Peternakan	Perikanan
2016	95,45	99,23	104,2	108,9	102,55
2017	95,8	99,76	108,86	101,5	102,24
2018	102,51	98,97	109,15	100,39	103,56
2019	107,51	101,77	108,49	99,61	105,01
2020	102,72	107,06	95,4	94,17	108,74

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.47.
Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

2. Pangan

Kondisi ketahanan pangan ditunjukkan dengan ketersediaan komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai dan gula. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 ketersediaan padi di Jawa Tengah cukup fluktuatif. Meskipun demikian secara umum ketersediaan padi di Jawa Tengah surplus jika dibandingkan dengan kebutuhannya.

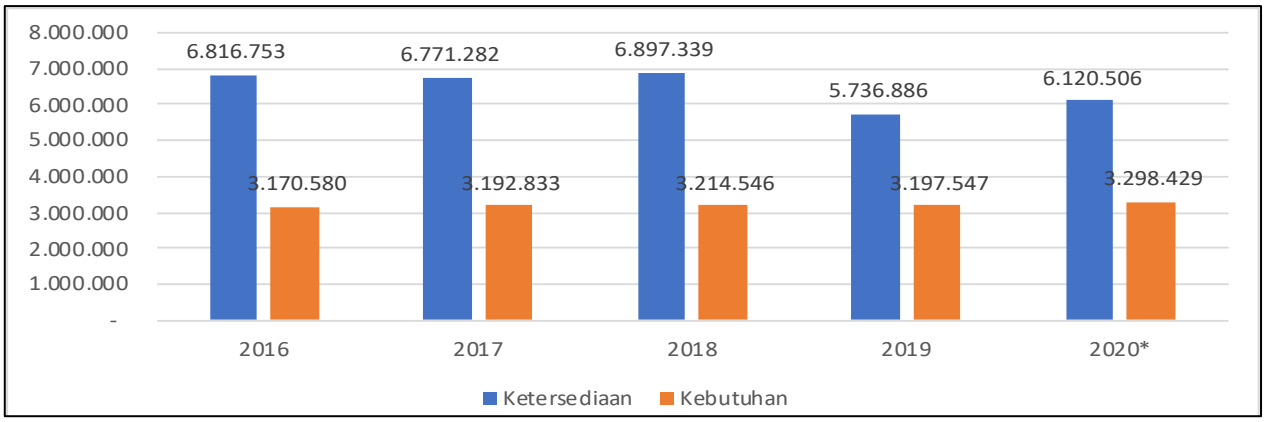

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
*Keterangan: *) Prognosa 2020*

Gambar 2.48.
Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020

Pada komoditas jagung, ketersediaan pada kurun waktu tahun 2016 – 2020 mengalami surplus. Produksi dan ketersediaan jagung relatif meningkat pada kurun waktu tahun 2016 – 2020. Penghitungan kebutuhan jagung berdasarkan konsumsi jagung pada manusia, sementara pada sisi yang lain produksi jagung lebih banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.

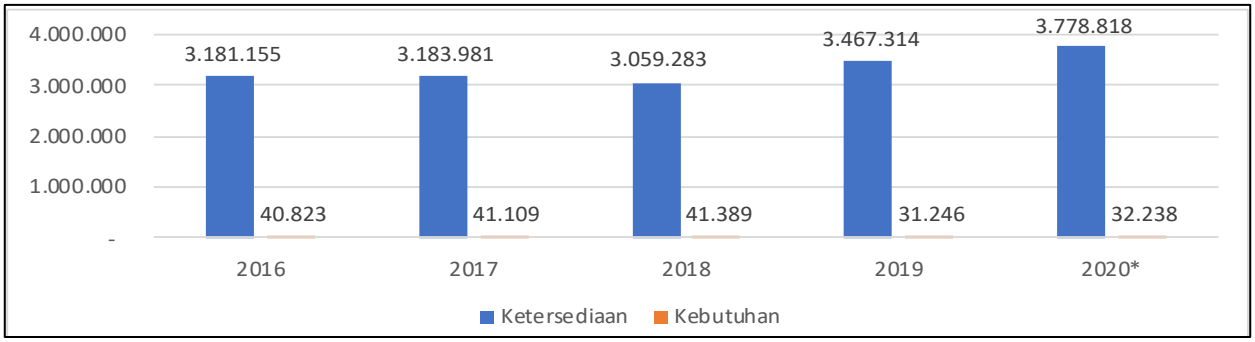

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
*Keterangan: *) Prognosa 2020*

Gambar 2.49.
Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang belum dipenuhi ketersediaannya oleh Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek produksi, selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 produksi kedelai mengalami fluktuatif

dan cenderung turun. Sementara itu pada aspek kebutuhan relatif stabil. Terdapat beberapa kendala yang berdampak pada rendahnya produksi kedelai di Jawa Tengah, yaitu antara lain rendahnya minat petani dalam budidaya kedelai, tidak stabilnya harga kedelai dibandingkan komoditas kacang-kacangan lainnya serta perawatan dan pola budidaya kedelai yang rentan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman.

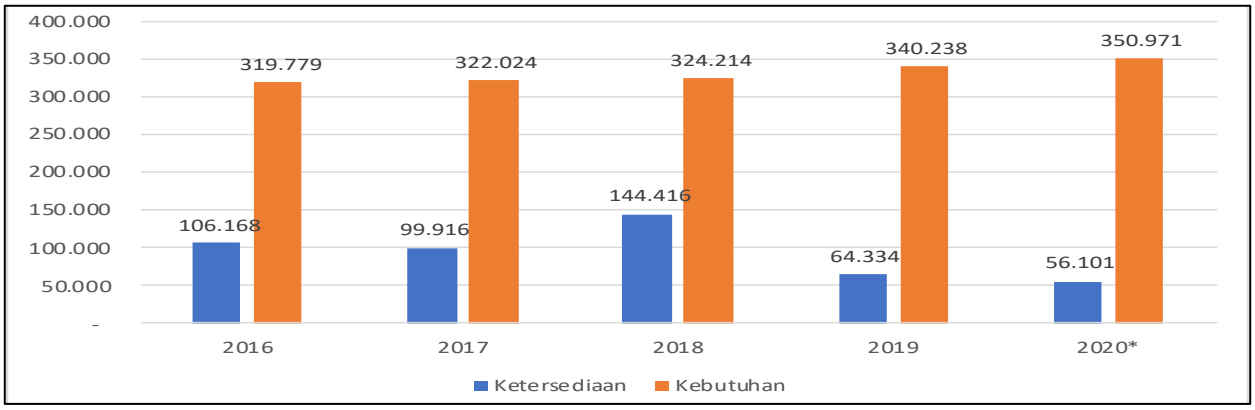

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
*Keterangan: *) Prognosa 2020*

Gambar 2.50.
Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Selanjutnya pada komoditas gula, ketersediaan pada kurun waktu tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Adapun pada tahun 2018 – 2020 ketersediaan gula mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Rendahnya produksi tebu pada aspek hulu merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya ketersediaan. Selain itu produktivitas pabrik gula di Jawa Tengah memerlukan upaya revitalisasi atau peremajaan mesin produksi.

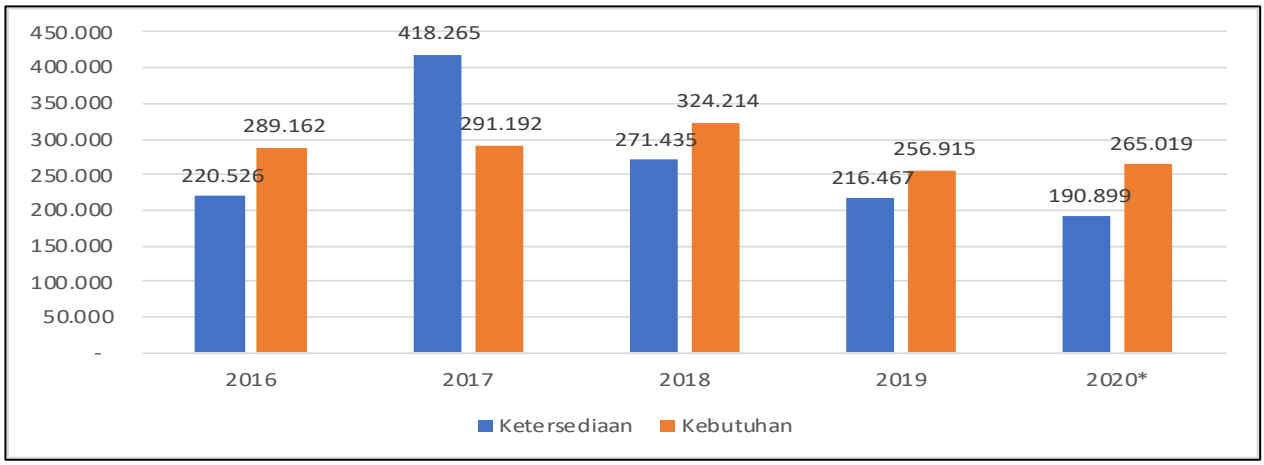

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (dalam ton), 2021
*Keterangan: *) Prognosa 2020*

Gambar 2.51.
Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun. Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada prioritas 1 sampai 6. Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori prioritas 6. Peta FSVA tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 576 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 158 kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat 315 kecamatan, kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 75 kecamatan, kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3) terdapat 13 kecamatan, kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) terdapat 12 kecamatan dan kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1) terdapat 3 kecamatan. Berdasarkan kondisi terebut maka masih diperlukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 1 sampai 5.

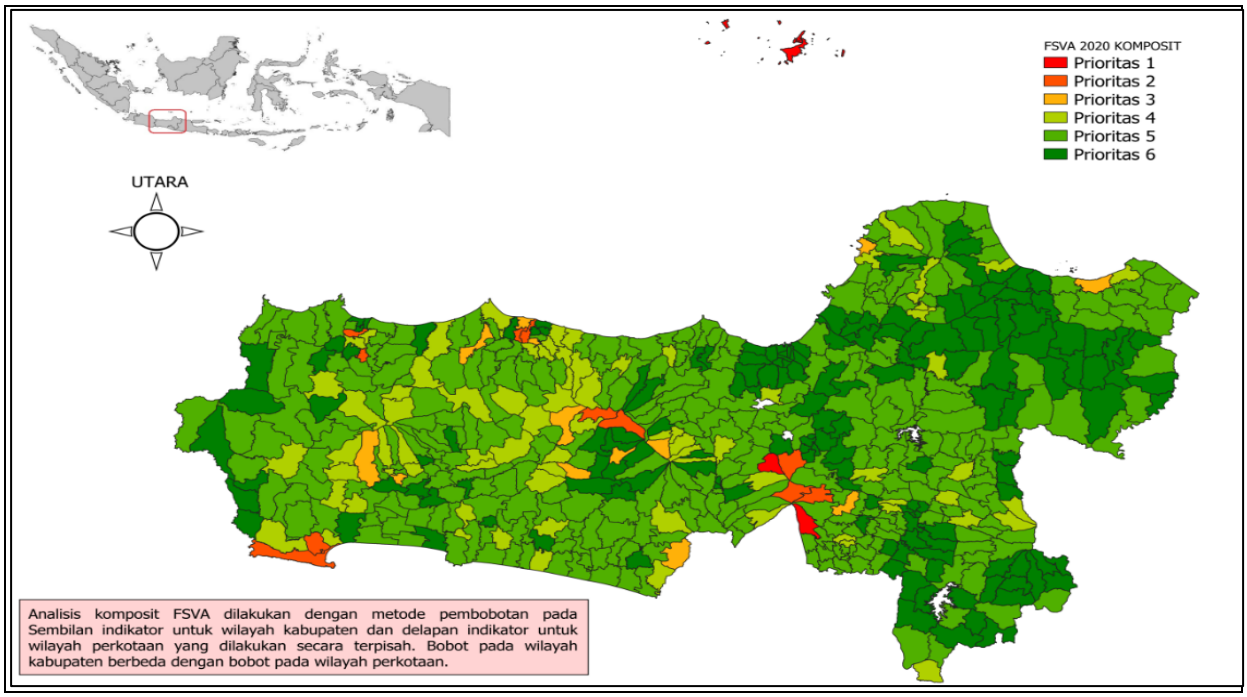

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2021
*Keterangan: *) Prognosa 2020*

Gambar 2.52.
Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2020 dimana CV tahun 2020 merupakan perhitungan CV sampai bulan November 2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.48.

Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2016–2020

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Tepung Terigu	1,22	2,72	1,59	1,18	0,99	1,54
2	Minyak Goreng	6,88	2,42	3,22	2,42	4,51	3,89
3	Daging Sapi	3,17	1,21	1,63	1,11	0,90	1,60
4	Telur Ayam Ras	6,88	6,43	6,82	4,78	5,76	6,13
5	Daging Ayam Ras	5,55	3,13	6,48	2,83	6,61	4,92
6	Cabai Merah Keriting	34,55	40,47	22,60	49,20	48,92	39,15
7	Bawang Merah	9,76	17,39	20,18	23,49	23,22	18,81
8	Gula Pasir Lokal	9,89	4,20	3,25	5,17	13,66	7,23
9	Kedelai	3,65	3,17	1,27	1,10	2,31	2,30
10	Jagung	4,27	8,06	3,41	3,64	5,72	5,02
11	Beras Termurah	1,51	4,59	3,18	1,34	0,73	2,27
12	Beras Medium	1,34	2,60	4,38	1,23	0,92	2,09
13	Beras Premium	1,53	2,41	2,94	0,89	0,47	1,65

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020
*Keterangan: *) data sampai bulan November 2020*

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi antara lain minyak goreng, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan gula pasir lokal.

Tabel 2.49.

Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No,	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020*
1	Padi-padian	25,0	24,90	25,00	25,00	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,90	0,88	1,42	1,1	0,9
3	Pangan Hewani	24,0	19,20	19,45	17,09	20,0	20,4
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,00	5,00	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,90	1,00	0,70	0,5	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	6,87	10,00	6,4	6,1
7	Gula	2,5	2,00	2,50	2,37	2,1	2,1
8	Sayur & buah	30,0	28,00	25,71	25,71	29,5	27,1
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	91,78	91,80	86,41	89,6	87,1
Skor PPH Nasional		100,0	81,8	85,20	90,40	90,8	87.9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2020
*Keterangan: *) angka sementara*

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2016 - 2020 untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi. Standar konsumsi berdasarkan WNPG VIII tahun 2004 ditentukan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Mulai tahun 2017 standar konsumsi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50.
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Ideal WNPG VIII	2016	Ideal WNPG X	2017	2018	2019	2020*
1	Beras (Kg/Kap/Th)	91,00	99,11	97,80	99,40	94,92	95,94	88,8
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	35,60	15,13	39,20	21,85	18,99	14,69	12,2
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	54,80	44,37	58,80	40,04	30,17	34,25	32,8
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	91,30	67,82	98,10	67,22	83,34	96,22	90,8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020
*Keterangan: *) angka sementara*

Capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi per kapita/hari, menunjukkan bahwa konsumsi beras perlu diturunkan, Adapun konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.51.
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Kelompok Pangan	Ideal WNPG VIII	Tahun					
			2016	Ideal WNPG X	2017	2018	2019	2020*
1	Padi-padian	1,000	1,068,58	1,075,0	1,252,6	1,235,31	1,303.1	1,221
2	Umbi-umbian	120	81,84	129,0	37,8	61,26	47.1	37
3	Pangan Hewani	240	206,63	258,0	209,1	183,77	214.7	220
4	Minyak dan lemak	200	283,84	215,0	253,5	215,33	226.8	227
5	Buah/biji berminyak	60	40,12	64,0	47,0	30,22	20.1	19
6	Kacang-kacangan	100	195,47	108,0	73,9	125,58	68.7	66
7	Gula	100	84,74	108,0	128,1	102,02	91.8	90
8	Sayur & buah	120	120,23	129,0	110,6	110,53	127.0	117
9	Lain-lain	60	20,29	64,0	37,1	26,15	51.7	51
JUMLAH		2000	2,101,75	2,150,0	2,149,5	2,090,17	2151.1	2,048

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020
*Keterangan: *) angka sementara*

Masih ditemukannya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara insidentil, belum secara rutin dan tersebar di semua wilayah. Berikut perkembangan data pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Jawa Tengah dimana data tahun 2020 sampai pada pengawasan triwulan III (Bulan Oktober 2020).

Tabel 2.52.
Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019 – 2020

NO	Triwulan	2019		2020*	
		Jumlah Sampel	Sampel Aman	Jumlah Sampel	Sampel Aman
1	I	100	91	100	97
2	II	152	150	0	0
3	III	176	176	225	218
4	IV	172	172	-	-
Jumlah		600	589	325	315
Persentase Sampel Aman		98,17		96,92	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2020
*Keterangan: *) capaian triwulan III*

Memperhatikan tabel di atas, perlu ditingkatkan pengawasan pangan segar baik dari jumlah komoditas maupun waktu pelaksanaannya, mengingat persentase keamanan pangan belum mencapai 100%.

Pada ketersediaan pangan di sektor perikanan, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Dalam kurun waktu lima tahun total produksi perikanan di Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016 produksi perikanan sebanyak 776.522 ton meningkat menjadi 1.013.951,06 ton di tahun 2020.

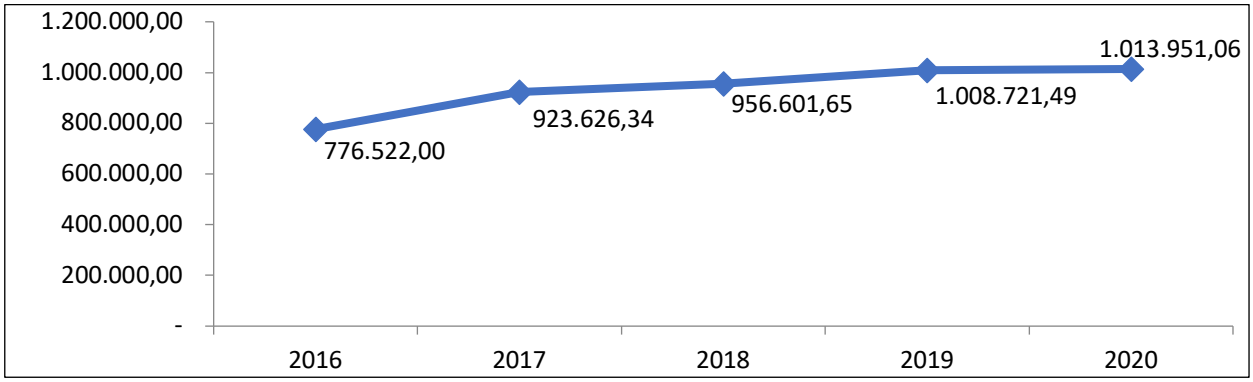

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.53.
Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Ton)

Keragaman konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dapat digambarkan dari angka konsumsi ikan. Pada tahun 2019 angka konsumsi ikan Jawa Tengah sebesar 35,99 kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 30,65 kg/kapita/tahun, namun masih di bawah angka nasional

yaitu sebesar 54,50 kg/kapita/tahun. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

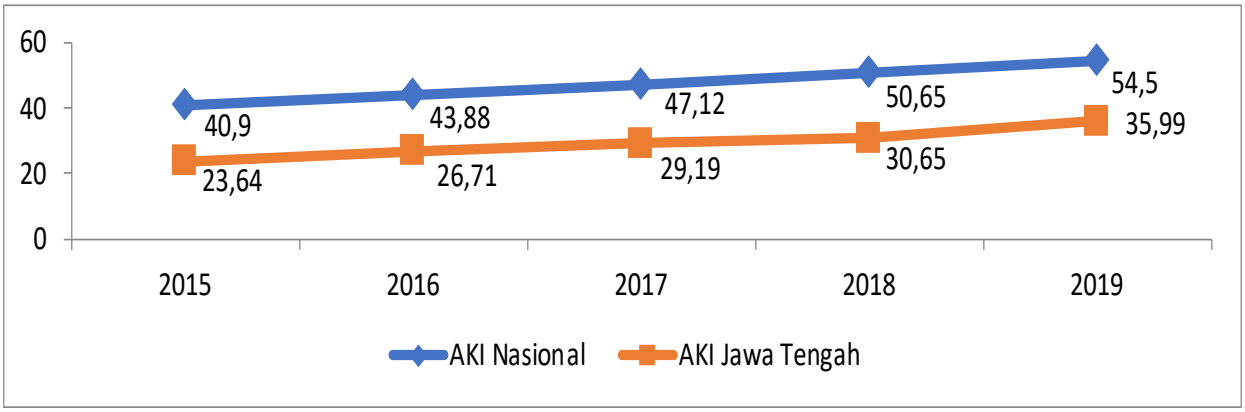

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.54.
Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (Kg/Kapita/Tahun)

Jawa Tengah juga merupakan salah satu provinsi penghasil garam nasional dengan sentra produksi berada di Kabupaten Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang dengan total lahan seluas 6.608.78 Ha. Kontribusi produksi garam rakyat di Jawa Tengah terhadap produksi nasional cukup signifikan yaitu sebesar 22,15 – 27,93 persen dan berada di urutan ke-2 setelah Jawa Timur dari total 21 provinsi penghasil garam. Produktivitas garam tahun 2020 sebesar 62,92 ton/Ha. Jumlah ini lebih kecil daripada produktivitas ideal garam rakyat nasional yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 100 ton/Ha. Mendasarkan hal tersebut, maka potensi Jawa Tengah sebagai penghasil garam masih perlu ditingkatkan terutama dalam penerapan teknologi untuk adaptasi musim.

Tabel 2.53.
Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan (ha)	6.608.78	6.608.78	6.713.72	6.713.72	6.713.72
2	Jumlah Petambak (orang)	15.445	15.445	14.061	14.061	14.061
3	Produksi (ton)	26.150.37	307.249.18	302.001.32	302.001.32	368.660.04
4	Produktivitas (ton/ha/musim)	3.96	46.49	44.98	44.98	62.92
5	Rata-rata curah hujan (mm/tahun)	2.225.00	2.313.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00
6	Rata-rata bulan kemarau (bulan)	2-3	4-5	4	4	4

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Sedangkan pada sektor perikanan pengolahan, populasi UPI (Unit Pengolahan Ikan) skala mikro dan kecil di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 6.552 unit dan skala menengah besar sebanyak 77 unit, dalam jumlah tersebut baru 155 unit (UPI menengah besar dan UPI mikro kecil) yang memiliki Sertifikat

Kelayakan Pengolahan (SKP). Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan juga pemasaran.

Pada sisi yang lain pada sektor perikanan, daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap semakin menurun. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, luas kawasan peruntukan kawasan konservasi seluas 134.935.114 Ha. Adapun kerusakan wilayah pesisir ditunjukkan pada abrasi dan akresi. Pada tahun 2017 telah terjadi abrasi seluas 8.606,53 Ha dan akresi seluas 4.774,87 Ha. Berdasarkan tingkat kerusakan tersebut diperlukan upaya rehabilitasi kerusakan pesisir.

Selain itu, usaha perikanan tangkap oleh nelayan mempunyai resiko cukup tinggi. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 telah terjadi kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 508 kejadian. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya penjaminan usaha penangkapan ikan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang, akibat dihadapkan pada cuaca yang tidak bersahabat ataupun kecelakaan kerja di laut, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas terkait potensi perikanan yang ada di Jawa Tengah baik pada perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan, beserta potensi permasalahan yang ada pada sektor perikanan, maka diperlukan adanya pengelolaan kelembagaan usaha perikanan dan kelautan berbasis korporasi sehingga kesejahteraan para pelaku perikanan dapat meningkat. Pada tahun 2020 di Jawa Tengah terdapat KUB (Kelompok Usaha Bersama) sebanyak 1400 unit, sejumlah 12 KUB yang berbentuk KUB koperasi dan 30 KUB potensial, dan jumlah ini masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya.

3. Energi

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau terluar di Provinsi Jawa Tengah. Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak

dengan kapasitas sebesar 2x2,2 MW sehingga mulai tahun 2016 penduduk di Pulau Karimun dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam.

Sumber: Dinas ESDM Prov jateng, Tahun 2021

Gambar 2.55.
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah

Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah terbagi menjadi 4 (empat) Sub Sistem:

1) Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Ungaran dan PLTGU/PLTU Tambak Lorok memasok wilayah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Brebes;
2) GITET Pedan dan GITET Kasugihan memasok wilayah Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, dan Kota Magelang (termasuk memasok DIY);
3) PLTU Cilacap memasok wilayah Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, dan Kab. Kebumen;
4) PLTD Legon Bajak 2 x 2,2 MW memasok wilayah Pulau Karimun dan Pulau Kemujan.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dan sedang dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Program Listrik 35.000 MW secara nasional. Progres pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020, yaitu:

1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x1.000 MW) : progres 94,2% (per November 2020), Rencana COD Unit 1 pada Januari tahun 2021 dan Unit 2 pada 2 April 2021;
2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 & 6 (2x1.000 MW) : progres 92,7% (per November 2020), Rencana COD Unit 5 pada Mei tahun 2021 dan Unit 6 pada September 2021;
3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW) : progres 80,86% (per November 2020), Rencana COD pada April tahun 2021.

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang, berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2020 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 20.418 GWh pada tahun 2015 menjadi 27.365 GWh pada tahun 2020.

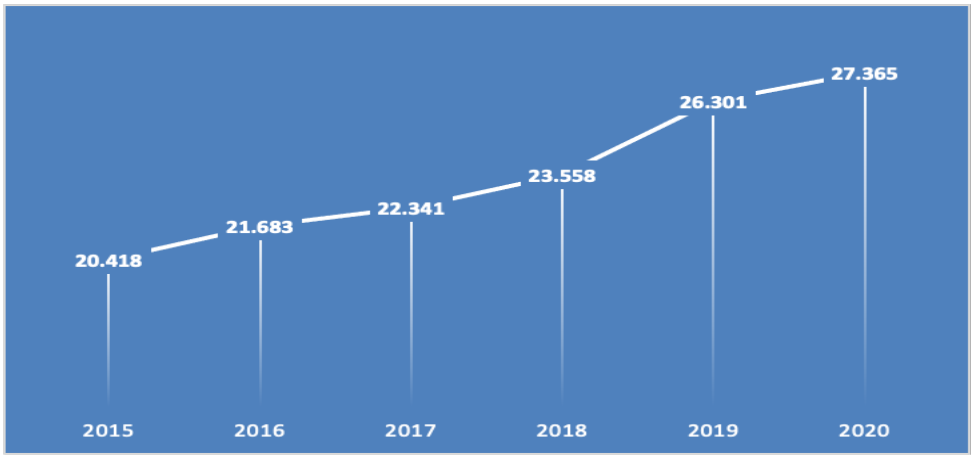

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jateng, 2021

Gambar 2.56.
Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020 (GWh)

Rasio elektrifikasi Jawa Tengah hingga tahun 2020 sebesar 99,88 persen sehingga masih terdapat 0,12 persen KK belum berlistrik, yang sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Perkembangan rasio elektrifikasi selama tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Sampai Dengan Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Elektrifikasi (%)	93,51	96,30	98,52	99,88	99,88
2.	Sambungan Listrik Murah	2.175	8.338	13.092	27.225	40.173

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pemenuhan kebutuhan energi Jawa Tengah masih didominasi oleh penggunaan energi fosil yaitu sebesar 88,11 persen pada tahun 2020 yang berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan upaya penggunaan energi yang ramah lingkungan yaitu energi baru

terbarukan (EBT). Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi EBT yang cukup banyak antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy (biomassa)*, gas rawa dan panas bumi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik di Jawa Tengah. Selain penggunaan EBT, upaya untuk penurunan emisi gas rumah kaca antara lain melalui pelaksanaan Lomba Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Khusus untuk kegiatan Audit Energi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu penghematan energi di gedung pemerintahan. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2015-2020 sebagai berikut.

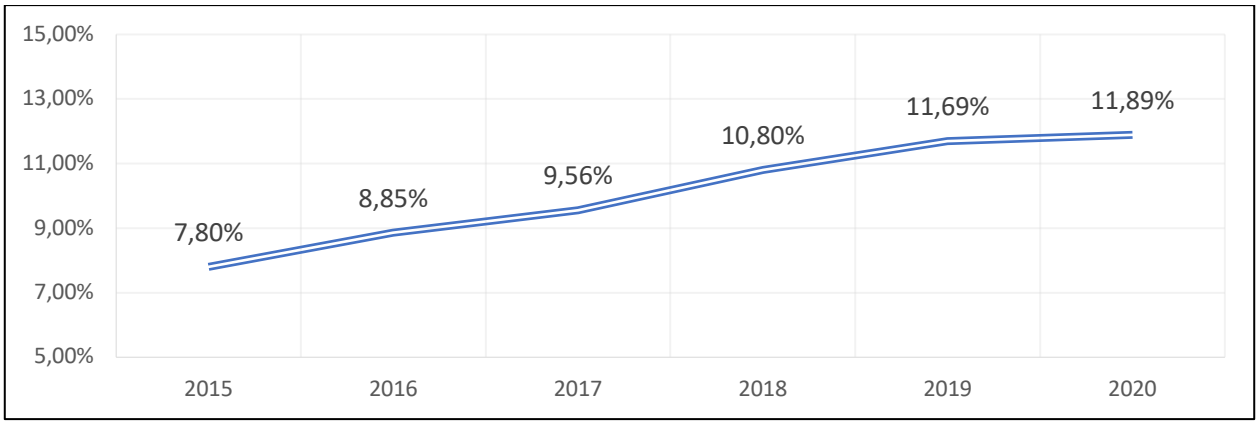

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.57.
Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2020

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 Kabupaten/Kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

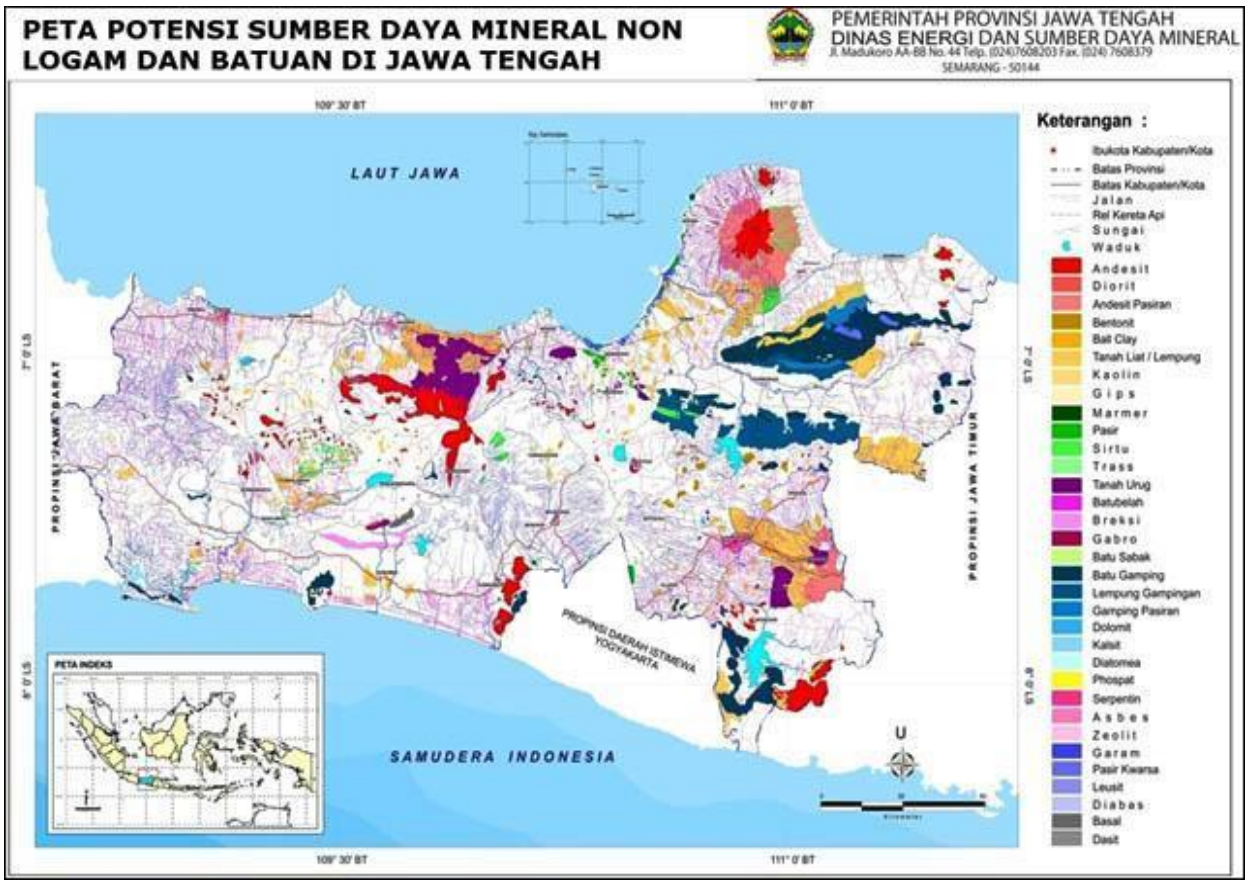

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.58.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Peningkatan aktivitas perekonomian ditengarai berpengaruh terhadap aktivitas pertambangan di Jawa Tengah yang menunjukkan kecenderungan perkembangan fluktuatif. Meskipun aktivitas pertambangan menunjukkan perkembangan fluktuatif, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.55.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas PETI (ha)	485	484,55	489,55	133	128
Sidak PETI (obyek)	135	200	169	114	107
Proses Hukum (kasus)	15	34	11	9	8
Lokasi di Kab/Kota	29	29	29	28	26

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2020

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik dan setempat-setempat sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara, tetapi juga dimungkinkan melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertibannya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi bersama Tim Terpadu telah melakukan penertiban penambangan liar. Penertiban pertambangan tanpa izin diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP). Selain itu, untuk mengatasi permasalahan dalam pertambangan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan permasalahan sosial, maka perlu adanya tata cara pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*). Dengan diterapkannya GMP akan membantu industri pertambangan menjadi berkelanjutan (*sustainable mining*).

Pengelolaan air tanah di Jawa Tengah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT di Jawa Tengah sebanyak 31 CAT, terdiri dari 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 6 CAT lintas Provinsi dan 19 CAT lintas kabupaten/kota (kewenangan provinsi). Potensi air tanah bebas CAT lintas Provinsi sebesar 411,15 juta m^3/tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 6.575,64 juta m^3/tahun dan CAT dalam kabupaten sebesar 355,20 juta m^3/tahun. Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya visualisasi telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui Lomba Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.

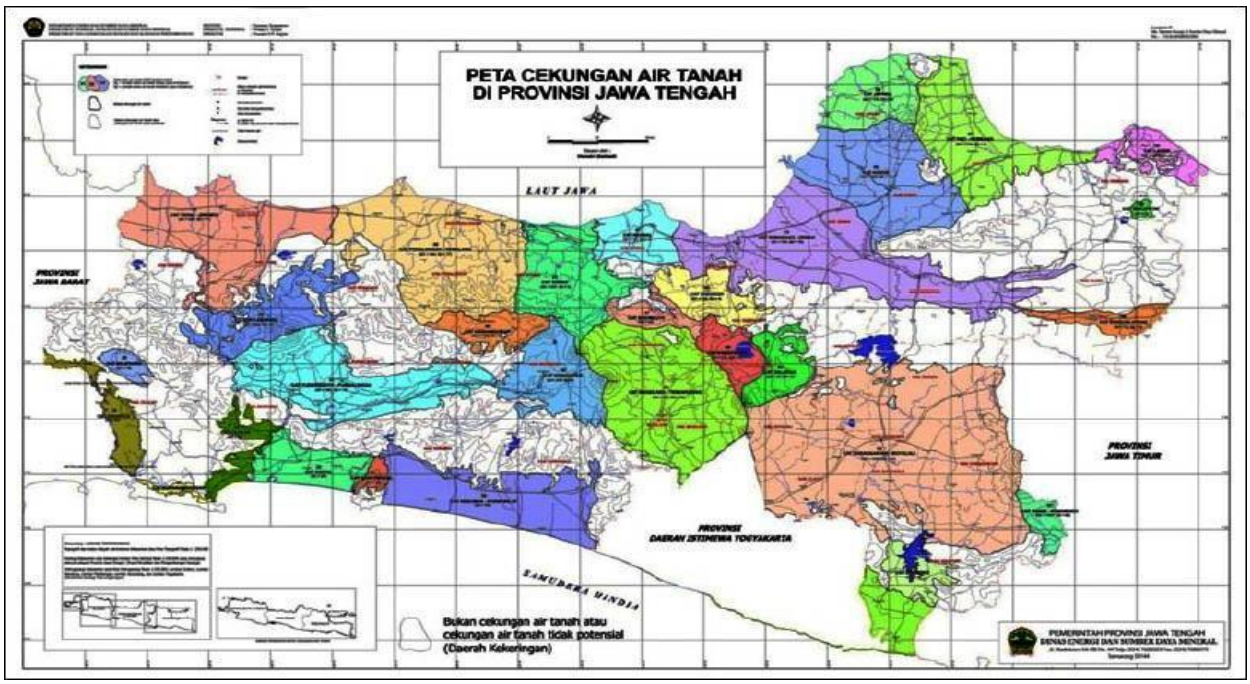

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.59.
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah

2.1.7. Kondisi Infrastruktur Wilayah

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

a. Kondisi Jalan

Panjang jalan di Jawa Tengah yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 7,88 persen dari total panjang jalan di Jawa Tengah (30.508,80 km). Sebagian besar jalan di Jawa Tengah (87,12 persen) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sisanya merupakan kewenangan Nasional (4,99 persen). Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik dan Jalan Non Status (NS) sepanjang 109,82 km yang merupakan bagian dari Jalur JJLS Jawa Tengah. JJLS merupakan jaringan jalan strategis yang menghubungkan PKW Cilacap – Yogya, dan merupakan jaringan jalan pulau terluar negara yang berbatasan dengan Australia. JJLS di ruas Kebumen – Cilacap juga dapat berperan menjadi tanggul mengingat potensi bencana tsunami di sepanjang pantai selatan.

Kondisi jalan kewenangan provinsi yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 954,201 km atau 39,68 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56.
Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan
Tahun 2020

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	km	%	km	%	Km	%	
Nasional	691,96	33,50	800,00	60,95	30,24	5,19	1,40	0,36	1.523,60
Provinsi	2.181,82	90,73	222,92	9,27	0	0,00	0,00	0,00	2.404,741
Kabupaten/Kota*)	15392,97	57,91	4863,95	18,30	3544,53	13,34	2852,21	10,73	26.580,142
Jumlah Jateng	18266,75	59,87	5886,87	19,30	3574,77	11,72	2853,61	9,35	30.508,483
Jalan Non Status	80,88	75,65	28,94	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109,82
Jalan Tol	330,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71

Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2020

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57.
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2020								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	752,56	80,17	76,00	8,10	62,85	6,70	47,29	5,04	938,69
2	Banyumas	679,15	45,04	348,31	23,10	460,04	30,51	20,50	1,36	1508,00
3	Batang	279,32	50,56	111,71	20,22	65,00	11,77	96,40	17,45	552,42
4	Blora	279,21	23,06	492,20	40,65	400,04	33,04	39,40	3,25	1210,84
5	Boyolali	504,74	74,44	52,90	7,80	42,22	6,23	78,15	11,53	678,00
6	Brebes	191,74	27,00	386,02	54,35	106,69	15,02	25,75	3,63	710,19
7	Cilacap	813,45	64,09	161,03	12,69	271,75	21,41	22,97	1,81	1269,20
8	Demak	371,55	87,15	44,21	10,37	8,37	1,96	2,20	0,52	426,33
9	Grobogan	700,01	76,27	16,89	1,84	53,97	5,88	146,90	16,01	917,77
10	Jepara	344,88	39,54	408,81	46,87	95,03	10,90	23,43	2,69	872,14
11	Karanganyar	515,89	49,30	370,22	35,38	149,05	14,24	11,35	1,08	1046,51
12	Kebumen	365,19	38,03	337,40	35,13	124,36	12,95	133,40	13,89	960,36
13	Kendal	452,16	58,70	151,24	19,63	97,06	12,60	69,87	9,07	770,33
14	Klaten	474,26	66,25	170,64	23,84	59,44	8,30	11,55	1,61	715,89
15	Kudus	392,92	61,46	194,84	30,48	38,34	6,00	13,16	2,06	639,26
16	Magelang	773,67	77,30	118,28	11,82	90,56	9,05	18,32	1,83	1000,83
17	Pati	599,06	71,54	39,66	4,74	137,70	16,44	60,96	7,28	837,38
18	Pekalongan	491,75	73,41	52,25	7,80	29,53	4,41	96,37	14,39	669,90
19	Pemalang	499,76	65,27	88,92	11,61	97,00	12,67	80,04	10,45	765,72
20	Purbalingga	588,34	66,25	108,81	12,25	82,51	9,29	108,43	12,21	888,09

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2020								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
21	Purworejo	248,00	32,24	358,89	46,65	101,60	13,21	60,76	7,90	769,25
22	Rembang	374,15	58,21	87,65	13,64	139,75	21,74	41,20	6,41	642,75
23	Semarang	581,05	79,20	94,66	12,90	41,02	5,59	16,89	2,30	733,62
24	Sragen	726,47	71,21	97,97	9,60	195,80	19,19	0,00	0,00	1020,25
25	Sukoharjo	400,01	66,10	134,73	22,27	67,46	11,15	2,92	0,48	605,12
26	Tegal	443,04	52,29	244,23	28,83	98,33	11,61	61,67	7,28	847,27
27	Temanggung	413,76	63,61	116,54	17,92	79,39	12,21	40,78	6,27	650,48
28	Wonogiri	771,38	74,28	133,92	12,90	110,37	10,63	22,80	2,20	1038,47
29	Wonosobo	497,55	49,79	78,79	7,89	179,48	17,96	243,46	24,36	999,28
30	Kota Magelang	76,09	63,99	36,02	30,29	6,79	5,71	0,00	0,00	118,90
31	Kota Pekalongan	104,71	68,25	18,27	11,91	12,55	8,18	17,88	11,66	153,41
32	Kota Salatiga	289,68	85,84	24,55	7,27	22,03	6,53	1,21	0,36	337,47
33	Kota Semarang	731,01	87,04	47,11	5,61	37,86	4,51	23,93	2,85	839,90
34	Kota Surakarta	99,66	46,48	83,59	38,99	28,21	13,16	2,95	1,38	214,41
35	Kota Tegal	107,71	46,54	98,67	42,63	22,60	9,76	2,46	1,06	231,44
	JUMLAH	**15.392,97**	**57,75**	**4.863,95**	**18,25**	**3.544,53**	**13,30**	**2.852,21**	**10,70**	**26.579,84**

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2021

b. Standarisasi Jalan Provinsi

Standar jalan provinsi setidaknya dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan). Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar.

Sampai dengan tahun 2020, panjang jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 954,201 km atau mencapai 39,68 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis.

Tabel 2.58.
Kondisi Lebar Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Lebar Perkerasan Jalan	Panjang (km)	Persentase (%)
1	4 m	87,130	3,63
2	5 m	256,880	10,69
3	6 m	1.106,216	46,00
4	7 m	800,165	33,27
5	8 – 9 m	64,558	2,68
6	> 9 m	89,792	3,73
Total		**2.404,741**	**100,00**

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2020

2. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan akses air minum perkotaan pada tahun 2020 sebesar 88,23 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 86,82 persen. Sedangkan untuk perdesaan, cakupan pelayanan akses air minum pada tahun 2020 sebesar 81,98 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,71 persen. Untuk cakupan layanan sanitasi pada tahun 2020 sebesar 90,72 persen yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 89,57 persen.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air minum di Jawa Tengah 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas dan Keburejo.

Tabel 2.59.
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Minum					
	- Perkotaan (%)	80,45	80,98	84,15	86,82	88,23
	- Perdesaan (%)	72,80	72,80	74,55	76,71	81,98
2	Sanitasi (%)	77,07	80,00	81,50	89,57	90,72

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dalam rangka pengelolaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelolanya dimana kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Kondisi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Akses Air Minum Perkota-an	Akses AirMinum Perdesaan	Kondisi SPAM PERKOTAAN PDAM (Buku BPPW 2019)			Kondisi BPSPAM		Akses Sanitasi Air Limbah	Kondisi Sanitasi		
			Kapasi-tas Prod -uksi	Idle Capacit y (lt/dt)	Status Kiner-ja	Jmlh BPSP AM	Fung -si Baik		Nama/ Lokasi IPLT	Status Operasi	Jmlh KPP
Cilacap	91,24	73,72	696,73	183,27	Sehat	149	131	84,57	Tritih Lor	Beroperasi	1
Banyumas	79,61	69,63	987,72	335,21	Sehat	176	166	81,60	Gunung Tugel	Tidak	30
Purbalingga	100	83,6	497,97	250,53	Sehat	156	143	90,77	-	-	2
Banjarnegara	89,91	90,47	74,79	65,21	Kurang	170	166	64,07	-	-	2
Kebumen	84,00	95,70	284,9	375	Sehat	148	143	89,56	Kali gending	Beroperasi	14
Purworejo	86,82	89,11	229,14	80,82	Sehat	184	176	87,36	Jetis	Tidak	17
Wonosobo	94,23	97,24	701,99	716,44	Sehat	155	149	61,07	Wono-rejo	Beroperasi	n/a
Magelang	91,90	85,09	701,66	263,92	Sehat	200	184	96,12	-	-	12
Boyolali	35,89	64,11	454,71	166,19	Sehat	158	148	98,03	Winong	Tidak	32
Klaten	92,48	87,15	516,5	25	Sehat	143	129	100,00	Jomboran	Beroperasi	50
Sukoharjo	82,39	72,12	341,75	62,55	Sehat	88	88	92,85	Mojorejo	Beroperasi	10
Wonogiri	94,20	76,88	280,11	218,95	Sehat	155	151	100,00	-	-	33
Karanganyar	99,70	80,54	619,02	13,56	Sehat	140	132	99,90	Mojo Gedang	Beroperasi	30
Sragen	100,00	68,33	778,3	148,8	Sehat	160	152	96,80	Tanggan	Beroperasi	20
Grobogan	86,80	79,60	384	67	Sehat	153	135	95,51	Ngembak	Beroperasi	n/a
Blora	93,14	89,00	170	51	Sehat	170	160	100,00	Temurejo	Beroperasi	20
Rembang	85,86	83,88	187,64	68,86	Sehat	151	136	100,00	Kerep	Beroperasi	21
Pati	84,08	51,05	280,72	60,88	Sehat	187	165	74,85	Suko-harjo	Beroperasi	22
Kudus	98,00	96,00	391,15	110	Sehat	78	71	100,00	Tanjungre jo	Beroperasi	50
Jepara	84,89	90,19	537,1	115	Sehat	72	71	86,74	Bande-ngan	Beroperasi	95
Demak	87,47	72,52	552,83	48,17	Sehat	157	145	97,23	Kali-kondang	Tidak	6
Semarang	93,66	96,38	495,32	31,14	Sehat	150	148	93,06	-	-	39
Temanggung	81,20	72,00	200	120	Sehat	170	170	93,88	Krang-gan	Konstruksi	n/a
Kendal	91,09	86,21	562,19	144,06	Sehat	147	147	100,00	-	-	13
Batang	80,50	86,98	445,67	70,05	Sehat	153	151	82,55	Randu Kuning	Beroperasi	4
Pekalongan	84,63	88,28	193,96	0	Sehat	163	163	79,33	Wiradesa	Konstruksi	4
Pemalang	100	88,27	369,34	373,16	Sehat	167	149	92,69	Pegong-soran	Beroperasi	3
Tegal	86,77	66,84	377,58	10,27	Sehat	150	136	92,97	Kedung-jati	Beroperasi	n/a
Brebes	96,02	95,03	489,87	73,08	Sehat	141	121	76,20	-	-	1
Kota Magelang	97,30	0	479,22	105,78	Sehat	0	0	97,90	Tegal rejo	Beroperasi	21
Kota Surakarta	93,10	0	795,05	0	Sehat	0	0	95,47	Putri Cempo	Beroperasi	50
Kota Salatiga	88,05	0	229,02	70,98	Sehat	0	0	100,00	Ngronggo	Tidak	n/a
Kota Semarang	95,43	0	3795,13	0	Sehat	88	70	86,58	Tambak Lor	Beroperasi	1
Kota Pekalongan	86,97	0	257,36	132,33	Sehat	47	43	99,32	Degayu	Beroperasi	50
Kota Tegal	70,56	0	240	146	Sehat	0	0	88,30	Muara Rejo	Beroperasi	8
Jawa Tengah	88,23	81,98	18.598,45	4.703,21		4.526	4.239	90,72			

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

3. Jasa Konstruksi

Pengelolaan jasa konstruksi di Jawa Tengah pada tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 meskipun Informasi Jasa Kontruksi pada tahun 2020 tidak dilakukan kegiatan dikarenakan pandemi Covid-19. Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2020 mencapai 1.138 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 750 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2020 sejumlah 3.288 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2.798 orang.

Tabel 2.61.

Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.671	1.853	1.080	750	1.138
2	Informasi Jasa Kontruksi {sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb), pelaksanaan event / pameran}	3	4	4	4	0
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang)	1.065	1.228	2.038	2.798	3.288

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2020

4. Bangunan Gedung Milik Daerah

Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar pada tahun 2020 adalah 117 komplek. Komplek Bangunan Gedung yang sudah diperiksa keandalannya sejumlah 20.

Tabel 2.62.

Jumlah Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Studi Keandalan

No	Instansi	Jumlah
1	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	1
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
3	Dinas Sosial	1
4	Dinas Ketenagakerjaan	1
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	1
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
8	Dinas Kesehatan	1
9	Kantor Satpol PP	1
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
12	RSUD Tugurejo	1
13	RSUD KRT Wongsonegoro	1
14	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1
15	RSJD Surakarta	1
16	RSJD Soedjarwadi Klaten	1
17	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	1

No	Instansi	Jumlah
18	Dinas SDA dan Tata Ruang	1
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	1
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1
	TOTAL	20

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2020

5. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah, diantaranya terkait dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Untuk mendukung kawasan strategis dimaksud, secara umum *grand design* pengembangan perhubungan di Jawa Tengah mendasarkan Dokumen Review Penataan Transportasi Wilayah (Tatrawil). Konsep rencana pengembangan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah sesuai dengan gambar berikut.

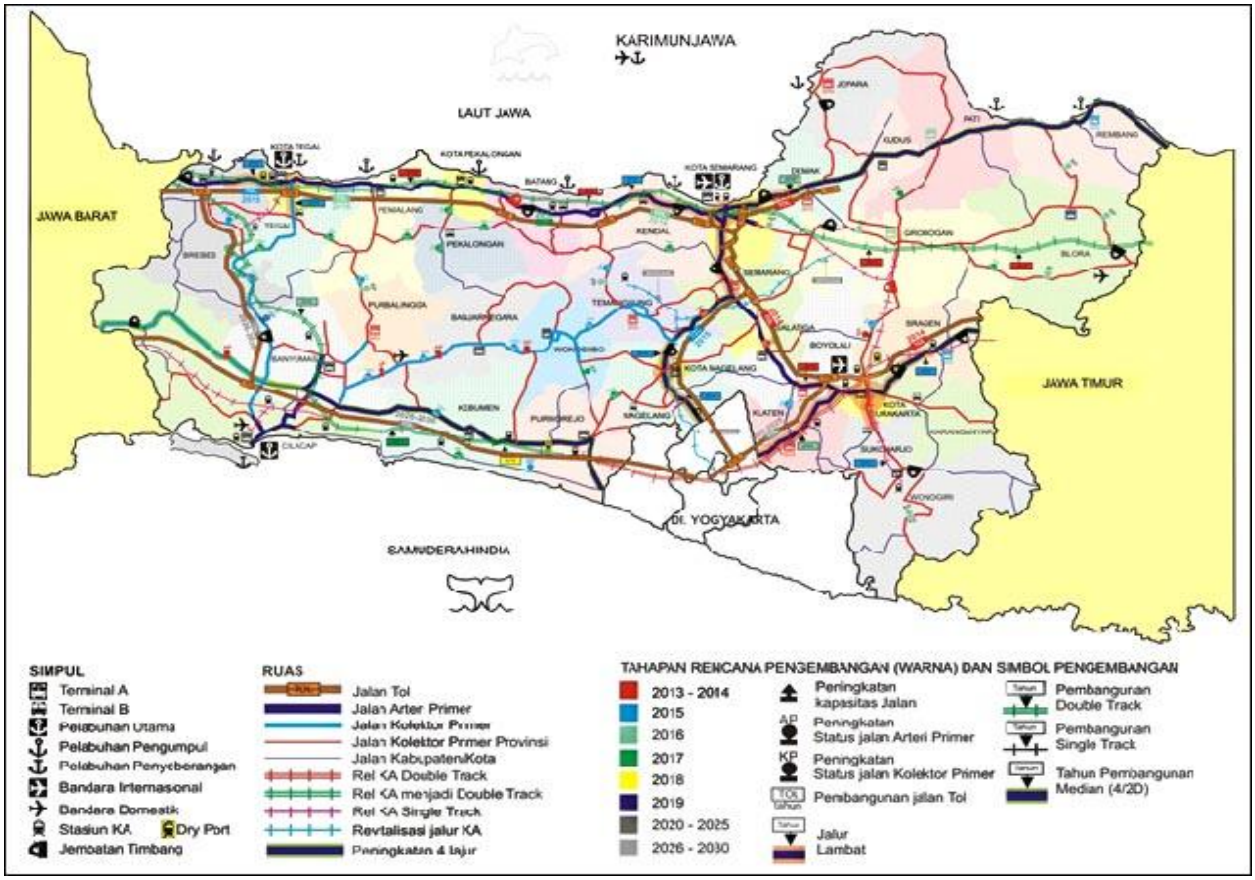

Sumber: Review Tatrawil, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.60.
Konsep Pengembangan Infrastruktur Perhubungan di Jawa Tengah

Saat terjadi pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, sarana prasarana perhubungan mendapatkan perhatian khusus karena pada simpul transportasi (pelabuhan, bandara, stasiun dan terminal) yang padat calon penumpang merupakan titik rawan terjadinya penularan virus serta berpotensi menjadi

pintu masuk orang positif Covid-19 dari luar masuk ke wilayah Jawa Tengah. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian. Pemerintah provinsi hanya mempunyai kewenangan pada perhubungan darat dan laut, namun demikian Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi untuk perhubungan udara dan perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut maupun udara.

a. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

Terminal bus merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

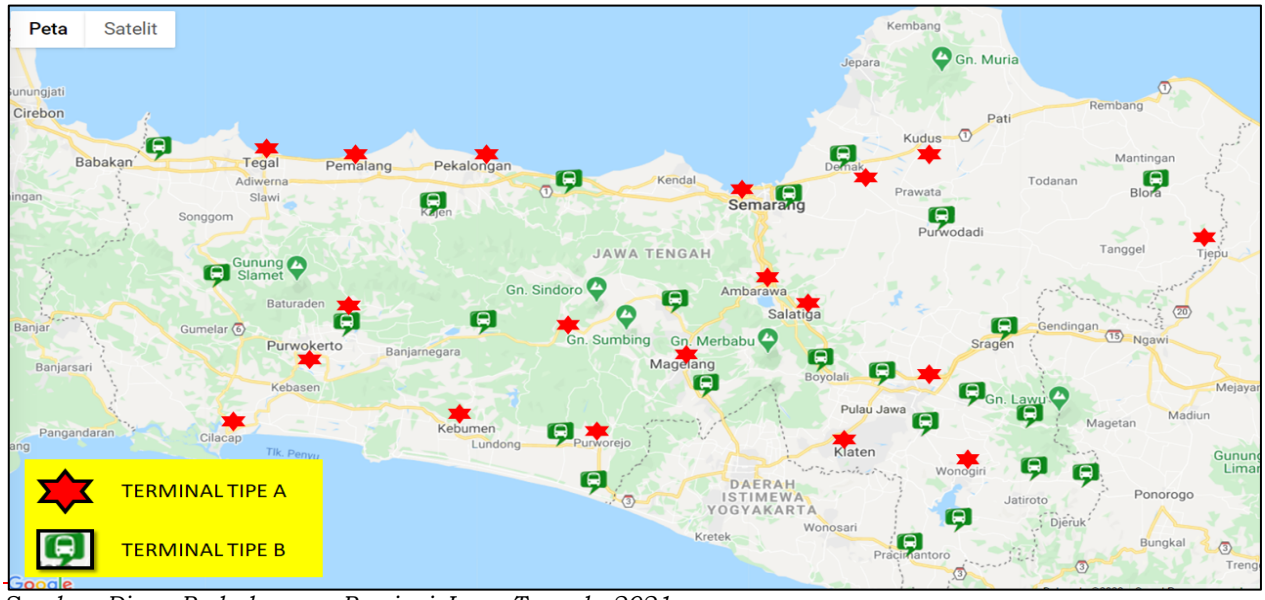

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.61.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2020 sejumlah 221 terminal yang terdiri dari 19 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi), dan ±178 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota). Terjadinya perubahan jumlah terminal mendasarkan tipenya dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya peralihan tipe serta adanya pembangunan terminal.

Tabel 2.63.
Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah terminal tipe A	18	17	17	17	19
2.	Jumlah terminal tipe B	24	24	24	24	24
3.	Jumlah terminal tipe C	78	77	151	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		**120**	**120**	**118**	**219**	**221**

Keterangan:
- *Sumber Terminal Tipe A = Kementerian Perhubungan, 2020*
- *Sumber Terminal Tipe B = Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020*
- *Sumber Terminal Tipe C = BAPPEDA Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, 2020*

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan terminal mendasarkan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2018 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 9 kabupaten/kota dan tipe B di 11 kabupaten/kota.

Tabel 2.64.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada
2	Kab. Demak	Demak*	Ada	Bintoro	Ada
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		
6	Kab. Grobogan		Ada	Purwodadi	Ada
	Wanarakuti				
7	Kab. Jepara		Ada		Ada
8	Kab. Kudus	Jati	Ada		
9	Kab. Pati		Ada		Ada
	Subosukowonosraten				
10	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
11	Kab. Boyolali		Ada	Penggung	Ada
12	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
13	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
14	Kab. Wonogiri	Giri Adipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro,	Ada

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
				Purwantoro, dan Baturetno	
15	Kab. Sragen		Ada	Pilangsari	Ada
16	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Bregasmalang				
17	Kab. Brebes			Bumiayu dan Tanjung	Ada
18	Kab. Tegal				Ada
19	Kota Tegal	Tegal	Ada		Ada
20	Kab. Pemalang	Induk Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
21	Kab. Pekalongan			Kajen	Ada
22	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
23	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Barlinmascakeb				
24	Kab. Banjarnegara		Ada	Banjarnegara	Ada
25	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
26	Kab. Banyumas	Purwokerto	Ada		Ada*
27	Kab. Cilacap	Bangga Bangun Desa	Ada		Ada
28	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		Ada
	Purwomanggung				
29	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Kutoarjo* dan Nampurejo	Ada
30	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
31	Kab. Magelang			Drs. Prayitno	Ada
32	Kota Magelang	Tidar	Ada		
33	Kab. Temanggung			Madureso	Ada
	Banglor				
34	Kab. Rembang		Ada		Ada
35	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada
J U M L A H		19 Terminal	26 Terminal	24 Terminal	27 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah & Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, Diolah, 2020
Catatan :
- *Terminal Tipe A mendasarkan SK Menteri Perhubungan No. 109 Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019*
- *Terminal Tipe B mendasarkan SK Gubernur No. 551.22/31 Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019*
- *Terminal Tipe A Demak dan Tipe B Kutoarjo masih dalam proses pembangunan*
- *Terminal Tipe A Kota Tegal merupakan peralihan dari Terminal Tipe C*

Pada tahun 2020, terdapat 178 buah terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang tidak mempunyai Terminal Tipe C.

Tabel 2.65.

Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2020*	
	KEDUNGSEPUR		
1.	Kab. Kendal	4	**Sukorejo, Boja*, Weleri** dan Kendal* (* : SK Bupati Kendal No. 231/211/2008)
2.	Kab. Demak	2	**Karangawen** dan Pucanggading (Mranggen)
3.	Kab. Semarang	7	Sisemut Ungaran, Ambarawa, Sumowono, Sruwen Tengaran, Suruh, Pos Terminal Bringin, Pos Terminal Kopeng Getasan
4.	Kota Semarang	2	**Cangkiran** dan Gunungpati (SK Walikota Semarang No. 551.22/1169 Tahun 2016)
5.	Kota Salatiga	1	Tamansari
6.	Kab. Grobogan	5	**Sulursari, Wirosari,** Angkotdes Purwodadi, **Godong** dan **Gubug**
	WANARAKUTI		
7.	Kab. Jepara	5	Welahan, **Pecangaan, Jepara**, **Bangsri** dan Kelet (SK Bupati Jepara No. 551.22/172 Tahun 2016)
8.	Kab. Kudus	5	Jetak, Kalirejo, Getas, Singocandi dan Padurenan
9.	Kab. Pati	3	Kembang Joyo*, **Juwana** dan **Tayu** (* : SK Bupati Pati No. 551.22/2174 2016, Juwana dan Tayu belum ada SK)
	SUBOSUKO WONOSRATEN		
10.	Kab. Sukoharjo	4	Sukoharjo, Bekonang, Watukelir dan Tawangsari
11.	Kab. Boyolali	13	**Karanggede**, Guwo, Klewor, Nogosari, Simo, Cepogo, Ampel, Sunggingan, Randuasri, Tambak, Tamansari, Bangak dan Selo
12.	Kota Surakarta	2	Kadipiro dan Semanggi
13.	Kab. Karanganyar	10	**Matesih, Palur**, Gondangrejo, Jongke, Jambangan, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan, Jumapolo dan Jatipuro
14.	Kab. Wonogiri	18	**Wonogiri**, **Ngadirojo**, Baturetno, Batuwarno, Tirtomoyo, Pracimantoro, **Wuryantoro**, **Eromoko**, Giri Belah, Manyaran, **Slogohimo**, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Jatisrono, **Jatiroto**, Sidoharjo dan **Girimarto**
15.	Kab. Sragen	7	Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, **Sumberlawang** dan **Gemolong**
16.	Kab. Klaten	7	**Penggung, Cawas, Teloyo**, **Pasar Klaten, Bendogantungan**, **Tulung,** dan **Delanggu**
	BREGASMALANG		
17.	Kab. Brebes	7	**Ketanggungan, Brebes**, Bumiayu, Jatibarang, Banjarharjo, Larangan dan Losari
18.	Kab. Tegal	3	Dukuhsalam, Adiwerna dan Trayeman (SK Bupati Tegal No. 769 Tahun 2017)
19.	Kota Tegal	0	Belum ada Terminal Tipe C

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2020*	
20.	Kab. Pemalang	8	**Belik, Moga, Comal, Randudongkal,** Grosir Comal, Angkutan Kota Pemalang, Petarukan dan Warungpring
	PETANGLONG		
21.	Kab. Pekalongan	5	Wiradesa, Kedungwuni, Doro, Kesesi dan Sragi
22.	Kab. Batang	5	Bandar, Bawang, Reban, Limpung, dan Blado
23.	Kota Pekalongan	0	Belum ada Terminal Tipe C
	BARLINMASCAKEB		
24.	Kab. Banjarnegara	4	Mandiraja, Karangkobar, Kalibening & Banjarnegara (Angkudes)
25.	Kab. Purbalingga	4	Bukateja, Kejobong, Jompo, dan Penaruban
26.	Kab. Banyumas	3	**Wangon*, Ajibarang*** dan **Baturaden**** (*sesuai SK Bupati Banyumas No. 480/324 Tahun 2016), ** : Terminal Baturaden dikelola oleh pariwisata)
27.	Kab. Cilacap	8	**Karangpucung, Sidareja**, **Majenang**, Kawunganten, **Adipala**, Sampang, Wanareja dan Kroya (SK Bupati Cilacap No. 551.2/591/17/2015)
28.	Kab. Kebumen	4	Kebumen, Gombong (bus dan non bus) dan Karanggayam (Perdesaan)
	PURWOMANGGUNG		
29.	Kab. Purworejo	3	**Kutoarjo**, Kongsi dan Terminal non bus Pasar Kutoarjo
30.	Kab. Wonosobo	4	Sawangan, Terminal Keselamatan Jalan Reco, Mendolo dan Stasiun (meliputi Pasar Induk/TPR Bhayangkara/Jl. Resimen (SK Bupati Wonosobo No. 551.21/630/2019)
31.	Kab. Magelang	6	**Borobudur, Salaman, Secang,** Grabag, Tegalrejo dan Bandongan
32.	Kota Magelang	1	Magersari
33.	Kab. Temanggung	7	Maron, Kerkop, **Ngadirejo, Candiroto,** Kranggan, Pingit dan Plaza
	BANGLOR		
34.	Kab. Rembang	7	Rembang, Lasem, Pamotan, Sarang, Sulang, Sumber dan Gunem (SK Bupati Rembang No. 551.4/0984/2016)
35.	Kab. Blora	4	Todanan, Kunduran, Ngawen, dan Wulung
JUMLAH SE JATENG		**178**	

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah, 2021

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/23 Tahun 2019 merupakan Perubahan dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2020, terdapat 24 terminal tipe B yang tersebar pada 17 kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2018 terdapat 9 terminal yang aset tanahnya belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (3 terminal lahan milik PT. KAI, 4 terminal lahan milik Pemerintah Kabupaten dan 2 terminal lahan milik Pemerintah Desa). Sebagai hasil beberapa upaya yang dilakukan, 3

terminal secara aset sudah sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Terminal Penggung, Kutoarjo dan Sukoharjo). Terminal Penggung merupakan pengganti Terminal Sunggingan (tukar guling dengan aset Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2019) dan Terminal Kutoarjo merupakan pengganti dari Terminal Suronegaran (aset tanah Terminal Kutoarjo merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020). Sehingga pada Tahun 2020 tersisa 6 terminal yang aset tanahnya belum milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RIJLLAJ) Jawa Tengah yang disusun tahun 2017 terdapat rekomendasi pembangunan simpul transportasi terminal tipe B sebanyak 12 terminal di 11 kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Rembang, Pati, Jepara, Magelang, Temanggung, Kebumen, Cilacap Bagian Timur dan Bagian Barat, Banyumas, Brebes serta Purworejo.

Tabel 2.66.
Kondisi Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
1. Kota Semarang	1. Penggaron	Layak Operasi	Milik Pemprov
2. Kab. Grobogan	2. Purwodadi	Layak Operasi	Milik Pemprov
3. Kab. Blora	3. Gagak Rimang	Layak Operasi	Milik Pemprov
4. Kab. Demak	4. Bintoro	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
5. Kab. Batang	5. Banyu Putih	Layak Operasi	Milik Pemprov
6. Kab. Pekalongan	6. Kajen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7. Kab. Temanggung	7. Madureso	Layak Operasi	Milik Pemprov
8. Kab. Magelang	8. Drs. Prayitno	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
9. Kab. Boyolali	9. Penggung	Layak Operasi	Milik Pemprov (2019)
10. Kab. Sragen	10. Pilangsari	Layak Operasi	Milik Pemprov
11. Kab. Karanganyar	11. Tegalgede	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
	12. Tawangmangu	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
12. Kab. Wonogiri	13. Jatisrono	Layak Operasi	Milik Pemprov
	14. Baturetno	Layak Operasi	Milik Pemprov
	15. Pracimantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
	16. Purwantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
13. Kab. Purworejo	17. Kutoarjo	Proses Pembangunan	Milik Pemprov (2020)
	18. Nampurejo	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
14. Kab. Sukoharjo	19. Kartosuro	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
	20. Sukoharjo	Layak Operasi	Milik Pemprov
15. Kab. Banjar	21. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
16. Kab. Purbalingga	22. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
17. Kab. Brebes	23. Bumiayu	Layak Operasi	Milik Pemprov
	24. Tanjung	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

2) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Kewenangan Provinsi

Pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan Provinsi merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Jawa Tengah karena tingkat pemenuhannya cukup rendah dan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2.67.
Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, Guard-rail, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	6,04	7,48	7,74	12,18	16,93
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	-	3,85	3,85	4,55	4,55

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan pada tahun 2020 di jalan yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 16,93 persen, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 sebesar 6,04 persen.

Tabel 2.68.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rambu Jalan	2.133	280	375	600	-
2.	RPPJ	179	50	50	60	-
3.	APILL	7	-	8	6	-
4.	*Guardrail*	2.000	560	448	290	30
5.	Marka Jalan	80.470	15.835	12.001	102.000	-
6.	LPJU	205	263	263	513	150

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2019 sejumlah 513 unit relatif meningkat dibanding tahun 2016 sejumlah 205 unit. Namun, mengalami penurunan di tahun 2020 sejumlah 150 unit karena adanya kebijakan penganggaran yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

3) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, kondisi tahun 2018 setidaknya terdapat 155 titik lokasi daerah rawan kecelakaan (DRK), dimana 136 titik berada di ruas kewenangan pemerintah provinsi. Penanganan DRK di Jawa Tengah terus dilakukan penanganan, adapun perkembangan jumlah DRK pada tahun 2019 menurun menjadi 124 lokasi dan tahun 2020 kembali menurun menjadi 112 lokasi.

Data kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah pada tahun 2020 terdapat 21.396 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 3.508 meninggal dunia, 48 luka berat, 24.495 luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 14.746.525.000,00.

Tabel 2.69.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Laka Lantas	Kejadian	19.884	17.522	19.016	25.962	21.396
2.	Jumlah Korban MD	Jiwa	4.437	4.126	4.116	4.141	3.508
3.	Korban Luka Berat	Orang	200	114	97	96	48
4.	Korban Luka Ringan	Orang	23.699	20.495	21.679	30.555	24.495
5.	Kerugian Materiil	Rupiah (Rp.000)	14.347.32	12.351.991	14.138.632	17.858.087	14.746.525

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2021

Sebagai gambaran kepadatan lalu lntas di jalan kewenangan provinsi, setidaknya terdapat 13 ruas kewenangan provinsi yang masuk dalam kriteria rawan macet jika dilihat dari aspek perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan (VCR).

Tabel 2.70.
Ruas Jalan Provinsi yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2020

No.	Ruas jalan	Status	Fungsi	VCR 2019	2020		
					Kap.	Vol.	VCR
1.	Purbalingga - Bobotsari	P	K2	0,70	3.137,20	577	0,18
2.	Semarang - Godong	P	K2	0,77	2.778,44	2.154	0,78
3.	Nguter - Wonogiri	P	K2	1,59	2.874,34	1.170	0,41
4.	Sukorejo (Blimbing) - Boja - Cangkiran	P	K2	0,60	2.474,40	918	0,37
5.	Kudus - Margoyoso	P	K2	0,90	2.711,54	1.984	0,73
6.	Kretek - Kepil	P	K2	0,57	2.724,39	927	0,34
7.	Sukoharjo - Weru - Watu Kelir	P	K2	0,46	2.482,48	415	0,17
8.	Purwodadi - Wirosari	P	K2	1,26	2.693,03	1.295	0,48

No.	Ruas jalan	Status	Fungsi	VCR 2019	2020		
					Kap.	Vol.	VCR
9.	Patean (Kdt) - Parakan	P	K2	0,42	2.664,88	719	0,27
10.	Palur - Karanganyar	P	K2	0,36	5.232,60	715	0,14
11.	Kalimanah - Purbalingga (Bmu)	P	K2	0,22	3.290,68	1.199	0,36
12.	Surakarta - Gemolong - Geyer (Skt)	P	K2	0,10	2.564,01	1.249	0,49
13.	Jati - Klambu (Ptb)	P	K2	1,21	2.567,11	1.037	0,40

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.62.

Peta Persebaran Kemacetan Mendasarkan Beban Jalan (VCR)

4) Perijinan Trayek Angkutan Umum

Jumlah ijin trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sampai dengan tahun 2018 sebanyak 902 trayek dan jumlah ijin trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sejumlah 269 trayek, sedangkan Mobil Penumpang Umum sejumlah 397.667 unit. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2014. Perkembangan pelayanan angkutan jalan di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	269	269	269	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	3.757	4.422	4.666	4.666	4.666
4.	Jumlah bus (unit)	12.686	12.689	12.737	12.737	12.737
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Pelayanan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun adalah jumlah angkutan wisata (kendaraan) dan jumlah bus (unit). Untuk pelayanan angkutan pemadu moda telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut:

a) Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Kudus PP
b) Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Salatiga PP
c) Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Pekalongan PP
d) Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Wonogiri PP
e) Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP
f) Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru terlayani 1 (satu) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP.

5) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. Jumlah penumpang KM. Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara – Karimunjawa pp pada tahun 2020 melayani penumpang sejumlah 30.924 orang yang menurun dibandingkan tahun 2019 sejumlah 75.679 orang. Penurunan tersebut disebabkan karena pembatasan kapasitas penumpang sebagai salah satu protokol kesehatan pandemi Covid-19, dan juga karena ditutupnya objek wisata Karimunjawa selama pandemi Covid-19. Sedangkan penumpang KM Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penumpang menjadi 27.162 orang dibandingkan tahun 2019 sejumlah 102.684 orang karena faktor penyebab yang sama dengan penurunan jumlah penumpang pada KM. Siginjai.

Sementara KM. Kartini yang melayani lintas Semarang – Karimunjawa – Jepara pp, selama tahun 2020 tidak beroperasi karena adanya kebijakan penganggaran yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.63.
Pelayanan Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini I

KMC Kartini mulai beroperasi pada tahun 2004, dimana kondisi saat itu aksesibilitas menuju destinasi wisata di Kepulauan Karimunjawa masih sangat terbatas. Kondisi KMC Kartini 1 sampai dengan tahun 2020, umur teknisnya tergolong cukup tua (±16 tahun). Sehingga semakin memerlukan perawatan berupa *overhaul* dan *docking* rutin tahunan sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Izin HSC (*Hight Speed Craft*). Seiring perkembangan jaman, saat ini sudah terdapat beberapa layanan penyeberangan dan penerbangan untuk mendukung pariwisata.

Tabel 2.72.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*)	90.818	68.015	75.525	75.679	72.962
2.	Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang)	1.498	3.939	1.796	2.725	0
3.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspress 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	82.791	82.913	103.617	102.684	98.998
4.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspress 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang)	3.053**)	13.853	off	off	off

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020
*Keterangan : *)KM. Muria pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi, dan diganti dengan KMC Siginjai*
***) KMC Bahari Express II (Kendal – Karimunjawa) mulai beroperasi bulan Agustus 2016*

Sebagai dukungan pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi). Pada tahun 2020 telah dilakukan identifikasi aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah, dimana setidaknya terdapat 5 aktivitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota. Sehingga setidaknya diperlukan 10 sisi dermaga (plengsengan) untuk meningkatkan keselamatan aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 sudah ditetapkan trayek lintas penyeberangan dan fasilitasi proses perijinannya.

Tabel 2.73.
Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho	Desa Lutungmati (Batang)	Non Permanen	Ada (2019)
	Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Tegalsari (Kendal)	Non Permanen	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	Belum Ada
	Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Jatipurwo (Kendal)	Non Permanen	Belum Ada
3.	Sungai Pemali	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	Belum Ada
	Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Bojong (Kab. Tegal)	Non Permanen	Belum Ada
4.	Sungai Kaligangsa	Desa Randusangawetan (Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
	Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Sudah Ada
5.	Sungai Bengawan Solo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
	Surakarta – Sukoharjo	Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

6) Angkutan Umum Massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum massal yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.

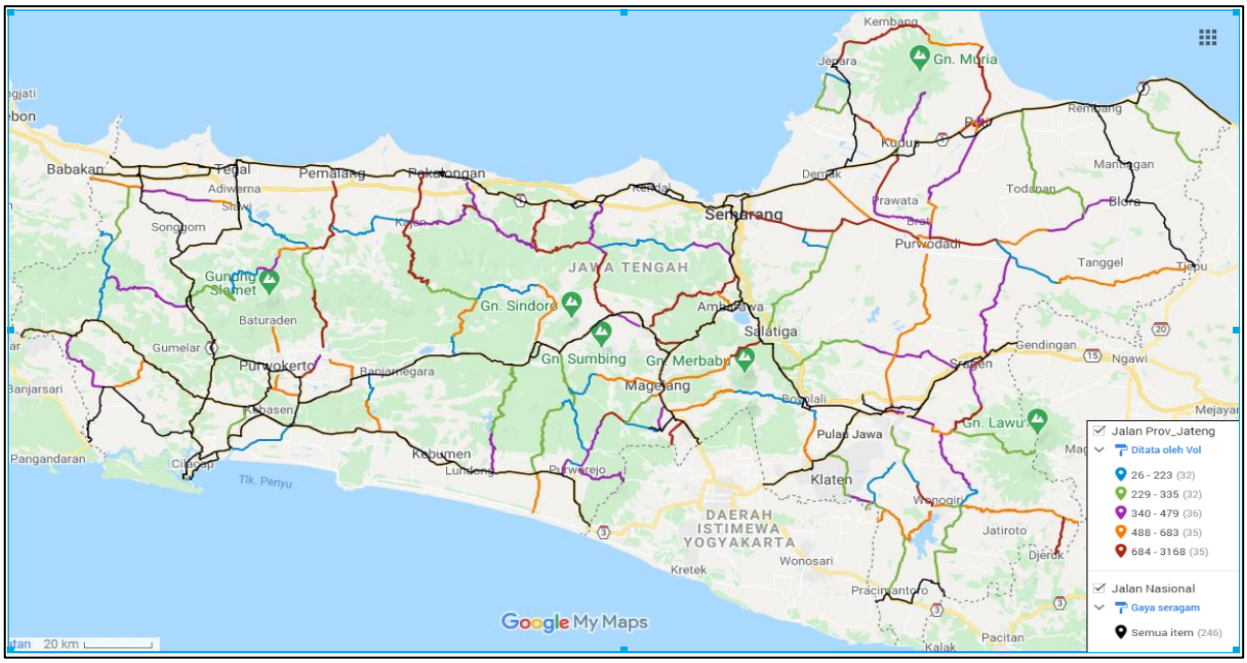

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.64.

Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah

Untuk membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utamanya pada wilayah perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya. Salah satu upaya yang ditempuh dengan pengembangan transportasi massal perkotaan pada wilayah aglomerasi.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.65.

***Launching* Layanan BRT Trans Jateng**

Angkutan umum massal di kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2020 telah terdapat pelayanan di 5 (lima) koridor, yaitu Terminal Bawen Kabupaten Semarang – Stasiun Tawang Kota Semarang, Terminal Bulupitu Purwokerto – Terminal Bukateja Purbalingga, Terminal Mangkang Kota Semarang – Terminal Bahurekso Kabupaten Kendal, Terminal Tirtonadi Surakarta – Sumber Lawang Kabupaten Sragen via Sangiran dan Stasiun Kutoarjo Purworejo Borobudur Kabupaten Magelang. Sehingga dari kebutuhan jumah koridor angkutan aglomerasi sejumlah 14 koridor, sehingga pada tahun 2020 masih terdapat kekurangan 9 koridor.

Tabel 2.74.
Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Purwodadi
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri
		9. Sukoharjo – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)
		11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Temanggung	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Adanya angkutan umum massal kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target tahun 2030 mencapai 32 persen). Jumlah penumpang yang dilayani oleh Trans Jateng dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mencapai kenaikan yang cukup signifikan, namun adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah penumpang yang dilayani Trans Jateng di tahun 2020. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Trans Jateng telah melayani total 8.819.918 orang, dengan jumlah penumpang setiap tahun terus mengalami kenaikan dari 724.320 orang di tahun 2017 menjadi 2.419.549 orang di tahun 2020.

Tabel 2.75.
Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2017 – 2020

No	Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	Total 2017-2020
	Kedungsepur					
1.	Terminal Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	724.320	1.886.694	2.117.390	1.051.768	5.780.172
2.	Terminal Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019)	-	-	178.943	592.411	771.354
	Barlinmascakeb					
3.	Purwokerto – Purbalingga (Agustus 2018)	-	351.896	1.141.126	613.804	2.106.826
	Subosukowonosraten					
4.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	-	55.442	55.442
	Purwomanggung					
5.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	-	106.124	106.124
Total 5 Koridor		**724.320**	**2.238.590**	**3.437.459**	**2.419.549**	**8.819.918**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Pada tahun 2019 dan 2020, terdapat dinamika kebijakan Pemerintah Pusat (Perpres 79 Tahun 2019 dan Perpres 109 Tahun 2020) untuk membangun kawasan industri di Brebes dan Batang untuk mendukung kebijakan dimaksud diperlukan kajian kelayakan kebutuhan angkutan umum massal untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan industri.

Sampai dengan tahun 2020 untuk angkutan umum di kawasan perbatasan (angkutan perintis) khususnya pada perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Brebes sekaligus juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat telah terdapat pada 3 trayek angkutan perintis yang dilayani oleh DAMRI (Rute : Sidareja – Cinangsi, Kawunganten – Gandrungmangu – Citembong dan Jetis – Adipala).

7) Angkutan Umum *Online*

Perkembangan angkutan umum mengalami dinamika yang cukup tinggi, dimana terdapat angkutan umum yang berbasis teknologi informasi atau *online*, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Secara teknis kendaraan roda 2 tidak termasuk kategori angkutan umum.

Mendasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang terakhir diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur dimaksud mengatur salah satunya untuk penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (*online*). Pada Tahun 2020 telah diterbitkan 918 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

Tabel 2.76.
Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (*Online*) Tahun 2017 – 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Kedungsepur	266	77	1.196	405
2.	Bregasmalang	105	-	47	28
3.	Barlingmascakeb	60	12	180	219
4.	Subosukowonosraten	90	-	721	115
5.	Purwomanggung	81	-	76	235
6.	Petanglong	60	-	17	26
7.	Banglor	-	-	-	-
8.	Wanarakuti	-	-	23	2
JUMLAH		**662**	**89**	**2.237**	**1.030**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

b. Perhubungan Laut

Pelabuhan laut memiliki peran dan nilai strategis sebagai salah satu pintu masuk dan keluar dari suatu wilayah. Mendasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 5 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, Tegal, Batang, Juwana, dan Sluke), dan 5 Pelabuhan Pengumpan Regional dan 3 pelabuhan pengumpan lokal.

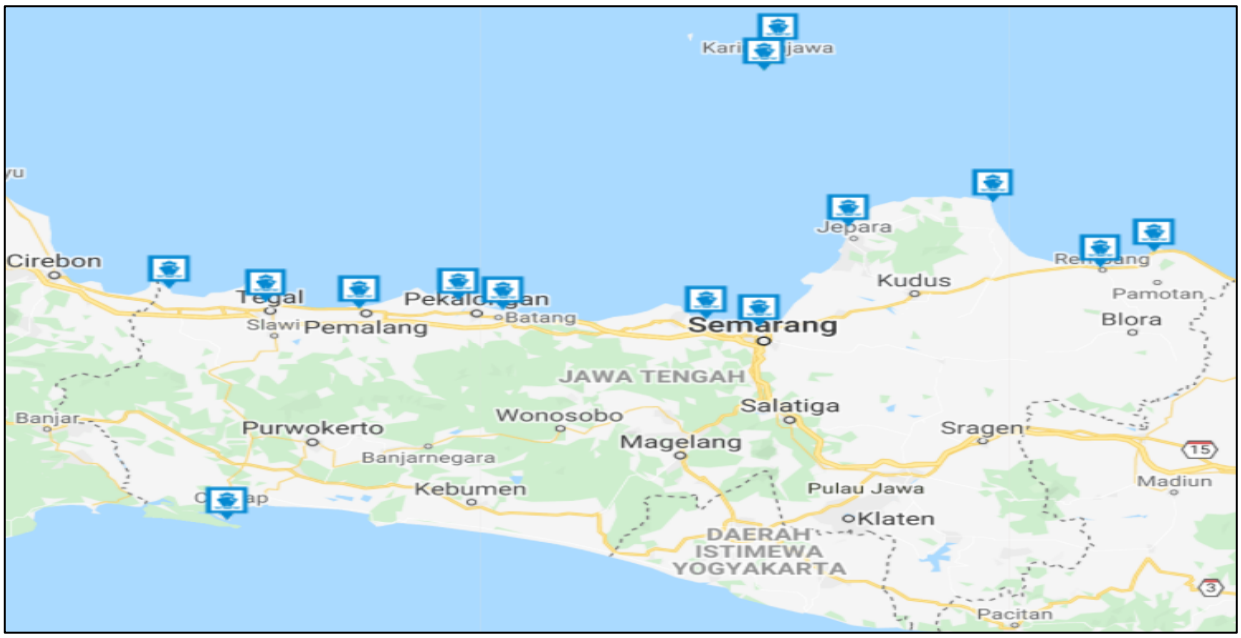

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.66.
Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Pelabuhan regional dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Tabel 2.77.
Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Pelabuhan	Hierarki dalam RIPN	Keterangan
1.	Tanjung Emas Semarang	Utama	RTRWN : Pemantapan Pel. Utama
2.	Tanjung Intan Cilacap	Pengumpul	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
3.	Tegal	Pengumpul	
4.	Batang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
5.	Sluke Rembang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
6.	Tasik Agung Rembang	Pengumpan Regional	
7.	Juwana Pati	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
8.	Jepara	Pengumpan Regional	
9.	Karimunjawa Jepara	Pengumpan Regional	
10.	Legon Bajak Jepara	Pengumpan Regional	
11.	Kendal	Pengumpan Regional	RTRWN : Pel. Angk. Penyeberangn Saat ini = Wil. Ker. Tanjung Emas
12.	Brebes	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
13.	Pekalongan	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
14.	Pemalang	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)

Sumber : PP 13/2017 tentang Perub. PP 26/2008 tentang RTRWN & SK Menhub. KP.432/2017 Tentang RIPN

Kondisi sampai dengan tahun 2020, proses pengalihan aset dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi masih belum selesai (aset dan pengelolaannya masih di Kementerian Perhubungan). Sampai dengan awal tahun 2020 masih dilakukan proses reviu Keputusan Menteri Perhubungan Nomer KP.432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Jumlah kunjungan kapal tahun 2020 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 2.663 *call* mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 3.804 *call*, hal ini disebabkan faktor pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekpor-impor.

Tabel 2.78.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelabuhan	9	14	14	14	14
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	2.001	2.791	3.410*)	3.804	2.663
	b. GRT (GT)	15.390.022	21.819.637	24.902.093*)	30.236.211	22.999.480
	c. Kargo (ton)	11.071.023	`12.690.037	13.919.940*)	14.682.120	14.185.650
	d. Kontainer (*Teus*)	602.473	593.575	539.158*)	658.303	355.774
	e. Penumpang (orang)	286.106	254.947	280.142*)	390.693	134.997
	f. *Dweelling Time* TPKS Impor	-	5,94	4,5	4,91	3,84
	g. *Dweelling Time* TPKS Expor	-	2,49	3,4	2,48	2,78
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (*call*)	1.359	410	354**)	1.240	1.441
	b. GRT (GT)	20.764.992	4.778.416	1.971.910**)	23.713.251	28.826.775
	c. Kargo (ton)	6.195.006	5.889.713	6.276.236**)	16.586.884	8.524.893

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Selama tahun 2020 *dwelling time* Pelabuhan Tanjung Emas (sebagai Pelabuhan utama di Jawa Tengah) mencapai 3,84 hari (impor) yang mengalami perbaikan kinerja jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,91 hari. Namun untuk ekspor mengalami penurunan kinerja dari 2,48 hari menjadi 2,78 hari.

c. Perhubungan Udara

Terdapat 2 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang dan Adi Sumarmo Surakarta, serta 2 bandara perintis yang sudah beroperasi yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara dan Tunggul Wulung Cilacap, serta 2 rencana pengoperasian dan pengembangan bandara yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga (Wirasaba) dan Bandara Ngloram Kabupaten Blora.

Telah dioperasionalkan terminal penumpang baru Bandara Ahmad Yani Semarang pada tahun 2018 dengan kapasitas ±6 juta penumpang per tahun, atau hampir 9 kali lipat dari kapasitas terminal sebelumnya.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.67.
Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional A. Yani Semarang

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta pada tahun 2020 telah terdapat intermoda transportasi dengan adanya kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan. Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Jumlah barang baik domestik maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2019.

Tabel 2.79.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bandara	4	4	4	6	6
2	Bandara Ahmad Yani					
	a. Penumpang domestik (orang)	3.690.633	4.239.732	4.943.701	3.678.104	1.342.341
	b. Penumpang internasional (orang)	143.860	188.691	216.548	228.700	35.728
	c. Barang domestik (kg)	22.262.578	16.844.792	29.485.686	15.788.447	9.157.070
	d. Barang internasional (kg)	1.765.117	766.173	2.226.842	2.086.421	239.699
3	Bandara Adi Soemarmo					
	a. Penumpang domestik (orang)	1.819.288	1.193.606	1.303.570	1.565.093	516.780
	b. Penumpang internasional (orang)	100.245	57.489	60.032	155.400	17.198
	c. Barang domestik (kg)	5.746.845	3.238.753	7.808.387	7.074.726	1.596.685
	d. Barang internasional (kg)	2.023.610	4.316	968.226	2.982.541	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewadaru pada tahun 2019 melalui perpanjangan *runway* dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter dan perluasan Gedung terminal penumpang dari 120 m^2 menjadi 220 m^2 untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan. Pada tahun 2020 terdapat pembangunan pagar pengaman bandara dan talud, tahun 2021 direncanakan perpanjangan *runway* dari 1.400 meter menjadi 1.600 meter dan peningkatan fasilitas sisi darat.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.68.
Apron, Terminal dan *Runway* Bandara Dewadaru Karimunjawa

Bandara Tunggul Wulung Cilacap dominan digunakan sebagai sarana pendidikan sekolah penerbangan (*flying school*). *Run way* sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil. Kondisi saat ini terutama untuk landas pacu Bandara Tunggul Wulung tidak memungkinkan untuk diperpanjang karena terdapat kendala (*obstacle*) dilapangan.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.69.
Bandara Tunggul Wulung Kabupaten Cilacap

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih diperlukan persebaran bandara untuk pemerataan pembangunan. Untuk wilayah tengah dan selatan, karena Bandara Tunggul Wulung Cilacap sulit untuk dikembangkan, maka dilakukan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan *progres*s pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2020 berupa proses perpanjangan *runway* menjadi 1.600 meter, pembangunan *apron, taxiway* dan jalan akses.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.70.

***Ground Breaking* Bandara JB Soedirman oleh Presiden pada 23 April 2018**

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur sedang dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, dimana sampai dengan tahun 2020 *progress* pembangunannya sampai dengan pembangunan fisik terminal penumpang (Tahap I), *Airfield Lighting System* (AFL) dan perpanjangan *runway* menjadi 1.600 meter, rekonstruksi apron dan pembangunan pagar. Adapun *sharing* Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Blora) mendasarkan nota kerjasama adalah pada penyediaan lahan.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.71.

Progres Perkembangan Bandara Ngloram Cepu Kabupaten Blora

d. Perkeretaapian

Hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah terdapat jaringan rel kereta api (aktif dan non aktif), yang berpotensi digunakan sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan raya berkurang. Jika distribusi barang utamanya untuk jarak sedang dan jauh dapat dilayani dengan jaringan rel kereta api dapat menurunkan biaya logistik sehingga daya saing daerah akan meningkat.

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 sepanjang 1.645,65 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (56,48 persen dari total panjang rel), dan 716,15 km jalur rel non aktif/belum operasional (43,52 persen dari total panjang rel). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Kota Jakarta dan Kota Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan masih diperlukan lanjutan penanganan sampai dengan semua jaringan rel tuntas dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.

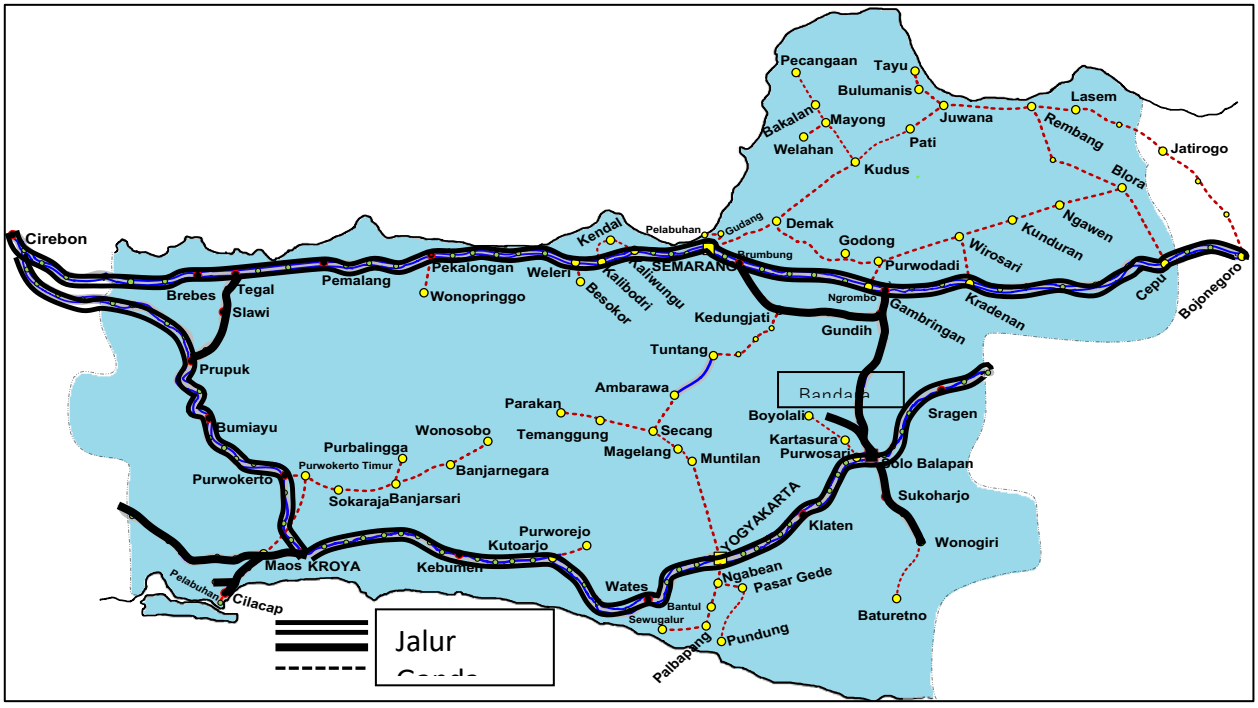

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.72.
Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.73.
Peta Jaringan *Loop* Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Di Jawa Tengah terdapat 1.369 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebagian besar terdapat di jalan kewenangan kabupaten/kota sebesar 1.304 titik atau 95,25 persen dari total perlintasan. Kondisi perlintasan terdiri dari 108 perlintasan tidak sebidang (terdiri dari 23 *fly over* dan 85 *underpass*) dan 1.262 sebidang (372 berpalang pintu/dijaga dan 889 belum dilengkapi dengan palang pintu). Perlintasan sebidang yang terletak di perkotaan yang lalu lintasnya cukup tinggi berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan. Perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.80.
Perlintasan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2019

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		*Underpass*		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2,85	10	43,48	6	7,06	22	5,91	1	0,11
2.	Provinsi	26	1,90	0	0,00	1	1,18	24	6,45	1	0,11
3.	Kab/Kota	1304	95,25	13	56,52	78	91,76	326	87,63	887	99,78
Jumlah		**1369**	**100**	**23**	**100**	**85**	**100**	**372**	**100**	**889**	**100**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Khusus untuk jalan yang merupakan kewenangan provinsi, terdapat 26 titik perlintasan dengan jalur rel kereta api yang terdiri dari 25 titik perlintasan sebidang dan 1 titik tidak sebidang yang tersebar di 12 kabupaten/kota yang meliputi 4 Daerah Operasi (DAOP) PT. KAI. Beberapa titik sudah mendesak memerlukan penanganan dengan perlintasan tidak sebidang karena telah menyebabkan kemacetan utamanya pada Kabupaten Grobogan dan Cilacap.

Tabel 2.81.

Perlintasan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
	Perlintasan Sebidang				
	DAOP 3 Cirebon				
1.	Kersana – Bandungsari	263	264+138	Kab. Brebes	Berpalang Pintu
	DAOP 4 Semarang				
2.	Wiradesa – Kelibening	115	94+425	Kab. Pekalongan	Berpalang Pintu
3.	Semarang – Godong	15&17	13+257	Kab. Demak	Berpalang Pintu
4.	Tegowanu–Tanggung–Kapung	33	23+025	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
5.	Gubug – Kapung – Kedungjati	39	30+840	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
6.	Gubug – Kapung – Kedungjati	27	33+832	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
7.	Purwodadi – Geyer	81	58+880	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
8.	Purwodadi – Geyer	6	006+833	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
9.	Singget – Doplang – Cepu	99	65+202	Kab. Blora	Berpalang Pintu
10.	Singget – Doplang – Cepu	72	42+634	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
11.	Kuwu – Galeh	54	32+897	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
	DAOP 5 Purwokerto				
12.	Buntu – Kroya – Slarang	409	402+292	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
13.	Menganti – Kesugihan	2	387+325	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
14.	Menganti – Kesugihan	467	387+966	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
15.	Sidareja – Cukangleuleus	441	339+819	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
16.	Jl. Veteran (Cilacap)	26	21+295	Kab. Cilacap	Tidak Ada Pintu
17.	Kutoarjo – Ketawang	610	479+174	Kab. Purworejo	Berpalang Pintu
	DAOP 6 Yogyakarta				
18.	Purwodadi – Geyer	123	80+144	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
19.	Purwodadi – Geyer	138	84+703	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
20.	Gemolong – Andong	146	89+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
21.	Sragen – Batujamus	72	233+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
22.	Karangwuni – Cawas – Jentir	251	130+530	Kab. Klaten	Berpalang Pintu
23.	Sukoharjo – Nguter	19	14+990	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
24.	Surakarta – Sukoharjo	9	10+185	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
25.	Palur – Karanganyar	108	256+761	Kab.Karanganyar	Berpalang Pintu
	Perlintasan Tidak Sebidang				
1	Jl. A. Yani (Surakarta)	-	-	Kota Surakarta	*Underpass*

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Untuk pelayanan perkeretaapian jumlah penumpang dan jumlah barang terangkut pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah penumpang kereta api tahun 2020 sebesar 8.318.591 orang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 24.638.063 orang. Jumlah stasiun KA di Jawa Tengah cenderung tetap yaitu sejumlah 106 stasiun. Sebab penurunan jumlah perlintasan KA di Jawa Tengah mulai pada tahun 2015 karena ditutup sehubungan dengan pembangunan *double track*/rel ganda kereta api oleh Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.82.
Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jml penumpang (orang)	19.711.021	18.334.400	25.624.133	24.638.063	8.318.591
2.	Jumlah barang terangkut (ton)	1.480.612	1.617.727	1.939.940	2.056.546	1.902.245
3.	Jml stasiun KA	140	140	140	106	106
4.	Jml Perlintasan KA di Jawa Tengah	1.395	1.317	1.369	1.168	1.369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Di Jawa Tengah terdapat kegiatan pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) yang terdiri dari Lintas Utara dan Lintas Selatan. *Double track* lintas selatan Jawa terdiri dari *double track* Purwokerto - Kroya dan Solo - Sragen (Palur – Kedungbanteng) yang direncanakan selesai pada tahun 2018. Progres fisik pembangunan *double track* Purwokerto – Kroya pada tahun 2020 sebesar 99,64 persen, sedangkan untuk Kroya – Kutoharjo sudah selesai 100 persen. Progres fisik pembangunan *double track* Solo – Sragen (Palur – Kedung banteng) sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2018 dengan panjang lintasan 27,9 km.

Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jawa Tengah telah dikembangkan sistem angkutan rel di wilayah perkotaan Solo Raya yaitu pengembangan Kereta Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (mulai operasional Desember 2019). Jaringan KA BIAS menghubungkan Stasiun Bandara Adi Soemarmo dengan Stasiun Solo Balapan (sepanjang 12,77 km) yang direncanakan diperpanjang sampai dengan Stasiun Klaten sepanjang 43,77 km (rencana mulai 2021). Pada tahun 2020 juga sudah dikembangkan Kereta Rel Listrik (KRL) Solo – Jogjakarta (pengganti layanan KA Prambanan Ekspress/Prameks) yang akan menjadi KRL ke-2 di Indonesia setelah KRL Jabodetabek yang direncanakan mulai fungsional di tahun 2021.

Tabel 2.83.

Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
1.	Kedungjati – Tuntang	32	FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL 2015, Tanah 2016, Proses Review DED
2.	Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas	2,9	FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Masih ada tanah warga yang proses gugatan pengadilan. Pembebasan Lahan 2,1 Km sisa 400 m ditempati 56 warga (Anggaran dampak social dan konstruksi APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021)
3.	Purwokerto - Wonosobo	94	FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub kesesuaian RTRW 2016, Penetapan Trase 2016, Rencana : 2018 - 2023
4.	Semarang – Demak – Kudus	52	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Studi SID APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021. Studi SID APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021. Rencana 2021 – 2030
5.	Kudus – Pati – Rembang	60	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Rencana 2021 – 2030
6.	Bedono – (Secang – Parakan) – Magelang – Yogyakarta : - Magelang – Yogyakarta - Magelang – Secang – Parakan	 46 37	FS 2013, Kajian Trase Bedono – Secang – Magelang 2014, Rekom Gubernur 2019, Studi Kelayakan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar akses jalur kereta 2018, Studi DED APND 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali 2021. Rencana 2018 – 2024
7.	Cepu – Rembang	72	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
8.	Purwosari – Wonogiri - Baturetno	82	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
9.	Wonosobo – Magelang	29,6	Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang		507,5	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2020

6. Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 930,44 km/luas DAS 4.425,36 km^2) dan WS Bodri Kuto (panjang 355,03 km/luas DAS 1.647,40 km^2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2020 tercatat 52,21 persen (691,07 km dari 1.323,64 km), sedikit meningkat dibandingkan

tahun 2019 sebesar 52,2 persen. Selama 6 tahun terakhir (tahun 2015-2020), persentase sungai dalam kondisi baik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.

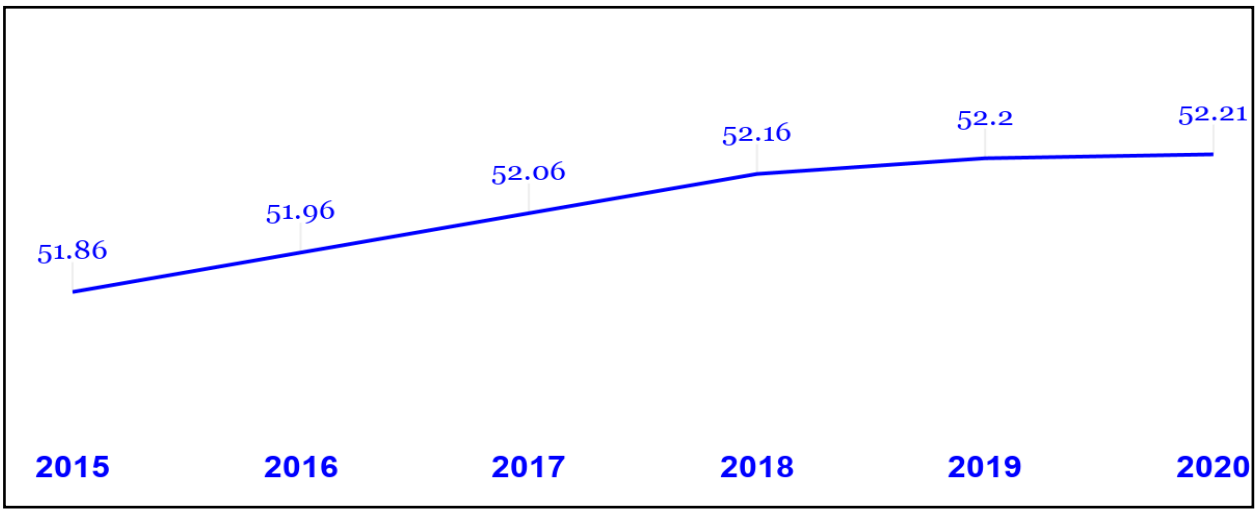

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.74.
Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2020 (%)

Bencana banjir juga dapat disebabkan oleh luapan sungai. Tercatat luasan daerah bebas genangan akibat banjir di Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Dari luas total wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha), luas daerah bebas genangan banjir pada tahun 2020 seluas 3.122.355 ha (95,94 persen) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 seluas 3.117.611 ha (95,79 persen).

Tabel 2.84.
Penurunan Luasan Daerah Genangan Akibat Banjir (Ha) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Genangan turun menjadi (Ha)	156.812	151.812	146.805	141.801	136.801	132.057
Luas Genangan yang bisa diturunkan tiap tahun (Ha)	5.049	5.000	5.007	5.004	5.000	4.744

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2021

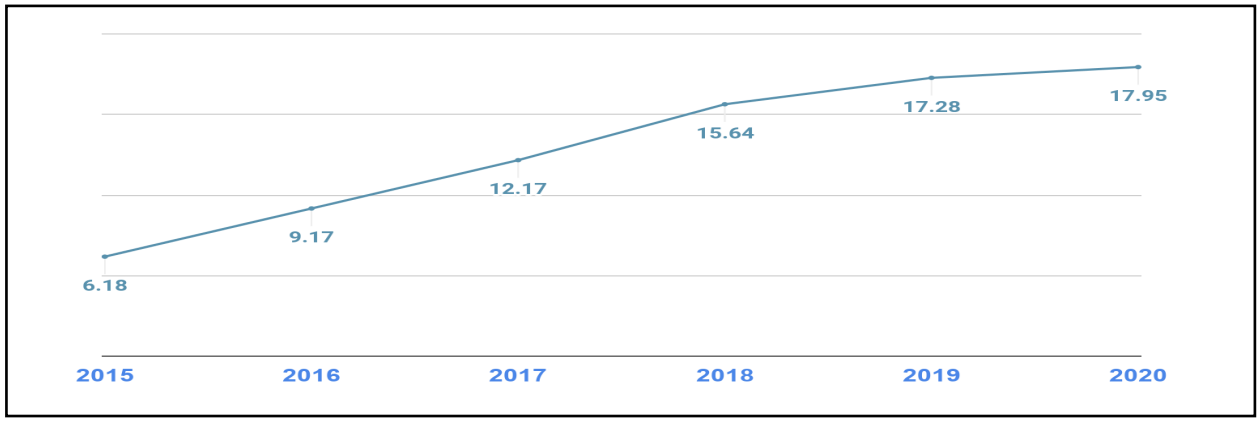

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.75.
Persentase Daerah Bebas Genangan Banjir di Jawa Tengah
Tahun 2015 – 2020 (%)

Di Jawa Tengah, kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m^3/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung. Di Jawa Tengah, total luas area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan pusat seluas 347.674 ha (36,45 persen), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865 ha (9,11 persaen) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha (54,44 persen).

Tabel 2.85.
Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	33
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.542

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, masih dijumpai jaringan irigasi dalam kondisi rusak hingga rusak ringan dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Kerusakan jaringan irigasi sampai tahun 2020 tidak ada yang masuk dalam kategori rusak berat, namun demikian jaringan irigasi dengan kondisi rusak ringan sampai sedang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.86.

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2020

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total Luas (Ha)
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
2016	1.730	6	67.754	73	17.044	19	337	2	86.865
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865
2019	4.941	6	66.723	77	15.201	17	0	0	86.865
2020	4.333	5	67.178	77	15.354	18	0	0	86.865

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan sebaran kondisi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota di tahun 2019 dan 2020, persentase kondisi baik irigasi tercatat ada 11 kabupaten dibawah 50 persen, 11 kabupaten antara 50 – 70 persen, serta 10 kabupaten antara 70– 92 persen.

Tabel 2.87.

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
1	Cilacap *)	702	21.745	45,52	7,40	14,56	32,52
2	Banyumas	535	13,470	80.31	12.01	2.87	4,81
3	Purbalingga	255	19,159	45.00	0	20.80	34,20
4	Banjarnegara *)	322	16.483	66,25	n/a	n/a	n/a
5	Kebumen	283	12,260	73.30	1.73	1.28	23,69
6	Purworejo	250	9,470	15.88	18.60	29.80	35.72
7	Wonosobo	705	21,050	65.33	11.35	7.42	15,89
8	Magelang	993	35,662	60.5	6.7	15.8	17,0
9	Boyolali	255	9,821	62,74	19,22	8,24	9,8
10	Klaten	478	29,713	36.17	0	51.36	12,47
11	Sukoharjo	70	4,353	29.00	26.00	37.00	9.00
12	Wonogiri	403	28,784	74.80	6.08	6.92	12.20
13	Karanganyar	351	18,867	18.27	76.40	4.57	0.76
14	Sragen	118	12,323	77.91	0	10.84	11.24
15	Grobogan	268	20,194	27.18	18.39	39.00	15.44
16	Blora	183	13,351	47.81	15.24	13.94	23.00
17	Rembang	318	21,193	50.80	24.85	2.48	21.87
18	Pati	327	20,965	85.78	3.90	2.32	8.00
19	Kudus	231	10,295	87.26	7.76	4.98	0.00
20	Jepara	834	28,247	24.30	9.00	20.50	46.20
21	Demak *)	4	1.627	90,26	n/a	n/a	n/a
22	Semarang	666	32,687	58.89	13.21	10.85	17.05

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
23	Temanggung	577	17,711	59.97	21.09	12.28	6.57
24	Kendal	686	10,427	45.48	11.07	26.53	16,91
25	Batang	573	18,231	33.62	16.17	24.20	26,01
26	Pekalongan *)	339	13.818	54,00	12,00	8,00	26,00
27	Pemalang	91	7.341	73.04	11.26	9.21	6,48
28	Tegal	208	9,281	58.86	16.15	20.93	4,06
29	Brebes	449	25,731	64.00	36.00		
30	Kota Salatiga	12	374	89.20	7.12	3.59	0,09
31	Kota Semarang *)	41	2.339	78,00	n/a	n/a	n/a
32	Kota Tegal	6	489	55.00	0	0	45,00

*Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota Tahun 2021, data kondisi fisik jaringan irigasi tahun 2020; *) data kondisi Tahun 2019*

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, salah satunya penyediaan air untuk air baku. Pemenuhan air baku penting bahkan utama karena digunakan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Selain air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini, di Jawa Tengah terdapat 41 bangunan bendungan/waduk (9 waduk besar dan 32 waduk kecil). Kebutuhan air baku khususnya air minum sejalan dengan besaran tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu diharapkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat diimbangi secara positif dengan ketersediaan air baku.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir (2016-2020) dari 56,49 persen menjadi 61,39 persen.

Tabel 2.88.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kebutuhan Air Baku (juta m^3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	739,65	745,02	750,25	755,35	760,33
Ketersediaan Air Baku (juta m^3/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	417,83	435,84	456,83	466,78	466,78
Ketersediaan Air Baku (%)	56,49	58,5	60,89	61,8	61,39

Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2021

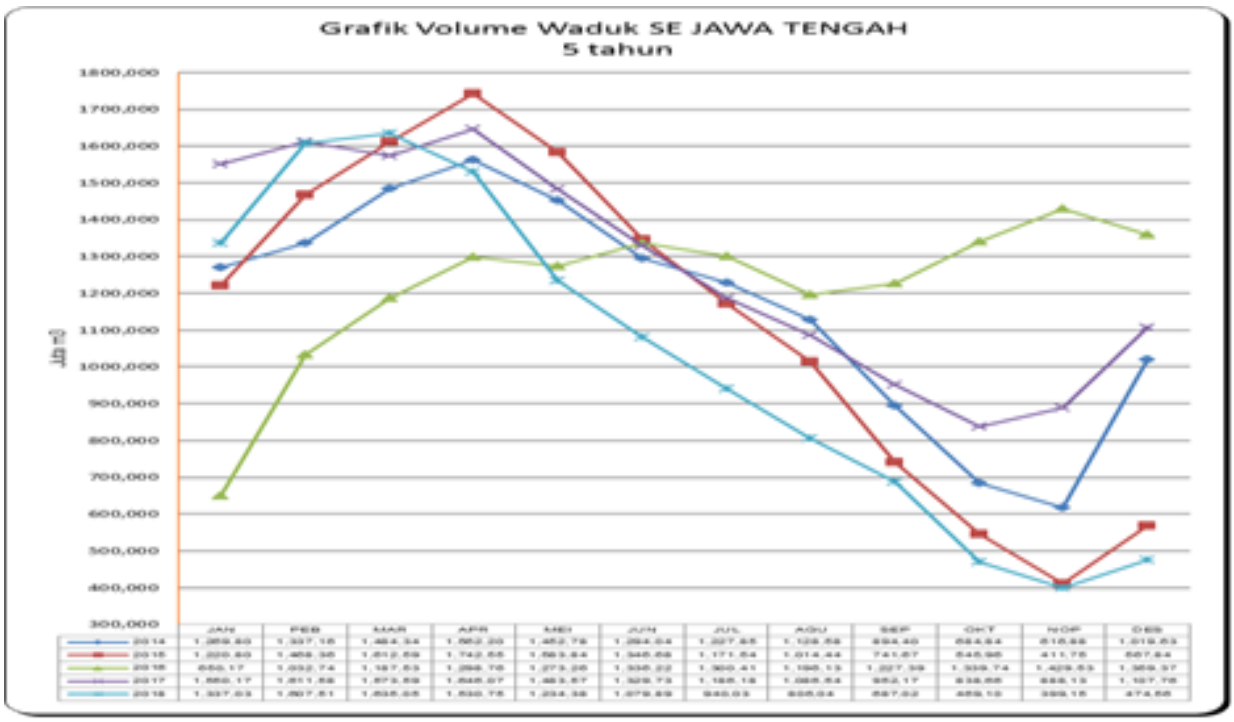

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.76.
Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m^3)
Tahun 2016-2020

Gambar diatas menunjukan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk di Jawa Tengah mengalami penurunan kebutuhan air di Jawa Tengah tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan.

7. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 0,77 persen dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan *backlog* rumah.

Tabel 2.89.
***Backlog* Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020**

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Backlog Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni	*Backlog* Milik	*Backlog* Huni
1	Kab.Cilacap	32.646	22.679	33.567	27.166	33.567	27.166	34.111	23.125	22.526	17.075
2	Kab.Banyumas	29.630	10.546	35.597	20.585	35.597	20.585	33.423	24.345	44.736	30.901
3	Kab.Purbalingga	11.783	9.773	17.222	12.611	17.222	12.611	11.125	8.786	7.922	4.699
4	Kab.Banjarnegara	11.453	10.066	15.998	13.472	15.998	13.472	12.192	10.331	18.299	14.116
5	Kab.Kebumen	20.562	17.866	32.727	28.145	32.727	28.145	28.297	24.976	28.397	22.483
6	Kab.Purworejo	27.732	22.961	42.034	35.907	42.034	35.907	32.790	25.503	32.200	25.976
7	Kab.Wonosobo	10.512	7.309	17.374	13.274	17.374	13.274	16.849	12.882	16.047	11.028
8	Kab.Magelang	24.509	16.179	26.327	20.343	26.327	20.343	31.944	24.903	33.259	22.981
9	Kab.Boyolali	8.506	6.610	18.443	12.296	18.443	12.296	16.071	9.757	19.935	16.073
10	Kab.Klaten	27.504	21.953	46.233	37.381	46.233	37.381	43.185	39.418	38.820	32.972
11	Kab.Sukoharjo	30.408	19.762	45.826	28.524	45.826	28.524	44.202	28.604	45.798	23.418
12	Kab.Wonogiri	8.099	6.441	13.596	10.417	13.596	10.417	11.662	9.692	7.094	6.044
13	Kab.Karanganyar	9.892	3.749	15.296	11.247	15.296	11.247	32.653	24.576	24.198	16.944
14	Kab.Sragen	9.063	6.172	24.891	22.439	24.891	22.439	17.038	14.313	18.156	16.427
15	Kab.Grobogan	17.407	16.544	24.885	19.207	24.885	19.207	20.734	20.339	16.211	14.602
16	Kab.Blora	10.468	7.382	17.298	14.118	17.298	14.118	23.472	20.845	18.263	15.633
17	Kab.Rembang	8.916	6.963	9.345	7.824	9.345	7.824	7.411	5.804	9.748	8.749
18	Kab.Pati	17.879	16.568	23.240	20.447	23.240	20.447	15.515	13.516	16.547	14.479
19	Kab.Kudus	12.377	10.536	15.271	11.077	15.271	11.077	23.326	14.470	18.549	12.982
20	Kab.Jepara	18.930	16.949	31.954	26.733	31.954	26.733	20.669	18.628	27.554	24.872
21	Kab.Demak	14.617	11.867	15.832	12.934	15.832	12.934	14.634	12.565	17.955	14.195
22	Kab.Semarang	27.936	15.597	20.992	10.294	20.992	10.294	25.991	15.958	25.107	16.006
23	Kab.Temanggung	10.482	7.989	11.566	8.316	11.566	8.316	10.154	6.231	11.927	8.831
24	Kab.Kendal	21.203	19.408	27.457	22.103	27.457	22.103	24.458	20.025	20.982	17.093
25	Kab.Batang	7.402	5.774	13.732	11.734	13.732	11.734	11.414	9.762	10.986	9.387
26	Kab.Pekalongan	20.518	18.788	32.780	29.183	32.780	29.183	13.480	8.593	23.825	18.516
27	Kab.Pemalang	22.652	19.940	44.367	35.865	44.367	35.865	44.389	40.135	48.802	42.771
28	Kab.Tegal	66.837	61.195	72.469	70.231	72.469	70.231	78.245	68.920	64.604	56.942
29	Kab.Brebes	58.604	55.283	71.536	66.400	71.536	66.400	79.803	71.429	43.631	39.929
30	Kota Magelang	10.628	4.644	12.775	7.236	12.775	7.236	12.572	6.617	11.443	5.388
31	Kota Surakarta	54.313	26.496	60.653	33.446	60.653	33.446	57.627	29.602	65.282	32.914
32	Kota Salatiga	13.510	4.376	19.772	6.732	19.772	6.732	18.215	5.182	15.574	4.918
33	Kota Semarang	142.504	75.941	163.643	94.962	163.643	94.962	164.448	100.313	154.725	80.195
34	Kota Pekalongan	16.629	14.192	21.994	17.208	21.994	17.208	23.484	20.049	21.473	17.426
35	Kota Tegal	25.625	20.434	30.142	24.290	30.142	24.290	23.796	19.213	22.431	19.195
	Jumlah Total	861.738	618.932	1.127.202	844.226	1.126.837	844.148	1.079.379	809.410	1.023.008	736.159

Sumber : SNVT PP Provinsi Jawa Tengah, 2021

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2011 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio Rumah Layak Huni tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.90.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah (Unit)
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR	Swadaya/ lainnya	
2016	5.830	3.601	-	-	-	9.431
2017	12.377	19.587	30.274	704	-	62.942
2018	25.087	21.691	16.841	939	-	64.558
2019	36.725	23.208	26.651	2.388	13.598	102.570
2020	38.781	10.298	22.883	1.818	1.450	75.230
Total	118.800	78.385	96.649	5.849	15.048	314.731

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2021

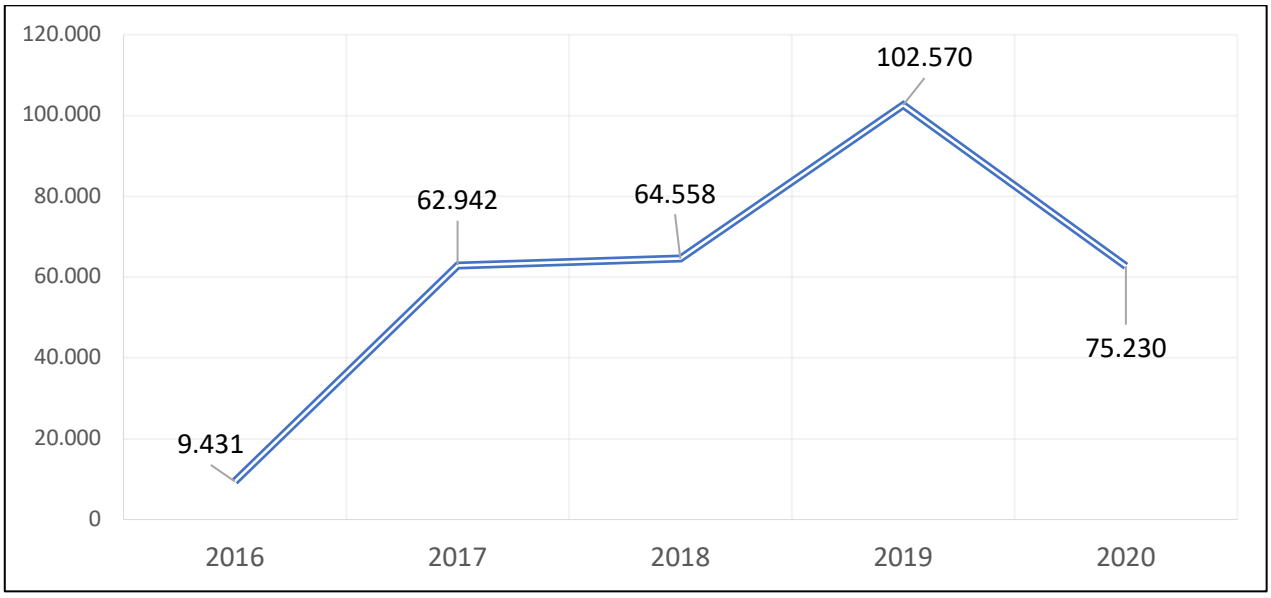

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2021

Gambar 2.77.
Perkembangan Penanganan Rumah Layak Huni Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.91.
Persebaran Jumlah RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020			
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Jumlah
1	Kab Banjarnegara	374	4.037	28.862	33.273
2	Kab Banyumas	1.075	27.894	44.724	73.693
3	Kab Batang	209	2.122	34.666	36.997
4	Kab Blora	58	7.613	77.977	85.648
5	Kab Boyolali	118	18.856	46.396	65.370
6	Kab Brebes	248	20.449	51.065	71.762
7	Kab Cilacap	1.738	43.105	59.687	104.530
8	Kab Demak	87	7.173	62.166	69.426
9	Kab Grobogan	145	18.888	125.666	144.699
10	Kab Jepara	426	3.241	44.473	48.140
11	Kab Karanganyar	38	1.479	8.712	10.229
12	Kab Kebumen	850	10.581	27.826	39.257
13	Kab Kendal	103	2.368	42.632	45.103
14	Kab Klaten	64	5.145	17.371	22.580
15	Kota Magelang	-	6	366	372
16	Kota Pekalongan	3	276	2.022	2.301
17	Kota Salatiga	19	44	1.466	1.529
18	Kota Semarang	24	333	8.855	9.212
19	Kota Surakarta	15	218	1.721	1.954
20	Kota Tegal	6	69	981	1.056
21	Kab Kudus	24	550	2.881	3.455
22	Kab Magelang	97	15.825	29.110	45.032
23	Kab Pati	322	26.692	54.705	81.719
24	Kab Pekalongan	755	3.626	15.824	20.205
25	Kab Pemalang	1.841	14.114	39.670	55.625
26	Kab Purbalingga	1.945	18.817	25.265	46.027
27	Kab Purworejo	577	7.379	15.893	23.849
28	Kab Rembang	54	14.725	38.375	53.154
29	Kab Semarang	36	1.807	28.877	30.720
30	Kab Sragen	24	18.668	34.677	53.369
31	Kab Sukoharjo	114	4.853	11.705	16.672
32	Kab Tegal	766	13.060	27.362	41.188
33	Kab Temanggung	149	1.870	30.643	32.662
34	Kab Wonogiri	647	10.187	25.640	36.474
35	Kab Wonosobo	110	1.345	23.339	24.794
	Jumlah	**13.061**	**327.415**	**1.091.600**	**1.432.076**

Sumber : Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos, Tahun 2021

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 di Jawa Tengah, terdapat 1.682.723 unit rumah tidak layak huni. Pada tahun 2018 RTLH yang harus ditangani sebanyak 1.582.024 unit. Setelah dilakukan penanganan RTLH serta verifikasi dan validasi data PBDT dari tahun 2016-2020, sisa RTLH berdasarkan PBDT yang belum tertangani sejumlah 827.009 unit. Sebanyak 314.731 unit RTLH telah ditangani melalui integrasi program pusat, provinsi, kabupaten/kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), swadaya dan lain-lain.

Namun, pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi penambahan jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 551.300 unit. Sehingga, jumlah rumah layak huni Provinsi Jawa Tengah hingga akhir tahun 2020 yang belum tertangani sebesar 1.378.309 unit.

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.92.
Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Cilacap	67	54	91	576
2	Banyumas	45	38	28	239
3	Purbalingga	15	14	9	31
4	Banjarnegara	83	356	282	422
5	Kebumen	32	10	25	139
6	Purworejo	9	-	2	9
7	Wonosobo	35	14	4	39
8	Magelang	72	10	10	228
9	Boyolali	28	6	1	73
10	Klaten	15	5	8	67
11	Sukoharjo	4	4	-	2
12	Wonogiri	71	9	17	125

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
13	Karanganyar	26	4	6	35
14	Sragen	51	6	5	113
15	Grobogan	37	27	14	277
16	Blora	12	16	11	66
17	Rembang	4	-	-	12
18	Pati	57	19	15	36
19	Kudus	55	7	2	37
20	Jepara	35	12	6	21
21	Demak	23	26	2	6
22	Semarang	9	5	1	6
23	Temanggung	60	15	12	111
24	Kendal	34	8	18	54
25	Batang	6	2	1	-
26	Pekalongan	35	8	1	17
27	Pemalang	14	10	12	12
28	Tegal	53	20	15	9
29	Brebes	49	39	134	168
30	Kota Magelang	1	-	-	1
31	Kota Surakarta	8	4	1	-
32	Kota Salatiga	1	-	-	-
33	Kota Semarang	121	15	14	56
34	Kota Pekalongan	7	1	8	1
35	Kota Tegal	10	-	2	1
TOTAL		1.184	764	757	2.989

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2020

Selain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kawasan permukiman kumuh yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah. Kawasan kumuh umumnya terdapat di kawasan perkotaan daripada di kawasan perdesaan.

Hal lain yang terkait adalah sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Jawa Tengah yang turut menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Implikasi dari peluang tersebut adalah terjadinya urbanisasi dari masyarakat untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan intensitas pemanfaatan lahan untuk permukiman (meningkatkan kepadatan bangunan).

Peningkatan pemanfaatan lahan untuk hunian yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat khususnya kategori MBR seringkali tidak diimbangi dengan aksesibilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai. Tidak terdapatnya akses air bersih, sanitasi di kawasan permukiman salah satu contohnya. Akibatnya kualitas kawasan permukiman semakin lama akan semakin menurun. Kondisi ini dapat berakibat munculnya kawasan permukiman kumuh baru.

Penetapan permukiman kumuh sudah secara jelas dituangkan pada RPJMN Tahun 2015-2019, dimana target besarnya adalah terciptanya kota bebas kumuh di tahun 2019. Proses penanganan kumuh telah dimulai tahun 2015 dan target harus tercapai pada tahun 2019. Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 ha, antara 10-15 ha dan di atas 15 ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan tanggung jawab Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan tanggung jawab Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang mempunyai luas 10-15 Ha.

Berdasarkan data RPJMN di Provinsi Jawa Tengah terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 3.982,88 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 612,44 Ha. Pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas 6.987,47 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 1.087,06 Ha.

Pada akhir tahun 2019 dilakukan pemutakhiran data kumuh dengan melakukan pemantauan pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menetapkan luasan kawasan kumuh 7.244,26 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 1.207,23 Ha. Pada akhir tahun 2020 dilakukan pemutakhiran data kumuh dengan melakukan pemantauan pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menetapkan luasan kawasan kumuh 7.909,66 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 1398,76 Ha. Data kawasan permukiman kumuh yang selalu berkembang dikarenakan adanya pembaruan SK Kawasan Permukiman Kumuh oleh Bupati/Walikota. Rincian pembagian luasan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.93.

Perbandingan Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Jawa Tengah

No	Uraian	<10 ha	10-15 ha	>15 ha	Total
1	SK s.d tahun 2019	2100,15	1207,22	3936,30	7243,67
2	SK s.d tahun 2020	2162,85	1398,76	4348,05	7909,66
3	RPJMN 2014-2019	1028,12	612,44	2342,31	3982,88

Sumber: Dinas Perakim Prov. Jateng dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, 2019

Tabel 2.94.

Rincian Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA KAB/KOTA	RPJMN	SK s/d 2019	Tahun SK
1	Kab. Cilacap	20.84	26.88	2014
2	Kab. Banyumas	69.58	69.58	2014
3	Kab. Purbalingga	32.39	32.39	2014
4	Kab. Banjarnegara	58.22	138.69	2016
5	Kab. Kebumen	69.57	442.07	2016
6	Kab. Purworejo	82.69	197.41	2014
7	Kab. Wonosobo	70.83	220.34	2019
8	Kab. Magelang	69.91	85.09	2014
9	Kab. Boyolali	0.36	48.62	2017
10	Kab. Klaten	186.41	236.50	2014
11	Kab. Sukoharjo	35.28	202.57	2016
12	Kab. Wonogiri	24.47	47.98	2014
13	Kab. Karanganyar	68.28	100.16	2015
14	Kab. Sragen	2.33	3.60	2014
15	Kab. Grobogan	50.77	107.32	2014
16	Kab. Blora	48.11	66.15	2014
17	Kab. Rembang	59.53	290.45	2017
18	Kab. Pati	107.39	181.57	2017
19	Kab. Kudus	95.06	145.40	2017
20	Kab. Jepara	49.26	102.76	2019
21	Kab. Demak	38.15	368.0	2016
22	Kab. Semarang	179.04	477.92	2014
23	Kab. Temanggung	8.34	297.81	2017
24	Kab. Kendal	230.19	153.57	2017
25	Kab. Batang	88.86	109.36	2014
26	Kab. Pekalongan	614.52	538.21	2018
27	Kab. Pemalang	240.74	326.82	2018
28	Kab. Tegal	50.00	375.61	2019
29	Kab. Brebes	27.95	791.36	2018
30	Kota Magelang	65.55	67.41	2018
31	Kota Surakarta	413.78	359.55	2016
32	Kota Salatiga	21.84	21.84	2016
33	Kota Semarang	415.93	415.93	2014
34	Kota Pekalongan	195.59	155.82	2018
35	Kota Tegal	191.13	39.53	2019
TOTAL		**3982.90**	**7244.26**	

Sumber: Pemerintah Kabupaten/Kota, 2019

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 seluas 967,08 Ha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga sampai dengan tahun 2020, luasan kawasan permukiman kumuh yang tersisa seluas 1.260,41 Ha.

Tabel 2.95.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kewenangan Penanganan	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Realisasi Tahunan (Ha)		Total s.d Tahun 2020	Sisa Kawasan Kumuh 2020 (Ha)	% Capaian per Tahun	% Capaian Kumulatif
		2019	2020				
Pusat (< 10 Ha)	629,01	226,46	181,21	407,67	221,34	28,81%	64,81%
Provinsi (10-15 Ha)	474,66	200,06	35,54	235,60	239,06	7,49%	49,64%
Kab/Kota > 15 Ha	1900,92	350,58	750,33	1.100,91	800,01	39,47%	57,91%
TOTAL	**3004,59**	**777,10**	**967,08**	**1.744,18**	**1.260,41**	**32,19%**	**58,05%**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2021

Dengan berakhirnya target RPJMN 2014-2019, maka pada tahun 2020 muncul pembaruan data kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Data hingga November 2020 didapatkan pembaruan seperti tabel dibawah.

Tabel 2.96.
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan SK
Bupati/Walikota Sampai Dengan Tahun 2020 Di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	SK s.d 2020	Penanganan s.d Tahun 2020	Sisa Luasan Kumuh s.d 2020		
				< 10 Ha	10-15 Ha	> 15 Ha
1	Kab. Cilacap	26,88	20,84	6,04	0,00	0,00
2	Kab. Banyumas	115,70	0,00	32,76	27,67	55,27
3	Kab. Purbalingga	32,39	31,09	1,30	0,00	0,00
4	Kab. Banjarnegara	138,69	82,97	45,43	5,22	5,07
5	Kab. Kebumen	343,26	343,26	0,00	0,00	0,00
6	Kab. Purworejo	197,41	92,92	15,09	10,00	79,40
7	Kab. Wonosobo	220,34	0,00	53,44	21,09	145,81
8	Kab. Magelang	85,09	66,09	13,47	3,58	1,95
9	Kab. Boyolali	48,62	39,66	8,96	0,00	0,00
10	Kab. Klaten	236,50	184,96	0,00	0,00	51,54
11	Kab. Sukoharjo	202,567	38,77	72,28	91,52	0,00
12	Kab. Wonogiri	47,98	0,00	37,49	10,49	0,00
13	Kab. Karanganyar	107,24	0,00	83,02	24,22	0,00
14	Kab. Sragen	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00
15	Kab. Grobogan	107,32	2,00	75,87	12,73	16,72
16	Kab. Blora	474,77	0,00	48,99	54,78	371
17	Kab. Rembang	290,448	53,16	30,52	26,68	180,09
18	Kab. Pati	181,57	135,95	8,30	22,23	15,09
19	Kab. Kudus	145,413	139,463	5,95	0,00	0,00
20	Kab. Jepara	138,26	47,85	28,31	0,00	62,10
21	Kab. Demak	367,99	211,74	11,45	25,88	118,92
22	Kab. Semarang	335,53	19,21	81,18	75,04	160,10

No	Kabupaten/ Kota	SK s.d 2020	Penanganan s.d Tahun 2020	Sisa Luasan Kumuh s.d 2020		
				< 10 Ha	10-15 Ha	> 15 Ha
23	Kab. Temanggung	297,83	139,735	76,45	45,69	35,96
24	Kab. Kendal	153,06	123,85	19,40	0,22	9,59
25	Kab. Batang	109,77	66,72	2,83	6,93	33,29
26	Kab. Pekalongan	749,45	610,45	7,61	12,20	119,20
27	Kab. Pemalang	326,91	136,69	40,15	40,33	109,74
28	Kab. Tegal	299,06	57,75	20,22	61,23	159,86
29	Kab. Brebes	791,36	0,00	22,91	178,34	590,11
30	Kota Magelang	67,42	57,56	3,07	0,00	6,79
31	Kota Surakarta	366,506	238,354	23,27	3,10	101,78
32	Kota Salatiga	253,66	145,57	23,22	11,30	73,57
33	Kota Semarang	411,94	298,28	0,89	18,31	94,46
34	Kota Pekalongan	195,59	178,02	1,38	0,83	15,36
35	Kota Tegal	39,53	39,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**7909,66**	**3602,45**	**904,84**	**789,60**	**2612,77**
				4307,21		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2020

Dari beberapa gambaran diatas masih diperlukan adanya pembaruan data kawasan permukiman kumuh, mengingat SK kawasan permukiman kumuh yang dinamis dan berkembang. Untuk itu masih diperlukan adanya monitoring dan evaluasi data kawasan permukiman kumuh secara berkesinambungan, masih diperlukan adanya penyusunan petunjuk teknis penentuan kawasan permukiman kumuh, serta masih diperlukan adanya verifikasi terhadap SK Bupati/Walikota sebelum penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh.

Pendataan perumahan dan kawasan permukiman menjadi persoalan tersendiri saat ini. Belum adanya koordinasi dan sinergi pendataan dapat berakibat terbatasnya data yang dimiliki serta kurang sinerginya penanganan permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, maka pemenuhan statistik dasar diselenggarakan oleh BPS. Sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan, oleh karena itu diharapkan adanya sinergi dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS dan instansi pemerintah.

8. Pertanahan

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Pertanahan yaitu Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan

tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi, penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Berdasarkan data yang ada sampai tahun 2020, ijin penetapan lokasi aktif sebanyak 16 ijin yang terdiri dari pembangunan jalan tol, GITET, bendungan yang kesemuanya mempunyai batas waktu selama 2 tahun dan apabila pengadaan tanah terkendala sampai lebih dari 2 tahun maka akan dilakukan perpanjangan selama 1 tahun bila belum selesai juga maka akan diperbaharui dengan ijin lokasi yang baru. Umumnya kendala disebabkan (1) kesiapan instansi yang memerlukan tanah, (2) prosedur tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf, tanah perhutani dan tanah negara lain yang berbeda, serta (3) kesiapan pendanaan.

Terkait kegiatan inventarisasi bidang tanah, berdasarkan target dalam RPJMD, tahun 2019 sampai dengan 2020 Identifikasi dan Inventarisasi Tanah HP dan HGU sebanyak 40 bidang yang terdiri dari Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Hak Pakai (HP) sejumlah 30 bidang dan tanah Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah 10 bidang. Kegiatan inventarisasi ini dalam rangka menertibkan tanah HP agar sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemantauan ijin penetapan lokasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebanyak 3.794 bidang, pemantauan pensertifikatan tanah LP2B sebanyak 2.480 bidang, dan penataan akses reform sebanyak 3 kegiatan.

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mempertahankan luasan tanah kas desa yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengusahakan tanah pengganti dengan luasan yang terus bertambah. Demikian juga dalam mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan dengan memberikan insentif berupa sertifikasi

gratis kepada masyarakat. Diharapkan selain masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahannya, status lahannya juga lebih baik/bersertifikat. Namun hal ini masih belum didukung dengan regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan animo masyarakat petani menjadikan tanahnya sebagai LP2B. Dukungan pemerintah daerah dalam menjaga LP2B juga masih rendah, terlihat dari masih minimnya kabupaten/kota yang sudah mempunyai Perda Penetapan Lokasi LP2B diwilayahnya. Dalam kurun waktu 2016 – 2018 kegiatan sertifikasi lahan mendapatkan alokasi dana yang cenderung naik, namun sejak tahun 2019 – 2020 cenderung menurun karena wabah Covid-19. Perkembangan pelayanan urusan pertanahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan Di Provinsi Jateng Tahun 2016-2020 (Penggantian Tanah Kas Desa dan Stimulan Pembuatan Sertifikat Lahan)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penggantian tanah kas desa					
	Luas semula (ha)	164.977	1.287.521	326.521	891.330	391.25
	Luas menjadi (ha)	87.213 & UGR 32M	1.440.194 & UGR 199 M	385.660 & UGR 28.1 M	623.163 & UGR 89.35 M	3.039 & 39.09.M
2	Stimulasi pembuatan sertifikat lahan					
	Kawasan lindung diluar hutan & Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (ha)	1.325	125	3.641	100	200
	Tanah Kas Desa	-	-	34	-	-
3	Jumlah Inventarisasi Bidang Tanah					
	HGU	-	-	-	5	5
	HP	-	-	-	15	15
	Kebutuhan akses reforma agraria	-	-	-	1	2
	Pemantauan LP2B	-	-	-	1.669	811
	Pemantauan Penetapan Lokasi	-	-	-	3.268	526
4	Penetapan Lokasi	-	-	7.414	400	5928

Sumber: Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah dan Dispermasdesdukcapil Prov Jawa Tengah, 2021

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi.

2.1.8. Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan/hutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan secara nasional untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH (tahun 2016-2019) terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dalam perkembangannya, mendasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Surat Edaran Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH menjadi 4 komponen, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

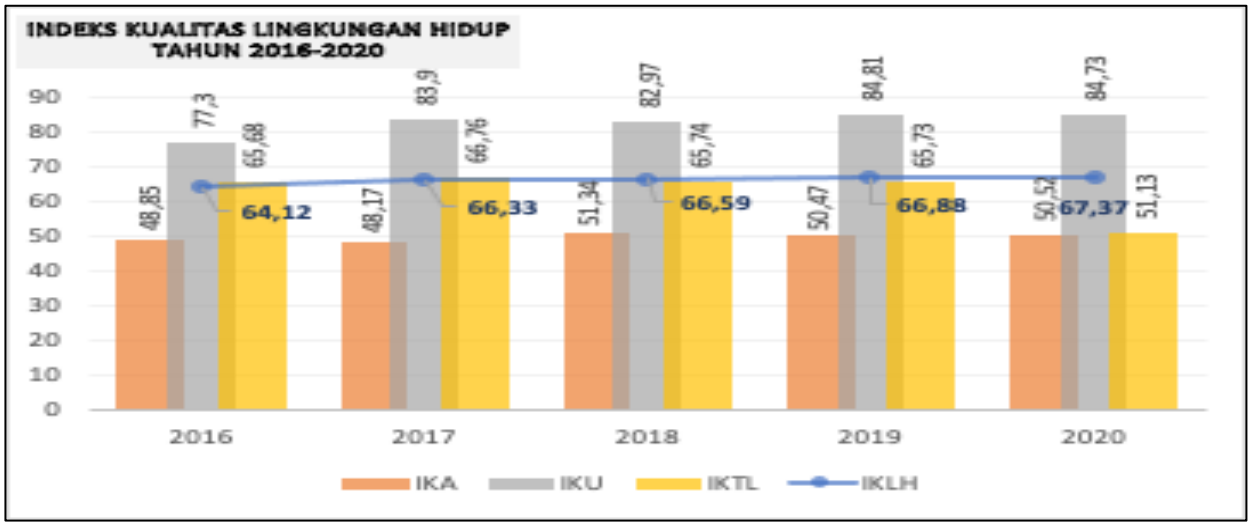

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Gambar 2.78.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 - 2020

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 64,12 pada tahun 2016 menjadi 67,37 pada tahun 2020. Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kisaran nilai IKLH, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IKLH yang termasuk pada predikat cukup baik (predikat IKLH 60 < IKLH ≤ 70 artinya cukup baik), dengan kenaikan rata-rata selama tahun 2016-2020 sebesar 2,16 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Namun demikian, pada tahun 2019 hingga tahun 2020, nilai IKU sedikit mengalami penurunan yang berkaitan dengan berkurangnya daya dukung fungsi hutan dalam menyerap gas polutan dan gas rumah kaca serta dinamika peningkatan kegiatan industri. Sedangkan IKTL pada tahun 2020 menurun cukup signifikan, disebabkan adanya penyesuaian metode penghitungan mendasarkan Peraturan Ditjen PPKL P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/I/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Hutan, dampak perubahan fungsi lahan dari pertanian lahan kering ke permukiman.

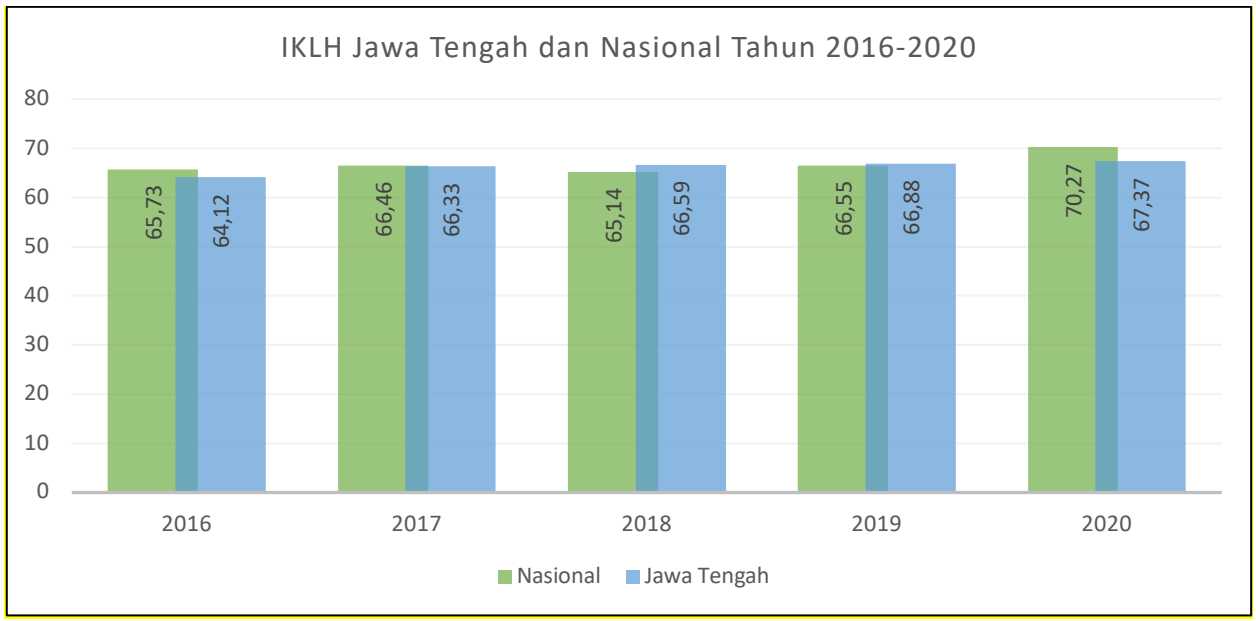

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Gambar 2.79.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 - 2020

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2020 adalah 70,27 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,37. Meningkatnya IKLH Nasional 2020 sebanyak 3,72 poin disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional.

b. Perubahan Iklim

Terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat dari persebaran indeks kerentanan dan emisi gas rumah kaca (GRK). Data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 27 kabupaten/kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 6 kabupaten/kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2), dan 2 kabupaten/kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai kondisi geografisnya maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang laut.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.80.
Persebaran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Tahun 2021

Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 91.850,59 $GgCO_2eq$ dengan kontributor utama penyumbang emisi GRK Provinsi Jawa Tengah adalah sektor energi mencapai 63.408 $GgCO_2e$ (69,03 persen). Untuk penyumbang emisi kedua adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21.722,23 $GgCO_2e$ (23,65 persen) dikontribusikan oleh kegiatan pemupukan, penggunaan kapur, pembakaran biomassa serta sistem pengairan. Sektor limbah dengan kontribusi sebesar 5.135,59 GgCO2e (5,59 persen) yang dikontribusikan dari pengelolaan sampah dan limbah cair. Emisi dari sektor

proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) sebesar 4.649,24 $GgCO_2e$ (5,06 persen), dimana sumber emisi dari sektor IPPU berasal dari kategori industri mineral. Selain menghasilkan emisi GRK, Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang mampu menyerap emisi sebesar 3.064,48 $GgCO_2e$ (-3,34 persen).

Tabel 2.98.
Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2020

No	Sektor	Emisi (Gg CO_2 eq)	Persentase (%)
1	Energi	63.408,00	69,03
2	Pertanian	21.722,23	23,65
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	4.649,24	5,06
4	Limbah	5.135,59	5,59
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	3.064,48	-3,34
	Total Emisi GRK	**91.850,59**	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2021

c. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dari hasil perhitungan dan pengujian status mutu kualitas air sungai tahun 2020 menunjukkan bahwa sungai Baki, sungai Grompol, sungai Samin, sungai Palur, sungai Babon masuk dalam kategori cemar sedang, sedangkan sungai Premulung, sungai Mungkung, sungai Grompol, sungai Samin, sungai Jlantah, sungai Pepe, sungai Bogowonto, sungai Garang, sungai Gung, sungai Kupang, sungai Luk Ulo, sungai Lusi, sungai Pemali, sungai Sambong, sungai Serang, sungai Serayu, sungai Tuntang, sungai sungai Wulan, sungai Bengawan sungai Solo, sungai Progo, sungai Citanduy, sungai Cisanggarung dalam kondisi tercemar ringan, dan sungai Luk Ulo, sungai Pemali dalam kondisi baik. Permasalahan utama pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Tengah adalah dari limbah domestik dimana parameter *Fecal Coliform*, dan total *Coliform* selalu melebihi baku mutu, sedangkan BOD, COD, Minyak Lemak, Klorin Bebas dan Detergen sebagai *Metilen Blue Aktif Surfaktan* (MBAS) sebagian besar melebihi baku mutu. Limbah domestik tersebut dapat bersumber dari rumah tangga, industri besar/menengah/kecil dan industri garmen yang belum memiliki pengolahan air limbah. Pada DAS Solo juga terdapat industri tekstil dan industri rayon yang membuang air limbahnya langsung ke Sungai Bengawan Solo dengan debit yang besar. Sektor pertanian, perkebunan dan peternakan juga menyumbang pencemaran di daerah hulu sungai Bengawan Solo dan anak Sungai Bengawan Solo yang dibuktikan dengan parameter *Nitrit* dan *Phosphat* yang melebihi baku mutu.

Tabel 2.99.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Nama Sungai	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
1	Baki	2,28	Cemar Ringan	4,56	Cemar Ringan	3,84	Cemar Ringan	3,66	Cemar Ringan	5,20	Cemar Sedang
2	Premulung	7,71	Cemar Sedang	5,52	Cemar Sedang	4,46	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	3,50	Cemar Ringan
3	Mungkung	6,13	Cemar Sedang	5,23	Cemar Sedang	4,22	Cemar Ringan	3,01	Cemar Ringan	2,85	Cemar Ringan
4	Grompol	2,05	Cemar Ringan	4,80	Cemar Ringan	4,67	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	5,33	Cemar Sedang
5	Samin	4,28	Cemar Ringan	5,38	Cemar Sedang	3,76	Cemar Ringan	2,61	Cemar Ringan	5,18	Cemar Sedang
6	Jlantah	2,46	Cemar Ringan	3,80	Cemar Ringan	2,82	Cemar Ringan	3,36	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan
7	Palur	3,94	Cemar Ringan	5,54	Cemar Sedang	4,57	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	6,12	Cemar Sedang
8	Pepe	2,01	Cemar Ringan	4,57	Cemar Ringan	4,37	Cemar Ringan	4,35	Cemar Ringan	3,42	Cemar Ringan
9	Babon	4,45	Cemar Ringan	4,86	Cemar Ringan	2,80	Cemar Ringan	3,97	Cemar Ringan	6,62	Cemar Sedang
10	Bogowonto	-	Tidak dilakukan pemantauan	1,94	Cemar Ringan	2,09	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	4,02	Cemar Ringan
11	Garang	4,50	Cemar Ringan	4,00	Cemar Ringan	5,58	Cemar Sedang	6,53	Cemar Sedang	3,40	Cemar Ringan
12	Gung	2,88	Cemar Ringan	3,28	Cemar Ringan	2,93	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	2,90	Cemar Ringan
13	Kupang	-	Tidak dilakukan pemantauan	3,99	Cemar Ringan	2,36	Cemar Ringan	3,15	Cemar Ringan	3,86	Cemar Ringan
14	Luk Ulo	-	Tidak dilakukan pemantauan	1,82	Cemar Ringan	1,31	Cemar Ringan	2,94	Cemar Ringan	0,91	Kondisi Baik
15	Lusi	2,55	Cemar Ringan	2,21	Cemar Ringan	2,15	Cemar Ringan	3,35	Cemar Ringan	3,75	Cemar Ringan
16	Pemali	6,64	Cemar Sedang	3,10	Cemar Ringan	1,85	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	0,77	Kondisi Baik
17	Sambong	-	Tidak dilakukan pemantauan	3,84	Cemar Ringan	2,66	Cemar Ringan	3,74	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan
18	Serang	2,99	Cemar Ringan	2,63	Cemar Ringan	2,19	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	2,29	Cemar Ringan
19	Serayu	3,26	Cemar Ringan	1,91	Cemar Ringan	1,57	Cemar Ringan	3,70	Cemar Ringan	2,24	Cemar Ringan
20	Tuntang	3,11	Cemar Ringan	3,49	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan	3,19	Cemar Ringan	3,59	Cemar Ringan

No	Nama Sungai	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai IP	**Status Mutu**	**Nilai IP**	**Status Mutu**	**Nilai IP**	**Status Mutu**	**Nilai IP**	**Status Mutu**	**Nilai IP**	**Status Mutu**
21	Wulan	4,07	Cemar Ringan	4,75	Cemar Ringan	1,77	Cemar Ringan	2,13	Cemar Ringan	4,00	Cemar Ringan
22	Bengawan Solo	4,51	Cemar Ringan	2,18	Cemar Ringan	3,91	Cemar Ringan	3,85	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan
23	Progo	3,26	Cemar Ringan	1,53	Cemar Ringan	1,25	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	2,03	Cemar Ringan
24	Citanduy	4,86	Cemar Ringan	0,92	Kondisi Baik	1,97	Cemar Ringan	4,62	Cemar Ringan	1,97	Cemar Ringan
25	Cisangga-rung	5,13	Cemar Sedang	0,75	Kondisi Baik	2,83	Cemar Ringan	5,28	Cemar Sedang	1,94	Cemar Ringan
Nilai IP Jawa Tengah		3,96	Cemar Ringan	3,46	Cemar Ringan	2,98	Cemar Ringan	3,84	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan
Jumlah Sungai Dihitung		25		25		25		25		25	

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021

Pengelolaan sampah di Jawa Tengah masih terpusat pada kawasan perkotaan yaitu sebesar 37,57 persen dan kawasan perdesaan sebesar 3,96 persen (Data Persentase Rumah Tangga yang Perlakuan terhadap Sampah Diangkut Petugas, Statistik Lingkungan Hidup 2020, BPS), sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah kawasan perkotaan saja yang terlayani dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan. Ini diakibatkan karena masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah di perdesaan. Selain itu, masih adanya kebiasaan penduduk yang membuang sampah di sungai (8,68 persen dari total buangan sampah berada di sungai), hal ini menyebabkan air sungai meluap dan menimbulkan bencana banjir pada musim penghujan. Selain itu kenaikan muka air laut sebagai akibat dari pemanasan global juga terjadi di pantai utara Jawa (Pekalongan, Batang, Demak, Semarang). Berikut adalah data timbulan sampah dan persentase sampah yang terangkut ke TPA per kabupaten kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.100. .

Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.565.804	5.380.998	5.418.184	5.604.080,65	6.055.617,05
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	262.149,36	334.697,76	725.047,58	1.069.308,62	1.175.675,24
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	1.442.619,5	1.359.778,2	1.992.430,5	2.774.189,20	2.626.441,58
4	Total Pengelolaan Sampah	1.704.768,9	1.694.476	2.717.478,1	3.843.497,82	3.802.116,82
Persentase Pengelolaan Sampah (%)		30.62	31,49	50,15	68,58	62,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Jumlah timbulan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sejumlah 5.565.804 ton/tahun menjadi 6.055.617,05 ton/tahun pada tahun 2020. Sedangkan sampah yang tertangani baru mencakup 2.626.441,58 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 2.800.543,29 ton/tahun pada tahun 2020, yaitu sebesar 62,79 persen. Berdasarkan data TPA di Jawa Tengah, luas total TPA yang ada sejumlah 58 TPA adalah 258,1 Ha. Dengan total sampah yang terangkut menunjukkan rata-rata setiap 1 Ha TPA menerima sampah sebesar 6.310 ton untuk dikelola. Berikut adalah tipe pengelolaan TPA di Jawa Tengah.

Tabel 2.101.

Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	*Unmanaged Shallow*	*Unmanaged Deep*		
1	Cilacap 1	TPA Majenang			√	1,6	2025
2	Cilacap 2	TPA Sidareja			√	1,4	2025
3	Cilacap 3	TPA Kroya			√	0,8	2017
4	Cilacap 4	TAP Jeruklegi	√			6,3	2019
5	Banyumas 1	TPA Kaliori	√			4,7	2018
6	Banyumas 2	TPA Gunung Tugel			√	6,7	2014
7	Banyumas 3	TPA Ajibarang			√	2,0	2014
8	Purbalingga	TPA Banjaran			√	4,0	2018
9	Banjarnegara	TPA Winong			√	3,8	2049
10	Kebumen 1	TPA Kaligending			√	5,0	2033
11	Kebumen 2	TPA Semali	√			3,7	2033

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	*Unmanaged Shallow*	*Unmanaged Deep*		
12	Purworejo	TPA Jetis Loana	√			4,7	2019
13	Wonosobo	TPA Wonorejo			√	4,5	2018
14	Kab. Magelang 1	TPA Pasuruhan			√	1,8	2017
15	Kab. Magelang 2	TPA Klegen			√	0,2	2017
16	Boyolali	TPA Winong		√		3,7	---
17	Klaten 1	TPA Jomboran			√	0,2	2014
18	Klaten 2	TPA Joho			√	0,9	2015
19	Klaten 3	TPA Candirejo			√	1,0	2016
20	Klaten 4	TPA Pedan			√	7,0	belum beroperasi
21	Sukoharjo	TPA Mojorejo			√	3,7	2017
22	Wonogiri 1	TPA Ngadirojo			√	8,2	2023
23	Wonogiri 2	TPA Baturetno			√	1,5	2026
24	Wonogiri 3	TPA Purwantoro			√	0,5	2021
25	Wonogiri 4	TPA Slogohimo			√	0,3	2026
26	Karanganyar	TPA Sukosari			√	4,4	2021
27	Sragen	TPA Tanggan			√	4,2	2016
28	Grobogan 1	TPA Ngembak	√			9,8	2033
29	Grobogan 2	TPA Godong		√		1,0	2015
30	Grobogan 3	TPA Mojorebo		√		1,0	2013
31	Grobogan 4	TPA Gubug			√	1,0	2013
32	Blora 1	TPA Lebok			√	1,5	2019
33	Blora 2	TPA Temurejo	√			4,0	2018
34	Rembang	TPA Kerep			√	3,2	2035
35	Pati 1	TPA Sukoharjo	√			12,5	2026
36	Pati 2	TPA Plosojenar			√	1,7	2018
37	Kudus	TPA Tajungrejo	√			5,6	2019
38	Jepara 1	TPA Bandengan	√			5,5	2015
39	Jepara 2	TPA Krasak			√	0,7	2020
40	Jepara 3	TPA Gemulung			√	0,9	2016
41	Demak 1	TPA Kalikondang			√	2,5	2016
42	Demak 2	TPA Candisari			√	0,8	2016
43	Kab. Semarang	TPA Blondo	√			5,7	2009
44	Temanggung	TPA Sanggrahan	√			4,0	2031
45	Kendal 1	TPA Darupono			√	0,9	2015
46	Kendal 2	TPA Pagergunung			√	1,8	2025
47	Batang	TPA Randu Kuning			√	2,5	2019
48	Kab.Pekalongan	TPA Linggoasri	√			4,7	2019
49	Pemalang	TPA Pegongsoran	√			6,0	2031
50	Kab. Tegal	TPA Penujah			√	3,0	2018
51	Brebes 1	TPA Kaliwlingi			√	4,0	2040
52	Brebes 2	TPA Kalijurang			√	2,0	2021

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	*Unmanaged Shallow*	*Unmanaged Deep*		
53	Kota Magelang	TPA Banyu Urip			√	7,8	2016
54	Surakarta	TPA Putri Cempo			√	17,0	2018
55	Salatiga	TPA Ngronggo			√	5,3	2017
56	Kota Semarang	TPA Jatibarang			√	46,0	2026
57	Kota Pekalongan	TPA Degayu			√	4,0	2013
58	Kota Tegal	TPA Muararejo		√		5,0	2022
	JUMLAH		**13**	**4**	**41**	**258,1**	

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2020
Keterangan:
Unmanaged deep : Open dumping ketinggian > 5 mtr
Unmanaged shallow : Open dumping ketinggian < 5 mtr
Controll Landfiil : penutupan dengan tanah 7 hari

Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 58 TPA sebanyak 35 TPA telah melebihi usia pakai secara teknis atau sebesar 60,34 persen dari total TPA. Berdasarkan sistem pengelolaannya maka hanya 22,41 persen yang menggunakan sistem *controlled landfill*, sedangkan sisanya sebanyak 71 persen atau 41 TPA masih menggunakan sistem *open dumping* dengan ketinggian lebih dari 5 meter.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu, yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020) dan penyusunan DED (DLHK, 2021).

Selain timbulan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri. Tahun 2019 jumlah limbah padat yang dihasilkan oleh Rumah Tangga, Terminal, Pabrik/Industri, Tambang, Rumah Sakit, Hotel, Pariwisata, Sekolah sebesar 5.455.694 ton/hari, air limbah 1.750.225,00 m^3/hari, limbah B3 padat 23.550,77 ton/hari dan limbah B3 cair sebesar 431,97 ton/hari.

Tabel 2.102.
Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemar di Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/hari)	Jumlah Limbah B3 Cair (ton/hari)
Bergerak	-	-	-	-	-	-
Tidak Bergerak	Rumah Tangga, Terminal, Pabrik/ Industri, Tambang, Rumah Sakit, Hotel, Pariwi-sata, Sekolah	-	5.455.694	1.750.225	23.550,77	431,97

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021

Wabah virus Covid-19 memberikan dampak dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkungan hidup, utamanya timbulan limbah infeksius Covid-19. Data timbulan limbah medis yang dilaporkan oleh kabupaten/kota mencapai 546.711,48 kg, untuk fasilitas pelayanan kesehatan 106 dari 239 jumlah Rumah Sakit Umum, 194 dari 879 Puskesmas, 41 dari 1.166 klinik serta 7 rumah karantina yang berada di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penanganan limbah medis terutama di saat pandemi Covid-19 yaitu kesenjangan antara kapasitas pengolahan dan timbulan limbah yang semakin meningkat serta distribusi fasilitas pengolahannya perlu menjadi prioritas mempertimbangkan limbah medis Covid-19 masuk dalam kategori infeksius dan menjadi mata rantai penularan penyakit tersebut.

Tabel 2.103.
Jumlah Data Timbulan Limbah Infeksius Covid-19 Tahun 2020

No	Fasyankes	Jumlah Limbah Medis (Kg)	Jumlah Sampah Rumah Tangga Potensi Covid (Kg)	Keterangan
1	Rumah Sakit	625.662,13	21.688,25	106 RS (24 Kab) *)Dari 239 RS umum di 35 Kab/kota di Jawa Tengah
2	Puskesmas	19.802,61	662,56	194 (12 Kab) *) Dari 879 Puskesmas di 35 Kab/kota di Jawa Tengah
3	Klinik, PKM	6.929,78	182,10	41 (4 Kab) *) Dari 1.166 Klinik di 35 Kab/kota di Jawa Tengah
4	Rumah Karantina	-	10.499,20	7 (6 Kab)
	Total	**652.394,52**	**33.032,11**	

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021
*Keterangan: *) Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan Polindes Tahun 2019, BPS*

d. Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah

Kualitas lahan dinilai dari dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Jawa Tengah.

Pada tahun 2019, hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 652.085,68 ha dan hutan rakyat seluas 684.317,70 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah seluas 1.336.403,38 ha. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/22 luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah sebesar 634.601 ha terdiri dari 469.664 ha di luar kawasan dan 164.937 ha di dalam kawasan. Berdasarkan SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, terdapat perubahan luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, yaitu semula 634.601 Ha, menjadi 375.733 Ha (10,96 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah), dengan rincian luas lahan kritis sebesar 171.649,75 Ha dan sangat kritis sebesar 204.083,27 Ha. Berdasarkan status lahan, lahan kritis tersebut 86 persen tersebar di lahan masyarakat/tanah hak, sedangkan sisanya 14 persen tersebar di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kategori kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat. Sedangkan pada lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pemulihan lahan kritis di kawasan hutan negara, khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial, dilakukan melalui sistem perhutanan sosial yang mana masyarakat sekitar hutan mendapat akses untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Untuk menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam implementasi penanganan lahan kritis diprioritaskan melalui penerapan teknologi *agroforestry*. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104.
Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Luas Hutan dalam dan luar kawasan (ha)	1.289.104,54	1.249.104,02	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Kritis (ha)	634.601	634.601	375.733*)	375.733*)	375.733*)
Luas kumulatif lahan yang direhabilitasi per tahun (ha)	36.919	35.333	23.361	23.431	32.389
Perbandingan luas yang direhabilitasi per tahun (%)	5,82	5,57	6,22	6,24	8,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2021
** Berdasarkan SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional*

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Setidaknya ada 17 DAS di Jawa Tengah yang telah mengalami penurunan daya dukungnya dan harus dipulihkan daya dukungnya antara lain DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo, DAS Solo, DAS Citandui, DAS Bodri, DAS Bogowonto, DAS Garang, DAS Serang, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Luk ulo, DAS Wawar Medono dan DAS Lampir, DAS Kabuyutan. Selain penanganan lahan kritis yang berada di matra darat, juga dilakukan penanganan ekosistem mangrove dan pantai melalui rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove.

Tabel 2.105.
Data Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang Menurun Daya Dukungnya

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Keterangan
1	DAS Progo	174.644,93	Buruk (2018), Harus dipulihkan
2	DAS Serayu	372.425,17	Buruk (2017), Harus dipulihkan
3	DAS Bogowonto	57.457,50	Buruk (2019), Harus dipulihkan
4	DAS LukUlo	63.9006,43	Sedang (2020), harus dipulihkan
5	DAS Tuntang,	131.282,01	Harus dipulihkan
6	DAS Pemali,	131.162,91	Harus dipulihkan
7	DAS Solo,	621.350,88	Harus dipulihkan
8	DAS Citandui.	95.622,96	Harus dipulihkan
9	DAS Bodri,	60.557,50	Harus dipulihkan
10	DAS Garang,	21.303,58	Harus dipulihkan
11	DAS Serang,	348.723,62	Harus dipulihkan
12	DAS Cacaban,	17.472,52	Harus dipulihkan
13	DAS Juwana,	120.565,20	Harus dipulihkan
14	DAS Comal,	88.759,53	Harus dipulihkan
15	DAS WawarMedono	78.727,00	Harus dipulihkan
16	DAS Lampir	36.628,21	Harus dipulihkan
17	DAS Kabuyutan	15.369,64	Harus dipulihkan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2021
Keterangan :
1. *Jumlah DAS, Sub DAS dan Sub Sub DAS sebanyak 236 DAS*
2. *Tujuh Belas (17) DAS yang daya dukungnya menurun dan harus dipulihkan memiliki luas 2.317.978,69 ha atau 71% dari luas Provinsi Jawa Tengah*

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan kebakaran hutan. Kerusakan kawasan hutan di Jawa Tengah mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya, yaitu untuk luas pencurian pohon dari 22,88 Ha berhasil diturunkan menjadi 17,41 Ha, serta luas kebakaran hutan dari 3.628,84 Ha berhasil diturunkan menjadi 281,50 Ha. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas pencurian pohon	31,38	29,82	29,00	22,88	17,41
2.	Luas Kebakaran hutan	116,20	1.320,96	4.215,64	3.628,84	281,50
	Total Luas Kerusakan hutan	**147,58**	**1.350,78**	**4.244,64**	**3.651,72**	**298,91**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2021

Pada tahun 2016-2020, produksi hasil hutan cenderung meningkat hingga mencapai 3.044.117,30 m^3, yang berasal dari hasil pemanfaatan hutan rakyat dan hutan negara. Gambaran mengenai produksi hasil hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107.
Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat dan Hutan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat (m^3)	2.687.298,84	2.576.980,41	2.597.954,53	2.632.756,10	2.682.476,19
2	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Negara (m^3)	255.717,9	210.673	254.657	278.118,06	361.641,11
	Total Produksi Hasil Hutan (m^3)	2.943.016,74	2.787.653,41	2.852.611,53	2.910.874,16	3.044.117,30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 2021

e. Pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan

Pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan. Berikut gambaran perkembangan pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan di Jawa Tengah tahun 2016-2020.

Tabel 2.108.
Jumlah Pengelola Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan di Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengguna kawasan hutan	Unit	153	165	179	193	201
2	Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m^3 berizin	Unit	902	920	938	967	999
3	Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu	Unit	199	567	636	736	838

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Pengguna kawasan hutan setiap tahun bertambah, dengan jumlah pengguna kawasan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 201 unit. Selain itu jumlah industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m^3 berizin setiap tahun terus bertambah, dengan jumlah sampai dengan tahun 2020 sebanyak 999 unit. Jumlah Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu baik pada Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) maupun industri hasil hutan meningkat setiap tahun dimana sampai dengan tahun 2020 berjumlah 838 unit. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor produk hasil hutan di Jawa Tengah.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan ke masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah.

Tabel 2.109.
Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	Total
1	Pemberian Akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat	Ha	2.852,07	25.448,80	6.872,76	655,21	35.828,84
2	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi	Kelompok	16	54	79	81	81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dalam kurun waktu 4 tahun (2017-2020), telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 81 SK untuk 81 Kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 35.828,84 Ha. Sebagai salah satu upaya memulihkan dampak

pandemi Covid-19 dilakukan penguatan perhutanan sosial yang diarahkan pada penataan kelembagaan, pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha kelompok dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok.

f. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah

Besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 0,51 persen menurun menjadi 0,48 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya produksi kayu yang berada di kawasan hutan negara berasal dari tegakan yang berumur muda, sehingga hasilnya merupakan kayu berukuran kecil dan harganya lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanaman hutan rakyat dari jenis-jenis penghasil bahan baku kayu industri untuk meningkatkan industri pengolahan kayu yang bersertifikasi legal kayu (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK). Data kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Nilai Sektor Kehutanan (juta rupiah)	5.516.303,29	5.914.322,01	6.197.300,16	6.209.872,32	6.486.868,11
2	Nilai Total PDRB (juta rupiah)	1.087.316.682,68	1.172.794.523,68	1.268.261.165,59	1.361.567.356,73	1.348.600.397,35
3	Kontribusi (%)	0,51	0,50	0,49	0,46	0,48

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah. 2021
Keterangan:
**) angka sementara*
***) angka sangat sementara*

2. Penanggulangan Bencana

Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan ancaman bencana tinggi. Potensi ancaman yang ada di Jawa Tengah meliputi 1) bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longor, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan; 2) bencana non-alam, yaitu epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 2.112 kejadian di tahun 2016 menjadi 2.870 kejadian di tahun 2020. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidro meteorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Setidaknya teridentifikasi 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.111.

Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angintopan	419	490	407	706	629
2	Banjir	298	270	171	171	459
3	Gas beracun	0	0	0	0	2
4	Gempabumi	0	11	3	5	2
5	Kebakaran	468	600	589	718	356
6	Kekeringan	0	0	0	30	0
7	Letusangn.Api	0	1	5	2	12
8	Tanah longsor	927	1.091	555	718	1.387
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	0	0	4	6	23
Jumlah		**2.112**	**2.463**	**1.734**	**2.356**	**2.870**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2021

Selama kurun waktu 2016-2020, kejadian bencana telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 299 orang meninggal dunia, 33 orang hilang, 177 orang luka berat, dan 593 orang luka ringan.

Tabel 2.112.

Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2016	2.112	129	21	61	96
2017	2.463	60	1	60	107
2018	1.734	39	4	17	124
2019	2.356	39	4	24	175
2020	2.909	32	3	15	91
Jumlah		**299**	**33**	**177**	**593**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2021

Taksiran kerugian tertinggi akibat bencana tercatat di tahun 2016 sebesar 3 triliyun rupiah lebih, sedangkan pada tahun 2017 hingga 2020 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana kebakaran.

Tabel 2.113.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Bencana	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)
1	Angin Topan	419	7.648.565	490	8.016.727	407	5.445.666	706	15.367.598	NA	5.469.095
2	Banjir	298	1.914.023.342	270	7.731.340	171	2.924.463	171	2.777.845		32.798.305
3	Tanah Longsor	927	185.627.303	1.091	21.025.867	555	5.111.856	718	9.354.277		16.806.207
4	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	30	0		0
5	Kebakaran	468	1.127.741.291	600	40.622.373	589	33.866.505	718	55.387.150		18.779.138
6	Gempa Bumi	-	-	-	-	3	65.000	5	65.000		0
7	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	5	-	2	0		0
8	Ombak Besar	-	-	-	-	4	57.000	6	0		0
9	Lainnya	-	-	12	9.771.788	-	-	-	-		0
	Jumlah	**2.112**	**3.235.040.501**	**2.463**	**87.168.095**	**1.734**	**47.470.620**	**2.356**	**82.951.870**	**2.870**	**73.582.747**

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2021

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, BNPB telah melakukan penilaian Indeks Risiko Bencana yang terakhir diperbarui sesuai data tahun 2018. Kajian risiko bencana dilakukan dengan mengalikan komponen bahaya dengan kerentanan dibagi kapasitas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) social budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Semakin besar bahaya dan kerentanan serta semakin kecil kapasitas daerah maka risiko bencana akan semakin besar.

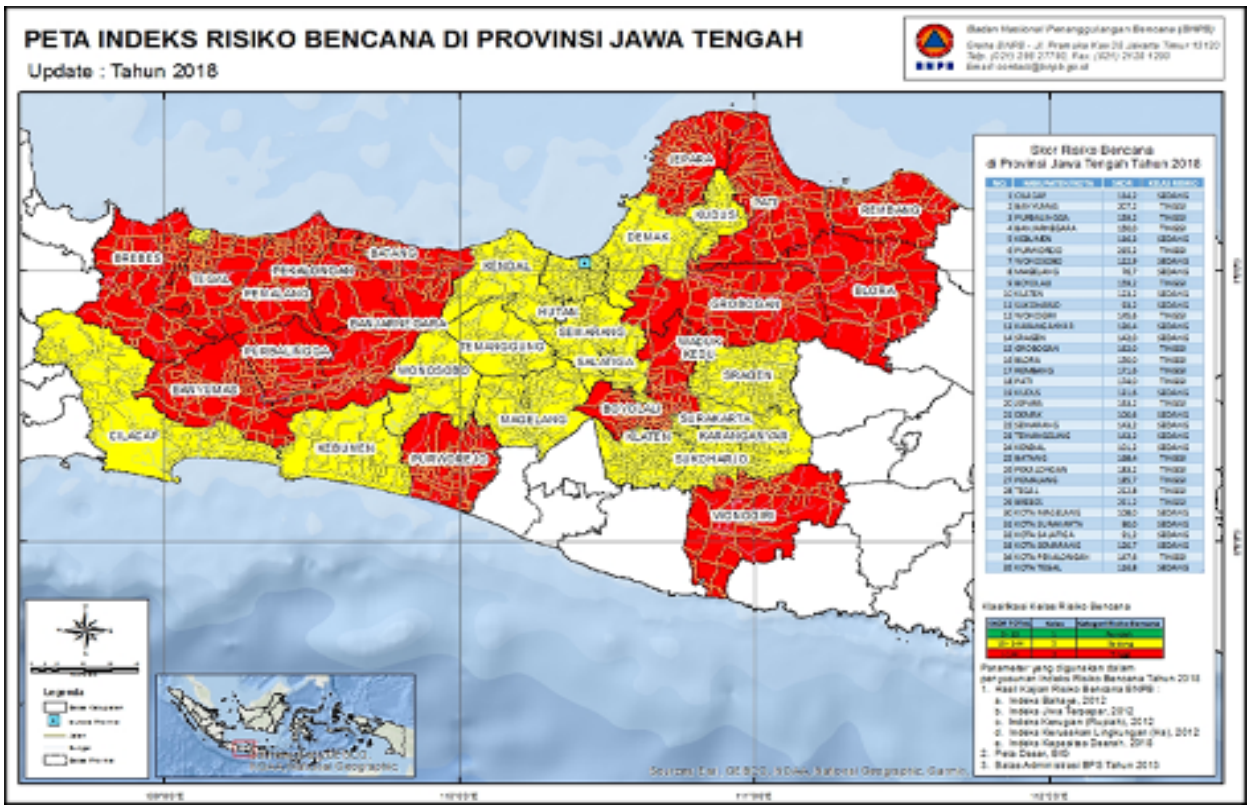

Sumber: BNPB, 2020

Gambar 2.81.
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Hasil penilaian Indeks Risiko Bencana tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah berada di posisi 17 dari 34 provinsi dengan nilai 146,47 (risiko bencana tinggi). Pada level kabupaten/kota, terdapat17 kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana tinggi dan 18 kabupaten/kota memiliki indeks risiko bencana sedang. Kabupaten yang memiliki indeks risiko bencana tertinggi meliputi Kabupaten Purworejo, Tegal, Brebes, dan Banyumas.

Nilai indeks risiko bencana Provinsi Jawa Tengah data yang tersaji masih di kurun waktu 2016-2018, sedangkan data terbaru masih belum rilis. Nilai indeks risiko bencana Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan 150,92 ditahun 2016 menjadi 146,47 di tahun 2018 namun masih berada pada kategori risiko bencana tinggi. Sementara itu, nilai indeks risiko bencana kabupaten kota selama periode yang sama tidak banyak mengalami perubahan, kecuali pada Kabupaten Pemalang, Kebumen, Cilacap, Kendal, Wonosobo, Demak, Magelang dan Kota Semarang. Dengan mengasumsikan ancaman bahaya relatif tetap, kondisi ini mengindikasikan bahwa belum ada upaya signifikan yang dilakukan untuk menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2.114.
Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2016-2018

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	KELAS RISIKO
1	Purworejo	215,20	215,20	215,20	Tinggi
2	Tegal	212,80	212,80	212,80	Tinggi
3	Brebes	211,20	211,20	211,20	Tinggi
4	Banyumas	207,20	207,20	207,20	Tinggi
5	Pemalang	206,00	206,00	185,70	Tinggi
6	Pekalongan	183,20	183,20	183,20	Tinggi
7	Pati	174,00	174,00	174,00	Tinggi
8	Rembang	171,60	171,60	171,60	Tinggi
9	Batang	168,40	168,40	168,40	Tinggi
10	Jepara	163,20	163,20	163,20	Tinggi
11	Grobogan	162,00	162,00	162,00	Tinggi
12	Purbalingga	159,20	159,20	159,20	Tinggi
13	Boyolali	159,20	159,20	159,20	Tinggi
14	Banjarnegara	150,00	150,00	150,00	Tinggi
15	Blora	150,00	150,00	150,00	Tinggi
16	Kota Pekalongan	147,60	147,60	147,60	Tinggi
17	Wonogiri	145,60	145,60	145,60	Tinggi
18	Semarang	143,20	143,20	143,20	Sedang
19	Temanggung	143,20	143,20	143,20	Sedang
20	Sragen	142,00	142,00	142,00	Sedang
21	Kebumen	165,76	151,08	140,31	Sedang
22	Cilacap	175,53	159,77	139,90	Sedang
23	Kudus	131,60	131,60	131,60	Sedang
24	Karanganyar	130,40	130,40	130,40	Sedang
25	Kendal	156,80	142,49	124.57	Sedang
26	Klaten	123,20	123,20	123,20	Sedang
27	Wonosobo	135,20	135,20	122,94	Sedang
28	Kota Semarang	124,72	124,72	120,75	Sedang
29	Demak	138,20	127,42	118,21	Sedang
30	Kota Tegal	116,80	116,80	116,80	Sedang
31	Kota Magelang	108,00	108,00	108,00	Sedang
32	Sukoharjo	93,20	93,20	93,20	Sedang
33	Kota Salatiga	91,20	91,20	91,20	Sedang
34	Magelang	96,86	90,82	90,82	Sedang
35	Kota Surakarta	80,00	80,00	80,00	Sedang
Jawa Tengah		**150,92**	**149,16**	**146,47**	**Tinggi**

Sumber: BNPB, 2021

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2020, telah terpasang sebanyak 76 unit peralatan EWS dan 590 unit rambu jalur evakuasi

Tabel 2.115.
Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2016 – 2020

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2016	2	-	46	120
2017	5	-	51	90
2018	9	-	60	150
2019	15	-	75	230
2020	1	-	76	-

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2021

Bentuk mitigasi non-struktural yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh bencana menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 95 desa sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.116.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2020

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2016	8	58 desa
2017	8	66 desa
2018	8	74 desa
2019	18	92 desa
2020	3	95 desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2021

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana

yang merugikan. Indikator kunci desa tangguh bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

2.1.9. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

1. Reformasi Birokrasi

Kinerja reformasi birokrasi di Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang semakin meningkat. Peningkatan IRB ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2020, IRB Provinsi Jawa Tengah mencapai angka sebesar 77,05 meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 76,99. Nilai IRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan capaian IRB tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat baik.

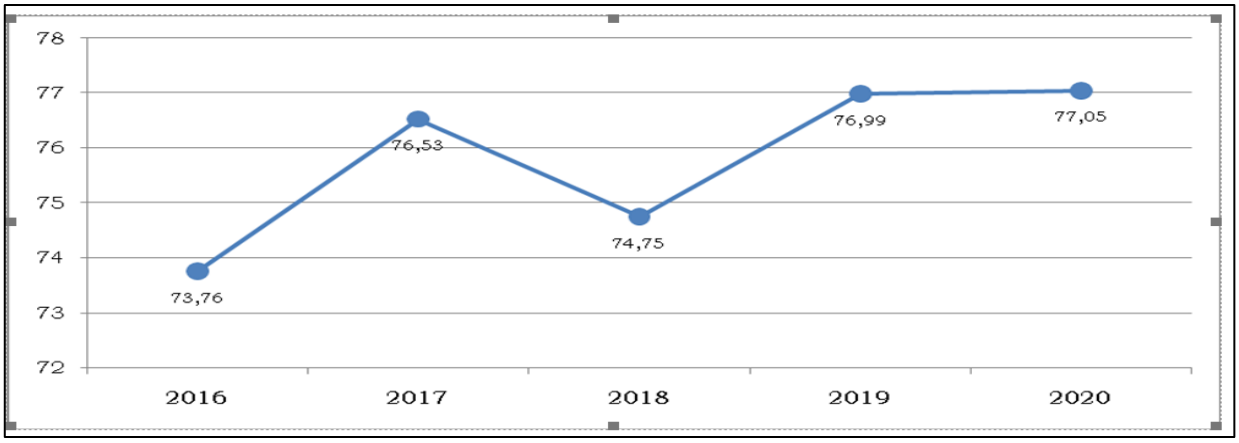

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2021.

Gambar 2.82.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

2. Pelayanan Publik

Unit Pelayanan Publik dalam menjalankan fungsinya diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang harus dipenuhi adalah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Standar pelayanan merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2015-2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan standar manajemen mutu melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi ISO, serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan.

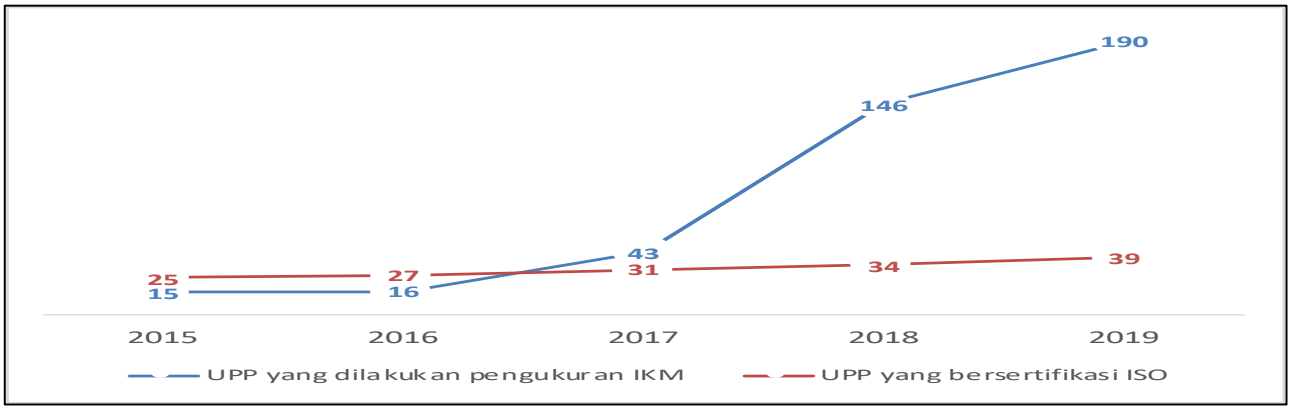

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.83.
Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 (Unit)

Hasil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan masyarakat adalah hasil kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 IKM terus meningkat, dimana tahun 2019 IKM Jawa Tengah sebesar 82,54. Angka ini meningkat 1,18 poin dari tahun 2018 yang sebesar 81,36. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dan semakin diterima oleh masyarakat.

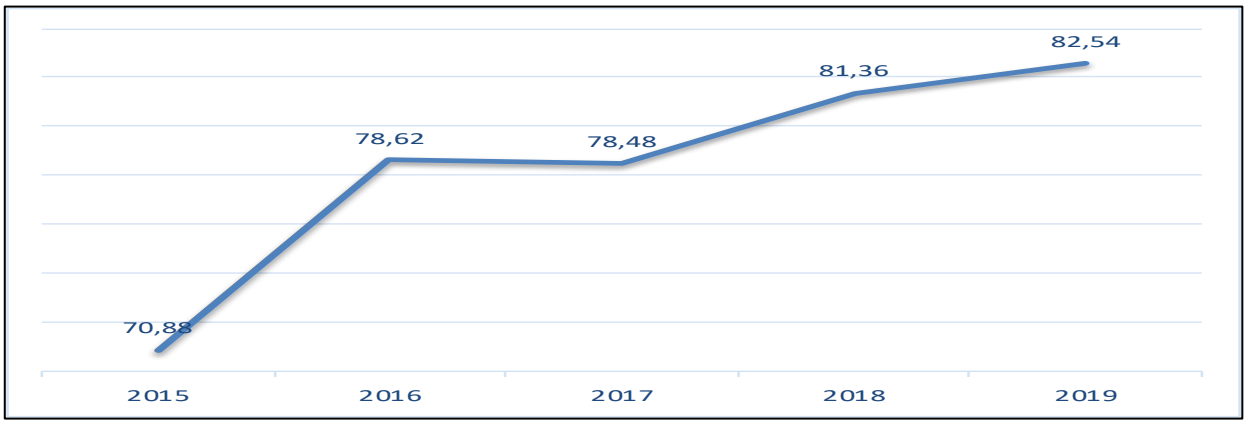

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.84.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terutama di era digital saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil dari implementasi kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik diukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penilaian Indeks SPBE pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan oleh Kemen PAN dan RB, tetapi dengan turunnya Surat KemenPAN dan RB No:B/41/KT.03/2021 maka pada tahun 2020 digunakan hasil penilaian mandiri.

Berdasarkan penilaian mandiri untuk tahun 2020, Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar sebesar 4,20 meningkat dari tahun 2019 sebesar 3,85. Kenaikan Indeks SPBE dari tahun 2019 ke tahun 2020 secara rinci ditunjukkan oleh masing-masing komponennya sebagai berikut untuk: Indeks Domain Tata Kelola SPBE meningkat dari 3,57 menjadi 3,71; Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE meningkat dari 3,41 menjadi 3,47; Indeks Domain Layanan SPBE juga meningkat dari 4,18 menjadi 4,67.

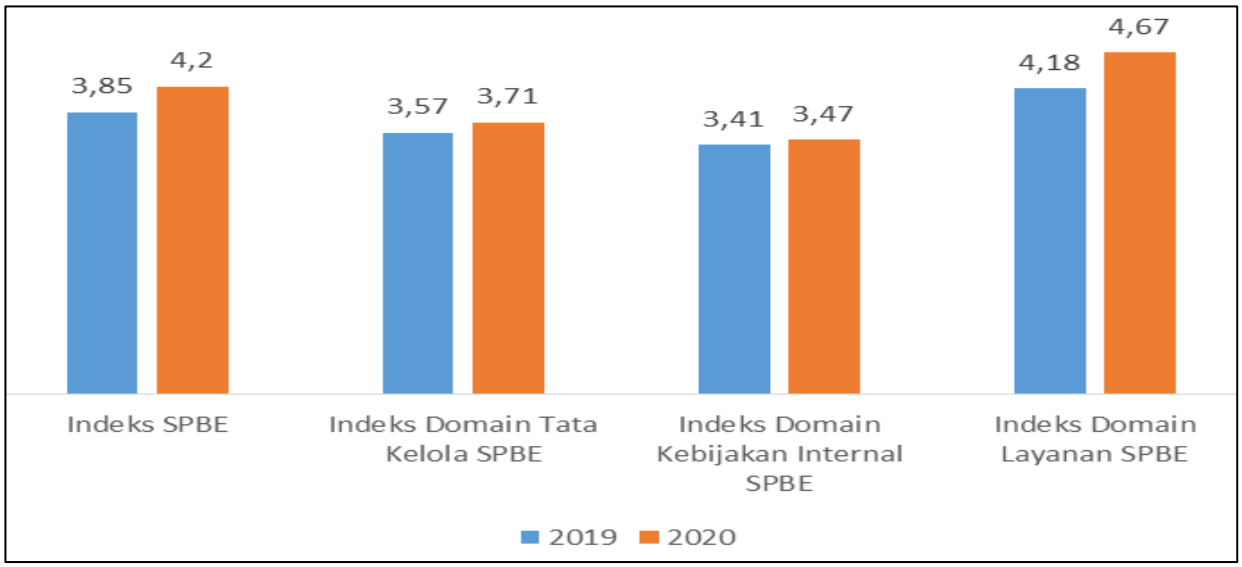

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2020

Gambar 2.85.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Hasil Penilaian Mandiri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2020

4. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB. Dari 5

komponen SAKIP yang dievaluasi, semua komponen mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan, kecuali pada komponen evaluasi internal yang mengalami penurunan, utamanya pada aspek kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja. Hal ini perlu mendapat perhatian bagaimana kedepan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa ditingkatkan secara lebih baik lagi dan berkelanjutan, terutama pada komponen evaluasi internal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah dan dilaporkan melalui e-SAKIP Reviu. Adapun data hasil evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117.
Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,39	25,24	26,38	26,77	26,64
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,95	18,13	19,87	20,50	20,23
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,68	10,79	11,68	11,99	12,08
4.	Evaluasi Internal	10	8,01	8,23	8,26	8,26	7,02
5.	Capaian Kinerja	20	12,57	13,55	13,99	14,04	14,28
	Hasil Nilai SAKIP		**76,60**	**75,94**	**80,18**	**81,56**	**80,25**
	Predikat		**BB**	**BB**	**A**	**A**	**A**

Sumber: Kemenpan RB, 2021.

Capaian pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sangat baik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum diikuti seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB pada tahun 2020, terdapat 4 kabupaten/kota yang mencapai predikat BB (Sangat Baik), yaitu Kabupaten Banyumas, Cilacap, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan; sebanyak 31 kabupaten/kota dengan predikat B (Baik). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melaksanakan kegiatan pembinaan SAKIP 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah berupa koordinasi/fasilitasi dan evaluasi penyusunan RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaporan kinerja, perjanjian kinerja, dan evaluasi SAKIP dalam rangka peningkatan penerapan sistem manajemen kinerja di kabupaten/kota.

5. Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi. Pada tahun 2020, nilai

penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 289, nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2018 yaitu sebesar 267,5 dan tahun 2019 yaitu sebesar 280, yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Baik. Nilai tersebut menggambarkan Indeks Sistem Merit Jawa Tengah di tahun 2020 adalah sebesar 0,70, sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 0,70.

Tabel 2.118.
Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2020

NO	Aspek	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kebutuhan	60	10	37,5
2	Pengadaan	18	30	38
3	Pengembangan Karier	62,5	72,5	55
4	Promosi dan Mutasi	31	30	20
5	Manajemen Kinerja	42,5	50	67,5
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	22,5	30	35
7	Perlindungan dan Pelayanan	8	10	16
8	Sistem Informasi	23	20	20
Skor Nilai		**267,5**	**280**	**289**
Indeks Sistem Merit		**0,66**	**0,70**	**0,70**

Sumber: KASN, 2020

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diketahui bahwa aspek Pengembangan Karir dan aspek Promosi dan Mutasi mengalami penurunan, dikarenakan pola pengembangan karir berdasarkan kompetensi teknis dan manajerial belum tersistem dan terinci dengan baik serta belum didukung dengan penetapan kebijakan internal tentang pola karir.

6. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah terjadinya konflik bernuansa SARA. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Selama kurun waktu 2016-2020, jumlah kasus konflik bernuansa SARA konsisten menurun, yaitu semula 17 kasus pada tahun 2016 menjadi 9 kasus pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan upaya penanganan konflik SARA di Jawa Tengah yang cukup signifikan antara lain melalui pendampingan

secara intensif kepada masyarakat yang rawan terjadi konflik SARA, menggiatkan kegiatan antar kelompok maupun antar agama, dan patroli *cyber* terhadap penyebaran konten *hoax* dan *hatespeech*.

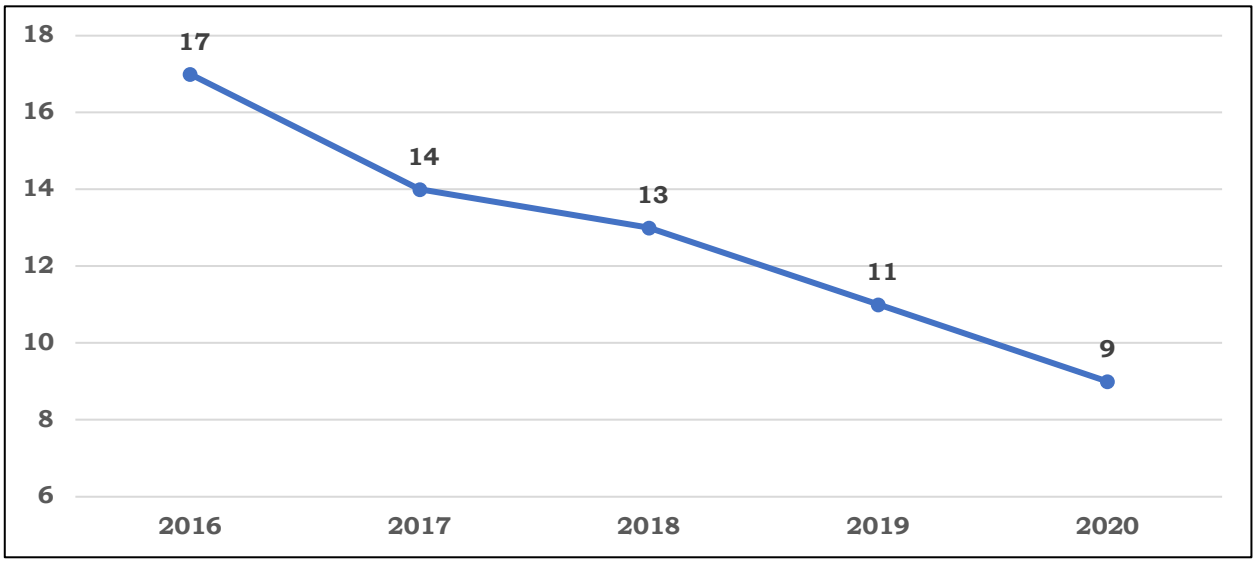

Sumber: BINDA Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.86.
Jumlah Kasus Konflik Bernuansa SARA di Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

Kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari jumlah tindak pidana yang tertangani. Capaian kinerja penyelesaian kasus tindak pidana di Jawa Tengah tahun 2020 adalah sebesar 84,49 persen, meningkat dibanding tahun 2018 yang mencapai 68,35 persen.

Tabel 2.119.
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Tertangani	
1	2016	13.425	9.176	68,35
2	2017	11.420	8.489	74,33
3	2018	9.834	7.251	73,73
4	2019	10.291	8.334	80,98
5	2020	9.807	8.286	84,49
Jumlah		**54.777**	**41.536**	**75,83**

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2021

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga demokrasi (*democratic institution*), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa

Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat dari 66,71 pada tahun 2016 menjadi 75,43 pada tahun 2020.

Tabel 2.120.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	**Kebebasan Sipil**	66,06	69,07	76,21	78,43	73,68
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	12,50	6,25	97,66	60,16	60,16
	2. Kebebasan Berpendapat	75,70	61,82	64,56	48,59	38,88
	3. Kebebasan Berkeyakinan	66,51	81,54	75,38	82,32	80,40
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	80,03	63,53	75,25	86,97	75,54
II.	**Hak-Hak Politik**	67,24	67,24	66,92	67,91	75,46
	1. Hak Memilih dan Dipilih	84,48	84,48	83,84	85,82	85,70
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	65,22
III.	**Lembaga-Lembaga Demokrasi**	66,69	78,82	75,42	90,50	77,60
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	86,71	86,71	86,71	84,84	84,84
	2. Peran DPRD	50,50	79,74	95,77	87,01	76,41
	3. Peran Partai Politik	74,29	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	27,43	83,16	54,30	79,56	81,96
	5. Peran Peradilan yang Independen	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
Skor IDI		**66,71**	**70,85**	**72,17**	**77,22**	**75,43**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Selama tahun 2016 – 2019 IDI Provinsi Jawa Tengah terus meningkat, namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Dua aspek mengalami penurunan yaitu aspek kebebasan sipil dan aspek lembaga-lembaga demokrasi. Sementara itu aspek hak-hak politik meningkat cukup baik di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan terlibat aktif dalam komitmen kepala daerah dalam meningkatkan capaian IDI, koordinasi intensif Pokja IDI, upaya diseminasi IDI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta melaksanakan penguatan budaya politik demokratis dari semua *stakeholders* melalui kegiatan penguatan pendidikan dan budaya politik bagi seluruh elemen masyarakat.

Kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari jumlah unjuk rasa berdasarkan kelompok massa maupun tuntutan.Unjuk rasa berdasar kelompok massa dari tahun ke tahun cenderung menurun, serta jumlah unjuk rasa pada tahun 2018 merupakan jumlah unjuk rasa terendah intensitasnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2016 tercatat sebanyak 369 kali, dan

menurun menjadi 332 kali pada tahun 2020. Kondisi demikian secara umum dapat menunjukkan situasi di Jawa Tengah relatif cukup kondusif.

Tabel 2.121.
Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Kelompok Massa	Tahun / Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru	1	1	2	0	0
2	Mahasiswa	8	1	10	61	40
3	Buruh	5	7	17	59	100
4	Masyarakat	65	50	79	42	37
5	Warga Desa	0	0	0	51	39
6	Ormas/Parpol	0	0	0	76	116
	Jumlah	369	279	108	289	332

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2020

Selanjutnya, untuk unjuk rasa berdasarkan tuntutan selama periode tahun 2016-2020 dominan pada jenis tuntutan politik sebanya 545 tuntutan (39,58 persen), diikuti dengan jenis tuntutan sosial budaya sebanyak 468 tuntutan (33,98 persen).

Tabel 2.122.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Tuntutan	Tahun					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ideologi	0	0	0	0	0	0
2	Politik	300	201	10	26	8	545
3	Ekonomi	40	51	31	53	87	262
4	Sosbud	5	4	60	184	215	468
5	Hukum dan HAM	17	11	7	20	7	62
6	Pendidikan	7	12	0	1	7	27
7	Kesehatan	0	0	0	5	8	13
	Jumlah	**369**	**279**	**108**	**289**	**332**	**1.377**

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2020

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2020 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2020 dengan menggunkaan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu $\leq$ 50% Sangat Rendah; 51% $\leq$ 65% Rendah; 66 % $\leq$ 75% Sedang; 76 % $\leq$ 90% Tinggi dan 91% $\leq$ 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2020 mendasarkan urusan

sebagaimana secara keseluruhan dapat dikatagorikan sangat tinggi dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.123.

Rekapitulasi Rata-rata Realiasi Ketercapaian Kinerja RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan

Urusan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Predikat
(1)	(2)	
IKU	**71,85**	**Sedang**
IKD	**100,85**	**Sangat Tinggi**
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
Pendidikan	100,08	Sangat Tinggi
Kesehatan	115,09	Sangat Tinggi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,06	Sangat Tinggi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	121,30	Sangat Tinggi
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	114,95	Sangat Tinggi
Sosial	100	Sangat Tinggi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
Tenaga Kerja	170,13	Sangat Tinggi
PP dan PA	107,26	Sangat Tinggi
Pangan	106,20	Sangat Tinggi
Pertanahan	122,60	Sangat Tinggi
Lingkungan Hidup	222,24	Sangat Tinggi
Administrasi Kependudukan &	388,98	Sangat Tinggi
Pemberdes	105,40	Sangat Tinggi
Pengendalian Penduduk & KB	96,52	Sangat Tinggi
Perhubungan	103,81	Sangat Tinggi
Komunikasi dan Informatika	106,78	Sangat Tinggi
Koperasi dan UKM	29,92	Sangat Rendah
Penanaman Modal	146,57	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan OR	90,48	Tinggi
Statistik	157,34	Sangat Tinggi
Persandian	100	Sangat Tinggi
Kebudayaan	130,64	Sangat Tinggi
Perpustakaan	112,38	Sangat Tinggi
Kearsipan	204,64	Sangat Tinggi
Urusan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan	100,09	Sangat Tinggi
Pariwisata	114,59	Sangat Tinggi
Pertanian	126,10	Sangat Tinggi
Kehutanan	121,12	Sangat Tinggi
Energi dan Sumber Daya Mineral	110,99	Sangat Tinggi
Perdagangan	183,82	Sangat Tinggi
Perindustrian	-78,09	Sangat Rendah
Transmigrasi	Na	Na
Urusan Penunjang Pemerintahan		
Perencanaan	100	Sangat Tinggi
Keuangan	-135,06	Sangat Rendah

Urusan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Predikat
(1)	(2)	
Kepegawaian dan Diklat	99,06	Sangat Tinggi
Penelitian dan Pengembangan	100	Sangat Tinggi
Pengawasan	244,54	Sangat Tinggi
Fungsi Lainnya	102,05	Tinggi
Jumlah		
Persentase		

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah IKD) dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.124.
Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Jumlah Indika-tor	Tercapai (Capaian Tahun 2020 ≥ Target Akhir RPJMD)		Akan Tercapai (Capaian Tahun 2020 ≥ 40% & < 100% Target Akhir RPJMD)		Perlu Upaya Keras (Capian Tahun 2020 < 40% Target RPJMD)		NA	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
I K U	13	2	15,38	10	76,92	1	7,69	0	0
I K D	194	66	34,02	89	45,88	28	14,43	11	5,67
I K P D	961	307	31,95	439	45,68	208	21,64	7	0,73

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020 (hasil analisis)

Pembangunan tahun 2020 terjadi anomali kondisi pembangunan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dimana telah dilakukan 2 kali *refocussing* alokasi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, penyesuaian terhadap penurunan pendapatan tahun 2020 dan kondisi ekonomi, sosial serta keadaan masyarakat yang memburuk ditandai utamanya dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali target tahun 2020 yang secara keseluruhan cenderung tidak memenuhi target yang telah di tetapkan pada RKPD Tahun 2020. Rencana target 2020 yang kemudian akan menjadi *baseline* perhitungan kembali rencana target tahun 2022 disamping tetap memperhatian capaian tahun 2020 dan target RPJMD Tahun 2018-2023 serta target dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Permasalahan pembangunan pada tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

a) Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan terutama bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan miskin;
b) Masih terdapat anak putus dan tidak sekolah;
c) Serapan lulusan pendidikan menengah kejuruan pada lapangan pekerjaan masih rendah.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

a) Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita;
b) Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan *stunting* pada baduta dan balita;
c) Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
d) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
e) Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
f) Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
g) Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput bola”.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan serta untuk meningkatkan arus distribusi barang, jasa, dan orang utamanya dalam mendukung perekonomian. Dalam pelaksanaanya yang masih perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1) Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi sedang dan rusak, serta terdapat jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton) sesuai Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
2) Adanya perlintasan sebidang rel kereta api di jalan provinsi dan persimpangan jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan;
3) Terdapat ruas jalan non status yang mempunyai fungsi strategis dan perlu penanganan seperti jalur jalan lintas selatan.

b) Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, air bersih, dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Masih terdapat sarana dan prasarana jaringan irigasi yang rusak dan perlu dikembangkan;
2) Masih diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan domestik;
3) Masih terdapat kondisi sarana dan prasarana sungai dan pantai dalam kondisi rusak dan atau berkurang daya tampungnya utamanya di wilayah pantura;
4) Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasana pengendali banjir dan rob agar dapat mengurangi luasan genangan serta pengelolaannya sejalan dengan peningkatan kejadian dan dampak bencana alam.

c) Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:

1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas air minum di wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai standar SDG's serta keterbatasan sumber daya pengelolaan air minum regional;

2) Akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas pengelola instalasi pengolahan limbah domestik komunal.

d) Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan Gedung Milik Daerah

Dalam sektor jasa konstruksi, daya saing pelaku jasa kontruksi dan kelayakan bangunan gedung milik daerah masih memerlukan perhatian pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi perlu ditingkatkan untuk menghadapi kompetisi pasar bebas;
2. Perlunya pemetaan kondisi kelayakan bangunan gedung milik pemerintah.

e) Penataan Ruang

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang sebagai berikut:

1) Perlunya penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi;
2) Masih banyaknya RTRW kabupaten/kota yang perlu direvisi dan seluruh kabupaten/kota belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan;
3) Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada RTH perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

a) Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (*Backlog* Rumah) yang masih tinggi;
b) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah;
c) Perlu pendampingan penanganan rumah masyarakat korban bencana rusak parah dan/atau harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman serta masyarakat yang tinggal di lahan milik provinsi, atau tinggal di daerah yang direncakan untuk dilaksanakan program pemerintah;
d) Belum adanya justifikasi tingkat kebencanaan baik nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menjadi dasar penanganan Bencana;
e) Adanya dinamika penetapan luasan kawasan permukiman kumuh oleh Bupati/Walikota yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
f) Belum adanya pola penganggaran dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh terutama untuk menangani kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 -15 Ha oleh Pemerintah Provinsi;

g) Perlunya sinergi penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru;
h) Belum terpadunya kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan kebijakan sertifikasi dan registrasi pelaku pembangunan perumahan;
i) Belum adanya ketersediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang valid, terkini (*up-to-date*), dan terintegrasi;

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Jawa Tengah, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan ketertiban umum, serta penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

a) Masih kurangnya upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu untuk mengatasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b) Pelanggaran terhadap produk hukum daerah masih cukup tinggi;
c) Tingginya ancaman bencana akibat kondisi topografi, geologi dan hidrologi, serta dampak perubahan iklim dan aktivitas masyarakat;
d) Tingginya kerentanan masyarakat, infrastruktur wilayah dan lingkungan;
e) Rendahnya kapasitas masyarakat dan lembaga dalam upaya PRB.

6) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

a) Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PPKS dalam panti dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintahan dan antar sektor;
b) Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya;
c) Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial.

b. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

a) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja;
b) Masih adanya kasus hubungan industrial yang perlu diselesaikan;
c) Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
d) Belum optimalnya jaminan sosial bagi tenaga kerja dan pekerja bukan penerima upah;
e) Masih terdapatnya jumlah penduduk usia muda 15 -24 tahun yang termasuk NEET yang tinggi (meningkat dari tahun 2017 - 2020) yaitu jumlah yang tidak bekerja, tidak bersekolah dan tidak sedang diberikan pelatihan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

a) Belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang;
b) Belum optimalnya pemenuhan hak anak;
c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3) Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

a) Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah yang belum merata dan masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan;
b) Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
c) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat.

4) Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa dan reforma agraria. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

a) Instansi yang membutuhkan tanah masih belum memahami mekanisme dan persyaratan sehingga dokumen pengadaan tanah yang diajukan belum lengkap (detail) dan menghambat verifikasi dokumen, tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
b) Belum optimalnya kegiatan Reforma Agraria terkait akses reform dilingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
c) Lemahnya penataan administrasi penguasaan dan kepemilikan tanah khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), tanah kas desa dan tanah pemerintah (HP,HGU) atau tanah BUMN sehingga dikuasai oleh masyarakat yang memunculkan permasalahan pertanahan.

5) Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlang-sungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaanya, ditemukan permasalahan meliputi:

a) Menurunnya kualitas lingkungan hidup (air, udara, laut dan tanah);
b) Penanganan dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi:

a) Pemanfaatan data kependudukan sebagai bahan rujukan dalam berbagai sektor pembangunan belum dioptimalkan;
b) Belum semua kabupaten/kota mendorong masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a) BUMDesa sebagai katalisator perekonomian desa masih belum dipahami sepenuhnya oleh desa sehingga masih banyak desa yang belum membentuk BUMDesa dan masih perlunya peningkatan status klasifikasi BUMDesa;
b) Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan guna mendukung pembangkitan ekonomi desa.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

a) Belum optimalnya kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten/kota dan provinsi;
b) Menurunnya kesertaan KB;
c) Perlunya peningkatan peran Tri Bina dan UPPKA guna mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9) Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

a) Masih diperlukannya pengembangan pelayanan angkutan dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya (termasuk untuk mendukung kebijakan nasional adanya rencana pengembangan kawasan industri dan implementasi *major project* RPJMN 2020 -2024);
b) Masih diperlukannya upaya keras untuk meminimalisasi adanya potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan provinsi dan perlintasan sebidang dengan jalur rel kereta api serta penyeberangan sungai antar kabupaten/kota;
c) Masih diperlukannya upaya keras peningkatan pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
d) Masih diperlukannya upaya fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat (bandara, pelabuhan, perkeretaapian dan terminal tipe A);
e) Sampai dengan tahun 2020, proses pengalihan aset dan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional belum selesai.

10) Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan aplikasi informatika dan *website* harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

a) Belum semua perangkat daerah memanfaatkan *data center, fiber obtic*, dan *bandwidth* yang sudah terbangun;
b) Masih diperlukan peningkatan keamanan sistem informasi pembangunan;
c) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
d) Masih adanya wilayah pemerintahan yang belum tersedia/terjangkau akses internet;
e) Masih perlu peningkatan akses informasi karena belum dapat diakses masyarakat secara merata.

11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

a) Menurunnya tingkat koperasi aktif;
b) Menurunnya jumlah koperasi simpan pinjam (KSP/USP) yang sehat;
c) Menurunnya laju pertumbuhan UMKM;
d) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja UMKM.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

a) Kendala pelaku usaha saat *starting up* meliputi ketersediaan lahan/tata ruang, perizinan, dan tenaga kerja sesuai kompetensi yang diperlukan;
b) Kendala terkait belum lengkapnya ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal;
c) Pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang belum merata di Jawa Tengah;
d) Pelambatan pertumbuhan penanaman modal akibat dampak Covid-19.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meingkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

a) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda;
b) Masih tingginya pemuda yang bekerja sebagai buruh /karyawan yang menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan pemuda;
c) Belum optimalnya prestasi atlet Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional;
d) Belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
e) Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan *stakeholder.*

14) Statistik

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date,* dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain:

a) Validitas data dan informasi, belum *link and match* antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan;
b) Belum optimalnya integrasi aplikasi pengolah data perangkat daerah dengan *Single Data System* untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
c) Belum adanya standarisasi data sektoral dan metadata oleh pusat dalam rangka implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019;
d) Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan data statistik sektoral;
e) Masih kurangnya pemahaman badan publik terhadap keterbukaan informasi publik

15) Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi imformasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

a) Masih banyaknya sarana prasarana persandian dan keamanan informasi yang belum sesuai standar;
b) Keterbatasan kompetensi SDM aparatur dalam mengelola persandian dan keamanan informasi.

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan menghadapi berbagai kendala baik dari sisi fisik maupun non fisik yaitu:

a) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya belum memadai;
b) Jumlah kelompok seniman menurun;
c) Partisipasi seniman dalam kegiatan kesenian menurun;

d) Masih kurangnya jumlah pamong budaya dan SDM arkeolog khususnya untuk pengelolaan cagar budaya.

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Jawa Tengah, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah:

a) Perlu peningkatan kualitas layanan perpustakaan provinsi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat;
b) Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan baik perpustakaan umum dan keliling, maupun *online*;
c) Terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi pengelolaan perpustakaan.

18) Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

a) Masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan;
b) Terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi pengelolaan arsip yang berakibat belum optimalnya kualitas layanan kearsiapan untuk kebutuhan informasi masyarakat.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa perma-salahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

a) Belum optimalnya produksi perikanan dan produktivitas garam;
b) Belum optimalnya jaminan terhadap risiko usaha penangkapan ikan;
c) Masih rendahnya konsumsi ikan;
d) Belum optimalnya pembudidayaan ikan;
e) Tingginya kerusakan ekosistem pesisir;
f) Belum optimalnya penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran;

g) Pengelolaan kelembagaan dan usaha perikanan dan kelautan masih bersifat konvensional belum berbasis korporasi.

2) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembanganya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

a) Belum maksimalnya tata kelola destinasi pariwisata dan daya tarik wisata yang baik;
b) Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri;
c) Masih terbatasnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi kompetensi;
d) Masih kurangnya kemitraan dan kerjasama lintas sektor, publik, dan privat;
e) Menurunnya kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB.

3) Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian~~;~~
b) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
c) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
d) Pengembangan kelembagaan petani belum berorientasi pada usaha ekonomis.

4) Kehutanan

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yaitu:

a) Pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang belum sepenuhnya berkelanjutan;
b) Menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengakibatkan bencana banjir, erosi, longsor, dan kekeringan;
c) Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan energi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan industri. Kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur juga semakin meningkat sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Terkait hal tersebut, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

a) Pertumbuhan konsumsi (*demand*) tenaga listrik di Jawa Tengah masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan *supply* penyediaan tenaga listrik;
b) Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
c) Masih perlunya peningkatan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
d) Masih perlunya peningkatan pengendalian pemanfaatan air tanah.

6) Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

a) Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
b) Neraca perdagangan masih defisit.

7) Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

a) Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
b) Menurunnya pertumbuhan industri skala kecil dan menengah;
c) Pengembangan klaster industri belum optimal.

8) Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

d. Unsur Pendukung Pemerintahan

Kinerja reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

a) Belum selarasnya pengukuran kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasi;
b) Masih perlunya pendampingan implementasi SAKIP kabupaten/kota;
c) Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik;
d) Belum optimalnya penerapan replikasi inovasi pelayanan publik.

e. Unsur Penunjang Pemerintahan

1) Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

a) Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika kebijakan dan regulasi yang selalu berkembang;
b) Perlunya meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

a) Perlunya peningkatan pengelolaan pendapatan;
b) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
c) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik

KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

a) Belum terpetakannya secara keselurahan kompetensi PNS;
b) Kekurangan jumlah pegawai setiap tahunnya, dengan jumlah pegawai yang pensiun lebih besar dari penerimaan pegawai baru (belum *zero growth*);
c) Kualifikasi PNS relatif masih rendah;
d) Pemanfaatan teknologi untuk layanan administrasi kepegawaian belum optimal;
e) Perlunya peningkatan disiplin pegawai;
f) Belum terwujudnya *single* data sistem informasi kepegawaian daerah dengan pusat;
g) Belum optimalnya program pengembangan talenta sebagai salah satu infrastruktur pendukung manajemen talenta ASN.

4) Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

a) Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung perencanaan pembangunan masih belum optimal;
b) Rendahnya kualitas penyelenggaraan inovasi daerah untuk mendukung daya saing daerah.

f. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain:

a) Pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra yang disebabkan karena pengawasan belum berfokus pada hasil 3E, penanganan kasus/pengaduan masyarakat belum optimal serta peran APIP dalam menjalankan peran layanan pemberian saran atau *advisory services* belum optimal;
b) Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
c) Teknologi informasi belum digunakan secara optimal dalam kegiatan pengawasan;
d) Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

g. Unsur Pemerintahan Umum

Tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

a) Ancaman terorisme, intoleransi, kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang masih membutuhkan upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu;
b) Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19.

2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 yaitu sebagai berikut.

a. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan September 2020 sebanyak 4,12 juta jiwa atau 11,84 persen, meningkat dibandingkan bulan September 2019 (10,58 persen). Angka ini masih di atas capaian nasional yaitu sebesar 10,19 persen. Sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi di wilayah pedesaan sebesar 2,23 juta jiwa (13,20 persen), sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 1,89 juta jiwa (10,57 persen). Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan), buruh industri kecil, dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil).

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan,

belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) menuju industrialisasi komoditas pertanian (industri pengolahan hasil pertanian), dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Kemiskinan juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Selain itu isu pandemi Covid-19 yang telah menyebar sampai hampir ke pelosok Indonesia dan Jawa Tengah, juga menimbulkan kerentanan lain dari aspek sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap pandemi Covid-19 secara sosial ekonomi adalah mereka masyarakat yang saat ini termasuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah (desil 1-4), dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek, dan lain-lainnya. Mereka inilah kelompok masyarakat yang rentan, rentan secara ekonomi menjadi miskin, dan rentan terpapar Covid-19. Kelompok masyarakat miskin inilah yang masuk dalam poverty trap atau jebakan kemiskinan, yang jika terjadi krisis maka mereka akan semakin tidak berdaya.

Ditambah lagi dengan kondisi tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor ekonomi antara lain ditunjukkan dengan adanya tekanan di sektor produksi akibat ketergantungan industri pada bahan baku impor, turunnya ekspor, dan perlahan diikuti dengan rasionalisasi jumlah tenaga kerja, mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah menjadi masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin (dari desil 5-6 menjadi desil 1-4). Yaitu kelompok pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan oleh industri atau UMKM. Sebanyak 11.676 orang pekerja telah di PHK dan 40.797 orang dirumahkan akibat tekanan ekonomi akibat Covid-19.

Kondisi inilah kemudian yang diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Jawa Tengah. Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah meningkat menjadi 6,48 persen di Bulan Agustus. Hal ini perlu diantisipasi dalam hal kaitannya dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kemungkinan terjadinya peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Perluasan sasaran penerima bantuan sosial menjadi satu hal yang tidak dapat dihindari. Namun demikian persoalan data masyarakat yang

berhak mendapatkan bantuan pemerintah masih menjadi isu krusial yang belum juga kunjung terselesaikan. Untuk itu pengelolaan DTKS menjadi kunci yang harus diperhatikan dengan cermat agar perluasan dan peningkatan sasaran bantuan sosial terdampak Covid-19 tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih antar kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Tahun 2020 IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi 71,87 dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,73. Namun demikian angka ini masih berada dibawah nasional yaitu sebesar 71,94. Demikian pula dengan capaian komponen pendidikan yang merupakan salah satu pembentuk IPM yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Tengah masih berada di bawah capaian Nasional. Hal yang sama ditunjukkan pada capaian komponen standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita disesuaikan di Jawa Tengah masih berada di bawah nasional. Sedangkan kondisi yang cukup baik ditunjukkan oleh capaian komponen kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) Jawa Tengah yang telah melampaui nasional.

Isu strategis yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun kedepan adalah terjadinya penuaan penduduk (population ageing) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (senecsent diseases) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.

Pada kondisi dan situasi pandemi ini isu pendidikan dan kesehatan cukup mengemuka dalam konteks pembangunan kualitas SDM. Di bidang pendidikan telah terjadi perubahan pola penyelenggaraan pendidikan dan metode pembelajaran dari luring menjadi daring. Berbagai kendala dijumpai

dalam pelaksanaan daring baik dari sisi guru maupun siswa, sehingga muncul kekhawatiran terhadap kualitas hasil proses pembelajaran. Hal tersebut perlu menjadi pemikiran serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu bagaimana konsep, sistem dan metode pembelajaran yang efektif dan aman pada situasi pandemi ini, lalu bagaimana menyiapkan sarana prasarana sekolah yang memenuhi syarat protokol kesehatan serta tidak kalah penting menyiapkan SDM baik guru dan tenaga pendidik maupun siswa agar secara serius dapat mematuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai protokol kesehatan. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 menuntut manusia untuk semakin meningkatkan pemahaman dan kemampuan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi, menciptakan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sementara itu pembangunan pendidikan di Jawa Tengah masih dihadapkan pada jumlah anak putus sekolah dan tidak sekolah dimana sebagian besar dikarenakan alasan faktor ekonomi atau merupakan anak usia sekolah dengan keterbatasan fisik dan mental (disabilitas). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerataan dan akses layanan pendidikan di Jawa Tengah belum optimal, meskipun partisipasi pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan akan mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Apalagi dengan melihat gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi, serta tren penyakit katastropik yang semakin meningkat dan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi, maka upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sehingga mengancam status kesehatan masyarakat. Penularan dan penyebaran virus Covid-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis yang menyerang orang usia produktif

Pembelajaran dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana mendorong penguatan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan daerah melalui pengendalian penyakit, penguatan ketahanan

kesehatan (*health security*), penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi ini diproyeksikan masih akan berlangsung di tahun 2021, maka pengendalian penyebaran Covid-19 terus diupayakan dengan tetap menjaga perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara bertahap serta meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi "kebinekatunggalikaan", serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Jawa Tengah. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cenderung meningkat telah mengkawatirkan semuanya dan dapat mengancam kualitas sumber daya manusia. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan "darurat narkoba" sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA.

Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah. Penguatan identitas dan bangunan nilai masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme.

Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan Jawa Tengah melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi wilayah maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; maupun ekspresi kebudayaan non-materiil menyangkut hasil karya dan kreatifitas seni budaya maupun ekspresi upacara adat, kenduri dan perayaan. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat.

c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun karena terjadinya pandemi Covid-19 perekonomian Jawa Tengah di tahun 2020 terjadi kontraksi, termasuk pada sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, perdagangan dan jasa), kecuali sektor pertanian yang masih tumbuh positif di tahun 2020 sampai triwulan 3. Beberapa kondisi yang dihadapi kedepan antara lain sebagai berikut.

a. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Namun demikian kondisinya saat ini industri yang berkembang masih didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi).

Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75 persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi juga menjadi tantangan penting kedepan untuk disiapkan dalam rangka pengembangan industri di Jawa Tengah. Persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

b. Sektor Perdagangan dan Jasa

Salah satu sektor unggulan Jawa Tengah lainnya adalah perdagangan dan jasa, yang trennya dari tahun ke tahun mulai meningkat. Meskipun meningkat, persoalan yang dihadapi di sektor perdagangan adalah neraca perdagangan defisit, dimana impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Penyebabnya antara lain rendahnya ekspor antardaerah, dan pasar ekspor yang masih terbatas pada pangsa pasar konvensional.

Selain itu, sektor produksi didominasi pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha. Tren pengembangan *e-commerce* juga belum dibarengi kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan *e-commerce* tersebut.

Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia.

Pengembangan pariwisata Jawa Tengah mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Jawa Tengah dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah mestinya ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*Eco-Socio Tourism*), dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan, laut, sungai, karts, danau, dan pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneski antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

c. Sektor Pertanian

Sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang PDRB ketiga terbesar di Jawa Tengah, sektor pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Persoalan terjadi saat ini adalah justru sektor pertanian makin terdesak dan menurun kontribusinya pada PDRB dari tahun ke tahun. Selain itu, persoalan lain adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan. Hal tersebut didukung dengan semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri.

Persoalan sektor pertanian sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan Jawa Tengah kedepan. Hal tersebut dikarenakan pertama, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian, meskipun kecenderungannya semakin menurun dan yang tersisa adalah petani usia tua. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi serta transportasi dan komunikasi belum memadai. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar. Sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya menyebabkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan rendah.

d. Penanaman modal

Realisasi penanaman modal Jawa Tengah semakin baik dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan dari tren peningkatan realisasi penanaman modal. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan penanaman modal yang dihadapi seperti kendala pelaku usaha saat *starting up* meliputi ketersediaan lahan/tata ruang, perizinan, dan tenaga kerja sesuai kompetensi yang diperlukan; ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal; persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kehadiran penanaman modal; pertumbuhan dan persebaran penanaman modal yang belum merata di Jawa Tengah; dan pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat dampak Covid-19.

Selain itu, isu penting terkait dengan ekonomi daerah adalah peran pemerintah provinsi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dapat dilihat dari kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Provinsi Jawa Tengah dalam waktu lima tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan, dari 19,25 persen (2013) menjadi 25,22 persen (2017). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan, meskipun angkanya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.

Namun demikian, kondisi perekonomian daerah akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Namun terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 di Indonesia berdampak pada sektor tenaga kerja. Jumlah kepulangan penduduk migran Jawa Tengah sebesar 1.124.000 orang. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Relawan Melawan Covid-19 (TRMC-19) di Jawa Tengah diperoleh gambaran kepulangan migran Jawa Tengah 62,57 persen mudik tidak

dengan keluarga dan 43,43 persen mudik bersama keluarga dan tanggungan; pemudik karena kehilangan pekerjaan sebanyak 53,65 persen, dan 46,35 persen karena sebab lainnya, diantaranya adalah kegiatan pendidikan sementara dihentikan. Data dari sisi penghasilan menunjukkan 8,73 persen pemudik memiliki lebih dari 1 (satu) sumber penghasilan, sedangkan 91,27 persen hanya mempunyai 1 (satu) sumber penghasilan. Tambahan keterangan lain 42,46 persen pemudik bergantung pada keluarga yang ditumpangi, sejumlah 7,7 persen pemudik dengan tanggungan keluarga, sejumlah 89 persen pemudik tidak dapat memastikan sampai kapan akan tinggal di desa atau kembali ke aktivitas sebelumnya. Kondisi ini yang diproyeksikan akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah di atas 6 persen di tahun 2020 (TPT Bulan Agustus 2020 sebesar 6,48 persen).

Selain itu tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini juga berdampak pada sektor-sektor perekonomian antara lain sektor koperasi, UMKM, dan IKM yang ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, dan tenaga kerja. Permasalahan yang terjadi antara lain pada penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Namun untuk UMKM yang berbasis *online* justru mengalami peningkatan omset cukup signifikan. Permasalahan juga terjadi pada 848 pasar rakyat di Jawa Tengah dimana terjadi penurunan jumlah pedagang sampai 25,6 persen dan omset sampai dengan 47,5 persen.

Demikian juga sektor pertanian terdampak pandemi Covid-19 yang tergambarkan dari pertumbuhan negatif sektor pertanian pada PDRB Jawa Tengah. Kelompok masyarakat di sektor ini yang terdampak antara lain petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha pengolah dan pemasar produk pertanian, peternakan, dan perikanan, dan petambak garam rakyat. Permasalahan yang dihadapi sektor ini antara lain menurunnya permintaan pasar akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanian dan produksi hasil pertanian, yang kemudian berakibat pada penurunan pendapatan para pelaku sektor pertanian.

Sektor lain yang terdampak cukup signifikan adalah sektor pariwisata. Menurunnya minat masyarakat untuk bepergian ke destinasi wisata yang sangat tajam berakibat pada menurunnya roda perekonomian bagi para pelaku usaha bidang pariwisata. Dampak yang tampak antara lain banyaknya hotel berbintang dan non bintang yang tutup sementara, tingkat hunian hotel yang menurun drastis, biro wisara dan agen wisata menghentikan usahanya sementara, tutupnya daya tarik wisata (DTW) termasuk desa wisata, menurunnya usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata, yang seluruhnya mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang di PHK atau di rumahkan.

Dari sektor transportasi sebagai pendukung pembangunan ekonomi juga mengalami dampak cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penularan virus Covid-19 dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia dari dan menuju luar daerah/negara menyebabkan terhentinya operasional usaha transportasi umum darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut berakibat pada penurunan pendapatan para pelaku usaha di bidang transportasi termasuk pelaku usaha yang berdampingan dengan sektor transportasi seperti UMKM, karena ditutupnya usaha yang ada di terminal atau bandara.

Demikian juga di sektor infrastruktur yang akibat adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 berakibat pada terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Termasuk juga tertundanya pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah yang mendukung pada proyek strategis nasional. Tertundanya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

d. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan implementasi konsep pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Isu berkaitan dengan sumberdaya air di Jawa Tengah adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah, yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/*catchment area*, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak.

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan dan serta konflik satwa liar dengan masyarakat, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.

Persoalan penting lainnya terkait pengelolaan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang belum seimbang dengan peningkatan layanan persampahan baik di perkotaan maupun perdesaan masih rendah.

Selain itu, isu lainnya adalah masih maraknya kegiatan pertambangan yang belum menerapkan *good mining practice* sehingga berpotensi dapat merusak lahan. Sehingga perlu ditingkatkan pemahaman terkait perijinan oleh masyarakat, dan pembinaan/pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir, dan konflik sosial terkait alih fungsi lahan.

Dikaitkan dengan isu kebencanaan kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan wilayah melalui pembentukan pusat pertumbuhan baru dan implementasi proyek strategis nasional perlu didukung dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana terhadap hasil-hasil pembangunan serta untuk menghindari potensi hambatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

e. Kedaulatan pangan dan energi

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Disisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Menyempitnya lahan pertanian (LP2B) karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menurunnya persediaan dan produksi pangan.

Isu lain adalah terkait sistem distribusi pangan, dimana pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat, yang terbentuk dalam satu sistem logistik daerah. Hal tersebut juga harus didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Selain itu, penting juga

untuk penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan, kesemuanya harus berbasis masyarakat.

Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat juga masih menjadi isu penting dalam kedaulatan pangan. Melihat skor Pola Pangan Harapan dibawah angka 100 dan cakupan konsumsi masyarakat Jawa Tengah tertinggi adalah beras, bisa digambarkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah belum beragam. Hal tersebut berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya, yang memiliki ketergantungan pada beras. Mutu dan keamanan pangan juga harus tetap diperhatikan, karena saat ini mulai banyak ditemukan produk pangan yang diindikasi tidak terjamin mutu dan keamanannya.

Satu tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi yang menunjukkan pentingnya ketersediaan energi guna menunjang dinamika pembangunan. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan akan ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 39,76 persen, gas bumi 13,51 persen, batubara 37,16 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) 9,67 persen. Dalam dokumen RUED Provinsi Jawa Tengah diharapkan sampai dengan tahun 2050 terjadi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 28,82 persen, sehingga akan mengurangi ketergantungan pemanfaatan energi fosil.

Tantangan pemenuhan energi di Jawa Tengah kedepan adalah penyediaan energi untuk industri, perlunya penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi utamanya terkait jaringan listrik dan jaringan gas, serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

Selain itu kondisi rasio elektrifikasi di Jawa Tengah sampai dengan Desember tahun 2020 baru mencapai 99,88 persen, meskipun seluruh wilayah desa dan kelurahan di Jawa Tengah telah memiliki akses jaringan listrik. Sebanyak 0,12 persen kepala keluarga (KK) belum berlistrik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga miskin yang perlu didukung pemerintah.

Budaya hemat energi di masyarakat juga masih perlu digalakkan lagi. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong gerakan budaya hemat energi telah

dilakukan dengan gerakan budaya hemat energi dan pengembangan desa mandiri energi.

f. Kesenjangan wilayah

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 di tahun 2019. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian/integrasi antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting.

Keserasian pembangunan pantura dan pansela semakin perlu untuk menjadi perhatian sejalan dengan dikembangkannya dan dibangunnya Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Kawasan Industri Brebes yang berpotensi untuk semakin mendorong dan memantapkan perkembangan perekonomian wilayah di Pantura, demikian juga dengan pembangunan Kawasan Partiwisata Borobudur. Kondisi tersebut dapat berakibat pada semakin menajuhnya kesenjangan antara pantura dan pansela. Dengan demikian aksesibilitas keterhubungan pantura dan pansela, serta mengintegrasikan potensi wilayah selatan termasuk perkotaan Purworejo dan Kebumen antara lain dengan basis pariwisata dan industri termasuk untuk merespon pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta penting untuk menjadi perhatian kedepan.

g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna

meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Maka pengembangan teknologi dan inovasi pelayanan publik menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga menjadi satu kriteria pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih meningkatkan kinerja dengan mengefektifkan budaya kinerja yang tinggi melalui perbaikan proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kinerja organisasi agar lebih selaras dengan pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja individu dengan kinerja organisasi sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, serta melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/ kota yang implementasi akuntabilitas kinerjanya belum baik.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan daerah, Jawa Tengah termasuk daerah yang mandiri. Namun demikian, dari tren selama lima tahun terakhir diketahui bahwa kemampuan fiskal daerah Jawa Tengah yang dilihat dari kontribusi PAD dan DBH terhadap pendapatan daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Jawa Tengah. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang kompeten, progresif, dan adaptif, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan. Hal tersebut didukung dengan penempatan talenta ASN yang tepat pada jabatan, dan pengembangan talenta ASN melalui Jawa Tengah Corporate University (Jateng

CorpU). Selain itu juga perlu dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan/organisasi birokrasi agar efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkannya, dan hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka penyederhanaan organisasi.

Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda secara global juga berdampak pada aspek tata kelola pemerintahan. Pandemi ini berdampak pada perubahan tata kelola, pola dan sistem kerja birokrasi, dimana diberlakukan pola *work from home* atau bekerja di rumah bagi sebagian besar ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pola kerja yang demikian menuntut optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi dalam bekerja (digitalisasi tata kelola). Maka pelayanan publik secara *online*, tata naskah dinas elektronik, rapat/pertemuan *online*, serta pembelajaran pendidikan dan pelatihan *online* menjadi hal yang harus dioptimalkan dalam pola kerja birokrasi di Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kerja dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan lainnya dalam implemetasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah yaitu penerapan *dynamic governance* agar pemerintah daerah lebih dapat bertindak progresif dan adaptif dalam penanganan berbagai persoalan pembangunan daerah dari sudut pandang lintas sektor. Kebijakan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan *dynamic governance* dalam rangka menuju birokrasi kelas dunia.

Sedangkan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Jawa Tengah. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 secara global telah berdampak pada pelambatan ekonomi secara global. Sebagian besar negara utama dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan tahun 2020 berturut-turut. Tekanan pertumbuhan ekonomi paling dalam umumnya terjadi di triwulan kedua seiring dengan berbagai kebijakan restriksi yang sangat ketat pada periode tersebut dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan kelompok negara Eropa pun tidak cukup tangguh menghadapi dampak pandemi Covid-19 di sektor perekonomian. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain adanya ketergantungan yang tinggi pada sektor tertentu seperti pariwisata dan perdagangan internasional yang memang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Memasuki triwulan tiga dan keempat tahun 2020 seiring dengan menurunnya penyebaran Covid-19, beberapa negara mulai menerapkan kebijakan relaksasi untuk pembatasan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada pergeseran pertumbuhan ekonomi yang semula terkontraksi menjadi tumbuh positif pada triwulan ketiga dan keempat. Seperti yang terjadi di negara Tiongkok dan Vietnam yang bahkan pada triwulan kedua ekonominya telah mengalami *rebound*. Pola pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berbeda dengan negara lainnya antara lain disebabkan karena negara tersebut telah melakukan kebijakan *lockdown* sejak awal tahun 2020, sehingga pada awal triwulan kedua sudah mulai menerapkan kebijakan relaksasi.

Meskipun demikian, kejadian pandemi Covid-19 belum berakhir di tahun 2020, bahkan berlanjut sampai dengan tahun 2021. Kebijakan *new normal* di berbagai negara dengan melonggarkan aturan pembatasan sosial dan mengendurnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, serta bermutasinya virus Covid-19 memicu peningkatan transmisi penularan Covid-19 yang semakin tinggi. Bahkan kondisi tersebut sangat berdampak pada peningkatan kasus dan angka kematian yang memaksa beberapa negara mengambil kebijakan restriksi atau *lockdown* kembali, serta mengalihkan pembiayaan untuk penanganan kasus akibat pandemi lanjutan tersebut, termasuk Indonesia.

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 persen (*c to c*). Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah terutama untuk mendorong *rebound* perekonomian nasional antara lain melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan mulai tahun 2020 dan berlanjut di tahun 2021.

Kebijakan dari sisi fiskal juga dilakukan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan yang diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan juga memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2020 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan *New Normal* (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi *year on year* yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Secara keseluruhan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 2,65 persen (c to c) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Dari sisi permintaan (*demand),* pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (berkontribusi 60,96 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 1,42 persen; Konsumsi Pemerintah (berkontribusi 7,29 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 4,3 persen, Pembentukan Modal

Tetap Bruto (berkontribusi 30,98 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi minus 6,98 persen; sementara Ekspor (berkontribusi 36,91 persen terhadap PDRB) dan Impor (berkontribusi 38,3 persen terhadap PDRB) mengalami kontraksi masing-masing minus 13,84 persen dan minus 14,82 persen. Dengan demikian, pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak Maret 2020 hingga akhir Desember 2020 telah mengakibatkan aktivitas perekonomian dari sisi permintaan mengalami kontraksi yang serius sehingga menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada 2020 mengalami kontraksi.

Dari sisi penawaran ekonomi (*supply side*), dua sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Tengah, yaitu Industri Pengolahan (berkontribusi 34,52 persen terhadap PDRB) dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (berkontribusi 13,49 persen terhadap PDRB), mengalami pertumbuhan negatif yaitu masing-masing sebesar minus 3,74 persen dan minus 3,8 persen. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertumbuh positif sebesar 2,48 persen. Secara keseluruhan, ada 11 sektor usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan akibat Covid-19 yaitu Industri Pengolahan (-3,74 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-3,80 persen), Konstruksi (-3,76 persen), Jasa Pendidikan (-0,24 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-7,98 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-1,31 persen), Pertambangan dan Penggalian (-0,80 persen), Transportasi dan Pergudangan (-33,15 persen), Real Estate (-0,28 persen), Jasa Lainnya (-8,01 persen), dan Jasa Perusahaan (-7,19 persen). Sementara itu, ada 6 sektor yang membukukan pertumbuhan positif yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2,48 persen), Informasi dan Komunikasi (15,65 persen), Jasa Keuangan (2,03 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,19 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (1,79 persen) serta Pengadaan Air (2,29 persen).

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4.119,93 ribu orang (11,84 persen), bertambah sebanyak 440,53 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3.679,40 ribu orang (10,58 persen). Demikian pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48 persen), mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44 persen).

Sejalan dengan dimulainya kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah yang membaik. Meskipun pada triwulan I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah masih terkontraksi sebesar minus 0,87 persen, namun di triwulan II tahun 2021 mulai tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2021 tumbuh 5,56 persen (*yoy*) setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Sementara itu selama semester I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 2,33 persen (c to c) dibandingkan semester I tahun 2020. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan selama semester I kecuali jasa lainnya, pertanian, dan industri pengolahan. Demikian juga dari sisi permintaan dimana komponen penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kenaikan yaitu komponen ekspor barang dan jasa yang menjadi komponen penyumbang pertumbuhan paling tinggi, diikuti oleh komponen impor barang dan jasa, serta komponen PMTB.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 tersebut memberikan harapan lebih baik lagi akan semakin membaiknya perekonomian Jawa Tengah di tahun 2022. Dengan tetap memberlakukan kebijakan PPKM dan percepatan pemberian vaksin yang menjangkau seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat diharapkan akan semakin meningkatkan mobilitas dan konsumsi domestik masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Selain itu dengan semakin banyak negara yang menerapkan kebijakan relaksasi mulai tahun 2021 semakin memberikan peluang peningkatan ekspor dan impor luar negeri. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2022 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2022 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2022 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 10,49 – 10,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,75 – 5,69 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 41,46 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,35 di tahun 2022.

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 – 5,20
2	PDRB ADHK	Milyar Rp	1.058.913,49
3	PDRB per kapita	Juta Rp	41,46
4	Inflasi	%	3,0 ± 1
5	Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	56.596,81
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 – 5,69
7	Angka Kemiskinan	%	10,49 – 10,30
8	Rasio Gini	Angka	0,35

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Jawa Tengah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
5) Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;
6) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung meningkat di tahun 2018-2019, namun kemudian menurun di tahun 2020. Tahun 2018, realisasi pendapatan daerah mencapai 24,702 trilyun rupiah meningkat menjadi 25,859 trilyun rupiah di tahun 2019. Tahun 2020 realisasi pendapatan menurun menjadi 25,393 trilyun rupiah. Penurunan realisasi pendapatan di tahun 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global maupun daerah. Penurunan terutama terjadi pada komponen PAD yaitu pada penerimaan pajak daerah dan retribusi.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menurun dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, serta kurang optimalnya kegiatan *door to door* dan razia pada masa pandemi. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga mengalami penurunan dikarenakan turunnya daya beli masyakarat yang berdampak pada lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian besar industri besar otomotif. Selain itu, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga mengalami penurunan dikarenakan harga jual BBM turun rata-rata 10,24 persen sesuai dengan Kepmen ESDM No. 187K/10/MEM/2019 dan konsumsi BBM turun rata-rata 26 persen akibat kebijakan pemerintah terkait himbauan untuk tidak mudik.

Sementara itu, Pajak Air Permukaan (PAP) juga diperkirakan menurun, hal ini didasarkan atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan

penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing provinsi dimana pada tahun 2020 sebesar 2,330 trilyun rupiah dikurangi adanya kurang bayar BPJS sebesar 56 milyar rupiah.

Selain pajak daerah, komponen retribusi juga mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan antara lain adanya penerapan *social distancing* dan *physical distancing* sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/ gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penjualan benih; tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata; pembatasan kegiatan pada pengujian kayu; serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.

Tabel 3.2.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH	**24.702.318.190.582**	**25.859.780.137.936**	**25.393.735.934.148**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**13.711.836.037.849**	**14.437.914.236.398**	**13.668.282.278.855**
Pajak Daerah	11.507.119.643.262	11.951.919.535.383	11.139.173.309.780
Retribusi Daerah	104.870.144.923	114.861.058.851	93.279.121.699
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	459.626.767.964	512.701.993.939	530.091.029.137
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.640.219.481.700	1.858.431.648.225	1.905.738.818.239
PENDAPATAN TRANSFER	**10.968.474.152.733**	**11.398.681.901.538**	**11.702.101.655.293**
Dana Bagi Hasil Pajak	760.737.570.218	564.290.383.834	843.392.119.954
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.712.350.806	11.677.937.800	16.888.016.587
Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000	3.784.512.513.000	3.438.709.973.000
Dana Alokasi Khusus (fisik)	267.575.436.659	267.101.813.252	350.564.240.958
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.244.165.043.013	6.707.320.412.787	6.983.232.690.794
Dana Insentif Daerah	33.500.000.000	62.388.421.000	-
Dana Penyesuaian	-	-	68.212.455.000
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.197.321.037	1.390.419.865	1.102.159.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**22.008.000.000**	**23.184.000.000**	**23.352.000.000**
Pendapatan Hibah	22.008.000.000	23.184.000.000	23.352.000.000

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2020

Selama kurun tahun 2018-2020, PAD menjadi penyumbang terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 55,05 persen, pendapatan transfer sebesar 44,85 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,09 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 82,73 persen.

Tabel 3.3.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2020 (%)

Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN DAERAH	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**55,51**	**55,83**	**53,83**	**55,06**
Pajak Daerah	83,92	82,78	81,50	82,73
Retribusi Daerah	0,76	0,80	0,68	0,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,35	3,55	3,88	3,59
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11,96	12,87	13,94	12,93
PENDAPATAN TRANSFER	**44,40**	**44,08**	**46,08**	**44,85**
Dana Bagi Hasil Pajak	6,94	4,95	7,21	6,36
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,08	0,10	0,14	0,11
Dana Alokasi Umum	33,30	33,20	29,39	31,96
Dana Alokasi Khusus (fisik)	2,44	2,34	3,00	2,59
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	56,93	58,84	59,68	58,48
Dana Insentif Daerah	0,31	0,55	0,00	0,28
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,58	0,19
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**
Pendapatan Hibah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2020

Mempertimbangkan kondisi realisasi tersebut, dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,20 – 5,20 persen, aktivitas ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih (masa *recovery*), serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan sebesar 23,976 trilyun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 16,089 trilyun rupiah, pendapatan transfer sebesar 7,863 trilyun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,652 milyar rupiah.

Tabel 3.4.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**16.089.479.700.000**
1.1.	Pajak Daerah	13.746.038.540.000
1.2.	Retribusi Daerah	116.972.412.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	547.584.985.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.678.883.763.000
2.	**Pendapatan Transfer**	**7.863.585.771.000**
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	7.863.585.771.000
2.2	Transfer antar daerah	-
3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**23.652.000.000**
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	**23.976.717.471.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2022, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem (eSAMSAT) dan penambahan titik-titik pelayanan;
c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, PD penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan:

a. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
d. Penggerakan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kinerja belanja daerah dalam tahun 2018-2020 sejalan dengan kinerja pendapatan daerah dimana di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Rata-rata setiap komponen belanja daerah mengalami penurunan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja transfer, kecuali belanja hibah dan belanja tidak terduga yang mengalami kenaikan di tahun 2020. Penurunan pada belanja pegawai dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai pada tahun yang bersangkutan. Sementara belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja modal menurun sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 melalui *refocussing* dan realokasi belanja, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga kinerja pembangunan utamanya pada pelayanan, kesehatan dan perekonomian dapat tetap baik.

Komponen Belanja Tidak Terduga tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari *refocussing* belanja. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kenaikan Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi penanganan Pandemi Covid-19 yang penggunaanya diarahkan utamanya untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial dengan sasaran masyarakat terdampak Covid-19.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH	**24.478.632.557.340**	**26.151.062.842.457**	**25.651.740.349.991**
BELANJA OPERASI	**15.702.411.154.887**	**16.354.554.423.473**	**16.223.988.285.131**
Belanja Pegawai	6.468.261.263.572	6.591.903.141.578	6.483.761.623.794
Belanja Barang dan Jasa	4.042.705.957.395	4.562.499.451.144	4.104.637.788.228
Belanja Subsidi		0	0
Belanja Hibah	5.150.000.983.920	5.155.826.080.751	5.593.181.623.109
Belanja Bantuan Sosial	41.442.950.000	44.325.750.000	42.407.250.000
BELANJA MODAL	**1.681.752.306.368**	**2.099.719.124.860**	**996.994.505.160**
BELANJA TAK TERDUGA	**13.118.505.530**	**2.662.431.206**	**1.783.884.978.571**
BELANJA TRANSFER	**7.081.350.590.555**	**7.694.126.862.918**	**6.646.872.581.129**
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota	4.971.230.606.896	5.248.472.302.270	4.633.245.749.888
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	1.187.190.486.179	1.050.456.112.049	845.543.195.241

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Bantuan Keuangan kepada Desa	894.607.765.980	1.361.431.049.000	1.168.083.636.000
Bantuan Keuangan kepada Parpol	19.466.159.000	19.767.399.599	-
Bantuan Keuangan kepada Pemda Lain	8.855.572.500	14.000.000.000	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2020

Komposisi belanja daerah mulai tahun 2022 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 24,262 trilyun rupiah yang diarahkan pada:

1. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran;
3. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Struktur rencana belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2022 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk P3K (guru dan tenaga kesehatan) dan CPNS;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan *New Nomal*. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri; operasional dan pengelolaan 3 SMK *Boarding School* dan 18 SMK Semi *Boarding* School; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan keterntraman dan ketertiban;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
   d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan

perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, pembangunan Unit Sekolah Baru (SMKN Pagentan Banjarnegara, SMAN Tawangmangu Karanganyar, dan SMK Lumbir Banyumas), pembangunan *fly over* Ganevo Mranggen, lanjutan pembangunan Kawasan Jatidiri, dan pembangunan *data center*.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan, SPPD, dan TMMD. Sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan RTLH pedesaan, KPMD, desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

Tabel 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Belanja Operasi**	**13.786.487.199.000**
1.1.	Belanja Pegawai	6.404.304.219.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.304.565.693.000
1.3.	Belanja Hibah	1.986.701.487.000
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	90.915.800.000
1.5.	Belanja Subsidi	-
2.	**Belanja Modal**	**1.750.192.856.000**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**21.000.000.000**
4.	**Belanja Transfer**	**8.705.166.193.000**
4.1.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.581.646.500.000
4.2.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	6.123.519.693.000
	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	**24.262.846.248.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu tahun 2018-2019, penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pengembalian dana bergulir, dan penerimaan kembali piutang. Pengeluran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman kepada bank. Namun di tahun 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena penganggaran lebih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN	**1.388.916.848.598**	**1.410.440.151.221**	**1.119.348.228.370**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.528.916.848.598**	**1.630.776.601.765**	**1.119.348.228.370**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.156.338.690.485	1.612.602.481.841	1.119.095.687.470
Pencairan dana Cadangan	350.000.000.000	-	-
Penerimaan pengembalian dana bergulir	275.423.625	140.403.868	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	22.302.734.488	18.033.716.056	-
Penerimaan Kembali Piutang			252.540.900
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**140.000.000.000**	**220.336.450.544**	**-**
Pembentukan dana cadangan	-	-	-
Penyertaan modal	140.000.000.000	180.000.000.000	-
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	40.336.450.544	-

Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2019-2020

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sejalan dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi adanya penyertaan modal investasi dari Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.8.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**1.177.128.777.000**
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	703.128.777.000
1.2.	Penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD	474.000.000.000
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**891.000.000.000**
2.1.	Pembentukan dana cadangan	400.000.000.000
2.2.	Penyertaan modal	491.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	**286.128.777.000**

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

URAIAN			JUMLAH (Rp)
(1)			(2)
PENDAPATAN DAERAH			**23.976.717.471.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH			**16.089.479.700.000**
1	Pajak Daerah		13.746.038.540.000
2	Retribusi Daerah		116.972.412.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		547.584.985.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.678.883.763.000
PENDAPATAN TRANSFER			**7.863.585.771.000**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		7.863.585.771.000
	a	Dana Perimbangan	7.833.747.099.000
	b	Dana Insentif Daerah	29.838.672.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			**23.652.000.000**
1	Pendapatan Hibah		23.652.000.000
BELANJA DAERAH			**24.262.846.248.000**
BELANJA OPERASI			**13.786.487.199.000**
1	Belanja Pegawai		6.404.304.219.000
2	Belanja Barang dan Jasa		5.304.565.693.000
3	Belanja Subsidi		0
4	Belanja Hibah		1.986.701.487.000
5	Belanja Bantuan Sosial		90.915.800.000
BELANJA MODAL			**1.750.192.856.000**
BELANJA TAK TERDUGA			**21.000.000.000**
BELANJA TRANSFER			**8.705.166.193.000**
1	Belanja Bagi Hasil		6.123.519.693.000
2	Belanja Bantuan Keuangan		2.581.646.500.000
JUMLAH BELANJA			**24.262.846.248.000**
SURPLUS/DEFISIT			**(286.128.777.000)**
PEMBIAYAAN			**286.128.777.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			**1.177.128.777.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		703.128.777.000
2	Penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD		474.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			**891.000.000.000**
1	Pembentukan dana cadangan		400.000.000.000
2	Penyertaan modal		491.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)			**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2021

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat

yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.10.
Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021

No.	Kementerian/PD Provinsi	Jumlah (Rp. 000,-)		
		2019	2020	2021
I	**Kementerian Dalam Negeri (DK & TP)**	**188.360**	**20.390**	**5.722.397**
	Dinpermasdesdukcapil	-		2.983.658
	Biro Pemerintahan Otdaker	188.360	20.390	1.567.739
	Inspektorat			790.000
	Bappeda			381.000
II	**Kementerian Pertanian (DK & TP)**	**520.417.892**	**390.608.656**	**461.535.241**
	Dintanbun (Dekonsentrasi)	85.560.379	87.269.664	106.094.750
	Dintanbun (TP)	326.674.043	231.481.602	265.812.924
	Disnakeswan	60.949.020	44.286.930	72.110.542
	DKP (Dekonsentrasi)	47.234.450	27.570.460	-
	DKP (TP)	-	-	-
	Dishanpan			17.517.025
III	**Kementerian Perdagangan (DK)**	**2.394.816**	-	**3.735.902**
	Disperindag	2.394.816	-	3.735.902
IV	**Kementerian Pendidikan (DK)**	**13.244.052**	-	-
	Dinas Pendidikan	13.244.052	-	-
V	**Kementerian Kesehatan (DK)**	**57.277.477**	**11.904.755**	**66.785.466**
	Dinas Kesehatan	57.277.477	11.904.755	66.785.466
VI	**Kement PU (DK & TP)**	**158.817.145**	**150.589.515**	**142.143.963**
	Dinas Bina Marga Cipta Karya	63.311.257	91.600.978	47.793.736
	Dinas PSDA dan Tata Ruang	95.505.888	58.988.537	94.350.227
VII	**Kementerian Tenaga Kerja(DK & TP)**	**17.530.135**	**6.887.355**	**6.019.873**
	Dinas Tenaga Kerja	17.530.135	6.887.335	6.019.873
VIII	**Kementerian Sosial (DK & TP)**	**32.758.682**	**22.677.090**	**17.112.154**
	Dinas Sosial	32.758.682	22.677.090	17.112.154
IX	**Kementerian Lutkan (DK & TP)**	**4.521.019**	**2.365.866**	**4.997.705**
	Dinas Lutkan (Dekonsentrasi)	4.521.019	2.365.866	4.697.705
	Dinas Lutkan (TP)	-		300.000
X	**Kementerian LH (DK)**	**3.088.520**	-	-
	DLHK	3.088.520	-	-
XI	**Kementerian Koperasi & UKM (DK)**	**6.141.695**	**5.371.153**	**7.923.185**
	Dinas Koperasi & UMKM	6.141.690	5.371.153	7.923.185
XII	**Perpustakaan Nasional (DK)**	**519.924**	-	-
	Badan Arpus	519.924	-	-

No.	Kementerian/PD Provinsi	Jumlah (Rp. 000,-)		
		2019	2020	2021
XIII	**Kementerian Pora (DK)**	**8.334.870**	**8.393.308**	**8.194.653**
	Dinas Porapar	8.334.870	8.393.308	8.194.653
XIV	**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**1.823.612**	**1.933.612**	**3.920.000**
	Dinas Porapar	1.823.612	1.933.612	3.920.000
XV	**BKPM (DK)**	**680.495**	**427.322**	**1.051.069**
	DPMPTSP	680.495	427.322	1.051.069
XVI	**Kementerian Pemberdayaan Perempuan**	**1.900.000**	**726.000**	-
	DP3AKB	1.900.000	726.000	-
XVII	**Kementerian Perindustrian (DK)**	**3.283.840**	**3.672.461**	-
	Disperindag	3.283.840	3.672.461	-
XVIII	**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (DK)**	**1.144.613**	**572.216**	**1.144.613**
	Bappeda	1.144.613	572.216	1.144.613
XIX	**Arsip Nasional RI**	**560.065**	**440.905**	**422.490**
	Dinas Arpus	560.065	440.905	422.490
XX	**Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi**	**173.096.349**	**120.752.936**	-
1	Dinas Tenaga Kerja	3.551.492		-
2	Dinas Pembermasdes Dukcapil	169.544.857	120.752.936	-
Jumlah Total		**1.007.723.561**	**727.459.540**	**730.708.711**

Sumber: Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2021

Guna penyelesaian permasalahan pembangunan dan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mendorong pendanaan alternatif Non APBD. Pendanaan alternatif non APBD ditempuh diantaranya dengan mendorong pengembangan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha, peningkatan peran swasta dan BUMN – BUMD melalui Tanggung Jawa Sosial Lingkungan Perusahaan serta bentuk partisipasi swadaya masyarakat lainnya.

Peningkatan peran swasta dan BUMN-BUMD melalui Tanggung Jawa Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP)/program *Corporate Social Resbosibility* (CSR) di Jawa Tengah merupakan wujud kepedulian perusahaan untuk berperan serta dalam mendukung pencapaian target dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang TJLSP dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017. Kurun waktu tahun 2020 – 2021 program TJLSP/CSR diwujudkan dalam penanganan permasalahan di bidang kesejahteraan sosial; pendidikan; kesehatan; olahraga-seni-budaya-pariwiata; ekonomi rakyat; keagamaan; perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan; energi terbarukan, kedaruratan, pendampingan umum, dan inftasruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat diantaranya melalui penanganan RTLH, bantuan pendidikan, jaminan sosial, pelayanan kondisi darurat, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perkembangan program TJLSP/CSR di Jawa Tengah tahun 2020-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

No.	Perusahaan	Anggaran	
1	PT Semen Grobogan	Rp	6.700.000
2	HIPMI Peduli Jawa Tengah	Rp	314.000.000
3	PT Telekomunikasi Indonesia	Rp	4.812.396.933
4	BPR BKK Tulung	Rp	43.500.000
5	BPR BKK Temanggung	Rp	177.769.600
6	BPR BKK Tasikmadu	Rp	124.113.164
7	BPR BKK Purwokerto	Rp	898.975.113
8	BPR BKK Kota Tegal	Rp	145.950
9	BPR BKK Kebumen	Rp	151.012.994
10	BPR BKK Karangmalang	Rp	606.087.200
11	BPR BKK Jepara	Rp	202.781.346
12	BPR BKK Demak	Rp	307.591.100
13	BPR BKK Batang	Rp	83.926.000
14	BPR BKK Banjarharjo	Rp	93.230.000
15	PT Indonesia Power Semarang PGU	Rp	257.822.999
16	Perum Perhutani Divisi Regional Jateng	Rp	5.971.880.373
17	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Rp	5.611.199.700
18	PT Tirta Investama (AQUA) Klaten	Rp	1.141.534.999
19	PT Sinar Tambang Arthalestari	Rp	5.200.000
20	PT Semen Gresik Tbk	Rp	13.442.600.000
21	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Rp	608.204.000
22	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	Rp	35.999.998
23	PT Phapros Tbk	Rp	3.185.785.205
24	PT Jamkrida Jateng	Rp	685.924.800
25	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	Rp	905.622.583
26	Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) Central Java Operation	Rp	-

No.	Perusahaan	Anggaran	
27	Meka Group	Rp	115.041.400
28	Bank Jateng	Rp	14.009.232.000
29	Angkasa Pura Airports	Rp	1.150.000.000
30	BPR BKK Blora	Rp	227.155.000
31	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	Rp	79.027.969
32	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	Rp	813.522.500
33	BPR BKK Purwodadi	Rp	309.679.680
34	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Rp	1.075.392.179
35	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Rp	2.897.070.800
36	PT Kimia Farma Tbk Semarang	Rp	12.813.000
37	PT Bhimasena Power Indonesia	Rp	-
	Total	**Rp**	**60.362.938.585**

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Pelaporan CSR Tahun 2021

No.	Perusahaan	Anggaran	
1	BPR BKK Tulung	Rp	27.474.877
2	BPR BKK Kebumen	Rp	200.000.000
3	BPR BKK Karangmalang	Rp	360.000.000
4	BPR BKK Batang	Rp	54.000.000
5	BPR BKK Banjarharjo	Rp	77.442.000
6	Perum Perhutani Divisi Regional Jateng	Rp	356.500.000
7	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Rp	3.153.480.000
8	PT Sinar Tambang Arthalestari	Rp	7.000.000
9	PT Semen Gresik Tbk	Rp	3.149.000.000
10	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Rp	675.000.000
11	PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang	Rp	20.000.000
12	PT Phapros Tbk	Rp	1.528.000.000
13	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	Rp	125.000.000
14	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng	Rp	1.500.000.000
15	Coca-Cola Amatil Indonesai (CCAI) Central Java Operation	Rp	-
16	BPR BKK Demak	Rp	312.958.620
17	BPR BKK Kab. Tegal	Rp	5.000.000

No.	Perusahaan	Anggaran	
18	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Rp	20.280.000.000
19	PT Jamkrida Jateng	Rp	550.000.000
20	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap	Rp	1.454.500.000
	Total	**Rp**	**33.835.355.497**

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2021

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki visi yang akan diwujudkan di tahun 2023 yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup		Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00
		Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	75,90
			Persentase tindak pidana yang tertangani	%	87,00
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good*		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	*governance and clean government*)				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,00
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,27
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	84,00
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,49
			Opini BPK	Opini	WTP
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	38,00
			Indeks Sistem Merit	Angka	0,72
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		Angka Kemiskinan	%	10,49 – 10,30
			Indeks Gini	Angka	0,35
		Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,38 – 9,22
			Persentase penduduk miskin perdesaan	%	11,65 – 11,45
			Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20%	Ribu Rupiah	433,38

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
			berpenghasilan terendah		
			Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,50
			Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,00
		Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 – 5,69
			Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpengha-silan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,48
	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 – 5,20
			Inflasi	%	3,0 ± 1
			PDRB per kapita	Juta Rp	41,46
			Indeks Williamson	Angka	0,57
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,00
			Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	2,93
			Pertumbuhan sektor perdagangan & jasa	%	2,82
			Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	15,30
			Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00 – 5,00
			Nilai Tukar Petani	Angka	103,56

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,58
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,96
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,53
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18
	Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52
		Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Angka	50,60
			Indeks Kualitas Udara	Angka	84,95
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,20
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,56

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2022 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 79,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 10,49 – 10,30 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,35;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,75 – 5,69 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,20 – 5,20 persen;
7. Inflasi pada angka 3,0 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 41,46 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,57;
10. Nilai Tukar Petani 103,56;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,58;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,18; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,52.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

a. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*bulid forward better*). Adapun tema pembangunan nasional tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Selanjutnya prioritas nasional tahun 2022 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastrutkur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,8 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,3 persen; dan
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,41 – 73,46.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. Beberapa *major project* utama tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan yang membutuhkan dukungan antara lain:

1. MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter yaitu Kawasan Industri Batang meliputi perencanaan perizinan dan tata ruang KI dan smelter, pembangunan infrastruktur di dalam KI dan smelter, serta peningkatan investasi dan promosi ekspor;
2. MP Pengelolaan Terpadu UMKM meliputi penyediaan akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama, kurasi dan standardisasi produk, perluasan akses pasar dan kemitrausahaan, penyediaan akses pembiayaan, pendampingan SDM UMKM, serta regulasi dan pendataan UMKM;
3. MP Akselerasi Pengembangan Energo Terbarukan dan Konservasi Energi meliputi pembangunan aneka energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. MP Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu DPP Borobudur dan sekitarnya meliputi perintisan dsetinasi, pembangunan jalan, serta pembangunan bandara dan pelabuhan, pembangunan desa wisata, pembangunan amenitas, pembangunan kawasan dan wilayah
5. MP reformasi Sistem Perlindungan Sosial meliputi pengembangan regsitrasi sosial ekonomi, penguatan integrasi kepesertaan dan informasi jaminan sosial, dan penguatan bantuan sosial;
6. MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional meliputi penguatan sumber daya kesehatan, penguatan health security, serta pelayanan kesehatan;
7. MP Reformasi Pendidikan Keterampilan meliputi revitalisasi SMK,transformasi BLK, dan reformasi Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK);
8. MP Transformasi Digital meliputi digitalisasi di sektor kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi UMKM, bantuan sosial, literasi masyarakat, SDM digital, dan keamanan siber;
9. MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan B3 meliputi fasilitas pengolahan limbah B3 medis dan fasyanker, serta pengolahan limbah B3 terpadu.

Adapun sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 – 5,84 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 10,27 – 11,42 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,06 – 5,89 persen.

b. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**" yang dijabarkan dalam **prioritas daerah** tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana

Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun 2022 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kejadian pandemi Covid-19 di tahun 2020 memberikan goncangan cukup berat pada sektor perekonomian sehingga diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan. Untuk itu di kebijakan pembangunan daerah di tahun 2022 didorong untuk penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang difokuskan pada:

a) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, serta kualitas produk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani; perwujudan korporasi petani; peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan; perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan; peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah; mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat; peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah, serta berbasis kawasan perdesaan melalui pengembangan desa wisata; perbaikan iklim investasi

yang semakin kondusif; peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, serta peningkatan kapasitan tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung, dan *longstorage* yang didukung dengan perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;

b) Penguatan keberlanjutan lingkungan hidup melalui rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung, serta keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; konservasi lingkungan, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang, serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;
c) Pemantapan ketahanan bencana melalui peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob, dan tanah longsor; integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan; sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan; penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu 1) Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dan 2) Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Williamson, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Penyelenggaraan Jalan;
3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5) Program Penanggulangan Bencana;
6) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
7) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
8) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
9) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
10) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
12) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
13) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
14) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
15) Program Pengelolaan Persampahan;
16) Program Penataan Desa;
17) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
18) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
19) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
20) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
21) Program Pengelolaan Pelayaran;
22) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
23) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
24) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
25) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
26) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
27) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
28) Program Promosi Penanaman Modal;
29) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
31) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
32) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
33) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
34) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
35) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
36) Program Pemasaran Pariwisata;
37) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
38) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
39) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
40) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
41) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
42) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
43) Program Penyuluhan Pertanian;
44) Program Pengelolaan Hutan;
45) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
46) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
47) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
48) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
49) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;

50) Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
51) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
52) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
53) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
54) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
55) Program Pengembangan Ekspor;
56) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
57) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
58) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
59) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
60) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Kebijakan pengurangan kemiskinan diarahkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (PKE) mencapai 0 persen di tahun 2024 sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2021. Sasaran kebijakan ini untuk penduduk miskin dan rentan miskin khususnya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak Covid-19, dan sasaran kelompok PKE pada tahun 2022 di 19 (sembilan belas) kabupaten di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Tegal, Purbalingga, Pekalongan, Batang, Kendal, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Kendal, Pati, dan Rembang. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja, serta pengawasan tenaga kerja. Prioritas daerah fokus pada:

a) Penyediaan *basic need access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya yang bersifat langsung dan tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui antara lain peningkatan akses pendidikan berupa beasiswa siswa miskin, penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding* dan asrama semi *boarding* di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, serta pemberian bantuan operasional sekolah (BOSDa) bagi SMA, SMK, SLB Swasta dan MA; peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat; bantuan stimulan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan rumah

baru sederhana sehat, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan listrik; pemberian Kartu Jateng Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif, perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; fasilitasi kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan; serta peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

b) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan serta meningkatan daya tahan usaha mikro dan kecil antara lain melalui keperantaraan akses masyarakat terhadap modal, informasi dan fasilitasi pembiayaan/kredit, teknologi, pasar, manajemen usaha, *linkage* usaha mikro kecil dengan *off taker* (penjamin); pengembangan *startup* wirausaha baru; penguatan perhutanan sosial berupa agroforestry untuk kelompok tani hutan; peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa/BUMDesa Bersama; pemanfaatan teknologi informasi digitalisasi dalam rangka edukasi dan literasi pengetahuan, manajemen usaha, pola pembiayaan, maupun pola pemasaran dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0; peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina;
c) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antar pemangku kepentingan, peningkatan dan perluasan pengelolaan pemanfaatan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penajaman target sasaran penganggulangan kemiskinan berbasis DTKS, fasilitasi pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas dengan pendampingan yang kontinyu, peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Baznas;
d) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; penciptaan atau perluasan kesempatan kerja dengan juga memberikan akses kepada kelompok disabilitas, masyarakat miskin, lansia, dan TNI purna; perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, dan pelayanan pengawasan tenaga kerja.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Angka Kemiskinan, Indeks Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5) Program Pengembangan Perumahan;
6) Program Kawasan Permukiman;
7) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9) Program Pemberdayaan Sosial;
10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
11) Program Rehabilitasi Sosial;
12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
13) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
14) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
15) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
16) Program Penemoatan Tenaga Kerja;
17) Program Hubungan Industrial;
18) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
19) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
20) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
21) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
22) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebuhan Maksimum dan Tanah Absentee;
23) Program Pendaftaran Penduduk;
24) Program Pencatatan Sipil;
25) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
26) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
27) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
28) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
29) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
30) Program Pengembangan UMKM;

31) Program Promosi Penanaman Modal;
32) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
33) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
34) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
35) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
36) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
37) Program Penyuluhan Pertanian;
38) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
39) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
40) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada:

a) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan terutama yang memenuhi standar protokol kesehatan, serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;
b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat; serta pembudayaan/permassalan olahraga kepada masyarakat, penyelenggaraan keolahragaan melalui pembudayaan/pemassalan olahraga kepada masyarakat, peningkatan prestasi olahraga, penyelenggaraan even olahraga, dan peningkatan sarpras olahraga;

c) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
10) Program Perlindungan Perempuan;
11) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
12) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
13) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
14) Program Perlindungan Khusus Anak;
15) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
16) Program Pengendalian Penduduk;
17) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
18) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
19) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
20) Program Pengembangan Kebudayaan;
21) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
22) Program Pembinaan Sejarah;
23) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
24) Program Pengelolaan Permuseuman;
25) Program Pembinaan Perpustakaan.
26) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan toleransi, kebersamaan, dan gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah. Prioritas daerah ini di tahun 2022 difokuskan pada:

a) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; pengendalian produk hukum dan penegakkan perda;
c) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan *human capital management*; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
d) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD

lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;

e) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganergaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
f) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pencegahan ekstrimisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu 1) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dan 2) Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, dan Persentase Penurunan Konflik SARA. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

1) Program Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4) Program Pelayanan Penanaman Modal;
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6) Program Penataan Bangunan Gedung;
7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
8) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
9) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
10) Program Pengelolaan Arsip;
11) Program Administrasi Umum;
12) Program Penataan Organisasi;
13) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
14) Program Kesejahteraan Rakyat;
15) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
16) Program Perekonomian dan Pembangunan;
17) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
18) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
19) Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi;
20) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
21) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
22) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
23) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
24) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

26) Program Kepegawaian Daerah;
27) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
28) Program Pelayanan Penghubung;
29) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
30) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
31) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
32) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
33) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
34) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
35) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Penjabaran program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang mendukung prioritas daerah beserta indikatif kebutuhan pendanaannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Prioritas, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Pertumbuhan Ekonomi			
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
		Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana		**1.281.192.874.000**
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	157.939.878.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	590.414.539.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.802.600.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.665.829.000
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.735.000.000
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.700.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.600.750.000
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.065.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	550.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	719.600.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.870.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.760.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	850.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	3.567.795.000
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	380.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.022.415.000
			PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	800.000.000
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.675.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	500.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	105.786.755.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.379.216.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.700.024.000
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.250.000.000
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.000.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.892.964.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	7.275.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	242.800.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	465.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	994.651.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.997.890.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	49.017.513.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.937.588.000
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.469.440.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.484.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.367.100.000
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.014.500.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.102.450.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	79.866.573.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.125.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	15.741.085.000
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.453.572.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.393.658.000
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	35.208.095.000
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.304.944.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.242.060.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.014.670.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	6.206.560.000
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	5.527.731.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	12.181.982.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3.120.535.000
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.069.089.000
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	23.296.800.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.600.325.000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.899.580.000
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	286.685.000
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	73.460.581.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.098.052.000
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.750.000.000
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Angka Kemiskinan Indeks Gini			
Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka			
		Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran		**2.826.078.812.000**
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.043.999.916.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	532.013.651.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.088.158.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	730.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	17.425.000.000
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	610.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.300.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.055.000.000
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	49.278.485.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	41.750.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	435.000.000
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	400.000.000
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.446.757.000
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.835.434.000
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.218.409.000
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.002.524.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.254.250.000
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.830.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	500.000.000
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	190.000.000
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	175.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	200.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.800.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.150.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	300.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.840.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.650.000.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.150.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	253.290.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.394.344.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.865.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.310.000.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	12.631.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.350.744.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.451.850.000
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	295.000.000
Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing		**1.823.104.539.000**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.096.188.601.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	281.135.377.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	875.000.000
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	252.500.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	500.000.000
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150.463.582.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.800.000.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.800.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.620.129.000
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.053.400.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.021.800.000
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	175.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	235.000.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	695.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	525.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	275.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	40.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	16.579.750.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	223.275.950.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	18.402.500.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.820.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.980.000.000
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	655.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.875.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	710.950.000
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi			
Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA			
		Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah		**18.332.470.023.000**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.191.641.271.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	45.873.968.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	801.480.000
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.768.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	47.750.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	67.255.132.000
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.010.176.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	300.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.500.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.500.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	321.905.000
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	171.446.297.000
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.800.000.000
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.326.130.000
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	425.470.610.000
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.315.000.000
			PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	100.714.735.000
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.450.000.000
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.675.000.000
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	168.930.054.000
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	165.495.350.000
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.000.000.000

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Prioritas Daerah	Program	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.259.800.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.738.436.697.000
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.051.822.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	33.853.659.000
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	17.274.560.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.569.078.000
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.152.775.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.272.457.000
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.709.555.000
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.985.500.000
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.631.612.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	42.575.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.106.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	17.246.400.000

Rencana pembangunan daerah tahun 2022 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu:

1. **Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK**

   Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

   Bentuk implementasi sekolah tanpa sekat diantaranya adalah penerapan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB melalui pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

   Implementasi lainnya dari sekolah tanpa sekat adalah pelatihan tentang demokrasi dan pemilu. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, yang mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Program pelatihan tentang demokrasi dan pemilu ini terutama adalah untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Kegiatan lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaaan, politik, dan kepemerintahan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya politik gotong royong.

   Program pendidikan anti korupsi juga menjadi salah satu program unggulan dalam konteks sekolah tanpa sekat. Pendidikan anti korupsi ini dilakukan melalui internalisasi kurikulum sekolah mengenai pemahaman tentang sekolah-sekolah, dan sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Program lain adalah magang gubernur untuk SMA/SMK. Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik..

2. **Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama**

   Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahteraan menuju kehidupan

yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Bentuk implementasi program unggulan ini antara lain dengan memberikan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama serta peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan.

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Bentuk penjabaran program unggulan yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.

Penerapan teknologi informasi dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Bentuk pelayanan publik lainnya yang didorong untuk dikembangkan adalah Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi program ini juga didukung dengan upaya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN dan implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli, tidak hanya di tataran pemerintah provinsi tetapi juga sampai kabupaten/kota.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan focussing penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, pengembangan Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKPP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 OPD minimal 1

desa miskin" dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri. Bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan keuangan untuk stimulan bantuan RSLH, untuk seluruh desa, dan/atau kelurahan.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah, yang hingga saat ini sudah dilakukan inisiasi dalam mengimplementasikannya.

Program kemudahan akses kredit UMKM adalah program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Bentuk penerapan program ini antara lain melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM.

Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDesa yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDesa sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Implementasi penguatan BUMDesa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDesa, serta penyertaan modal kepada BUMDesa dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan startup wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja. Upaya

implementasi program tersebut antara lain bimtek dan pendampingan wirausaha baru, fasilitasi akses pasar dan modal bagi wirausaha baru, pengembangan aplikasi e-commerce, pelatihan padat karya produksi di desa miskin, pelatihan kerja bagi masyarakat di berbagai bidang, serta pemagangan ke luar negeri.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga ditingkat produsen dan konsumen; membangun sistem informasi tentang ketersediaan dan stok pangan secara real time; menjamin pemasaran produk pertanian serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Upaya menjaga harga komoditas pertanian dilakukan melalui pengembangan sistem informasi dengan stabilitas stok antar waktu dan antar wilayah berdasarkan informasi real time harga ditingkat produsen dan konsumen.

Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya. Sasaran penerima asuransi adalah petani yang sudah memiliki kartu tani.

Program melindungi kepentingan nelayan adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar. Jaminan tersebut berupa pemberian asuransi bagi nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Implementasi lainnya dari program ini adalah Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT), pengembangan Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP), serta pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan".

7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung

peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri. Implementasinya berupa perbaikan daerah irigasi, serta perbaikan dan pembangunan embung.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menginternalisasi kebijakan tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga, pembukaan kawasan industri baru juga didukung dengan pemenuhan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti penyediaan air baku, listrik, akses jalan, dan permukiman bagi pekerja.

Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan adalah integrasi hulu-hilir, integrasi berbasis organisasi pertanian dan konsolidasi lahan melalui pengembangan koorporasi petani, integrasi dibawah tegakan, zero waste, agrowisata, minapadi, dan pertanian organik. Pola pengembangan pertanian terintegrasi yaitu:

a) Integrasi pertanian berorientasi hasil food, feed, fuel, fertilizer, fiber (5f), yaitu budidaya di bawah tegakan dan integrasi tanaman pangan-peternakan;
b) Integrasi sektor pertanian dengan sektor lain, antara lain melalui agrowisata dan minapadi;
c) Integrasi berbasis organisasi antara lain melalui pengembangan pertanian organik, gula semut dan kopi;
d) Pengembangan pertanian terintegrasi yaitu integrasi hulu-hilir dengan konsolidasi lahan dan usaha pada petani dengan lahan sempit, didukung pinjaman kredit dari perbankan dan jaminan kredit dari BUMD penjamin kredit, serta pemasaran produk berbasis online.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi program ini antara lain penyuluhan paradigma sehat, edukasi pasien dan keluarga pasien, homecare, homevisit, daycare, kolaborasi/ interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor, peningkatan Public Safety Center (PSC) 119 tingkat provinsi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu di fasyankes.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Implementasinya antara lain pengelolaan SMK boarding dengan membangun gedung asrama SMK Negeri semi boarding, pembiayaan operasional asrama SMK Negeri semi boarding, bantuan beasiswa miskin (BSM), Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, serta uji kompetensi siswa SMK miskin.

Program selanjutnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel, yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan. Bentuk kegiatan dari program ini adalah pemberian BOSDa untuk sekolah swasta, dan pemberian bantuan hibah sarpras keagamaan, pendidikan keagamaa, dan hibah kepada lembaga keagamaan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Bentuk implementasinya antara lain parade seni budaya, pegalaran seni, pertunjukan kesenian rakyat, pengembangan daya tarik wisata, dan Jambore Ekonomi Kreatif (Workshop Ekonomi Kreatif Bidang Seni Pertunjukan dan Seni Rupa).

Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah. Program ini dilakukan melalui peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri.

Program lainnya adalah pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan

pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan peningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Bentuk implementasinya antara lain edukasi lingkungan di tingkat sekolah, pengembangan budaya hemat energi, rehabilitasi dan konservasi lingkungan (hutan, lahan, air tanah), pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan desa ekowisata, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, serta pembentukan desa tangguh bencana.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2018-2023), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
1	2	3	4
1	Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian	Kemiskinan	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2	Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan,	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
1	2	3	4
	kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka		hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing
3	Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan, yang didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur	a. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha b. Kedaulatan pangan dan energi	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
4	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
5	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah
6	Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
1	2	3	4
7	Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Kebijakan Umum

5.1.1. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Mendasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi

a. Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang-Petanglong – Kedungsepur – Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi dan pembangunan wilayah Jawa Tengah;
b. Poros pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb – Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah selatan;
c. Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela;
d. Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk percepatan pembangunan koridor tengah Jawa Tengah dengan tetap menjaga dan meningkatan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet – Sindoro – Sumbing – Merbabu – Merapi – Lawu;
e. Wilayah perbatasan timur dan barat Jawa Tengah diarahkan untuk dipercepat pembangunannya guna meningkatkan keserasian pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi dan wilayah pembangunan di Jawa Tengah;
f. Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 1
Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Strategi pengembangan wilayah di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
2. Peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan;
3. Pengembangan prasarana wilayah;
4. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
5. Pemertahanan lahan pertanian;
6. Pengembangan kawasan industri;
7. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata strategis;
8. Pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak;
9. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah tersebut dalam perkembangannya diarahkan untuk selaras dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah lainnya yang telah ditetapkan dalam beberapa regulasi baru yang terbit setelah ditetapkannya RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 meliputi:

a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
b. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang. Kebijakan ini untuk meningkatkan

investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah;

c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, dimana dalam dokumen RPJMN memberikan arahan untuk pengembangan wilayah Pulau Jawa – Bali;
d. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam Daftar Proyek Strategis Nasional Sektor Kawasan, termasuk didalamnya rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang yang pembangunannya dimulai sejak awal tahun 2020. Kebijakan ini juga untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.

5.1.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Dalam mendukung arah pengembangan wilayah, diperlukan jaringan prasarana wilayah yang ditekankan pada pengembangan prasarana pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan antar Pusat Kegiatan baik Nasional, Wilayah dan Lokal (PKN, PKW dan PKL).

Adapun pengembangan jaringan prasarana dimaksud berupa jaringan prasarana transportasi meliputi pengembangan jaringan jalan, angkutan umum aglomerasi perkotaan, integrasi antar moda transportasi, bandar udara, reaktivasi jaringan rel kereta api, pelabuhan, terminal, jaringan prasarana energi, dan jaringan prasarana sumber daya air. Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah dilakukan antara lain melalui:

1) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas wilayah;
2) Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung kawasan-kawasan strategis;
3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik untuk mendukung pasokan energi nasional (sistem JAMALI);
4) Pengembangan sistem prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan domestik, sektor industri dan pertanian.

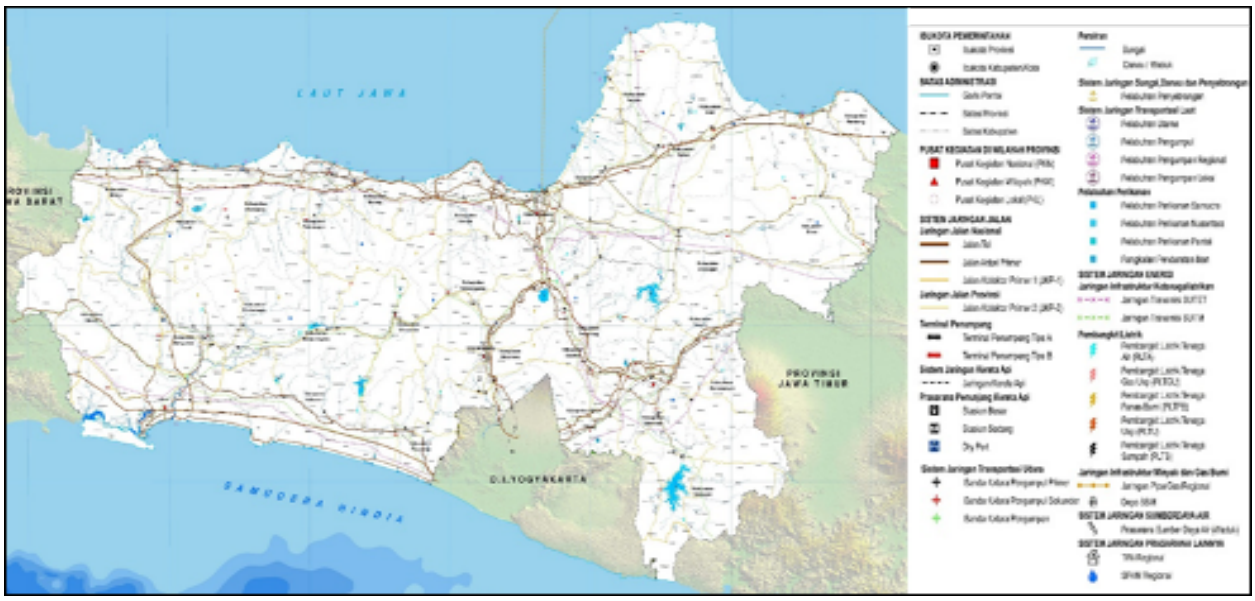

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5. 2
Pengembangan Wilayah Melalui Pembangunan Jaringan Prasarana

5.1.3. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Lindung

   Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan bencana alam, serta kawasan lindung geologi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

   a. Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS);
   b. Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar 30%, yang terdiri RTH publik minimal 20%, dan RTH privat minimal 10%;
   c. Rehabilitasi lahan kritis;
   d. Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air;
   e. Peningkatan upaya mitigasi pada kawasan rawan bencana.

2. Kawasan Budidaya

   Fokus perwujudan kawasan budidaya diarahkan pada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

   a. Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan produksi;
   b. Pemantapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
   c. Pengembangan kawasan agropolitan;
   d. Pengendalian kawasan pertambangan;
   e. Pengembangan kawasan industri;

f. Pengembangan kawasan pariwisata;
g. Peningkatan kawasan permukiman.

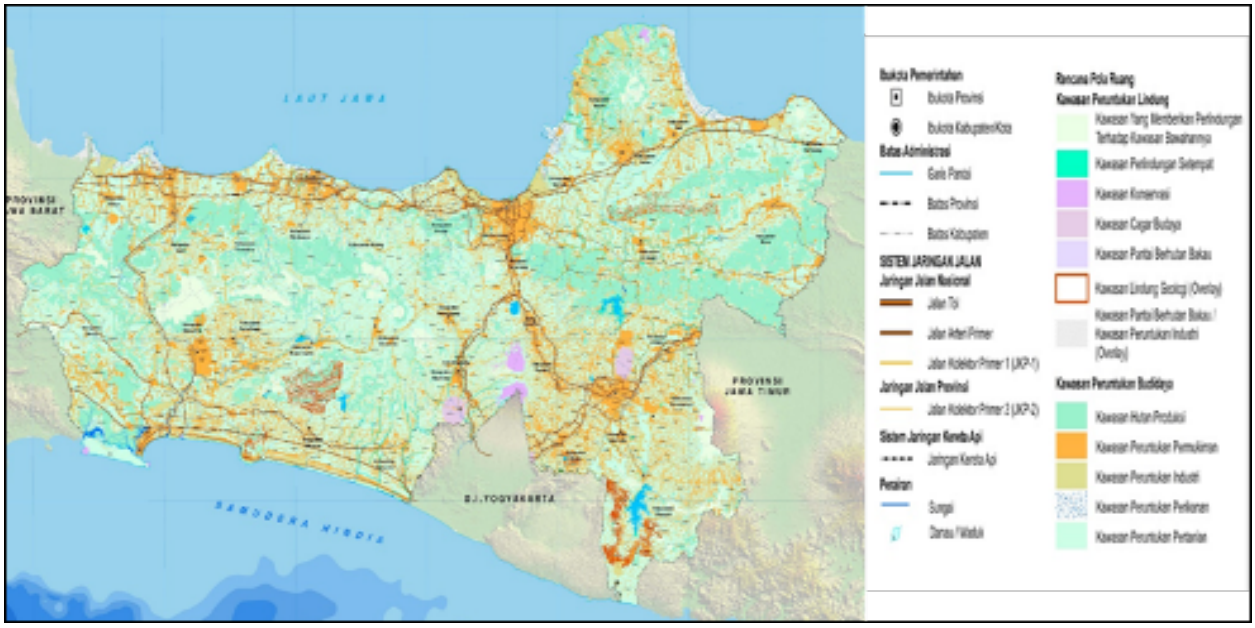

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5. 3
Pengembangan Wilayah Melalui Arah Pola Ruang

5.1.4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Nasional di Provinsi meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);
B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
   1. Kawasan Borobudur dan sekitarnya;
   2. Kawasan Candi Prambanan; dan
   3. Kawasan Sangiran.
C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
   1. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
   2. Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak).

Penetapan kawasan strategis didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Kawasan tersebut terbagi menurut 3 sudut kepentingan yaitu:

A. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
1. Kawasan Industri Terpadu meliputi:

a. Kawasan Industri Kendal – Semarang - Demak;
b. Kawasan Industri Brebes;
c. Kawasan Industri Rembang;
d. Kawasan Industri Cilacap; dan
e. Kawasan Industri Kebumen;
f. Kawasan Industri Terpadu Batang.

2. Kawasan agropolitan meliputi:
   a. Kawasan agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas);
   b. Kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar);
   c. Kawasan agropolitan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang);
   d. Kawasan agropolitan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara).
3. Kawasan perkotaan meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten;
   b. Kawasan Perkotaan Bregasmalang
   c. Kawasan Perkotaan Petanglong; dan
   d. Kawasan Perkotaan Purwomanggung.
4. Kawasan strategis pariwisata terpadu meliputi:
   a. Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu Kawasan Surakarta dan sekitarnya;
   b. Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu Kawasan Borobudur - Kebumen - Dieng dan sekitarnya;
   c. Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu Kawasan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya.

B. Sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:

1. Kawasan Masjid Agung Demak;
2. Kawasan Candi Dieng;
3. Kawasan Candi Gedongsongo;
4. Kawasan Candi Cetho – Sukuh;
5. Kawasan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran.

C. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu;
2. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
3. Kawasan Rawa Pening;
4. Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing;
5. Kawasan Gunung Lawu; dan
6. Kawasan Gunung Slamet.

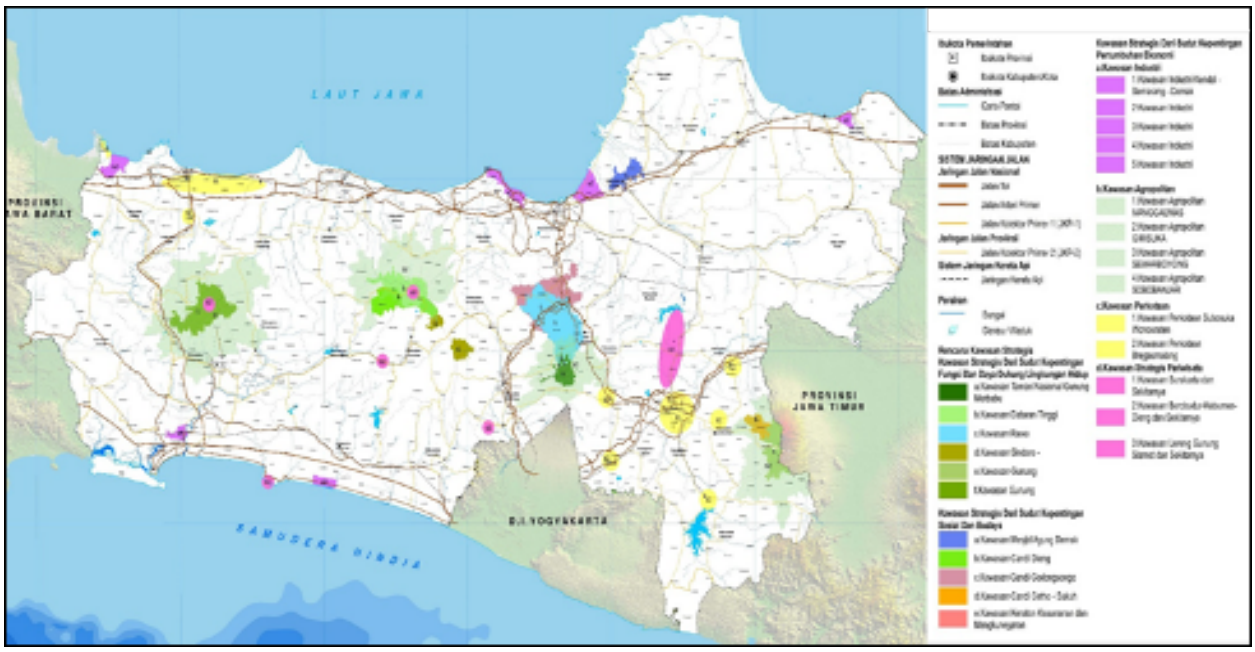

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5. 4
Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

5.2. Arah Pengembangan Perwilayahan

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tidak terlepas dari arah pembangunan wilayah Jawa – Bali sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN, pembangunan wilayah Jawa-Bali diprioritaskan pada kegiatan prioritas yaitu 1) pengembangan sektor unggulan; 2) pengembangan kawasan strategis; 3) pengembangan kawasan perkotaan; 4) pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; serta 5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Untuk wilayah Jawa Tengah diprioritaskan pada:

1. Pengembangan sektor unggulan pada komoditas tebu, kopi, garam, dan perikanan tangkap dan budidaya;
2. Pengembangan kawasan strategis antara lain pada:
   a. Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KI Brebes, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
   b. Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur dan sekitarnya;
   c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain jalan tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, jalan lintas pansela, pembangunan KA Ekspres Jakarta – Semarang, dan pembangunan Bandara Ngloram Cepu;

d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, dan revitalisasi balai latihan kerja.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Gambar 5. 5
Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa – Bali

3. Pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas WM Semarang; pembangunan Kota Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Semarang (Kedungsepur) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan;
4. Pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal melalui proyek prioritas antara lain:
   a. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan

ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

b. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bersama di KPPN Magelang dan KPPN Kendal;
c. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 16 kabupaten di Jawa Tengah;
d. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mengurangi penduduk miskin di Jawa Tengah;
e. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;

5. Penguatan kelembagaan dan keuangan daerah, dengan beberapa proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:
   a. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
   b. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama pengawalan kepeminatan investasi;
   c. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
   d. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   e. Peningkatan riset dan inovasi daerah;
   f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
   g. Peningkatan kualitas belanja daerah;
   h. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
   i. Pengembangan kerjasama antardaerah;
   j. Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
   k. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
   l. Perluasan kepemilikan akta kelahiran;
   m. Penataan ruang dan lahan;
   n. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan; dan
   o. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokkan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk,

serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun pengembangan kewilayahan meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang sebagaimana pada gambar berikut.

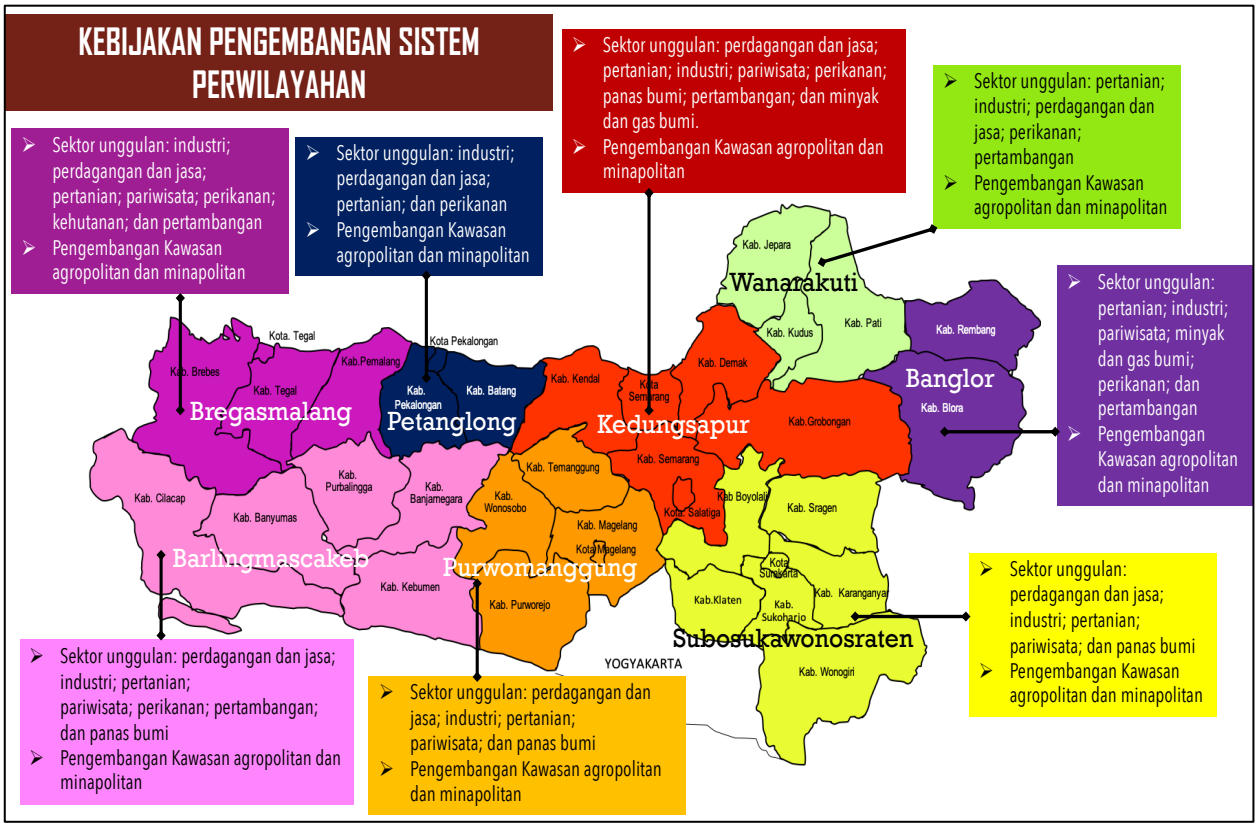

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2009-2029

Gambar 5. 6
Pembagian Per Wilayahan

Kebijakan pembangunan pada 8 wilayah pembangunan dilakukan selaras terpadu dan terintegrasi dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan pembangunan wilayah yang berdaya saing dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan. Kebijakan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dan menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur eksisting ditambah dengan infrastruktur tambahan guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan pusat ekonomi dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya masih belum optimal dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan serta memajukan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta kawasan industri pada 3 (tiga) *quick wins* di wilayah pengembangan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang yang didukung dengan pembangunan di wilayah sekitarnya agar pembanguan menjadi semakin merata di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan 3 (tiga) *quick wins* tersebut yaitu:

1. Kawasan Kedungsepur (Kendal – Kota Semarang – Semarang - Kota Salatiga - Demak – Grobogan), dengan *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal, dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029, dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kendal sendiri telah ditentukan sebesar 4.500 Ha. Kawasan pendukung Kedungsepur (KI Kendal), meliputi:
   a. Wilayah Pengembangan Banglor yang meliputi Kabupaten Rembang dan Blora; dan
   b. Wilayah Pengembang Wanarakuti meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.
2. Kawasan Purwomanggung (Purworejo - Wonosobo - Magelang – Kota Magelang - Temanggung), dengan *quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece*, Mahakarya Budaya Dunia, yang diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan mancanegara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung.
   Kawasan pendukung Purwomanggung (Kawasan Pariwisata Borobudur), meliputi Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten yang meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten;
3. Kawasan Bregasmalang (Brebes – Kota Tegal - Tegal - Pemalang) dengan *quickwin* Kawasan Industri Brebes. Kawasan Industri (KI) Brebes ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sisi ekonomi, diarahkan sebagai pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan di Bregasmalang. Kawasan pendukung Bregasmalang (KI Brebes), meliputi:
   a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb yang meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen;
   b. Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan.

Rencana Program/kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 sejumlah 270 program/kegiatan dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp. 353.411,3 M. Adapun dari 270 program/kegiatan

tersebut dibiayai melalui beberapa macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 205 program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp. 46.183,3 M atau sebesar 13.07%; (2) KPBU terdiri dari 31 program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp. 150.402 M atau sebesar 42,56%; (3) BUMN/BUMD/Swasta terdiri dari 33 program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp.156.726 M atau sebesar 44,35%; dan (4) APBD terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp. 100 M atau sebesar 0,03%. Mayoritas program/kegiatan di Provinsi Jawa Tengah berasal dari sektor sumber daya air (20,7%), jalan/jembatan (18,5%), transportasi (7,8%), pariwisata (7,8%) serta perikanan dan kelautan (7,0%), rencana bersifat indikatif dinamis dengan memperhatikan kondisi kesiapan untuk dilaksanakan. Gambaran keterkaitan 3 *quick wins* dengan wilayah pengembangan sebagaimana dalam gambar berikut.

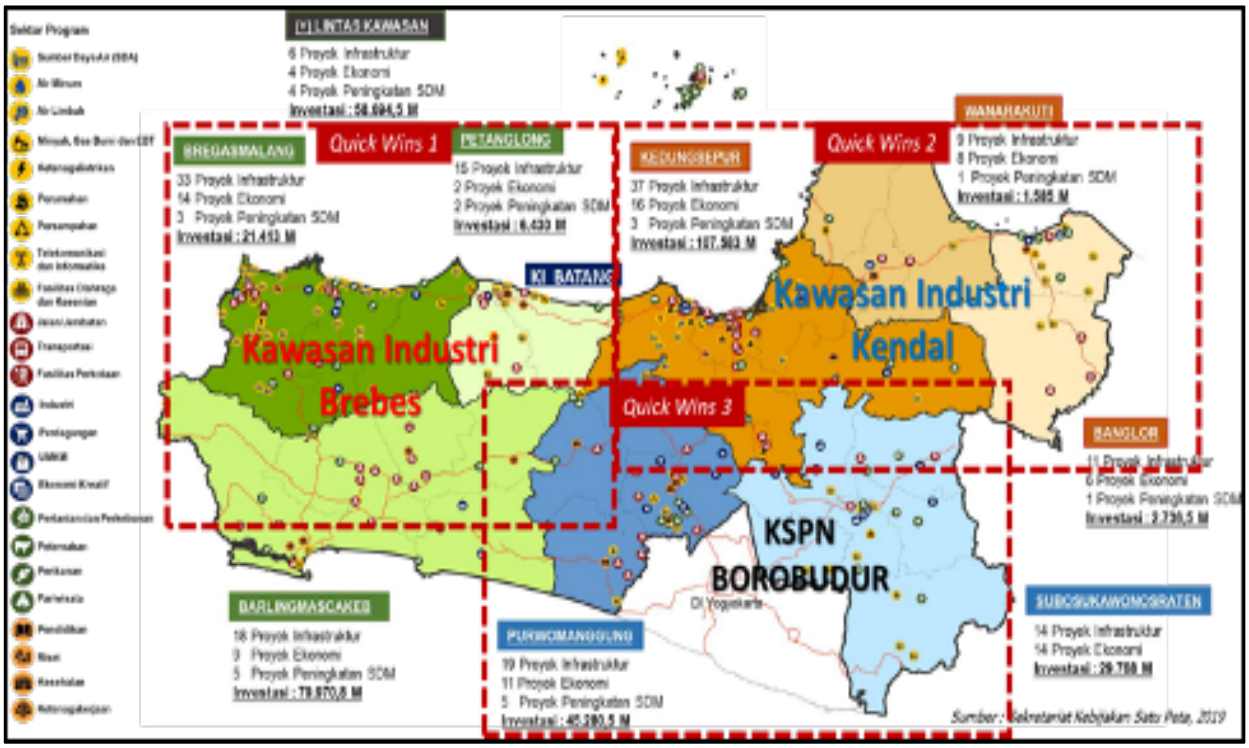

Sumber: Perpres Nomor 79 Tahun 2019 (diolah)

Gambar 5. 7
Quick Wins Dalam Konstelasi Wilayah Pengembangan Jawa Tengah Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019

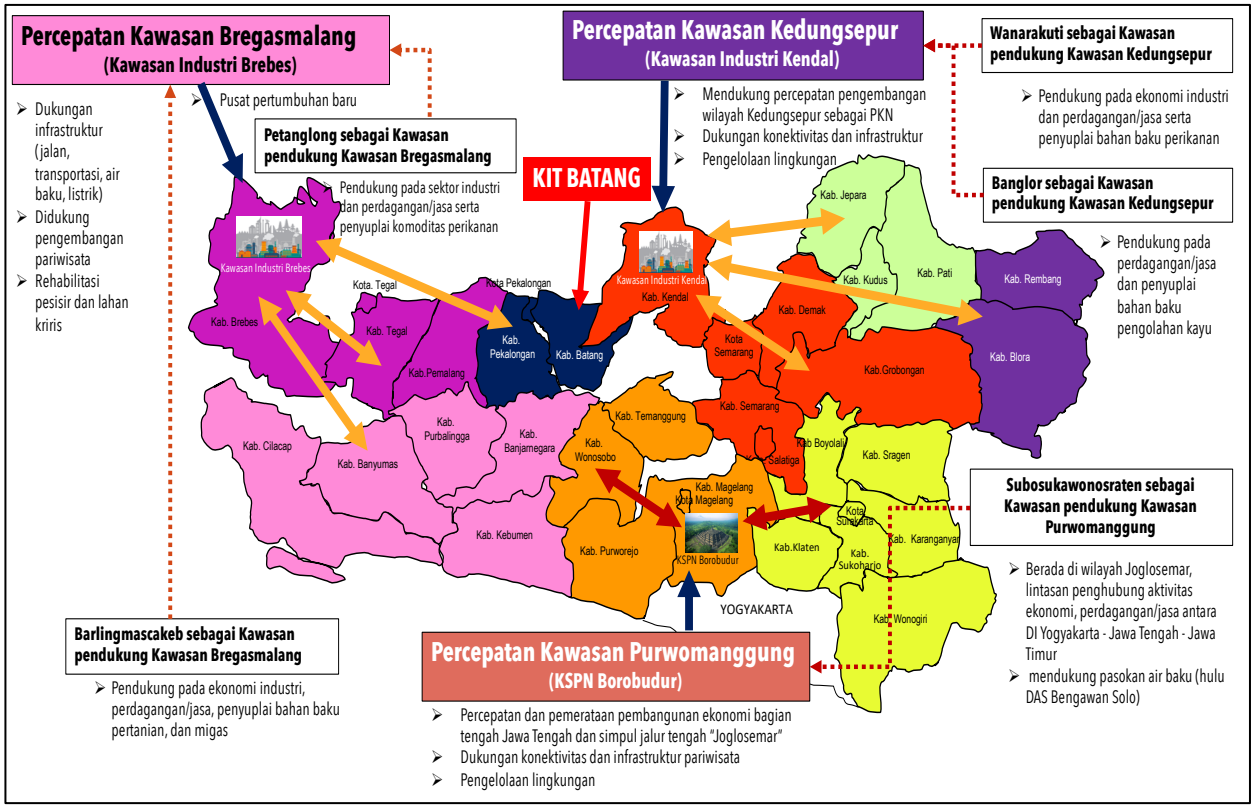

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5. 8
Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah

Disisi lain strategi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan melalui 3 (tiga) prinsip konektivitas yaitu: 1) Konektivitas memaksimalkan pertumbuhan melalui keterpaduan kawasan *(inclusive development)* dengan menghubungkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi; 2) Konektivitas memperluas pertumbuhan melalui keterkaitan hubungan wilayah-wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan 3) Konektivitas berdampak pada pencapaian pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Membangun konektivitas untuk menginterkoneksikan spasial guna mereduksi potensi terciptanya kesenjangan perekonomian dan kesejahteraan yang semakin tajam dalam masyarakat antar daerah, agar terwujudnya keterkaitan yang bersifat sinergis dan simbiosis mutualisme dalam berbagai kegiatan pembangunan wilayah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

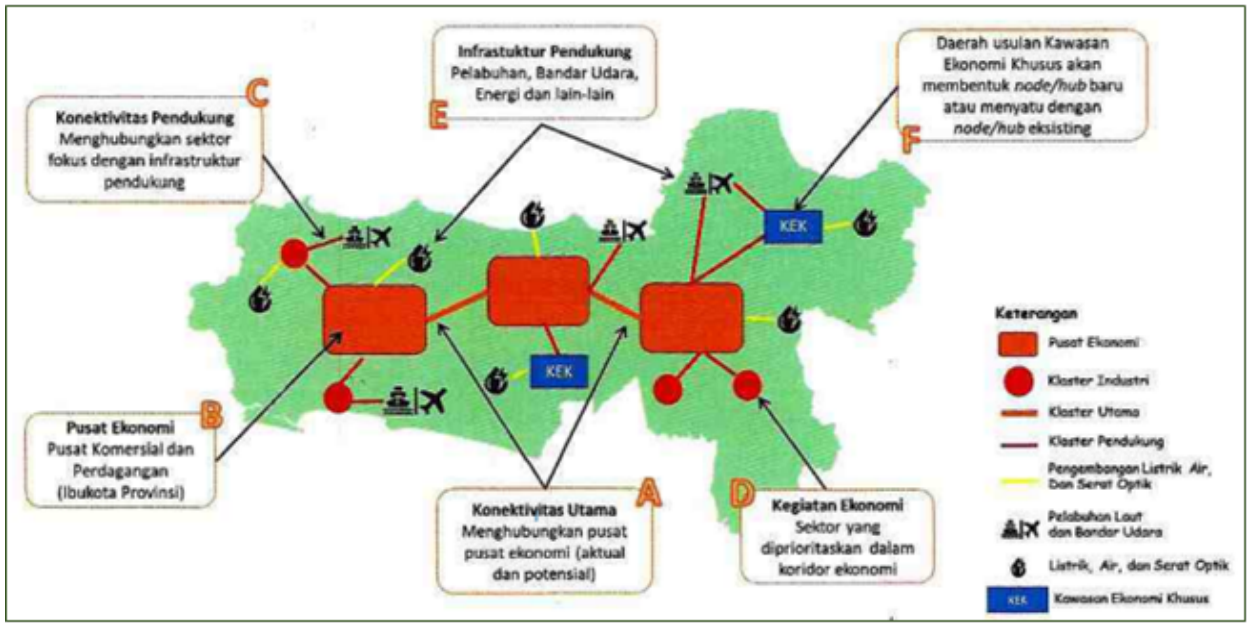

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 5. 9
Konsep Penguatan Konsektivitas Jawa Tengah

Selain Perpres Nomor 79 Tahun 2019, pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan pemerataan wilayah di Jawa Tengah dipercepat pula dengan pembangunan infrastruktur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020, dengan sebaran dan kegiatan sebagaimana gambar berikut.

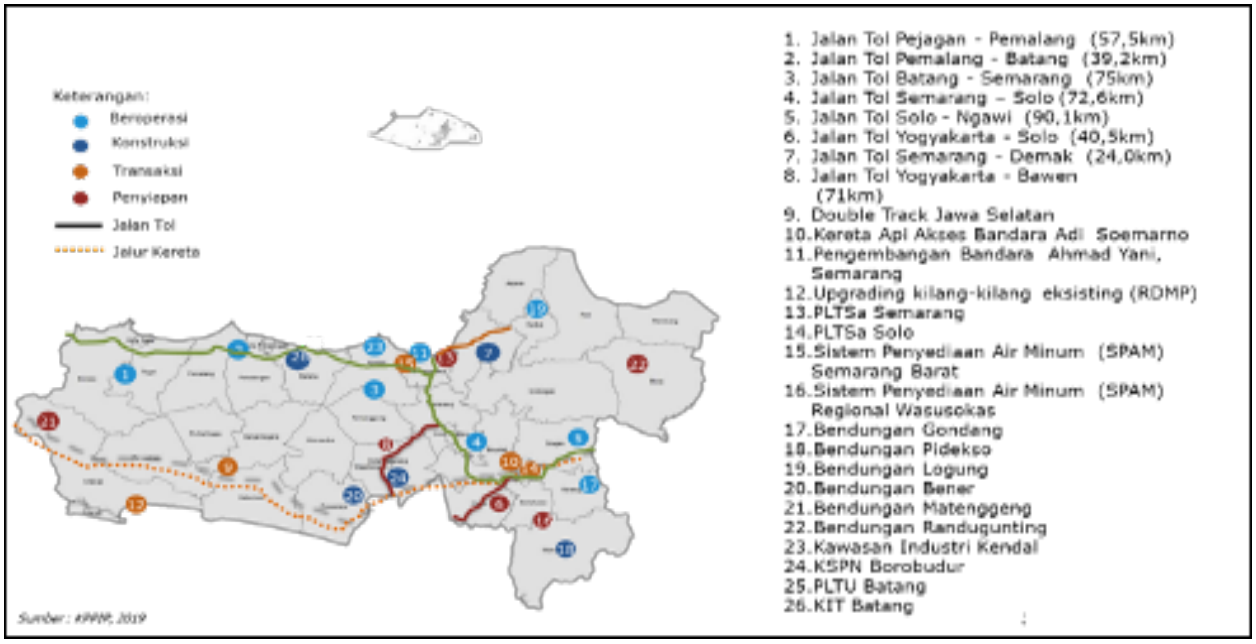

Sumber: Perpres No. 109 Tahun 2020

Gambar 5. 10
Sebaran Proyek Strategis Nasional Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Di Jawa Tengah

5.2.1. Integrasi Antar Wilayah Pengembangan

Kolaborasi ini menggabarkan konsinstensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian antara wilayah pengembangan prioritas dan pendukung yang diamanatkan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 dengan memperhatikan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Batang sebagai Proyek Strategis Nasional.

5.2.1.1. Integrasi WP dalam *Quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal

A. WP Kedungsepur

WP Kedungsepur sebagai WP prioritas dengan *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Kondisi makro pembangunan wilayah Kedungsepur saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 1
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Grobogan	-1,59	12,46	4,50	69,87
2	Kab. Demak	-0,23	12,54	7,31	72,22
3	Kab. Semarang	-2,67	7,51	4,57	74,10
4	Kab. Kendal	-1,53	9,99	7,56	72,29
5	Kota Semarang	-1,61	4,34	9,57	83,05
6	Kota Salatiga	-1,68	4,94	7,44	83,14
Rata-Rata WP		**-1,55**	**8,63**	**6,83**	**75,78**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Wilayah Kedungsepur diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah. Wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur pantura; serta perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 12 (duabelas) kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, dan Sukorejo yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya. Kawasan-kawasan Wilayah Kedungsepur yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo. Selain itu juga terdapat kawasan strategis kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Industri Kendal – Semarang – Demak.

Arah kebijakan pengembangan WP Kedungsepur adalah ***"Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan".*** Arah kebijakan pengembangan WP Kedungsepur dapat digambarkan sebagai berikut.

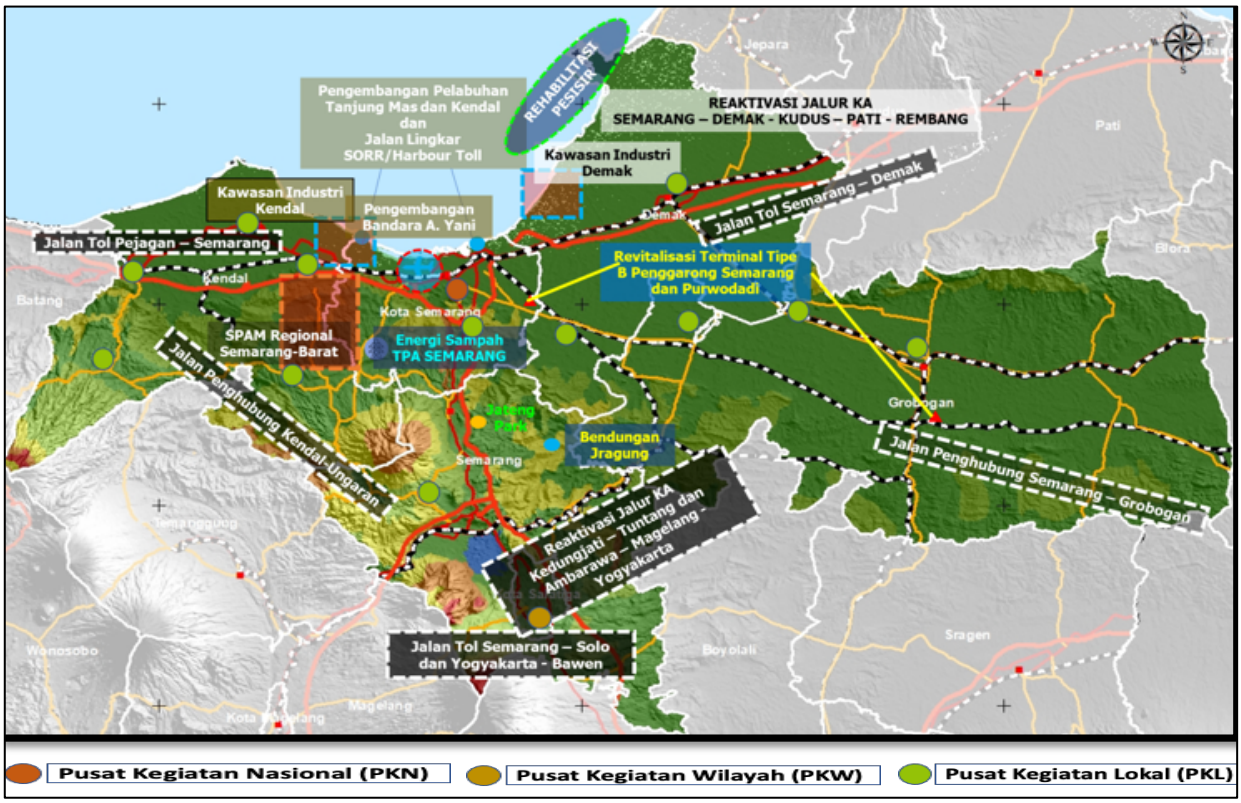

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 11
Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Pengembangan wilayah Kedungsepur untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.2
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Grobogan	3,90-5,16	11,51-11,40	4,14-4,08	70,99
2	Kab. Demak	3,89-5,15	11,63-11,52	6,72-6,63	72,96
3	Kab. Semarang	4,06-5,37	6,66-6,61	4,20-4,15	74,71
4	Kab. Kendal	4,13-5,47	9,26-9,19	6,95-6,86	72,98
5	Kota Semarang	4,98-6,59	4,78-4,76	8,80-8,68	84,02
6	Kota Salatiga	4,27-5,65	5,20-5,14	6,84-6,75	84,04
Rata-Rata WP		**4,21-5,57**	**8,17-8,10**	**6,28-6,19**	**76,62**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi; pelayanan jaringan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (3 koridor) dan rel (kereta api komuter), fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal; fasilitasi revitalisasi/ reakvitasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Kedungjati – Tuntang, dan Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; fasilitasi pembangunan jalur rel dari Tanjung Emas menuju Kendal *Sea Port*; fasilitasi pembangunan jalan tol Semarang – Demak; fasilitasi pembangunan jalan lingkar SORR/ Semarang *Harbour Toll;* dan fasilitasi pengembangan Bandara A. Yani Kota Semarang.

Selain itu juga dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan air baku yang dilakukan dengan pembangunan prasarana dan sarana air baku pendukung untuk pengembangan kawasan industri (KIK dan *Jatengland*). Selain itu upaya pengelolaan lingkungan diantaranya konservasi mangrove di Kabupaten Demak; konservasi air tanah CAT Semarang – Demak; rehabilitasi; penanganan daerah kritis; penanganan pencemaran Rawa Pening; dan pembangunan *Waste to Energy* Kota Semarang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal meliputi perdagangan, jasa, industri kawasan Kendal dan Demak, dan pembangunan Jateng *Park* dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Program/kegiatan yang direncanakan akan dilakukan untuk mendukung kebijakan Perpres No. 79 Tahun 2019 di WP Kedungsepur yaitu sebanyak 56 program/kegiatan yang akan dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 33 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 7 (tujuh) program/kegiatan; (3) BUMN terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan; (4) BUMD terdiri dari 3 (tiga) program/kegiatan; dan (5)

Swasta terdiri dari 8 (delapan) program/kegiatan. Mayoritas program/ kegiatan di WP Kedungsepur adalah sektor sumber daya air, jalan/jembatan dan pariwisata.

Untuk mendukung pengembangan WP Kedungsepur program/ kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Pembangunan perlintasan tidak sebidang di Kabupaten Demak, peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Semarang-Grobogan, penghubung Kota Semarang-Kabupaten Grobogan, dan penghubung Kabupaten Kendal-Kabupaten Semarang;
b. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada Kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Stasiun Tawang Kota Semarang – Terminal Bawen Kabupaten Semarang, Terminal Mangkang Kota Semarang – Terminal Bahurekso Kabupaten Kendal, dan Terminal Penggaron Kota Semarang – Terminal Gubug via Terminal Godong Kabupaten Grobogan;
c. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis diantaranya melalui FGD pembangunan tahap V terminal penumpang tipe A Demak dan FGD reaktivasi jalur KA Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang;
d. Fasilitasi pembangunan waduk dan bendungan untuk meningkatkan penyediaan sumber air baku diantaranya Waduk Ngemplak Kabupaten Grobogan, Jragung Kabupaten Semarang dan Grobogan, Bendung Karet Sungai Blorong Kabupaten Kendal, Bendungan Bodri Kabupaten Kendal, Bendung Karet Sungai Bodri Kabupaten Kendal;
e. Fasilitasi kegiatan pengendalian banjir Sungai Bringin pendukung penanganan banjir Kota Semarang;
f. Pengendalian banjir pada sungai kewenangan provinsi melalui normalisasi, pemeliharaan, dan perkuatan tebing sungai;
g. Fasilitasi pembangunan gardu induk pendukung KI Kendal (150 KV) guna mentransformasikan tegangan dari pembangkitan;
h. Fasilitasi pembangunan pipa gas distribusi Semarang-Kendal-Brebes-Cirebon untuk mendukung pengembangan infrastruktir daerah dan perekonomian wilayah;
i. Pengembangan destinasi wisata Jateng Valley.

B. WP Banglor

WP Banglor sebagai WP pendukung *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Kondisi makro pembangunan wilayah Banglor saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 3
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Blora	-4,66	11,96	4,89	68,84
2	Kab. Rembang	-1,49	15,60	4,83	70,02
Rata-Rata WP		**-3,08**	**13,78**	**4,86**	**69,43**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Arah kebijakan pengembangan WP Banglor difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, sedangkan perkotaan Rembang diusulkan menjadi PKW. Sedangkan PKL wilayah Banglor meliputi Kawasan Perkotaan Lasem dan Blora.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah ***"Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Perindustrian dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"***. Arah kebijakan pengembangan WP Banglor dapat digambarkan sebagai berikut.

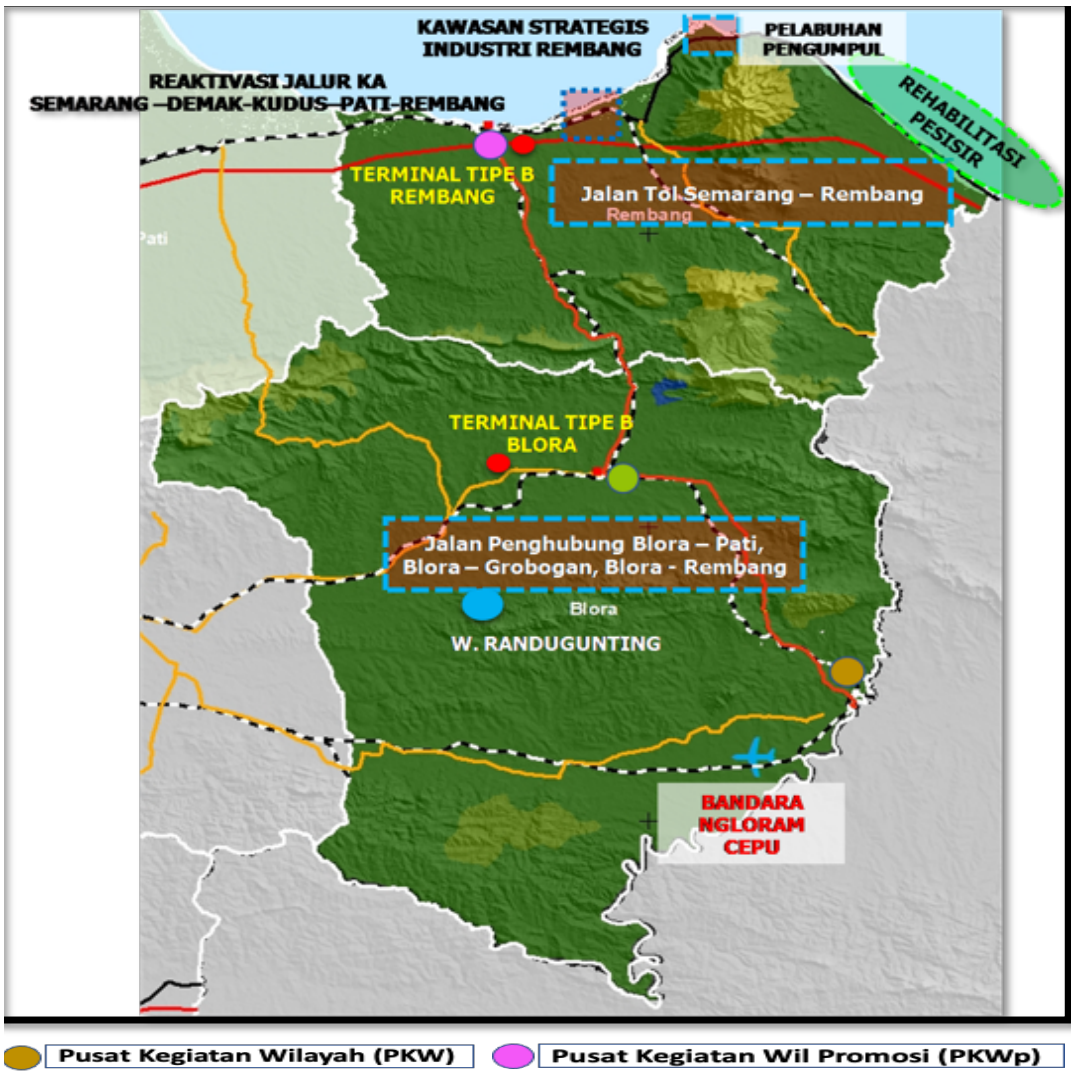

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 12
Arah Pengembangan Wilayah Banglor

Pengembangan wilayah Banglor untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 4
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Blora	2,94-3,89	10,45-10,39	4,50-4,44	69,50
2	Kab. Rembang	3,78-5,00	14,74-14,61	4,44-4,38	70,88
Rata-Rata WP		**3,36-4,45**	**12,59-12,50**	**4,47-4,41**	**70,19**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Pembangunan pengembangan wilayah diupayakan untuk meningkatkan pemerataan wilayah timur Jawa Tengah, maka ke depan di wilayah ini akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan membangun kawasan industri baru di Rembang, dan pengembangan Bandara Ngloram dimana tahun

2020 sudah dilakukan uji coba, dan tahun 2021 direncanakan sudah dapat melayani penerbangan komersial. Keduanya diharapkan akan memberikan daya ungkit dan memacu percepatan pembangunan di wilayah ini. Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, Kawasan Perkotaan Rembang didorong untuk dapat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu produksi perikanan tangkap juga ditingkatkan, didukung dengan pembangunan sarana prasarana pendukungnya, terutama di wilayah pantura.

Dalam mencapai arah pengembangan wilayah berbasis industri dan *agroforestry* yang didukung kepariwisataan, akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai yaitu pembangunan, fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; fasilitasi peningkatan jalan nasional Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora - Batas Jatim, peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Pati, dan peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan khususnya menjaga keberlanjutan air tanah maka dilakukan konservasi CAT Pati - Rembang dan penanganan kerusakan pesisir melalui konservasi mangrove di Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku maka akan dilakukan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku dan fasilitasi pembangunan Bendungan Randugunting.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 terdapat 18 program/kegiatan yang akan dilakukan di WP Banglor. Sumber pembiayaan kegiatan di WP Banglor ini dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 16 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; dan (3) BUMD/Swasta terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Banglor meliputi sektor sumber daya air, jalan/jembatan, serta perikanan dan kelautan.

Untuk mendukung pengembangan WP Banglor program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Peningkatan jalan provinsi pendukung akses Bandara Ngloram di Kabupaten Blora dan akses perbatasan Jatim di Kabupaten Rembang;
b. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui rehabilitasi terminal tipe B Gagakrimang Kabupaten Blora;
c. Fasilitasi pembangunan waduk dan bendungan untuk meningkatkan penyediaan sumber air baku diantaranya Waduk Randugunting dan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Blora.

C. WP Wanarakuti

WP Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) sebagai WP pendukung *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Kondisi makro pembangunan wilayah Wanarakuti saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka

kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 5
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Jepara	-1,94	7,17	6,70	71,99
2	Kab. Kudus	-3,53	7,31	5,53	75,00
3	Kab. Pati	-1,15	10,08	4,74	71,77
Rata-Rata WP		**-2,21**	**8,19**	**5,66**	**72,92**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Arah kebijakan pengembangan WP Wanarakuti difokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada ***"Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan".*** Arah kebijakan pengembangan WP Wanarakuti dapat digambarkan sebagai berikut.

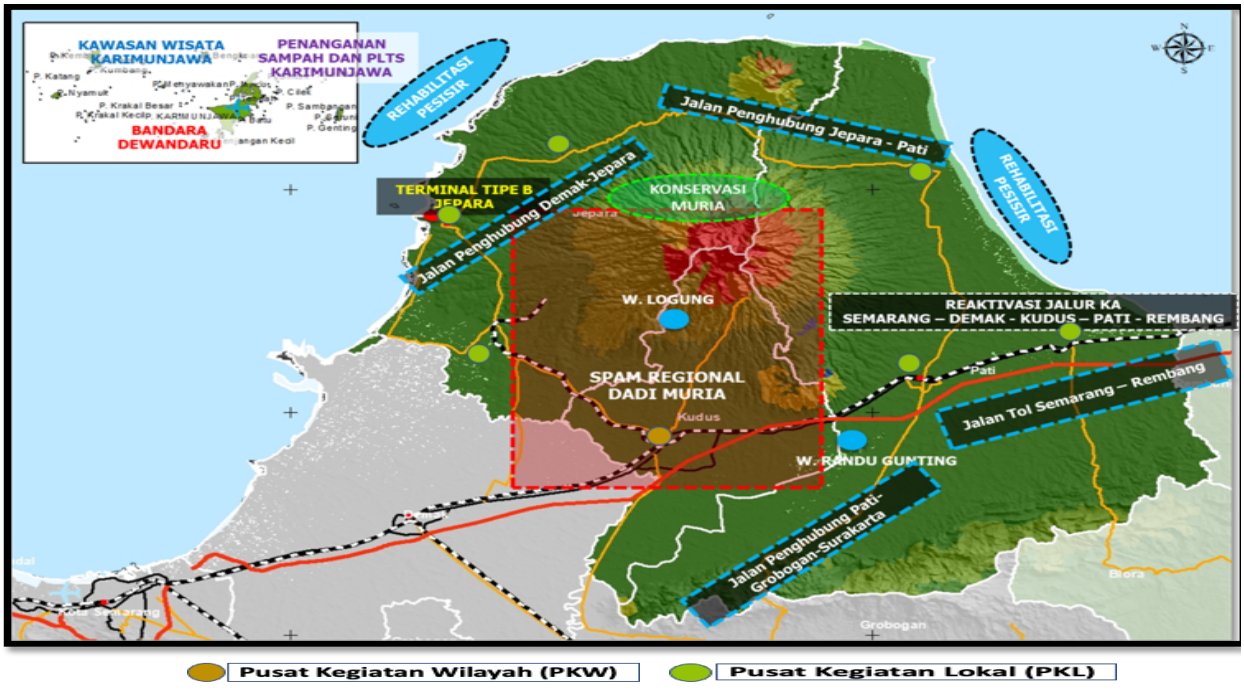

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 13
Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti

Pengembangan wilayah Wanarakuti untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 6
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wanarakuti Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Jepara	4,37-5,79	7,42-7,36	6,16-6,08	72,48
2	Kab. Kudus	2,25-2,98	6,77-6,71	5,09-5,02	75,52
3	Kab. Pati	4,26-5,63	10,27-10,19	4,36-4,30	72,59
Rata-Rata WP		**3,63-4,80**	**8,15-8,09**	**5,20-5,13**	**73,53**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur yaitu fasilitasi pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa; peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan; fasilitasi revitalisasi/ reaktifasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; inisiasi pembangunan jalan Demak-Jepara (*Coastal Road*).

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku maka akan dilakukan dengan inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati, dan Jepara). Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan.

Selain itu, diperlukan sarana prasarana pendukung pariwisata melalui penyiapan listrik PLTS Komunal (Karimunjawa), penanganan sampah (Karimunjawa), pengembangan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa - Semarang dan sekitarnya, serta destinasi pariwisata Rembang-Blora.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 terdapat 18 program/kegiatan di WP Wanarakuti. Kegiatan tersebut dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 14 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; (3) BUMD terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; (4) BUMD/Swasta terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan; dan (5) BUMD terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan. Mayoritas program/kegiatan di WP Wanarakuti adalah sektor perikanan dan kelautan serta sumber daya air.

Untuk mendukung pengembangan WP Wanarakuti program/ kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Peningkatan jalan provinsi pendukung akses Karimunjawa di Kabupaten Jepara;
b. Pengembangan aksesibilitas Karimunjawa-Semarang dan sekitarnya, diantaranya melalui operasionalisasi KMC Kartini I (proses scrapping);
c. Fasilitasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria;
d. Fasilitasi kegiatan pengendalian banjir Sungai Juana Kabupaten Pati, dan Sungai Wulan Kabupaten Kudus;
e. Konservasi DAS Muria dan DAS Kendeng.

5.2.1.2. Integrasi WP dalam *Quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur

A. WP Purwomanggung

Pengembangan WP Purwomanggung sebagai WP prioritas *quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kondisi makro pembangunan wilayah Purwomanggung saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 7
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Purworejo	-1,66	11,78	4,04	72,68
2	Kab. Wonosobo	-1,66	17,36	5,37	68,22
3	Kab. Magelang	-1,68	11,27	4,27	69,87
4	Kab. Temanggung	-2,13	9,96	3,85	69,57
5	Kota Magelang	-2,45	7,58	8,59	79,99
Rata-Rata WP		**-1,92**	**11,59**	**5,22**	**72,07**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Wilayah Purwomanggung yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi timur tidak akan terlepas dari pembangunan Bandara *Yogyakarta International Airport (YIA)* di Kulon Progo. WP ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur. Oleh karen itu, untuk mendukung pengembangan kewilayahan baik dari sisi sosial, ekonomi dan kewilayahan maka Perkotaan Purworejo akan didorong statusnya yang semula Pusat Kegiatan Lokal menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP ini adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan. Arah kebijakan WP Purwomanggung adalah

"Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan". Arah kebijakan pengembangan WP Purwomanggung dapat digambarkan sebagai berikut.

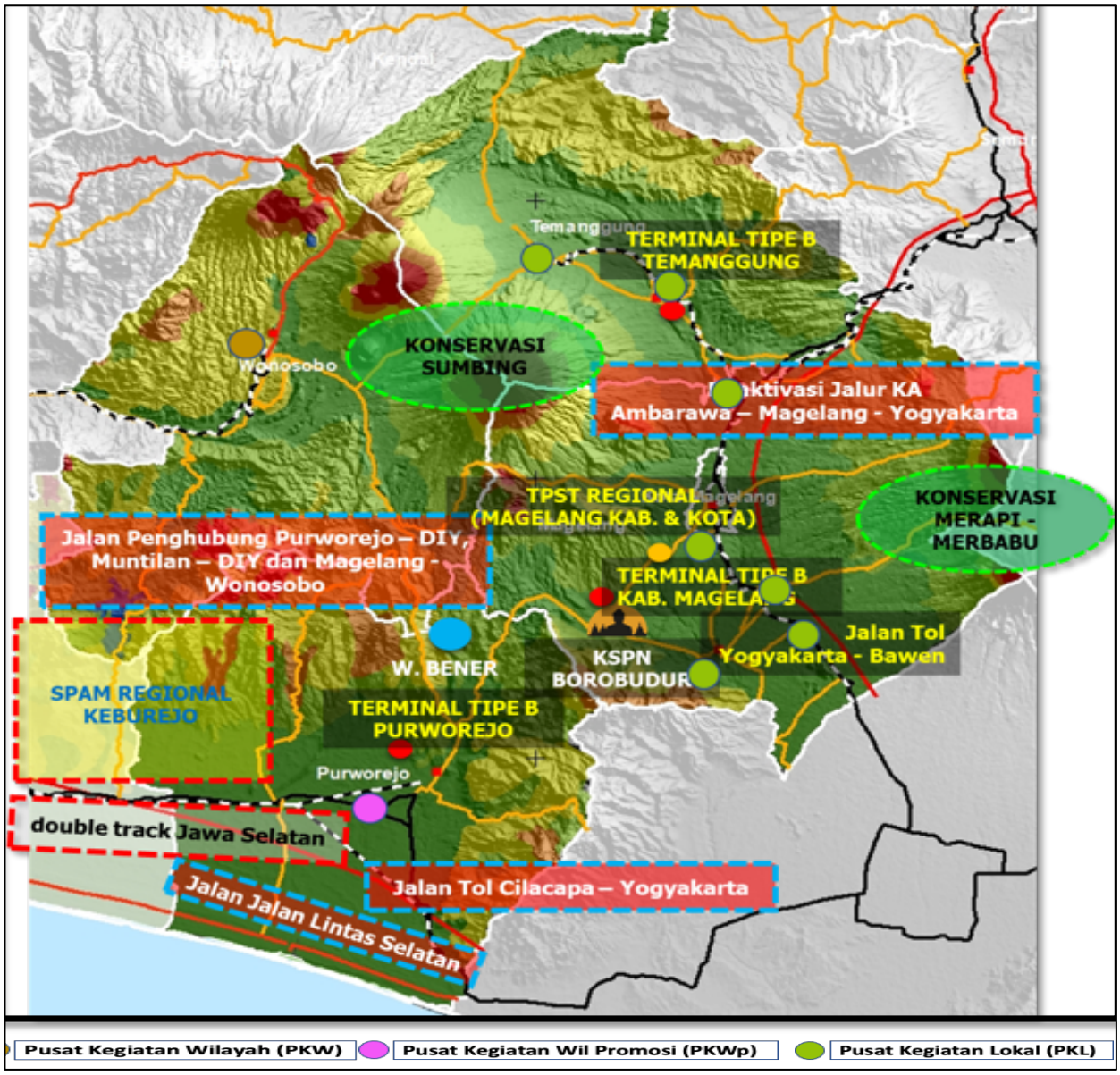

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 5. 14
Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung

Pengembangan wilayah Purwomanggung untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 8
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Purwomanggung Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Purworejo	3,96-5,24	11,42-11,33	3,72-3,67	73,36
2	Kab. Wonosobo	4,08-5,39	16,60-16,48	4,94-4,87	69,25
3	Kab. Magelang	3,85-5,09	10,77-10,71	3,93-3,87	70,90
4	Kab. Temanggung	3,67-4,85	9,53-9,46	3,54-3,49	70,14
5	Kota Magelang	3,95-5,23	8,04-7,99	7,90-7,79	79,47
Rata-Rata WP		**3,90-5,16**	**11,27-11,19**	**4,81-4,74**	**72,62**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas akan dilakukan reaktivasi jalur rel KA Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan/BRT (koridor Purworejo -Magelang); pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Purworejo; peningkatan aksesibilitas Borobudur dan Dieng; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Purworejo - Perbatasan DIY (Purworejo - Sibolong), peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Magelang - Wonosobo (pendukung akses NYIA), dan peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Magelang - Perbatasan DIY (Muntilan - Klangon); fasilitasi pembangunan jalan tol Bawen - Yogyakarta dan Cilacap - Yogyakarta.

Guna pemenuhan kebutuhan air, maka dilakukan fasilitasi pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen dan Purworejo), dan fasilitasi pembangunan Bendungan Bener. Sedangkan untuk kelestarian lingkungan maka akan dilakukan tahapan persiapan dan perijinan TPST Regional Magelang, konservasi utamanya pada Wilayah Dieng, Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, dan kawasan hulu lainnya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengembangan ekonomi yang meliputi pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 terdapat 35 program/kegiatan di WP Purwomanggung. Rencana program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) program/kegiatan; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) program/kegiatan. Mayoritas program/kegiatan di WP Purwomanggung adalah sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Untuk mendukung pengembangan WP Purwomanggung, program/ kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Peningkatan dan penanganan jalan pendukung akses KSPN Borobudur (melalui DAK dan PHJD) dan peningkatan jalan provinsi penghubung Wonosobo-Purworejo;
b. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Keburejo (Kebumen dan Purworejo) di KabupatenPurworejo;
c. Pembangunan MAJT di KabupatenMagelang;
d. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada Kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Stasiun Kutoarjo Purworejo – Borobudur Kabupaten Magelang dalam rangka untuk mengoptimalisasi potensi adanya Bandara Yogyakarta (YIA) di Kulonprogo dan pengembangan Kawasan Borobudur;
e. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui pembangunan terminal tipe B Kutoarjo Tahap II (pendukung peningkatan PKL ke PKWp dan simpul integrasi antar moda kereta api, AKDP, Trans Jateng, dan angkutan lanjutan dari YIA);
f. Tahapan persiapan dan perizinan TPST Regional Magelang;
g. Fasilitasi pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara untuk mendukung pengembangan infrastruktur daerah dan perekonomian wilayah.

B. WP Subosukawonosraten

WP Subosukawonosraten sebagai WP pendukung *quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kondisi makro pembangunan wilayah Subosukawonosraten saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 9
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Boyolali	-1,24	10,18	4,27	74,25
2	Kab. Sukoharjo	-1,70	7,68	6,93	76,98
3	Kab. Karanganyar	-1,87	10,28	5,96	75,86
4	Kab. Wonogiri	-1,41	10,86	4,27	70,25
5	Kab. Sragen	-1,81	13,38	4,75	73,95
6	Kab. Klaten	-1,18	12,89	5,46	75,56
7	Kota Surakarta	-1,74	9,03	7,96	82,21
Rata-Rata WP		**-1,56**	**10,61**	**5,65**	**75,58**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Wilayah Subosukawonosraten diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ampel, Sukoharjo, Kartosuro, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Gemolong, Jaten, Delanggu, dan Tawangmangu. Sektor unggulan wilayah ini adalah pariwisata, industri dan pertanian.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah pengembangan wilayah Subosukawonosraten adalah ***"Pembangunan Wilayah Subosuka-wonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.*** Arah kebijakan pengembangan WP Subosukawonosraten dapat digambarkan sebagai berikut.

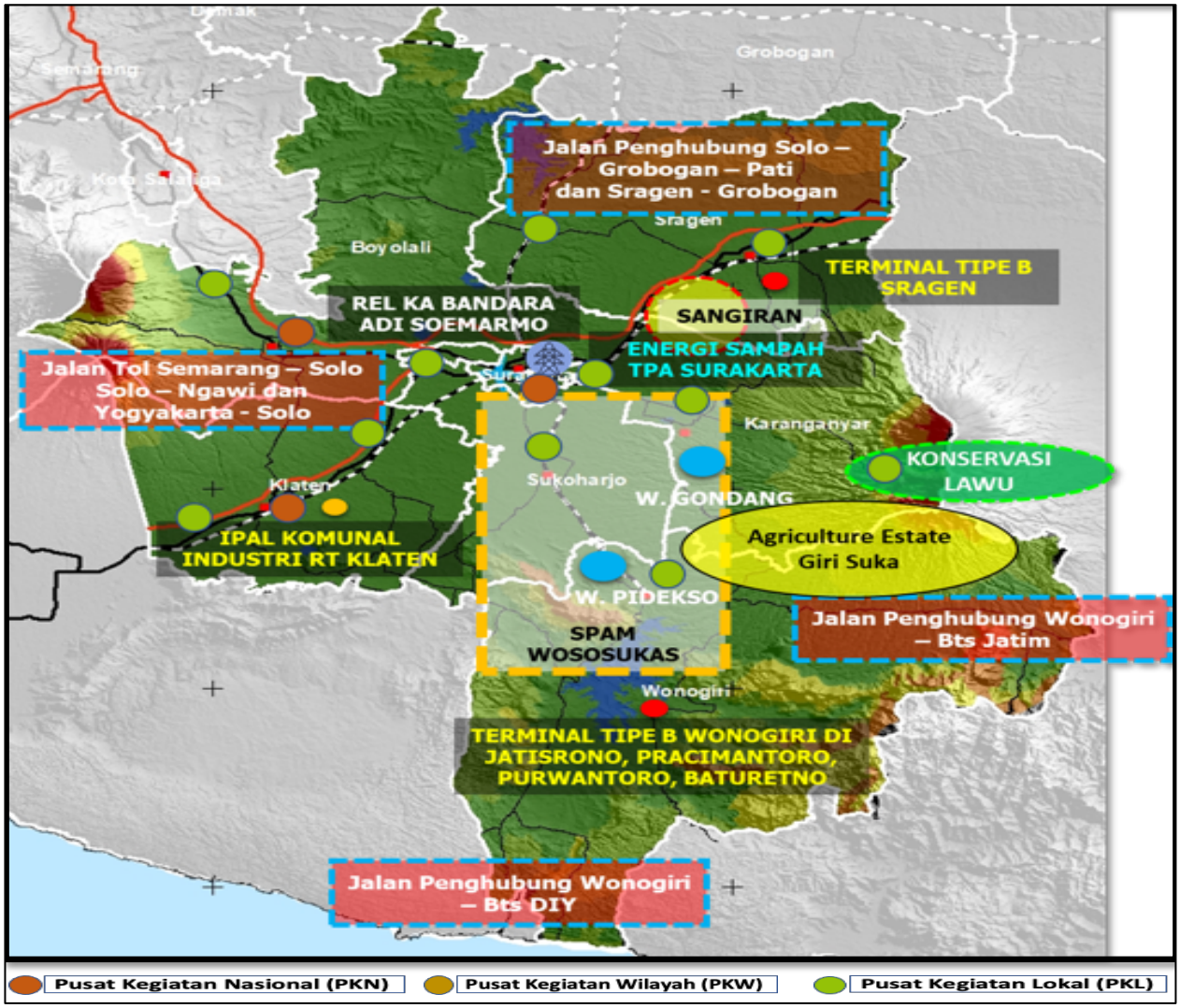

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 15
Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 10
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Boyolali	4,33-5,72	10,84-10,77	4,86-4,79	75,22
2	Kab. Sukoharjo	4,30-5,69	8,20-8,13	6,37-6,29	77,81
3	Kab. Karanganyar	4,31-5,70	10,51-10,42	5,48-5,41	76,72
4	Kab. Wonogiri	3,73-4,94	10,53-10,43	3,93-3,87	70,85
5	Kab. Sragen	4,29-5,67	12,90-12,83	4,37-4,31	74,72
6	Kab. Klaten	4,05-5,36	12,46-12,37	5,02-4,95	76,08
7	Kota Surakarta	4,20-5,56	9,25-9,17	7,28-7,19	82,79
Rata-Rata WP		**4,17-5,52**	**10,67-10,59**	**5,38-5,26**	**76,31**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Pembangunan pengembangan pariwisata menjadi arah pembangunan utama kawasan pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya (Keraton Solo, Sangiran, Tawangmangu Candi Cetho – Sukuh, dan lain-lain). Kabupaten/ kota lainnya diarahkan untuk mengembangkan pariwisata alam, dengan memperbaiki aksesibilitas, prasarana dan sarana pendukung pariwisatanya.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan perlu dilakukan peningkatan konektifitas di Solo Raya yaitu pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan (2 koridor), dan revitalisasi Terminal Tipe B Pilangsari Kabupaten Sragen, Penggung (Kabupaten Boyolali), Pracimantoro (Kabupaten Wonogiri), Sukoharjo (kabupaten sukoharjo); peningkatan pelayanan (peningkatan frekuensi) kereta api regional Solo – Semarang; fasilitasi pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali; fasilitasi penyelesaian jalan tol Semarang – Solo, fasilitasi penyelesaian jalan tol Solo – Kertosono, fasilitasi pembangunan jalan tol Solo – Yogya, peningkatan jalan provinsi penghubung Surakarta - Grobogan – Pati, peningkatan jalan provinsi penghubung Wonogiri - Perbatasan Jatim, dan peningkatan jalan provinsi penghubung Wonogiri - Perbatasan DIY; fasilitasi pembangunan *Dry Port* Sragen; fasilitasi pengembangan infrastruktur transportasi pendukung pariwisata di Wilayah Subosukawonosraten, dan fasilitasi pengembangan destinasi.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku maka akan dilakukan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku, fasilitasi pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan Kota Surakarta), dan fasilitasi pembangunan Waduk Gondang dan Waduk Pidekso.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan dilakukan penanganan lahan kritis Merapi dan Lawu, penanganan pencemaran di anak Sungai Bengawan Solo dan industri kecil, serta konservasi CAT Karanganyar-Boyolali. Selain itu wilayah Subosukawonosraten juga akan dikembangkan kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar) dan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang), yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 terdapat 28 usulan program/ kegiatan di WP Subosukawonosraten. Adapun dari 28 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 25 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan; dan (3) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Subosukawonosraten adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Untuk mendukung pengembangan WP Subosukawonosraten program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan di antaranya meliputi:

a. Peningkatan jalan provinsi penghubung Kota Surakarta-Kabupaten Grobogan, akses menuju Bandara Ngloram dari Kabupaten Grobogan-Blora, penghubung Kabupaten Grobogan-Sragen, dan peningkatan jalan akses perbatasan Jawa Timur di Kabupaten Wonogiri;
b. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada Kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Terminal Tirtonadi – Sangiran – Terminal Sumberlawang sebagai dukungan peningkatan aksesibilitas kawasan pariwisata;
c. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui rehabilitasi terminal tipe B, Penggung Kabupaten Boyolali;
d. Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang KA dengan Jalan di Ruas Jalan Provinsi melalui pengadaan dan pemasangan Early Warning System (EWS) di Kabupaten Sukoharjo dan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang di Kabupaten Sragen;
e. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kabupaten Wonogiri untuk mendukung aksesibilitas menuju jalan tol;
f. Fasilitasi kegiatan pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo Kabupaten Sukoharjo, Sungai Dengkeng Kabupaten Klaten, dan Sungai Pepe Kota Surakarta;
g. Fasilitasi pembangunan jaringan Daerah Irigasi Pidekso Kabupaten Wonogiri sebagai dukungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekitar.

5.2.1.3. Integrasi WP dalam *Quickwin* Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri (KI) Batang

A. WP Bregasmalang

WP Bregasmalang sebagai WP prioritas *quickwin* Kawasan Industri (KI) Brebes meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Kondisi makro pembangunan wilayah Bregasmalang saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 11
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Brebes	-0,59	17,03	9,83	66,11
2	Kab. Tegal	-1,46	8,14	9,82	68,39
3	Kab. Pemalang	-0,66	16,02	7,64	66,32
4	Kota Tegal	-2,25	7,80	8,40	75,07
Rata-Rata WP		**-1,24**	**12,25**	**8,92**	**68,97**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Wilayah Bregasmalang diarahkan sebagai PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. PKW meliputi Kota Tegal, dan PKL meliputi Comal, Pemalang, Slawi – Adiwerna, Ketanggungan – Kersana, Bumiayu, Brebes, dan Losari. Selanjutnya Kota Tegal diusulkan sebagai PKN Promosi. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes – Tegal – Adiwerna - Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan - Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Bregasmalang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Bregasmalang adalah ***"Pengembangan Wilayah Bregasmalang berbasis Agrominapolitan dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan".*** Arah kebijakan pengembangan WP Bregasmalang dapat digambarkan sebagai berikut.

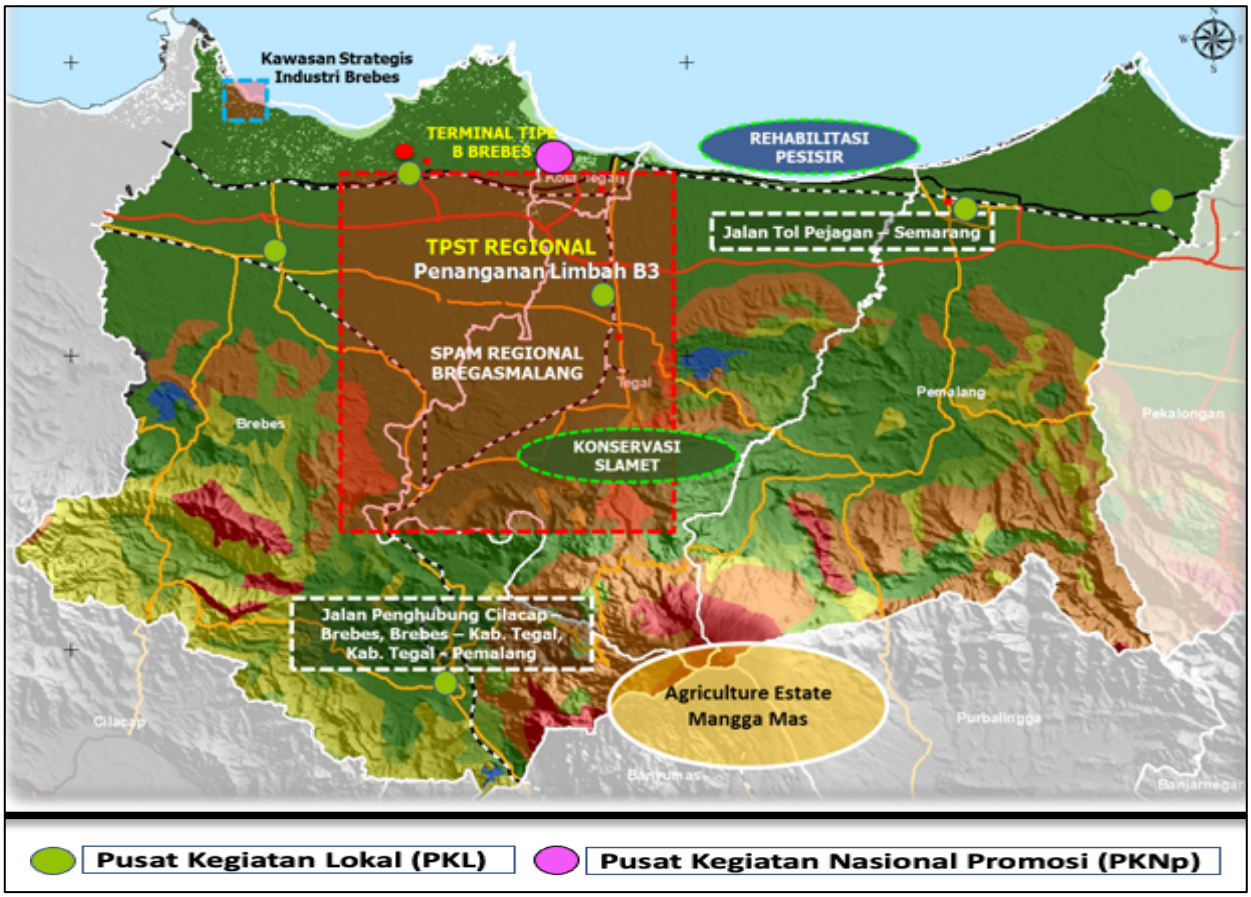

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 16
Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang

Pengembangan wilayah Bregasmalang untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 12
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Brebes	4,25-5,63	16,14-16,03	9,04-8,92	66,90
2	Kab. Tegal	4,05-5,36	7,79-7,71	9,03-8,91	68,83
3	Kab. Pemalang	4,21-5,57	15,35-15,28	7,03-6,93	66,85
4	Kota Tegal	4,19-5,54	7,44-7,39	7,73-7,62	75,68
Rata-Rata WP		**4,18-5,53**	**11,68-11,60**	**8,21-8,10**	**69,57**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Pembangunan pengembangan dilakukan dalam upaya meningkatkan pemerataan wilayah barat Jawa Tengah dengan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu membangun kawasan industri baru di Brebes. Selain itu Wilayah Bregasmalang juga merupakan bagian Kawasan Pariswisata Lereng

Gunung Slamet dan Kawasan Agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas), yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini. Selain itu produksi perikanan tangkap juga ditingkatkan, didukung dengan pembangunan sarana prasarana pendukungnya, terutama di wilayah pantura. Sedangkan bagian selatan wilayah ini, diarahkan untuk pengembangan pariwisata alam, serta memperkuat pembangunan wilayah berbasis pertanian, yaitu di Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Brebes bagian selatan.

Untuk itu maka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas diarahkan untuk pengembangan infrastruktur meliputi fasilitasi pembangunan jalan tol Pejagan – Semarang; peningkatan konektivitas wilayah Bregasmalang; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Brebes - Kabupaten Cilacap (Salem - Bandungsari); peningkatan jalan provinsi penghubung Brebes - Kabupaten Tegal; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang, dan revitalisasi Terminal Tipe B Tanjung, Kabupaten Brebes.

Peningkatan SPAM Regional Bregas (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan Industri dan agropolitan. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan antara adalah konservasi CAT Pekalongan - Pemalang, penanganan lahan kritis (Tegal, perbatasan Brebes -Kuningan, Pemalang); rehabilitasi pesisir melalui konservasi mangrove di Kabupaten Pemalang.

Dalam Perpres No. 79 tahun 2019 telah disepakati 50 usulan program/kegiatan di WP Bregasmalang. Adapun dari 50 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 40 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 4 (empat) usulan program/kegiatan; dan (3) BUMN terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan; (4) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan; dan (5) Swasta terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Bregasmalang adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Untuk mendukung pengembangan WP Bregasmalang program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Pembangunan jalan pasca bencana di Kabupaten Brebes;
b. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Bregas (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) di Kabupaten Tegal;
c. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan Jatibarang (Bts. Tegal) - Ketanggungan, dan Bantarsari-Kersana-Ketanggungan;
d. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan dermaga sungai di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes;

e. Fasilitasi kegiatan rehabilitasi sungai pengendalian banjir Sungai Pemali, Sungai Gangsa, Sungai Cisanggarung, Sungai Tanjung, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan, dan Sungai Kluwut di Kabupaten Brebes;
f. Fasilitasi pembangunan Bendung Karet Sungai Pemali, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan, dan Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes untuk peningkatan penyediaan air baku;
g. Pengendalian banjir pada sungai kewenangan provinsi melalui normalisasi, pemeliharaan, dan perkuatan tebing;
h. Fasilitasi pembangunan pipa gas transmisi Cirebon-Brebes-Semarang, dan pembangunan kawasan energi terpadu Kabupaten Pemalang untuk mendukung pengembangan infrastruktur daerah dan perekonomian wilayah;
i. Fasilitasi pembangunan gardu induk Ketanggungan Kabupaten Brebes guna mentransformasikan tegangan dari pembangkitan.

B. WP Barlingmascakeb

WP Barlingmascakeb sebagai WP Pendukung *Quickwin* Kawasan Industri (KI) Brebes meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Kondisi makro pembangunan wilayah Barlingmascakeb saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 13
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Banjarnegara	-1,32	15,64	5,86	67,45
2	Kab. Purbalingga	-1,23	15,90	6,10	68,97
3	Kab. Banyumas	-1,65	13,26	6,00	71,98
4	Kab. Cilacap	-10,36	11,46	9,10	69,95
5	Kab. Kebumen	-1,46	17,59	6,07	69,81
Rata-Rata WP		**-3,20**	**14,77**	**6,63**	**69,63**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Wilayah Barlingmascakeb diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. PKN meliputi Kota Cilacap dan sekitarnya; Sedangkan PKW meliputi Purwokerto dan Kebumen, serta PKL meliputi Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Sumpiuh, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar – Kebumen, dan Prembun. Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, PKL Purbalingga didorong menjadi Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW). Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan.

Arah kebijakan WP Barlingmascakeb adalah ***"Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agrominapolitan dan Pariwisata Terpadu yang Didukung Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"***. Arah kebijakan pengembangan WP Barlingmascakeb dapat digambarkan sebagai berikut.

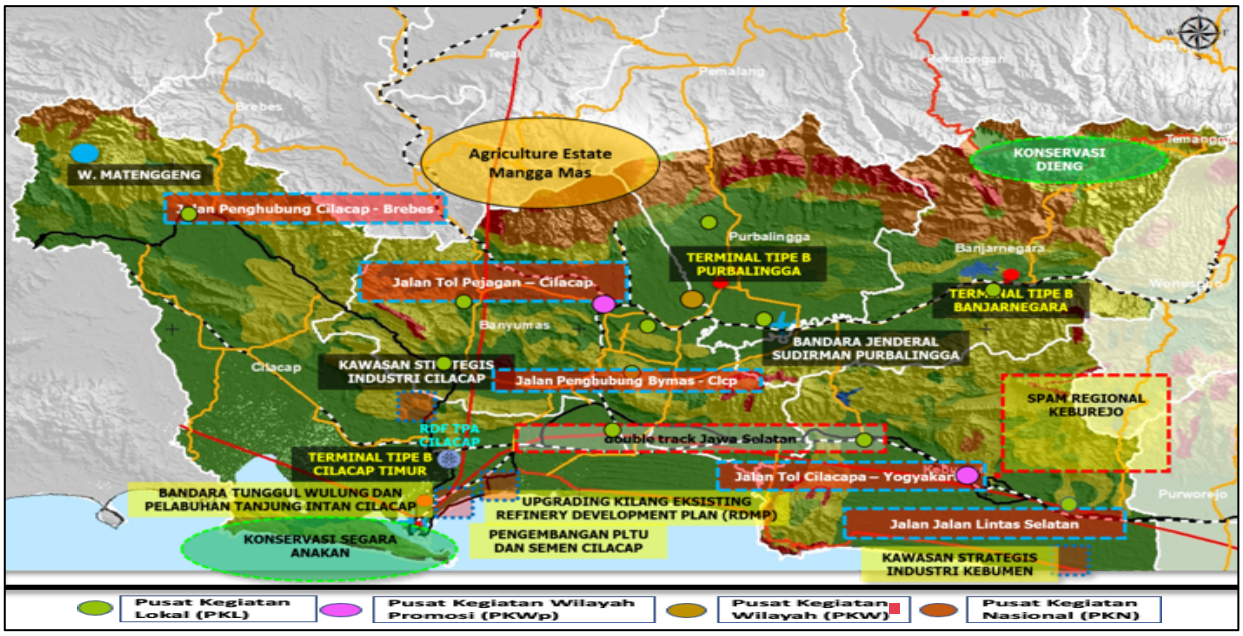

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 17
Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb

Pengembangan wilayah Barlingmascakeb untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 14
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Banjarnegara	4,07-5,38	14,71-14,64	5,39-5,32	68,23
2	Kab. Purbalingga	4,10-5,43	15,20-15,04	5,61-5,54	69,91
3	Kab. Banyumas	4,59-6,08	12,98-12,88	5,52-5,44	72,50
4	Kab. Cilacap	1,69-2,24	8,15-8,00	8,37-8,26	70,67
5	Kab. Kebumen	4,05-5,36	16,74-16,64	5,58-5,51	70,57
Rata-Rata WP		**3,70-4,90**	**13,56-13,44**	**6,09-6,01**	**70,38**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi fasilitasi pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); fasilitasi pembangunan jalan tol Pejagan – Cilacap dan Cilacap – Yogyakarta; fasilitasi pengembangan Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan Tunggul Wulung beserta aksesibilitasnya; fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Banyumas - Cilacap, peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Cilacap - Brebes, peningkatan jalan provinsi di Kabupaten Cilacap (Perbatasan Jawa Barat), dan pembangunan Banjar Kebuka (Banjarnegara - Kebumen); pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan (Koridor Purwokerto - Purbalingga); serta pembangunan Terminal Tipe B di Cilacap Timur.

Guna pemenuhan kebutuhan air baku maka dilakukan fasilitasi pembangunan Bendungan Matenggeng. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan diantaranya konservasi Segara Anakan, DAS Citanduy, Dieng, Gunung Slamet, dan CAT Kebumen - Purworejo; penanganan kerusakan pesisir; *Geopark* Karangsambung, *Geopark* Dieng (Banjarnegara); dan pembangunan *Waste to Energy*/*Refused Derived Fuel* (RDF) Cilacap.

WP ini direncanakan pengembangan kegiatan perekonomian utamanya adalah fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen; *upgrading RDMP*; industri semen; pariwisata koridor Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya; serta pengembangan kawasan agropolitan Mangga Mas.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019, telah disepakati 32 usulan program/kegiatan di WP Barlingmascakeb. Adapun dari 32 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 25 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 3 (tiga) usulan program/ kegiatan; (3) BUMN terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan; dan (4) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Barlingmascakeb adalah sektor jalan/jembatan dan transportasi.

Untuk mendukung pengembangan WP Barlingmascakeb program/ kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Peningkatan jalan provinsi penghubung Purbalinga-Pemalang, dan jalan provinsi di Kabupaten Cilacap pendukung akses perbatasan dengan Jawa Barat;
b. Penyediaan layanan angkutan umum massal berbasis jalan pada Kawasan aglomerasi perkotaan melalui lanjutan operasional Trans Jateng koridor Terminal Bulupitu Kabupaten Banyumas – Terminal Bukateja Kabupaten Purbalingga;

c. Fasilitasi peningkatan penyediaan air baku melalui pembangunan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas;
d. Pembangunan pertamina RDMP RU IV Kabupaten Cilacap.

C. WP Petanglong

WP Petanglong WP pendukung *quickwin* Kawasan Industri (KI) Brebes meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 15
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)*)	TPT (%)**)	IPM
1	Kab. Pekalongan	-1,89	10,19	6,97	69,63
2	Kab. Batang	-1,29	9,13	6,92	68,65
3	Kota Pekalongan	-1,87	7,17	7,02	74,98
Rata-Rata WP		**-1,68**	**8,83**	**6,97**	**71,09**

Keterangan:
**) Angka kemiskinan per Maret 2020*
***) TPT per Agustus 2020*

Wilayah Petanglong diarahkan sebagai PKW meliputi Kota Pekalongan, dan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Limpung, Batang, Kajen, Kedungwuni, dan Wiradesa. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan PKL.

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah ***"Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan"***. Arah kebijakan pengembangan WP Petanglong dapat digambarkan sebagai berikut.

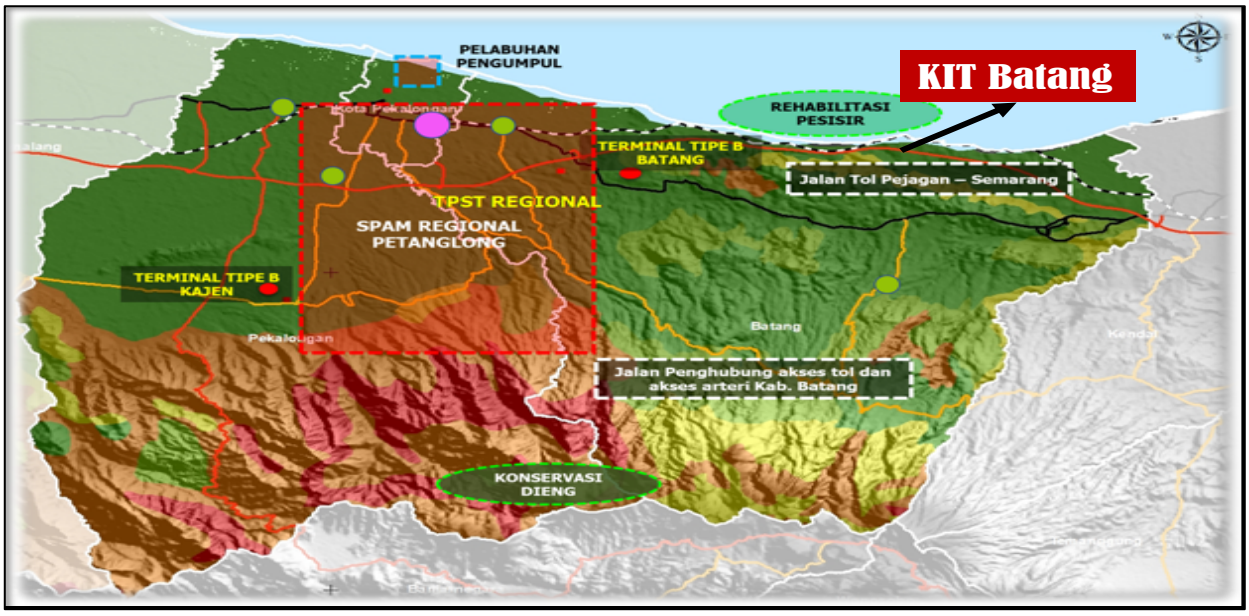

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 5. 18
Arah Pengembangan Wilayah Petanglong

Pengembangan wilayah Petanglong untuk tahun 2022 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 16
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Pekalongan	3,89-5,15	10,16-10,05	6,41-6,32	70,26
2	Kab. Batang	3,91-5,18	8,90-8,80	6,36-5,28	69,66
3	Kota Pekalongan	3,99-5,28	7,04-6,99	6,46-6,37	75,57
Rata-Rata WP		**3,93-5,21**	**8,70-8,61**	**6,41-6,32**	**71,83**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 (hasil analisis)

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain pemantapan konektivitas dan aksesibilitas akan dilakukan pengembangan infrastruktur meliputi revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih, Kabupaten Batang dan Kajen, Kabupaten Pekalongan; peningkatan jalan provinsi akses menuju jalan tol di Kabupaten Pekalongan, dan peningkatan jalan provinsi akses menuju jalan arteri pantura di Kabupaten Batang.

Guna pemenuhan kebutuhan air baku maka akan dilakukan pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan). Selain itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan diantaranya utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang), serta konservasi CAT Pekalongan – Pemalang; dan penanganan kerusakan pesisir melalui konservasi mangrove di Kabupaten Pekalongan.

Dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di WP Petanglong. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan. Mayoritas usulan program/kegiatan di WP Petanglong adalah sektor sumber daya air dan jalan/jembatan.

Di wilayah Petanglong sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 dibangun Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi di wilayah Batang dan sekitarnya. Kawasan Industri Terpadu Batang (*the smart and sustainable Industrial Estate*) terletak di Koridor Industri Utara Jawa Tengah seluas 4.300 ha. KIT Batang terbagi dalam 3 klaster kawasan dengan rincian klaster 1 (3.100 ha), klaster 2 (800 ha), dan klaster 3 (400 ha). Peruntukkan pengembangan di klaster 1 adalah untuk pengembangan *industrial estate* dan *industrial township*, klaster 2 adalah untuk pengembangan pusat inovasi dan *township*, dan klaster 3 adalah untuk pengembangan pusat rekreasi dan *township*.

Untuk mendukung pengembangan WP Petanglong program/kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan diantaranya meliputi:

a. Peningkatan jalan provinsi penghubung Pantura-Pansela, dan akses Tol Trans Jawa di Kabupaten Pekalongan;
b. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui peningkatan terminal tipe B Banyuputih Kabupaten Batang (rehabilitasi gedung utama);
c. Studi Alokasi Air WS Pemali Comal dan WS Bodri Kuto; Kajian dan DED Waduk yang mendukung pengembangan KIT Batang;
d. Fasilitasi pengendalian banjir pada sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan, sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, pengendalian banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan;
e. Pembangunan bangunan pengaman pantai di pesisir utara Jawa Tengah;
f. Fasilitasi pengembangan infrastruktur penyediaan LNG/gas berkelanjutan Jawa Tengah, Kabupaten Batang untuk mendukung pengembangan KIT Batang.

5.2.2. Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi.

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik seringkali terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai *etalase* gambaran daerah/ wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI.Yogyakarta. Ada 5 (lima) konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumber daya untuk menserasikan pembangunan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/ potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan;
5. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2022

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya *shock* pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2022 pendapatan daerah diproyeksikan akan mulai pulih dan mengalami peningkatan. Pendapatan daerah tahun 2022 diupayakan tercapai melalui:

a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi Sistem (eSAMSAT) dan penambahan titik-titik pelayanan;
c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
g. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
h. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
i. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
j. Menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan upaya-upaya peningkatan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Kerangka pendanaan Tahun 2022 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1.

Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

URAIAN			JUMLAH (Rp)
(1)			(2)
PENDAPATAN DAERAH			**23.976.717.471.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH			**16.089.479.700.000**
1	Pajak Daerah		13.746.038.540.000
2	Retribusi Daerah		116.972.412.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		547.584.985.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.678.883.763.000
PENDAPATAN TRANSFER			**7.863.585.771.000**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		7.863.585.771.000
	a	Dana Perimbangan	7.833.747.099.000
	b	Dana Insentif Daerah	29.838.672.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			**23.652.000.000**
1	Pendapatan Hibah		23.652.000.000
BELANJA DAERAH			**24.262.846.248.000**
BELANJA OPERASI			**13.786.487.199.000**
1	Belanja Pegawai		6.404.304.219.000
2	Belanja Barang dan Jasa		5.304.565.693.000
3	Belanja Subsidi		0
4	Belanja Hibah		1.986.701.487.000
5	Belanja Bantuan Sosial		90.915.800.000
BELANJA MODAL			**1.750.192.856.000**
BELANJA TAK TERDUGA			**21.000.000.000**
BELANJA TRANSFER			**8.705.166.193.000**
1	Belanja Bagi Hasil		6.123.519.693.000
2	Belanja Bantuan Keuangan		2.581.646.500.000
JUMLAH BELANJA			**24.262.846.248.000**
SURPLUS/DEFISIT			**(286.128.777.000)**
PEMBIAYAAN			**286.128.777.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			**1.177.128.777.000**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		703.128.777.000
2	Penerimaan kembali investasi non permanen kepada BUMD		474.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			**891.000.000.000**
1	Pembentukan dana cadangan		400.000.000.000
2	Penyertaan modal		491.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)			**0**

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2021

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2022 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung

urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggarakan Pendidikan (BOP) SMA, SMK, dan SLB negeri bagi 612.251 siswa termasuk untuk pemberian kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA, SMK, dan SLB swasta bagi 607.021 siswa, Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bagi 10.000 siswa, pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, pembinaan potensi siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA, SMK, dan SLB, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Lumbir Banyumas, tahap lanjutan SMK Pagentan Banjarnegara dan SMA Tawangmangu Karanganyar, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK SMA, SMK, SLB; persentase prasarana sarana SMA, SMK, SLB sesuai standar; persentase keikutsertaan peserta didik SMA, SMK, SLB dalam even nasional berjenjang; persentase guru SMA, SMK, SLB memenuhi kualifikasi akademik; dan persentase SMA, SMK memanfaatkan sumber belajar berbasis IT.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penyusunan dan penetapan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah dan khusus dalam bentuk dokumen pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan model pembelajaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase serapan kurikulum SMA, SMK, dan SLB.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemetaan, penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio guru SMA, SMK, SLB dengan rombongan belajar SMA, SMK, SLB.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan menengah dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan

untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan SMA, SMK yang diterbitkan, dan persentase ijin pendidikan khusus yang disetujui.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi; penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi; penerbitan izin rumah sakit Kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.

Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini yaitu persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan bayi; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan balita; persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga baik; persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/bencana <24 jam (termasuk di wilayah kerja 5 Balkesmas); persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan keswa; persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu; persentase ketersediaan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan; persentase ketersediaan obat dan vaksin; persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas (pada masing-masing 5 Balkesmas); persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM; persentase kabupaten/kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif; persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK; persentase kabupaten/kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan; dan persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (pada RSUD/RSJD).

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya; tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes provinsi; serta persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih (pada RSUD/RSJD).

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK); dan penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT). Indikator kinerja program ini yaitu persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman, serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi; pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif dan preventif tingkat daerah provinsi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; persentase kabupaten/kota yang di fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas (masing-masing wilayah pada 5 Balkesmas); persentase organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran; persentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK; dan persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (pada RSUD/RSJD).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarpras irigasi, sungai dan pantai, sarpras air baku (embung), selain itu juga kegiatan perencanaan teknis sarpras sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengelolaan irigasi dan air baku, serta pengelolaan konservasi SDA dan pengendalian banjir.

Penanganan prasarana sarana sumber daya air akibat banjir serta penanganan banjir dilaksanakan di 6 Balai PSDA. Khusus penanganan banjir wilayah Pantura pada WS Pemali Comal dan Bodri Kuto antara lain di Brebes (Sungai Pemali, Nipon, Keruh, Dandang), Pemalang (Sungai Comal), Tegal (Sungai Gung), Pekalongan (Sungai Loji, Bremi Meduri, Kupang, Sragi Lama), Kendal (Sungai Bodri, Blukar), Semarang (Anak Sungai Rawa Pening), dan Kota Semarang (Sungai Silandak), dilaksanakan melalui rehabilitasi dan pembangunan prasarana sarana sungai (perkuatan tebing dan konservasi DAS); normalisasi dan pelurusan sungai; pengamanan pantai (Kota Pekalongan); pengelolaan dan pengadaan peralatan (seperti pompa, *mobile pump* dan alat-alat berat); pengadaan bahan banjiran; serta pembangunan sumur resapan, dan biopori.

Rehabilitasi dan pembangunan prasarana sarana irigasi (Daerah Irigasi) dan prasarana sarana air baku (embung) di 6 Balai PSDA dengan didukung penyediaan peralatan dan sumber daya manusia (SDM) untuk operasi dan pemeliharaannya (OP), serta dukungan fasilitasi pembangunan bendungan utamanya di Bendungan Randugunting, Jragung, Dolok, Bener, Kedunglanggar, Karanganyar (Pemalang), Ngemplak, Pasedan, Matenggeng, Bantarkawung, Malahayu, Jatinegara dan Bodri.

Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi; persentase pemenuhan kebutuhan air baku; persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; persentase prasarana dan sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; persentase luasan daerah bebas genangan banjir; persentase sungai dalam kondisi baik; persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA; serta persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA; dan peningkatan persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi SPAM Regional Wosusokas dan Petanglong, pembangunan SPAM Regional Bregas dan Keburejo, serta inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akses layak air minum perdesaan; persentase akses layak air minum perkotaan; dan persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat,

dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase akses sanitasi air limbah domestik.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah diantaranya pembangunan gedung utamanya untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dan Pusat Kreatif Borobudur Kabupaten Magelang; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar.

e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang diperiksa keandalannya.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar 7 (tujuh) meter dengan MST 8 ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada ruas-ruas strategis penghubung pantura-pansela (di antaranya ruas Pemalang-Randudongkal, Bobotsari-Belik), akses perbatasan antar provinsi (di antaranya Sidareja-Cukangleuleus), akses *inlet-outlet* tol (di antaranya ruas Wiradesa-Kalibening), akses kawasan industri (di antaranya ruas Buntu-Kroya-Slarang), pembangunan jalan di antaranya Salem-Bandungsari pasca bencana, pembangunan *flyover* Ganevo di Kabupaten Demak, akses pendukung pariwisata (di antaranya ruas Jepara-Keling mendukung akses Karimunjawa), serta penanganan jalan pendukung akses KSPN Borobudur dan peningkatan jalan provinsi penghubung Wonosobo-Purworejo melalui DAK dan PHJD.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemeliharaan rutin, dan pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir, untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase panjang jalan provinsi sesuai standar kolektor baik (pada bidang); persentase jalan provinsi kondisi permukaan baik (pada balai); dan persentase panjang jembatan kondisi baik (pada balai).

Untuk mendukung perencanaan dan pengawasan penanganan jalan provinsi dilakukan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem

pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; pembangunan *flyover*, penggantian jembatan, dan penanggulangan bencana/tanggap darurat, serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase perencanaan, pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan.

Indikator kinerja lainnya di program ini yang juga harus dicapai yaitu persentase panjang jalan yang dileger; persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan; persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan; dan persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi; dan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tata ruang provinsi, pembinaan penyusunan/reviu rencana tata ruang kabupaten/kota, pengendalian pemanfaatan ruang, dan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase dokumen/arahan pengembangan kewilayahan yang disusun; persentase dokumen RTR kabupaten/kota yang dievaluasi; persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang; persentase pelaksanaan pengendalian pemanfataan ruang; serta persentase pengawasan ruang di masing-masing 6 (enam) balai PSDA.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi pembangunan rumah susun bagi

pekerja. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, dan persentase rumah layak huni yang disediakan.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program. Indikator kinerja program ini adalah persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penindakan pelanggar produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan pelanggar perda, pemberdayaan PPNS, serta sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal; pemeliharaan tramtibum, pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan konsolidasi penanganan tramtibum; pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibumtranmas, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib, dan peningkatan kapasitas SDM satpol PP; peningkatan keterampilan satlinmas, peningkatan kapasitas kelembagaan satlinmas, dan orientasi satlinmas dalam pengamanan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah, persentase pemeliharaan tramtibum lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah, persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas; persentase anggota Satpol PP kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya, serta persentase anggota linmas kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penurunan risiko bencana, persentase penanganan darurat kebencanaan, persentase rehab rekon pasca bencana, dan persentase pemenuhan logistik bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal guna untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis dalam panti, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dalam panti, serta rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza dalam panti. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (pada bidang dan seluruh panti).

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, pengangkatan anak antar WNI, dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan; persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan; dan persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi guna untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan taman makan pahlawan nasional provinsi guna mencapai indikator persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja. Indikator kinerja program ini adalah persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja yang dilakukan pembinaan.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi; persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi; persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas; persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian; persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota, perlindungan PMI baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu indikator persentase peningkatan

pencari kerja yang ditempatkan di sektor formal; persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektorak kabupaten/kota (UMSK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah; persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk; persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, serta pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3, dan persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai yaitu rasio korban kekerasan terhadap perempuan, dan persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanaan pendataan kekerasan perempuan secara berjenjang.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender; dan persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan OPD provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota menuju layak anak minimal tingkat pratama, dan persentase keterisian indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio korban kekerasan terhadap anak, dan persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjenjang.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya melalui penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal, informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, dan pengembangan kelembagaan jaringan distribusi pangan, selain itu untuk kegiatan pengelolaan keseimbangan cadangan pangan provinsi dan promosi

pencapaian target konsumsi pangan melalui pengelolaan cadangan pangan provinsi, promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas; CV harga pangan strategis (beras); rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan; dan angka konsumsi beras.

b. Program Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan melalui fasilitasi desa mandiri pangan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase penurunan desa rawan pangan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar melalui rekomendasi, registrasi, penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan; dan persentase peningkatan rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi, dan untuk dukungan percepatan Program Strategis Nasional (PSN), dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Indikator kinerja program ini yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absebte

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, serta untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah. Indikator kinerja program ini yaitu persentase pelaksanaan reforma agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen review Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi validasi KLHS RTRW/RDTR/RPJMD kabupaten/kota, penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penyusunan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), serta fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait pelestarian lingkungan hidup. Indikator kinerja program yaitu persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas air dan udara melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada anak sungai Bengawan Solo, dan Rawa Pening dengan upaya fasilitasi pembangunan IPAL industri kecil, pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara, pendampingan Aksi Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim dan Registri Kampung Iklim, serta penyusunan dokumen tingkat Emisi dan serapan tahunan Provinsi Jawa Tengah. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja program yaitu persentase sungai yang meningkat kualitasnya; persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara (pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup), persentase pengujian kualitas air; persentase pemantauan kualitas udara ambien (pada Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi melalui pengembangan ruang terbuka hijau/RTH dengan fasilitasi bibit dan penanaman RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani (pada Bidang Pengelolaan Sampah, limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan pada Balai Kebun Raya Baturaden).

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin PPLH yang diterbitkan, serta penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi lingkungan hidup (pada bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup), dan persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan melalui kampanye penyuluhan lingkungan hidup, pelatihan tematik bagi masyarakat dan SDM lingkungan hidup, serta peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui penilaian sekolah peduli lingkungan/gerakan peduli lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota yang jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya; (pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup); persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya (pada Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup); dan persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan).

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), dengan indikator kinerja yaitu persentase pengaduan yang ditangani (pada Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan).

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan sampah di TPST regional Magelang berupa tahapan persiapan dan perijinan TPST Regional Magelang, dengan indikator kinerja yaitu persentase sampah yang dikelola.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan skala provinsi untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota yang seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota yang kepemilikan dokumen akte kelahiran di atas 95%.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat. Indikator kinerja program ini adalah persentase desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kerjasama antar desa dan pembangunan kawasan perdesaan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pengembangan kawasan perdesaan.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi pembinaan pengelolaan aset dan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan desa; persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya; persentase rekomendasi gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum; dan persentase desa dengan Sistem Informasi Desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kesmasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta lembaga ekonomi masyarakat di desa. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya, dan persentase desa yang memiliki BUMDesa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan pemetaan perkitaan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase pemerintah daerah yang menyusun GDPK (*Grand Desain* Pembangunan Kependudukan) 5 bidang, dan persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal; dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan *unmetneed* KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan; persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan; dan persentase keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan operasionalisasi 6 (enam) koridor lanjutan (Kota Semarang - Kabupaten Semarang, Kota Semarang - Kabupaten Kendal, Kota Semarang - Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas – Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo – Kabupaten Magelang, Kota Surakarta - Kabupaten Sragen), kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap II di Kabupaten Purworejo, peningkatan Terminal Banyuputih Batang (Rehabilitasi Gedung Utama), rehabilitasi Terminal Penggung Boyolali dan Terminal Gagakrimang Blora, peningkatan peran Forum LLAJ dalam proses finalisasi dan legalisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan terutama pada ruas jalan alternatif sejajar pantura dan kawasan strategis lainnya (akses menuju tol dari arah Wonogiri) utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan provinsi.

Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi; persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis; persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan; persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; persentase rehabilitasi daerah rawan kecelakaan (pada semua balai); persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (pada semua balai); persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM; persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi *Passing Grade* pemahaman keselamatan jalan; dan persentase fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pengadaan dan pemasangan lampu penerangan pada dermaga Sungai lintas Kabupaten Tegal-Brebes, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat

barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan; kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebe-rangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa penyediaan layanan KMC Kartini I Lintas Semarang – Karimunjawa (proses *scrapping*).

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang; persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin; dan persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api di Sukoharjo dan Sragen, serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretapian di Jawa Tengah, utamanya pada lintas Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang kereta api.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan utama seperti publikasi data dan informasi oleh badan publik, koordinasi komunitas masyarakat kehumasan, penyebarluasan konten, penyusunan rekomendasi analisis berita dan pendapat umum, dan penyelesaian sengketa informasi. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu nilai survei kepuasan komunikasi publik, dan persentase badan publik yang terbuka.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan utama seperti penyediaan jaringan FO, pembangunan *data center*, penyediaan kapasitas *bandwidth*, peningkatan infrastruktur TIK di PD yang terintegrasi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi berbagi pakai, peningkatan kapasitas penyelenggara *e-government,* penerbitan regulasi pengelolaan kominfo. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan persentase aplikasi yang diintegrasikan.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase jumlah koperasi aktif provinsi.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase jumlah KSP/KSPPS provinsi dengan kategori sehat.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada pendidikan dan latihan bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian juga UMKM, serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dan UMKM. Indikator kinerja program ini adalah persentase SDM KUMKM yang terampil.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha, serta peningkatan produktivitas, nilai tambah, penguatan kelembagaan. Indikator kinerja program ini yaitu persentase koperasi provinsi yang berkualitas.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pada pemangku kepentingan. Indikator kinerja program ini yaitu persentase usaha mikro menuju kecil.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah melalui fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, serta desain dan teknologi. Indikator kinerja program yang akan dicapai yaitu persentase usaha kecil menuju menengah.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan dokumen kajian perencanaan penanaman modal daerah, dan penyusunan dokumen prospektus investasi di Jawa Tengah. Indikator kinerja program ini adalah persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, fasilitasi pendampingan terhadap calon investor dalam dan luar negeri, dan fasilitasi temu usaha terhadap pelaku usaha. Program yang dilakukan ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio izin usaha terhadap kepeminatan penanaman modal, dan rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan usaha.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang penerbitan dokumennya terdigitalisasi, penyediaan layanan perizinan dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi, penyediaan layanan perizinan yang masuk pada mall pelayanan publik, gerai dan layanan keliling, penyelenggaraan klinik pemenuhan komitmen perizinan, dan pemantauan terhadap proses pengajuan penerbitan pemenuhan komitmen oleh pemohon perizinan berusaha/komitmen. Hal tersebut yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan dengan target sebesar 94%. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pelayanan fasilitasi, pelayanan informasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, penyusunan dokumen analisis pengembangan sarana dan prasarana layanan, peningkatan kompetensi aparatur melalui orientasi teknis pelayanan, penyusunan Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan, dan penerapan dokumen ISO. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian pengaduan masyarakat; persentase pemenuhan standar pelayanan; persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan terhadap proyek yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, penyusunan laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait ketentuan pelaksanaan

penanaman modal, dan pengawasan perusahaan yang ditinjau perizinannya. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase realisasi proyek penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan analisis pengembangan aplikasi, pengintegrasian sistem informasi, dan penyusunan dokumen analisis data dan informasi penanaman modal. Indikator kinerja program ini adalah persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan *stakeholder*; dan penyadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan; dan persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga prestasi tingkat nasional, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, dalam bentuk pembinaan atlet secara berjenjang; penguatan *database* keolahragaan dan penguatan kemitraan dengan *stakeholder* olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana latihan dan pertandingan, serta penyelesaian Stadion Jatidiri, guna pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan prestasi olahraga; persentase atlet PPLOP yang berprestasi; dan persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral,** yang diarahkan pada kegiatan utama seperti koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data, serta peningkatan kapasitas SDM pemda untuk peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan data sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi,** yang diarahkan pada kegiatan utama seperti penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi, analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi, pelaksanaan keamanan informasi pemerintah, dan pelayanan keamanan penetapan pola hubungan komunikasi sandi. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai adalah persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi >80.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, pengelolaan kebudayaan, dan pembinaan lembaga adat yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam provinsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ragam budaya terlayani; dan persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian melalui peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional dan pendidikan pelatihan SDM kesenian tradisional. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jenis seni tradisi terlayani.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal provinsi dalam bentuk pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi, fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal serta penyediaan data dan informasi sejarah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sumber belajar berbasis budaya.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase status cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada pengelolaan museum provinsi melalui revitalisasi, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana museum serta penyelenggaraan even museum. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu survei kepuasan pengunjung museum.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembinaan Perpustakaan** yang diarahkan pada kegiatan peningkatan

kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan provinsi; pengembangan kemitraan dan jejaring perpustakaan melalui kerjasama dalam peningkatan kualitas perpustakaan provinsi; peningkatan budaya gemar baca pada satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus serta masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan penyelenggaraan pameran/promosi perpustakaan; pengembangan dan pelestarian bahan pustaka; serta pengembangan layanan perpustakaan melalui layanan perpustakaan *online*, layanan rumah belajar modern, layanan perpustaakan keliling, layanan LTPS dan layanan mobil pintar. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan; persentase perluasan jejaring kemitraan; persentase ketersediaan bahan pustaka; persentase partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, kabupaten/kota dalam pembudayaan gemar membaca, dan persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan Arsip.** Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola arsip dan penerapan budaya tertib arsip melalui pembinaan dan pengawasan kearsipan, penguatan sistem pengelolaan dan pelestarian arsip (digitalisasi arsip), peningkatan kualitas pelayanan kearsipan melalui otomasi layanan kearsipan berbasis IT, serta publikasi dan promosi kearsipan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perangkat daerah yang tertib arsip; dan persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan; serta persentase peningkatan pengunjung arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi melalui jumlah dokumen pencadangan kawasan konservasi yang ditetapkan dan jumlah TKB yang ditenggelamkan; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usahanya dan luas tambak garam yang menerapkan teknologi per tahun (ha/tahun); serta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi melalui jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut, jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya, dan jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu yaitu persentase peningkatan produksi garam;

persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir; persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya; persentase peningkatan verifikasi perizinan unit usaha; dan persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di laut sampai dengan 12 mil melalui penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, jumlah nelayan yang terlindungi dan jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran; pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat dan jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan <10 GT; dan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi melalui jumlah pelayanan perijinan, jumlah SPB yang diterbitkan, dan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap; dan persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui Jumlah unit pembenihan yang diusulkan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (unit); dan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut melalui jumlah pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya tawar/payau/laut (kelompok) dan jumlah laboratorium yang memenuhi standar teknis (unit). Indikator kinerja yang akan dicapai program ini adalah persentase pertumbuhan produksi budidaya; persentase peningkatan produksi benih; dan persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil melalui jumlah pelaku usaha ruang laut yang memahami perundangan dan Jumlah kelompok masyarakat pengawas (kelompok) SDKP yang aktif; dan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang memahami perundangan, jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan air tawar yang memahami perundangan, dan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memahami perundangan. Indikator kinerja

program ini yaitu persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan; persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan; dan persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp.

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui umlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun (dokumen); serta pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar melalui jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan (dokumen), jumlah poklahsar yang difasilitasi pemasaran *e-commerce* (kelompok), dan jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN. Indikator kinerja program ini adalah persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan; dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi, pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, serta penetapan tanda datar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Indikator kinerja pada program ini yaitu persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP, dan persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; serta pengiatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan kota kreatif yang teruji petik. Indikator kinerja program ini adalah persentase kota kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan melalui fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif, fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Indikator kinerja yang akan dicapai dengan program ini adalah persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian melalui pengembangan padi, jagung, aneka kacang, sayuran, intensifikasi tebu, dan asuransi petani. Selain itu diarahkan untuk kegiatan penataan prasarana pertanian melalui sarana pasca panen, dan *startup* kewirausahaan. Selanjutnya pada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan melalui penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau, pembentukan korporasi, perbanyakan benih padi, kedelai bawang merah, revitalisasi kebun, sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penambahan jumlah alsintan, persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani di Jawa Tengah, persentase penyaluran pupuk subsidi; persentase peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai; persentase peningkatan produksi bawang merah, cabe, durian, melati, dan jahe; persentase peningkatan produksi kopi, tebu, kelapa; persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolah hasil; persentase layanan sertifikasi benih; persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH (wilayah Semarang, Surakarta, Banyumas) dan di Balai Benih Tanaman Perkebunan. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu bibit ternak melalui pengembangan budidaya ternak, pakan ternak, perbibitan, produksi semen beku, produksi ternak ruminansia dan nonruminansia. Selanjutnya juga diarahkan pada kegiatan peredaran obat melalui pengawasan distribusi obat hewan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu jumlah populasi ternak, persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku, persentase peningkatan produksi ternak, serta persentase peningkatan pengawasan peredaran obat hewan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui rehabilitasi jaringan irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jaringan irigasi yang baik.

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan untuk kegiatan penataan prasarana pertanian melalui fasilitasi inovasi peternakan dan pelaku pengolahan pemasaran. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit, dan hewan melalui penyakit hewan yang tertangani, jaminan mutu produk hewan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan PHMS (penyakit hewan menular strategis), dan persentase penurunan pemotongan betina produktif.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi melalui pengendalian OPT tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Selain itu diarahkan untuk kegiatan pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan melalui fasilitasi penguatan kelembagaan dan kelompok petani, serta pengembangan kemitraan usaha (kelompok). Selain itu diarahkan untuk kegiatan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan SDM penyuluhan bidang pertanian. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (bidang penyuluhan, pasca panen, dan bina usaha); dan persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (balai pelatihan pertanian).

Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diarahkan untuk kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan.

4. Kehutanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis (termasuk ekosistem mangrove dan pantai) melalui pengembangan hutan rakyat/hak, penghijauan lingkungan, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, penanganan pengaduan kerusakan hutan, penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS. Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (pada bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, dan pada CDK I-XI); persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (pada bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, dan pada CDK I-XI); serta persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani pada CDK I-XI dan BSPTH.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE), pendampingan masyarakat penyangga KEE, pengelolaan Taman Hutan Raya Mangkunegoro I, dan pengelolaan Kebun Raya Baturaden; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu persentase TSL yang ditangani (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya alam dan pada CDK I-XI); persentase kawasan konservasi yang dikelola secara efektif (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya alam pada CDK I-VI, VIII-X; dan persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (pada Balai Kebun Raya Baturraden dan pada Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro).

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)/Pengakuan Dan Perlindungan Kemitaan Kehutanan (Kulin KK)/Izin Pemanfataan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (pada bidang Penyuluhan, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, dan pada CDK I-XI).

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui perencanaan dan/atau penetapan rencana pengelolaan DAS, optimalisasi fungsi dan daya dukung DAS, pemberdayaan masyarakat dan sinkronisasi pengelolaan DAS melalui Gerakan Penanaman Pemulihan DAS dan peningkatan peran badan usaha/lembaga masyarakat. Indikator kinerja program ini yaitu persentase jumlah DAS yang tertangani, dan persentase lahan kritis dan sangat kritis yang tertangani (pada bidang pengelolaan DAS dan konservasi sumberdaya alam).

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembinaan geologi dan air tanah, utamanya untuk konservasi air tanah dan menahan laju penurunan tanah/*land subsidence* (salah satu penyebab banjir kawasan pesisir) pada wilayah Pantura (Pekalongan) melalui kegiatan pembangunan sumur resapan dangkal, sumur pantau, pemeliharaan dan pengadaan suku cadang peralatan sumur pantau, serta penyusunan Peta Zona Konservasi Air Tanah (CAT Pekalongan-Pemalang, CAT Semarang-Demak dan CAT Karanganyar-Boyolali). Selain itu program ini juga diarahkan untuk penanganan daerah rawan kekeringan dengan pembangunan sumur bor dalam. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase pengambilan air tanah (pada bidang dan 12

wilayah Cabang Dinas ESDM), serta persentase pelayanan pengujian air tanah.

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembinaan pertambangan mineral dan batubara, melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan, promosi pertambangan di Jawa Tengah, pemetaan potensi mineral di kawasan Pansela dan penetapan harga patokan mineral. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase *good mining practice* (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM), serta persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan konservasi Energi Baru Terbarukan, utamanya melalui kegiatan pembangunan demplot biogas, perpipaan gas rawa, PLTS *Rooftop* dan PLTS *Charging Station*, PLTMH, Pompa Tenaga Surya, Desa Mandiri Energi dan Hemat Energi dan Air. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi di Jawa Tengah (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM).

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, terutama diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi 15.000 rumah tangga miskin dan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (pada bidang dan 12 wilayah Cabang Dinas ESDM).

6. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) melalui post audit dan verifikasi ekspor/impor di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, fasilitasi pasar lelang

komoditas agro secara *online*, serta fasilitasi SNI pasar rakyat dan Sistem Resi Gudang. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga melalui pemantauan harga, paket sembako murah, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), dan Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP), serta kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui pengawasan pupuk bersubsidi oleh KP3 di gudang lini III dan IV di Jawa Tengah. Indikator kinerja program ini adalah persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten/kota (*price center*).

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha orientasi ekspor, *export coaching programme,* peningkatan citra produk potensi ekspor; serta peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator nilai ekspor non migas.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota, peningkatan tertib niaga, pengawasan barang beredar, pengembangan layanan sertifikasi melalui edukasi SNI/manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI), serta bimbingan dan sertifikasi SNI/manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan.

Kegiatan lain yang diarahkan dalam program ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang, dan Surakarta adalah kegiatan penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB, peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB, peningkatan kalibrasi laboratorium uji BPSMB, pembinaan dan pengembangan industri hasil tembakau sertifikat pengujian melalui fasilitasi pengujian BPSMB, serta peningkatan sarana prasarana. Indikator kinerja yang akan dicapai adalah persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta), dan persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang).

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi dan pemasaran produk dalam negeri antara lain Pesona Produk Kriya, Jateng *Fair*, Soropadan Agro *Expo*, penyediaan dan/atau penyampaian informasi serta pengembangan aplikasi *e-commerce* Pakde Gayeng. Produk ini dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro melalui peningkatan SDM industri melalui pelatihan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM. Indikator yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah persentase pertumbuhan industri pengolahan industri agro.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan bidang industri non agro melalui peningkatan SDM industri melalui pelatihan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, serta peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran dan jejaring kemitraan. Indikator kinerja yang akan dicapai melalui kegiatan dalam program ini adalah persentase pertumbuhan industri pengolahan industri non agro.

Selain itu dilakukan juga kegiatan di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan meliputi peningkatan layanan baik SDM balai dan IKM yang bergerak di industri kreatif digital dan kemasan yang memanfaatkan layanan jasa di Balai. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif.

Kegiatan lain juga dilakukan di Balai Industri Logam dan Kayu melalui peningkatan layanan jasa keteknikan, pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu, serta peningkatan sarana prasarana balai/UPT. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa.

Di samping itu kegiatan ini juga dilakukan di Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki melalui peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki siap kerja di Jawa Tengah. Kegiatan ini diarahkan pada pencapaian indikator program yaitu persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki.

b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri agro dan non agro melalui peningkatan informasi industri di Jawa Tengah meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan industri dan/atau kawasan industri di Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional, dan persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang difasilitasi; dan persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada bagian rumah tangga; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada bagian TU dan rumah tangga pimpinan; persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah pada bagian humas dan protokol; persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja setda; persentase pelayanan administrasi kepegawaian setda; persentase capaian administrasi umum dan keuangan (pada seluruh biro dan 3 asisten).

b. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan; fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; penataan analisis jabatan; fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan

pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase OPD yang meningkat skor kematangan organisasinya; persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya; efektifitas pelaksanaan analisis jabatan OPD; persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan; persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan standar pelayanan; persentase OPD yang nilai PMPRBnya meningkat; persentase kabupaten/kota yang indeks reformasi birokrasinya meningkat; dan persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat.

c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; serta pengembangan otonomi dan penataan urusan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu efektifitas kerjasama daerah; persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti; dan persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana sipitual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar; persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar; dan persentase fasilitasi keagamaan dalam kondisi baik.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian

indikator kinerja yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani; dan persentase kabupaten/kota peduli HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu nilai kemandirian BLUD; persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusullkan sebagai kebijakan; persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan; persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur; persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan; persentase capaian kinerja program bidang pertanian; tingkat kesehatan BUMD aneka usaha; dan tingkat kesehatan BUMD jasa keuangan.

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu efektivitas pengadaan secara elektronik; persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa; dan persentase permasalahan kelembagaan UKPBJ dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu capaian pelaksanaan APBD; capaian pelaksanaan APBN; persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah; persentase realisasi bantuan keuangan; dan persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD, serta kegiatan perencanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja program ini yaitu persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Sekretariat DPRD; serta persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,

Program ini diarahkan pada kegiatan kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD; pelaksanaan dan pengawasan kode etik; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kapasitas DPRD; fasilitasi tugas pimpinan DPRD; pembahasan kebijakan anggaran; penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat; serta pembahasan kerja sama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA; dan persentase layanan bagian humas.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

c. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanan, evaluasi, dan analisis data yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan.

d. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi

perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial budaya; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan keuangan dalam mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase penetapan APBD tepat waktu; persentase evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan; persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu; persentase penyampaian laporan keuangan Pemeintah Daerah tepat waktu; dan persentase realisasi serapan APBD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah; persentase objek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan BBNKB (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan PKB (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan PAP (di bidang dan UPPD); persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah; persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; persentase peningkatan penerimaan PBBKB; persentase peningkatan penerimaan pajak rokok; persentase peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah; persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah; dan persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada (di UPPD).

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan pemetaan kompetensi PNS melalui *Computer Assisted Test* (CAT) Psikometri; peningkatan dan pengembangan kapasitas PNS melalui tugas belajar, fasilitasi ijin belajar, diklat lemhanas, diklat pim tk. I, pengembangan manajemen talenta, evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional, pemetaan PNS potensial melalui uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas bagi PNS yang memenuhi syarat, dan seleksi terbuka bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT); peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian melalui pengadaan dan pengangkatan CPNS yang transparan, akuntabel, dan kompetitif berbasis kompetensi dengan *Computer Assisted Test* (CAT), penyelesaian layanan administrasi kepegawaian tepat waktu, dan evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan; pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis TI; serta pembinaan disiplin, kesejahteraan, perlindungan, dan penghargaan PNS. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PNS yang terpetakan kompetensinya, persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar, persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang terevaluasi kinerjanya, persentase layanan administrasi kepegawaian, persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan, dan persentase penanganan kasus kepegawaian.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial; persentase ASN yang lulus latsar CPNS; persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti; indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan; dan persentase PNS yang lulus uji kompetensi.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah,** yang diarahkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, serta

pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri; persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya; persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang ekonomi dan industri; persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang pemerintahan sosial dan budaya; dan persentase inovasi daerah yang siap diterapkan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Pengelolaan Penghubung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung** yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian pelayanan penghubung.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal; dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertantu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan khusus, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah, persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; serta asistensi dan pendampingan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu nilai *self assessment* RB provinsi, persentase capaian aksi stranas PK, persentase jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi, persentase nilai MCP korsupgah, dan persentase penerapan MR di OPD.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pertahanan Dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Pogram ini dilaksanakan untuk mencapai indikator

kinerja program yaitu persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan kauangan perangkat daerah; serta persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah tahun 2022. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran Buku III RKPD Tahun 2022.

Tabel 6.2.
Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**2.326.762.793.000**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.325.135.293.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	875.000.000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	252.500.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**690.697.362.000**	Dinas Kesehatan; 7 RSUD/RSJD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	682.477.233.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.800.000.000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.800.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.620.129.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**830.316.452.000**	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya; Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	157.939.878.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	28.088.158.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	730.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	45.873.968.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	801.480.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	590.414.539.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.802.600.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.665.829.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**22.535.000.000**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	17.425.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	610.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.300.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**6.503.000.000**	Satpol PP; Sekretariat BPBD
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.768.000.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.735.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**100.318.485.000**	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.055.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	49.278.485.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	41.750.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.700.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	435.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**17.903.124.000**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	400.000.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.446.757.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.835.434.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.218.409.000	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.002.524.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**5.330.200.000**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.053.400.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.021.800.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	175.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	150.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	235.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	695.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**16.750.000.000**	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	10.855.000.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.830.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.065.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**1.550.000.000**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	550.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	500.000.000	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**13.169.810.000**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	719.600.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.870.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.760.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	850.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	3.567.795.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	380.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.022.415.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**565.000.000**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	190.000.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	175.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**5.500.000.000**	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM PENATAAN DESA	200.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	800.000.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.675.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.825.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**1.765.000.000**	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	275.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.150.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	340.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**109.865.995.000**	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	105.786.755.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.379.216.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.700.024.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**115.005.132.000**	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	47.750.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	67.255.132.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**34.907.964.000**	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.250.000.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.000.000.000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.892.964.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	7.275.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.840.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.650.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**3.112.627.000**	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	242.800.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	565.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.010.176.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	994.651.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	300.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**257.005.700.000**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	23.729.750.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	233.275.950.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**1.500.000.000**	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.500.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**3.500.000.000**	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.500.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**28.732.500.000**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	18.402.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.820.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.980.000.000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	655.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.875.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**710.950.000**	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	710.950.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**321.905.000**	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	321.905.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**70.554.065.000**	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.251.180.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	50.411.857.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.937.588.000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.469.440.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.484.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**3.534.050.000**	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.367.100.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.014.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.102.450.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**129.385.888.000**	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	81.731.573.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.435.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	15.741.085.000	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.453.572.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	21.024.658.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	**46.120.513.000**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	35.208.095.000	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.304.944.000	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6.592.804.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.014.670.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**44.488.658.000**	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	6.206.560.000	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	5.527.731.000	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	12.181.982.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	20.572.385.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**32.252.479.000**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.069.089.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	23.296.800.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4.600.325.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.899.580.000	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	286.685.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**74.558.633.000**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	73.460.581.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.098.052.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**295.000.000**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	295.000.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH	**710.197.772.000**	Sekretariat Daerah
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	171.446.297.000	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.800.000.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.326.130.000	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	425.470.610.000	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.315.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100.714.735.000	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.450.000.000	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.675.000.000	
SEKRETARIAT DPRD	**334.425.404.000**	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	168.930.054.000	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	165.495.350.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
PERENCANAAN	**9.259.800.000**	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.000.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.259.800.000	
KEUANGAN	**8.776.342.178.000**	Badan Pengelola Pendapatan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.738.436.697.000	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.051.822.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	33.853.659.000	
KEPEGAWAIAN	**17.274.560.000**	Badan Kepegawaian Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	17.274.560.000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**22.569.078.000**	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.569.078.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**8.750.000.000**	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.750.000.000	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	**1.152.775.000**	Badan Penghubung
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.152.775.000	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
INSPEKTORAT DAERAH	**8.982.012.000**	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.272.457.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.709.555.000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**90.544.512.000**	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.985.500.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.631.612.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	42.575.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.106.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	17.246.400.000	
NON URUSAN	**9.287.829.872.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.287.829.872.000	Seluruh PD

Selanjutnya implementasi Program Unggulan di tahun 2022 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.3.

Implementasi Program Unggulan Jawa Tengah Tahun 2022

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	a. Sekolah tanpa sekat	Integrasi pendidikan formal, informal dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga mernjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB	Program ini dilakukan dengan memberikan stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian dana BOS SMA Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian dana BOS SMK Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri (SLBN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemberian dana BOS SLB Negeri (SLBN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan
			Akses siswa berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dalam bentuk optimalisasi sekolah inklusi, dan penyediaan guru pendamping melalui peningkatan SDM
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembiayaan GTT dan PTT SMA Tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah GTT dan PTT tahun tersebut
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembiayaan GTT dan PTT SMK Tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah GTT dan PTT tahun tersebut
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembiayaan GTT dan PTT SLB Tahun 2022 disesuaikan dengan jumlah GTT dan PTT tahun tersebut
	b. Pelatihan tentang demokrasi dan pemilu	Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, terutama bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat	Fasilitasi forum OSIS SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS
			Fasilitasi forum OSIS SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu. Program ini juga ditujukan kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Edukasi politik mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan	Pesta Demokrasi Sekolah (simulasi pemilu dalam pemilihan Pengurus OSIS)	Badan Kesbangpol	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS
			Peningkatan Demokrasi Indonesia (Pemahaman aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia kepada elemen masyarakat)	Badan Kesbangpol	
			Pendidikan Politik Perempuan	DPPPA DALDUK KB	termasuk kader politik perempuan
			Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Badan Kesbangpol	
			Wakil Rakyat Mengajar SMA/SMK/Ponpes	Setwan	
			Sekolah Politik Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Sasaran masyarakat umum utamanya generasi muda milenial

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Kesbang Sambang Sekolah	Badan Kesbangpol	- Sasaran siswa SMA/SMK (pemilih pemula)
					- Dilakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu
			Pendidikan melalui media massa, *online* dan sosial.	Dinas Kominfo	Publikasi melalui berbagai media (Media massa, Media on line, TV dan Radio)
		Bentuk edukasi politik lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaaan, politik, dan kepemerintahan.	Mengajar di Perguruan Tinggi / Akademi/ SMA/ SMK/ SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Mengajar di kelompok / lembaga non formal	Badan Kesbangpol	Jawa Tengah kampung Bhineka
			Menyapa melalui media Radio/TV Lokal dan Nasional	Dinas Kominfo	Dialog informasi kebijakan dan pembangunan daerah lewat radio dan TV
			Ngopi bareng Gubernur/Wakil Gubernur	Biro Umum dan Biro Adm. Bangda	
			Ngaji bersama Gubernur/Wakil Gubernur	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Bentuk lainnya adalah menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya Politik Gotong Royong	Hari jumat hari pengabdian masyarakat	Semua OPD	Gerakan Jumat OPD bersama masyarakat untuk bergotong royong meningkatkan kebersihan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat sekitar
			Gerakan Gotong Royong Masyarakat	Dispermades	Kegiatan gotong-royong dipadukan dengan pelaksanaan TMMD
	c. Pelatihan Gender	Merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, termasuk kepada pendidik dan anak usia sekolah	Pelatihan daan TOT tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi pendidik dan siswa SMA/SMK/SLB	DPPPA DALDUK KB dan Dinas Dikbud	
	d. Pendidikan Anti Korupsi	Merupakan salah satu bentuk program sekolah tanpa sekat, yang dilakukan melalui internalisasi kurikulum sekolah mengenai pemahaman tentang	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter yang didalamnya terdapat Pendidikan Anti Korupsi sosialisasi/ asistensi/ fasilitasi	Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Termasuk didalamnya Gerakan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		korupsi dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan			
					Dorongan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan hal yang sama
			Sosialisasi/asistensi/ fasilitasi pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA/SMK/SLB	Inspektorat	Dasarnya adalah Mou antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA/SMK/SLB se Jawa Tengah
	e. Program magang Gubernur untuk SMA/SMK	Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik	Siswa hadir dan bersama Gubernur/Wakil Gubernur dalam setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Gubernur /Wakil Gubernur ("Program Sehari Bersama Gubernur")	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji	Peningkatan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama yang terdaftar pada Kanwil Kemenag Jateng dan peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan	Pemberian bantuan honorarium untuk pendidik keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan (Hibah Sarana prasarana peribadatan)	Biro Kesejahteraan Rakyat	
			Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang	Dinas PU BMCK	
3.	Reformasi birokrasi di kab/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Program ini ditujukkan tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.			
		Pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, didukung penguatan keamanan sistem informasi.	Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan pengaduan masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota; integrasi FO; *Smart City/Smart Province; single* data sistem; didukung dengan penguatan keamanan sistem.	Dinas Kominfo	Digitalisasi pemerintahan ini untuk mendukung *Smart Province*
		Pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin untuk menyelesaikan	- Tinjauan Lapangan	Semua OPD Prov. Jateng	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		permasalahan di masyarakat			
			- Dialog / Tatap muka dengan berbagai media		
			Roadshow	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
			Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan	Biro Pem, Otda Dan Kerjasama Setda Prov.Jateng	
		Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang ada	a. Pelayanan perijinan terpadu yang mudah dan cepat dengan :		
			- Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP	DPMPTSP	
			- Penanganan pengaduan, penyederhanaan proses pelayanan perizinan, Gelar Inovasi Pelayanan Publik, dan	DPMPTSP	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Analisa Survei Kepuasan Masyarakat		
			b. Pelayanan samsat yang mudah dan cepat :		
			- Publikasi Pembayaran PKB melalui media elektronik dan media cetak	Bapenda	
			- Jaringan SAMSAT Online	Bapenda	
		Penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN	Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi ASN	Biro Organisasi, BKD, dan BPSDMD	
			Penjaminan mutu kompetensi ASN	BPSDMD	
			Penggajian, penghargaan dan disiplin	BKD dan semua OPD	
			Pembinaan dan evaluasi (Analisis Jabatan)	Biro Organisasi	
		Implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli	Standar Perlayanan OPD	Biro Organisasi	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	a. Satgas Kemiskinan	Secara fungsional merupakan penguatan lebih lanjut dari tugas dan fungsi TKPKD utamanya memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat tercapai, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan			
			Koordinasi dan *focussing* penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota	Dinsos, Bappeda yang dikoordinir Assisten Kesejahteraan Rakyat	Satgas Kemiskinan bagian dari TKPKD dengan pelibatan Unsur-unsur non Pemerintah
			Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	Disporapar	Pemuda diarahkan sebagai bagian dari satgas kemiskinan.

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Program "Maju Bareng" untuk penanggulangan kemiskinan	Seluruh PD	Gerakan bersama "1 OPD minimal 1 Desa Miskin" menggunakan konsep "Kolaborasi Berjenjang" dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi)
	b. Bantuan Desa	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana dan prasarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).	Operasional KPMD, Stimulan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengembangan Kawasan	Dispermasdes	
	c. Rumah Sederhana Layak Huni	Bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan nilai keswadayaan dan sifat gotong royong masyarakat.	Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Bantuan sosial pembangunan baru Rumah Sederhana Sehat	Bantuan sosial berupa material bangunan		
5.	a. Obligasi Daerah	Pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar pendapatan asli daerah	Pembangunan Rumah Sakit Khusus di Kota Pekalongan dan Magelang	Dinas Kesehatan	- RS Khusus di Kota Pekalongan tahun 2022 direncanakan pembangunan fisik dengan pembiayaan KPBU - RS Khusus di Magelang tahun 2022 direncanakan penyusunan AMDAL.
			Pengembangan Rumah Sakit Khusus di RSUD Kelet	RSUD Kelet Jepara	Pembiayaan direncanakan menggunakan sumber DBHCHT
			Pengembangan RSUD Moewardi (Pengembangan Onkologi Terpadu)	RSUD Dr. Moewardi	Pembiayaan direncakan menggunakan anggaran BLUD
			Pembangunan Kawasan Olahraga Jatidiri	Disporapar	Pembangunan kawasan Jatidiri untuk tahun 2022 difokuskan pada penyelesaian pembangunan stadion dengan menggunakan pembiayaan APBD

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Infrastruktur Penunjang Kawasan Industri	Disperindag	
			Pengembangan Kawasan *Edu Park* Tlogo Wening	CMJT dan Biro Perekonomian untuk memfasilitasi	Pembiayaan direncanakan menggunakan anggaran BUMD yang bekerjsama dengan Swasta. Tahun 2022 direncanakan proses penjajagan dengan calon investor
	b. Kemudahan akses kredit UMKM	Fasilitasi Bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan	Pelatihan pengajuan kredit ke perbankan	Dinkop UKM	
			Pemberian Pinjaman untuk UMKM (Kredit Mitra 25)	Bank Jateng dan Dinkop UMKM untuk memfasilitasi	
	c. Penguatan BUMDesa	Peningkatan peran dan produktivitas BUMDesa sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDesa dan penyertaan modal kepada BUMDesa melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa	Dispermades	
	d. Pelatihan s*tartup* untuk wirausaha muda	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi	Bimtek dan pendampingan wirausaha baru	Disporapar, Disperindag, Distanbun, Dinkop UKM	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja			
			Akses pasar dan modal bagi wirausaha baru		Pasar rakyat ibukota provinsi dan kabupaten/kota
			Pengembangan aplikasi *e-commerce* Pak De Gayeng	Disperindag	*"Market Place*" untuk memudahkan penjualan produk para pelaku UMKM – IKM
			Pengembangan Kemitraan, Permodalan, Akses Pasar dan Bahan Baku Bagi Industri Non Agro	Disperindag	Kemitraan Industri Besar dengan Industri Kecil di Jateng; kemudahan akses bahan baku bagi IKM
			Pelatihan padat karya produktif di desa miskin	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan
			Pelatihan kerja di bidang industri	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/tenaga kerja
			Pelatihan kerja di bidang pertanian	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja dibidang pertanian
			Pemagangan ke luar negeri	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi calon tenaga kerja

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6.	a. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani				
	1) Menjaga Harga Komoditas	Program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa			
			Pelaksanaan Sistem Informasi Logistik Daerah (SISLOGDA)	Dinas Ketahanan Pangan	Upaya menjaga stabilitas stok dan gejolak harga komoditas pangan melalui keterbukaan akses informasi stok pangan
			Menjaga stok beras pada gudang (cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan masyarakat dan lembaga	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan stok beras

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			distribusi pangan masyarakat) tingkat kawasan		
			Penyediaan informasi harga kepokmas dan barang penting di Jawa Tengah	Disperindag	
	2) Asuransi gagal panen untuk petani	Merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya	Jaminan gagal panen bagi petani (Asuransi Petani)	Distanbun	Untuk petani yang sudah memliki kartu tani
	b. Melindungi kepentingan nelayan	Program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar			
			Asuransi Nelayan Jawa Tengah	DKP	Jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan,

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					berupa pemberian bantuan asuransi bagi nelayan Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun
			Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT)	DKP	Memfasilitasi penyediaan aset (hak atas tanah nelayan) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional
			Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP)	DKP	Memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan dengan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nelayan di daerah bekerjasama dengan DPMPTSP dan KSOP guna efisiensi biaya dan waktu proses perizinan kapal perikanan oleh nelayan
			Pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan"	DKP	Memulihkan ketersedian (stok) sumberdaya ikan dengan mengadakan bangunan yang ditempatkan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					didalam perairan sebagai areal berpijah, perlindungan, asuhan dan pembesaran bagi telur serta anak2 ikan
					Diserahkan pengelolaannya kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah di daerah yang turut serta membantu dalam kegiatan pengawasan dan pemulihan sumberdaya ikan
7.	a. Pengembangan transportasi massal	Pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT)	Pengembangan Koridor BRT Trans Jateng	Dinas Perhubungan	Operasionalisasi 6 Koridor lanjutan Trans Jateng (Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Semarang-Gubug, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur) dan Solo-Sumberlawang Via Sangiran)

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Revitalisasi jalur kereta api	Fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/ reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur, serta wilayah tengah	Peningkatan layanan berupa peningkatan frekuensi kereta api (Fasilitasi)	Dinas Perhubungan	KA Joglosemarkerto sebelumnya bernama KA Joglokerto, Tahun 2020 frekuensi 3 x rangkaian kereta dengan perjalanan melingkar tanpa perjalanan PP
			Revitalisasi / Reaktivasi Jalur KA Non Operasi	Kementerian Perhubungan RI	Pada Tahun 2021 fasilitasi Penyusunan studi Investigasi dan Rancang Dasar Jalur KA Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Anggaran APBN sebesar 2 M (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan)
			Pemasangan *Early Warning System* di Perlintasan Sebidang Kereta Api	Dinas Perhubungan	Pengadaan dan pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Perlintasan JPL 9 Ruas Surakarta - Sukoharjo
			Pembangunan *Fly Over* Ganevo Mranggen	Dinas PU BMCK	Perlintasan sebidang dengan rel KA

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	c. Pengembangan bandara	Fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah	Pembangunan dan Pengembangan Bandara di Jawa Tengah (Fasilitasi Pemprov. Jateng berupa *sharing* pembebasan tanah)	Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan	
			Pembangunan Bandara Jend. Soedirman		• Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.023 m^2 untuk operasional tahap I dengan panjang *runway* 1.600 m • Operasional Tahap I Bulan Juni tahun 2021 dan tahap II 2023 • Tahun 2022 direncanakan untuk pembangunan Gedung terminal

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan Bandara Ngloram		• Pada Tahun 2020 Pekerjaan fisik Perpanjangan Runway dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.600 m x 30 m serta rekonstruksi Apron • Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.792 m^2 dengan peruntukan jalan akses masuk ke bandara, jalan akses kendaraan PK-PPK, Gedung PK-PPK dan Gedung operasional • Rencana mulai beroperasi tahun 2021
			Pengembangan Bandara Dewadaru		• Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 16.010 m^2 untuk pembangunan gedung terminal dan fasilitas darat lainnya • Tahun 2022 direncanakan pekerjaan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					fisik pembangunan Gedung terminal dan fasilitas darat lainnya
	d. Pembangunan embung/ irigasi	Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri	Perbaikan daerah irigasi	Dinas PU SDA Taru	Pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian
			Perbaikan dan pembangunan embung	Dinas PU SDA Taru	Pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat termasuk untuk pertanian
8.	a. Pembukaan kawasan industri baru	Afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Dukungan Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah	Disperindag dan DPMPTSP	Penyusunan Kajian Wilayah Industri Baru untuk pemerataan sebaran industri dan pengembangan wilayah perbatasan Jateng

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Rintisan pertanian terintegrasi	Konsep integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi pertanian			
	1) *Agriculture estate*	Integrasi hulu - hilir, melalui konsolidasi lahan dan usaha terutama pada petani dengan lahan sempit, dengan pendampingan manajemen dari BUMD dan dukungan pinjaman/kredit dari Bank Jateng/BPR BKK serta jaminan kredit dari PT. Jamkrida.	Konsolidasi lahan bagi petani dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 Ha.	Dintanbun, BUMD, Jamkrida, Bank Jateng, PT. SPJT dan keterlibatan Perguruan Tinggi	Petani dan BUMD merupakan satu kesatuan manajemen dalam bentuk korporasi, masing - masing mempunyai hak dan kewajiban.

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			BUMD yaitu aspek *on-farm*, pengolahan dan *off-farm* sehingga akan memotong rantai pasok.		PT. SPJT memberikan pendampingan dari *on farm*, pengolahan dan *off farm* sehungga memotong rantai pasok
			Pemberian kredit kepada petani antara lain melalui Bank Jateng dan BPR/BKK dengan suku bunga rendah.		Dari sisi pengelolaan keuangan, untuk tahap awal petani mendapatkan pinjaman yang disalurkan secara rutin tiap bulan, dengan kata lain petani mendapatkan gaji bulanan selama masa tanam, misal budidaya padi maka jangka waktu pinjaman selama 3 bulan.
	2) Integrasi di bawah tegakan	Budidaya tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai di bawah tegakan kawasan hutan	Fasilitasi dan koordinasi dengan Perhutani untuk penyediaan lahan di bawah tegakan	Dinas LHK	Budidaya tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai di bawah tegakan kawasan hutan
			Penanaman tanaman pangan di bawah tegakan pendampingan budidaya	Dintanbun	
	3) *Zero Waste*	Integrasi tanaman pangan - peternakan dengan mengoptimalkan limbah untuk digunakan kembali	Pemanfaatan limbah tanaman budidaya (pasca panen) sebagai bahan baku pupuk organik	Dintanbun	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi sarana, prasarana dan pengolah-an limbah ternak melalui inovasi teknologi pengola-han pupuk dan pengem-bangan biogas, Peman-faatan sumber EBT dan penurunan emisi GRK	Disnak Keswan	
			Fasilitasi sarana, prasarana unit pengolahan limbah ternak melalui inovasi teknologi pengolahan pupuk (APPO) dan pengembangan biogas; Pemanfaatan sumber energi terbarukan dan penurunan emisi gas rumah kaca	Disnak Keswan	
	4) Agrowisata	Integrasi sektor pariwisata dengan pertanian	Penyediaan dan pengembangan kawasan wisata	Distanbun	Pengembangan potensi lokal berbasis agro menjadi Atraksi Wisata
			Pengembangan destinasi dan promosi	Disporapar	
	5) Minapadi	Integrasi padi dengan perikanan budidaya	Penyiapan lahan	Dintanbun	Integrasi antara budidaya tanaman padi sawah dengan budidaya perikanan tawar dalam satu lahan
			Pengadaan bibit tanaman padi		
			Budidaya tanaman padi		
			Penyediaan bibit ikan	Dinlutkan	
			Budidaya ikan		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	6) Pertanian Organik	Pengembangan pertanian tanpa menggunakan bahan kimia	Pendampingan dan sertifikasi organik	Dintanbun, Dishanpan	Lokasi di Kabupaten Magelang dan Boyolali
9.	a. Rumah Sakit tanpa dinding	RS tanpa dinding mengubah paradigma kesehatan dari dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan	Penyuluhan paradigma sehat melalui : Penyebaran informasi melalui media elektronik (TV, radio, Vidiotron, Media *Online*, TV Kereta , media luar ruang , media pameran, media cetak, media transportasi); Penyuluhan kesehatan ke sekolah dan masyarakat; Edukasi pasien dan keluarga pasien; *home care; home visit; Daycare*	Dinas Kesehatan; 7 RSUD/RSJD	
			Kolaborasi/interkoneksi pelayanan kesehatan lintas	Dinas Kesehatan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat	sektor (puskesmas, RS Kabupaten/Kota/RS Provinsi)		
			Peningkatan kapasitas *Public Safety Center* (PSC) 119 Tingkat Provinsi	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Optimalisasi akreditasi RS dengan peningkatan mutu di Fasyankes (RS, Puskesmas, Laboratorium)	Dinas Kesehatan	
	b. Sekolah biaya pemerintah khusus siswa miskin (SMA/SMK/SLB)	Sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh	Pengelolaan SMK Negeri *Boarding*	Dinas Dikbud	Pengelolaan 3 SMK Negeri Jawa Tengah di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Purbalingga
			Biaya operasional Asrama SMK Negeri *Semi Boading*	Dinas Dikbud	Operasional dimulai tahun 2021-2023 @ 2 M/tahun/ asrama (100 siswa)

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM)	Dinas Dikbud	Alokasi BSM sebesar Rp. 1.000.000 Siswa/Tahun
			Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara	Dinas Dikbud	Pembiayaan selama 3 tahun dengan sasaran siswa miskin berprestasi
			Program Indonesia Pintar	Dinas Dikbud	Pembiayaan dari Pemerintah Pusat dengan sasaran siswa miskin
			Uji kompetensi siswa SMK miskin	Dinas Dikbud	
	c. Bantuan sekolah swasta, Ponpes, Madrasah dan Difabel	Pemberian Stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan	Bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta (BOSDa)	Dinas Dikbud	
			Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan	Biro Kesra	
			Bantuan Hibah Sarpras Pendidikan Keagamaan	Biro Kesra	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan	Biro Kesra	
10.	a. Festival seni	Program ini dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain	Parade seni budaya Jawa Tengah	Dinas Dikbud, Badan Penghubung	
			Festival/ lomba tingkat Nasional		
			Duta seni Pelajar Jawa -Bali-Lampung		
			Pagelaran seni dalam Provinsi		
			Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah		
			Pagelaran seni/ pengiriman Tim kesenian ke luar negeri		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Konggres Bahasa/ Kebudayaan Jawa		
			Pentas seni budaya di TBJT		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kesenian kepada Kabupaten/Kota	Disporapar	Penyelenggaraan kesenian/atraksi wisata untuk promosi pariwisata melalui: (1) tampilan kesenian pada event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri; (2) fasilitasi atau dukungan kesenian pada event pariwisata di kabupaten/kota.
			Pengembangan Daya Tarik Wisata	Disporapar	Pembinaan dan pengembangan Keunikan Lokal Daerah/Masyarakat menjadi Atraksi Wisata di Desa Wisata melalui pagelaran seni masyarakat lokal
			Pembangunan Pusat Kreatif Borobudur	Dinas PUBMCK	Pembangunan pusat kreatif Borobudur di Kabupaten Magelang juga dalam rangka mendukung pengembangan KSPN Borobudur

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Pengembangan infrastruktur olahraga	Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri	Disporapar	Tahun 2022 diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan stadion Jatidiri
	c. Rumah kebudayaan	Penyediaan Ruang Bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah	Pemanfaatan aset aset pemerintah provinsi/ kabupaten/kota/desa yang potensial sebagai "Rumah Budaya"	BPKAD	
			Event napak tilas dan lawatan sejarah	Dinas Dikbud	2020
			Dialog Budaya dan tradisi	Dinas Dikbud	
			Seminar sejarah lokal	Dinas Dikbud	
			Kemah budaya	Dinas Dikbud	2017/2018, refocussing di 2020, 2021
			Penyelenggaraan warisan dunia	Dinas Dikbud	2020
			Pameran cagar budaya dan permuseuman	Dinas Dikbud	2019

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pembinan generasi penghayat	Dinas Dikbud	
			Festival/Pagelaran/Lomba Seni dalam Provinsi	Dinas Dikbud	
			Dialog Pengembangan Kebudayaan dan pagelaran tradisi keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	d. Kepedulian Lingkungan	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan peningkatan pengurangan resiko bencana	Peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui:		
			Edukasi melalui Sekolah Peduli Lingkungan	DLHK	Sekolah yang telah menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
			Budaya hemat energi (Lomba Hemat Energi & Air dan Lomba Desa Mandiri Energi)	Dinas ESDM	
			Audit energi	Dinas ESDM	
			Sadar lingkungan melalui Program Kampung Iklim	DLHK	
			Upaya konservasi dan rehabilitasi melalui rehabilitasi hutan dan lahan	DLHK	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Konservasi air tanah: - sumur resapan - sumur pantau	Dinas ESDM	
			Pengembangan EBT: - roof top - pemanfaatan EBT (biogas, biomass, gas rawa dan pompa air tenaga surya)	Dinas ESDM	
			Pengembangan desa ekowisata	Dinporpar dan DLHK	
			Pemantauan kualitas air serta pengembangan dan perbaikan kualitas air melalui pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan, penegakkan hukum dalam rangka pengendalian pencemaran air	DLHK	Sungai/waduk/danau di Provinsi Jawa Tengah
			Pemantauan kualitas udara melalui pembinaan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran udara	DLHK	35 kabupaten/kota
			IPAL Industri kecil/ limbah Rumah Tangga/Lembaga	DLHK	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi pengolahan sampah melalui: - Bank sampah - TPS 3R - Pembinaan pengelolaan limbah B3 - TPST regional, RDF	DLHK	
			Rekomendasi ijin lingkungan	DLHK	
			Penegakan Perda melalui:		
			Pembinaan terhadap siswa SMK/SMA, Ormas, BUMD dan penegakan Perda terutama berkaitan dengan Lingkungan	SATPOL PP	
			Penanggulangan Bencana melalui:		
			Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Set BPBD	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mendasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2020, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,00	Sekretariat Daerah
3	Angka Kemiskinan	%	10,49-10,30	Sekretariat Daerah
4	Indeks Gini	Angka	0,35	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75-5,69	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20-5,20	Sekretariat Daerah
7	Inflasi	%	3,0±1	Sekretariat Daerah
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	41,46	Sekretariat Daerah
9	Indeks Williamson	Angka	0,57	Sekretariat Daerah
10	Nilai Tukar Petani	Angka	103,56	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,58	Sekretariat Daerah
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	Sekretariat Daerah
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52	Sekretariat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	98,98
2		Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,20
3		Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	12,88
4		Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,80
5		Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07
6	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu	100.000/ KH	88,00
7		Angka Kematian Balita	10.000/KH	10,45
8		Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,90
9		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,20
10		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	63,00
11		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100
12		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	74,00
13		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	72,00
14		Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	83,00
15		Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89,00
16		Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90,00
17		Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	85,00
18		Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100
19		Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82,00
20		Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	95,00
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	13,30

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22		Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	41,35
23		Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	88,83
24		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91,55
25	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65,20
26		Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,36
27		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	76,04
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	24,76
29		Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100
30		Persentase penurunan kawasan kumuh	%	25,27
31	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase penanganan gangguan trantibum di Jawa Tengah	%	100
32		Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	%	100
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik	%	2,97
34		Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	%	3,12
35	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100
36		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,56
37		Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	5,00
38		Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	3,00
39		Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100
40	Dinas Sosial	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	1,90
41		Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	25,74

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase pengangguran yang ditangani	%	9,86
43		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	24,24
44		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	90,56
45		Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	29,39
46		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	5,68
47		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenaga-kerjaan	%	91,07
48		Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	28,57
49		Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,18
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,15
51		Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	91,43
52		Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,27
53		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,20
54		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60,00
55		Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	80,00
56		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,05
57		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	64,76
58		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	54,38
59		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,62
60	Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44
61		Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.100
62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	51,20

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63		Indeks Kualitas Udara	%	84,95
64		Indeks Kualitas Air	%	50,60
65		Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43
66		Indeks Pencemaran Air	%	3,45
67		Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,20
68		Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47
69		Luas Tutupan Lahan (LTV)	km^2	10.223,65
70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	50,34
71		Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100
72	Dinas Perhubungan	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,38
73		Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,49
74		Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67
75	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,83
76		Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,53
77		Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,17
78		Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	81,76
79		Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	3,00
80	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	9,88
81		Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	21,10
82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100
83		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90,00
84	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,63
85		Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,23
86		Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15
87	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	79,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88		Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	79,00
89	Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	38,18
90		Produksi Perikanan	Ton	1.018.833,92
91	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,60
92	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	3,92
93	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	14,85
94		Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan *good mining practice* (GMP)	%	43,50
95		Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,05
96		Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,00
97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	2,93
98		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	2,82
99	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85,00
100		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80,00
101		Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	76,00
102		Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	95,00
103		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	95,00
104		Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	40,00
105		Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90,00
106		Ketercapaian laba BUMD	%	70,00
107		Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	80,00
108		Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	85,00
109		Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	88,00
110		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	85,00
111		Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	60,98
112		Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	83,67

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
113		Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang	%	75,61
114		Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78,00
115	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	88,50
116	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	90
117		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67,00
118		Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,00
119	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	8,61
120		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	1,06
121	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	%	100
122		Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70,00
123	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100
124		Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang dikembangkan	%	100
125	Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	Level	3,00
126		Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,18
127	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,92
128		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi	%	25,00
129	Badan Penghubung	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84,00

7.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU OPD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**		
1	Angka Kemiskinan	%	10,49-10,30
2	Indeks Gini	Angka	0,35
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,38-9,22
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	11,65-11,45
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	433,38
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,50
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,00
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75-5,69
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,48
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20-5,20
11	Inflasi	%	3,0±1
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	41,46
13	Indeks Williamson	Angka	0,57
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3,00
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	2,93
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	2,82
17	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	15,30
18	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00-5,00
19	Nilai Tukar Petani	Angka	103,56
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,58
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,96
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88
23	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,53
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18
B	**Aspek Pelayanan Umum**		
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	PENDIDIKAN		
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	12,88
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,80
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	98,98
	KESEHATAN		
5	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	88,00
6	Angka Kematian Balita	1.000/KH	10,45
7	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,90
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,20
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	63,00
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100
11	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	74,00
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	72,00
13	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	83,00
14	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89,00
15	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90,00
16	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	85,00
17	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100
18	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82,00
19	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	95,00
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
20	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	13,30
21	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	41,35
22	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	88,83
23	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91,55
24	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65,20
25	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,36
26	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	76,04

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
27	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	24,76
28	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	25,27
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
29	Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	%	100
30	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100
31	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100
32	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	5,00
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	3,00
34	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100
	SOSIAL		
35	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	1,90
36	Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	25,74
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	TENAGA KERJA		
37	Persentase pengangguran yang ditangani	%	9,86
38	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	24,24
39	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	90,56
40	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	29,39
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	5,68
42	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	91,07
43	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	28,57
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,15
45	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	91,43

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
46	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,27
47	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60,00
48	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	80,00
49	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,05
50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,62
	PANGAN		
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44
52	Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.100
	PERTANAHAN		
53	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100
	LINGKUNGAN HIDUP		
54	Indeks Pencemaran Air	%	3,45
55	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,20
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
56	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
57	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	50,34
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
58	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,20
59	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	64,76
60	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	54,38
	PERHUBUNGAN		
61	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,38
62	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,49
63	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
64	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,83
65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,53
66	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,17
	KOPERASI DAN UKM		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
67	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	9,88
68	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	21,10
	PENANAMAN MODAL		
69	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100
70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90,00
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
71	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15
72	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,63
	STATISTIK		
73	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	81,76
	PERSANDIAN		
74	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	3,00
	KEBUDAYAAN		
75	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,20
	PERPUSTAKAAN		
76	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	79,00
	KEARSIPAN		
77	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	79,00
	URUSAN PILIHAN		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
78	Produksi Perikanan	Ton	1.018.830,92
79	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	38,18
	PARIWISATA		
80	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,23
	PERTANIAN		
81	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6
82	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	3,92
	KEHUTANAN		
83	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,43
84	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	10.223,65
85	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
86	Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan *good mining practice* (GMP)	%	43,50
87	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,05
88	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,00
89	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	14,85
	PERDAGANGAN		
90	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	2,82
	PERINDUSTRIAN		
91	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	2,93
	TRANSMIGRASI		
92	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,18
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	SEKRETARIAT DAERAH		
93	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85,00
94	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80,00
95	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	76,00
96	Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	95,00
97	Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	95,00
98	Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	40,00
99	Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90,00
100	Ketercapaian laba BUMD	%	70,00
101	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	80,00
102	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	85,00
103	Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	88,00
104	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	85,00
105	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	60,98
106	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	83,67
107	Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang	%	75,61
108	Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78,00
	SEKRETARIAT DPRD		
109	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	88,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PERENCANAAN		
110	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	%	90,00
	KEUANGAN		
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	8,61
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	1,06
113	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
114	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
	KEPEGAWAIAN		
115	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100
116	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,92
118	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	25,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
119	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67,00
120	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,00
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
121	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84,00
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
122	Level Kapabilitas APIP	Level	3,00
123	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,18
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
124	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,97
125	Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,12
C	**Aspek Daya Saing**		
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15,00
2	Indeks Toleransi	Angka	75,90
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	87,00
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,00
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,27
7	Nilai SAKIP	Angka	84,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,49
9	Opini BPK	Opini	WTP
10	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	38,00
11	Indeks Sistem Merit	Angka	0,72
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52
13	Indeks Kualitas Air	Angka	50,60
14	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,95
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,20
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,56

7.4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

Tabel 7.4.
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Cost Recovery Rate Total (CRR Total)	%	82	RSUD Dr. Moewardi
	CRR Total	%	78	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	CRR total	%	52,94	RSUD Tugurejo
	CRR Total	%	35	RSUD Kelet Donorejo
	CRR Total	%	42	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
	Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	33	RSJD Surakarta
	CRR total	%	45	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	Seluruh PD
	Persentase ketercapaian perencanaan dan	%	100	Seluruh PD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	evaluasi kinerja OPD			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APK SLB	%	84,41	
	APK SLB Cabdin I	%	222,05	
	APK SLB Cabdin II	%	40,9	
	APK SLB Cabdin III	%	92,07	
	APK SLB Cabdin IV	%	63,65	
	APK SLB Cabdin IX	%	68,82	
	APK SLB Cabdin V	%	140,92	
	APK SLB Cabdin VI	%	143,61	
	APK SLB Cabdin VII	%	252,95	
	APK SLB Cabdin VIII	%	67,26	
	APK SLB Cabdin X	%	55,8	
	APK SLB Cabdin XI	%	32,77	
	APK SLB Cabdin XII	%	57,17	
	APK SLB Cabdin XIII	%	99,67	
	APK SMA	%	29,45	
	APK SMA Cabdin I	%	34,78	
	APK SMA Cabdin II	%	31,76	
	APK SMA Cabdin III	%	31,47	
	APK SMA Cabdin IV	%	24,52	
	APK SMA Cabdin IX	%	23,06	
	APK SMA Cabdin V	%	34,81	
	APK SMA Cabdin VI	%	25,87	
	APK SMA Cabdin VII	%	47,02	
	APK SMA Cabdin VIII	%	29,71	
	APK SMA Cabdin X	%	27,66	
	APK SMA Cabdin XI	%	33,4	
	APK SMA Cabdin XII	%	22,44	
	APK SMA Cabdin XIII	%	31,69	
	APK SMK	%	55,31	
	APK SMK Cabdin I	%	46,65	
	APK SMK Cabdin II	%	42,93	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	APK SMK CAbdin III	%	50,79	
	APK SMK Cabdin IV	%	44,47	
	APK SMK Cabdin IX	%	54,11	
	APK SMK Cabdin V	%	59,35	
	APK SMK Cabdin VI	%	56,14	
	APK SMK Cabdin VII	%	63,64	
	APK SMK Cabdin VIII	%	50,83	
	APK SMK Cabdin X	%	66,42	
	APK SMK Cabdin XI	%	66,62	
	APK SMK Cabdin XII	%	60,15	
	APK SMK Cabdin XIII	%	60,59	
	Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	100	
	Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	99,97	
	Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	99,94	
	Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar	%	98,63	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87,86	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I	%	89,85	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III	%	85,8	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV	%	80,91	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX	%	81,88	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V	%	94,57	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI	%	87,62	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII	%	87,23	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII	%	80,97	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X	%	89,13	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI	%	91,69	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII	%	92,19	
	Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII	%	81,1	
	Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar	%	72,94	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	73,63	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I	%	76,56	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III	%	63,8	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV	%	71,87	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX	%	76,71	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V	%	68,24	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI	%	71,5	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII	%	74,53	
	Persentase prasarana sarana	%	76,12	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SMA sesuai standar Cabdin VIII			
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X	%	63,5	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI	%	75,1	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII	%	71,95	
	Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII	%	75,25	
	Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar	%	88,23	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	88,9	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I	%	85,75	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III	%	90,18	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV	%	85,86	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX	%	90,55	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V	%	89,8	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI	%	88,97	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII	%	92,3	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII	%	89,03	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X	%	88,63	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI	%	89,9	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII	%	90,65	
	Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII	%	84,85	
	Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	68,13	
	Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	70,12	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	18,46	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	2,69	
	Prosentase keikutsertaan	%	0,77	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V			
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	3,85	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	3,46	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	1,15	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,15	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,77	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	8,44	
	Prosentase keikutsertaan	%	3,1	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I			
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II	%	0,6	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	0,17	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,17	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX	%	0,43	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	0,43	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,17	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	0,86	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	0,69	
	Prosentase keikutsertaan	%	0,43	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X			
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	0,86	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	0,34	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,17	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang	%	20,04	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin	%	0,76	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I	%	4,01	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III	%	2,86	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV	%	0,38	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba	%	1,15	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	nasional yang berjenjang Cabdin IX			
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V	%	1,53	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI	%	0,95	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII	%	2,29	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII	%	2,1	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X	%	0,95	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI	%	1,34	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII	%	1,34	
	Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII	%	0,38	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan Kebudayaan
	Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,75	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I	%	98,14	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II	%	99,26	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III	%	98,73	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV	%	99,61	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX	%	99,32	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V	%	97,4	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI	%	98,19	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII	%	99,57	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII	%	98,58	
	Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X	%	98,68	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II	%	99,48	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III	%	99,69	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV	%	98,52	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX	%	98,08	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V	%	99,1	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI	%	99,52	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII	%	100	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII	%	99,47	
	Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X	%	98,52	
	Prersentase serapan kurikulum SMA	%	100	
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI	%	99,51	
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII	%	97,3	
	Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII	%	98,26	
	Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII	%	100	
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI	%	97,73	
	Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII	%	98,99	
	Prsentase serapan kurikulum SMK	%	99,07	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%	0,26	
	Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,07	
	Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,07	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui	%	100	
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan	%	100	
	Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan	%	95	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehatan
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	%	0	
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	
	Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	85,71	
	Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan	%	85	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik			
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	%	68,57	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	62,86	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	22,86	
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	74	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Klb/Bencana < 24 Jam			
	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana < 24 Jam	%	100	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	49	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati	%	71,42	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	%	42,85	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas	%	71,42	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	71,4	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	71,42	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di Wilker Balkesmas Klaten			
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang	%	57,14	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71,42	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	71,42	
	Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71,42	
	Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	70	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa	%	91	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten	%	91	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di	%	91	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Balkesmas wilker Magelang			
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati	%	91	
	Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang	%	91,3	
	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	42,85	
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	
	Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	
	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	85	
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	
	Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular	%	60	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan	Kabupaten/Kota	35	
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	Sertifikat	4	
	Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66,7	
	Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Dinas Kesehatan
	Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70	
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	0	
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	88	
	Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	98	
	Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	34	
	Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	70	
	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	30	
	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	%	20	
	Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	91	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Dinas Kesehatan
	Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	67	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	17,71	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	85	
	Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	
	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	
	Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	51,43	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	%	50	
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	71	
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	71,42	
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	71,42	
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	%	71,42	
	Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	%	71,42	
	Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan	%	58	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dengan Balabkes PAK			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo	%	100	
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	
	Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	
	Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Progo Bogowonto Luk Ulo			
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	
	Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	
	Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	82,8	
	Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	20,4	
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	62	
	Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	44,03	
	Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	
	Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	
	Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy			
	Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,25	
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	
	Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses layak air minum perdesaan	%	81,55	
	Persentase akses layak air minum perkotaan	%	92,15	
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	89,39	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	92,8	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	13,3	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	13,3	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	97,63	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	95,49	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	90,6	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	94,92	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	79,53	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	95,33	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92,99	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	95,39	
	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,52	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	43,65	
	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39,07	
	Persentase panjang jalan yang dileger	%	99,71	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81,74	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	91,89	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	91,49	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	86,07	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88,82	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	84,13	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92,66	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	84,24	
	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	92,92	
	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	85,32	
	Persentase pengendalian mutu	%	88,61	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pelaksanaan jasa konstruksi			
	Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	
	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	16,54	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
	Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	21,98	
	Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%	60,14	
	Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	%	76,95	
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	75,13	
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	
	Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	7,39	
	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	11,84	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	17,5	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	23,37	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	%	0,06	
	Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum	%	3,94	
	Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%	100	
	Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	%	100	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	
	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	
	Persentase penurunan risiko bencana	%	1	
	Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	25,74	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Dinas Sosial
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	3,28	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,14	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,11	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,11	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,18	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,1	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,17	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	0,14	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelayanan Sosial Dharma Putera			
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,06	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,09	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,13	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo	%	0,12	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,18	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,17	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,06	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,13	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,08	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,13	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,12	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,22	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,14	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,07	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	0,07	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelayanan Sosial Suko Mulyo			
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,18	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,06	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,11	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,17	
	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,1	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0,23	
	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1,46	
	Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan	%	100	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Dinas Sosial
	Persentase korban Bencana Alam dan	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sosial yang mendapatkan penanganan			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Dinas Sosial
	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	28,57	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	3,25	
	Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	5,68	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	0	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	0	
	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	29,39	
	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	0,74	
	Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%	0	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	24,24	
	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	0	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	87,56	
	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	46,62	
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	90,56	
	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	16,11	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	0	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	6,42	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	15	
	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,7	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%	35	
	Persentase penyelenggaraan program kualitas	%	35	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	keluarga berbasis pemenuhan hak anak			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi	%	15	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	94,28	
	Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	20	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	15	
	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	12,46	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Dinas Ketahanan Pangan
	Angka Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	92,3	
	CV harga pangan strategis (beras)	%	4,9	
	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	3731	
	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	0,61	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
	Prosentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Dinas Ketahanan Pangan
	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	
	Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan	%	80	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8,57	
	Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100	
	Persentase pengujian kualitas air	%	100	
	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	1,91	
	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,14	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	74,87	
	Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader	%	17,14	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya			
	Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	50	
	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase sampah yang dikelola	%	80	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el	%	95	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95%	%	92	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependuduka

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				n dan Pencatatan Sipil
	Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	75	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
PROGRAM PENATAAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	87,01	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	86	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	2,85	
	Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa	%	14,61	
	Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	100	
	Presentase fasilitasi regulasi daerah	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang berkaitan dengan Desa			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa	%	70,43	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	2,62	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	25	
	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%	19,44	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	29,5	
	Unmeetneed KB	%	12,89	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	96,25	
	Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	25	
	Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	90,5	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Dinas Perhubungan
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,03	
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	31,92	
	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	58,33	
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	24,48	
	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	8,67	
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	49,91	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	40,88	
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	50,97	
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	78,71	
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	82,72	
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	65,49	
	Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	87,65	
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	43,75	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	35	
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	21,88	
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	19,23	
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	20,69	
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	53,85	
	Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	21,62	
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	28,57	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	37,5	
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	66,96	
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait	%	47,01	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	angkutan di perairan yang berijin			
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				Dinas Perhubungan
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	15,73	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	%	78	
	Persentase badan publik yang terbuka	%	92	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	70	
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi	%	70	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi	%	66	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat	%	23,5	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase SDM KUMKM yang terampil	%	82	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas	%	18	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase Usaha Mikro menuju kecil	%	12,59	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Persentase Usaha Kecil menuju Menengah	%	23	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	%	100	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	%	8	
	Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha	%	20	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	92	
	Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	
	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	94	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	80	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	64,06	
	Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	13,04	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	13,89	
	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	43,33	
	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Ketersediaan data sektoral	%	95	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80	%	66,67	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	%	88,75	
	Presentase ragam budaya terlayani	%	2,9	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Presentase jenis seni tradisi terlayani	%	6,2	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	1,6	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase status cagar budaya	%	19,9	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	Angka	89,15	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%	85,18	
	Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%	0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	80	
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%	80	
	Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%	80	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	%	79	
	Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	%	92,78	
	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	85	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	2,5	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	1	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	1	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	0,5	
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	5	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	0,1	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	63,64	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	72,73	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	72,73	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90,91	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,1	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	%	100	
	Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	2	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0,2	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	%	100	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	
	Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp	%	40	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	2	
	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan	%	2	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	69,57	
	Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	56	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	11530429	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	Persentase Kota Kreatif	%	5,71	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	50,69	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	3819014	
	Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100	
	Persentase Penambahan Jumlah Alsintan	%	1,98	
	Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan	%	5	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	usaha tani di Jawa Tengah			
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil	%	2,5	
	Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan	%	1	
	Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%	10,8	
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	3	
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	1,5	
	Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	1,5	
	Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	1,5	
	Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%	3,1	
	Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%	2,9	
	Persentase peningkatan produksi ternak	%	1	
	Persentase penyaluran pupuk subsidi	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	%	0,5	
	Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	1	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase penurunan pemotongan betina produktif	%	10	
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	
	Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT)	%	0,15	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	7	
	Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	14	
	Persentase peningkatan	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kapasitas SDM pertanian			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH	%	0,91	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I	%	1,18	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II	%	1,33	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III	%	1,21	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV	%	1,53	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX	%	1,96	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V	%	1,19	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI	%	1,57	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII	%	3,01	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII	%	1,37	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X	%	1,84	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI	%	1,28	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ditangani di CDK Wil VIII			
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X	%	100	
	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	7,28	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I	%	1,85	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II	%	1,85	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III	%	1,44	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV	%	1,85	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX	%	1,85	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V	%	2,26	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang	%	2,26	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berkelanjutan di CDK Wil VI			
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII	%	2,26	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII	%	1,44	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X	%	1,44	
	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI	%	1,44	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	efektif di CDK Wil IX			
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII	%	100	
	Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil X	%	100	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden	%	0,09	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	%	0,14	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ditangani di CDK Wil IX			
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X	%	100	
	Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	20	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I	%	2,4	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II	%	1,6	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III	%	1,6	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV	%	1,6	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX	%	1,6	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V	%	2,4	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI	%	1,6	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII	%	2,4	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII	%	1,6	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X	%	1,6	
	Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI	%	1,6	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase jumlah DAS yang tertangani	%	5	
	Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	17,46	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	
	Persentase pengambilan air tanah	%	55,48	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12,54	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0,6	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5,33	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14,74	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,16	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,25	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,89	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3,29	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,1	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,97	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4,17	
	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8,43	
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase Good Mining Practice	%	43,5	
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria	%	3,2	
	Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan	%	5,97	
	Persentase good mining practice Wilayah Merapi	%	2,99	
	Persentase good mining practice	%	3,41	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Wilayah Semarang Demak			
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan	%	3,41	
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah	%	3,41	
	Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara	%	2,77	
	Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu	%	2,99	
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan	%	5,33	
	Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara	%	4,69	
	Persentase good mining practice Wilayah Solo	%	2,56	
	Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	2,77	
	Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	29144	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e	503,78	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	300,64	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e	989,02	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e	5014,16	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e	89	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e	229	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e	784,93	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e	347	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e	19959	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e	211,55	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e	293,19	
	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e	298,83	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	29,7	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2,06	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	3,86	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	2,98	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1,45	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	3,39	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2,21	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	1,62	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1,51	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	4,02	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	3,66	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	1,59	
	Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,36	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	7	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	0,19	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	12	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai ekspor non migas	Juta US$	7076	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	4	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	4,17	
	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	5	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	8	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,31	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,17	
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	3	
	Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	1,5	
	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	70	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	
	Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,18	
	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,18	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan	%	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi			
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				Sekretariat Daerah
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	85,36	
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	85,71	
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	77,14	
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	81,58	
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	29,27	
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	91,84	
	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	73,17	
	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	73,65	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				Sekretariat Daerah
	Efektivitas kerjasama daerah	%	90	
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan	%	90	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	umum yang tindaklanjuti			
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	90	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				Sekretariat Daerah
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	90	
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	90	
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	40	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				Sekretariat Daerah
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	95	
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	95	
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	95	
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	95	
PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
	Nilai kemandirian BLUD	%	50	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang	%	75	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	diusulkan sebagai kebijakan			
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	95	
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	90	
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	75	
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	80	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	93	
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	90	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Sekretariat Daerah
	Capaian Pelaksanaan APBD	%	98	
	Capaian Pelaksanaan APBN	%	95	
	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	80	
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	83	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	
SEKRETARIAT DPRD				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI				Sekretariat DPRD
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	%	100	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA	%	95	
	Persentase Layanan Bagian Humas	%	95	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan	%	90	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	90	
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang	%	90	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup			
	Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	90	
	Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian	%	90	
KEUANGAN				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	1	
	Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	
	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	
	Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	
	Persentase realisasi serapan APBD	%	92	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	70	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	%	8	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	%	8	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	%	8	
	Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	%	8	
	Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%	95	
	Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	%	90	
	Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	%	7,28	
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%	6,35	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	8,56	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	7,16	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	%	6	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	%	6	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	8,28	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	%	4,39	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	4,1	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	%	4,34	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	7,31	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	%	4,52	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	6,6	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	6,4	
	Persentase peningkatan	%	4,64	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal			
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	%	4,39	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	%	6,47	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	%	6	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	8,45	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	4,58	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	7,98	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	6	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	%	8,34	
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	%	8,57	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	%	8,97	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB	%	8,7	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UPPD Kabupaten Sukoharjo			
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	%	7,82	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	8,39	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8,98	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	6,55	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	%	8,46	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	%	6,95	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	%	6	
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	%	5,52	
	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	%	5,66	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	%	5,3	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	%	7,59	
	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	%	6,85	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah	%	-0,83	
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	%	21,15	
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	%	13,26	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-8,48	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	%	0,63	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	%	49,04	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	%	38,06	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	%	14,47	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	%	1,73	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	%	14,48	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	%	26,32	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	%	21,78	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	%	19	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	%	32,44	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	%	27,04	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	%	25,97	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	%	10,96	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	%	10	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	%	22,62	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	%	18,26	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	%	160,36	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	%	11,2	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	%	38,28	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	%	13,3	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	%	21,43	
	Persentase peningkatan	%	16,14	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang			
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	%	-53,33	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5,29	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	%	10,14	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	%	1,76	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	%	32,18	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	%	2,1	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	%	42,86	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	%	8,91	
	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	%	1,61	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	%	76,92	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	%	2,55	
	Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Tegal	%	0	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	%	8	
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%	4,52	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	22,91	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	8,04	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	%	25,26	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	%	-1,21	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	12,62	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	%	18,41	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	8,71	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	%	8,42	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	8,69	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	%	12,52	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	14,23	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	8,54	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	%	16,46	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	%	4,87	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	%	-0,92	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	%	15,54	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	%	2,34	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	28,09	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	16,86	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-1,83	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	-6,58	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	%	-3,22	
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	%	-3,29	
	Persentase peningkatan	%	6,26	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen			
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	15,08	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	%	41,55	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	9,25	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-4,41	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10,22	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	%	-56,06	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	%	-29,65	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	%	-15,72	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	%	2,67	
	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	%	1,96	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	%	-0,6	
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	%	-8,16	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	%	-31,27	
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	%	1,36	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	0,82	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	%	0	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	%	0	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	%	6,49	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	%	8,91	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	%	9,16	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	%	1,4	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	%	0,86	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	%	3	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	%	1,41	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	%	0,46	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	%	11,15	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	%	1	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	%	9,84	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	%	1,62	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	%	1,35	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	%	-26,09	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	%	2,49	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	%	10	
	Persentase peningkatan	%	1,11	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga			
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	%	6,5	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	%	2,03	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	%	2,02	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	%	9,18	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	2,19	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	%	1,76	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	%	3,68	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	%	1,72	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10,95	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada	%	7,27	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UPPD Kota Magelang			
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	%	1,29	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	%	1,09	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	%	2,74	
	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	%	3,4	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	%	7,38	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	%	9,94	
	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	%	14,29	
KEPEGAWAIAN				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	
	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	80	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Presentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	
	Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	80	
	Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	80	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3,5	
	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	
	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	79	
	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	80	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang	%	20	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	operasional bidang ekonomi dan industri			
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	20	
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	20	
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	84	
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	84	
	Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	84	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG				
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				Badan Penghubung
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	100	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan	%	85	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Akuntabilitas Keuangan Daerah			
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	
	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	85	
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	85	
	Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	75	
	Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	
	Persentase Nilai MCP korsupgah	%	85	
	Persentase Penerapan MR di OPD	%	10	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,14	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Politik Bidang	Nilai	3,1	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kesatuan Bangsa dan Politik			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,92	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,23	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,7	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dalam pentahapan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 adalah peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM. Tahap keempat ini menjadi sangat penting untuk memantapkan langkah Jawa Tengah dalam mencapai target pembangunan jangka menengah menjelang berakhirnya periode pembangunan daerah jangka menengah di tahun 2023. Sehingga semua sektor dan prioritas pembangunan diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKPD 2022 mensinergikan seluruh pelaku pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi.

Prioritas pembangunan tahun 2022 mengikuti prinsip *money follow priority programme* dan *programme follow result*, serta berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dokumen RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, serta pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2022. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 ini dapat tercapai sehingga mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan komitmen dan peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

RKPD 2022
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

BUKU II

SCAN ME

DAFTAR ISI

A. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah 1

1. Capaian Indikator Kinerja Utama 1

2. Indikator Kinerja Daerah 2

B. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program 22

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 22

1. Pendidikan 22

2. Kesehatan 35

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 46

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 55

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Politik 56

6. Sosial 59

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 62

1. Tenaga Kerja 62

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 65

5. Pangan 66

6. Pertanahan 67

7. Lingkungan Hidup 68

8. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 69

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 72

9. Perhubungan 74

10. Komunikasi dan Informatika 78

11. Koperasi dan UKM 78

12. Penanaman Modal 81

13. Kepemudaan dan Olahraga 83

14. Statistik 84

15. Persandian 85

16. Kebudayaan 86

17. Perpustakaan 87

18. Kearsipan 88

III. Urusan Pilihan 89

1. Perikanan dan Kelautan 89

2. Pariwisata 93

3. Pertanian 94

4. Kehutanan 98

5. Energi dan Sumber Daya Mineral 102
6. Perdagangan 108
7. Perindustrian 109
8. Transmigrasi 111
IV. Penunjang Pemerintahan 112
1. Perencanaan 112
2. Keuangan 114
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 132
4. Penelitian dan Pengembangan 135
5. Pengawasan 135
6. Fungsi Lainnya 137

DAFTAR TABEL

Tabel A. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah 1
Tabel A. 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020..... 2
Tabel A. 3 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 5
Tabel A. 4 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 21
Tabel B.I. 1 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan 22
Tabel B.I. 2 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan 35
Tabel B.I. 3 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... 46
Tabel B.I. 4 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 55
Tabel B.I. 5 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... 57
Tabel B.I. 6 Capaian Kinerja Urusan Sosial 59
Tabel B.II. 1 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja 62
Tabel B.II. 2 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 65
Tabel B.II. 3 Capaian Kinerja Urusan Pangan 66
Tabel B.II. 4 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 68
Tabel B.II. 5 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 68
Tabel B.II. 6 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70
Tabel B.II. 7 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 71
Tabel B.II. 8 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 73
Tabel B.II. 9 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 74
Tabel B.II. 10 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika..... 78
Tabel B.II. 11 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM.....79
Tabel B.II. 12 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal 81
Tabel B.II. 13 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga..... 83
Tabel B.II. 14 Capaian Kinerja Urusan Statistik 85
Tabel B.II. 15 Capaian Kinerja Urusan Persandian 85
Tabel B.II. 16 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 86
Tabel B.II. 17 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan 87
Tabel B.II. 18 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 88
Tabel B.III. 1 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan 89
Tabel B.III. 2 Capaian Kinerja Pariwisata 93
Tabel B.III. 3 Capaian Kinerja Urusan Pertanian..... 94

Tabel B.III. 4 Capaian Kinerja Kehutanan 98
Tabel B.III. 5 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ... 103
Tabel B.III. 6 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan 108
Tabel B.III. 7 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 109
Tabel B.III. 8 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi 111
Tabel B.IV. 1 Capaian Kinerja Perencanaan 112
Tabel B.IV. 2 Capaian Kinerja Keuangan 113
Tabel B.IV. 3 Capaian Kinerja Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 132
Tabel B.IV. 4 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan 135
Tabel B.IV. 5 Capaian Kinerja Pengawasan 135
Tabel B.IV. 6 Capaian Kinerja Fungsi Lainnya 137

A. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

Tabel A. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisa-si Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(2)
1	Persentase Penurunan Konflik SARA	15	15,38	15	15,38	15,38	102,53	●	Setda
2	Indeks Reformasi Birokrasi	80	76,99	77	84,93	84,93	106,16	●	Setda
3	Angka Kemiskinan	7,48-6,48	10,58	13,40-12,30	11,84 (Sept 2020)	11,84 (Sept 2020)	41,71	▶	Setda
4	Indeks Gini	0,30	0,358	0,37	0,359 (Sept 2020)	0,359 (Sept 2020)	80,33	▶	Setda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00	4,49	5,88-6,75	6,48 (Agst 2020)	6,48 (Agst 2020)	38,00	▶	Setda
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,6-6,0	5,41	2,3-3,5	-3,34 (y-o-y)	-2,65 (c-o-c)	-47,32	▼	Setda
7	Inflasi	3,0±1	2,81	3,0 ± 1	1,56 (Des 2020)	1,56 (Des 2020)	148,00	●	Setda
8	PDRB per kapita	45,35	39,24	40,30	38,6	38,6	85,12	▶	Setda
9	Indeks *Williamson*	0,56	0,619	0,59	NA	NA	NA	NA	Setda
10	Nilai Tukar Petani	103,15	106,00	102,42	101,49 (Des 2020)	101,49	98,39	▶	Setda
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73	71,73	71,98	71,78	71,78	98,33	▶	Setda
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,25	91,89	89	92,18	92,18	99,92	▶	Setda
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,26	66,88	66,87	66,87	67,37	100,16	●	DLHK

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan tabel capaian diatas Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berjumlah 13 indikator. IKU RPJMD Provinsi Jawa Tengah diantaranya terdapat gambaran umum kondisi makro di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 7 indikator yang analisisnya dapat dilihat pada BAB Gambaran Umum Kondisi Makro Daerah terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Nilai Tukar Petani dan Angka Kemiskinan. Capaian indikator Persentase Penurunan Konflik SARA, Indeks Reformasi Birokrasi Inflasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berstatus tercapai, dan indikator PDRB Perkapita berstatus akan tercapai serta Untuk Indeks Williamson, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan masih menunggu data rilis.

2. Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Tabel A. 2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1	Angka Kemiskinan	7,48-6,48	10,58	13,40-12,30	11,84 (Sept 2020)	11,84 (Sept 2020)	41,71	▶	Setda
2	Indeks Gini	0,3	0,358	0,37	0,359 (Sept 2020)	0,359 (Sept 2020)	80,33	▶	Setda
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,6-6,0	5,41	2,3-3,5	-3,34 (y-o-y)	-2,65 (c-o-c)	-47,32	▼	Setda
4	Inflasi	3,0±1	2,81	3,0 ± 1	1,56 (Des 2020)	1,56 (Des 2020)	148,00	●	Setda
5	PDRB per kapita	45,35	39,24	40,30	38,6	38,6	85,12	▶	Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73	71,73	71,98	71,78	71,78	98,33		Setda
7	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	9,17	8,99	11,38-10,44	10,57 (Sept 2020)	10,57 (Sept 2020)	84,73		Setda
8	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	11,97	12,26	15,54-14,25	13,20 (Sept 2020)	13,20 (Sept 2020)	89,72		Setda
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4	4,49	5,88-6,75	6,48 (Agst 2020)	6,48 (Agst 2020)	38,00		Setda
10	Indeks Williamson	0,56	0,619	0,59	NA	NA	NA	NA	Setda
11	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,1	1,36	1,09	2,48	2,48	80,00		Setda
12	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	5,65	5,19	2,41	-3,74	-3,74	-66,19		Setda
13	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dan Jasa	5,9	5,98	1,58	-3,80	-3,80	-64,41		Setda
14	Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata pada PAD	3,2	12,47	3,15	2,99	2,99	93,43		Setda
15	Rata-rata Lama Sekolah	7,45	7,53	7,65	7,69	7,69	103,22		Setda
16	Harapan Lama Sekolah	13,17	12,68	12,74	12,7	12,7	96,43		Setda
17	Angka Harapan Hidup	74,1	74,23	74,28	74,37	74,37	100,36		Setda
18	Pertumbuhan Investasi	10	0,39	4-5	-5,8	-5,8	-58		Setda
19	Persentase Tenaga Kerja Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah Yang Bekerja Kurang Dari 15 Jam Per Minggu	5,5	7,38	5,65	7,95 (TW III 2020)	7,95	144,55		Setda
20	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	523,15	374,9	478,76	396,87 (TW III 2020)	396,87	75,86		Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Angka Partisipasi Sekolah jenjang Menengah Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	61,75	59,85	61	60,92 (TW III 2020)	60,92	98,66	▶	Setda
22	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah Dengan Keluhan Kesehatan	29,75	35,47	30,5	30,47 (TW III 2020)	30,47	97,58	▶	Setda
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,25	91,89	92,06	NA	NA	NA	NA	Setda
24	Nilai Tukar Petani	103,15	106,00	102,42	101,49 (Des 2020)	101,49	98,39	▶	Setda

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berjumlah 24 indikator. Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya terdapat gambaran umum kondisi makro di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 7 indikator yang analisisnya dapat dilihat pada BAB Gambaran Umum Kondisi Makro Daerah terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Nilai Tukar Petani dan Angka Kemiskinan. Untuk 18 Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, 2 indikator yaitu Persentase penduduk miskin perkotaan dan Persentase penduduk miskin pedesaan merupakan bagian dari indikator Angka Kemiskinan.

Berdasarkan tabel capaian Kinerja Pemerintah Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat diatas dapat diuraikan bahwa terdapat 4 indikator tercapai, 15 indikator akan tercapai, 4 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator masih menunggu data rilis (belum tersedia data).

Tabel A. 3
Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	**Aspek Pelayanan Umum**								
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	PENDIDIKAN								
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	6,79	12,68	12,62	12,92	12,92	9,72		Dindikbud
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB Sesuai Standar	80,43	77,98	78,14	83,48	83,48	103,79		Dindikbud
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/ SLB	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	87,50		Dindikbud
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB Memenuhi Kualifikasi Akademik	91,55	89,50	97,44	98,85	98,85	107,97		Dindikbud
	KESEHATAN								
5	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	90	86.7	85	85,55	85,55	95,06		RSUD Tugurejo
6	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	98,17	98,38	98,08	92,07	92,07	93,79		RSJD Surakarta
7	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100	99,59	90	99,31	99,31	99,31		RSJD Amino Gondohu-tomo
8	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	95	83,30	80	82,30	82,30	86,63		RSUD Kelet Donorejo
9	AKI	81	76.93	85,5	98,6	98,6	78,27		Dinkes
10	AKB	7,8	8.22	8,1	7,79	7,79	100,13		Dinkes
11	AKABA	10,43	9.63	10,45	8,99	8,99	113,81		Dinkes
12	Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan	72	80.72	57	84,29	84,29	117,81		Dinkes

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengendalian Penyakit Menular								
13	Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	60	69.47	52	65,5	65,5	109,17		Dinkes
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Atau Berpotensi Bencana Provinsi	100	100	100	100	100	100,00		Dinkes
15	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	84	82,14	80	81,43	81,43	96,94		RSUD Moewardi
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	87,67	88	87,59	89,6	89,6	102,20		RSUD Margono
17	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100	90,71	80	92,03	92,03	92,03		RSJD Soedjarwadi
18	Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan	69	46	45	57	57	53,85		Dinkes
19	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	0,32	0,2	0,2	0,19	0,19	59,38		Dinkes
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
20	Persentase Panjang Jalan provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor Baik	44,24	38,41	38,79	39,68	39,68	113,67		Dinas BMCK
21	Persentase Akses Aman Air Minum Perkotaan	94,15	86,82	88,15	88,23	88,23	40,80		Dinas BMCK
22	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan	92,50	90,69	90,73	90,73	90,73	38,97		Dinas BMCK

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Dan Bangunan Pelengkap Baik Serta Persentase Panjang Jembatan Kondisi Baik								
23	Persentase Akses Aman Air Minum Perdesaan	83,30	76,71	78,05	81,98	81,98	84,91		Dinas BMCK
24	Persentase Jumlah Bantuan Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah	15,23	11,17	11,37	11,37	11,37	24,02		Dinas BMCK
25	Tingkat Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	67,69	62,6	63,87	63,27	63,27	29,84		Pusdataru
26	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	56,62	53,45	54,24	53,47	53,47	20,25		Pusdataru
27	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	78,75	71,75	73,5	73,06	73,06	34,07		Pusdataru
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
28	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	49,83	61,43	71,03	38,22	38,22	130,38		Disperakim
29	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	34,16	6,48	5,95	11,24	11,24	32,90		Disperakim
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
30	Persentase Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	90	88,41	81	88,61	88,61	98,46		Kesbangpol
31	Persentase Masyarakat yang	90	87,48	81	88,02	88,02	97,80		Kesbangpol

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Paham Terhadap Politik								
32	Persentase Kabupaten/Kota yang Kondusif	100	100	100	100	100	100,00		BPBD
33	Indeks ketahanan Daerah	3,6	3,52	3,54	3,54	3,54	98,33		BPBD
34	Persentase Penambahan Kapasitas PB di Wilayah Rawan Bencana	50	10,06	10	10,71	20,77	41,54		BPBD
35	Persentase Penambahan Kapasitas Relawan TRC/Pemangku Kepentingan PB	25	5,5	5	5,1	10,6	42,4		BPBD
36	Persentase Pemulihan Pasca Bencana Yang Terealisasi	100	100	100	100	100	100		Satpol PP
37	Persentase Kecukupan Kebutuhan Dasar Dan Peralatan Masyarakat Terdampak Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100		BPBD
	SOSIAL								
38	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	97,63	0,7	0,95	0,95	0,95	0,97		Dinsos
39	Persentase PSKS yang Mendapatkan Penguatan Yang Melaksanakan UKS	44,83	6,88	13,75	11,99	11,99	26,75		Dinsos
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	TENAGA KERJA								
40	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	71,01	70,27	17	37,07	37,07	52,20		Disnaker-trans
41	Persentase Penyelesaian Perselisihan	96	92,53	86	91,43	91,43	95,24		Disnaker-trans

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Hubungan Industrial								
42	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	54,62	56,88	24,86	55,01	55,01	100,71		Disnaker-trans
43	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang Kompeten	8,19	7,16	3,96	11,08	11,08	135,29		Disnaker-trans
44	Persentase Pengangguran yang Ditangani	28,55	25,91	6,8	10,10	10,10	35,38		Disnaker-trans
45	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	82,97	94,43	94,06	91,92	91,92	72,183		Disnaker-trans
46	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	68	56,02	40	40,05	40,05	58,90		Disnaker-trans
47	Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	87,77	93,16	87,26	96,56	96,56	110,01		Disnaker-trans
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,2	74,03	75,14	NA	NA	NA	NA	DP3AKB-DDKB
49	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	100	91.43	85.71	91,43	91,43	91,43		DP3AKB-DDKB
50	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8,0	8,25	8,29	8,99	8,99	88,60		DP3AKB-DDKB
51	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	2,18	2.23	2.24	2,23	2,23	97,71		DP3AKB-DDKB
52	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja	34,3	34.28	34.21	34,31	34,28	99,94		DP3AKB-DDKB

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Afirmatif Pemenuhan Hak Anak	34,29	54.28	25.71	54,28	54,28	158,30		DP3AKB-DDKB
54	Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8,02	7.78	8.13	8,49	2,29	350,22		DP3AKB-DDKB
	PANGAN								
55	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,8	89,61	87,72	87,1	87,1	98,09		Dishanpan
56	PPH Ketersediaan	83,5	85,2	82,75	82,27	82,27	98,53		Dishanpan
57	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	2.150	2.151	2.150	2048	2048	95,26		Dishanpan
58	Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	57	61,83	57	59,9	59,9	105,09		Dishanpan
	PERTANAHAN								
59	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	100	108,91	100	199,72	199,72	199,72		Disperakim
	LINGKUNGAN HIDUP								
60	Indeks Kualitas Air	50,07	50,47	49,17	50,52	50,52	100,90		DLHK
61	Indeks Kualitas udara	85,11	84,81	84,71	84,73	84,73	99,55		DLHK
62	Indeks Pencemaran Air	3,45	3,41	3,45	3,40	3,40	101,47		DLHK
63	Indeks Pencemar SO_2 dan NO_2	0,2	0,20	0,20	0,2	0,2	100		DLHK
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
64	Cakupan Masyarakat yang Terlayani Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100,00		Dispermas-desdukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
65	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	20,35	34,49	38,46	48,57	48,57	238,67		Dispermas-desdukcapil
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB								
66	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	76	73.48	75.1	73,26	73,26	96,39		DP3AKB-DDKB
67	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	19,64	22	21.14	22,25	22,25	6,351		DP3AKB-DDKB
	PERHUBUNGAN								
68	Persentase Layanan Jaringan Distribusi Transportasi	60,38	35,99	37,84	37,84	37,84	62,67		Dishub
69	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi	51,45	9,26	12,19	12,85	12,85	24,98		Dishub
70	Persentase Operasional Angkutan Umum Aglomerasi yang Nyaman dan Handal	66,67	33,67	40,00	40	40	60,00		Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
71	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	3,3	3,41	2,94	3,47	3,47	105,15		Diskominfo
72	Indeks Domain Tata Kelola SPBE.	2,82	3,71	2,51	3,71	3,71	131,56		Diskominfo
73	Indeks Domain Layanan SPBE.	3,6	4,06	3,2	4,67	4,67	129,72		Diskominfo
	KOPERASI DAN UKM								

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
74	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	29,68	76,31	8,57	-2,58	-2,58	-8,72		Dinkop
75	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	29,95	56,90	18,79	-2,79	-2,79	-9,43		Dinkop
	PENANAMAN MODAL								
76	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,1	90	89,28	89,28	99,20		DPMPTSP
77	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	100	125,47	100	202	202	202		DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
78	Indeks Pembangunan Pemuda	50,35	54,5	50,25	54,5	54,5	107,86		Dinporapar
79	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,65	0,55	0,60	0,6	0,6	92,31		Dinporapar
	STATISTIK								
80	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	75,9	60,00	30,36	176,26	176,26	248,26		Diskominfo
	PERSANDIAN								
81	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	3	2,9	1	2,9	2,9	96,67		Diskominfo
	KEBUDAYAAN								
82	Persentase Jenis Seni Budaya yang Terlayani	6,82	3,8	4	4,94	4,94	72,43		Dindikbud
	PERPUSTAKAAN								
83	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	100	24,19	48	46,94	46,94	46,94		Dinas Arpus
	KEARSIPAN								
84	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang Terintegrasi	100	21,27	44	44	44	44,00		Dinas Arpus
	URUSAN PILIHAN								

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
85	Produksi Perikanan	1.042.610,71	1.008.721,49	1.010.738,93	1.013.951,06	1.013.951,06	100,32		DKP
86	Angka Konsumsi Ikan	33,67	33,71	33,85	33,71	33,71	100,12		DKP
	PARIWISATA								
87	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	3,25	3,21	3,19	2,99	2,99	92		Dinporapar
	PERTANIAN								
88	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Padi)	58.587.320	9.655.654	9.703.932	9.581.911	29.737.548	50,76		Distanbun
89	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Jagung)	18.448.802	3.459.646	3.675.020	3.766.962	10.641.514	57,68		Distanbun
90	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kedelai)	536.251	64.334	67.591	38.537	269.066	50,18		Distanbun
91	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Cabe Besar)	1.088.141	164.906	209.232	158.321	495.023	45,49		Distanbun
92	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	2.860.080	481.890	550.276	562.630	1.490.106	52,10		Distanbun

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perkebunan (Bawang Merah)								
93	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Tebu)	14.817.560	2.894.884.	2.860.511	2.854.351	8.629.998	58,24		Distanbun
94	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kelapa)	829.495	168.717	169.132	168.805	495.824	59,77		Distanbun
95	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dan Perkebunan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Kopi)	107.780	23.927	21.556	24.065	70.376	65,30		Distanbun
96	Jumlah Produksi Daging	375.382.386	412.717.813	321.831.952	403.725.408	403.725.408	107,55		Disnakkeswan
97	Jumlah Produksi Susu	101.866.620	103.568.464	98.049.998	103.439.376	103.439.376	101,54		Disnakkeswan
98	Jumlah Produksi Telur	325.083.370	319.487.816	281.234.242	335.367.125	335.367.125	103,16		Disnakkeswan
	KEHUTANAN								
99	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66,76	65,73	51,09	51,13	51,13	76,59		DLHK
100	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	0,43	0,46	0,43	0,48	0,48	111,63		DLHK
101	Luas Tutupan Lahan (LTV)	16.555,86	15.323,18	10.168,66	10.222,57	10.222,57	61,75		DLHK
102	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	0,47	-2,49	0,47	2,68	2,68	570,21		DLHK
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
103	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	1	1,17	1	1,28	1,28	128,00		Dinas ESDM

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
104	Persentase Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Dalam Bauran Energi	15,96	11,69	11,6	11,89	11,89	74,50	▶	Dinas ESDM
105	Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	67	66	65,5	66,4	66,4	99,10	▶	Dinas ESDM
106	Indeks Ketersediaan Air Tanah	2,99	3,08	3,03	3,05	3,05	102,01	●	Dinas ESDM
	PERDAGANGAN								
107	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	8,64	5,98	1,58	-3,80	-3,80	-43,98	▼	Disperindag
	PERINDUSTRIAN								
108	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5,85	5,19	2,41	-3,74	-3,74	-63,93	▼	Disperindag
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
109	Persentase Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Berkualitas	90	90	90	92,19	92,19	102,43	●	Bappeda
110	Persentase Konsistensi , Keselarasan dan Ketercapaian Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah	90	90	90	94,38	94,38	104,87	●	Bappeda
	KEUANGAN								
111	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	8,59	3,87	0,46	-0,07	-0,07	-0,79	▼	Bapenda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
112	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	10,37	13,41	-20,1	0,017	0,017	0,16		Bapenda
113	Persentase Pemanfaatan Aset	72,5	63	65	70,23	70,23	96,87		BPKAD
114	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100	100	100,00		BPKAD
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
115	Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	100	100	100	100	100	100,00		BKD
116	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi	100	100	100	100	100	100,00		BKD
117	Persentase ASN yang Tersertifikasi Kompetensi	35,08	35,22	35,03	35,42	35,42	100,97		BPSDMP
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
118	Persentase Hasil Kelitbanganiptekin Yang Sesuai Dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90	90	90	90	90	100,00		Bappeda
	PENGAWASAN								
119	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	3	NA	3	3	3	100,00		Inspektorat
120	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	3,5	3,18	3,2	3,16	3,16	90,29		Inspektorat
	FUNGSI LAINNYA								
121	Persentase Kebijakan yang Efektif	84	93,02	80	81	81	96,43		Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
122	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	84	86,36	75	82,47	82,47	98,18		Setda
123	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	79	75,63	76	77,5	77,5	98,1		Setda
124	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang Terealisasi	85	100	85	100	100	117,65		Setda
125	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Terealisasi	85	100	85	100	100	117,65		Setda
126	Persentase Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Efektif	90	71	75	70	70	77,78		Setda
127	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Direalisasikan	85	85,71	80	80	80	94,12		Setda
128	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terealiasi	96	83,05	80	85	85	88,54		Setda
129	Persentase Usulan Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum yang Terealisasi	94	100	93	100	100	106,38		Setda
130	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang Terealisasi	94	100	87	87	87	92,55		Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
131	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	85	81	75	99,47	99,47	117,02		Setda
132	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan di Kabupaten/Kota	85	96,60	82	99	99	116,47		Setda
133	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	84	95,63	81	85,13	85,13	101,35		Setda
134	Persentase Efektivitas Rekomendasi Hasil Kajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	94	100	91	100	100	106,38		Setda
135	Peningkatan Persentase Produk Hukum Daerah yang Diinformasikan	94	100	91	100	100	106,38		Setda
136	Persentase Efektivitas Implementasi Kebijakan Bidang Hukum	94	100	91	100	100	106,38		Setda
137	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	31	24,78	29	36,1	36,1	116,45		Setda
138	presentase UPP yang Memperoleh Nilai IKM Baik	100	92,63	70	93,22	93,22	93,22		Setda
139	Persentase Pemenuhan Sasaran dan Area Perubahan RB yang Nilainya Telah Mencapai B	92	75	78	83,67	83,67	90,95		Setda
140	Persentase Kabupaten/Kota yang Meningkat Indeks RB nya	85	40	50	30	30	35,29		Setda
141	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan	96	100	70	70	70	72,92		Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam								
142	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	88,46	70	70	70	82,35		Setda
143	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	95	87,50	70	89	89	93,68		Setda
144	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	70	96,93	30	32	32	45,71		Setda
145	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang Dievaluasi	85	85,71	71	100	100	117,65		Setda
146	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang Dievaluasi	96	75	70	80	80	83,33		Setda
147	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang Dievaluasi Pelaksanaan Fungsinya	100	100	80	100	100	100,00		Setda
148	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dievaluasi	85	85,41	80	83,33	83,33	98,04		Setda
149	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang	100	90	80	100	100	100,00		Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Reali-sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perekonomian yang Dievaluasi								
150	Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100,00	●	Setda
151	Persentase Tertib Pelaksanaan Otonomi Daerah Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kapasitas Daerah, Serta Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100	100	100	100	100	100,00	●	Setda
152	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan	79	75,63	76	77,5	77,5	98,10	▶	Setda
153	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85	82,25	82	83	83	97,65	▶	Setda
154	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	75	71,07	72	88,18	88,18	117,57	●	Setwan

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Berdasarkan tabel capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Aspek pelayanan umum dapat diuraikan jumlah Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Aspek pelayanan umum sebanyak 154 indikator dengan rincian 64 indikator tercapai,

75 indikator akan tercapai, 14 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator belum terisi data.

Tabel A. 4
Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	**Aspek Daya Saing**								
1	Persentase penurunan konflik SARA	15	15,38	15,00	15,38	15,38	102,53	●	
2	Indeks Toleransi	76,6	72,5	74,48	72,50	72,50	94,65	▶	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	80	76,99	77,00	84,93	84,93	106,16	●	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	82,54	82,70	83,94	83,94	95,39	▶	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,24	3,85	2,88	4,2	4,2	129,63	●	
6	Nilai SAKIP	85	81,56	82	81,56	81,56	95,95	▶	
7	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,5	3,50*)	3,47	NA	NA	NA	NA	
8	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	29	24,8	28,00	31,84	31,84	109,79	●	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,26	66,88	66,87	67,37	67,37	100,16	●	
10	Indeks Kualitas Air	50,07	50,47	49,17	50,52	50,52	100,90	●	
11	Indeks Kualitas Udara	85,11	84,81	84,71	84,73	84,73	99,55	▶	
12	Indeks Tutupan Lahan	66,76	65,73	51,09	51,13	51,13	76,59	▶	
13	Persentase tindak pidana yang tertangani	90	80,98	83,00	84,49	84,49	93,88	▶	
14	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	NA	NA	NA	NA	
15	Indeks Sistem Merit	0,71	0,70	0,70	0,7	0,7	98,59	▶	
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	3,6	3,52	3,54	3,54	3,54	98,33	▶	

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Keterangan :

: Tercapai (Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD)

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD)

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan tabel capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Aspek Daya Saing dapat diuraikan jumlah indikator Kinerja Pemerintah Daerah Aspek Daya Saing sebanyak 16 indikator dengan rincian 6 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai dan 2 indikator belum terisi data.

B. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 177 indikator kinerja.

Tabel B.I. 1
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pembinaan Pendidikan Khusus**								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	97,97	97,90	97,88	98,11	98,11	100,14	●	Bidang Pembinaan Diksus
2.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	81,13	81,83	82,58	87,84	87,84	108,27	●	Bidang Pembinaan Diksus
3.	APK SLB	67,14	65,91	66,11	84,37	84,37	125,66	●	Bidang Pembinaan Diksus
4.	Disparitas Prestasi SLB	0,65	0,63	0,95	0,45	0,45	144,44	●	Bidang Pembinaan Diksus
5.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	81,42	87,50	87,50	89,72	89,72	110,19	●	Cabang Dinas Pendidikan I
6.	APK SLB	65,54	168,35	168,85	219,63	219,63	335,11	●	Cabang Dinas Pendidikan I
7.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	96,71	98,04	96,62	98,1	98,1	101,44	●	Cabang Dinas Pendidikan I
8.	Disparitas Prestasi SLB	7,41	0,00	7,71	0,00	0,00	100,00	●	Cabang Dinas Pendidikan I

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	Disparitas Prestasi SLB	0,02	0,00	0,32	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan II
10.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,71	98,10	98,62	98,66	98,66	99,95		Cabang Dinas Pendidikan II
11.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	87,95	85,07	85,07	98,59	98,59	112,10		Cabang Dinas Pendidikan II
12.	APK SLB	74,01	31,60	31,70	40,36	40,36	54,53		Cabang Dinas Pendidikan II
13.	Disparitas Prestasi SLB	0,06	0,00	0,36	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan III
14.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	78,81	82,80	82,80	84,94	84,94	107,78		Cabang Dinas Pendidikan III
15.	APK SLB	49,09	71,30	71,51	91,71	91,71	186,82		Cabang Dinas Pendidikan III
16.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	97,81	98,63	97,72	98,51	98,51	100,72		Cabang Dinas Pendidikan III
17.	APK SLB	64,11	45,60	45,74	62,35	62,35	97,25		Cabang Dinas Pendidikan IV
18.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	75,77	70,97	70,97	80,85	80,85	106,70		Cabang Dinas Pendidikan IV
19.	Disparitas Prestasi SLB	0,01	0,00	0,30	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan IV
20.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,91	99,22	98,82	99,32	99,32	100,41		Cabang Dinas Pendidikan IV
21.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	76,77	85,07	85,87	94,51	94,51	123,11		Cabang Dinas Pendidikan V
22.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	96,61	97,30	96,52	97,35	97,35	100,77		Cabang Dinas Pendidikan V
23.	Disparitas Prestasi SLB	0,28	1,00	0,58	1,00	1,00	28,00		Cabang Dinas Pendidikan V
24.	APK SLB	71,64	114,62	114,96	138,83	138,83	193,79		Cabang Dinas Pendidikan V

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	85,50	80,12	80,12	87,27	87,27	102,07		Cabang Dinas Pendidikan VI
26.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	97,78	96,67	97,69	97,79	97,79	100,01		Cabang Dinas Pendidikan VI
27.	Disparitas prestasi SLB	0,15	1,33	0,45	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VI
28.	APK SLB	88,94	111,63	111,97	141,42	141,42	159,01		Cabang Dinas Pendidikan VI
29.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	79,80	85,71	85,71	86,30	86,30	108,15		Cabang Dinas Pendidikan VII
30.	APK SLB	61,08	187,34	187,90	251,96	251,96	412,51		Cabang Dinas Pendidikan VII
31.	Disparitas prestasi SLB	0,14	1,50	0,44	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VII
32.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,96	99,47	98,87	99	99	100,04		Cabang Dinas Pendidikan VII
33.	Disparitas Prestasi SLB	0,11	0,50	0,41	1,17	1,17	9,40		Cabang Dinas Pendidikan VIII
34.	APK SLB	70,09	57,01	57,18	66,67	66,67	95,12		Cabang Dinas Pendidikan VIII
35.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	97,67	98,48	97,58	97,61	97,61	99,94		Cabang Dinas Pendidikan VIII
36.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	80,49	79,07	79,07	80,69	80,69	100,25		Cabang Dinas Pendidikan VIII
37.	APK SLB	66,26	48,15	48,30	64,36	64,36	97,13		Cabang Dinas Pendidikan IX
38.	Disparitas Prestasi SLB	0,16	0,00	0,46	0,5	0,5	32,00		Cabang Dinas Pendidikan IX

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	81,65	76,26	79,00	81,86	81,86	100,26		Cabang Dinas Pendidikan IX
40.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,88	96,25	98,79	98,92	98,92	100,04		Cabang Dinas Pendidikan IX
41.	Disparitas Prestasi SLB	0,02	1,00	0,32	1,00	1,00	2,00		Cabang Dinas Pendidikan X
42.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	69,57	64,91	64,91	89,11	89,11	128,09		Cabang Dinas Pendidikan X
43.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,06	97,76	97,97	98,08	98,08	100,02		Cabang Dinas Pendidikan X
44.	APK SLB	41,65	41,49	41,62	54,05	54,05	129,77		Cabang Dinas Pendidikan X
45.	Disparitas Prestasi SLB	0,10	0,00	0,30	0	0	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XI
46.	APK SLB	64,94	24,88	24,95	31,68	31,68	48,78		Cabang Dinas Pendidikan XI
47.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	97,18	82,35	84,62	91,67	91,67	94,33		Cabang Dinas Pendidikan XI
48.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,83	97,40	98,74	98,91	98,91	100,08		Cabang Dinas Pendidikan XI
49.	APK SLB	66,88	41,31	41,43	56,13	56,13	83,93		Cabang Dinas Pendidikan XII
50.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	96,69	96,57	96,60	96,7	96,7	100,01		Cabang Dinas Pendidikan XII
51.	Disparitas Prestasi SLB	0,02	0,00	0,32	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XII
52.	Persentase Prasarana Sarana SLB Sesuai Standar	84,68	86,29	86,52	92,17	92,17	108,85		Cabang Dinas Pendidikan XII
53.	Persentase Serapan Kurikulum SLB	98,01	97,89	97,92	98,08	98,08	100,07		Cabang Dinas Pendidikan XIII
54.	Persentase Prasarana	75,03	73,00	73,53	81,08	81,08	108,06		Cabang Dinas

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sarana SLB Sesuai Standar								Pendidikan XIII
55.	Disparitas Prestasi SLB	0,06	0,67	0,36	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XIII
56.	APK SLB	83,23	73,86	74,08	97,27	97,27	116,87		Cabang Dinas Pendidikan XIII
II.	**Pembinaan SMK**								Bidang Pembinaan SMK
57.	Disparitas Prestasi SMK	1,02	1,03	1,04	0,55	0,55	185,45		Bidang Pembinaan SMK
58.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	86,54	85,23	85,39	88,78	88,78	102,59		Bidang Pembinaan SMK
59.	APK SMK	49,46	54,44	54,62	54,88	54,88	110,96		Bidang Pembinaan SMK
60.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	80,81	98,97	98,97	99,00	99,00	122,51		BPTIK Dindikbud Kelas A
61.	Persentase SMK Memanfaatkan Sumber Belajar Berbasis IT	76,44	51,08	50,54	57,92	57,92	75,77		Cabang Dinas Pendidikan I
62.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	77,06	85,23	85,30	85,30	85,30	110,69		Cabang Dinas Pendidikan I
63.	APK SMK	49,88	46,78	46,92	46,53	46,53	93,28		Cabang Dinas Pendidikan I
64.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	82,11	100,00	100,00	100,00	100,00	121,79		Cabang Dinas Pendidikan I
65.	Disparitas Prestasi SMK	2,55	0,50	2,70	0,5	0,5	510,00		Cabang Dinas Pendidikan I
66.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	77,86	80,77	81,10	87,16	87,16	111,94		Cabang Dinas Pendidikan II
67.	Disparitas Prestasi SMK	0,81	0,50	0,84	0,5	0,5	162,00		Cabang Dinas Pendidikan II
68.	APK SMK	33,73	34,52	42,09	42,71	42,71	126,62		Cabang Dinas Pendidikan II
69.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	78,66	99,38	83,7	99,39	99,39	126,35		Cabang Dinas Pendidikan II
70.	APK SMK	37,33	49,52	49,67	49,99	49,99	133,91		Cabang Dinas

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pendidikan III
71.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	80,42	99,59	99,59	99,61	99,61	123,86		Cabang Dinas Pendidikan III
72.	Disparitas Prestasi SMK	1,81	1,33	1,96	1,33	1,33	136,09		Cabang Dinas Pendidikan III
73.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	76,62	83,48	83,70	90,16	90,16	117,67		Cabang Dinas Pendidikan IV
74.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	69,38	78,31	78,56	85,84	85,84	123,72		Cabang Dinas Pendidikan IV
75.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	75,69	98,00	98,00	98,1	98,1	129,61		Cabang Dinas Pendidikan IV
76.	Disparitas Prestasi SMK	0,31	0,50	0,34	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan IV
77.	APK SMK	42,92	43,42	43,63	43,77	43,77	101,98		Cabang Dinas Pendidikan IV
78.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	81,69	99,00	99,00	99,03	99,03	121,23		Cabang Dinas Pendidikan V
79.	APK SMK	59,24	58,35	58,53	58,61	58,61	98,94		Cabang Dinas Pendidikan V
80.	Disparitas Prestasi SMK	0,87	0,67	0,90	0,67	0,67	129,85		Cabang Dinas Pendidikan V
81.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	77,27	84,77	84,84	89,78	89,78	116,19		Cabang Dinas Pendidikan V
82.	Disparitas Prestasi SMK	0,72	2,67	0,75	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VI
83.	APK SMK	51,62	55,97	56,17	55,97	55,97	108,43		Cabang Dinas Pendidikan VI
84.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	90,09	87,52	87,84	88,22	88,22	97,92		Cabang Dinas Pendidikan VI
85.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	81,02	99,42	99,42	99,44	99,44	122,74		Cabang Dinas Pendidikan VI

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
86.	Disparitas Prestasi SMK	1,78	3,50	1,93	1,00	1,00	178,00		Cabang Dinas Pendidikan VII
87.	APK SMK	73,19	63,43	63,43	63,13	63,13	86,25		Cabang Dinas Pendidikan VII
88.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	84,25	85,94	86,04	92,28	92,28	109,53		Cabang Dinas Pendidikan VII
89.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	82,22	100,00	100,00	100	100	121,62		Cabang Dinas Pendidikan VII
90.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	84,95	99,37	99,37	99,37	99,37	116,97		Cabang Dinas Pendidikan VIII
91.	Disparitas Prestasi SMK	0,81	1,50	0,84	1,00	1,00	81,00		Cabang Dinas Pendidikan VIII
92.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	73,99	88,27	88,34	88,57	88,57	119,71		Cabang Dinas Pendidikan VIII
93.	APK SMK	55,52	50,36	51,51	50,53	50,53	91,01		Cabang Dinas Pendidikan VIII
94.	Disparitas Prestasi SMK	0,96	1,17	0,99	1	1	96,00		Cabang Dinas Pendidikan IX
95.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	84,68	88,55	88,61	89,97	89,97	106,25		Cabang Dinas Pendidikan IX
96.	APK SMK	44,71	53,83	54,10	53,88	53,88	120,51		Cabang Dinas Pendidikan IX
97.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	83,16	97,98	97,98	97,98	97,98	117,82		Cabang Dinas Pendidikan IX
98.	APK SMK	56,97	65,32	65,51	66,15	66,15	116,11		Cabang Dinas Pendidikan X
99.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	78,98	84,97	85,14	88,21	88,21	111,69		Cabang Dinas Pendidikan X
100.	Disparitas Prestasi SMK	0,84	0,50	0,87	0,50	0,50	168,00		Cabang Dinas Pendidikan X

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
101.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	81,45	98,42	98,42	98,46	98,46	120,88		Cabang Dinas Pendidikan X
102.	APK SMK	55,64	64,35	64,54	65,61	65,61	117,92		Cabang Dinas Pendidikan XI
103.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	75,04	84,96	85,18	89,11	89,11	118,75		Cabang Dinas Pendidikan XI
104.	Disparitas Prestasi SMK	0,23	0,50	0,26	0,5	0,5	46,00		Cabang Dinas Pendidikan XI
105.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	78,13	97,63	97,63	97,66	97,66	125,00		Cabang Dinas Pendidikan XI
106.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	80,10	98,89	98,89	98,9	98,9	123,47		Cabang Dinas Pendidikan XII
107.	APK SMK	37,78	58,29	58,47	59,71	59,71	158,05		Cabang Dinas Pendidikan XII
108.	Disparitas Prestasi SMK	0,59	2,00	0,60	1,33	1,33	44,36		Cabang Dinas Pendidikan XII
109.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	80,16	85,49	85,66	90,63	90,63	113,06		Cabang Dinas Pendidikan XII
110.	Disparitas Prestasi SMK	0,51	0,67	0,54	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XIII
111.	Persentase Serapan Kurikulum SMK	80,10	100,00	100,00	100,00	100,00	124,84		Cabang Dinas Pendidikan XIII
112.	APK SMK	43,58	58,80	58,98	59,83	59,83	137,29		Cabang Dinas Pendidikan XIII
113.	Persentase Prasarana Sarana SMK Sesuai Standar	78,77	85,23	84,44	84,45	84,45	107,21		Cabang Dinas Pendidikan XIII
III.	**Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan**								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114.	Persentase Guru SMK Memenuhi Kualifikasi Akademik	84,79	99,90	99,90	99,91	99,91	117,83		Bidang Ketenagaan Dikbud

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
115.	Persentase Guru SLB Memenuhi Kualifikasi Akademik	90,51	100,00	100,00	100,00	100,00	110,49		Bidang Ketenagaan Dikbud
116.	Rasio Guru SMA Dengan Rombongan Belajar SMA	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	87,50		Bidang Ketenagaan Dikbud
117.	Rasio Guru SLB Dengan Rombongan Belajar SLB	0,50	0,26	0,26	0,26	0,26	52,00		Bidang Ketenagaan Dikbud
118.	Rasio Guru SMK Dengan Rombongan Belajar SMK	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	87,50		Bidang Ketenagaan Dikbud
119.	Persentase Guru SMA Memenuhi Kualifikasi Akademik	99,35	99,93	99,93	99,94	99,94	100,59		Bidang Ketenagaan Dikbud
IV.	**Pembinaan SMA**								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
120.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	98,98	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Pembinaan SMA
121.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	73,61	66,45	66,77	73,36	73,36	99,66		Bidang Pembinaan SMA
122.	APK SMA	28,36	28,59	28,68	29,11	29,11	102,64		Bidang Pembinaan SMA
123.	Disparitas Prestasi SMA	0,93	0,96	0,97	1,45	1,45	64,14		Bidang Pembinaan SMA
124.	Persentase SMA Memanfaatkan Sumber Belajar Berbasis IT	73,90	50,81	56,00	60,37	60,37	81,69		BPTIK Dindikbud Kelas A
125.	APK SMA	39,46	35,31	35,41	34,76	34,76	88,09		Cabang Dinas Pendidikan I
126.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	81,39	74,61	75,10	106,44	106,44	130,78		Cabang Dinas Pendidikan I
127.	Disparitas Prestasi SMA	3,62	3,50	3,66	6,5	6,5	55,69		Cabang Dinas Pendidikan I
128.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan I
129.	Disparitas Prestasi SMA	0,30	1,00	0,34	0,5	0,5	60,00		Cabang Dinas Pendidikan II

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
130.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	98,84	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan II
131.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	65,76	53,99	54,85	72,92	72,92	110,89		Cabang Dinas Pendidikan II
132.	APK SMA	19,05	31,22	31,37	31,43	31,43	164,99		Cabang Dinas Pendidikan II
133.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	67,48	59,57	60,00	63,78	63,78	94,52		Cabang Dinas Pendidikan III
134.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	99,25	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan III
135.	APK SMA	25,54	30,88	30,97	31,43	31,43	123,06		Cabang Dinas Pendidikan III
136.	Disparitas Prestasi SMA	1,44	3,33	1,48	0,67	0,67	214,93		Cabang Dinas Pendidikan III
137.	APK SMA	23,11	23,80	23,92	24,08	24,08	104,20		Cabang Dinas Pendidikan IV
138.	Disparitas Prestasi SMA	0,23	0,50	0,27	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan IV
139.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	71,45	62,87	63,74	65,44	65,44	91,59		Cabang Dinas Pendidikan IV
140.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan IV
141.	Disparitas Prestasi SMA	0,85	2,00	0,89	1,33	1,33	63,91		Cabang Dinas Pendidikan V
142.	APK SMA	35,36	33,42	33,52	34,37	34,37	97,20		Cabang Dinas Pendidikan V
143.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	98,65	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan V
144.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	71,49	65,24	65,35	65,95	65,95	92,25		Cabang Dinas Pendidikan V
145.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	99,05	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VI

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
146.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	70,20	63,54	64,16	71,48	71,48	101,82		Cabang Dinas Pendidikan VI
147.	Disparitas Prestasi SMA	0,11	1,33	0,15	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VI
148.	APK SMA	20,77	24,93	25,03	25,5	25,5	122,77		Cabang Dinas Pendidikan VI
149.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	76,74	74,38	74,38	73,42	73,42	95,67		Cabang Dinas Pendidikan VII
150.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VII
151.	Disparitas Prestasi SMA	0,83	1,00	0,85	0,5	0,5	166,00		Cabang Dinas Pendidikan VII
152.	APK SMA	51,79	45,24	45,24	46,44	46,44	89,67		Cabang Dinas Pendidikan VII
153.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	78,25	71,20	71,26	75,86	75,86	96,95		Cabang Dinas Pendidikan VIII
154.	APK SMA	30,82	29,08	29,16	29,44	29,44	95,52		Cabang Dinas Pendidikan VIII
155.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan VIII
156.	Disparitas Prestasi SMA	1,21	1,67	1,25	0,67	0,67	180,60		Cabang Dinas Pendidikan VIII
157.	APK SMA	20,55	21,76	21,87	22,84	22,84	111,14		Cabang Dinas Pendidikan IX
158.	Disparitas PRESTASi SMA	0,65	1,50	0,69	1,17	1,17	55,56		Cabang Dinas Pendidikan IX
159.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	66,32	61,02	61,31	76,69	76,69	115,64		Cabang Dinas Pendidikan IX
160.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	97,45	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pendidikan IX
161.	APK SMA	24,83	26,49	26,57	27,4	27,4	110,35		Cabang Dinas Pendidikan X
162.	Disparitas Prestasi SMA	1,51	1,50	1,55	1,5	1,5	100,67		Cabang Dinas Pendidikan X
163.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	68,03	60,05	60,11	62,37	62,37	91,68		Cabang Dinas Pendidikan X
164.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	98,94	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan X
165.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	98,45	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XI
166.	Disparitas Prestasi SMA	0,79	1,00	0,81	1,00	1,00	79,00		Cabang Dinas Pendidikan XI
167.	APK SMA	30,71	31,91	32,01	32,72	32,72	106,55		Cabang Dinas Pendidikan XI
168.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	83,68	71,18	71,66	74,28	74,28	88,77		Cabang Dinas Pendidikan XI
169.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	99,19	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XII
170.	Disparitas Prestasi SMA	0,27	1,33	0,31	0,00	0,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XII
171.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	74,16	68,95	68,95	69	69	93,04		Cabang Dinas Pendidikan XII
172.	APK SMA	19,88	21,82	21,89	22,12	22,12	111,27		Cabang Dinas Pendidikan XII
173.	Persentase Prasarana Sarana SMA Sesuai Standar	81,94	74,04	74,36	74,77	74,77	91,25		Cabang Dinas Pendidikan XIII
174.	APK SMA	26,77	30,83	30,92	31,16	31,16	116,40		Cabang Dinas Pendidikan XIII
175.	Persentase Serapan Kurikulum SMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Cabang Dinas Pendidikan XIII

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
176.	Disparitas Prestasi SMA	0,34	2,00	0,38	0,00	0,00	100,00	●	Cabang Dinas Pendidikan XIII
V,	**Manajemen Pelayanan Pendidikan**								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
177.	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pendidikan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan jumlah indikator urusan Urusan Pendidikan sebanyak 177 indikator dengan rincian 130 Indikator tercapai, 44 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras. Adapun Indikator perlu upaya keras yaitu disparitas prestasi SMA, SMK dan SLB disebabkan salah satu dari 2 kondisi yaitu : (1) Tidak ada perolehan prestasi dalam pelaksanaan keikutsertaan lomba/festival/kejuaraan atau (2) Terdapat gap yang cukup besar dalam perolehan prestasi antar kabupaten/kota dalam 1 wilayah cabang dinas tersebut.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 100 indikator kinerja.

Tabel B.I. 2
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
I.	**Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit**								**Dinas Kesehatan**
1.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM	52	65,00	43,00	65,70	65,70	191,33		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.	Persentase UCI Desa	99,96	99,96	99,95	99,95	99,95	100,01		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Penemuan dan Penurunan Kasus Penyakit Menular	74,30	94,14	65,70	88,57	88,57	182,49		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Respon Cepat Penanggulangan KLB/Bencana< 24 Jam	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang	52,00	40,00	42,85	43,00	43,00	82,69		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
6.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Penanggulangan KLB/bencana<24 Jam di Wilayah Balkesmas Semarang	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
7.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Penemuan dan	74,30	64,00	57,14	65,70	65,70	88,42		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
	Penurunan Kasus Penyakit Menular di wilayah Balkesmas Semarang								
8.	Persentase Kab./Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa	52	40,00	42,85	43,00	43,00	82,69		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
9.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Penanggulangan KLB/bencana<24 Jam di Wilayah Balkesmas Ambarawa	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
10.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Penemuan dan Penurunan Kasus Penyakit Menular di wilayah Balkesmas Ambarawa	74,30	64,00	57,14	65,70	65,70	88,43		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
11.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang	52	40,00	42,85	43,00	43,00	82,69		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
12.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Penanggulangan KLB/bencana<24 Jam di Wilayah Balkesmas Magelang	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
13.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Penemuan dan Penurunan Kasus Penyakit Menular di wilayah Balkesmas Magelang	74,30	64,00	57,14	65,70	65,70	88,43		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
14.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten	52	40,00	42,86	21,00	21,00	40,38		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
15.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Penanggulangan KLB/bencana<24 Jam di Wilayah Balkesmas Klaten	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
16.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Penemuan dan Penurunan Kasus Penyakit Menular	74,30	64,00	65,70	32,80	32,80	44,15		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
17.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM di wilayah Balkesmas Pati	52,00	40,00	28,57	29,00	29,00	55,77		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
18.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Penanggulangan KLB/bencana<24 Jam di Wilayah Balkesmas Pati	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
19.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Penemuan dan Penurunan Kasus Penyakit Menular	74,30	64,00	57,14	57,14	57,14	76,90		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
20.	Persentase Penanganan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran	100	17,00	57,00	57,00	57,00	57		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
II.	**Pelayanan Kesehatan**								
21.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	85	25	21,00	25,00	50,00	58,82		RSUD Dr. Moewardi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
22.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	66	66,00	35,00	35,00	35,00	53,03		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
23.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	80	71,87	73,00	100,00	100,00	125,00		RSUD Tugurejo
24.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	90	96,50	90,00	100,00	100,00	111,11		RSUD Tugurejo
25.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	100	62,50	85,00	85,00	85,00	85,00		RSUD Kelet Donorejo
26.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	100	13,00	20,00	20,00	33,00	33,00		RSUD Kelet Donorejo
27.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	100	12,01	95,00	100,00	100,00	100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
28.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	100	9,99	95,00	100,00	100,00	100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
29.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	95,00	97,06	75,00	100,00	100,00	105,26		RSJD Surakarta
30.	Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan	95,00	100,00	90,00	100,01	100,01	105,27		RSJD Surakarta
31.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
32.	Persentase Pemenuhan	100	36,80	55,00	55,00	55,00	55,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
	Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan								
33.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan	82	28,57	42,86	42,86	42,86	52,26		Bidang Pelayanan Kesehatan
34.	Cakupan Penduduk Miskin yang Mempunyai Jaminan Kesehatan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
35.	Persentase Kabupaten/Kota dengan 100% Fasilitas Kesehatan Primer, Rujukan dan Faskes Lain yang Terakreditasi	100	96,55	89,65	100,00	100,00	100,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
36.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai Ketentuan	34,00	17,00	23,00	23,00	23,00	67,64		Bidang Pelayanan Kesehatan
37.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan wilayah Balkesmas Semarang	82	28,57	42,86	42,86	42,86	52,26		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
38.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa	82	28,51	42,86	42,86	42,86	52,26		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
39.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan wilayah Balkesmas Magelang	82	22,00	42,86	42,80	42,80	52,20		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
40.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan wilayah Balkesmas Klaten	82	22,00	42,86	42,86	42,86	52,26		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
41.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan wilayah Balkesmas Pati	82	28,57	42,86	42,86	42,86	52,26		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
42.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan di BKIM	82	28,00	36,00	36,00	36,00	43,9		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
43.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	80	57,14	62,86	62,86	62,86	78,5		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
44.	Persentase Kabupaten/Kota dengan 100% Fasilitas Kesehatan Primer, Rujukan dan Faskes Lain yang Terakreditasi	100	14,29	89,65	100,00	100,00	1000		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
45.	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan di Balapkes PAK	82	22,00	42,86	42,86	42,86	52,26		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
III.	**Sumber Daya Kesehatan**								
46.	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	35,00	-	32,00	41,00	41,00	117,14		RSUD Dr. Moewardi
47.	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	40,00	-	10,00	18,71	18,71	46,78		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
48.	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	100,00	-	20,00	20,79	20,79	20,79		RSUD Tugurejo
49.	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	100,00	17,00	18,00	12,00	12,00	12,00		RSUD Kelet Donorejo
50.	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	70,00	73,38	30,00	21,09	21,09	30,13		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
51.	Persentase SDM Kesehatan dan	100,00	96,58	25,00	96,58	96,58	96,58		RSJD Surakarta

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
	Non Kesehatan yang Terlatih								
52.	Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	89,00	96,29	40,00	55,00	55,00	61,80		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
53.	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00		Bidang Sumber Daya Kesehatan
54.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku	100,00	47,90	57,00	58,84	58,84	58,84		Bidang Sumber Daya Kesehatan
55.	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Dikembangkan Kompetensinya	100,00	100,00	70,00	72,97	72,97	72,97		Bidang Sumber Daya Kesehatan
56.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang	100,00	42,00	57,00	57,00	57,00	57,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
57.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	Na	Na	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
58.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang	35,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Na	Na	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
59.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan	35,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Na	Na	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
	yang Berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten								
60.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Balkesmas Wilayah Pati	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	Na	Na	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
61.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku di BKIM	35,00	15,00	20,00	20,00	20,00	57,14		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
62.	Persentase Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Balapkes PAK	35,00	15,00	57,00	57,00	57,00	162		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
63.	Proporsi Pelatihan Kesehatan Sesuai Standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
IV.	**Kesehatan Masyarakat**								Dinas Kesehatan
64.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga Baik	100,00	42,00	57,00	57,00	57,00	57		Bidang Kesehatan Masyarakat
65.	Persentase Kab/Kota yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11%	45,70	71,42	71,42	71,42	71,42	156,2		Bidang Kesehatan Masyarakat
66.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita	80,00	74,29	62,86	62,86	62,86	78,5		Bidang Kesehatan Masyarakat
67.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Balkesmas Wil. Semarang	80,00	57,14	57,14	62,86	62,86	78,58		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
68.	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah	71,00	14,00	29,00	29,00	29,00	40,84		Balai Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
	Mencapai PHBS Tatanan Institusi Pendidikan Sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang								Wilayah Semarang
69.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Balkesmas Wil. Ambarawa	80,00	57,14	57,14	62,86	62,86	78,58		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
70.	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai PHBS Tatanan Institusi Pendidikan Sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa	71,00	14,00	28,57	29,00	29,00	40,85		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
71.	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai PHBS Tatanan Institusi Pendidikan Sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang	37,14	5,71	14.28	14,28	14,28	38,4		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
72.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Balkesmas Wil. Magelang	80,00	57,14	57,14	62,86	62,86	78,58		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
73.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Balkesmas Wil. Klaten	80,00	57,14	57,14	57,14	57,14	71,4		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
74.	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai PHBS Tatanan Institusi Pendidikan Sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten	37,14	5,71	29,00	29,00	29,00	78,0		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
75.	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai PHBS Tatanan Institusi Pendidikan Sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati	71,00	14,00	29,00	29,00	29,00	40,8		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
76.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Balkesmas Wil. Pati	80,00	57,14	43,00	43,00	43,00	53,75		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
77.	Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Mencapai PHBS Tatanan Institusi Pendidikan Sehat 5%	37,14	5,71	14,28	14,28	14,28	38,4		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
78.	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita di Balapkes PAK	80,00	57,14	62,86	62,86	62,86	78,5		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
V.	**Farmasi dan Perbekalan Kesehatan**								
79.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	8,42	-	40,00	21,71	21,71	257,84		RSUD Dr. Moewardi
80.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	27,00	17,00	20,00	25,00	25,00	92,59		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
81.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	30,00	33,33	30,00	30,00	30,00	100,00		RSUD Tugurejo
82.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	100,00	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84		RSUD Kelet Donorejo
83.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	100,00	100,00	100,00	100	100	100		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
84.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	100,00	100,00	95,00	100	100,00	100,00		RSJD Surakarta
85.	Persentase Kegiatan Pemenuhan Logistik	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
VI.	**Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**								
86.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi	70,00	48,68	50,00	58,17	58,17	83,10		RSUD Dr. Moewardi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
	dan Pemberdayaan Masyarakat								
87.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	13,78	15,00	25,57	25,57	25,57		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
88.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	100,00	21,78	20,00	15,42	37,2	37,2		RSUD Tugurejo
89.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	100,00	40,00	15,00	15,00	15,00	15,00		RSUD Kelet Donorejo
90.	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelayanan Kusta	100,00	30,00	20,00	14,28	44,28	44,28		RSUD Kelet Donorejo
91.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	100,00	53,30	25,00	37,67	37,67	37,67		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
92.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	95,00	100,00	80,00	140,96	140,96	148,38		RSJD Surakarta
93.	Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	100,00	5,00	7,54	35,27	35,27	35,27		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
VII.	**Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)**								
94.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	72,05	82,16	71,00	99,89	99,89	138,64		RSUD Dr. Moewardi
95.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	75,00	81,88	72,00	78,60	78,60	104,80		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
96.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	53,69	57,83	55,55	70,18	70,18	130,71		RSUD Tugurejo
97.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	100,00	72	82,00	72,00	72,00	72,00		RSUD Kelet Donorejo
98.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	39,00	40,60	32,00	46,00	46,00	117,95		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
99.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	35,00	21,97	30	36,45	36,45	104,14		RSJD Surakarta
100.	*Cost Recovery Rate* (CRR) *Total*	46,00	48,23	43	58,75	127,72	127,72		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Kesehatan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan jumlah indikator urusan Urusan Kesehatan sebanyak 100 indikator dengan rincian 35 indikator telah tercapai, 56 indikator akan tercapai, 5 indikator perlu upaya keras dan 4 indikator belum terisi data (Na).

Indikator yang perlu upaya keras antara lain :

1. Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Kelet dikarenakan tidak ada subsidi anggaran dari APBD Tahun 2020, sedangkan untuk anggaran dari BLUD hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- untuk 1 tahun pelaksanaan kegiatan ;
2. Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa, Magelang, Klaten, Pati dikarenakan kegiatan ini tidak dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet dikarenakan adanya pandemic COVID-19 sehingga *follow up* pasien kusta hanya dilaksanakan disekitar wilayah kerja saja.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 64 indikator kinerja.

Tabel B.I. 3
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan**								**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**
1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor Baik Bidang	40,13	36,06	36,34	37,16	37,16	92,60		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur								
2.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor Baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	47,68	40,79	41,23	42,27	42,27	88,65		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
II.	**Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi**								Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
3.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Tegal	88,43	87,13	87,14	87,14	87,14	98,54		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
4.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Tegal	86,09	83,37	83,47	83,47	83,47	96,96		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal
5.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Pekalongan	96,65	94,95	94,99	94,99	94,99	98,28		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
6.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Pekalongan	88,44	84,74	84,98	84,98	84,98	96,09		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
7.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Cilacap	91,75	90,71	90,73	90,73	90,73	98,89		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
8.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Cilacap	83,60	80,86	80,98	80,98	80,98	96,87		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
9.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Smg	97,89	96,38	96,42	96,42	96,42	98,50		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Semarang	85,46	82,78	83,00	83,00	83,00	97,12		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
11.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Magelang	93,60	90,74	90,91	90,91	90,91	97,13		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
12.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Magelang	92,40	90,79	90,83	90,83	90,83	98,30		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
13.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Wonosobo	97,87	96,14	96,18	96,18	96,18	98,27		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
14.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Wonosobo	94,85	91,73	91,92	91,92	91,92	96,91		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
15.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Pati	88,33	86,55	86,58	86,58	86,58	98,02		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
16.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Pati	93,77	90,13	90,29	90,29	90,29	96,29		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
17.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Baik BPJ Wilayah Purwodadi	84,41	81,82	81,88	81,88	81,88	97,00		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
18.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Purwodadi	91,13	86,34	86,65	86,65	86,65	95,08		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
19.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi	94,73	91,78	91,86	91,86	91,86	96,97		Balai Pengelolaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Permukaan Baik BPJ Wil Surakarta								Jalan Wilayah Surakarta.
20.	Persentase Panjang Jembatan Provinsi Kondisi Baik BPJ Wilayah Surakarta	96,05	89,91	90,38	90,38	90,38	94,10		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
III.	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**								Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
21.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebinamargaan	100,00	93,05	93,05	93,05	93,05	93,05		Balai Pengujian dan Peralatan
22.	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	100,00	69,99	77,50	90,56	90,56	90,56		Balai Pengujian dan Peralatan
IV.	**Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakarya-an**								Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
23.	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	100,00	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
24.	Persentase Database Jalan, Jembatan, dan Keciptakaryaan yang Termutakhirkan	100,00	100,00	33,33	33,33	33,33	33,33		Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
V.	**Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi**								Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
25.	Persentase Akses Air Minum Perkotaan	94,15	86,82	88,15	88,23	88,23	93,71		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
26.	Persentase Akses Sanitasi Air Limbah Domestik	91,50	89,57	90,60	90,72	90,72	99,15		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27.	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	83,30	76,71	78,05	81,98	81,98	98,42		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
VI.	**Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi**								Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
28.	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar	15,23	11,17	11,37	11,37	11,37	74,66		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
29.	Persentase Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	19,09	9,71	11,86	11,86	11,86	62,13		Balai Jasa Konstruksi
VII.	**Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku**								Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
30.	Persentase Kondisi Baik Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi	84,50	82,50	82,32	82,32	82,32	12,80		Bidang Irigasi dan Air Baku
31.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	65,80	61,80	61,39	61,39	61,39	10,18		Bidang Irigasi dan Air Baku
32.	Persentase Prasarana Sarana Air Baku yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100,00	100,00	20,83	20,83	20,83	20,83		Balai PSDA Pemali Comal
33.	Persentase Daerah Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100,00	100,00	87,33	87,33	87,33	87,33		Balai PSDA Pemali Comal
34.	Persentase Prasarana Sarana Air Baku yang Dipelihara	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00		Balai PSDA Bodri Kuto

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto								
35.	Persentase Daerah Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100,00	100,00	87,33	87,33	87,33	87,33		Balai PSDA Bodri Kuto
36.	Persentase Prasarana Sarana Air Baku yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100,00	100,00	64,38	64,38	64,38	64,38		Balai PSDA Serang Lusi Juana
37.	Persentase Daerah Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100,00	100,00	68,33	68,33	68,33	68,33		Balai PSDA Serang Lusi Juana
38.	Persentase Daerah Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100,00	100,00	53,47	53,47	53,47	53,47		Balai PSDA Bengawan Solo
39.	Persentase Prasarana Sarana Air Baku yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100,00	100,00	24,00	24,00	24,00	24,00		Balai PSDA Bengawan Solo
40.	Persentase Prasarana Sarana Air Baku yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
41.	Persentase Daerah Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100,00	100,00	32,14	32,14	32,14	32,14		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
42.	Persentase Daerah Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100,00	100,00	26,92	26,92	26,92	26,92		Balai PSDA Serayu Citanduy.
43.	Persentase Prasarana Sarana Air Baku yang Dipelihara di Wilayah Balai	100,00	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00		Balai PSDA Serayu Citanduy.

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PSDA Serayu Citanduy								
VII I.	**Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir**								Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
44.	Persentase Luasan Daerah Bebas Genangan Banjir	23,83	17,28	17,95	17,95	17,95	28,21		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
45.	Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik	52,36	52,20	52,21	52,21	52,21	25,00		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
46.	Persentase Darurat Banjir yang Tertangani di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100,00	100,00	85,71	85,71	85,71	85,71		Balai PSDA Pemali Comal
47.	Persentase Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100,00	100,00	32,50	32,50	32,50	32,50		Balai PSDA Pemali Comal
48.	Persentase Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100,00	100,00	72,06	72,06	72,06	72,06		Balai PSDA Bodri Kuto
49.	Persentase Darurat Banjir yang Tertangani di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100,00	100,00	78,95	78,95	78,95	78,95		Balai PSDA Bodri Kuto
50.	Persentase Darurat Banjir yang Tertangani di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	66,67		Balai PSDA Serang Lusi Juana
51.	Persentase Darurat Banjir yang Tertangani di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100,00	100,00	22,22	22,22	22,22	22,22		Balai PSDA Bengawan Solo
52.	Persentase Darurat Banjir yang Tertangani di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53.	Persentase Darurat Banjir yang Tertangani di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100,00	100,00	83,33	83.33	83,33	83,33		Balai PSDA Serayu Citanduy.
IX.	**Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA**								Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
54.	Persentase Perencanaan Teknis yang Ditindaklanjuti	100,00	21,38	23,27	23,27	23,27	3,48		Bidang Pengemba-ngan dan Pembinaan Teknis
X.	**Penyelenggara- an Penataan Ruang**								Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
55.	Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	80,00	72,00	73,53	73,53	73,53	35,30		Bidang Penataan Ruang
56.	Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Rekom Gub	100,00	21,42	33,00	33,00	33,00	21,84		Bidang Penataan Ruang
57.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	77,50	71,50	72,59	72,60	72,60	34,53		Bidang Penataan Ruang
58.	Persentase Rencana Tata Ruang Provinsi yang Tersusun	33,35	6,67	8,65	6,67	6,67	11,27		Bidang Penataan Ruang
59.	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100,00	100,00	28,57	28,57	28,57	28,57		Balai PSDA Pemali Comal
	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai PSDA Bodri Kuto

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Target 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
60.	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	▼	Balai PSDA Serang Lusi Juana
61.	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100,00	100,00	57,41	57,14	57,14	57,14	▶	Balai PSDA Bengawan Solo
62.	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100,00	100,00	33,33	33,33	33,33	33,33	▶	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
63.	Persentase Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Balai PSDA Serayu Citanduy.

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 64 indikator dengan rincian 2 indikator berstatus tercapai, 46 indikator berstatus akan tercapai, dan 16 indikator perlu upaya keras.

Pada sub Urusan Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebanyak 29 indikator dalam status akan tercapai.

Pada sub urusan Sumber Daya Air terdiri dari 25 indikator dimana 13 akan tercapai dan 12 perlu upaya keras akibat adanya kebijakan *refocusing* anggaran yang berdampak pada tidak adanya pekerjaan/pembangunan fisik serta berkurangnya cakupan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, air baku, sungai dan pantai. Di sisi lain juga adanya pembatasan intensitas koordinasi/pertemuan tatap muka yang berpengaruh pada realisasi fisik kegiatan.

Sedangkan pada sub urusan Penataan Ruang memiliki 10 indikator terdiri dari 2 tercapai, 4 akan tercapai dan 4 perlu upaya keras yang disebabkan

adanya perubahan regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja yang menghapus kewenangan Provinsi terkait penetapan perda Kawasan Strategis Provinsi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja 4 indikator kinerja.

Tabel B.I. 4
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pembangunan Perumahan**								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.	Persentase Rumah Layak Huni yang Disediakan	12,50	0,02	1,92	1,92	1,92	15,36	▼	Bidang Perumahan
2.	Persentase Rumah tidak Layak Huni yang Tertangani	37,24	4,89	6,58	7,06	7,06	18,96	▼	Bidang Perumahan
II.	**Penanganan Kawasan Permukiman**								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	32,95	4,32	4,21	7,49	7,49	22,73	▼	Bidang Kawasan Pemukiman
III.	**Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan**								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4.	Persentase Ketersediaan Kebijakan, Data dan Evaluasi Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai (Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD)

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD)

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan jumlah indikator urusan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebanyak 4 indikator dengan rincian 1 indikator telah tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase rumah layak huni yang disediakan disebabkan pengurangan *backlog* masih terkendala dalam integrasi program pembangunan Rusunawa dengan pengelola kawasan industri, pemerintah pusat, Kabupaten/Kota dan para pekerja. Namun demikian jika dilihat pada target Tujuan dan Sasaran maka indikator tersebut akan tercapai dengan memperhitungkan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Swasta.
2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni/RTLH yang tertangani disebabkan oleh adanya bantuan RTLH yang tidak dapat direalisasikan karena perubahan kondisi calon penerima yang sudah tidak sesuai lagi serta belum adanya kemampuan untuk membangun. Pada Tahun 2019 penanganan peningkatan kualitas RTLH melalui berbagai sumber pendanaan sebanyak 102.575 Unit, penangan RTLH Tahun 2020 dari berbagai sumber pendanaan sebanyak 75.230 Unit yang terdiri dari 38.781 unit ditangani oleh APBN, 10.298 unit ditangani APBD Provinsi Jawa Tengah, 22.883 unit ditangani oleh APBD Kabupaten/Kota, 1.818 unit ditangani oleh dana CSR dan 1.450 unit dari swadaya lainnya. Secara keseluruhan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 RTLH sudah tertangani sebanyak 242.358 unit.
3. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani telah sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Disperakim. Namun demikian, rendahnya tingkat capaian Tahun 2020 (tahun ke 2) dibanding akhir RPJMD disebabkan oleh penanganan permukiman kumuh akan difokuskan pada tahun ke 4 dan 5 dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Politik

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja.

Tabel B.I. 5
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan**								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Kewaspadaan Dan Deteksi Dini	90,00	88,73	81,00	89,29	89,29	99,21		Bidang Ideologi dan Kewaspada-an Nasional
2.	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Ideologi dan Kewaspada-an Nasional
3.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila Dan Wasbang	90,00	87,80	81,00	90,98	90,98	101,09		Bidang Ideologi dan Kewaspada-an Nasional
II.	**Program Penguatan Ketahanan Bangsa**								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Bangsa	90,00	88,70	81,00	85,57	85,57	95,08		Bidang Ketahanan Bangsa
III.	**Program Penguatan Politik Dalam Negeri**								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Aspek-Aspek IDI	90	87,49	81,00	88,02	88,02	97,80		Bidang Politik Dalam Negri
IV.	**Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah**								Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Persentase Penegakkan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100	100	17,89	30,84	30,84	30,84		Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
V.	**Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal**								Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisa-si Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Persentase Kabupaten/Kota Rawan Tramtib yang Kondusif	85	85	85,00	85	85	100,00	●	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
VI.	**Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**								Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	62,61	12,52	2,73	2,73	2,73	4,36	▼	Bidang Pembinaan Masyarakat
9.	Persentase Masyarakat Yang Meningkat Kepatuhan dan Ketaatannya Terhadap Tibumtranmas	56,98	10,70	2,03	2,03	2,03	3,56	▼	Bidang Pembinaan Masyarakat
VII.	**Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih**								Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Persentase Anggota Linmas Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	5,94	2,24	0,23	0,23	0,23	3,87	▼	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
VIII.	**Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**								Sekretariat BPBD
11.	Persentase Penurunan Risiko Bencana	8	2,00	1,00	2,00	4,00	50,00	▶	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
12.	Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Bidang Penanganan Darurat
13.	Persentase Rehab Rekon Pasca Bencana	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
14.	Persentase Pemenuhan Logistik Bencana	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Bidang Logistik dan Peralatan

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023

dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 14 indikator dengan rincian 6 indikator telah tercapai, 6 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator perlu upaya keras disebabkan adanya penundaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 31 indikator kinerja.

Tabel B.I. 6
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Rehabilitasi Sosial**								Dinas Sosial
1.	Persentase Penanganan PMKS Terlantar yang Membutuhkan Pelayanan Dasar di Dalam Panti	4,10	0,82	1,64	1,64	1,64	40,00	▶	Bidang Rehabilitasi Sosial
2.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,15	0,03	0,06	0,06	0,06	40,00	▶	Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo
3.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,16	0,05	0,06	0,06	0,06	37,50	▶	Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri
4.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,18	0,05	0,07	0,07	0,07	38,89	▶	Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya
5.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,22	0,04	0,09	0,09	0,09	40,91	▶	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu
6.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,13	0,03	0,05	0,05	0,05	38,46	▶	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring
7.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,13	0,03	0,05	0,05	0,05	38,46	▶	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede
8.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,16	0,03	0,06	0,06	0,06	37,50	▶	Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,11	0,02	0,04	0,04	0,04	36,36		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo
10.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,15	0,03	0,06	0,06	0,06	40,00		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan
11.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,21	0,04	0,08	0,08	0,08	38,10		Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama
12.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,23	0,07	0,09	0,09	0,09	39,13		Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha
13.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,17	0,05	0,07	0,07	0,07	41,18		Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera
14.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,14	0,03	0,06	0,06	0,06	42,86		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo
15.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,21	0,04	0,08	0,08	0,08	38,10		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata
16.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,09	0,02	0,04	0,04	0,04	44,44		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran
17.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,28	0,06	0,11	0,11	0,11	39,29		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo
18.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,07	0,02	0,03	0,03	0,03	42,86		Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu
19.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,18	0,04	0,07	0,07	0,07	38,89		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti
20.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,14	0,03	0,06	0,06	0,06	42,86		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,22	0,04	0,09	0,09	0,09	40,91		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojong bata
22.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,16	0,03	0,06	0,06	0,06	37,50		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi
23.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,23	0,05	0,09	0,09	0,09	39,13		Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
24.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,07	0,01	0,03	0,03	0,03	42,86		Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mera Demak
25.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,07	0,01	0,03	0,03	0,03	42,86		Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo Boyolali
26.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,08	0,02	0,03	0,03	0,03	37,50		Panti Pelayanan Sosial Anak Sukomulyo Tegal
27.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,12	0,02	0,05	0,05	0,05	41,67		Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso Salatiga
28.	Persentase Keberfungsian Sosial PMKS Dalam Panti	0,11	0,03	0,04	0,04	0,04	36,36		Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri Magelang
II.	**Penanganan Fakir Miskin**								Dinas Sosial
29.	Persentase Fakir Miskin yang Telah Tervalidasi	0,29	0,06	0,11	0,11	0,11	37,93		Bidang Penanganan Fakir Miskin
III.	**Perlindungan Dan Jaminan Sosial**								Dinas Sosial
30.	Persentase Penanganan Social Terhadap Korban Bencana dan PMKS Non Produktif	1,82	0,36	0,73	0,73	0,73	40,11		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
IV.	**Pemberdayaan Sosial**								Dinas Sosial
31.	Persentase PSKS Dapat Melaksanakan UKS	34,38	8,97	11,99	11,99	11,99	34,87		Bidang Pemberdayaan Sosial

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Sosial terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan jumlah indikator Urusan Sosial sebanyak 31 indikator dengan keseluruhan indikator akan tercapai.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja.

Tabel B.II. 1
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja**								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.	Persentase Kenaikan Pencari Kerja Dan Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	8,19	7,16	3,96	11,08	11,08	135,29	●	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
2.	Persentase Kenaikan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi	38,50	31,00	1,69	6,94	6,94	18,03	▼	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
3.	Persentase Kenaikan Perusahaan Yang Menerapkan Peningkatan Produktivitas	4,20	3,10	0,66	0,67	0,67	15,95	▼	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
4.	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja Tersertifikasi	2,25	1,00	0,10	0,11	0,11	4,89	▼	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
5.	Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri	1,12	1,44	1,33	2,97	2,97	265,18	●	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
6.	Persentase Kenaikan Pencari Kerja Yang	6,67	100,0 0	7,61	23,07	23,07	345,88	●	Balai Pelatihan Kerja dan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian								Transmigrasi Kelas A
7.	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Dilatih Peningkatan Produktivitas Atau Kewirausahaan	13,04	88,24	4,23	4,78	4,78	36,66		Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
8.	Persentase Kenaikan Pencari Kerja yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Jasa, Bahasa Asing, Budaya Dasar Dan Pekerjaan Migran	16,00	82,00	6,60	16,91	16,91	105,69		Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
II.	**Peningkatan Kesempatan Kerja**								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	71,01	69,10	17,00	37,07	37,07	52,20		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
10.	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Informal	68	56,02	40,00	40,05	40,05	58,90		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
III.	**Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Persentase Pekerja Buruh yang Menjadi Peserta BPJS ketenagakerjaan	87,70	93,16	87,26	96,56	96,56	110,10		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
12.	Persentase Perusahaan yang Menyusun Dan Melaksanakan Struktur Dan Skala Upah	36,00	15,02	15,65	15,65	15,65	43,47		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
13.	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang Terbentuk	47,61	46,27	44,66	47,59	47,59	99,96		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	24,15	23,73	23,05	24,29	24,29	100,58	●	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
15.	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	96,00	92,53	86,00	91,43	91,43	95,24	▶	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
IV.	**Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Persentase Penurunan Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan	82,97	94,43	94,06	91,92	91,92	110,79	●	Bidang Pengawasan Ketenaga-kerjaan WASNAKER
17.	Persentase Peningkatan Perusahaan Memiliki Kategori Baik Dalam Penerapan K3	26,14	25,45	25,29	30,56	30,56	36,83	▶	Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Tenaga Kerja sebanyak 17 indikator dengan rincian 7 indikator tercapai bahkan sudah melampui target akhir RPJMD, 7 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu upaya keras.

Indikator perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi disebabkan untuk meningkatkan jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi perlu dilakukan bimbingan teknis akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja, dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah lembaga yang akan diakreditasi;
2. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan yang berhenti beroperasi sementara yang

mengakibatkan perusahaan harus merumahkan karyawan bahkan melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasionalnya, sehingga saat ini sebagian besar perusahaan masih berkonsentrasi untuk pemulihan kondisi perusahaan dan keberlangsungan usaha;

3. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi disebabkan karena Pandemi COVID-19 dimana adanya *sosial distancing* menyebabkan berkurangnya tenaga kerja yang dilatih berkurang dan berkurangnya dukungan APBN.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja.

Tabel B.II. 2
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak**								
1.	Persentase Peningkatan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha Ekonomi	30,00	100	30,00	30,00	30,00	100,00	●	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.	Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya, Dan Tingkat Nindya	91,43	88,57	88,57	88,57	88,57	96,87	▶	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
3.	Persentase Data Dan Informasi PPPA yang Tersedia	100	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	▶	Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
I.	**Perlindungan Perempuan Dan Anak**								
4.	Rasio korban Kekerasan Terhadap Perempuan	5,64	5,89	5,81	5,75	5,75	101,03	●	Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	12,36	12,44	12,66	12,15	12,15	101,73	●	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan Jumlah indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak 5 Indikator yang terdiri dari 3 indikator tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

5. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja.

Tabel B.II. 3
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Ketahanan Pangan**								
1.	Ketersediaan Protein Pangan Beragam dan Berkualitas	107,80	107,77	87,80	87,97	87,97	81,60	▶	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2.	Ketersediaan Energi Pangan Beragam dan Berkualitas	4.020	4.023	3.730	3732,00	3732,00	92,84	▶	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
3.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	85	95,24	85,00	85,71	85,71	100,84	●	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
4.	CV Harga Pangan Strategis Beras	5	1,17	5,00	1,1	1,1	178,00	●	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Reali-sasi 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah	25	23,85	28,00	23,53	23,53	105,88	●	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
6.	CV Harga Pangan Strategis Cabai	40	25,10	43,00	49,3	49,3	76,75	▶	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
7.	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	100	100	100	100,00	100	100,00	●	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
8.	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat Kebutuhan Pangan	1	0,46	0,50	0,51	0,51	51,00	▶	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
9.	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	0,15	0,16	0,12	0,15	0,15	100,00	●	Bidang Konsumsi dan Penganekara-gaman Pangan
10.	Konsumsi Pangan Beras	97,80	95,90	98,80	88,8	88,8	90,80	▶	Bidang Konsumsi dan Penganekara-gaman Pangan
11.	Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur	87	96,20	84,00	90,6	90,6	104,14	●	Bidang Konsumsi dan Penganekarag-aman Pangan
12.	Konsumsi Kelompok Pangan Hewani	34	34,30	31,00	32,8	32,8	96,47	▶	Bidang Konsumsi dan Penganekara-gaman Pangan
13.	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	90	98,17	90.00	97	97	107,78	●	Bidang Keamanan Pangan
14.	Persentase Jaminan Mutu Pangan Yang Diterbitkan	80	95,43	80.00	85,15	85,15	106,44	●	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja urusan Pangan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Pangan sebanyak 14 Indikator dengan rincian 8 indikator telah tercapai, 6 indikator akan tercapai.

6. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja.

Tabel B.II. 4
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**								
1.	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	100	108,91	100,00	199,72	199,72	199,72	●	Bidang Pertanahan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja urusan Pertanahan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa Jumlah indikator urusan Pertanahan sebanyak 1 indikator dengan status telah tercapai.

7. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja.

Tabel B.II. 5
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan**								
1.	Persentase Sungai yang Meningkat Kualitasnya	10,00	5,00	2,04	5	5	50	▶	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Persentase Kabupaten/Kota yang Meningkat Kualitas Udara	8,57	5,71	2,33	5,71	5,71	66,63	▶	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
3.	Persentase Sungai yang Meningkat Kualitasnya	10	5,00	2,04	5	5	50	▶	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
4.	Persentase Pemantauan Kualitas Udara Ambien	100	100	100	100,00	100,00	100,00	●	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
II.	**Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas**								
5.	Persentase Rekomendasi Lingkungan Hidup	100	100,00	36,24	100	100	100	●	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengemba-ngan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Lingkungan Hidup sebanyak 5 indikator dengan rincian 2 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai.

8. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel B.II. 6
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan
dan PencatatanSipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Penataan Administrasi Kependudukan**								Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Dukcapil
1.	Cakupan OPD Provinsi/Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100	20,00	40,00	96	380,00	380,00	●	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
2.	Tingkat Partisipasi 0-18 Tahun Memiliki Akte Kelahiran	100	96,09	90,00	96	96,00	96,00	▶	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk
3.	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el per wajib KTP-el	100	99,25	90,00	99	99,00	99,00	▶	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021 ***(*) = Angka Realisasi LKPJ 2020***

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa Jumlah indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 indikator dengan rincian 1 indikator telah tercapai dan 2 indiaktor akan tercapai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 indikator kinerja.

Tabel B.II. 7
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa**								Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependuduk-an dan Catatan Sipil
1.	Persentase Rekomendasi Raperda/ Raperbup Yang Berkaitan Dengan Desa	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Penataan Desa
2.	Persentase Jumlah Desa Dengan Satgas Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Sosial Budaya Masyarakat	100	27,71	37,60	37,16	37,16	37,16		Bidang Penataan Desa
3.	Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	40,24	10,54	11,81	11,81	11,81	29,35		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
4.	Persentase Anggota BPD yang Meningkat Kapasitasnya	4,34	2,56	3,00	0,00	2,56	58,99		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
5.	Persentase Jumlah Rekomendasi Gubernur Terhadap Permohonan Persetujuan Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Untuk Kepentingan Umum	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
II.	**Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**								Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependuduk-an dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaan	100	34,25	42,47	53,45	53,45	53,45	▶	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
7.	Persentase desa Yang Mengembangkan BKAD	6,68	2,23	2,60	2,61	2,61	39,07	▶	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
III.	**Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat**								Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
8.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi	71,61	40,00	42,75	48,84	48,84	68,20	▶	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	3,55	2,15	2,22	2,50	2,50	70,42	▶	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 9 Indikator dengan rincian 2 indikator telah tercapai, 6 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator perlu upaya keras yaitu Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa disebabkan adanya penundaan fasilitasi kegiatan pengembangan Sistem Informasi Desa pada Tahun Anggaran 2020 dan dialihkan pada dukungan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja.

Tabel B.II. 8
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana**								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.	Persentase Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Memiliki Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	41,67	5,56	8,33	6,33	6,33	15,19		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
2.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp)	30,00	28,30	28,15	28,69	28,69	95,63		Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
3.	Unmetneed KB	10,75	13,03	13,10	12,90	12,90	80,00		Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
4.	Persentase Organisasi Masyarakat/Mitra Kerja Dalam Program Kb Tingkat Daerah Provinsi Yang Aktif	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat
II.	**Keluarga Sejahtera**								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5.	Persentase Kelompok Tribina Yang Aktif	96,30	96,13	93,00	99,01	99,01	102,81		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
6.	Persentase UPPKS yang aktif	90,20	90,57	88,00	96,59	96,59	107,08		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Persentase Ormas Dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga	100	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	▶	Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 7 Indikator dengan rincian 3 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator yang perlu upaya keras disebabkan adanya PERKA BKKBN No 3 Th 2020 tentang Kebijakan Pengendalian penduduk, tertuang dalam GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan), arahan untuk melakukan penyusunan sehingga fokus pada penyusunan GDPK tidak pada penyusunan kebijakan.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 indikator kinerja.

Tabel B.II. 9
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Perhubungan Darat**								Dinas Perhubungan
1.	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang	52,34	12,18	16,93	16,93	16,93	32,35	▶	Bidang Lalu Lintas
2.	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	50,00	10,00	20,00	20,00	20,00	40,00	▶	Bidang Lalu Lintas

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	76,92	15,38	30,77	38,46	38,46	50,00		Bidang Lalu Lintas
4.	Persentase Jumlah Abdi Yasa yang Memenuhi *Passing Grade* Pemahaman Keselamatan Jalan	18,52	3.89	3,89	3,89	3,89	21,00		Bidang Lalu Lintas
5.	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	5,68	4,69	4,72	4,72	4,72	83,10		Bidang Angkutan Jalan
6.	Persentase Pembaharuan Izin AKDP Yang Berbadan Hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	43,21	38,25	38,69	39,12	39,12	90,53		Bidang Angkutan Jalan
7.	Persentase Pembaharuan Izin AKDP Yang Berbadan Hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	66,43	63,99	64,23	64,47	64,47	97,05		Bidang Angkutan Jalan
8.	Persentase Trayek Angkutan Aglomerasi Dan Perintis	42,86	9,52	19,05	19,05	19,05	44,45		Bidang Angkutan Jalan
9.	Persentase Penumpang Masa Angkutan Lebaran Yang Menggunakan Angkutan Umum	94,45	84,87	84,87	82,53	82,53	87,38		Bidang Angkutan Jalan
10.	Persentase Terminal Bus Type B Sesuai Standar Pelayanan	43,75	10,94	10,94	10,94	10,94	25,01		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapi-an
11.	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang Di Perlintasan Sebidang Kereta Api	45,45	4,55	4,55	4,55	4,55	10,01		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapi-an
12.	Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Strategis	100,00	20	20,00	20,00	20,00	20,00		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapi an

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.	Persentase Pembaharuan Izin AKDP Yang Berbadan Hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	52,51	48,92	49,33	49,74	49,74	94,72		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
14.	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	31,25	6,25	12,50	12,50	12,50	40,00		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
15.	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	52,03	47,60	48,06	48,52	48,52	93,25		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
16.	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	62,50	12,50	25,00	31,25	31,25	50,00		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
17.	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang Berbadan Hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	79,53	77,36	77,63	77,81	77,81	97,84		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
18.	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	38,46	7,69	7,69	7,69	7,69	19,99		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
19.	Persentase Pembaharuan Izin AKDP yang Berbadan Hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	83,55	82,26	82,34	82,34	82,34	98,55		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20.	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	34,48	6,90	10,34	13,79	13,79	39,99	▶	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
21.	Persentase bus Angkutan Umum / Massal Berbasis Aglomerasi Di Kawasan Strategis Yang Beroperasi	34,85	17,26	27,36	27,36	27,36	78,51	▶	Balai Transportasi Jawa Tengah
II.	**Pengembangan Perhubungan Laut**								Dinas Perhubungan
22.	Persentase Perusahaan Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan Yang Berijin	43,28	37,13	38,99	43,28	43,28	100,00	●	Bidang Pelayaran
23.	Persentase Fasilitas Keselamatan Pelayaran Terpasang	75,00	12,50	12,50	12,50	12,50	16,67	▼	Bidang Pelayaran
24.	Persentase Penumpang Angkutan Laut Dari Dan Ke Karimunjawa	87,79	58,55	61,59	59,38	59,38	67,64	▶	Balai Transportasi Jawa Tengah

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Perhubungan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Perhubungan sebanyak 24 indikator dengan rincian 1 indikator telah tercapai, 17 indikator akan tercapai, 6 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator yang perlu upaya keras dikarenakan adanya penundaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 antara lain peningkatan Terminal Tipe B di 7 Lokasi (Madureso, Purbalingga, Purwodadi, Pilangsari, Gagakrimang, Penggaron, Penggung) dan Pembangunan Terminal tipe B di 1 Lokasi (Kutoarjo); pemasangan *Early Warning System* (EWS) di Perlintasan Sebidang JPL 251 130+530 Kabupaten Klaten; penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Jl. Kejajar – Dieng yang dialihkan pada dukungan pelaksanaan posko pengendalian di pintu masuk Jawa Tengah pada 17 lokasi perbatasan Jawa Tengah dan implementasi Bus Sehat Trans Jateng.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel B.II. 10
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**								Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	85,00	60,00	64,00	77,01	77,01	90,60	▶	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
II.	**Pengemba- ngan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**								
2.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	80,00	20,00	40,00	40,00	40,00	50,00	▶	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
III.	**Pengemba-ngan *E-Goverment***								
3.	Persentase Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi	85,00	45,00	55,00	55,00	55,00	64,71	▶	Bidang *E-Government*

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Komunikasi dan Informatika sebanyak 3 indikator dengan status capaian keseluruhan akan tercapai.

11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja.

Tabel B.II. 11
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
I.	**Pembinaan dan Pengawasan Koperasi**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.	Persentase Koperasi Sehat	27,15	22,26	21,00	23,44	23,44	86,34		Bidang Pengawasan
2.	Persentase Koperasi Aktif	85,19	84,22	64,50	71,27	71,27	83,66		Bidang Pengawasan
II.	**Pemasyarakatan Perkoperasian**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Provinsi	66,20	45,84	2,25	2,32	2,32	3,50		Bidang Kelembagaan
III.	**Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.	Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	76,50	73,25	52,00	47,50	47,50	62,09		Bidang Kelembagaan
IV.	**Pendidikan Perkoperasian dan UKM**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5.	Persentase Sumberdaya Manusia Koperasi dan UKM yang Terampil	83,00	96,28	78,00	98,79	98,79	119,02		Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Mene-ngah Kelas A.
V.	**Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6.	Persentase KUKM yang Mengakses Kredit Perbankan	32,14	38,56	27,17	27,21	27,21	84,66		Bidang Restrukturi-sasi dan Pembiayaan
VI.	**Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7.	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi Provinsi dan UKM yang dibina	56,48	56,90	1,19	-2,78	-2,78	-4,92		Bidang Restrukturi-sasi dan Pembiayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
8.	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Provinsi dan UKM yang Dibina	74,93	76,31	6,52	-5,96	-5,96	-7,95	▼	Bidang Restrukturi-sasi dan Pembiayaan
VII.	**Peningkatan Produktivitas KUKM**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9.	Persentase Pertumbuhan Profit KUKM yang dibina	29,92	22,33	8,52	-4,18	-4,18	-13,97	▼	Bidang Bina Usaha
VIII.	**Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM**								Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10.	Persentase Pertumbuhan Pangsa Pasar Produk Koperasi dan UKM	6,40	6,74	3,75	-8,04	-8,04	-125,63	▼	Bidang Bina Usaha

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Koperasi dan UKM sebanyak 10 indikator dengan rincian 1 indikator telah melebihi target akhir RPJMD, 4 indikator akan tercapai, 5 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator perlu upaya keras disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi Jawa Tengah akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi disebabkan kemampuan koperasi untuk menarik anggota baru menurun akibat pembatasan layanan kantor, ketidakmampuan untuk menyediakan layanan pendaftaran anggota secara digital, hingga pada penundaan tingkat konsumsi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berakibat pada menurunnya jumlah pertumbuhan anggota koperasi.
2. Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina disebabkan koperasi dan UMKM melakukan efisiensi secara optimal sebagai akibat dari fokus mereka pada upaya untuk dapat bertahan hidup menyikapi penurunan daya beli masyakat akibat pandemi COVID-19.

3. Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina disebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 berakibat pada menurunnya permintaan atas produk/jasa Koperasi dan UKM.
4. Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 mempengaruhi tingkat keuntungan dari Koperasi dan UKM.
5. Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM disebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 berakibat pada menurunnya permintaan atas produk/jasa Koperasi dan UKM sehingga mengurangi pangsa pasar terhadap produk Koperasi dan UKM.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja.

Tabel B.II. 12
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal**								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.	Persentase Bahan Kajian Potensi Penanaman Modal Yang Dipromosikan	80	100,00	65,00	65,00	65,00	81,25	▶	Bidang Perencanaan dan Pengemba-ngan
II.	**Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal**								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Rasio Jumlah Ijin Usaha Dan /Atau Izin Komersial/Izin Operasional Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	24	22,09	10,00	20,29	20,29	84,54	▶	Bidang Promosi PM

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Rasio Jumlah Realisasi Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM Terhadap Jumlah Kepeminatan Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM	26	22,22	10,00	12,00	12,00	46,15		Bidang Promosi PM
III.	**Pelayanan Perijinan**								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	95	97,26	92,00	98,71	98,71	103,91		Bidang Pelayanan Perizinan
IV.	**Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal**								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Persentase Realisasi Proyek Penanaman Modal	15	20,65	15,00	35,44	35,44	267,77		Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
V.	**Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan**								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	93	100,00	90,00	98,00	98,00	105,38		Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
7.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
VI.	**Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan**								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Perijinan	90	64,66	60,00	118,33	118,33	131,48		Bidang Pengelola Data dan Informasi

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Penanaman Modal sebanyak 8 indikator dengan rincian 5 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja.

Tabel B.II. 13
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pembinaan dan pengembangan kepemudaan**								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
1.	Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan	100,00	20	26,99	26,99	26,99	26,99	▼	Bidang Kepemudaan
2.	Persentase Capaian Kemandirian Ekonomi Pemuda	16,30	-	3,84	3,84	3,84	23,56	▼	Bidang Kepemudaan
II.	**Pembinaan dan pengembangan keolahragaan**								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	45,00	5	6,67	0	5	11,11	▼	Bidang Kepemudaan
4.	Persentase Capaian Even Olahraga Rekreasi	100,00	-	30,00	40,00	40,00	40,00	▶	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
5.	Persentase Peningkatan Tenaga Olahraga yang Berkompeten	63,90	-	28,90	28,90	28,90	45,23	▶	Bidang Keolahragaan
6.	Persentase Atlet PPLOP Yang Berprestasi	15,00	-	3,89	2	2	13,33	▼	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Persentase Sarpras Olahraga Dalam Kondisi Baik	100,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	▶	Bidang Keolahragaan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 7 indikator dengan rincian 3 indikator akan tercapai dan 4 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator perlu upaya keras disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 yaitu adanya penundaan kegiatan dan peniadaan beberapa kegiatan bersifat pengumpulan massa.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu:

1. Persentase capaian kapasitas kepemudaan disebabkan adanya penudaan kegiatan seleksi dan pemantapan PASKIBRAKA; kegiatan pemuda pelopor; kegiatan kepencintaalaman, kegiatan Kapal Pemuda Nusantara akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan kegiatan bersifat pengumpulan massa.
2. Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda disebabkan adanya pengurangan jumlah peserta kewirausahaan pemuda dan peserta PKKP akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan kegiatan bersifat pengumpulan massa.
3. Persentase atlet PPLOP yang berprestasidisebabkan adanya penudaan kegiatan kompetisi olahraga PPLOP akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan kegiatan bersifat pengumpulan massa.
4. Persentase peningkatan prestasi olaharaga disebabkan adanya penundaan kegiatan kompetisi olahraga akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan kegiatan bersifat pengumpulan massa.

14. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja.

Tabel B.II. 14
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi**								Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Persentase Badan Publik yang Terbuka	100	68	76,00	76,00	76,00	76	▶	Bidang Statistik
2.	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	100	141,11	79,00	169,59	169,59	169,59	●	Bidang Statistik

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Statistik terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Statistik sebanyak 2 indikator dengan rincian 1 indikator telah tercapai bahkan telah melampui target akhir RPJMD dan 1 indikator akan tercapai.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja.

Tabel B.II. 15
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPMJD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah**								Dinas Komunikasi dan Informatika
1.	Persentase Perangkat Daerah Memiliki Keamanan Informasi > 80	100	16,67	33,33	33,33	33,33	33,33	▶	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Persandian terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Persandian sebanyak 1 Indikator dengan status capaian akan tercapai.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja.

Tabel B.II. 16
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pembinaan Kebudayaan**								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.	Persentase Sumber Belajar Berbasis Budaya	0,42	0,33	0,33	0,33	0,33	78,57	▶	Bidang Pembinaan Kebudayaan
2.	Persentase Siswa dan Anggota Paguyuban Penghayat Kepercayaan yang Terlayani	37,84	29,11	26,40	29,11	29,11	76,93	▶	Bidang Pembinaan Kebudayaan
3.	Persentase Status Cagar Budaya	21,89	19,51	19,51	19,51	19,51	89,13	▶	Bidang Pembinaan Kebudayaan
4.	Persentase Jenis Budaya yang Terlayani	6,82	3,80	4,00	4,94	4,94	72,43	▶	Bidang Pembinaan Kebudayaan
5.	Persentase Seni Budaya Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	80,00	85,71	28,57	71,42	71,42	89,28	▶	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
6.	Survei Kepuasan Pengunjung Museum	88,70	89,00	89,01	89,09	89,09	100,44	●	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Kebudayaan sebanyak 6 indikator dengan rincian 1 indikator telah tercapai, 5 indikator akan tercapai.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja.

Tabel B.II. 17
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Perpustakaan**								Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	100	20,00	25,00	27,10	27,10	27,10	▼	Bidang Pengembangan Perpustakaan
2.	Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan Perpustakaan	100	33,33	40,00	46,70	46,70	46,70	▶	Bidang Pengembangan Perpustakaan
II.	**Pengelolaan Perpustakaan**								Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	100	24,19	29,59	36,80	36,76	36,76	▶	Bidang Pengelolaan Perpustakaan
4.	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Perpustakaan Provinsi	100	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	▶	Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Perpustakaan sebanyak 4 indikator dengan rincian 3 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator peningkatan kompetensi SDM perpustakaan perlu upaya keras disebabkan adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi SDM perpustakaan/ pustakawan sekolah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dirubah hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja, karena pandemi

COVID-19 peningkatan kompetensi SDM Perpustakaan dilaksanakan secara *online*, untuk sekolah yang belum mempunyai sarpras dalam mendukung kegiatan secara *online* belum dapat dilaksanakan, sehingga berdampak pada masih rendahnya jumlah SDM Perpustakaan/Pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja.

Tabel B.II. 18
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan**								Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Tertib Arsip	100	21,00	44,00	44,00	44,00	44,00	▶	Bidang Pembinaan, Pengemba-ngan dan Pengawasan Kearsipan
II.	**Pengelolaan dan Pelestarian Arsip**								Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Persentase Pengelolaan Arsip	100	23,91	29,00	36,43	36,43	36,43	▶	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
III.	**Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan**								Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Persentase Pengunjung Arsip	100	16,18	20,18	78,36	78,36	78,36	▶	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Kearsipan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Kearsipan sebanyak 3 indikator yang keseluruhan berstatus akan tercapai.

III. Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 27 indikator kinerja.

Tabel B.III. 1
Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.dTahun 2020	Tingkat Capaian RPJMDs.dTahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung JawabTarget
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Perikanan Tangkap**								Dinas Kelautan dan Perikanan
1.	Produksi Perikanan Tangkap	477.876,28	495.356,22	496.347	503.938,38	503.938,38	101,53		Bidang Perikanan Tangkap
2.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tegalsari	100	100	90,91	90,91	90,91	90,91		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
3.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Asemdoyong	100	81,82	90,91	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
4.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82	72,73	63,64	63,64	63,64	77,78		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
5.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Kidanglor	100,00	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
6.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tawang	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
7.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Morodemak	100	72,73	81,82	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
8.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
9.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tasikagung	100	72,73	81,82	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.dTahun 2020	Tingkat Capaian RPJMDs.dTahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung JawabTarget
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Karimunjawa	63,64	54,55	54,55	81,82	81,82	128,57		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
11.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Lohgending	100	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
12.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Larangan	100	90,91	100,00	90,91	90,91	90,91		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
II.	**Program Usaha dan Pengembangan Komoditas**								Dinas Kelautan dan Perikanan
13.	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
14.	Persentase Ppeningkatan Produksi Benih	25	37,10	10,00	38,13	38,13	152,52		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
15.	Produksi Perikanan Budidaya	564.734,42	513.365,27	514.392,00	510.012,68	510.012,68	99,15		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
III.	**Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut**								Dinas Kelautan dan Perikanan
16.	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	25	5,89	0,02	0,023	0,023	0,092		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
17.	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	25	1,7	0,03	0,03	0,03	0,12		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
18.	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang	25	5,61	0,06	0,06	0,06	0,24		Kantor Cabang Dinas Kelautan

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.dTahun 2020	Tingkat Capaian RPJMDs.dTahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung JawabTarget
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)								Wilayah Barat Kelas A
19.	Persentase Peningkatan Produksi Garam	25	4,06	5,00	5,54	5,54	22,16	▼	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
20.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	30	33,33	10,00	0,00	33,33	111,10	●	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
21.	Persentase Kawasan Konservasi yang Ditata Menuju Pengelolaan yang Efektif	25	15	15,00	0,00	15,00	20,00	▼	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
IV.	**Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**								Dinas Kelautan dan Perikanan
22.	Persentase Penurunan Jmlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan Wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah	2	10,00	8,00	8,00	8,00	(200,00)	▼	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
23.	Persentase Penurunan Jmlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan Wilayah Pantai Utara Timur Jawa Tengah	2	10,97	8,00	6,00	6,00	(100,00)	▼	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
24.	Persentase Penurunan Jmlah Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan Wilayah Pantai Utara Barat Jawa Tengah	2	10,00	8,00	6,00	6,00	(100,00)	▼	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
25.	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti	5	1,00	2,00	2,00	2,00	160,00	●	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No.	IndikatorKinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.dTahun 2020	Tingkat Capaian RPJMDs.dTahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung JawabTarget
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V.	**Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan**								Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	Persentase Peningkatan Dokumen Kelayakan Mutu	50	122,1	20,00	0,00	122,10	244,20	●	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
27.	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan	25	8,82	10,00	3,27	3,27	13,08	▼	Bidang Usaha dan Pengemba-ngan Komoditas

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 27 indikator dengan rincian 8 indikator telah tercapai bahkan 5 indikator telah melampaui target akhir RPJMD, 10 indikator akan tercapai dan 9 indikator perlu upaya keras.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi terkait dengan adanya aturan tentang tanah yang diperbolehkan untuk ditanami mangrove adalah tanah milik negara dan diatas garis pantai sesuai kewenangan provinsi.
2. Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan disebabkan karena karena kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai peraturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang secara dinamis mengalami perubahan.
3. Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif tidak dianggarkan pada Tahun 2020, tetapi diprediksikan target RPJMD akan tercapai karena target setiap hanya 1 kajian.
4. Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan dikarenakan akibat pandemi COVID-19 dimana daya beli masyarakat menurun sehingga sisi permintaan menurun, tetapi akan tercapai target akhir RPJMD dengan melihat perkembangan ekonomi yang membaik dan pendampingan usaha pengolahan kecil di Jawa Tengah.

5. Persentase peningkatan produksi garam dikarenakan musim hujan yang terjadi pada Tahun 2020 lebih lama dari musim kemarau tetapi dengan melihat perkembangan teknologi (tunnel garam, rumah prisma, geoisolator, dan gudang garam *collection point*) maka target akhir RPJMD akan tercapai.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja.

Tabel B.III. 2
Capaian Kinerja Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Destinasi Pariwisata**								Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
1.	Persentase Peningkatan Dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Pada Setiap DPP	78,26	43,48	21,74	21,74	21,74	27,79		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.	Persentase Usaha Pariwisata Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	70,00	16,50	23,00	23,00	23,00	32,86		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
II.	**Pengembangan Pemasaran Pariwisata**								Dinas Porapar
3.	Kunjungan Wisatawan Nusantara	62.748.973	57.900.863	14.973.707	22.629.085	22.629.085	36,06		Bidang Pemasaran Pariwisata
4.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.118.957	691,699	57.394	78.290	78.290	7,00		Bidang Pemasaran Pariwisata
III.	**Pengembangan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif**								Dinas Porapar
5.	Persentase SDM Pariwisata Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	38,3	-	21,28	21,28	21,28	55,56		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Sertifikasi	100	-	40,00	40,00	40,00	40,00		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									dan Ekonomi Kreatif

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pariwisata terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Pariwisata sebanyak 6 indikator dengan rincian4 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator yang capaian perlu upaya keras yaitu Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP disebabkan adanya pandemi COVID-19 dimana program kegiatan lebih diprioritaskan untuk penanganan Daya Tarik Wisata dan pelaku pariwisata yang terdampak COVID-19, sedangkan untuk indikator Kunjungan Wisatawan Mancanegara disebabkan dengan adanya kebijakan beberapa negara untuk menutup akses menuju Indonesia berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah secara global.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 27 indikator kinerja.

Tabel B.III. 3
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Agribisnis**								Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.	Persentase Jaringan Irigasi Tersier yang Baik	17,88	16,88	17,38	17,38	17,38	97,20		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
2.	Persentase Penambahan Alsintan	4	5,68	1,98	1,98	1,98	49,50		Bidang Prasarana dan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Sarana Pertanian
3.	Persentase Peningkatan Produksi Kedelai	2,10	0,84	2,50	1,98	1,98	94,29		Bidang Tanaman Pangan
4.	Persentase Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia lainnya	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	100,00		Bidang Tanaman Pangan
5.	Persentase Peningkatan Produksi Padi	0,70	0,79	0,50	0,54	0,54	77,14		Bidang Tanaman Pangan
6.	Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah	3,80	3,38	3,80	4,44	4,44	116,84		Bidang Hortikultura
7.	Persentase Peningkatan Produksi Cabe Besar	3,80	3,62	2,00	2,37	2,37	62,37		Bidang Hortikultura
8.	Persentase Peningkatan Produksi kopi	2,50	2,55	2,50	2,51	2,51	100,40		Bidang Perkebunan
9.	Persentase Peningkatan Produksi Tebu	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	60		Bidang Perkebunan
10.	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	0,50	0,49	0,30	0,30	0,30	60		Bidang Perkebunan
11.	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolahan Hasil	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
12.	Persentase Layanan Sertifikasi Benih	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
13.	Persentase Peningkatan Produksi Benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	3,00	1,90	1,5	1,00	1,00	33,33		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
14.	Persentase Peningkatan Produksi Benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	3,00	3,00	1,5	0,90	0,90	30		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
15.	Persentase Peningkatan Produksi Benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	3,00	1,23	1,5	0,37	0,37	12,33		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.	Persentase Peningkatan Produksi Benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00		Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
17.	Persentase Penurunan Serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT)	0,43	1,47	0,61	0,70	0,70	37,21		Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
II.	**Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian**								
18.	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	-	100,00	100,00	100	100	100		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
19.	Persentase Jumlah SDM Penyuluh yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	10,00	7,00	7,00	7,00	70		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
III.	**Pengembangan Agribisnis Peternakan**								Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20.	Persentase Kenaikan Fasilitasi Sarpras Peternakan	11,50	4,79	1,00	0,35	5,14	44,70		Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
21.	Persentase Kenaikan Fasilitasi Penyuluhan dan Kemitraan	76,00	9,52	8,69	7,65	24,17	31,80		Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
22.	Populasi ternak	4.013.001	3.634.643	3.457.393	3.983.065	3.983.065	99,25		Bidang Budidaya
23.	Persentase Penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Pemotongan Betina Produktif	10	28,17	10,00	32,85	32,85	328,50		Bidang Veteriner
24.	Persentase Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen Beku	9,90	0,99	1,00	1,92	3,92	39,49		Balai Inseminasi Buatan Kelas A

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.	Persentase Peningkatan Produksi Ternak	2,00	3,20	1,00	2,51	2,51	125,50	●	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
26.	Persentase Penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Pemotongan Betina Produktif	10,00	10,00	10,00	32,85	32,85	328,50	●	Balai Veteriner Semarang
27.	Persentase Penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Pemotongan Betina Produktif	10,00	28,17	10,00	32,85	32,85	328,50	●	Balai Veteriner Boyolali

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pertanian terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Pertanian sebanyak 27 indikator dengan rincian 11 Indikator telah tercapai, 15 Indikator akan tercapai, 1 Indikator perlu upaya keras.

Indikator sub urusan Pertanian sebanyak 19 indikator yang terdiri : 7 indikator telah tercapai, 11 indikator akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras karena adanya dampak perubahan iklim dan serangan hama wereng, tikus.

Sedangkan sub urusan Peternakan sebanyak 8 indikator yang terdiri: 4 indikator telah tercapai dan 4 indikator akan tercapai.

4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 bidang program dan 51 indikator kinerja.

Tabel B.III. 4
Capaian Kinerja Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan**								
1.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	25,00	6,36	7,69	11,83	11,83	47,32	▶	Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	1,63	0,64	0,63	0,64	0,64	39,26	▶	CDK 1
3.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	1,63	0,33	0,61	0,91	0,91	55,83	▶	CDK 2
4.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	1,69	0,34	0,45	0,82	0,82	48,53	▶	CDK 3
5.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	1,81	0,46	0,45	1,04	1,04	57,46	▶	CDK 4
6.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	2,00	0,45	0,52	0,71	0,71	35,5	▶	CDK 5
7.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	3,25	0,65	1,04	1,00	1,00	30,77	▶	CDK 6
8.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	2,06	0,41	0,63	1,02	1,02	49,51	▶	CDK 8
9.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	2,63	0,53	0,66	1,41	1,41	53,61	▶	CDK 9
10.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	2,06	0,52	0,64	0,76	0,76	36,89	▶	CDK 10
11.	Persentase Lahan Kritis dan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	100,00	●	Balai Taman Hutan Raya

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sangat Kritis Tertangani								KGPAA Mangkuna-goro I Kelas A
12.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	100,00		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
13.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	100,00		Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
14.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	3,13	1,42	1,08	1,07	1,07	34,19		CDK 11
15.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat Kritis Tertangani	3,13	0,63	0,98	2,44	2,44	77,96		CDK 7
II.	**Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**								Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	25,00	5,00	6,70	8,52	8,52	34,08		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindu-ngan Hutan
17.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindu-ngan Hutan
18.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 1
19.	Persentase Pengaduan yang Ditangani Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	3,00	0,60	0,7	1,0	1,0	33,33		CDK 1
20.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,7	0,84	0,84	42		CDK 2

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 2
22.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 3
23.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,5	0,60	0,60	30		CDK 3
24.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,5	0,6	0,6	30		CDK 4
25.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 4
26.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 5
27.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	3,00	0,60	0,70	1,0	1,0	33,33		CDK 5
28.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,70	0,84	0,84	42		CDK 6
29.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 6
30.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 8
31.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,50	0,60	0,60	30		CDK 8
32.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,50	0,6	0,6	30		CDK 9
33.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 9
34.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,70	0,84	0,84	42		CDK 10
35.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 10
36.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 11
37.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	2,00	0,40	0,50	0,6	0,6	30		CDK 11

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
38.	Persentase Pengaduan yang Ditangani	100,00	100,00	100	100	100	100		CDK 7
39.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat	3,00	0,60	0,70	1	1	33,33		CDK 7
III.	**Pemanfaatan Hutan**								Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
40.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	35,38	7,39	4,21	10,79	10,79	30,50		Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
41.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,72	0,41	0,62	0,62	0,62	86,11		CDK 1
42.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,72	0,62	0,62	0,62	0,62	86,11		CDK 2
43.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,62	0,21	0,41	0,41	0,41	66,13		CDK 3
44.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,72	0,31	0,62	0,62	0,62	86,11		CDK 4
45.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,82	1,13	0,82	0,82	0,82	100		CDK 5
46.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,82	0,41	0,82	0,82	0,62	100		CDK 6

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Status	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,62	0,42	0,41	0,41	0,41	66,13	▶	CDK 8
48.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,72	0,52	0,62	0,62	0,62	86,13	▶	CDK 9
49.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,62	0,21	0,41	0,41	0,41	66,13	▶	CDK 10
50.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,62	0,21	0,41	0,41	0,41	66,13	▶	CDK 11
51.	Persentase Unit Pengelolaan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan yang Berkelanjutan	0,82	0,41	0,82	0,82	0,82	100	●	CDK 7

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Kehutanan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Kehutanan sebanyak 51 indikator dengan rincian 18 indikator telah tercapai dan 33 indikator akan tercapai.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator kinerja.

Tabel B.III. 5
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV.	**Pengembangan Ketenagalistrikan**								Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin	37,13	12,85	15,91	18,95	18,95	51,04		Bidang Ketenaga listrikan
2.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Solo	1,92	0,92	0,93	1,24	1,24	64,58		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
3.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Kendeng Muria	2,53	1,05	1,11	1,50	1,50	59,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
4.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Serayu Utara	1,95	0,94	1,01	1,27	1,27	65,13		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
5.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Serayu Selatan	4,15	1,46	1,88	2,16	2,16	52,05		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
6.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Slamet Utara	5,06	1,12	1,94	1,87	1,87	36,96		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
7.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	1,62	0,96	0,96	1,21	1,21	74,69		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
8.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Kendeng Selatan	4,80	1,46	1,97	2,18	2,18	45,42		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
9.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Sewu Lawu	1,82	1,02	1,03	1,29	1,29	70,88		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Slamet Selatan	5,01	1,68	2,04	2,63	2,63	52,50		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
11.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Serayu Tengah	2,73	0,80	1,18	1,20	1,20	43,96		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
12.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Merapi	3,73	0,91	1,47	1,62	1,62	43,43		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
13.	Persentase Pemenuhan Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Wilayah Semarang Demak	1,82	0,53	0,69	0,79	0,79	43,41		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
V.	**Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**								
14.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e)	123.401,00	26.415,60	26948,16	26.955,96	26955,96	21,84		Bidang Energi Baru Terbarukan
15.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Solo	332,00	80,26	118,48	118,48	118,48	35,69		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
16.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria	1,737,69	279,64	305,12	305,12	305,12	17,56		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
17.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara	583,00	159,34	245,54	245,54	245,54	42,12		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
18.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan	739,00	49,37	62,92	64,02	64,02	8,66		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
19.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara	408,00	96,89	147,85	147,85	147,85	36,24		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
20.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) Wilayah	76,20	25,48	76,09	76,09	76,09	99,86		Cabang Dinas ESDM Wilayah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Ungaran Telomoyo								Ungaran - Telomoyo
21.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan	505,00	84,06	160,50	160,5	160,50	31,78		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
22.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu	407,00	92,54	118,02	118,02	118,02	29,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
23.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan	95.701 ,00	19.806, 30	19831, 78	19.831, 78	19831,78	20,72		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
24.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah	76,00	152,88	178,36	178,36	178,36	234,68		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
25.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Merapi	1.836, 00	619,56	734,22	734,22	734,22	39,99		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
26.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak	20.288 ,00	4.923,1 8	4923,1 8	4.923,1 8	4923,18	24,27		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
VI.	**Pengelolaan Pertambangan Minerba**								
27.	Persentase *Good Mining Practice*	85,71	72,81	24,58	29,65	29,65	34,59		Bidang Mineral dan Batubara
28.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Solo	6,57	2,38	0,96	1,69	1,69	25,72		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
29.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah KendengMuria	2,86	4,04	1,93	1,69	1,69	59,09		Cabang Dinas ESDM Wilayah KendengMuria
30.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Serayu Utara	6,29	2,61	1,20	1,2	1,20	19,08		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
31.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Serayu Selatan	4,29	7,13	1,69	1,93	1,93	44,99		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
32.	Persentase *Good Mining Practice*	12,00	7,25	3,61	4,34	4,34	36,17		Cabang Dinas ESDM

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Wilayah Slamet Utara								Wilayah Slamet Utara
33.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Ungaran Telomoyo	2,86	4,51	0,96	1,69	1,69	59,09		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
34.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Kendeng Selatan	11,43	17,10	4,82	4,34	4,34	37,97		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
35.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Sewu Lawu	5,14	5,23	1,45	2,17	2,17	42,22		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
36.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Slamet Selatan	14,29	10,21	4,10	4,58	4,58	32,05		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
37.	Persentase PelayananPenguji-an Mineral dan Batubara	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00		Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral Kelas A
38.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Serayu Tengah	2,86	2,85	1,20	1,2	1,20	41,96		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
39.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Merapi	13,14	5,94	1,20	2,41	2,41	18,34		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
40.	Persentase *Good Mining Practice* Wilayah Semarang Demak	4,00	3,56	1,45	2,41	2,41	60,25		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
VII.	**Pengembangan Kegeologian**								
41.	Persentase Pengambilan Air Tanah	55,76	47,11	49,09	46,93	46,93	118,82		Bidang Geologi dan Air Tanah
42.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Solo	4,20	4,11	4,13	3,94	3,94	106,60		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
43.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Kendeng Muria	12,60	8,03	9,94	9,32	9,32	135,19		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
44.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Serayu Utara	2,91	2,84	2,87	2,46	2,46	118,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Serayu Selatan	1,17	0,65	0,92	0,9	0,90	130,0	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
46.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Slamet Utara	0,97	0,95	0,96	0,87	0,87	111,49	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
47.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah UngaranTelomoyo	8,47	5,72	6,68	6,34	6,34	133,60	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
48.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Kendeng Selatan	0,61	0,59	0,60	0,6	0,60	101,67	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
49.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah SewuLawu	3,31	3,23	3,26	3,12	3,12	106,09	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
50.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Slamet Selatan	1,10	1,07	1,08	1,05	1,05	104,76	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
51.	Persentase Pelayanan Pengujian Air Tanah	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	●	Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral Kelas A
52.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Serayu Tengah	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	108,70	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
53.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Merapi	5,36	5,23	5,28	5,14	5,14	104,28	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
54.	Persentase Pengambilan Air Tanah Wilayah Semarang Demak	14,81	14,45	13,13	12,96	12,96	114,27	●	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Energi Sumber Daya Mineral terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan jumlah indikator urusan Urusan Energi Sumber Daya Mineral sebanyak 54 indikator dengan

rincian 16 indikator tercapai, 29 indikator akan tercapai dan 9 indikator perlu upaya keras.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu :

1. Penurunan emisi gas rumah kaca sector energi (tCO2e) disebabkan karena terdapat pembatalan pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT akibat *refocusing* anggaran diantaranya pembangunan 42 (empat puluh dua) unit PLTS *Charging Station*, 9 (sembilan) unit digester biogas, 1 (satu) unit PLTMH dan 1 (satu) unit PLTS Rooftop.
2. Persentase *Good Mining Practice* dikarenakan berkurangnya jumlah izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari target awal perencanaan karena beberapa sebab, yaitu terdapat penutupan Tambang pasca habis masa berlaku izinnya (tidak diperpanjang kembali) dan selesainya proyek pembangunan insfrastruktur jalan tol; adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, sehingga seluruh permohonan izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan, baik izin baru maupun perpanjangan tidak diterbitkan.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja.

Tabel B.III. 6
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.dTahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.	Nilai Ekspor Non Migas (Juta US$)	7.205,00	8.212,84	6.062	7.704,15	7.704,15	106,93		Bidang Perdagangan Luar Negeri
II.	**Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri**								
2.	Persentase Disparitas Harga Kepokmas di 6 Kabupaten/Kota (*price center*)	11,50	6,80	13,00	9,26	9,26	124,19		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
III.	**Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen**								
3.	Persentase Jumlah Barang Yang Tidak Sesuai Standar Pada Saat Pengawasan	3,00	1,25	6,00	0,90	0,90	333,33		Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.dTahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV.	**Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang**								
4.	Persentase Kenaikan Layanan Pengujian Dan Sertifikasi	5,00	5,05	4,00	4,02	4,02	80,40	▶	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kls A
5.	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi	4,00	92,31	4,55	28,11	28,11	702,75	●	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Perdagangan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Perdagangan sebanyak 5 indikator dengan rincian 3 indikator berstatus telah tercapai bahkan melebihi target akhir RPJMD dan 2 indikator berstatus akan tercapai

7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja.

Tabel B.III. 7
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Penguatan dan Pengembangan Industri Agro**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri	6,00	6,46	3,11	1,03	1,03	17,17	▼	Bidang Industri Agro

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengolahan Industri Agro								
II.	**Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Industri Non Agro	3,00	5,45	1,00	-9,00	-9,00	-300,00	▼	Bidang Industri Non Agro
III.	**Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Layanan Kemasan Dan Industri Kreatif	4,35	23,08	2,98	3,54	3,54	81,38	▶	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
IV.	**Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Keteknikan, Penerapan, Dan Rekayasa	3,17	3,15	3,00	3,82	3,82	120,50	●	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
V.	**Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki**								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Persentase Peserta Pelatihan Yang Diserap Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki	85,00	111,80	63,00	84,13	84,13	98,98	▶	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Perindutrian terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Perindustrian sebanyak 5 indikator yang terdiri: 1 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras.

Indikator perlu upaya keras yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Industri Agro disebabkan pertumbuhan dari komponen industri agro yang mengalami pertumbuhan negatif karena adanya penurunan permintaan dan pengurangan produksi khususnya terhadap industri pengolahan tembakau,

industri kayu, barang dari kayu dan gabus, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya serta industri *furniture*.

2. Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro disebabkan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu industri-industri yang memiliki keterkaitan dengan negara lain dalam hal pemenuhan bahan baku; mesin/sparepart; bahan penolong hingga ekspor produk terkena dampak yang cukup besar dalam pandemi COVID-19 seperti industri tekstil dan produk tekstil, industri bulu mata/rambut palsu, industri logam, otomotif dll. Disamping itu juga disebabkan oleh kenaikan harga, pengurangan jumlah shit produksi (dirumahkan/di PHK), penurunan permintaan, penundaan DO, pembatalan pesanan, serta ada yang berhenti produksi. Namun demikian kontribusi industri pengolahan memasuki akhir Tahun 2020 sudah mengalami perkembangan yang positif walaupun belum menyentuh angka positif, hal ini dikarenakan antara lain Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik turun 10%, Tekstil dan Pakaian Jadi turun 12%, Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik turun 8%, penurunan ini disebabkan oleh permintaan produk industri seperti produk karet dan barang logam elektronik masih rendah akibat industri pengguna seperti otomotif, komponen otomotif dll, yang belum bergerak, tetapi industri tekstil dan pakaian jadi sudah mengalami perkembangan positif.

8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja.

Tabel B.III. 8
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi**								Dinas Nakertrans
1.	Persentase Penempatan Transmigran Terhadap Animo Transmigrasi	3,41	6,10	0,00	Na	Na	Na	Na	
2.	Persentase Kenaikan Calon Transmigran Dilatih Di Bidang Pertanian	3,41	3,95	0,00	Na	Na	Na	Na	

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai (Capaian 2019 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2019 ≥ 20% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2019 < 20% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Transmigrasi sebanyak 2 indikator. Pada Tahun 2020 urusan Transmigrasi target indikator Urusan Transmigrasi sebesar 0 (nol) baik pada indikator Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi dan Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian sesuai dengan surat dari Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor B.656/PKT.04.01/IV/2020 Perihal Perpindahan dan Penetapan Transmigrasi Tahun 2020 sehubungan dengan COVID-19 bahwa Urusan Transmigrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan merupakan Indikator Kinerja OPD/pemerintah daerah.

IV. Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja,

Tabel B.IV. 1
Capaian Kinerja Perencanaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Perencanaan Pembangunan Ekonomi**								BAPPEDA
1.	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahunan Dengan Sasaran RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	●	Bidang Perekonomian
2.	Persentase Konsistensi Rencana Antar Dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) Lingkup Bidang Perekonomian	90,00	90	90,00	90,00	90,00	100,00	●	Bidang Perekonomian
II.	**Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya**								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pengembangan Daerah
3.	Persentase Konsistensi Rencana Antar Dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
4.	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahunan Dengan Sasaran RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
III.	**Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Persentase Konsistensi Rencana Antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) Lingkup Bidang Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6.	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahunan Dengan Sasaran RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
IV.	**Perencanaan Pembangunan Daerah**								Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.	Persentase Dokumen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00		Bidang Penyusunan

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Disusun Sesuai Peraturan Perundangan								Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

: Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

: Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

: Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Perencanaan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran urusan Keuangan pada fungsi penunjang pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 bidang program dan 164 indikator kinerja.

Tabel B.IV. 2
Capaian Kinerja Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**								Badan Pengelola Pendapatan Daerah
1.	Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00		Bidang Pengelolaan Data dan Pengemba-ngan Pendapatan
2.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	5,38	8,72	-7,74	-34,73	-34,73	-645,54		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
3.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	10,17	9,04	2,07	-0,84	-0,84	-8,26		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
4.	Persentase Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak	76,00	-	73,00	73,00	73,00	96,05		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	8,41	12,06	-7,35	-7,1	-7,1	-84,42	▼	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
6.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11,85	19,96	-23,00	-3,27	-3,27	-27,59	▼	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
7.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada Dipisahkan	12,26	14,26	3,14	3,39	3,39	27,65	▼	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
8.	Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	6,49	8,26	-3,66	-10,7	-10,7	-164,87	▼	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
9.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	12,08	7,42	6,79	31,14	31,14	257,78	●	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
10.	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	9,54	9,98	-25,85	0,31	0,31	3,25	▼	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
11.	Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	90,00	89,5	90,00	90,00	90,00	100,00	●	Bidang Evaluasi dan Pembinaan
12.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I	5,95	0,66	2,07	1,09	1,09	18,32	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
13.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I	6,03	3,55	-7,74	-27,32	-27,32	-453,07	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
14.	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang I	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
15.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I	10,59	14,18	0,17	-0,82	-0,82	-7,71	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
16.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II	10,34	10,07	2,07	1,57	1,57	15,18	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II	3,20	3,79	-7,74	-28,36	-28,36	-886,25	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
18.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II	9,38	16,67	-8,22	-3,8	-3,8	-40,51	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
19.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang II	10,59	11,81	0,18	0,19	0,19	1,79	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
20.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III	12,91	2,06	2,07	0,7	0,7	5,42	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
21.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III	5,19	0,64	-7,74	-26,04	-26,04	-501,73	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
22.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III	9,38	18,83	-17,07	15,02	15,02	160,13	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
23.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang III	10,59	11,85	0,09	0,14	0,14	1,32	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
24.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang	10,73	27,56	2,07	1,55	1,55	14,45	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
25.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang	6,40	12,25	-7,74	-31,13	-31,13	-486,41	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
26.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang	9,38	16,03	-6,06	-4	-4	-0,43	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Semarang	10,59	11,50	0,15	0,20	0,20	1,89		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
28.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga	9,50	15,88	2,07	3,17	3,17	33,37		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
29.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga	7,89	11,26	-7,74	-33,75	-33,75	-427,76		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
30.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga	9,38	18,4	-15,14	-7,7	-7,7	-82,09		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
31.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Salatiga	10,59	10,59	0,02	0,02	0,02	0,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
32.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal	11,16	2,76	2,07	0,7	0,7	6,27		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
33.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal	6,56	6,85	-7,74	-26,66	-26,66	-406,40		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
34.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal	9,38	17,74	-16,37	-11,88	-11,88	-126,65		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
35.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kendal	10,59	21,79	0,15	0,6	0,6	5,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak	14,60	21,57	2,07	2	2	13,7	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
37.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak	6,29	17,48	-7,74	-23,45	-23,45	-372,81	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
38.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak	9,38	17,27	-3,85	-1,4	-1,4	-14,93	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
39.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Demak	10,59	12,40	0,03	0,03	0,03	0,28	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
40.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan	10,25	11,96	2,07	2,4	2,4	23,41	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
41.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan	9,32	8,16	-7,74	-24,65	-24,65	-264,48	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
42.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan	9,38	17,95	-4,40	-1,6	-1,6	-17,06	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
43.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Grobogan	10,59	11,81	0,07	0,2	0,2	1,89	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
44.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta	9,49	5,92	2,07	0,7	0,7	7,38	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
45.	Persentase Peningkatan Penerimaan	9,00	3,62	-7,74	-33,14	-33,14	-368,22	▼	Unit Pelayanan Pendapatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BBNKB di UPPD Kota Surakarta								Daerah Kota Surakarta
46.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta	9,38	18,02	-6,98	-3,8	-3,8	-40,51	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
47.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Surakarta	10,59	7,41	0,04	0,05	0,05	0,47	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
48.	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten	10,79	8,68	2,07	2,5	2,5	23,17	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
49.	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten	10,76	16,60	-7,74	-25,81	-25,81	-239,87	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
50.	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten	9,38	17,23	-5,26	-1,33	-1,33	-14,18	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab.Klaten
51.	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten	10,59	10,81	0,03	0,04	0,04	0,38	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
52.	Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen	10,85	9,80	2,07	4,26	4,26	39,26	▶	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
53.	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen	3,45	13,21	-7,74	-29,55	-29,55	-856,52	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
54.	Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen	9,38	10,65	-9,66	-9,3	-9,3	-99,15	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
55.	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen	10,59	10,59	0,07	0,02	0,02	0,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
56.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	9,74	17,26	2,07	4,91	4,91	50,41		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
57.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	5,74	6,87	-7,74	-28,66	-28,66	-499,30		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
58.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo	9,38	32,85	-22,66	-11,41	-11,41	-121,64		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
59.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo	10,59	10,90	0,01	0,02	0,02	0,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
60.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	4,40	8,44	-7,74	-2,68	-2,68	-60,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
61.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri	9,38	11,25	-11,92	-8	-8	-85,29		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
62.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri	10,59	11,58	-0,15	-0,14	-0,14	-1,32		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
63.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	10,65	15,01	2,07	3,32	3,32	31,17		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kabupaten Wonogiri
64.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	7,82	6,65	2,07	1,74	1,74	22,25	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
65.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	3,45	8,82	-7,74	-28,14	-28,14	-815,65	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
66.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar	9,38	18,69	-11,91	8,06	8,06	85,93	▶	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
67.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kayada diUPPD Kab. Karanganyar	10,59	11,60	-0,04	-0,05	-0,05	-0,47	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
68.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali	11,97	8,17	2,07	2,08	2,08	17,38	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
69.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali	4,03	11,41	-7,74	-30,21	-30,21	-749,63	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
70.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali	9,38	16,19	-2,20	-2	-2	-21,32	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
71.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Boyolali	10,59	9,69	0,07	0,30	0,30	2,83	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
72.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB diUPPD Kabupaten Pati	6,23	18,31	-7,74	-20,82	-20,82	-334,19	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
73.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati	9,38	18,20	-5,38	-2,82	-2,82	-30,06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
74.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pati	10,59	10,79	0,01	0,01	0,01	0,09		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
75.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati	10,65	13,88	2,07	4	4	37,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
76.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora	11,66	10,46	2,07	2,34	2,34	20,07		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
77.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB diUPPD Kabupaten Blora	7,77	6,75	-7,74	-18,28	-18,28	-235,26		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
78.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora	9,38	19,17	-16,37	15,63	15,63	166,63		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
79.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Blora	10,59	10,99	0,08	0,10	0,10	0,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
80.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang	11,68	7,67	2,07	2,38	2,38	20,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
81.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang	11,66	11,15	-7,74	-26,41	-26,41	-226,50		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
82.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang	9,38	16,59	-4,08	-4	-4	-42,64	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
83.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Rembang	10,59	10,86	0,05	0,13	0,13	1,23	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
84.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus	15,50	4,02	2,07	1,94	1,94	12,52	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
85.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus	3,42	11,81	-7,74	-25,42	-25,42	-743,27	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
86.	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus	9,38	6,17	-23,19	-20	-20	-213,22	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
87.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kudus	10,59	11,04	0,00	0,87	0,87	8,22	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
88.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara	10,25	7,02	2,07	5	5	48,78	▶	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
89.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara	5,56	7,29	-7,74	-22,22	-22,22	-399,64	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
90.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Jepara	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Jepara
91.	Persentase Peningkatan Penerimaan	10,59	12,91	0,05	0,05	0,05	0,47	▼	Unit Pelayanan Pendapatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Jepara								Daerah Kabupaten Jepara
92.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan	11,54	13,37	2,07	0,7	0,7	6,07	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
93.	Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan	5,46	6,12	-7,74	-28,54	-28,54	-522,71	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
94.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kota Pekalongan	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
95.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Pekalongan	10,59	11,27	0,01	0,01	0,01	0,09	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
96.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	13,28	15,55	2,07	0,7	0,7	5,27	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kab. Pekalongan
97.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	2,54	1,50	-7,74	-25,87	-25,87	-1018,50	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
98.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan	9,38	14,73	3,25	76,31	76,31	813,54	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
99.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kab. Pekalongan	10,59	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
100.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang	13,39	8,14	2,07	2	2	14,94	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
101.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang	7,03	1,95	-7,74	-22,20	-22,20	-315,79	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
102.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang	9,38	17,39	-7,63	-7	-7	-74,63	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
103.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Batang	10,59	12,43	0,04	0,09	0,09	0,85	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
104.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang	11,48	8,62	2,07	0,73	0,73	6,36	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
105.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang	3,43	0,79	-7,74	-24,06	-24,06	-701,46	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
106.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang	9,38	21,51	-0,63	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
107.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kab. Pemalang	10,59	10,71	0,03	0,03	0,03	0,28	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
108.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal	10,19	20,68	2,07	8	8	78,51	▶	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
109.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal	2,94	2,27	-7,74	-25,38	-25,38	-863,27	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
110.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP diUPPD Kota Tegal	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Daerah Kota Tegal
111.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Tegal	10,59	19,97	-0,32	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
112.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal	14,57	0,48	2,07	-1,69	-1,69	-11,60	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
113.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB diUPPD Kabupaten Tegal	1,49	0,18	-7,74	-25,38	-25,38	-1703,36	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
114.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal	9,38	19,39	-8,58	-3,15	-3,15	-33,58	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
115.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Tegal	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
116.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes	8,06	9,38	2,07	1	1	8,06	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
117.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes	0,46	4,05	-7,74	-19,01	-19,01	-4132,61	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
118.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes	9,38	17,04	-11,41	-8,53	-8,53	-90,94	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
119.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes	10,59	10,76	0,05	0,09	0,09	0,85	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
120.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas	7,74	8,02	2,07	2,01	2,01	25,97	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
121.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas	3,05	8,79	-7,74	-29,56	-29,56	-969,18	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
122.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas	9,38	21,43	-18,09	-18	-18	-191,90	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
123.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas	10,59	11,30	0,07	0,07	0,07	0,63	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
124.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap	8,25	6,31	2,07	2,04	2,04	24,73	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
125.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap	2,48	10,34	-7,74	-22,74	-22,74	-916,94	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
126.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap	9,38	23,83	28,41	33,15	33,15	353,41	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
127.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap	10,59	10,88	0,02	0,02	0,02	0,18	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
128.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	6,23	8,73	2,07	-0,53	-0,53	-8,51	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
129.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	4,55	2,07	-7,74	-30,52	-30,52	-670,77		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
130.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga	9,38	17,61	-4,30	0,95	0,95	10,13		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
131.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga	10,59	11,35	0,10	0,13	0,13	1,23		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
132.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	8,73	8,41	2,07	2,00	2,00	22,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
133.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	5,97	6,41	-7,74	-24,35	-24,35	-407,87		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
134.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara	9,38	16,21	1,20	7,35	7,35	78,36		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
135.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara	10,59	10,71	0,05	0,06	0,06	0,57		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
136.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang	5,91	48,76	2,07	10,24	10,24	173,27		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
137.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang	8,60	0,55	-7,74	-21,87	-21,87	-254,30		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
138.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di	9,38	18,13	21,87	69,16	69,16	737,31		Unit Pelayanan Pendapatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UPPD Kota Magelang								Daerah Kota Magelang
139.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang	10,59	10,59	0,01	-0,01	-0,01	-0,09	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
140.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang	8,64	15,71	2,07	1,71	1,71	19,79	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
141.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang	3,53	16,97	-7,74	-22,83	-22,83	-646,74	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
142.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang	9,38	17,66	0,00	18,86	18,86	201,07	●	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
143.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang	10,59	11,12	0,07	0,10	0,10	0,94	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
144.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen	6,75	5,16	2,07	1,73	1,73	25,63	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
145.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen	4,09	13,32	-7,74	-25,23	-25,23	-616,87	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
146.	Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen	9,38	13,77	-19,81	-15,38	-15,38	-163,97	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
147.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10,59	10,72	0,05	0,08	0,08	0,76	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	di UPPD Kabupaten Kebumen								
148.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo	11,55	14,08	2,07	2,67	2,67	23,12	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
149.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo	7,82	6,98	-7,74	-25,51	-25,51	-326,21	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
150.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo	9,38	19,13	-6,18	4,41	4,41	47,01	▶	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
151.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo	10,59	10,59	0,06	0,10	0,10	0,94	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
152.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung	8,35	11,43	2,07	2,44	2,44	29,22	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
153.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung	5,11	25,96	-7,74	-19,91	-19,91	-389,63	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
154.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung	9,38	17,25	-9,07	-5	-5	-53,30	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
155.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung	10,59	11,19	-0,03	0,00	0,00	0,00	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
156.	Persentase Peningkatan Penerimaan PKB di	10,83	8,66	2,07	1,85	1,85	17,08	▼	Unit Pelayanan Pendapatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UPPD Kabupaten Wonosobo								Daerah Kabupaten Wonosobo,
157.	Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	7,16	16,05	-7,74	-17,22	-17,22	-240,50	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo,
158.	Persentase Peningkatan Penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo	9,38	18,38	-3,36	2,96	2,96	31,56	▶	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
159.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo	10,59	12,75	0,10	0,3	0,3	2,83	▼	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo,
II.	**Pengelolaan Keuangan Daerah**								Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
160.	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyusun APBD Tepat Waktu Dan Sesuai Kaidah Perundangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	●	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
161.	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	●	Bidang Anggaran
162.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	●	Bidang Akuntansi
163.	Persentase Realisasi Serapan APBD	95,00	93,00	67,00	86,99	86,99	91,57	▶	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
III.	**Pengelolaan Aset Daerah**								Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
164.	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	72,50	62,50	65	70,23	70,23	96,87	▶	Bidang Aset Daerah

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Keuangan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator urusan Keuangan sebanyak 164 indikator yang terdiri: 13 indikator telah tercapai, 14 indikator berstatus akan tercapai, dan 137 indikator masih perlu upaya keras. Adapun indikator yang capaian perlu upaya keras disebabkan adanya dampak Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan serta menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Indikator yang perlu upaya keras antara lain :

1. Persentase peningkatan penerimaan PKB dikarenakan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak;
2. Persentase peningkatan penerimaan BBNKB dikarenakan lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian besar industri besar otomotif;
3. Persentase peningkatan penerimaan PBBKB dikarenakan penurunan jumlah konsumsi BBM serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina (*y-on-y*) yang juga mengalami penurunan;
4. Persentase peningkatan penerimaan PAP dikarenakan banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tidak adanya konsumen;
5. Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan adanya penurunan penerimaan penerapan *social distancing* dan *physical distancing* sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/ gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat pandemi COVID-19.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 13 indikator kinerja.

Tabel B.IV. 3
Capaian Kinerja Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah**								Badan Kepegawaian Daerah
1.	Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
2.	Persentase PNS yang Meningkat Kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100,00	20,00	40	40,00	40,00	40		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
3.	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100		Bidang Mutasi
4.	Persentase Penanganan Kasus Kepegawaian	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100		Bidang Pembinaan dan Kesejahtera-an Pegawai
5.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang Dikembangkan dan Terintegrasi	100,00	20,00	40	40,00	40,00	40		Bidang Informasi Kepegawaian
6.	Persentase PNS yang Terpetakan Kompetensinya	100,00	20,00	21,50	21,50	21,50	21,5		Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
II.	**Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi**								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7.	Persentase Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang Ditindaklanjuti	80,00	76,00	77	81,13	81,13	101,41		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
8.	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan	3,50	3,50	3,5	3,50	3,50	100		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
III.	**Pengembangan Kompetensi ASN**								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
9.	Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100		Bidang Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kompetensi Teknis
10.	Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi Fungsional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	●	Bidang Pengemba-ngan Kompetensi Jabatan Fungsional
11.	Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	●	Bidang Pengemba-ngan Kompetensi Manajerial
12.	Persentase ASN yang Lulus Latsar CPNS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	●	Bidang Pengemba-ngan Kompetensi Manajerial
IV.	**Sertifikasi Kompetensi ASN**								Badan Pengemba-ngan Sumber Daya Manusia Daerah
13.	Persentase PNS yang Lulus Uji Kompetensi	90,00	82,57	80,00	74,16	74,16	82,4	▶	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel capaian kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 13 indikator dengan rincian 9 indikator tercapai, 3 indikator akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator yang perlu upaya keras adalah Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya disebabkan adnya penerapan protokol Kesehatan secara ketat dalam rangka mengurangi resiko penularan virus Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan pemetaan kompetensi PNS melalui CAT psikometri semula direncanakan sebanyak 2.000 PNS hanya dapat dilaksanakan 426 PNS pada Tahun 2020 yang menyebabkan masih rendahnya jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya dibandingkan target RPJMD 2018-2023.

4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh 2 indikator kinerja :

Tabel B.IV. 4
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

No,	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung JawabTarget
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(4)
I.	**Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah**								BAPPEDA
1.	Persentase implementasi riset dan pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	●	Bidang Riset dan Pengembangan
2.	Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	●	Bidang Inovasi dan Teknologi

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah indikator urusan Penelitian dan Pengembangan sejumlah 2 indikator dengan status keseluruhan telah tercapai.

5. Pengawasan

Kinerja penyelenggaran urusan pengawasan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 indikator kinerja.

Tabel B.IV. 5
Capaian Kinerja Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**Pengawasan Intern Pemerintah**								Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Penanganan Aduan Masyarakat								
1.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Wilayah III	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil III
2.	Persentase Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil III
3.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Lainnya Wilayah III	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil III
4.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Lainnya Wilayah I	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil I
5.	Persentase Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Wilayah I	100,00	100,00	79,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil I
6.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Wilayah I	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil I
7.	Persentase Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	100,00	100,00	36,00	100,00	100,00	100,00		Irbansus
8.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan	100,00	100,00	91,00	100,00	100,00	100,00		Irbansus
9.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Lainnya	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00		Irbansus
10.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Wilayah II	100,00	100,00	93,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil II
11.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang Dilakukan Pengawasan Lainnya Wilayah II	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil II
12.	Persentase Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Wilayah II	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00		Irbanwil II

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisas i Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab Target
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II.	**Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP**								Inspektorat
13.	Persentase APIP Berlisensi Nasional/ Internasional	100	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	▶	Inspektorat
III.	**Pembangunan Budaya Integritas**								Inspektorat
14.	Nilai Budaya Integritas	90	95,00	80,00	85,93	85,93	95,48	▶	Inspektorat
IV.	**Peningkatan Manajemen Mutu**								Inspektorat
15.	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	87,35	95,00	87,15	87,43	87,43	100,09	●	Inspektorat
V.	**Program Manajemen Resiko**								Inspektorat
16.	Persentase OPD yang Memiliki Profil Manajemen Risiko	100	102,08	100	100,00	100,00	100,00	●	Inspektorat

Sumber :Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Urusan Pengawasan terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat uraikan bahwa jumlah indikator urusan Pengawasan sebanyak 16 indikator dengan rincian 14 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai target RPJMD Tahun 2018-2023.

6. Fungsi Lainnya

Kinerja penyelenggaran urusan fungsi lainnya ditunjukkan oleh 63 indikator kinerja.

Tabel B.IV. 6
Capaian Kinerja Fungsi Lainnya

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fungsi Lainnya									
I.	**Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**								Sekretariat Daerah
1.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
2.	Persentase Naskah Kerjasama yang Ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
3.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85	100,00	85,00	100,00	100,00	117,65		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Infrastruktur	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
5.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief)* yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan Dan Pertanian Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
6.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
7.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* yang Diusulkan Sebagai	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kebijakan Bidang Keagamaan								
8.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
9.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
10.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	96	81,48	85,00	85,00	85,00	88,54		Biro Perekonomian Daerah
11.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan *(Policy Brief)* yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Penguatan dan Efisiensi BUMD	93	84,85	85,00	85,00	85,00	91,40		Biro Perekonomian Daerah
12.	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang Diusulkan Sebagai Kebijakan Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80	81,25	80,00	80,00	80,00	100,00		Biro Perekonomian Daerah
II.	**Penataan Peraturan Perundang-Undangan**								
13.	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-Undangan	94	100,00	93,00	100,00	100,00	106,38		Biro Hukum
14.	Persentase Efektifitas Produk Hukum Daerah	94	175,00	93,00	100,00	100,00	106,38		Biro Hukum

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III.	**Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah**								
15.	Persentase OPD yang Pelaksanaan APBDnya Sesuai Target	90	85,50	84,00	84,35	84,35	93,72		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
16.	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang Pelaksanaannya Sesuai Target	85	96,60	80,00	80,68	80,68	94,92		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
17.	Persentase OPD dan Kabupaten/Kota Tertib Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bankeu	88	95,63	87,00	95,24	95,24	108,23		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
18.	Persentase Ketepatan Waktu Penyerahan LKPJ kepada DPRD	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
19.	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Infrastruktur yang Dievaluasi Pelaksanaannya	100	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
20.	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang Dievaluasi Pelaksanaannya	100	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
21.	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang Dievaluasi Pelaksanaannya	100	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
22.	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Keagamaan yang Dievaluasi Pelaksanaannya	100	85,00	80,00	85,00	85,00	85,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
23.	Persentase Kegiatan Strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Dievaluasi Pelaksanaannya	100	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
24.	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan	100	85,00	80,00	85,00	85,00	85,00		Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya								
25.	Persentase OPD yang Mencapai Skor Kematangan organisasi minimal 15	63	95,83	97,56	51,43	51,43	81,63		Biro Organisasi
26.	Persentase OPD yang Efektif Dalam Implementasi ANJAB	86	83	84,00	84,00	84,00	97,67		Biro Organisasi
27.	Persentase UPP yang Mengimplementasikan Standar Pelayanan	59,53	17,70	36,73	34,33	34,33	57,67		Biro Organisasi
28.	Persentase OPD yang Mematuhi Kebijakan Ketatalaksanaan	100	66,67	67,99	67,99	67,99	67,99		Biro Organisasi
29.	Persentase OPD yang Nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Organisasi
30.	Persentase Kabupaten/Kota yang Capaian Sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang Nilainya Meningkat	85	40,00	45,00	45,00	45,00	52,94		Biro Organisasi
31.	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Skor Kematangan Organisasi Minimal 15	48	37,14	51,43	51,43	51,43	107,15		Biro Organisasi
32.	Persentase Capaian Sasaran dan Area Reformasi Birokrasi Provinsi Yang Nilainya Meningkat	97	78	85,00	85,00	85,00	87,63		Biro Organisasi
33.	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	94	100,00	91,00	100,00	100,00	106,38		Biro Hukum
34.	Persentase Produk Hukum yang Diinformasikan Tiap Tahun	94	100,00	91,00	100,00	100,00	106,38		Biro Hukum
35.	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	94	107,00	91,00	100,00	100,00	106,38		Biro Hukum
36.	Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM	94	97,00	91,00	50,00	50,00	53,19		Biro Hukum

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37.	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang Dievaluasi Pelaksanaannya	95	85	89,00	50,00	50,00	52,63		Biro Perekonomian Daerah
38.	Persentase Ketercapaian Peningkatan Laba BUMD Sesuai Target	98	85	70,00	60,00	60,00	61,22		Biro Perekonomian Daerah
39.	Persentase Kegiatan Strategis Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang Dievaluasi Pelaksanaannya	97	87	90,00	70,00	70,00	72,16		Biro Perekonomian Daerah
40.	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	95	90	50,00	91,00	91,00	95,79		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
41.	Persentase Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	80	70	73,00	73,00	73,00	91,25		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
42.	Persentase Aduan dan Sengketa yang Tertangani	80	70	73,00	73,00	73,00	91,25		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
IV.	**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah**								
43.	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
44.	Presentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dievaluasi Pelaksanaan Fungsinya	100	100	85,00	100,00	100,00	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
45.	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi	100	100	85,00	100,00	100,00	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelaksanaan fungsinya								
46.	Presentase Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian yang Dievaluasi Pelaksanaan fungsinya	100,00	100	85,00	100,00	100,00	100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
47.	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Dievaluasi Pelaksanaan Fungsinya	100	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
48.	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100,00	85,00	80,00	85,00	85,00	85,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
49.	Persentase Perangkat Daerah Bidang Umum yang Dievaluasi Pelaksanaan Fungsinya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Biro Umum
50.	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang Dievaluasi Pelaksanaan Fungsinya	90,00	100,00	83,00	100,00	100,00	**111,11**		Biro Perekonomian Daerah
51.	Persentase Tingkat Kesehatan BUMD	90,00	93,33	82,00	60,00	60,00	66,67		Biro Perekonomian Daerah
52.	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang Dievaluasi Pelaksanaan Fungsinya	92,00	100,00	85,00	65,00	65,00	70,65		Biro Perekonomian Daerah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V.	**Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**								Sekretariat Daerah
53.	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100,00	100,00	100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
54.	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Sesuai Kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100	100	100	100,00	100,00	100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
VI.	**Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**								Sekretariat Daerah
55.	Persentase Rata-Rata Ketercapaian IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
56.	Persentase Fasilitasi Dokumen Administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
VII.	**Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan**								Sekretariat Daerah
57.	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100,00	100	50	100,00	100,00	100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
58.	Persentase Layanan Liputan dan Keprotokolan	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00		Biro Umum
59.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Rumah Tangga Pimpinan	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00		Biro Umum
VIII.	**Peningkatan Layanan Kedewanan**								Sekretariat DPRD
60.	Persentase Layanan Bagian Humas	95,00	75,89	51,00	58,54	58,54	61,62		Bagian Humas
61.	Persentase Layanan Bagian Persidangan	95,00	103,34	79,00	89,52	89,52	94,23		Bagian Persidangan
IX.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat**								Badan Penghubung

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	Sta-tus	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisa-si				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
62.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	●	Badan Penghubung
X.	**Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**								Badan Penghubung
63.	Persentase kabupaten/kota yang Difasilitasi Dalam Promosi Produk Unggulan, dan Pelestarian Seni Budaya	100,00	100,00	100	28,57	28,57	28,57	▼	Badan Penghubung

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Keterangan :

● : Tercapai(Capaian 2020 ≥ 100 % dari Target RPJMD

▶ : Akan Tercapai (Capaian 2020 ≥ 30% &< 100 % dari Target RPJMD

▼ : Capaian Tahun 2020 < 30% Target Akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel capaian kinerja fungsi lainnya terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 dapat diuraikan bahwa dari jumlah indikator fungsi lainnya sebanyak 63 indikator dengan rincian 34 indikator berstatus telah tercapai, 28 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras. Adapun indikator yang perlu upaya keras adalah Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya yang disebabkan pembatalan penampilan 5 dari 7 kabupaten dalam kegiatan duta seni di Anjungan Jawa Tengah TMII dikarenakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dan kebijakan managemen TMII terkait penutupan sementara tempat wisata Pandemi Covid-19.

Rekapitulasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Target RPJMD 2018-2023

Urusan/Aspek	Indikator Sasaran	Tercapai	Akan tercapai	Perlu Upaya Keras	Na
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	24	4	15	4	1
Aspek Pelayanan Umum	154	64	74	15	1
Aspek Daya Saing	16	6	8	0	2
Total	**194**	**74**	**97**	**19**	**4**
Persentase		**38,14**	**50,00**	**9,79**	**2,06**

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja Daerah (PD) Terhadap target RPJMD 2018-2023 dapat diuraikan bahwa jumlah Indikator Tujuan dan Sasaran (IKD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 194 Indikator dengan rincian :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat memiliki 24 indikator dengan 4 indikator tercapai, 15 indikator akan tercapai dan 4 Indikator perlu upaya keras dan 1 Indikator masih belum tersedia data (Na).
2. Aspek Pelayanan Umum memiliki 154 indikator dengan 64 indikator tercapai, 74 indikator akan tercapai, 15 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator belum tersedia data (Na).
3. Aspek Daya Saing memiliki 16 indikator dengan 6 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai dan 2 indikator belum terisi data (Na).

Rekapitulasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Aspek Pelayanan Umum Terhadap Target RPJMD 2018-2023

Urusan	Indikator Sasaran	Tercapai	Akan tercapai	Perlu Upaya Keras	Na
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Pendidikan	4	2	1	1	0
Kesehatan	15	6	9	0	0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	1	4	3	0
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	1	1	0	0
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8	3	5	0	0
Sosial	2	0	0	2	0
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja	8	3	5	0	0
PP dan PA	7	2	4	0	1
Pangan	4	1	3	0	0
Pertanahan	1	1	0	0	0
Lingkungan Hidup	4	3	1	0	0
Administrasi Kependudukan &	1	1	0	0	0
Pemberdes	1	1	0	0	0
Pengendalian Penduduk & KB	2	0	1	1	0
Perhubungan	3	0	2	1	0
Komunikasi dan Informatika	3	3	0	0	0
Koperasi dan UKM	2	0	0	2	0
Penanaman Modal	2	1	1	0	0
Kepemudaan dan OR	2	1	1	0	0

Urusan	Indikator Sasaran	Tercapai	Akan tercapai	Perlu Upaya Keras	Na
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Statistik	1	1	0	0	0
Persandian	1	0	1	0	0
Kebudayaan	1	0	1	0	0
Perpustakaan	1	0	1	0	0
Kearsipan	1	0	1	0	0
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan	2	2	0	0	0
Pariwisata	1	0	1	0	0
Pertanian	11	3	8	0	0
Kehutanan	4	2	2	0	0
Energi dan Sumber Daya Mineral	4	2	2	0	0
Perdagangan	1	0	0	1	0
Perindustrian	1	0	0	1	0
Transmigrasi	0	2	0	0	0
Urusan Penunjang Pemerintahan					
Perencanaan	2	2	0	0	0
Keuangan	4	1	1	2	0
Kepegawaian dan Diklat	3	3	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan	1	1	0	0	0
Pengawasan	2	1	1	0	0
Fungsi Lainnya	34	16	18	0	0
Jumlah	**154**	**64**	**75**	**14**	**1**
Persentase		**41,56**	**48,70**	**9,09**	**0,65**

Rekapitulasi Indikator Kinerja Program Terhadap Target RPJMD 2018-2023

Urusan	Indikator Sasaran	Tercapai	Akan tercapai	Perlu Upaya Keras	Na
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Pendidikan	177	130	44	3	
Kesehatan	100	35	56	5	4
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64	2	46	16	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	1	0	3	
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14	6	5	3	
Sosial	31	0	31	0	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja	17	7	7	3	0
PP dan PA	5	2	3	0	
Pangan	14	8	6	0	0
Pertanahan	1	1	0	0	
Lingkungan Hidup	5	2	3	0	0
Administrasi Kependudukan &	3	1	2	0	
Pemberdes	9	2	6	1	
Pengendalian Penduduk & KB	7	3	3	1	
Perhubungan	24	1	17	6	
Komunikasi dan Informatika	3	0	3	0	
Koperasi dan UKM	10	1	4	5	0
Penanaman Modal	8	5	3	0	
Kepemudaan dan OR	7	0	3	4	0
Statistik	2	1	1	0	
Persandian	1	0	1	0	

Urusan	Indikator Sasaran	Tercapai	Akan tercapai	Perlu Upaya Keras	Na
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebudayaan	6	1	5	0	
Perpustakaan	4	0	3	1	
Kearsipan	3	0	3	0	
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan	27	8	10	9	0
Pariwisata	6	0	4	2	
Pertanian	27	11	15	1	
Kehutanan	51	18	33	0	0
Energi dan Sumber Daya Mineral	54	16	29	9	0
Perdagangan	5	4	1	0	0
Perindustrian	5	1	2	2	0
Transmigrasi	2				2
Urusan Penunjang Pemerintahan					
Perencanaan	7	7	0	0	0
Keuangan	164	13	14	137	0
Kepegawaian dan Diklat	13	9	3	1	0
Penelitian dan Pengembangan	2	2	0	0	0
Pengawasan	16	14	2	0	0
Fungsi Lainnya	63	34	28	1	0
Jumlah	**961**	**346**	**396**	**213**	**6**
Persentase	**100,00**	**36,00**	**41,21**	**22,16**	**0,62**

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

RKPD 2022

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMER 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

BUKU III

SCAN ME

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah													**5.211.457.399.000**		**9.058.010.017.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	Nilai Kepuasan Masyarakat										Angka	80,75		80,95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah											**1.096.388.601.000**		**4.944.936.121.000**		
			Nilai SAKIP Perangkat daerah								Angka	80	1.096.388.601.000	80,15	4.944.936.121.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1.096.388.601.000		4.944.936.121.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD					%	100	1.096.388.601.000	100	4.944.936.121.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.096.388.601.000		4.944.936.121.000		
								Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun			Dokumen	8	1.096.388.601.000	8	4.944.936.121.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.096.188.601.000		4.944.736.121.000		
										Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Angka	4	1.096.188.601.000	4	4.944.736.121.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Angka	4	200.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Meningkatnya kulaitas pelayanan perangkat daerah											**4.115.068.798.000**		**4.113.073.896.000**		
			Nilai Kepuasan Masyarakat								Angka	80,75	4.115.068.798.000	80,95	4.113.073.896.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								4.115.068.798.000		4.113.073.896.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	1.203.500.000	100	1.003.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	1	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						351.000.000		351.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	351.000.000	2	351.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				24.000.000		24.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		130.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	100.000.000	0	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	30.000.000	10	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		7.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		85.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000		30.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	51	30.000.000	50	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						389.500.000		389.500.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	389.500.000	2	389.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				153.000.000		153.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	153.000.000	12	153.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.500.000		210.500.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	210.500.000	12	210.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						433.000.000		233.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	433.000.000	2	233.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0	20.000.000	0	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.000.000		51.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	51.000.000	12	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		100.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	300.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	906.000.000	100	901.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						328.000.000		328.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	328.000.000	2	328.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.000.000		110.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	7	80.000.000	7	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000.000		60.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	60.000.000	2	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				60.000.000		60.000.000		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	31	60.000.000	31	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.000.000		333.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	333.000.000	2	333.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		125.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	125.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.000.000		190.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	190.000.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						185.000.000		180.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	185.000.000	2	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		95.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	1.594.500.000	100	1.594.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						330.800.000		330.800.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	330.800.000	2	330.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		90.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	2	70.000.000	2	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		4.800.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.800.000	12	4.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						645.000.000		645.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	645.000.000	2	645.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.000.000		145.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	145.000.000	1	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						344.800.000		344.800.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	344.800.000	2	344.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				141.200.000		141.200.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	141.200.000	12	141.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				183.600.000		183.600.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	183.600.000	12	183.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.900.000		273.900.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	273.900.000	2	273.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.900.000		29.900.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	29.900.000	12	29.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.000.000		43.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	1	43.000.000	1	43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	860.000.000	100	855.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						275.000.000		320.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	275.000.000	2	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		95.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5	15.000.000	5	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	5	15.000.000	15	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.000.000		310.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	310.000.000	2	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		110.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				170.000.000		170.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	170.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275.000.000		225.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	275.000.000	2	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		55.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	55.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		50.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	100.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	934.000.000	100	834.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						333.600.000		333.600.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	333.600.000	2	333.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				140.000.000		140.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	21	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	2	65.000.000	2	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.200.000		16.200.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		5.400.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2		2		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel								
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.400.000		330.400.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	330.400.000	2	330.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		170.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	170.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA BARAT
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				158.400.000		158.400.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	158.400.000	12	158.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.000.000		170.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	270.000.000	2	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel								
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000				
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	100.000.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	897.000.000	100	1.021.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						362.000.000		516.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	362.000.000	2	516.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		225.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	30	100.000.000	30	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	40	30.000.000	50	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		24.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.000.000		144.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	105.000.000	12	144.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	5	-	5	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	1	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360.000.000		380.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	360.000.000	2	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		200.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	180.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				144.000.000		144.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	144.000.000	12	144.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.000.000		125.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	175.000.000	2	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		50.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	847.500.000	100	847.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						308.500.000		308.500.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	308.500.000	2	308.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000		100.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	50.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		100.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	50.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						329.000.000		329.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	329.000.000	2	329.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.000.000		110.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	160.000.000	2	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel								
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		50.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	100.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah					%	100	2.870.855.000	100	2.955.355.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						524.100.000		578.600.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	524.100.000	2	578.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.125.000		26.125.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	26.125.000	12	26.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				278.375.000		278.375.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5	200.000.000	6	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	5	78.375.000	6	78.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		104.500.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	50.000.000	12	104.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83.600.000		83.600.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	83.600.000	12	83.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						320.000.000		350.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			Laporan	2	320.000.000	2	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	3	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3	-	3	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		150.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	120.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.473.000.000		1.473.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			Laporan	2	1.473.000.000	2	1.473.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.045.000.000		1.045.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.045.000.000	12	1.045.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				209.000.000		209.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	209.000.000	12	209.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				209.000.000		209.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	209.000.000	12	209.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						553.755.000		553.755.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			Laporan	2	553.755.000	2	553.755.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		35.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				402.325.000		402.325.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	402.325.000	3	402.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.430.000		56.430.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	56.430.000	12	56.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	1.043.000.000	100	1.210.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						329.000.000		474.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	329.000.000	2	474.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.000.000		160.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	75.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	3	30.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA BARAT
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		180.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						443.000.000		474.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	443.000.000	2	474.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		216.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	216.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				225.000.000		240.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	225.000.000	12	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						271.000.000		262.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	271.000.000	2	262.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				24.000.000		24.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.000.000		48.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	24.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	5.315.000.000	100	6.060.000.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.615.000.000		2.115.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	1.615.000.000	2	2.115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000		75.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.080.000.000		1.580.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	14	1.000.000.000	16	1.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	80.000.000	15	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000		95.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000		600.000.000		
								"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah"			Laporan	2	600.000.000	2	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				300.000.000		300.000.000		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	140	300.000.000	70	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	2	300.000.000	0	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.070.000.000		2.070.000.000		
								"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah"			Laporan	2	2.070.000.000	2	2.070.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.350.000.000		1.350.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.030.000.000		1.275.000.000		
								"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah"			Laporan	2	1.030.000.000	2	1.275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		75.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000		700.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	6	600.000.000	7	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		500.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	400.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	2.330.000.000	100	1.980.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						369.000.000		509.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	369.000.000	2	509.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				42.000.000		42.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.000.000		240.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	60.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	4	50.000.000	4	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.000.000		16.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	16.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000		200.000.000		
								"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah"			Laporan	2	150.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		200.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	150.000.000	4	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.146.000.000		946.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	1.146.000.000	2	946.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				520.000.000		520.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	520.000.000	12	520.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				580.000.000		380.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	580.000.000	12	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						665.000.000		325.000.000		
								"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"			Laporan	2	665.000.000	2	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	80.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				410.000.000		100.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	5	410.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelavanan Perangkat Daerah					%	100	841.000.000	100	841.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						261.000.000		261.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	261.000.000	2	261.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	50.000.000	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		8.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	4	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0	-	6	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	-	5	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.000.000		315.000.000		
								"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"			Laporan	2	315.000.000	2	315.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		120.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				180.000.000		180.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265.000.000		265.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	265.000.000	2	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	776.000.000	100	756.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						211.000.000		211.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	211.000.000	2	211.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	0	15.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	2	15.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		85.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.000.000		400.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	400.000.000	2	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				220.000.000		220.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	220.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				170.000.000		170.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	170.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.000.000		145.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			Laporan	2	165.000.000	2	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		80.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	1	100.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	919.440.000	100	891.750.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						251.800.000		264.110.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	251.800.000	2	264.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.500.000		67.500.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.900.000		9.900.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	9.900.000	12	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		19.200.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	19.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.400.000		4.400.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.400.000	12	4.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		108.110.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	108.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan		-		-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						501.940.000		501.940.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	501.940.000	2	501.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.300.000		5.300.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.300.000	12	5.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.400.000		250.400.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	250.400.000	12	250.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	1	6.000.000	1	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				240.240.000		240.240.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	240.240.000	12	240.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.700.000		125.700.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	165.700.000	2	125.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.200.000		16.200.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	4	-	4	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		60.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.500.000		49.500.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	4	49.500.000	4	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	4	-	4	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	886.500.000	100	978.500.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						263.000.000		360.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	263.000.000	2	360.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		121.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	50.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	20.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		36.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		60.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000		95.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		-		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	Unit	0	-	4	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	0	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	0	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		
										Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.000.000		391.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	391.000.000	2	391.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.000.000		190.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	190.000.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				180.000.000		180.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232.500.000		227.500.000		
								"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"			Laporan	2	232.500.000	2	227.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.500.000		2.500.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		45.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		95.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	100.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	1.355.000.000	100	1.355.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-		-		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0	-	12	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						325.000.000		325.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	325.000.000	2	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.000.000		130.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	30.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						500.000.000		500.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	2	500.000.000	2	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		-		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	-	1	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	-	2	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-				
										Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	1	-	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	2	500.000.000	2	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						310.000.000		310.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	310.000.000	2	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				198.000.000		198.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	198.000.000	12	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.000.000		220.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	220.000.000	2	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		20.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				-		-		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0	-	0	-	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangn perangkat daerah					%	100	4.091.489.503.000	100	4.088.989.791.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.056.759.503.000		4.052.989.791.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			Laporan	2	4.056.759.503.000	2	4.052.989.791.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.053.059.503.000		4.049.489.791.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	4.053.059.503.000	12	4.049.489.791.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.700.000.000		3.500.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	3.700.000.000	12	3.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						300.000.000		300.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada			Laporan	2	300.000.000	2	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000		300.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	120.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.03.04					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				180.000.000		-		
										Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	12	180.000.000	12	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000.000		500.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Laporan	2	500.000.000	2	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.03					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				300.000.000		300.000.000		
										Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.05.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		
										Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.05.11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	300	200.000.000	330	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.980.000.000		3.180.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	2	2.980.000.000	2	3.180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				650.000.000		650.000.000		
										Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	10	500.000.000	11	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	3	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA BARAT
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				700.000.000		700.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		1.000.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	800.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.350.000.000		7.650.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			Laporan		7.350.000.000		7.650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				-		200.000.000		
										Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	-	3	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		250.000.000		
										Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	150.000.000	2	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya				7.200.000.000		7.200.000.000		
										Jumlah unit pengadaan aset tetap lainnya	Unit	1	7.200.000.000	0	7.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
										Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.580.000.000		21.600.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	2	21.580.000.000	2	21.600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.600.000.000		2.600.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	2.600.000.000	12	2.600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				18.750.000.000		18.750.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	18.500.000.000	12	18.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Kegiatan	4	250.000.000	4	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.020.000.000		2.770.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			Laporan	2	2.020.000.000	2	2.770.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				245.000.000		245.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	245.000.000	12	245.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.09.07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.08					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		150.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	100.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				800.000.000		1.500.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	10	800.000.000	11	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000		500.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Penguatan karakter dan Ketahanan Budaya													**28.732.500.000**		**26.412.500.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	Angka Partisipasi Seni dan Budaya										Angka	11,5		12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan pendidikan karakter dalam jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai - nilai budaya											**28.732.500.000**		**26.412.500.000**		
			Persentase Jenis seni budaya yang terlayani								%	6,2	28.732.500.000	6,28	26.412.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								18.402.500.000		18.352.500.000		
						Persentase seni budaya Kab/Kota yang terfasilitasi					%	88,75	2.952.500.000	100	2.702.500.000	Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				2.22.02.1.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						2.952.500.000		2.702.500.000		
								Jumlah pelaku seni yang terlayani			Angka	975	550.000.000	1050	550.000.000	SEKSI PELESTARIAN SENI	
				2.22.02.1.02.02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				550.000.000		550.000.000		
										Jumlah SDM yg terbina	Orang	975	550.000.000	1050	550.000.000	SEKSI PELESTARIAN SENI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah seni budaya yang dipentaskan			Angka	198	2.402.500.000	215	2.152.500.000	SEKSI PERTUNJUKAN DAN PAMERAN SENI	
				2.22.02.1.02.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				2.402.500.000		2.152.500.000		
										Jumlah kelompok seni yang di tampilkan	Kelompok	198	2.402.500.000	215	2.152.500.000	SEKSI PERTUNJUKAN DAN PAMERAN SENI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase ragam budaya terlayani					%	2,9	15.450.000.000	3,1	15.650.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				2.22.02.1.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.150.000.000		1.150.000.000		
								presentase objek pemajuan kebdayaan teregristasi nasional			%	2,9	1.150.000.000	3,1	1.150.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
				2.22.02.1.01.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.000.000.000		1.000.000.000		
										Jumlah objek pemajuan kebudayaan terintegrasi provinsi	Angka	18	1.000.000.000	19	1.000.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.02.1.01.02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah SDM lembaga pranata budaya terbina	Orang	70	150.000.000	70	150.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.02.1.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						12.800.000.000		13.000.000.000		
								presentase objek seni tradisi teregristasi nasional			%	0,05	12.800.000.000	0,07	13.000.000.000	SEKSI KESENIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				2.22.02.1.02.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				12.800.000.000		13.000.000.000		
										Jumlah objek seni tradisi teregestrasi provinsi	Angka	5	12.800.000.000	7	13.000.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.02.1.03			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.500.000.000		1.500.000.000		
								presentase lembaga adat terbina			%	30	1.500.000.000	30	1.500.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
				2.22.02.1.03.01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				1.500.000.000		1.500.000.000		
										Jumlah lembaga adat terfasilitasi	Angka	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								3.820.000.000		2.000.000.000		
						Presentase jenis seni tradisi terlayani					%	6,2	3.820.000.000	6,28	2.000.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				2.22.03.1.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.820.000.000		2.000.000.000		
								Prosentase pelaku seni terbina			%	2,7	3.820.000.000	3,4	2.000.000.000	SEKSI KESENIAN	
				2.22.03.1.01.01					Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				2.000.000.000		2.000.000.000		
										Jumlah pelaku seni tradisional yang terfasilitasi	Angka	7771	2.000.000.000	9271	2.000.000.000	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.03.1.01.03					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				1.820.000.000		-		
										Jumlah lembaga seni tradisi terfasilitasi	Angka	0	1.820.000.000	0	-	SEKSI KESENIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								2.980.000.000		2.730.000.000		
						Persentase sumber belajar berbasis budaya					%	1,6	2.980.000.000	1,6	2.730.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				2.22.04.1.01			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						2.980.000.000		2.730.000.000		
								presentase sejarah lokal teregistrasi provinsi			%	2,8	2.980.000.000	2,8	2.730.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	
				2.22.04.1.01.01					Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				2.800.000.000		2.550.000.000		
										Jumlah lembaga sejarah lokal terfasilitasi	Angka	5	2.800.000.000	5	2.550.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.04.1.01.03					Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah pengayaan dan informasi kesejarahan	Angka	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.04.1.01.04					Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah sejarah lokal terfasilitasi	Angka	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								655.000.000		655.000.000		
						Persentase status cagar budaya					%	19,9	655.000.000	20,27	655.000.000	Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				2.22.05.1.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						225.000.000		225.000.000		
								Prosentase Objek Diduga Cagar Budaya teregistrasi provinsi			%	37,95	225.000.000	38,41	225.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
				2.22.05.1.01.01					Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				75.000.000		75.000.000		
										Jumlah objek diduga cagar budaya yang teregister provinsi	Angka	249	75.000.000	252	75.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				2.22.05.1.01.02					Penetapan Cagar Budaya				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah cagar budaya ditetapkan di provinsi	Angka	131	150.000.000	133	150.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				2.22.05.1.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						430.000.000		430.000.000		
								Prosentase cagar budaya peringkat provinsi terkelola			%	47	430.000.000	52,63	430.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	
				2.22.05.1.02.01					Pelindungan Cagar Budaya				150.000.000		150.000.000		
										Jumlah cagar budaya registrasi provinsi terlindungi	Angka	1	150.000.000	2	150.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				2.22.05.1.02.02					Pengembangan Cagar Budaya				100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah cagar budaya teregister provinsi yang direvitalisasi	Angka	1	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				2.22.05.1.02.03					Pemanfaatan Cagar Budaya				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah cagar budaya teregistrasi provinsi yang dimanfaatkan	Angka	15	80.000.000	17	80.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BALI ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				2.22.05.1.02.04					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah SDM cagar budaya terbina	Angka	35	100.000.000	35	100.000.000	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								2.875.000.000		2.675.000.000		
						Survei Kepuasan Pengunjung Museum					Angka	89,15	2.875.000.000	89,19	2.675.000.000	Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
				2.22.06.1.01			Pengelolaan Museum Provinsi						2.875.000.000		2.675.000.000		
								Jumlah koleksi museum dilestarikan			Angka	1800	2.875.000.000	1900	2.675.000.000	SEKSI PELESTARIAN	
				2.22.06.1.01.01					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				900.000.000		840.000.000		
										Jumlah koleksi museum yg dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	Angka	1800	900.000.000	1900	840.000.000	SEKSI PELESTARIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				2.22.06.1.01.03					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1.550.000.000		1.450.000.000		
										Jumlah penyelenggaraan event permuseuman bagi masyarakat	Kegiatan	8	1.550.000.000	8	1.450.000.000	SEKSI PELESTARIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				2.22.06.1.01.04					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				425.000.000		385.000.000		
										Jumlah sarana prasarana museum tersedia	Angka	5	425.000.000	5	385.000.000	SEKSI PELESTARIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB													**2.326.762.793.000**		**2.147.831.005.000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	
	Disparitas APK SMA/SMK/SLB										%	12,88		12,86		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja											**2.326.762.793.000**		**2.147.831.005.000**		
			APK SMA/SMK/SLB								%	84,8	2.036.031.567.000	85,1	1.880.890.602.000		
				1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								2.034.656.567.000		1.877.715.602.000		
						APK SLB					%	84,41	40.625.257.000	84,44	25.522.635.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						40.625.257.000		25.522.635.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	99	40.625.257.000	99	25.522.635.000	Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.38					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				662.850.000		662.850.000		
										Jumlah siswa SLB penerima bantuan perlengkapan peserta didik	Siswa	19678	662.850.000	20661	662.850.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.47					Penylapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan Pendidikan Khusus	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				7.095.167.000		6.769.785.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	3	7.095.167.000	3	6.769.785.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.52					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				32.717.240.000		17.940.000.000		
										Jumlah Siswa SLB Penerima dana BOS	Siswa	9393	32.717.240.000	9862	17.940.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin I					%	222,05	4.071.955.000	223,15	2.396.417.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						4.071.955.000		2.396.417.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	96	4.071.955.000	96,64	2.396.417.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				4.071.955.000		2.396.417.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	4.071.955.000	4	2.396.417.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin II					%	40,9	1.268.300.000	41,12	1.309.958.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.268.300.000		1.309.958.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	80	1.268.300.000	85	1.309.958.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.218.300.000		1.259.958.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	1.218.300.000	4	1.259.958.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin III					%	92,07	3.832.625.000	92,23	3.663.285.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						3.832.625.000		3.663.285.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	98	3.832.625.000	99	3.663.285.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.782.625.000		3.613.285.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	3.782.625.000	4	3.613.285.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SLB Cabdin IV					%	63,65	1.019.400.000	64,18	969.679.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.019.400.000		969.679.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	100	1.019.400.000	100	969.679.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				969.400.000		919.679.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	969.400.000	4	919.679.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin IX					%	68,82	3.567.350.000	69,27	3.273.990.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						3.567.350.000		3.273.990.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	98	3.567.350.000	98	3.273.990.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.517.350.000		3.223.990.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	1	3.517.350.000	1	3.223.990.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin V					%	140,92	1.039.050.000	141,51	970.696.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.039.050.000		970.696.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	98	1.039.050.000	99	970.696.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				989.050.000		920.696.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	989.050.000	4	920.696.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin VI					%	143,61	3.302.075.000	144,71	2.674.613.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						3.302.075.000		2.674.613.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	98	3.302.075.000	99	2.674.613.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.252.075.000		2.624.613.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SLB	Dokumen	4	3.252.075.000	4	2.624.613.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin VII					%	252,95	1.680.950.000	252,96	1.152.248.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.680.950.000		1.152.248.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	97	1.680.950.000	98	1.152.248.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.630.950.000		1.102.248.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SLB	Dokumen	4	1.630.950.000	4	1.102.248.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin VIII					%	67,26	2.607.775.000	67,77	2.266.130.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						2.607.775.000		2.266.130.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	98	2.607.775.000	98	2.266.130.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				2.557.775.000		2.216.130.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	2.557.775.000	4	2.216.130.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin X					%	55,8	1.808.675.000	56,29	1.638.675.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.808.675.000		1.638.675.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	98	1.808.675.000	98	1.638.675.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.758.675.000		1.588.675.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	1.758.675.000	4	1.588.675.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin XI					%	32,77	1.258.550.000	33,23	1.206.706.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.258.550.000		1.206.706.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	100	1.258.550.000	100	1.206.706.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				7.500.000		7.500.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	2	7.500.000	2	7.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.251.050.000		1.199.206.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	1.251.050.000	4	1.199.206.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin XII					%	57,17	4.022.575.000	57,6	3.853.839.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						4.022.575.000		3.853.839.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	99	4.022.575.000	99	3.853.839.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				3.972.575.000		3.803.839.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	3.972.575.000	4	3.803.839.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SLB Cabdin XIII					%	99,67	1.811.950.000	99,69	1.861.304.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.811.950.000		1.861.304.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SLB			%	97,11	1.811.950.000	97,11	1.861.304.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.46					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SLB	Dokumen	0	50.000.000	0	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.51					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1.761.950.000		1.811.304.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	0	1.761.950.000	4	1.811.304.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						APK SMA					%	29,45	553.922.737.000	29,62	515.102.902.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						553.922.737.000		515.102.902.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA			%	100	553.922.737.000	100	515.102.902.000	Bidang Pembinaan SMA	
				1.01.02.1.01.39					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				4.947.000.000		4.947.000.000		
										Jumlah siswa SMA penerima bantuan perlengkapan peserta didik	Siswa	32980	4.947.000.000	33478	4.947.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	3	100.000.000	3	100.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.48					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan Pendidikan SMA	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				44.762.057.000		27.188.402.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	3	44.762.057.000	3	27.188.402.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.53					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				504.013.680.000		482.767.500.000		
										Jumlah siswa SMA penerima dana BOS	Siswa	408295	504.013.680.000	410295	482.767.500.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin I					%	34,78	30.709.200.000	34,82	30.388.332.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						30.709.200.000		30.388.332.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin I			%	96	30.709.200.000	96,64	30.388.332.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				30.709.200.000		30.388.332.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	30.709.200.000	4	30.388.332.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin II					%	31,76	25.638.800.000	31,93	26.135.569.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						25.638.800.000		26.135.569.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin II			%	80	25.638.800.000	85	26.135.569.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				25.588.800.000		26.085.569.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	25.588.800.000	4	26.085.569.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin III					%	31,47	28.818.800.000	31,62	30.258.782.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						28.818.800.000		30.258.782.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin III			%	98	28.818.800.000	99	30.258.782.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				28.768.800.000		30.208.782.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	28.768.800.000	4	30.208.782.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						APK SMA Cabdin IV					%	24,52	20.927.600.000	24,72	20.718.476.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						20.927.600.000		20.718.476.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IV			%	100	20.927.600.000	100	20.718.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				20.877.600.000		20.668.476.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	20.877.600.000	4	20.668.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin IX					%	23,06	34.142.000.000	23,17	34.686.164.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						34.142.000.000		34.686.164.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin IX			%	99	34.142.000.000	99	34.686.164.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				34.092.000.000		34.636.164.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan menengha atas	Dokumen	4	34.092.000.000	4	34.636.164.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin V					%	34,81	33.213.200.000	34,92	32.980.580.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						33.213.200.000		32.980.580.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin V			%	98	33.213.200.000	99	32.980.580.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				33.163.200.000		32.930.580.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	33.163.200.000	4	32.930.580.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin VI					%	25,87	30.250.400.000	26,04	30.872.546.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						30.250.400.000		30.872.546.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VI			%	98	30.250.400.000	99	30.872.546.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				30.200.400.000		30.822.546.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	30.200.400.000	4	30.822.546.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin VII					%	47,02	20.646.800.000	47,28	20.362.904.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						20.646.800.000		20.362.904.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VII			%	97	20.646.800.000	98	20.362.904.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				20.596.800.000		20.312.904.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus	Dokumen	4	20.596.800.000	4	20.312.904.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						APK SMA Cabdin VIII					%	29,71	29.763.200.000	29,84	29.780.470.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						29.763.200.000		29.780.470.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin VIII			%	98	29.763.200.000	98	29.780.470.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				29.713.200.000		29.730.470.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan Menengah Atas	Dokumen	4	29.713.200.000	4	29.730.470.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin X					%	27,66	33.204.800.000	27,78	32.344.704.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						33.204.800.000		32.344.704.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin X			%	98	33.204.800.000	98	32.344.704.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				33.154.800.000		32.294.704.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	33.154.800.000	4	32.294.704.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin XI					%	33,4	23.081.400.000	33,71	23.379.981.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						23.081.400.000		23.379.981.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XI			%	100	23.081.400.000	100	23.379.981.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				21.000.000		21.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	21.000.000	2	21.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				23.060.400.000		23.358.981.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	23.060.400.000	4	23.358.981.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin XII					%	22,44	32.147.600.000	22,59	31.547.538.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						32.147.600.000		31.547.538.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XII			%	99	32.147.600.000	99	31.547.538.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				32.097.600.000		31.497.538.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	32.097.600.000	4	31.497.538.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMA Cabdin XIII					%	31,69	22.293.200.000	31,92	21.707.524.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						22.293.200.000		21.707.524.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMA pada Cacdin XIII			%	98	22.293.200.000	98	21.707.524.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.47					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMA	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.52					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				22.243.200.000		21.657.524.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMA	Dokumen	4	22.243.200.000	4	21.657.524.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						APK SMK					%	55,31	628.569.580.000	55,5	591.576.472.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						628.569.580.000		591.576.472.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK			%	100	628.569.580.000	100	591.576.472.000	Bidang Pembinaan SMK	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.537.950.000		7.537.950.000		
										Jumlah siswa SMK penerima bantuan perlengkapan peserta didik	Siswa	51945	7.537.950.000	52395	7.537.950.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				-		-		
										Jumlah SMK Boarding yang dikelola	Unit	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				100.000.000		200.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	3	100.000.000	3	200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.40					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				100.000.000		200.000.000		
										Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan Pendidikan SMK	Dokumen	1	100.000.000	1	200.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				150.328.070.000		133.288.122.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	5	150.328.070.000	5	133.288.122.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.02.46					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				470.503.560.000		450.350.400.000		
										Jumlah siswa SMK penerima dana BOS	Siswa	281469	470.503.560.000	281469	450.350.400.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin I					%	46,65	45.059.840.000	46,72	38.673.250.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						45.059.840.000		38.673.250.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin I			%	96	45.059.840.000	96,64	38.673.250.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				8.561.950.000		8.561.950.000		
										Jumlah SMK Boarding di kelola	Unit	1	8.561.950.000	1	8.561.950.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				36.497.890.000		30.111.300.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	36.497.890.000	4	30.111.300.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin II					%	42,93	20.454.440.000	42,99	18.557.968.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						20.454.440.000		18.557.968.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin II			%	80	20.454.440.000	85	18.557.968.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		22.500.000		
										Jumlah pengadaan perlengkapan peserta didik	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				793.800.000		1.323.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boarding dikelola	Unit	1	793.800.000	1	1.323.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				19.588.140.000		17.162.468.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	19.588.140.000	4	17.162.468.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK CAbdin III					%	50,79	25.247.988.000	51,44	22.752.116.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						25.247.988.000		22.752.116.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin III			%	98	25.247.988.000	99	22.752.116.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		22.500.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				4.969.588.000		5.498.788.000		
										Jumlah SMK Boarding dan SMK Semi Boarding dikelola	Unit	2	4.969.588.000	2	5.498.788.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				20.205.900.000		17.180.828.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	20.205.900.000	4	17.180.828.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						APK SMK Cabdin IV					%	44,47	16.777.680.000	44,88	14.862.525.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						16.777.680.000		14.862.525.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IV			%	100	16.777.680.000	100	14.862.525.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				45.000.000		45.000.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2	45.000.000	2	45.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.587.600.000		2.646.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola	Unit	2	1.587.600.000	2	2.646.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				15.095.080.000		12.121.525.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	15.095.080.000	4	12.121.525.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin IX					%	54,11	58.949.535.000	54,25	50.550.761.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						58.949.535.000		50.550.761.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin IX			%	98	58.949.535.000	98	50.550.761.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				67.500.000		67.500.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	3	67.500.000	3	67.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				8.302.985.000		10.169.785.000		
										Jumlah SMK Boarding dan Semi Boarding di keleola oleh Cabdin IX	Unit	4	8.302.985.000	4	10.169.785.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				50.529.050.000		40.263.476.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan menengah kejuruan	Dokumen	1	50.529.050.000	1	40.263.476.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin V					%	59,35	40.611.720.000	59,72	33.432.514.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						40.611.720.000		33.432.514.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin V			%	98	40.611.720.000	99	33.432.514.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		22.500.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				793.800.000		1.323.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola	Unit	1	793.800.000	1	1.323.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				39.745.420.000		32.037.014.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	39.745.420.000	4	32.037.014.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin VI					%	56,14	39.470.350.000	56,24	33.373.256.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						39.470.350.000		33.373.256.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VI			%	98	39.470.350.000	99	33.373.256.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				45.000.000		45.000.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2	45.000.000	2	45.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.587.600.000		2.646.000.000		
										Jumlsh SMK Semi Boarding yang di kelola Cabdin VI	Unit	2	1.587.600.000	2	2.646.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				37.787.750.000		30.632.256.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	37.787.750.000	4	30.632.256.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin VII					%	63,64	28.160.940.000	64,02	22.654.670.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						28.160.940.000		22.654.670.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VII			%	98	28.160.940.000	99	22.654.670.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				28.110.940.000		22.604.670.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	28.110.940.000	4	22.604.670.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						APK SMK Cabdin VIII					%	50,83	27.833.240.000	50,99	22.945.196.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						27.833.240.000		22.945.196.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin VIII			%	98	27.833.240.000	99	22.945.196.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		22.500.000		
										jumlah pengadaan Perlengkapan Peserta didik	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				793.800.000		1.323.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boardinng yang dikelola Cabdin VIII	Unit	1	793.800.000	1	1.323.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				26.966.940.000		21.549.696.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan SMK	Dokumen	4	26.966.940.000	4	21.549.696.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin X					%	66,42	32.254.570.000	66,48	26.776.894.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						32.254.570.000		26.776.894.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin X			%	98	32.254.570.000	98	26.776.894.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				45.000.000		45.000.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2	45.000.000	2	45.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				1.587.600.000		2.646.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boarding dikelola oleh Cabdin X	Unit	2	1.587.600.000	2	2.646.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				30.571.970.000		24.035.894.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	30.571.970.000	4	24.035.894.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin XI					%	66,62	15.254.960.000	66,82	13.215.257.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						15.254.960.000		13.215.257.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XI			%	100	15.254.960.000	100	13.215.257.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		22.500.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	22.500.000	0	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				793.800.000		1.323.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boarding yang di kelola cabang dinas XI	Unit	1	793.800.000	1	1.323.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				14.388.660.000		11.819.757.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	14.388.660.000	4	11.819.757.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin XII					%	60,15	33.387.360.000	60,21	27.113.762.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						33.387.360.000		27.113.762.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XII			%	99	33.387.360.000	99	27.113.762.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.31					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				22.500.000		22.500.000		
										Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1	22.500.000	1	22.500.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.37					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				793.800.000		1.323.000.000		
										Jumlah SMK Semi Boarding yang dikelola Cabdin XII	Unit		793.800.000		1.323.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				32.521.060.000		25.718.262.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	32.521.060.000	4	25.718.262.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						APK SMK Cabdin XIII					%	60,59	22.755.540.000	60,63	18.254.314.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						22.755.540.000		18.254.314.000		
								Prosentase Ketercapaian layanan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabdin XIII			%	98	22.755.540.000	98	18.254.314.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.39					Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaraan SMK	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.45					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				22.705.540.000		18.204.314.000		
										Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK	Dokumen	4	22.705.540.000	4	18.204.314.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang					%	18,46	1.000.000.000	21,15	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.000.000.000		2.000.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang			Siswa	26	1.000.000.000	26	2.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.000.000.000		2.000.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat Nasional yang diikuti	Siswa	5	1.000.000.000	5	2.000.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I					%	0,77	50.000.000	1,15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II					%	0,77	50.000.000	0,77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III					%	0,77	50.000.000	0,77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV					%	0,77	50.000.000	1,15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX					%	2,69	50.000.000	3,08	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V					%	0,77	50.000.000	0,77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI					%	0,77	50.000.000	0,77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII					%	3,85	50.000.000	3,85	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII					%	3,46	50.000.000	3,85	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X					%	1,15	50.000.000	1,54	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI					%	0,77	50.000.000	0,77	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII					%	1,15	50.000.000	1,54	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII					%	0,77	50.000.000	1,15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII			Siswa	26	50.000.000	26	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.48					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SLB tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	0	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang					%	8,44	4.000.000.000	9,65	4.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						4.000.000.000		4.000.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang			Siswa	132	4.000.000.000	132	4.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				4.000.000.000		4.000.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat nasional yang diikuti	Kegiatan	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I					%	3,1	50.000.000	3,36	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II					%	0,6	50.000.000	0,86	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III					%	0,17	50.000.000	0,26	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV					%	0,17	50.000.000	0,17	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX					%	0,43	50.000.000	0,6	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V					%	0,43	50.000.000	0,52	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI					%	0,17	50.000.000	0,34	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII					%	0,86	50.000.000	0,86	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII					%	0,69	50.000.000	0,86	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X					%	0,43	50.000.000	0,43	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI					%	0,86	50.000.000	0,86	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII					%	0,34	50.000.000	0,34	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Dokumen	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII					%	0,17	50.000.000	0,17	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII			Siswa	132	50.000.000	132	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMA tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang					%	20,04	2.242.600.000	21,56	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						2.242.600.000		2.000.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang			Siswa	85	2.242.600.000	85	2.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				2.242.600.000		2.000.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat nasional yang diikuti	Kegiatan	3	2.242.600.000	3	2.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin					%	0,76	50.000.000	0,95	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin II			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I					%	4,01	50.000.000	4,2	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin I			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III					%	2,86	50.000.000	2,86	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin III			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV					%	0,38	50.000.000	0,57	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IV			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX					%	1,15	50.000.000	1,15	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin IX			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	6	50.000.000	6	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V					%	1,53	50.000.000	1,72	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin V			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI					%	0,95	50.000.000	0,95	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VI			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII					%	2,29	50.000.000	2,48	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VII			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII					%	2,1	50.000.000	2,1	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin VIII			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	4	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X					%	0,95	50.000.000	0,95	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin X			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI					%	1,34	50.000.000	1,53	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XI			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII					%	1,34	50.000.000	1,53	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XII			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII					%	0,38	50.000.000	0,57	50.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba provinsi yang berjenjang pada Cabdin XIII			Siswa	85	50.000.000	85	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah even lomba SMK tingkat provinsi yang diikuti	Kegiatan	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								875.000.000		2.675.000.000		
						Persentase serapan kurikulum SLB					%	98,75	100.000.000	98,95	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						100.000.000		100.000.000		
								Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SLB			Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				100.000.000		100.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I					%	98,14		98,19		CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus										

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin I			Dokumen	1		1		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus								
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II					%	99,26	5.000.000	99,56	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin II			Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III					%	98,73	5.000.000	98,78	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin III			Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV					%	99,61	5.000.000	99,73	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IV			Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX					%	99,32	5.000.000	99,52	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin IX			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V					%	97,4	5.000.000	97,45	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin V			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VI					%	98,19	5.000.000	98,39	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VI			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII					%	99,57	5.000.000	99,62	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VII			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII					%	98,58	5.000.000	98,63	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin VIII			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X					%	98,68	5.000.000	98,98	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin X			Dokumen		5.000.000		5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I					%	100		100		CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah										
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin I			Dokumen	1		1		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah								
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin II			Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin III			Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin IV			Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin IX			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin V			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VI			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VII			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas Cabdin VIII			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin X			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XI			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XII			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I					%	100	15.000.000	100	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin I			Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II					%	99,48	15.000.000	99,53	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin II			Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III					%	99,69	15.000.000	99,74	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin III			Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV					%	98,52	15.000.000	98,7	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin IV			Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX					%	98,08	15.000.000	98,13	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin IX			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V					%	99,1	15.000.000	99,15	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin V			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI					%	99,52	15.000.000	99,57	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VI			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII					%	100	15.000.000	100	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VII			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII					%	99,47	15.000.000	99,57	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Kejuruan Cabdin VIII			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X					%	98,52	15.000.000	98,57	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin X			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prersentase serapan kurikulum SMA					%	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						200.000.000		200.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah			Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI					%	99,51	5.000.000	99,81	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XI			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII					%	97,3	5.000.000	97,6	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XII			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SLB	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII					%	98,26	5.000.000	98,38	5.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.03.1.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						5.000.000		5.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan khusus pada Cabdin XIII			Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.02.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus				5.000.000		5.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal Khusus	Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII					%	100	10.000.000	100	10.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						10.000.000		10.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah atas pada Cabdin XIII			Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				10.000.000		10.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMA	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI					%	97,73	15.000.000	97,78	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XI			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII					%	100	15.000.000	100	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XIII			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	0	15.000.000	0	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII					%	98,99	15.000.000	99,04	15.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						15.000.000		15.000.000		
								Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan menengah kejuruan pada Cabdin XII			Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyususnan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Prsentase serapan kurikulum SMK					%	99,07	200.000.000	99,12	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.03.1.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						200.000.000		2.000.000.000		
								Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SMK			Dokumen	6	200.000.000	7	2.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
				1.01.03.1.01.01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah				200.000.000		2.000.000.000		
										Jumlah dokumen pedoman penyusunan kurikulum muatan lokal SMK	Dokumen	6	200.000.000	7	2.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								500.000.000		500.000.000		
						Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui					%	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.05.1.02			Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						50.000.000		50.000.000		
								Jumlah Rekomendasi Perijinan SLB			Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.05.1.02.01					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi perijinan SLB	Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan					%	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.05.1.01			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						200.000.000		200.000.000		
								Jumlah Rekomendasi Perijinan SMA			Dokumen	5	200.000.000	5	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
				1.01.05.1.01.01					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi perijinan SMA	Dokumen	5	200.000.000	5	200.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan					%	95	250.000.000	96	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.05.1.01			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						250.000.000		250.000.000		
								Jumlah Rekomendasi Perijinan SMK			Dokumen	20	250.000.000	25	250.000.000	Bidang Pembinaan SMK	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.05.1.01.01					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				250.000.000		250.000.000		
										Jumlah dokumen evaluasi dan rekomendasi perijinan SMK	Dokumen	20	250.000.000	25	250.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademik								%	98,98	1.205.705.000	98,99	1.205.705.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1.205.705.000		1.205.705.000		
						Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik					%	100	280.706.000	100	280.706.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						280.706.000		280.706.000		
								Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya			Orang	170	280.706.000	173	280.706.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
				1.01.02.1.03.49					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus				50.000.000		174.075.000		
										Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB dan Kebudayaan	Orang	104	50.000.000	105	174.075.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.50					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus				230.706.000		106.631.000		
										Jumlah pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependdikan SLB	Kegiatan	66	230.706.000	68	106.631.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik					%	99,97	400.000.000	99,99	400.000.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						400.000.000		400.000.000		
								Jumlah Guru tenaga kependidikan SMA yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya			Orang	85	400.000.000	95	400.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
				1.01.02.1.01.50					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				55.000.000		81.250.000		
										Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	Orang	50	55.000.000	55	81.250.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
				1.01.02.1.01.51					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				345.000.000		318.750.000		
										Jumlah pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependdikan SMA	Kegiatan	35	345.000.000	40	318.750.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
						Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik					%	99,94	524.999.000	99,96	524.999.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						524.999.000		524.999.000		
								Jumlah Guru tenaga kependidikan SMK yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya			Orang	125	524.999.000	135	524.999.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.42					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				51.737.000		51.737.000		
										Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Orang	50	51.737.000	55	51.737.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.43					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				473.262.000		473.262.000		
										Jumlah pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependdikan SMK	Kegiatan	75	473.262.000	80	473.262.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
			Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai stadar								%	83,8	289.273.021.000	83,95	265.482.198.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								289.273.021.000		265.482.198.000		
						Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar					%	98,63	-	98,65	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah II sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar					%	87,86	6.461.661.000	87,87	9.275.925.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						6.461.661.000		9.275.925.000		
								Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP			Unit		6.461.661.000		9.275.925.000	Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.01					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				-		-		
										Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1	-	1	-	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				700.000.000		500.000.000		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2	700.000.000	2	500.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-		-		
										Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000		300.000.000		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	300.000.000	0	300.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.14					Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)								
										Jumlah Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.15					Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)								
										Jumlah Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.16					Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)								
										Jumlah Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.17					Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)								
										Jumlah Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				5.016.321.000		7.975.925.000		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2	5.016.321.000	2	7.975.925.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.19					Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang		-		-	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.29					Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				-		-		
										Jumlah ruang terapis yang direhabilitasi	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.31					Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.03.32					Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.33					Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.34					Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang					Bidang Pembinaan Diksus	
				1.01.02.1.03.35					Pengadaan Mebel Sekolah				-		200.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	0	-	0	200.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				445.340.000		300.000.000		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	445.340.000	0	300.000.000	Bidang Pembinaan Diksus	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I					%	89,85	-	89,9	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah I sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III					%	85,8	-	87,3	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah III sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV					%	80,91	-	80,94	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah IV sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX					%	81,88	-	81,98	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah IX sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V					%	94,57	-	94,6	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah V sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI					%	87,62	-	87,87	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah VI sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah								
										JUmlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII					%	87,23	-	87,51	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah VII sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	-	1	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII					%	80,97	-	81,02	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah VIII sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X					%	89,13	-	89,14	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah X sesuai SNP			Unit	0	-	4	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah						-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		4	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-				
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI					%	91,69	-	91,7	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah XI sesuai SNP			Unit	0	-	10	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII					%	92,19	-	92,2	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah XII sesuai SNP			Unit	0	-	14	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	5	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII					%	81,1	-	81,11	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.03			Pengelolaan Pendidikan Khusus						-		-		
								Jumlah sarpras SLB Wilayah XIII sesuai SNP			Unit	10	-	12	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	2	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.08					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.12					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.18					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	2	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.20					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.24					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.28					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-				
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.03.40					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar					%	72,94	-	72,95	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah II sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar					%	73,63	94.123.918.000	73,8	66.013.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						94.123.918.000		66.013.000.000		
								Jumlah sarana prasarana SMA sesuai SNP			Unit	175	94.123.918.000	200	66.013.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
				1.01.02.1.01.01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				7.275.000.000		9.500.000.000		
										Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	1	7.275.000.000	1	9.500.000.000	Bidang Pembinaan SMA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				8.744.575.000		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	8.744.575.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				2.021.235.000		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	2.021.235.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika				1.513.619.000		1.493.000.000		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	3	1.513.619.000	3	1.493.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia				2.040.423.000		1.405.000.000		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	3	2.040.423.000	3	1.405.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer				1.268.197.000		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	1.268.197.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.492.817.000		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	1.492.817.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.11					Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
										Jumlah unit pembangunan perpustakaan skolah	Unit					Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				999.642.000		11.465.000.000		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	32	999.642.000	34	11.465.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				33.566.107.000		15.457.000.000		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	105	33.566.107.000	110	15.457.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.20					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				4.250.274.000		2.649.000.000		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	12	4.250.274.000	13	2.649.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				3.204.748.000		1.882.000.000		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	8	3.204.748.000	8	1.882.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				4.001.583.000		2.206.000.000		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	9	4.001.583.000	9	2.206.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				4.458.628.000		2.766.000.000		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	11	4.458.628.000	11	2.766.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				605.202.000		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	605.202.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				778.458.000		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	778.458.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				874.204.000		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	874.204.000	0	-	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				6.704.206.000		5.340.000.000		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	26	6.704.206.000	28	5.340.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.36					Pengadaan Mebel Sekolah				2.600.000.000		2.600.000.000		
										JUmlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	0	2.600.000.000	0	2.600.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				7.725.000.000		9.250.000.000		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	63	7.725.000.000	65	9.250.000.000	Bidang Pembinaan SMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I					%	106,87	-	76,95	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah I sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III					%	63,8	-	64,01	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah III sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV					%	71,87	-	73,37	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah IV sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX					%	76,71	146.900.000	76,72	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						146.900.000		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah IX sesuai SNP			Unit	1	146.900.000	1	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				146.900.000		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	146.900.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V					%	68,24	-	69,74	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP			Unit		-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		-			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI					%	71,5	293.800.000	71,51	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						293.800.000		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah VI sesuai SNP			Unit	1	293.800.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				293.800.000		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2	293.800.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-				
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket		-			SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII					%	74,53	-	74,77	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah VII sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										JUmah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VIII					%	76,12	-	76,35	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah VIII sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X					%	63,5	293.800.000	63,88	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						293.800.000		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah X sesuai SNP			Unit	2	293.800.000	6	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia				-				
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer						-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				293.800.000				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2	293.800.000	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI					%	75,1	146.900.000	75,88	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						146.900.000		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah XI sesuai SNP			Unit	1	146.900.000	21	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi						-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Paket	0		0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika						-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Paket	0		0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Paket	0		0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa						-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Paket	0		0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				146.900.000		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	1	146.900.000	2	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0	-	1		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII					%	71,95	250.000.000	73,45	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						250.000.000		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah XII sesuai SNP			Unit	1	250.000.000	31	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru						-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0		0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Julmah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	2	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0	-	5	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	250.000.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII					%	75,25	-	75,35	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						-		-		
								Jumlah sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP			Unit	0	-	8	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.02					Penambahan Ruang Kelas Baru				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.04					Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.05					Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.06					Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.07					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.08					Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.10					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.19					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
										Jumah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.21					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.22					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.23					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia								
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.24					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.25					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.27					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.31					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
				1.01.02.1.01.41					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA	
						Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar					%	88,23	150.000.000	88,5	300.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN II	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						150.000.000		300.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah II sesuai SNP			Unit	0	150.000.000	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		300.000.000		
										Jumlah unit pengadaan mebel	Unit	1	150.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar					%	88,9	182.194.442.000	88,98	183.793.273.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						182.194.442.000		183.793.273.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
								Jumlah sarana prasarana SMK sesuai SNP			Unit	258	182.194.442.000	280	183.793.273.000	Bidang Pembinaan SMK	
				1.01.02.1.02.01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)				13.584.449.000		20.000.000.000		
										Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	2	13.584.449.000	0	20.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				1.750.000.000		1.750.000.000		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5	1.750.000.000	3	1.750.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa				72.530.950.000		70.293.273.000		
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	72.530.950.000	0	70.293.273.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang					Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					Bidang Pembinaan SMK	
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				1.410.000.000		2.000.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	35	1.410.000.000	50	2.000.000.000	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				92.919.043.000		89.750.000.000		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	120	92.919.043.000	130	89.750.000.000	Bidang Pembinaan SMK	
				1.01.02.1.02.34					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah				-		-		
										Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.35					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	Bidang Pembinaan SMK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I					%	85,75	400.000.000	86	400.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN I	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						400.000.000		400.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah I sesuai SNP			Unit	0	400.000.000	0	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.34					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah				400.000.000		400.000.000		
										Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0	400.000.000	0	400.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.35					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III					%	90,18	450.000.000	90,19	600.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN III	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						450.000.000		600.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah III sesuai SNP			Unit	0	450.000.000	0	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		300.000.000		
										Jumlah unit Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	1	150.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.34					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah				300.000.000		300.000.000		
										Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0	300.000.000	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.35					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV					%	85,86	300.000.000	85,87	600.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IV	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						300.000.000		600.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah IV sesuai SNP			Unit	0	300.000.000	0	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Ruang Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		600.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	2	300.000.000	2	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.38					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IX					%	90,55	1.111.600.000	90,76	1.100.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN IX	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						1.111.600.000		1.100.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah IX sesuai SNP			Unit	1	1.111.600.000	1	1.100.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				461.600.000		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	461.600.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										JUmlah pembangunan Ruag laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										JUmlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										JUmlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										JUmlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										JUmlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				450.000.000		900.000.000		
										Jumlah pengadaan mebel sekolah	Unit	3	450.000.000	3	900.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										JUmlah pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.34					Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangnan Gedung dan Ruang Sekolah	Unit	0	200.000.000	0	200.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.35					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah unit pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V					%	89,8	150.000.000	89,81	300.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN V	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						150.000.000		300.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP			Unit	0	150.000.000	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-				
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang		-			SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		300.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	1	150.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI					%	88,97	300.000.000	89,01	600.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VI	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						300.000.000		600.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah VI sesuai SNP			Unit	1	300.000.000	0	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		600.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	2	300.000.000	2	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII					%	92,3	-	92,31	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN VII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						-		-		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah VII sesuai SNP			Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII					%	89,03	150.000.000	89,1	300.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						150.000.000		300.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP			Unit	0	150.000.000	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										JUmlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang		-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	10	-	10	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		300.000.000		
										Jumlah mebel sekolah	Unit	1	150.000.000	1	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X					%	88,63	550.000.000	98	600.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN X	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						550.000.000		600.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah X sesuai SNP			Unit	1	550.000.000	13	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium								
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000		600.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	2	300.000.000	2	600.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000				
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	250.000.000	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI					%	89,9	400.000.000	90,02	300.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XI	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						400.000.000		300.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah XI sesuai SNP			Unit	1	400.000.000	8	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	9	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Paket	0	-	12	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Paket	0	-	6	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Paket	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-				
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-				
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		300.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	0	150.000.000	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	250.000.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII					%	90,65	400.000.000	90,66	300.000.000	CABANG DINAS PENDIDIKAN XII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						400.000.000		300.000.000		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah XII sesuai SNP			Unit	1	400.000.000	38	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang					SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	0		0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.28					Pengadaan Mebel Sekolah				150.000.000		300.000.000		
										Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	0	150.000.000	0	300.000.000	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	250.000.000	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII					%	84,85	-	84,95	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						-		-		
								Jumlah sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP			Unit	0	-	95	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.02.1.02.02					Penambahan Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.04					Pembangunan Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.05					Pembangunan Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.06					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-				
										Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-	0		SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.10					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-	0	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.15					Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	-	45	-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.17					Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang	0	-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.18					Rehabilitasi Ruang Laboratorium				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.19					Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.23					Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-		-		
										Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.33					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-		-		
										Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket		-		-	SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT					%	68,13	500.000.000	73,9	500.000.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				1.01.02.1.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						500.000.000		500.000.000		
								Jumlah Produksi Sumber Belajar SMA Berbasis TIK			Angka	85	150.000.000	90	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				1.01.02.1.01.46					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				150.000.000		100.000.000		
										Jumlah Produksi Sumber Belajar Bbasis TIK Jenjang SMA	Angka	85	150.000.000	90	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
								Jumlah sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran			Angka	605	350.000.000	655	400.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				1.01.02.1.01.49					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		200.000.000		
										Jumlah Kategori Lomba Jenjang SMA	Angka	5	150.000.000	5	200.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.01.51					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan TIK untuk mendukung pembelajaran Jenjang SMA	Orang	600	200.000.000	650	200.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT					%	70,12	500.000.000	76,44	500.000.000	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A	
				1.01.02.1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						500.000.000		500.000.000		
								Jumlah Produksi Sumber Belajar SMK Berbasis TIK			Angka	105	150.000.000	110	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				1.01.02.1.02.38					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				150.000.000		100.000.000		
										Jumlah Produksi Sumber Belajar Bbasis TIK Jenjang SMK	Angka	105	150.000.000	110	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran			Angka	1125	350.000.000	1225	400.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
				1.01.02.1.02.41					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				150.000.000		200.000.000		
										Jumlah Kategori Lomba Jenjang SMK	Angka	5	150.000.000	5	200.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				1.01.02.1.02.43					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan TIK untuk mendukung pembelajaran Jenjang SMK	Orang	1120	200.000.000	1220	200.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB								%	0,07	252.500.000	0,07	252.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								252.500.000		252.500.000		
						Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB					%	0,26	65.000.000	0,26	80.000.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				1.01.04.1.01			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi						65.000.000		80.000.000		
								Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya			Orang	57	28.000.000	60	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
				1.01.04.1.01.01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				28.000.000		40.000.000		
										Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB	Dokumen	14	28.000.000	14	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Guru SLB yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi			Orang	66	37.000.000	69	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	
				1.01.04.1.01.02					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				37.000.000		40.000.000		
										Jumlah Laporan Distribusi Pendidik dan Ketenagapendidikan SLB	Laporan	14	37.000.000	14	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA					%	0,07	87.500.000	0,07	92.500.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				1.01.04.1.01			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi						87.500.000		92.500.000		
								Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya			Orang	98	37.500.000	100	30.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
				1.01.04.1.01.01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				37.500.000		30.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	Dokumen	14	37.500.000	14	30.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Guru SMA yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi			Orang	106	50.000.000	112	62.500.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	
				1.01.04.1.01.02					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				50.000.000		62.500.000		
										Jumlah Laporan Distribusi Pendidik dan Ketenagapendidikan SMA	Laporan	14	50.000.000	14	62.500.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK					%	0,07	100.000.000	0,07	80.000.000	Bidang Ketenagaan Dikbud	
				1.01.04.1.01			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					100.000.000		80.000.000			
								Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya			Orang	98	40.000.000	101	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.04.1.01.01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				40.000.000		40.000.000		
										Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK	Dokumen	14	40.000.000	14	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Guru SMK yang dipindahkan dalam rangka penataan distribusi			Orang	105	60.000.000	109	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
				1.01.04.1.01.02					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				60.000.000		40.000.000		
										Jumlah Laporan Distribusi Pendidik dan Ketenagapendidikan SMK	Laporan	14	60.000.000	14	40.000.000	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**690.697.362.000**		**736.084.586.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72		Dinas Kesehatan	
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**690.697.362.000**		**736.084.586.000**		
						Angka Kematian Balita	Angka	10.45	30.530.179.000	10.43	30.540.282.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						30.530.179.000		30.540.282.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita	%	68.57	30.530.179.000	71.4	30.540.282.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					30.530.179.000		30.540.282.000		
						% Kab/Kota dengan Pelayanan Balita Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	%	57.1	109.897.000	57.1	120.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				109.897.000		120.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk melakukan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang minimal 90 %	%	20	109.897.000	22	120.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						% Kab/Kota Dengan Prevalensi Gizi Buruk < 0,05%	%	74.2	30.420.282.000	74.2	30.420.282.000		
		1.02.02.1.02.06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.420.282.000		30.420.282.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan penanganan bayi resiko stunting	%	20	334.250.000	22	334.250.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk penanganan gizi kurang dan gizi buruk	%	20	30.086.032.000	22	30.086.032.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Angka kematian bayi	Angka	7.9	107.900.000	7.8	130.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						107.900.000		130.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi	%	62.86	107.900.000	65.71	130.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					107.900.000		130.000.000		
						% Kab/Kota dengan Pelayanan Bayi Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 90%	%	97.14	107.900.000	97.14	130.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				107.900.000		130.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk melakukan kunjungan neonatal lengkap minimal 90%	%	25	107.900.000	28	130.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Angka kematian ibu.	Angka	88	3.458.453.000	87.5	4.245.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						3.458.453.000		4.245.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu	%	22.86	3.458.453.000	25.71	4.245.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.458.453.000		4.245.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi untuk melakukan pelayanan santun lansia sesuai standart minimal 50 %	Kabupaten/Kota	48.2	149.400.000	48.2	170.000.000		
		1.02.02.1.02.05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				149.400.000		170.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang memberikan pelayanan kesehatan lansia sesuai standart	Kabupaten/Kota	20	149.400.000	22	170.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						% Kab/Kota dengan Pelayanan Remaja Yang Dilayani Sesuai Standar Minimal 60%	%	91.4	3.096.850.000	91.4	3.805.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				3.096.850.000		3.805.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan Pelayanan kesehatan peduli Remaja Sesuai Standar Minimal 60%	%	20	3.096.850.000	22	3.805.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						% Kab/Kota Yang Melakukan Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	%	97.14	77.025.000	100	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				77.025.000		100.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan untuk melakukan pelayanan persalinan difaskes sesuai standar minimal 95 %	%	30	77.025.000	32	100.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						% Kab/Kota Yang Melaku-Kan Pelayanan Ibu Hamil Sesuai Standar Minimal Sebesar 95 %	%	28.57	120.350.000	31.42	140.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				120.350.000		140.000.000		
						Jumlah Kab/kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan melakukan ANC minimal 6 kali sesuai standar minimal sebesar 95 %	%	20	120.350.000	22	140.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						% Kab/Kota yang melakukan pelayanan KB mantap minimal 5%	%	28.57	14.828.000	31.42	30.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
		1.02.02.1.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				14.828.000		30.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan dilakukan pendampingan pelayanan KB mantap minimal 5 %	%	20	14.828.000	22	30.000.000	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0.2	13.011.006.000	0.21	16.660.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						10.510.000.000		12.810.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik	%	85	10.510.000.000	100	12.810.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					10.510.000.000		12.810.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Kerja Dan Olahraga Baik	%	85	10.510.000.000	100	12.810.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	
		1.02.02.1.02.07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150.000.000		350.000.000		
						Prosentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	%	94	120.000.000	100	300.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	%	94	30.000.000	100	50.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.360.000.000		12.460.000.000		
						Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Yang Memenuhi Syarat	%	77	50.000.000	85	330.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat-Tempat Umum (Ttu) Memenuhi Syarat	%	71	110.000.000	77	330.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM	%	85	10.200.000.000	100	11.800.000.000	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.501.006.000		3.850.000.000		
						Persentase kab/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	51.43	851.006.000	60	1.950.000.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					851.006.000		1.950.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Mencapai Desa Siaga Aktif Mandiri 11%	%	77.14	851.006.000	80	1.950.000.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				851.006.000		1.950.000.000		
						Jumlah Kab/Kota Yang Telah Mengimplementasikan Kebijakan PHBS	Kabupaten/Kota	6	78.200.000	7	536.635.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Tema Pesan Dalam Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Masyarakat	Jenis	5	522.806.000	5	956.550.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Kab/Kota Yang Telah Mencapai Rumah Tangga Sehat 76,5%	%	71.43		74.3	70.895.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 %	%	68.5	250.000.000	71.42	385.920.000	SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	%	50	250.000.000	55	250.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan terfasilitasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam kurun waktu tertentu selama 1 (satu) tahun	Kelompok	10	100.000.000	11	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Organisasi kemasyarakatan dan organisasi Profesi kesehatan teradvokasi dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran	Kelompok	10	100.000.000	11	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di BKIM	Kali	10	150.000.000	15	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah penyuluhan tentang kesehatan Indera penglihatan dan pendengaran pada masyarakat di BKIM	Kali	100	150.000.000	110	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	%	71	250.000.000	86	250.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	4	100.000.000	5	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi Penguatan UKBM di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	4	70.000.000	5	70.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah tema penyuluhan TKesehatan di Balkesmas wil Ambarawa	Paket	7	150.000.000	7	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Ambarawa	Kali	53	150.000.000	55	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	%	71.42	250.000.000	85.71	100.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	2	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	4	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						jumlah Kab / Kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di Wilker balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	2	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000				
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Klaten	Jenis	7	150.000.000	7		SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000				
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Klaten	Kali	51	150.000.000	55		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Prosentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	%	71.42	250.000.000	85.71	350.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		150.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang	Kabupaten/Kota	7	100.000.000	7	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	3	50.000.000	4	75.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						jumlah Kab / Kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	3	50.000.000	4	75.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		200.000.000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wilayah Magelang	Jenis	7	150.000.000	7	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000		200.000.000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wilayah Magelang	Kali	50	150.000.000	55	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Prosentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati	%	71.42	250.000.000	85.71	550.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		350.000.000		
						Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	2	100.000.000	3	350.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		350.000.000		
						Jumlah kab / kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	4	70.000.000	5	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah kab / kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	2	30.000.000	3	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		200.000.000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas Wilayah Pati	Jenis	7	150.000.000	7	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000		200.000.000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wilayah Pati	Kali	54	150.000.000	55	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Prosentase Kab/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	%	71.42	250.000.000	85.71	250.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	5	100.000.000	6	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						JUmlah kab/kota yang difasilitasi pembentukan UKBM di wilayah kerja Balkesmas Wilayah Semarang	Kabupaten/Kota	4	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kab/kota yang difasilitasi untuk mencapai STBM di wilayah kerja Balkesmas Wilayah Semarang	Kabupaten/Kota	2	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balkesmas wil Semarang	Paket	7	150.000.000	7	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wlayah Semarang	Kali	50	150.000.000	55	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK	%	58	150.000.000	60	150.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah tema penyuluhan kesehatan di Balabkes PAK	Angka	4	150.000.000	5	150.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.05.1.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah penyuluhan tentang program prioritas pada masyarakat di Balabkes PAK	Kali	24	150.000.000	36	150.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohusodo	%	100	2.070.000.000	100	10.270.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.871.656.000		10.070.000.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	1.871.656.000	100	10.070.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.500.000.000		9.700.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95	1.500.000.000	100	9.700.000.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana beserta pendukungnya	Paket	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						4.700.000.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik	Paket	0		3	4.700.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		0		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.500.000.000		5.000.000.000		
						jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	2	1.500.000.000	4	5.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	28000		30000		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					371.656.000		370.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100	371.656.000	100	370.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				371.656.000		370.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	371.656.000	100	370.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	70		70			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	24		24			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	400		500		SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						198.344.000		200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	198.344.000	100	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					198.344.000		200.000.000		
						Jumlah advokasi ,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	5	198.344.000	5	200.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				198.344.000		200.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	1300	198.344.000	1500	200.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr. RM Soedjarwadi	%	95	2.685.520.000	100	10.300.922.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.487.835.000		9.650.922.000		
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	%	0		0			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	0		0			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah ODGJ dan ODMK yang terlayani	Orang	0		0		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	2.487.835.000	100	9.650.922.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.000.000.000		9.162.922.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	2.000.000.000	100	9.162.922.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						2.162.922.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	0		1	2.162.922.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						3.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		1	3.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		0		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000.000		4.000.000.000		
						Jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	1	2.000.000.000	1	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					487.835.000		488.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100	487.835.000	100	488.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				487.835.000		488.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	487.835.000	100	488.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		0		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								450.000.000		
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	88		89	450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							450.000.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	4		4	450.000.000		
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						450.000.000		
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	440		445	450.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						197.685.000		200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	17.71	197.685.000	20.35	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					197.685.000		200.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	6	197.685.000	7	200.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				197.685.000		200.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan promotif preventif pendukung HWW	Orang	1000	197.685.000	1150	200.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82	21.875.000.000	82	27.675.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						21.750.000.000		27.325.000.000		
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100		100			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	38497		42194		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	21.750.000.000	95	27.325.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					21.000.000.000		26.500.000.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	90	21.000.000.000	90	26.500.000.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Terpenuhinya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.03			Pengembangan Rumah Sakit						7.500.000.000		
						Terpenuhinya pengembangan Rumah Sakit	Paket	1		1	7.500.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Paket	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan / alat penunjang medik	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				18.500.000.000		15.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	1	18.500.000.000	1	15.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	3		3		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	1		1		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.500.000.000		4.000.000.000		
						jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	4	2.500.000.000	4	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					750.000.000		825.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	95	750.000.000	95	825.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				750.000.000		825.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	750.000.000	100	825.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	80		80		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	98		100			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	2250		2750		SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						125.000.000		350.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90	125.000.000	95	350.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					125.000.000		350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	125.000.000	3	350.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				125.000.000		350.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	35000	125.000.000	40000	350.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	83	16.492.691.000	84	36.959.954.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						16.442.337.000		36.759.600.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	16.442.337.000	100	36.759.600.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					16.442.337.000		36.759.600.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi	%	60	16.442.337.000	65	36.759.600.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah Pemenuhan Bangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.442.337.000		24.759.600.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1	15.442.337.000	1	24.759.600.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				1.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						10.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1		1	10.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pemenuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah pemenuhan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1		1		SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah pemenuhan Pengadaan Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	80		80			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	1		1		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	34		35			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	3		3			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang mengikuti Diklat	Orang	900		950		BAGIAN DIKLAT	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						50.354.000		200.354.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	85	50.354.000	90	200.354.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					50.354.000		200.354.000		
						Jumlah Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	50.354.000	3	200.354.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				50.354.000		200.354.000		
						Jumlah peserta kegiatan promotif preventif pendukung HWW	Kegiatan	3650	50.354.000	3700	200.354.000	SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN	
						Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	16.588.000.000	90	36.653.300.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						16.338.000.000		36.403.300.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	85	16.338.000.000	90	36.403.300.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.629.622.000		35.653.300.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	15.629.622.000	100	35.653.300.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.000.000.000		28.615.300.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Paket	1	15.000.000.000	1	28.615.300.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						4.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		1	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						2.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		1	2.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		0		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				629.622.000		1.038.000.000		
						Jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	1	629.622.000	1	1.038.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					708.378.000		750.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100	708.378.000	100	750.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				708.378.000		750.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	708.378.000	100	750.000.000	SUB BAGIAN ORPEG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		0		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	%	20		20			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	300		300		SUB BAGIAN DIKLAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						250.000.000		250.000.000		
						Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	250.000.000	20	250.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000		250.000.000		
						jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	250.000.000	3	250.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	1000	250.000.000	1000	250.000.000	SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet	%	85	5.290.956.000	85	13.081.050.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						5.093.216.000		12.381.050.000		
						Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	5.093.216.000	100	12.381.050.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.459.156.000		10.747.000.000		
						Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	80	3.459.156.000	80	10.747.000.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket					SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.03			Pengembangan Rumah Sakit								
						Jumlah Pemenuhan Pengembangan Rumah Sakit	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Paket					SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.459.156.000		5.247.000.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1	2.459.156.000	1	5.247.000.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				1.000.000.000		5.500.000.000		
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1	1.000.000.000	1	5.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah Pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket					SUBBAG RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket					SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket					SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah penyediaan obat, vaksin, makan, minum serta faskes lainnya	Paket					SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					131.800.000		131.800.000		
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	30	131.800.000	30	131.800.000		
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				131.800.000		131.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pasien kusta yang mendapatkan pelayanan	Orang	100	131.800.000	100	131.800.000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.502.260.000		1.502.250.000		
						Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	%	20	1.502.260.000	20	1.502.250.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				1.502.260.000		1.502.250.000		
						Prosentase peningkatan tata kelola RS	%	20	1.502.260.000	20	1.502.250.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Prosentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%					SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								500.000.000		
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%			100	500.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							500.000.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan			50	500.000.000		
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						500.000.000		
						Jumlah SDM kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang			100	500.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						197.740.000		200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	197.740.000	100	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					197.740.000		200.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	70	197.740.000	85	200.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				197.740.000		200.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	250	197.740.000	300	200.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89	2.600.000.000	90	11.220.844.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.000.000.000		10.620.844.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	2.000.000.000	100	10.620.844.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.000.000.000		10.620.844.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	2.000.000.000	100	10.620.844.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.000.000.000		10.620.844.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah paket pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	2	2.000.000.000	2	10.620.844.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	1		1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1		1		SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes (paket)	Paket	1		1		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100		100			
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	100		100		SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						500.000.000		500.000.000		
						Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	30	500.000.000	40	500.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		500.000.000		
						Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	Kegiatan	5	500.000.000	5	500.000.000		
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	540	500.000.000	720	500.000.000	SEKSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						100.000.000		100.000.000		
						Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	100.000.000	40	100.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan	Kegiatan	3	100.000.000	3	100.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung Hospital Without Walls (HWW)	Orang	1500	100.000.000	1800	100.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	63	570.680.222.000	69	526.340.349.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						566.580.222.000		521.040.349.000		
						Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	600.000.000	100	800.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					600.000.000		800.000.000		
						Persentase ketersediaan informasi kesehatan bersumber data rutin	%	100	600.000.000	100	800.000.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	
		1.02.02.1.03.01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				600.000.000		800.000.000		
						Persentase kelengkapan data kesehatan yang terintegrasi	%	80	600.000.000	85	800.000.000	SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin di prov. jateng	%	70	20.881.110.000	75	30.000.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						20.881.110.000		30.000.000.000		
						Prosentase pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin	%	70	20.881.110.000	75	30.000.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				20.881.110.000		30.000.000.000		
						ketersediaan obat dan vaksin	Paket	4	20.881.110.000	4	30.000.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Ambarawa	%	91	2.700.000.000	91	2.630.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						2.125.000.000		1.930.000.000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Ambarawa	Bulan	12	2.125.000.000	12	1.930.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				775.000.000		930.000.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balkesmas Ambarawa	Paket	1	775.000.000	1	930.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				550.000.000		500.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di Balkesmas Ambarawa	Bulan	12	550.000.000	12	500.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				150.000.000		250.000.000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Ambarawa	Paket	1	150.000.000	1	250.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				650.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di Balkesmas Ambarawa	Bulan	12	650.000.000	12	250.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					575.000.000		700.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Ambarawa	Angka	83	575.000.000	85	700.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				575.000.000		700.000.000		
						Prosentase Survey Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa	Angka	83	575.000.000	83	700.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Klaten	%	91	2.200.000.000	91	2.350.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.750.000.000		1.900.000.000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Klaten	Bulan	12	1.750.000.000	12	1.900.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				240.000.000		240.000.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balkesmas Klaten	Paket	1	240.000.000	1	240.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				510.000.000		510.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di Balkesmas Klaten	Bulan	12	510.000.000	12	510.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				100.000.000		250.000.000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten	Paket	2	100.000.000	2	250.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				900.000.000		900.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di Balkesmas Klaten	Bulan	12	900.000.000	12	900.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					450.000.000		450.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Klaten..	Angka	83	450.000.000	83	450.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				450.000.000		450.000.000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan di Balkesmas Klaten..	%	100	450.000.000	100	450.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Magelang	%	91	2.600.000.000	91	2.400.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.300.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Magelang	Bulan	12	2.300.000.000	12	2.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				1.400.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balkesmas Magelang	Paket	1	1.400.000.000	1	1.000.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				300.000.000		500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di Balkesmas Magelang	Bulan	12	300.000.000	12	500.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				130.000.000		250.000.000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang	Paket	1	130.000.000	1	250.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				470.000.000		250.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di Balkesmas Magelang	Bulan	12	470.000.000	12	250.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		400.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Magelang	Angka	83	300.000.000	85	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000		400.000.000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan di Balkesmas Magelang..	%	91	300.000.000	91	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Pati	%	91	2.842.857.000	91	2.990.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.542.857.000		2.500.000.000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas Wilayah Pati	Bulan	12	2.542.857.000	12	2.500.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				1.700.000.000		1.400.000.000		
						Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati	Paket	1	1.700.000.000	1	1.400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				342.857.000		500.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan reagen, bahan habis pakai di Balkesmas Pati	Bulan	12	342.857.000	12	500.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				250.000.000		300.000.000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati	Paket	1	250.000.000	1	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				250.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, vaksin , dan makan minum di Balkesmas Pati	Bulan	12	250.000.000	12	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		490.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wilayah Pati..	%	83	300.000.000	83	490.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000		490.000.000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan di Balkesmas Pati	%	100	300.000.000	100	490.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wil Semarang	%	91.3	2.200.000.000	91.3	2.450.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.900.000.000		2.150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balkesmas Wil Semarang	Bulan	12	1.900.000.000	12	2.150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				750.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Wilayah Semarang	Paket	1	750.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan Reagen, bahan habis pakai di Balkesmas Wilayah Semarang	Bulan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan yang dipenuhi di balkesmas Semarang	Paket	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan makan minum di Balkesmas Wilayah Semarang	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		300.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di Balkesmas Wil Semarang	%	83	300.000.000	83	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000		300.000.000		
						Prosentase kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan di Balkesmas Semarang	%	100	300.000.000	100	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu	%	42.85	525.133.651.000	74.28	427.419.406.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Proporsi Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan unggulan di Jateng	%	55.55	100.000.000	55.55	100.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				100.000.000		100.000.000		
						Proporsi RS Provinsi Jateng dengan Unggulan Di Jawa Tengah	%	14.28	100.000.000	28.57	100.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					525.033.651.000		427.319.406.000		
						presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS	%	73.93	521.813.651.000	74.43	424.579.406.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.16			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				521.813.651.000		424.579.406.000		
						Persentasi Masyarakatyang mendapatkan dukungan kontribusi pembiayaan kesehatan	%	100	521.813.651.000	100	424.579.406.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase Kab/Kota dengan 90% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	96.55	380.000.000	100	1.100.000.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				380.000.000		1.100.000.000		
						Presentase Kab/Kota dengan 90% Labkesda terakreditasi	%	97.55	100.000.000	100	500.000.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase Kab/Kota dengan 90% Puskesmas terakreditasi	%	99.54	140.000.000	100	300.000.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentase Kab/Kota dengan 90% RS terakreditasi	%	100	140.000.000	100	300.000.000	SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Proporsi Kabupaten/Kota dengan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Katentuan	%	31.43	590.000.000	34.29	590.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				190.000.000		190.000.000		
						Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai dengan Standar Minimal 2 Puskesmas	%	60	190.000.000	68.57	190.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.20			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				400.000.000		400.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas Melaksanakan Manajemen Puskesmas dengan Pendekatan Keluarga Sebesar Minimal 20%	%	85.71	200.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	
						Persentase Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20%	%	80	200.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Proporsi Kabupaten/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Ketentuan	%	71.42	2.250.000.000	85.71	1.050.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				150.000.000		200.000.000		
						Proporsi Pelayanan Kesehatan pada Tanggap Darurat Krisis Kesehatan	%	100	150.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.23			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				150.000.000		200.000.000		
						Proporsi Kab/Kota Yang Memiliki Pelayanan Gawat Darurat Pra Rumah Sakit	%	71.43	150.000.000	85.71	200.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.950.000.000		650.000.000		
						Proporsi Kab/Kota Dengan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Unit-Unit Kritis Sesuai Ketentuan	%	71.42	238.450.000	85.71	350.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Proporsi Rs Provinsi Jawa Tengah Yang Melaksanakan RS Tanpa Dinding	%	71.42	121.890.000	85.71	150.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Proporsi Rumah Sakit Dengan Sarana Prasarana Dan Alat (SPA) Penunjang Sesuai Kelas	%	75	1.589.660.000	83	150.000.000	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase Kab/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan	Kabupaten/Kota	35	300.000.000	35	400.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		400.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan sesuai standar pelayanan yang berlaku	Angka	35	300.000.000	35	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000		400.000.000		
						Jumlah Labkesda Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan dan mutu laboratorium	%	100	100.000.000	100	125.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase pelayanan pengujian alat kesehatan di Fasyankes	%	20	100.000.000	25	150.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar di Balabkes PAK	%	78	100.000.000	80	125.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK	Sertifikat	4	4.922.604.000	4	17.900.943.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					4.922.604.000		17.900.943.000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di Balabkes PAK	Bulan	12	4.922.604.000	12	17.900.943.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.02.02.1.01.02			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.521.661.000		2.500.000.000		
						Jumlah Pembangunan fasilitas kesehatan Balabkes PAK	Paket	1	1.521.661.000	0	2.500.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						12.000.000.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang Dipenuhi Di Balabkes PAK	Paket			1	12.000.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	5		5		SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai lainnya di Balabkes PAK	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				1.556.082.000		1.556.082.000		
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat alat kesehatan/ peralatan laboratorium yang dipenuhi di Balabkes PAK	Paket	10	1.556.082.000	12	1.556.082.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.644.861.000		1.644.861.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan reagen di Balabkes PAK	Bulan	12	1.644.861.000	12	1.644.861.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM	%	66.7	2.200.000.000	66.7	31.700.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.900.000.000		31.400.000.000		
						Jumlah bulan tersedianya fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Prov di BKIM	Bulan	12	1.900.000.000	12	31.400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						30.000.000.000		
						Jumlah gedung yang dibangun	Unit	1		1	30.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				500.000.000				
						Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Yang terpenuhi Di BKIM	Paket	1	500.000.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)				500.000.000		400.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Reagen, Bahan Habis Pakai Di BKIM	Bulan	12	500.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				250.000.000		250.000.000		
						bulan terpenuhinya pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan di BKIM	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengadaan peralatan / peralatan laborarorium kesehatan yang terpenuhii di BKIM	Unit	100	200.000.000	150	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				650.000.000		750.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Obat, vaksin, Dan Makan Minum Di BKIM	Bulan	12	650.000.000	12	750.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		300.000.000		
						Angka kepuasan pelanggan di BKIM	%	86	300.000.000	87	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.27			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000		300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar di BKIM	%	100	300.000.000	100	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.300.000.000		2.700.000.000		
						Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	70	500.000.000	70	900.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		900.000.000		
						Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	%	85	500.000.000	100	900.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				500.000.000		900.000.000		
						Persentase SDM Kesehatan Yang Dikembangkan Kompetensinya	%	65	500.000.000	70	900.000.000	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	%	91	1.800.000.000	92	1.800.000.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.800.000.000		1.800.000.000		
						Persentase pelatihan yang sesuai standart	%	90	1.800.000.000	95	1.800.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.800.000.000		1.800.000.000		
						Persentase peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan yang terakreditasi	%	95	1.800.000.000	97	1.800.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						1.800.000.000		2.600.000.000		
						Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan	%	67	1.800.000.000	71	2.600.000.000	Bidang Sumber Daya Kesehatan	
				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					1.700.000.000		2.500.000.000		
						Persentase Sarana Distribusi farmasi, alkes dan Sarana Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	70	1.700.000.000	75	2.500.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.01.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK				1.700.000.000		2.500.000.000		
						Sarana Distribusi farmasi, alkes dan sarana pelayanan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	70	1.700.000.000	75	2.500.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					100.000.000		100.000.000		
						Persentase Sarana produksi farmasi dan makanan minuman Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	60	100.000.000	65	100.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	
		1.02.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				100.000.000		100.000.000		
						Sarana produksi Farmasi dan makanan minuman Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	%	60	100.000.000	65	100.000.000	SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	72	1.227.148.000	75	2.560.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.227.148.000		2.560.000.000		
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas	%	71.42	75.000.000	85.71	270.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					75.000.000		270.000.000		
						Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	5	75.000.000	6	270.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				75.000.000		270.000.000		
						Jumlah kab / kota dengan angka kesakitan DBD < 46 / 1000 penduduk di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	5	25.000.000	6	85.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah kab / kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS > 40 % di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	4	25.000.000	5	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah kab / kota dengan CNR > 100 / 100.000 penduduk di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	5	25.000.000	6	85.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	71.4	60.000.000	74.3	140.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					60.000.000		140.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5	60.000.000	6	140.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				60.000.000		140.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/1000 penduduk di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5	15.000.000	6	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	40.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100.000 pendd di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	4	15.000.000	5	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah kab/kota dengan kasus malaria di wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	1	10.000.000	1	20.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	71.42	75.000.000	85.71	150.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					75.000.000		150.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	5	75.000.000	6	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				75.000.000		150.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/1000 penduduk di wilkes Balkesmas Klaten..	Kabupaten/Kota	6	25.000.000	7	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilkes Balkes Klaten..	Kabupaten/Kota	6	25.000.000	7	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah kab/kota dengna CNR > 100/100.000 pendd di wilker Balkes Klaten..	Kabupaten/Kota	4	25.000.000	5	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang	%	57.14	80.000.000	71.42	120.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					80.000.000		120.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	3	80.000.000	4	120.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				80.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/100.000 penduduk di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	5	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100.000 pendd di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah kab/kota dengan kasus Malaria di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71.42	80.000.000	85.71	80.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	4	80.000.000	5	80.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan angka kesakitan DBD < 46/1000 penduduk di wilkes Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	20.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kab/kota dengan cakupan penemuan HIV AIDS >40% di wilkes Balkes Semarang	Kabupaten/Kota	5	30.000.000	6	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah kab/kota dengan CNR > 100/100.000 penduduk di wilker Balkesmas Wilayah Semarang	Kabupaten/Kota	4	30.000.000	5	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Prosentase kab/kota dengan peningkatan kinerja program PM	%	60	857.148.000	68.57	1.800.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					857.148.000		1.800.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan Dan Penurunan Kasus Penyakit Menular	%	71.43	857.148.000	80	1.800.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				857.148.000		1.800.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian target penyakit tular vektor dan zoonosis	%	74.29	318.500.000	80	900.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Penemuan/deteksi dini Penyakit Menular Langsung	%	68.57	538.648.000	74.29	900.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	74	1.248.774.000	77	3.760.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.248.774.000		3.760.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	%	85.71	400.000.000	100	400.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Kab/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	Kabupaten/Kota	30	400.000.000	35	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pelayanan kesehatani indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif	Kabupaten/Kota	30	400.000.000	35	400.000.000	SEKSI PENUNJANG PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	%	49	40.000.000	52	60.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					40.000.000		60.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5	40.000.000	6	60.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				40.000.000		60.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balkesmas Ambarawa	Kabupaten/Kota	5	40.000.000	6	60.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati	%	71.42	25.000.000	85.71	150.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.000.000		150.000.000		
						Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	5	25.000.000	6	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				25.000.000		150.000.000		
						Jumlah kab / kota dengan puskesmas yang melaksanakan posbindu institusi di wilayah kerja Balkesmas Pati	Kabupaten/Kota	4	25.000.000	5	150.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	%	42.85	20.000.000	57.14	30.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		30.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang..	Kabupaten/Kota	4	20.000.000	5	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	30.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	%	71.42	25.000.000	85.71	50.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					25.000.000		50.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	5	25.000.000	6	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				25.000.000		50.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balkesmas Klaten	Kabupaten/Kota	6	25.000.000	7	50.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	%	71.42	20.000.000	85.71	20.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	20.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu Institusi di Wilker Balkesmas Semarang	Kabupaten/Kota	5	20.000.000	6	20.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Prosentase kab/kota dengan peningkatan kinerja program PTM dan keswa	%	74	718.774.000	77	3.050.000.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					718.774.000		3.050.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini PTM dan Keswa, Napza	%	85	718.774.000	88	3.050.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				383.219.000		2.500.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan desa yang melaksanakan layanan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM)	%	97	300.000.000	100	2.000.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Kab/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini gangguan penglohatan dan pendengaran	%	49	33.219.000	52	200.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kab/Kota Dengan Puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Cervik Dengan Metode Iva	%	85	50.000.000	88	300.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				185.555.000		300.000.000		
						Persentase kab/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan jiwa	%	90	185.555.000	100	300.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.14			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA				150.000.000		250.000.000		
						Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas Yang melaksanakan layanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)	%	10	150.000.000	15	250.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	2.831.513.000	100	5.687.885.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.831.513.000		5.687.885.000		
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100.000.000	100	200.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		200.000.000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Ambarawa	%	100	100.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100.000.000		200.000.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di wilker Balkesmas Ambarawa	%	100	100.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100.000.000	100	150.000.000		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Magelang	%	100	100.000.000	100	150.000.000		
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100.000.000		150.000.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di wilker Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	100.000.000	100	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100.000.000	100	200.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		200.000.000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Klaten	%	100	100.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100.000.000		200.000.000		
						Persentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di wilker Balkesmas Klaten	%	100	100.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	2.331.513.000	100	4.837.885.000	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.331.513.000		4.837.885.000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam	%	100	1.731.513.000	100	3.837.885.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				300.000.000		750.000.000		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pra bencana/KLB	%	100	300.000.000	100	750.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.02.02.1.02.02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1.031.513.000		2.087.885.000		
						Prosentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berdampak dan akan beresiko pada kasus KLB	%	100	1.031.513.000	100	2.087.885.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.02.02.1.02.18			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				400.000.000		1.000.000.000		
						prosentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bencana/Krisis Kesehatan	%	100	100.000.000	100	500.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Prosentase respon cepat pelayanan kesehatan tahap tanggap darurat bencana / krisis kesehatan	%	100	300.000.000	100	500.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Uci Desa	%	99	600.000.000	99	1.000.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	
		1.02.02.1.02.17			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				600.000.000		1.000.000.000		
						Tercapaonya Imunisasi Dasar Lengkap	%	99	600.000.000	99	1.000.000.000	SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100.000.000	100	200.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		200.000.000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas pati	%	100	100.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100.000.000		200.000.000		
						Persentase kabupaten / kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat, dan pasca bencana / KLB di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	100	100.000.000	100	200.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Persentase kab/kota dengan penanggulangan KLB/Bencana <24 jam ditangani oleh balkesmas Semarang	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	
		1.02.02.1.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100.000.000		100.000.000		
						Presentase kab/kota yang difasilitasi pemberian yankes pra, saat dan pasca bencana/KLB di Wilayah Kerja Balkesmas Wilayah Semarang	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
meningkatkan tata kelola organisasi									**2.378.386.244.000**		**2.235.197.239.000**	**Dinas Kesehatan**	
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5		Dinas Kesehatan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja								**93.644.278.000**		**97.120.000.000**		
						Nilai SAKIP	Angka	88	93.644.278.000	89	97.120.000.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						93.644.278.000		97.120.000.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	88	93.644.278.000	89	97.120.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					933.750.000		1.400.000.000		
						Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD	%	95	933.750.000	100	1.400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				425.000.000		800.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	425.000.000	10	800.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				508.750.000		600.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	508.750.000	4	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					92.710.528.000		95.620.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	92.710.528.000	2	95.620.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				91.260.528.000		93.970.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	91.260.528.000	12	93.970.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				228.389.000		350.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	228.389.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				221.611.000		300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Laporan	1	221.611.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1		1	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						100.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Laporan	0		1	100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**2.284.741.966.000**		**2.138.077.239.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	2.284.741.966.000	85.5	2.138.077.239.000	Dinas Kesehatan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.284.741.966.000		2.138.077.239.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	33	36.000.000.000	35	38.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					36.000.000.000		38.000.000.000		
						Cost Recovery rate (CRR) Parsial	%	95	36.000.000.000	100	38.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				36.000.000.000		38.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	36.000.000.000	100	38.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Cost Recovery Rate Total (CRR Total)	%	82	870.000.000.000	82.5	720.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					870.000.000.000		720.000.000.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	100	870.000.000.000	100	720.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				870.000.000.000		720.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan BLUD	%	90	870.000.000.000	95	720.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						CRR total	%	45	42.000.000.000	46	42.500.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					42.000.000.000		42.500.000.000		
						CRR parsial	%	99.5	42.000.000.000	100	42.500.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				42.000.000.000		42.500.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	42.000.000.000	100	42.500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						CRR total	%	52.94	164.000.000.000	53.69	165.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					164.000.000.000		165.000.000.000		
						CRR Parsial	%	100	164.000.000.000	100	165.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				164.000.000.000		165.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	164.000.000.000	100	165.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						CRR Total	%	35	41.374.000.000	35	47.028.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					41.374.000.000		47.028.000.000		
						Persentase CRR Parsial	%	94	41.374.000.000	95	47.028.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				41.374.000.000		47.028.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	41.374.000.000	100	47.028.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						CRR Total	%	78	426.000.000.000	81	380.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					426.000.000.000		380.000.000.000		
						Persentase CRR parsial	%	90	426.000.000.000	95	380.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				426.000.000.000		380.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	86	426.000.000.000	87	380.000.000.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						CRR Total	%	42	54.000.000.000	45	55.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Peningkatan Pelayanan BLUD					54.000.000.000		55.000.000.000		
						CRR Parsial	%	94	54.000.000.000	96	55.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				54.000.000.000		55.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	54.000.000.000	100	55.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						"Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah"	%	100	13.630.195.000	100	13.881.261.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					400.000.000		500.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	400.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	200.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					400.000.000		400.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	Orang	25	200.000.000	25	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.160.043.000		3.500.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1	3.160.043.000	1	3.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				885.043.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	885.043.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	300.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				400.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	400.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				400.000.000		500.000.000		
						Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	1	400.000.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					500.000.000		404.968.000		
						Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	500.000.000	1	404.968.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				50.000.000		34.968.000		
						Jumlah unit pengadaan mebeleur	Unit	5	50.000.000	5	34.968.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		100.000.000		
						Pengadaan aset tak berwujud	Unit	1	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		120.000.000		
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	10	200.000.000	10	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.770.152.000		7.776.293.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	7.770.152.000	1	7.776.293.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12	125.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.700.000.000		2.700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	2.700.000.000	12	2.700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				330.977.000		337.118.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	330.977.000	12	337.118.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.614.175.000		4.614.175.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	4.614.175.000	12	4.614.175.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.400.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1.400.000.000	1	1.300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	300.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap tak berwujud	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.700.000.000	100	3.830.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	5	50.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					900.000.000		900.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	900.000.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.000.000		160.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				84.000.000		84.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	84.000.000	12	84.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000		350.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	100.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					930.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	930.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				193.000.000		193.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	193.000.000	12	193.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				320.000.000		320.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	320.000.000	12	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				410.000.000		480.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	410.000.000	12	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					320.000.000		330.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	320.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				70.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	70.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	5.500.000.000	100	5.652.000.000	Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.000.000.000		3.000.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.000.000.000		3.000.000.000		
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	3.000.000.000	12	3.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.000.000	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		50.000.000		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	60	25.000.000	60	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					925.000.000		1.005.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan adminstrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	925.000.000	12	1.005.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				90.000.000		90.000.000		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.000.000		60.000.000		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	55.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		150.000.000		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	125.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		100.000.000		
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	100	50.000.000	200	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					291.500.000		297.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	291.500.000	12	297.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.000.000		47.000.000		
						Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	20	47.000.000	30	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				44.500.000		50.000.000		
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	5	44.500.000	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Pengadaan Mebel	Unit	20	50.000.000	30	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	150.000.000	10	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					980.500.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	980.500.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				380.500.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	380.500.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95.000.000		95.000.000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					278.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	278.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan/berkala dan pajak kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Bulan	12	13.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Aset Tetap Tak Berwujud	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	150.000.000	3	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan dipenuhinya pemeliharaan mebel	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala di sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.600.000.000	100	4.180.600.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Jasa Pelayanan)	Bulan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	5	30.000.000	5	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					834.000.000		1.144.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	834.000.000	1	1.144.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				228.000.000		250.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	148.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	80.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				64.400.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	64.400.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				325.000.000		600.000.000		
						umlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	325.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.600.000		9.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.600.000	12	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					275.000.000		350.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	275.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	110.000.000	5	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				70.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	70.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	12	95.000.000	6	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					761.000.000		896.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	761.000.000	1	896.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		170.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	162.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				575.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	575.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					500.000.000		540.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	500.000.000	1	540.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	60.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	30.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				310.000.000		300.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	310.000.000	2	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	5.100.000.000	100	5.100.000.000	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.300.000.000		2.300.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.300.000.000		2.300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI KULON
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	12	30.000.000	20	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					628.600.000		900.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	628.600.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		41.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	41.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	75.000.000	15	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	25.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				45.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	45.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				115.000.000		115.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	115.000.000	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				82.000.000		112.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	82.000.000	12	112.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	225.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.600.000		13.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Bulan	1	13.600.000	1	13.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		250.000.000		
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	20.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1		1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						75.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2		5	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.469.600.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.469.600.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				705.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	705.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				102.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	102.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				657.600.000		390.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	657.600.000	12	390.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					651.800.000		600.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	651.800.000	1	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	85.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				196.800.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	196.800.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	250.000.000	3	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> PEDURUNGAN --> KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	52	50.000.000	52	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					900.000.000		900.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	900.000.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				13.000.000		13.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	13.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				227.000.000		227.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	227.000.000	12	227.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.000.000		160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	160.000.000	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.731.387.000	100	3.731.387.000	Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/workshop/seminar	Orang	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					633.000.000		633.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	633.000.000	1	633.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.854.000.000		1.854.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.854.000.000	1	1.854.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				644.000.000		644.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	644.000.000	12	644.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					914.387.000		914.387.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Dokumen	1	914.387.000	1	914.387.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap tak berwujud	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				564.387.000		564.387.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	12	564.387.000	12	564.387.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SEKSI PENUNJANG PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.650.000.000	100	3.718.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	39	50.000.000	39	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					750.000.000		768.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	750.000.000	12	768.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.000.000		24.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	22.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Bulan pemenuhan kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		75.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	70.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		85.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	80.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik)	Dokumen	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud dalam	Unit	2	75.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.000.000		95.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	15	95.000.000	15	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				340.000.000		340.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	340.000.000	12	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				818.000.000		818.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	818.000.000	12	818.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.000.000		450.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	400.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		250.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Bulan	12	200.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah"	%	100	3.900.000.000	100	4.150.000.000	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah laporan administrasi pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (jasa pelayanan)	Bulan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ workshop/ seminar	Orang	2	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					670.000.000		900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1	670.000.000	1	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	100.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya bahan bacaan / buku perpustakaan perangkat daerah	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE (sistem pemerintah berbasis elektronik)	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	Unit	2	75.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.300.000.000		1.120.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1	1.300.000.000	1	1.120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				550.000.000		550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	550.000.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				709.000.000		529.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	709.000.000	12	529.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.000.000		630.000.000		
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	1	430.000.000	1	630.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin /berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap tak berwujud	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		350.000.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	2	150.000.000	2	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala dan sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	%	100	119.903.342.000	100	119.903.342.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					119.903.342.000		119.903.342.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	119.903.342.000	12	119.903.342.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				119.903.342.000		119.903.342.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	119.903.342.000	12	119.903.342.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Unit	1		1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	42.046.685.000	100	46.181.631.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.046.685.000		46.181.631.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	42.046.685.000	1	46.181.631.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				42.046.685.000		46.181.631.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	42.046.685.000	12	46.181.631.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	95.713.824.000	100	96.000.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					95.713.824.000		96.000.000.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	95.713.824.000	1	96.000.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				95.713.824.000		96.000.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	95.713.824.000	12	96.000.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	62.845.413.000	100	72.935.143.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.845.413.000		72.935.143.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	62.845.413.000	1	72.935.143.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				62.845.413.000		72.935.143.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	62.845.413.000	12	72.935.143.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1		1			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	60.946.112.000	100	61.000.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					60.946.112.000		61.000.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	60.946.112.000	12	61.000.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				60.946.112.000		61.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	60.946.112.000	12	61.000.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	90	188.352.729.000	95	210.585.875.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					188.352.729.000		210.585.875.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	24	188.352.729.000	24	210.585.875.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				188.352.729.000		210.585.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	188.352.729.000	12	210.585.875.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	2		2			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	2		2		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	35.048.279.000	100	36.000.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.048.279.000		36.000.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14	35.048.279.000	14	36.000.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.048.279.000		36.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	35.048.279.000	14	36.000.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen						
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit					SUBBAG RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSUD Dr. Moewardi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**16.492.691.000**		**36.959.954.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**16.492.691.000**		**36.959.954.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	83	16.492.691.000	84	36.959.954.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						16.442.337.000		36.759.600.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	16.442.337.000	100	36.759.600.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					16.442.337.000		36.759.600.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dab UKM Rujukan TIngkat Daerah Provinsi	%	60	16.442.337.000	65	36.759.600.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah Pemenuhan Bangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.442.337.000		24.759.600.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1	15.442.337.000	1	24.759.600.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				1.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						10.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1		1	10.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pemenuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah pemenuhan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei,Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1		1		SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah pemenuhan Pengadaan Obat,Vaksin,Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	80		80			
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	1		1		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	34		35			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	3		3			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non Kesehatan yang mengikuti Diklat	Orang	900		950		BAGIAN DIKLAT	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						50.354.000		200.354.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	85	50.354.000	90	200.354.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					50.354.000		200.354.000		
						Jumlah Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	50.354.000	3	200.354.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				50.354.000		200.354.000		
						Jumlah peserta kegiatan promotif preventif pendukung HWW	Kegiatan	3650	50.354.000	3700	200.354.000	SUB BAGIAN HUMAS DAN PEMASARAN	
meningkatkan tata kelola organisasi									**1.058.352.729.000**		**930.585.875.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**1.058.352.729.000**		**930.585.875.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	1.058.352.729.000	85.5	930.585.875.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.058.352.729.000		930.585.875.000		
						Cost Recovery Rate Total (CRR Total)	%	82	870.000.000.000	82.5	720.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					870.000.000.000		720.000.000.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	%	100	870.000.000.000	100	720.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				870.000.000.000		720.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan BLUD	%	90	870.000.000.000	95	720.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian Pelayanan umum ,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	90	188.352.729.000	95	210.585.875.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					188.352.729.000		210.585.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	24	188.352.729.000	24	210.585.875.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				188.352.729.000		210.585.875.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	188.352.729.000	12	210.585.875.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	2		2			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	2		2		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**2.600.000.000**		**11.220.844.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**2.600.000.000**		**11.220.844.000**		
						Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89	2.600.000.000	90	11.220.844.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.000.000.000		10.620.844.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	2.000.000.000	100	10.620.844.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.000.000.000		10.620.844.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	2.000.000.000	100	10.620.844.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.000.000.000		10.620.844.000		
						Jumlah paket pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	2	2.000.000.000	2	10.620.844.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Unit	1		1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1		1		SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes (paket)	Paket	1		1		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG TERAPI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100		100			
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	100		100		SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						500.000.000		500.000.000		
						Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih	%	30	500.000.000	40	500.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					500.000.000		500.000.000		
						Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan	Kegiatan	5	500.000.000	5	500.000.000		
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	540	500.000.000	720	500.000.000	SEKSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						100.000.000		100.000.000		
						Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	100.000.000	40	100.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan	Kegiatan	3	100.000.000	3	100.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung Hospital Without Walls (HWW)	Orang	1500	100.000.000	1800	100.000.000	SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
meningkatkan tata kelola organisasi									**545.903.342.000**		**499.903.342.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**545.903.342.000**		**499.903.342.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	545.903.342.000	85.5	499.903.342.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						545.903.342.000		499.903.342.000		
						CRR Total	%	78	426.000.000.000	81	380.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					426.000.000.000		380.000.000.000		
						Persentase CRR parsial	%	90	426.000.000.000	95	380.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				426.000.000.000		380.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	86	426.000.000.000	87	380.000.000.000	SUBBAGIAN AKUNTANSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	%	100	119.903.342.000	100	119.903.342.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					119.903.342.000		119.903.342.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	119.903.342.000	12	119.903.342.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				119.903.342.000		119.903.342.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	119.903.342.000	12	119.903.342.000	SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Unit	1		1		SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; BANYUMAS --> PURWOKERTO SELATAN --> KELURAHAN BERKOH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSUD Tugurejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**16.588.000.000**		**36.653.300.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**16.588.000.000**		**36.653.300.000**		
						Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	16.588.000.000	90	36.653.300.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						16.338.000.000		36.403.300.000		
						Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	85	16.338.000.000	90	36.403.300.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					15.629.622.000		35.653.300.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	15.629.622.000	100	35.653.300.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				15.000.000.000		28.615.300.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Paket	1	15.000.000.000	1	28.615.300.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						4.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		1	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						2.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		1	2.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		0		SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				629.622.000		1.038.000.000		
						Jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	1	629.622.000	1	1.038.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					708.378.000		750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100	708.378.000	100	750.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				708.378.000		750.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	708.378.000	100	750.000.000	SUB BAGIAN ORPEG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		0		SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terlatih	%	20		20			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	300		300		SUB BAGIAN DIKLAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						250.000.000		250.000.000		
						Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi	%	20	250.000.000	20	250.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					250.000.000		250.000.000		
						jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	250.000.000	3	250.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	1000	250.000.000	1000	250.000.000	SUB BAGIAN TU HUKUM DAN HUMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
meningkatkan tata kelola organisasi									**259.713.824.000**		**261.000.000.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**259.713.824.000**		**261.000.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	259.713.824.000	85.5	261.000.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						259.713.824.000		261.000.000.000		
						CRR total	%	52.94	164.000.000.000	53.69	165.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					164.000.000.000		165.000.000.000		
						CRR Parsial	%	100	164.000.000.000	100	165.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				164.000.000.000		165.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	164.000.000.000	100	165.000.000.000	SUB BAGIAN ANGGARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	95.713.824.000	100	96.000.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					95.713.824.000		96.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	95.713.824.000	1	96.000.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				95.713.824.000		96.000.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	95.713.824.000	12	96.000.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSUD Kelet Donorejo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**5.290.956.000**		**13.081.050.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**5.290.956.000**		**13.081.050.000**		
						Persentase capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet	%	85	5.290.956.000	85	13.081.050.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						5.093.216.000		12.381.050.000		
						Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	5.093.216.000	100	12.381.050.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					3.459.156.000		10.747.000.000		
						Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	80	3.459.156.000	80	10.747.000.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket					SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.02.02.1.01.03			Pengembangan Rumah Sakit								
						Jumlah Pemenuhan Pengembangan Rumah Sakit	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Paket					SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				2.459.156.000		5.247.000.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	1	2.459.156.000	1	5.247.000.000	SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				1.000.000.000		5.500.000.000		
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1	1.000.000.000	1	5.500.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah Pemenuhan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket					SUBBAG RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket					SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket					SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah penyediaan obat, vaksin, makan, minum serta faskes lainnya	Paket					SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					131.800.000		131.800.000		
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	30	131.800.000	30	131.800.000		
		1.02.02.1.02.11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				131.800.000		131.800.000		
						Jumlah pasien kusta yang mendapatkan pelayanan	Orang	100	131.800.000	100	131.800.000	SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.502.260.000		1.502.250.000		
						Persentase Tingkat Capaian Hasil Penilaian Akreditasi Nasional dan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	%	20	1.502.260.000	20	1.502.250.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				1.502.260.000		1.502.250.000		
						Prosentase peningkatan tata kelola RS	%	20	1.502.260.000	20	1.502.250.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Prosentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%					SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								500.000.000		
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%			100	500.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							500.000.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan			50	500.000.000		
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						500.000.000		
						Jumlah SDM kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang			100	500.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						197.740.000		200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	197.740.000	100	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					197.740.000		200.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	70	197.740.000	85	200.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				197.740.000		200.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	250	197.740.000	300	200.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
meningkatkan tata kelola organisasi									**76.422.279.000**		**83.028.000.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**76.422.279.000**		**83.028.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	76.422.279.000	85.5	83.028.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						76.422.279.000		83.028.000.000		
						CRR Total	%	35	41.374.000.000	35	47.028.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					41.374.000.000		47.028.000.000		
						Persentase CRR Parsial	%	94	41.374.000.000	95	47.028.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				41.374.000.000		47.028.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	41.374.000.000	100	47.028.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	35.048.279.000	100	36.000.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.048.279.000		36.000.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	14	35.048.279.000	14	36.000.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.048.279.000		36.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	35.048.279.000	14	36.000.000.000	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen						
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit					SUBBAG RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**2.070.000.000**		**10.270.000.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**2.070.000.000**		**10.270.000.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohusodo	%	100	2.070.000.000	100	10.270.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1.871.656.000		10.070.000.000		
						Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	1.871.656.000	100	10.070.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.500.000.000		9.700.000.000		
						Persentase penyediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	95	1.500.000.000	100	9.700.000.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Jumlah pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana beserta pendukungnya	Paket	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						4.700.000.000		
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medik	Paket	0		3	4.700.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		0		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.500.000.000		5.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	2	1.500.000.000	4	5.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	28000		30000		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					371.656.000		370.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100	371.656.000	100	370.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				371.656.000		370.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	371.656.000	100	370.000.000	SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM Kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	70		70			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	24		24			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	400		500		SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						198.344.000		200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100	198.344.000	100	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					198.344.000		200.000.000		
						Jumlah advokasi ,pemberdayaan,kemitraan,peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	5	198.344.000	5	200.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				198.344.000		200.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	1300	198.344.000	1500	200.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
meningkatkan tata kelola organisasi									**114.946.112.000**		**116.000.000.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**114.946.112.000**		**116.000.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	114.946.112.000	85.5	116.000.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						114.946.112.000		116.000.000.000		
						CRR Total	%	42	54.000.000.000	45	55.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					54.000.000.000		55.000.000.000		
						CRR Parsial	%	94	54.000.000.000	96	55.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				54.000.000.000		55.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	54.000.000.000	100	55.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	60.946.112.000	100	61.000.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					60.946.112.000		61.000.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	12	60.946.112.000	12	61.000.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				60.946.112.000		61.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	60.946.112.000	12	61.000.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSJD Surakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**21.875.000.000**		**27.675.000.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**21.875.000.000**		**27.675.000.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82	21.875.000.000	82	27.675.000.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						21.750.000.000		27.325.000.000		
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100		100			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	100		100			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah ODMK dan ODGJ yang terlayani	Orang	38497		42194		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	90	21.750.000.000	95	27.325.000.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						21.000.000.000		26.500.000.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	90	21.000.000.000	90	26.500.000.000		
		1.02.02.1.01.01			Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								
						Terpenuhinya Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.03			Pengembangan Rumah Sakit						7.500.000.000		
						Terpenuhinya pengembangan Rumah Sakit	Paket	1		1	7.500.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								
						Terpenuhinya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Paket	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan alat kesehatan / alat penunjang medik	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan				18.500.000.000		15.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	1	18.500.000.000	1	15.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	1		1		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	3		3		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	1		1		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.500.000.000		4.000.000.000		
						jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	4	2.500.000.000	4	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					750.000.000		825.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	95	750.000.000	95	825.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				750.000.000		825.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	750.000.000	100	825.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	80		80		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	98		100			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	5		5			
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	2250		2750		SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						125.000.000		350.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	90	125.000.000	95	350.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					125.000.000		350.000.000		
						Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	3	125.000.000	3	350.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				125.000.000		350.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW	Orang	35000	125.000.000	40000	350.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
meningkatkan tata kelola organisasi									**98.845.413.000**		**110.935.143.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**98.845.413.000**		**110.935.143.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	98.845.413.000	85.5	110.935.143.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						98.845.413.000		110.935.143.000		
						Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	33	36.000.000.000	35	38.000.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					36.000.000.000		38.000.000.000		
						Cost Recovery rate (CRR) Parsial	%	95	36.000.000.000	100	38.000.000.000		
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				36.000.000.000		38.000.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	36.000.000.000	100	38.000.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	62.845.413.000	100	72.935.143.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.845.413.000		72.935.143.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	62.845.413.000	1	72.935.143.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				62.845.413.000		72.935.143.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	62.845.413.000	12	72.935.143.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	1		1			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	1		1		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									**2.685.520.000**		**10.300.922.000**		
						Angka Harapan Hidup	Tahun	74.59		74.72			
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian								**2.685.520.000**		**10.300.922.000**		
						Persentase capaian SPM di RSJD Dr. RM Soedjarwadi	%	95	2.685.520.000	100	10.300.922.000		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						2.487.835.000		9.650.922.000		
						Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	%	0		0			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
						Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	0		0			
		1.02.02.1.02.13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah ODGJ dan ODMK yang terlayani	Orang	0		0		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	2.487.835.000	100	9.650.922.000		
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					2.000.000.000		9.162.922.000		
						Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	2.000.000.000	100	9.162.922.000		
		1.02.02.1.01.10			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						2.162.922.000		
						Jumlah pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Paket	0		1	2.162.922.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.11			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan								
						Jumlah pemenuhan sarana layanan kesehatan	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.12			Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						3.000.000.000		
						Jumlah pemenuhan prasarana layanan kesehatan	Paket	0		1	3.000.000.000	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.13			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
						Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.14			Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)								
						Jumlah penyediaan bahan habis pakai	Paket	0		0		SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.20			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah ketersediaan pelayanan telemedicine di fasyankes	Paket	0		0		SUB BAGIAN MANAJEMEN DATA DAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.01.22			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000.000		4.000.000.000		
						Jumlah penyediaan obat, vaksin ,makan minum serta faskes lainnya	Paket	1	2.000.000.000	1	4.000.000.000	SEKSI PENUNJANG MEDIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					487.835.000		488.000.000		
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit	%	100	487.835.000	100	488.000.000		
		1.02.02.1.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit				487.835.000		488.000.000		
						Persentase peningkatan tata kelola RS	%	100	487.835.000	100	488.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.02.1.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional	%	0		0		SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								450.000.000		
						Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	88		89	450.000.000		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							450.000.000		
						Jumlah diklat yang dilaksanakan	Kegiatan	4		4	450.000.000		
		1.02.03.1.02.01			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						450.000.000		
						Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat	Orang	440		445	450.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						197.685.000		200.000.000		
						Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	17.71	197.685.000	20.35	200.000.000		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					197.685.000		200.000.000		
						Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Kegiatan	6	197.685.000	7	200.000.000		
		1.02.05.1.01.01			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				197.685.000		200.000.000		
						Jumlah peserta kegiatan promotif preventif pendukung HWW	Orang	1000	197.685.000	1150	200.000.000	SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
meningkatkan tata kelola organisasi									**84.046.685.000**		**88.681.631.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	85		85.5			
	Meningkatnya kualitas pelayanan								**84.046.685.000**		**88.681.631.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85	84.046.685.000	85.5	88.681.631.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						84.046.685.000		88.681.631.000		
						CRR total	%	45	42.000.000.000	46	42.500.000.000		
				Peningkatan Pelayanan BLUD					42.000.000.000		42.500.000.000		
						CRR parsial	%	99.5	42.000.000.000	100	42.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.10.01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				42.000.000.000		42.500.000.000		
						Capaian realisasi fisik kegiatan	%	100	42.000.000.000	100	42.500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	42.046.685.000	100	46.181.631.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.046.685.000		46.181.631.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	42.046.685.000	1	46.181.631.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				42.046.685.000		46.181.631.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	42.046.685.000	12	46.181.631.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas sesuai dengan Standar Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor									**590.414.539.000**		**482.774.631.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	41.35		42.26		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan baik								**231.193.552.000**		**220.174.026.000**		
						Persentase Panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91.55	231.193.552.000	92.35	220.174.026.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						231.193.552.000		220.174.026.000		
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	97.63	16.724.092.000	98.29	16.154.551.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					16.724.092.000		16.154.551.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 1	Km	99.916	9.622.240.000	75.596	7.487.223.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				5.010.255.000		3.264.307.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 1	Km	1.48	3.410.968.000	0.23	3.264.307.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	0.5	1.599.287.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				4.611.985.000		4.222.916.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1	Km	99.916	4.611.985.000	75.596	4.222.916.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Cilacap 2	Km	73.413	7.101.852.000	73.983	8.667.328.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.174.880.000		4.435.200.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Cilacap 2	Km	0.07	1.610.000.000	0.25	1.400.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	0.5	1.564.880.000	1	3.035.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Cilacap 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				3.926.972.000		4.232.128.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2	Km	73.413	3.926.972.000	73.983	4.232.128.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	95.49	14.592.855.000	95.49	16.156.195.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.592.855.000		16.156.195.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 1	Km	63.053	5.308.591.000	120.81	6.414.157.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				1.532.000.000				
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Magelang 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	0.5	1.532.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				3.776.591.000		6.414.157.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1	Km	63.053	3.776.591.000	120.817	6.414.157.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Magelang 2	Km	143.83	9.284.264.000	170.85	9.742.038.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.064.000.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Magelang 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	1	3.064.000.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Magelang 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.220.264.000		6.718.038.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2	Km	143.83	6.220.264.000	170.85	6.718.038.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	90.6	19.071.151.000	91.89	16.469.765.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					19.071.151.000		16.469.765.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 1	Km	125.33	9.628.041.000	126.33	7.415.976.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.044.000.000		1.512.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 1	Km	1	3.044.000.000	0.5	1.512.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.584.041.000		5.903.976.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1	Km	144.3	6.584.041.000	126.33	5.903.976.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pati 2	Km	140.571	9.443.110.000	140.93	9.053.789.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				4.576.000.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pati 2	Km	0		0.3	1.500.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pati 2	Km	1.5	4.576.000.000	0.5	1.524.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pati 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				4.867.110.000		6.029.789.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	Km	121.601	4.867.110.000	140.931	6.029.789.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	94.92	21.719.302.000	95.71	18.952.127.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					21.719.302.000		18.952.127.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 1	Km	157.9	10.889.987.000	157.9	11.002.706.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.050.000.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	1	3.050.000.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				7.839.987.000		7.978.706.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1	Km	157.9	7.839.987.000	157.9	7.978.706.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Pekalongan 2	Km	90.67	10.829.315.000	92.67	7.949.421.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				6.088.000.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Pekalongan 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	2	6.088.000.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Pekalongan 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				4.741.315.000		4.925.421.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	Km	90.67	4.741.315.000	92.67	4.925.421.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	79.53	35.578.254.000	80.61	31.514.037.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					35.578.254.000		31.514.037.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 1	Km	184.93	17.998.890.000	187.26	16.229.207.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				9.132.000.000		6.886.181.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1	Km	0		0.4	6.886.181.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	2.5	9.132.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.866.890.000		9.343.026.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1	Km	184.93	8.866.890.000	187.26	9.343.026.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Purwodadi 2	Km	191.98	17.579.364.000	194.86	15.284.830.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				7.600.000.000		4.671.699.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		0.95	4.671.699.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	2.5	7.600.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Purwodadi 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.979.364.000		10.613.131.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2	Km	191.98	9.979.364.000	194.86	10.613.131.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	95.33	16.030.850.000	96.06	16.009.726.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					16.030.850.000		16.009.726.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 1	Km	134.13	8.335.412.000	135.18	9.439.030.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				2.378.400.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 1	Km	0.05	800.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	0		1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 1	Km	0.4	1.578.400.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				5.957.012.000		6.415.030.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1	Km	134.13	5.957.012.000	135.18	6.415.030.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Semarang 2	m	87.45	7.695.438.000	87.48	6.570.696.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				4.388.107.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Semarang 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	1.03	4.388.107.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Semarang 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				3.307.331.000		3.546.696.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2	Km	87.45	3.307.331.000	87.48	3.546.696.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92.99	27.163.596.000	93.92	27.355.745.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					27.163.596.000		27.355.745.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 1	Km	188.885	12.785.951.000	191.035	12.637.023.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.366.400.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Surakarta 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	0.6	1.866.400.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 1	Km	1.5	1.500.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				9.419.551.000		9.613.023.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	Km	188.885	9.419.551.000	191.035	9.613.023.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Surakarta 2	Km	233.19	14.377.645.000	231.59	14.718.722.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				3.044.000.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Surakarta 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	1	3.044.000.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Surakarta 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				11.333.645.000		11.694.722.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	Km	233.19	11.333.645.000	231.59	11.694.722.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	95.39	23.523.238.000	96.46	20.440.207.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					23.523.238.000		20.440.207.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 1	Km	85.97	12.656.455.000	86.97	12.573.579.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				6.088.000.000		6.048.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	2	6.088.000.000	2	6.048.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				6.568.455.000		6.525.579.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1	Km	85.97	6.568.455.000	86.97	6.525.579.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Tegal 2	Km	97.87	10.866.783.000	97.72	7.866.628.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				6.007.200.000		3.024.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	1.85	6.007.200.000	1	3.024.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Tegal 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				4.859.583.000		4.842.628.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2	Km	97.87	4.859.583.000	97.72	4.842.628.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	91.52	17.410.464.000	91.92	20.175.933.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					17.410.464.000		20.175.933.000		
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 1	Km	127.595	12.214.322.000	140.93	10.454.766.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				4.100.000.000		1.512.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Wonosobo 1	Km	0.1	1.000.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	1	3.100.000.000	0.5	1.512.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 1	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				8.114.322.000		8.942.766.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1	Km	127.595	8.114.322.000	140.935	8.942.766.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Panjang jalan provinsi yang dijaga dalam kondisi permukaan baik di BPJ Wonosobo 2	Km	44.29	5.196.142.000	109.16	9.721.167.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.09			Rehabilitasi Jalan				1.540.000.000		2.953.440.000		
						Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Wonosobo 2	Km	0		0.6	1.430.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Panjang Rehabilitasi Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	0.5	1.540.000.000	0	1.523.440.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase di Wilayah Wonosobo 2	Km	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				3.656.142.000		6.767.727.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	Km	44.29	3.656.142.000	109.164	6.767.727.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	81.74	2.285.570.000	82.43	1.915.350.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					2.285.570.000		1.915.350.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 1	m	1226.22	1.226.220.000	856	856.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan								
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.226.220.000		856.000.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1	m	1226.22	1.226.220.000	856	856.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Cilacap 2	m	1059.35	1.059.350.000	1059.35	1.059.350.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan								
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m			22.5		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.059.350.000		1.059.350.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2	m	1059.35	1.059.350.000	1059.35	1.059.350.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	91.89	1.798.750.000	92.61	2.121.500.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					1.798.750.000		2.121.500.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 1	m	176.9	276.900.000	694.15	694.150.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan								
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				276.900.000		694.150.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1	m	176.9	276.900.000	694.15	694.150.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Magelang 2	m	1621.85	1.521.850.000	1427.35	1.427.350.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan								
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.521.850.000		1.427.350.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2	m	1621.85	1.521.850.000	1427.35	1.427.350.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	91.49	4.929.350.000	92.4	2.665.050.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.929.350.000		2.665.050.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 1	m	1199.4	2.260.700.000	1188.05	1.188.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				1.028.000.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 1	m	4	1.028.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.232.700.000		1.188.000.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1	m	1232.7	1.232.700.000	1188	1.188.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pati 2	m	1472.35	2.668.650.000	1477.05	1.477.050.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				1.229.600.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pati 2	m	9.2	1.229.600.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.439.050.000		1.477.050.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2	m	1439.05	1.439.050.000	1477.05	1.477.050.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	86.07	10.300.580.000	86.99	2.699.500.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.300.580.000		2.699.500.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 1	m	1598	2.389.000.000	1598.6	1.598.600.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				791.000.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	3.6	791.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.598.000.000		1.598.600.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1	m	1598	1.598.000.000	1598.6	1.598.600.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Pekalongan 2	m	1138.3	7.911.580.000	1100.9	1.100.900.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				6.773.280.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	211.6	6.773.280.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.138.300.000		1.100.900.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	m	1138.3	1.138.300.000	1100.9	1.100.900.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	88.82	3.647.500.000	90.02	4.133.700.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.647.500.000		4.133.700.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 1	m	1958.7	1.958.700.000	1866.5	1.866.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan								
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	0		0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.958.700.000		1.866.500.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1	m	1958.7	1.958.700.000	1866.5	1.866.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Purwodadi 2	m	1688.8	1.688.800.000	1662.4	2.267.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan						604.800.000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	0		3	604.800.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.688.800.000		1.662.400.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2	m	1688.8	1.688.800.000	1662.4	1.662.400.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	84.13	3.063.800.000	84.8	3.038.384.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.063.800.000		3.038.384.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 1	m	1306.6	2.334.800.000	1308.5	1.308.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				1.028.000.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	10	1.028.000.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.306.800.000		1.308.500.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1	m	1306.8	1.306.800.000	1308.5	1.308.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Semarang 2	m	729	729.000.000	723.9	1.729.884.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan						1.005.984.000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	0		5.1	1.005.984.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				729.000.000		723.900.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2	m	729	729.000.000	723.9	723.900.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	92.66	5.375.100.000	94.19	5.690.300.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					5.375.100.000		5.690.300.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 1	m	1266.5	2.092.900.000	1165.1	1.165.100.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				826.400.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	8.2	826.400.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.266.500.000		1.165.100.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	m	1266.5	1.266.500.000	1165.1	1.165.100.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Surakarta 2	m	3282.2	3.282.200.000	3265.2	4.525.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan						1.260.000.000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	0		17	1.260.000.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				3.282.200.000		3.265.200.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	m	3282.2	3.282.200.000	3265.2	3.265.200.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	84.24	3.864.800.000	84.92	5.996.396.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.864.800.000		5.996.396.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 1	m	774.4	1.752.000.000	771.4	771.400.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				977.600.000				
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	6	977.600.000	0		SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				774.400.000		771.400.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1	m	774.4	774.400.000	771.4	771.400.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Tegal 2	m	1236	2.112.800.000	1231.3	5.224.996.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				876.800.000		3.993.696.000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	7	876.800.000	11.7	3.993.696.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.236.000.000		1.231.300.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2	m	1236	1.236.000.000	1231.3	1.231.300.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	92.92	4.114.300.000	93.7	8.685.560.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.114.300.000		8.685.560.000		
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 1	m	1373.2	3.213.200.000	1396.5	4.919.460.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				1.840.000.000		3.522.960.000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	10.8	1.840.000.000	22	3.522.960.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.373.200.000		1.396.500.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1	m	1373.2	1.373.200.000	1396.5	1.396.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Panjang jembatan provinsi yang dijaga dalam kondisi baik di BPJ Wonosobo 2	m	371.1	901.100.000	792.5	3.766.100.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	
		1.03.10.1.01.18			Rehabilitasi Jembatan				530.000.000		2.973.600.000		
						Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	2	530.000.000	11.8	2.973.600.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		1.03.10.1.01.19			Pemeliharaan Rutin Jembatan				371.100.000		792.500.000		
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	m	371.1	371.100.000	792.5	792.500.000	SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
	Meningkatnya panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor								**359.220.987.000**		**262.600.605.000**		
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	41.35	359.220.987.000	42.26	262.600.605.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						359.220.987.000		262.600.605.000		
						Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	3.239.446.000	100	3.442.347.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					3.239.446.000		3.442.347.000		
						Jumlah Dokumen database yang dimutakhirkan	Dokumen	3	3.239.446.000	3	3.442.347.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.04			Survey Kondisi Jalan/Jembatan				3.239.446.000		3.442.347.000		
						Jumlah Dokumen Kondisi Jalan	Dokumen	1	1.854.998.000	1	2.014.899.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Kondisi Jembatan	Dokumen	1	730.575.000	1	773.575.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
						Jumlah Dokumen perhitungan LHR	Dokumen	1	653.873.000	1	653.873.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	43.65	56.424.661.000	44.47	79.925.313.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					56.424.661.000		79.925.313.000		
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 (dalam kilometer)	Km	1	9.539.625.000	2	17.501.588.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.05			Pembangunan Jalan								
						Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 1	Km	0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar				9.539.625.000		17.501.588.000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 1	Km	1	9.539.625.000	2	17.501.588.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan								
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat 1	Km					SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan								
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Barat 1	m					SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover								
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Barat 1	Km					SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan								
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1	m	0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1	
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 (dalam kilometer)	Km	4.1	46.885.036.000	6.5	62.423.725.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	
		1.03.10.1.01.05			Pembangunan Jalan				18.932.014.000		25.200.000.000		
						Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2	Km	1.5	18.932.014.000	2.5	25.200.000.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar				27.953.022.000		37.223.725.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 2	Km	2.6	27.953.022.000	4	37.223.725.000	SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan								
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Barat 2	Km					SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan								
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Barat 2	m					SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover								
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Barat 2	Km					SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan								
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 2	m	0		324		SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39.07	215.711.889.000	40.08	119.640.364.000	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					215.711.889.000		119.640.364.000		
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 (dalam kilometer)	Km	10.85	105.683.529.000	7.7	70.085.605.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar				85.543.529.000		70.085.605.000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Timur 1	Km	10.85	85.543.529.000	6.5	70.085.605.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan								
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur 1	Km					SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan								
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Timur 1	m	0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover								
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Timur 1	Km	0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan				20.140.000.000				
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1	m	109	20.140.000.000	0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan kondisinya menuju standar jalan kolektor baik di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 (dalam kilometer)	Km	4.25	110.028.360.000	5.6	49.554.759.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	
		1.03.10.1.01.06			Pelebaran Jalan Menuju Standar				35.013.000.000		49.554.759.000		
						Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Timur 2	Km	4.25	35.013.000.000	5.6	49.554.759.000	SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.03.10.1.01.08			Rekonstruksi Jalan								
						Panjang Rekonstruksi Jalan di Wilayah Timur 2	Km					SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	
		1.03.10.1.01.12			Pembangunan Jembatan								
						Panjang Pembangunan Jembatan di Wilayah Timur 2	m	0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.03.10.1.01.13			Pembangunan Flyover				75.015.360.000				
						Panjang Pembangunan Flyover di Wilayah Timur 2	Km	0.77	75.015.360.000	0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.03.10.1.01.16			Penggantian Jembatan								
						Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 2	m	0		0		SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 2	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase panjang jalan yang dileger	%	99.71	540.000.000	100	133.350.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					540.000.000		133.350.000		
						Panjang Jalan yang dileger	Km	2397.66	540.000.000	2404.741	133.350.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.03			Pengelolaan Leger Jalan				540.000.000		133.350.000		
						Panjang Jalan yang dileger	Km	50.83	540.000.000	6.89	133.350.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	85.32	16.913.073.000	100	27.704.056.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					16.913.073.000		27.704.056.000		
						Jumlah peralatan kebinamargaan yang tersedia	Unit	516	16.913.073.000	700	27.704.056.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	
		1.03.10.1.01.11			Pemeliharaan Rutin Jalan				16.913.073.000		27.704.056.000		
						Peralatan Kebinamargaan bertambah	Unit	346	13.506.477.000	184	24.166.499.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	Unit	58	2.010.496.000	59	1.489.057.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	Unit	3115	1.396.100.000	2740	2.048.500.000	SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	88.61	4.011.732.000	100	4.050.950.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					4.011.732.000		4.050.950.000		
						Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	4605	4.011.732.000	6000	4.050.950.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	
		1.03.10.1.01.22			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				4.011.732.000		4.050.950.000		
						dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	Dokumen	2	352.823.000	2	247.135.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	Orang	50	654.008.000	50	657.574.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						sertifikat hasil uji mutu konstruksi	Buah	1000	576.181.000	1395	404.971.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						unit Pemeliharaan alat uji	Unit	85	198.480.000	95	202.270.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						unit Penambahan alat uji	Unit	10	2.230.240.000	11	2.539.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	62.380.186.000	100	27.704.225.000	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi					62.380.186.000		27.704.225.000		
						Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	Dokumen	10	21.685.420.000	10	22.733.149.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	
		1.03.10.1.01.21			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				9.150.890.000		10.934.685.000		
						Jumlah Kegiatan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan	1	9.150.890.000	1	10.934.685.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.10.1.01.23			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				12.534.530.000		11.798.464.000		
						Jumlah dokumen pengawasan jalan	Dokumen	8	11.629.860.000	9	11.798.464.000	SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengawasan jembatan	Dokumen	1	904.670.000	0		SEKSI PENGAWASAN TEKNIS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	8	4.017.446.000	5	4.071.076.000	SEKSI RANCANG BANGUN	
		1.03.10.1.01.01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				4.017.446.000		4.071.076.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan	Dokumen	5	3.723.446.000	5	4.071.076.000	SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan	Dokumen	3	294.000.000	0		SEKSI RANCANG BANGUN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						luas lahan yang dibebaskan	m2	8025	36.677.320.000	100	900.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
		1.03.10.1.01.02			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan				36.677.320.000		900.000.000		
						Luas lahan yang dibebaskan untuk bangunan gedung	m2	3000	30.000.000.000	0		SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	
						Luas lahan yang dibebaskan untuk jalan dan jembatan	m2	5025	6.677.320.000	100	900.000.000	SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pelayanan Keciptakaryaan : Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Konstruksi									**77.296.206.000**		**295.836.619.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Persentase jumlah pelayanan air minum dan sanitasi serta bangunan gedung milik daerah menuju baik	%	51.07		52.36		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya akses layak air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat								**28.818.158.000**		**53.132.632.000**		
						Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	88.83	28.818.158.000	90.45	53.132.632.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						28.088.158.000		52.402.632.000		
						Persentase akses layak air minum perdesaan	%	81.55	852.730.000	83.3	852.730.000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					852.730.000		852.730.000		
						Jumlah Sambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan	KK	3239628	852.730.000	3309148	852.730.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.08			Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi				852.730.000		852.730.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota terfasilitasi dalam pengelolaan SPAM perdesaan	Kabupaten/Kota	29	852.730.000	29	852.730.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase akses layak air minum perkotaan	%	92.15	417.560.000	94.15	417.560.000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					417.560.000		417.560.000		
						Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan	KK	2894633	417.560.000	2957458	417.560.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.08			Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi				417.560.000		417.560.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota terfasilitasi dalam pengelolaan SPAM perkotaan	Kabupaten/Kota	6	417.560.000	6	417.560.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	89.39	26.817.868.000	100	51.132.342.000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota					26.817.868.000		51.132.342.000		
						Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun	Liter	1179	26.817.868.000	1319	51.132.342.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				1.290.868.000		1.205.342.000		
						Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun	Dokumen	5	1.290.868.000	1	1.205.342.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.03.1.01.03			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan				25.527.000.000		49.927.000.000		
						Jumlah debit air minum curah SPAM Reg. terbangun	Liter	130	25.527.000.000	140	49.927.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						730.000.000		730.000.000		
						Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	92.8	730.000.000	93.9	730.000.000		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					730.000.000		730.000.000		
						Jumlah sambungan rumah yang terlayani akses air limbah domestik	KK	6800384.19	730.000.000	6941376.46	730.000.000		
		1.03.05.1.01.06			Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik				730.000.000		730.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten/Kota	8	730.000.000	8	730.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi								**48.478.048.000**		**242.703.987.000**		
						Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	13.3	48.478.048.000	14.27	242.703.987.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						45.873.968.000		240.455.445.000		
						Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	13.3	45.873.968.000	14.27	240.455.445.000	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					45.873.968.000		240.455.445.000		
						Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (sampai dengan tahun n)	Unit	507	45.873.968.000	644	240.455.445.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	
		1.03.08.1.01.01			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				45.633.968.000		240.210.445.000		
						Jumlah BGMD menuju berfungsi baik sesuai standar (tahun n)	Unit	3	45.633.968.000	1	240.210.445.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.04			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi				160.000.000		165.000.000		
						Jumlah BGMD yang mendapat bantuan teknis	Unit	16	160.000.000	16	165.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.08.1.01.08			Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah SKPD yang mengikuti bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						801.480.000		701.480.000		
						Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	13.3	801.480.000	14.27	701.480.000		
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					801.480.000		701.480.000		
						Jumlah Komplek BGMD yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (sampai dengan tahun n)	Unit	507	801.480.000	644	701.480.000		
		1.03.09.1.01.03			Penataan Bangunan dan Lingkungan				761.480.000		661.480.000		
						Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (tahun n)	Unit	1	437.360.000	1	466.142.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng	Dokumen	2	324.120.000	2	195.338.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.09.1.01.06			Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah SKPD Teknis Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapat sosialisasi peraturan	Unit	35	40.000.000	35	40.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						1.802.600.000		1.547.062.000		
						Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	100	356.000.000	100	356.000.000		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					356.000.000		356.000.000		
						Jumlah pelaku jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	540	356.000.000	540	356.000.000		
		1.03.11.1.01.07			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				356.000.000		356.000.000		
						Jumlah anggota asosiasi penyedia jasa yang mendapat sosialisasi dan diseminasi peraturan	Orang	240	162.400.000	240	276.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pengguna jasa yang mendapat sosialisasi dan diseminasi peraturan	Orang	300	193.600.000	300	80.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	16.54	1.446.600.000	19.09	1.191.062.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					1.058.600.000		798.630.000		
						Jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	Orang	1410	1.058.600.000	1950	798.630.000		
		1.03.11.1.01.04			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				1.058.600.000		798.630.000		
						Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (tahun n)	Orang	200	1.058.600.000	160	798.630.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					388.000.000		392.432.000		
						Jumlah informasi jasa konstruksi	Buah	3	388.000.000	3	392.432.000		
		1.03.11.1.02.05			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi				388.000.000		392.432.000		
						Jumlah buku pengadaan buku konstruksi	Buah	100	20.000.000	100	17.500.000		
						Jumlah dokumen HSPK	Dokumen	2	168.000.000	2	292.532.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit stand pameran	Unit	4	200.000.000	4	82.400.000		
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**115.128.963.000**		**142.330.394.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	100		100		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**510.000.000**		**510.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79.77	510.000.000	80.77	510.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						510.000.000		510.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	79.77	510.000.000	80.77	510.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					510.000.000		510.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	62	510.000.000	62	510.000.000	SUBBAG PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				240.000.000		240.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	21	240.000.000	21	240.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				270.000.000		270.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	41	270.000.000	41	270.000.000	SUBBAG PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**114.618.963.000**		**141.820.394.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	100	114.618.963.000	100	141.820.394.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						114.618.963.000		141.820.394.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	942.000.000	100	992.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.000.000		178.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	168.000.000	12	178.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.500.000		12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.000.000		31.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	31.000.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				28.000.000		28.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	28.000.000	12	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.000.000		28.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	28.000.000	12	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	55.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					426.000.000		465.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	426.000.000	12	465.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.000.000		66.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	63.000.000	12	66.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				360.000.000		396.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	360.000.000	12	396.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					348.000.000		349.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	348.000.000	12	349.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.000.000		126.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	126.000.000	12	126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				210.000.000		210.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2	210.000.000	2	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12.000.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.352.000.000	100	991.650.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					223.960.000		188.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	223.960.000	12	188.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.800.000		8.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	3.800.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.530.000		33.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20.530.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.880.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	8.880.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.970.000		26.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	23.970.000	12	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.500.000		36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	37.500.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.780.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	125.780.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					440.500.000		478.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	440.500.000	12	478.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		131.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	125.000.000	12	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				312.000.000		344.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	312.000.000	12	344.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					687.540.000		325.150.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	687.540.000	12	325.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.540.000		107.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	74.540.000	12	107.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				575.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	4	575.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.000.000		18.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	38.000.000	12	18.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.082.150.000	100	1.159.750.000	Balai Pengujian dan Peralatan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					137.500.000		147.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	137.500.000	12	147.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					778.650.000		844.650.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	778.650.000	12	844.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.650.000		1.650.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	1.650.000	12	1.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.000.000		180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	175.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				602.000.000		663.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	602.000.000	12	663.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.000.000		167.600.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	166.000.000	12	167.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.000.000		17.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	16.000.000	12	17.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.008.000.000	100	1.063.300.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.500.000		188.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	168.500.000	12	188.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.000.000		23.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	23.000.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		38.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	12	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	63.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					510.500.000		554.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	510.500.000	12	554.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.500.000		6.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	6.500.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	120.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				384.000.000		423.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	384.000.000	12	423.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.000.000		320.300.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	329.000.000	12	320.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.000.000		106.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	116.000.000	12	106.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000		14.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	13.000.000	12	14.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.597.575.000	100	1.468.000.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					225.500.000		220.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	225.500.000	12	220.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.000.000		38.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	38.000.000	12	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.000.000		32.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	32.000.000	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	85.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.002.475.000		876.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.002.475.000	12	876.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	170.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				828.975.000		753.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	828.975.000	12	753.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					369.600.000		371.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	369.600.000	12	371.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.000.000		115.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	115.000.000	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				240.000.000		240.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	6	240.000.000	2	240.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14.600.000		16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	14.600.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.035.500.000	100	1.036.700.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					197.300.000		199.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	197.300.000	12	199.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.800.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	14.800.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.000.000		33.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	33.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.000.000		29.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	29.000.000	12	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	69.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					431.200.000		479.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	12	431.200.000	12	479.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.200.000		95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	82.200.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.000.000		380.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	345.000.000	12	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					407.000.000		358.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	407.000.000	12	358.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	125.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000		220.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2	220.000.000	2	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.000.000		13.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	62.000.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.256.000.000	100	1.179.400.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					176.500.000		181.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	176.500.000	12	181.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.500.000		8.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.000.000		29.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	29.000.000	12	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		65.000.000		
						umlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	60.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					652.500.000		664.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	652.500.000	12	664.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		84.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	125.000.000	12	84.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				525.000.000		578.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	525.000.000	12	578.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					427.000.000		333.400.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	427.000.000	12	333.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.000.000		118.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	108.000.000	12	118.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	300.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.000.000		15.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	19.000.000	12	15.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.577.800.000	100	1.427.900.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					209.500.000		219.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	209.500.000	12	219.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000		48.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	48.000.000	12	48.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.000.000		38.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	38.000.000	12	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.000.000		37.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	37.000.000	12	37.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	60.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					932.300.000		770.700.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	932.300.000	12	770.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.700.000		3.700.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	3.700.000	12	3.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				115.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	115.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				813.600.000		647.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	813.600.000	12	647.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					436.000.000		437.700.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	436.000.000	12	437.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.000.000		144.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	144.000.000	12	144.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				275.000.000		275.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	4	275.000.000	2	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.000.000		18.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	17.000.000	12	18.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.073.000.000	100	1.121.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					163.500.000		173.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	163.500.000	12	173.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.000.000		31.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	31.000.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				31.000.000		31.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	31.000.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.000.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	22.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	60.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					577.500.000		614.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	577.500.000	12	614.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.500.000		4.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	4.500.000	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				114.000.000		105.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	114.000.000	12	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				459.000.000		505.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	459.000.000	12	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					332.000.000		333.200.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	332.000.000	12	333.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12.000.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	574.000.000	100	618.000.000	Balai Jasa Konstruksi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					117.500.000		127.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	117.500.000	12	127.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.000.000		29.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	29.000.000	12	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.000.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	22.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	45.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					366.500.000		399.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	366.500.000	12	399.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				82.000.000		86.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	82.000.000	12	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				283.000.000		312.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	283.000.000	12	312.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		91.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	90.000.000	12	91.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.094.000.000	100	1.158.200.000	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					167.500.000		177.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	167.500.000	12	177.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.500.000		9.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	9.500.000	12	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000		36.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.000.000		24.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	55.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.000.000		641.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	588.000.000	12	641.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	105.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				480.000.000		528.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	480.000.000	12	528.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.500.000		339.700.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	338.500.000	12	339.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				111.500.000		111.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	111.500.000	12	111.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				215.000.000		215.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	2	215.000.000	2	215.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12.000.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	102.026.938.000	100	129.604.094.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					86.027.318.000		120.454.934.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	38	86.027.318.000	38	120.454.934.000	SUBBAG KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				82.881.128.000		117.305.564.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	82.881.128.000	12	117.305.564.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.946.190.000		2.949.370.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	2.946.190.000	12	2.949.370.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	19	200.000.000	19	200.000.000	SUBBAG KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					120.000.000		120.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	120.000.000	2	120.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	15	50.000.000	15	50.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.309.922.000		1.252.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	1.309.922.000	12	1.252.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.500.000		15.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.500.000	12	15.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				115.780.000		80.000.000		
						Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	115.780.000	12	80.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				127.642.000		55.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	127.642.000	12	55.500.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				21.000.000		21.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	21.000.000	12	21.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	650.000.000	12	700.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	4	50.000.000	4	50.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	13	60.000.000	13	60.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.578.381.000		3.733.860.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	10.578.381.000	1	3.733.860.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.339.360.000		2.450.000.000		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	54	4.339.360.000	6	2.450.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				939.840.000		319.860.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	254	939.840.000	200	319.860.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.299.181.000		964.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	333	5.299.181.000	139	964.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.455.740.000		2.560.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	2.455.740.000	12	2.560.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		53.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	20.000.000	12	53.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				750.000.000		780.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	750.000.000	12	780.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.685.740.000		1.727.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.685.740.000	12	1.727.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.485.577.000		1.433.300.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.485.577.000	12	1.433.300.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				560.000.000		560.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	560.000.000	12	560.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000		650.000.000		
						Jumlah unit gedung yang dipelihara/direhab	Unit	1	700.000.000	1	650.000.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				225.577.000		223.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	225.577.000	12	223.300.000	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang									**162.605.707.000**		**177.320.144.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	
						Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65.2		66.37		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air (SDA)								**157.939.878.000**		**172.654.315.000**		
						Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54.36	157.939.878.000	54.95	172.654.315.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						157.939.878.000		172.654.315.000		
						Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo	%	100	6.245.585.000	100	6.245.585.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.245.585.000		6.245.585.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	31	6.245.585.000	35	6.245.585.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.245.585.000		6.245.585.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	31	6.245.585.000	35	6.245.585.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	5.345.115.000	100	5.345.115.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.345.115.000		5.345.115.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	15	5.345.115.000	15	5.345.115.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				5.345.115.000		5.345.115.000		
						Jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	21	5.345.115.000	21	5.345.115.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	6.779.124.000	100	6.779.124.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.779.124.000		6.779.124.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	13	6.779.124.000	13	6.779.124.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				6.779.124.000		6.779.124.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	13	6.779.124.000	13	6.779.124.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	3.465.829.000	100	3.465.829.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah					3.465.829.000		3.465.829.000		

				Kabupaten/Kota									
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	7	3.465.829.000	7	3.465.829.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.465.829.000		3.465.829.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	7	3.465.829.000	7	3.465.829.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	3.737.158.000	100	3.737.158.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.737.158.000		3.737.158.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	9	3.737.158.000	9	3.737.158.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.737.158.000		3.737.158.000		
						jumlah sarana dan prasarana irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	9	3.737.158.000	9	3.737.158.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	3.975.079.000	100	3.975.079.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.975.079.000		3.975.079.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi Irigasi yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	3	3.975.079.000	3	3.975.079.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.02.21			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				3.975.079.000		3.975.079.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	3	3.975.079.000	3	3.975.079.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	2.741.746.000	100	2.741.746.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.741.746.000		2.741.746.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah PSDA Balai Bengawan Solo	Bulan	7	2.741.746.000	7	2.741.746.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				1.890.943.000		1.890.943.000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	15	1.529.143.000	12	1.529.143.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Bengawan Solo	Bulan	7	361.800.000	7	361.800.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				850.803.000		850.803.000		
						jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Bengawan Solo	Laporan	3	850.803.000	3	850.803.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	1.898.820.000	100	1.898.820.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.898.820.000		1.898.820.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Bulan	7	1.898.820.000	7	1.898.820.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				720.250.000		720.250.000		
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Bodri Kuto	Bulan	7	720.250.000	7	720.250.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1.178.570.000		1.178.570.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Bodri Kuto	Laporan	3	1.178.570.000	3	1.178.570.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	3.262.091.000	100	3.262.091.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.262.091.000		3.262.091.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Bulan	7	3.262.091.000	7	3.262.091.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.000.000.000		2.000.000.000		
						jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Pemali Comal	Bulan	7	2.000.000.000	7	2.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1.262.091.000		1.262.091.000		
						jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Pemali Comal	Laporan	3	1.262.091.000	3	1.262.091.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	2.735.874.000	100	2.735.874.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.735.874.000		2.735.874.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Bulan	7	2.735.874.000	7	2.735.874.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				1.997.486.000		1.997.486.000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	6	1.151.325.000	6	1.151.325.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Bulan	7	846.161.000	7	846.161.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				738.388.000		738.388.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Laporan	3	738.388.000	3	738.388.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	2.944.761.000	100	2.944.761.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.944.761.000		2.944.761.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Bulan	7	2.944.761.000	7	2.944.761.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				2.116.371.000		2.116.371.000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	5	1.086.371.000	5	1.086.371.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Serang Lusi Juana	Bulan	7	1.030.000.000	7	1.030.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				828.390.000		828.390.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Serang Lusi Juana	Laporan	3	828.390.000	3	828.390.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	2.601.524.000	100	2.601.524.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.601.524.000		2.601.524.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan penanganan darurat sarana dan prasarana sungai akibat banjir di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Bulan	7	2.601.524.000	7	2.601.524.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				1.662.384.000		1.662.384.000		
						Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	4	656.574.000	4	656.574.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat di Balai PSDA Serayu Citanduy	Bulan	7	1.005.810.000	7	1.005.810.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				939.140.000		939.140.000		
						Jumlah laporan pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air Balai PSDA Serayu Citanduy	Laporan	3	939.140.000	3	939.140.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	82.8	29.290.898.000	83	26.488.335.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					29.290.898.000		26.488.335.000		
						Presentase Luas DI Kondisi Baik dan Rusak Ringan	%	82.8	29.290.898.000	83	26.488.335.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.02.14			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				28.952.152.000		26.149.589.000		
						Jumlah daerah irigasi beserta sarana dan prasarana yang diperbaiki atau dibangun	Lokasi	27	28.952.152.000	22	26.149.589.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.03.02.1.02.28			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi				338.746.000		338.746.000		
						jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi	Dokumen	4	338.746.000	4	338.746.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	20.4	6.326.180.000	22.04	6.326.180.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					6.326.180.000		6.326.180.000		
						Jumlah Lokasi Banjir Yang Tertangani	Lokasi	20	6.326.180.000	20	6.326.180.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				6.326.180.000		6.326.180.000		
						Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat	Bulan	7	467.749.000	7	467.749.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah penanganan sarana prasarana akibat banjir	Lokasi	20	5.022.855.000	20	5.022.855.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KENDAL --> KENDAL --> KELURAHAN BALOK ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat	Unit	21	835.576.000	21	835.576.000	SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	62	10.201.669.000	62.5	10.201.669.000	Bidang Irigasi dan Air Baku	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					10.201.669.000		10.201.669.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Ketersediaan Air Baku	%	62	10.201.669.000	62.5	10.201.669.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.06			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				3.500.000.000		3.500.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun	Lokasi	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.02.1.01.21			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya				5.000.000.000		5.000.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana air baku yang direhabilitasi	Lokasi	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.02.1.01.61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				134.241.000		134.241.000		
						jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku	Dokumen	2	134.241.000	2	134.241.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.63			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				1.567.428.000		1.567.428.000		
						Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	Laporan	4	1.567.428.000	3	1.567.428.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	44.03	9.893.659.000	58.49	9.893.659.000	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.643.659.000		8.643.659.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Air Baku, sarana dan prasarana sungai dan pantai yang ditindaklanjuti	Dokumen	10	8.643.659.000	10	8.643.659.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.01.01			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1.072.237.000		1.072.237.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya)	Dokumen	3	1.072.237.000	2	1.072.237.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		1.03.02.1.01.03			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai				4.000.000.000		4.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai)	Dokumen	6	4.000.000.000	6	4.000.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		1.03.02.1.01.04			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah Dokumen Pengembangan Sumber Daya Air	Dokumen	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.03.02.1.01.60			Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1.094.274.000		1.094.274.000		
						Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA	Dokumen	3	260.852.000	3	442.394.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Pos Hidrologi dan klimatologi yang diperbaiki	Pos	2	833.422.000	2	651.880.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.03.02.1.01.62			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi				477.148.000		477.148.000		
						Jumlah Dokumen Pendayagunaan Sumber Daya Air	Dokumen	2	477.148.000	2	477.148.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.250.000.000		1.250.000.000		

						Jumlah Dokumen Perencanaan Irigasi yang ditindaklanjuti	Dokumen	15	1.250.000.000	13	1.250.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	
		1.03.02.1.02.01			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (Irigasi dan Rawa)	Dokumen	1	1.250.000.000	2	1.250.000.000	SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	650.000.000	100	650.000.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					650.000.000		650.000.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	5	650.000.000	5	650.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				650.000.000		650.000.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	5	650.000.000	5	650.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	315.690.000	100	315.690.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					315.690.000		315.690.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	6	315.690.000	4	315.690.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				315.690.000		315.690.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	6	315.690.000	4	315.690.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	679.065.000	100	679.065.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					679.065.000		679.065.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	2	679.065.000	2	679.065.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				679.065.000		679.065.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	2	679.065.000	2	679.065.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	217.429.000	100	217.429.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					217.429.000		217.429.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	2	217.429.000	2	217.429.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				217.429.000		217.429.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Lokasi	2	217.429.000	2	217.429.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	750.000.000	100	750.000.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					750.000.000		750.000.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	4	750.000.000	4	750.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				750.000.000		750.000.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Lokasi	4	750.000.000	4	750.000.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	225.050.000	100	225.050.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					225.050.000		225.050.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Air Baku yang Dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	1	225.050.000	1	225.050.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.49			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya				225.050.000		225.050.000		
						jumlah sarana dan prasarana air baku yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Lokasi	1	225.050.000	1	225.050.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52.25	44.277.510.000	52.27	61.794.510.000	Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					44.277.510.000		61.794.510.000		
						Panjang sungai dalam kondisi baik	m	5000	44.277.510.000	5500	61.794.510.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	
		1.03.02.1.01.10			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				28.735.000.000		37.302.000.000		
						Panjang Penanganan sarana dan prasarana tebing sungai yang dibangun	m	3300	28.735.000.000	4000	37.302.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		1.03.02.1.01.16			Pembangunan Check Dam								
						Jumlah Lokasi Sarana dan prasarana check dam sungai yang dibangun	Lokasi	0		0		SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.03.02.1.01.18			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				13.000.000.000		22.750.000.000		
						Panjang Penanganan sarana dan prasarana pantai yang dibangun	m	450	13.000.000.000	300	22.750.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		1.03.02.1.01.46			Normalisasi/Restorasi Sungai				1.800.000.000		1.000.000.000		
						Panjang Penanganan sarana dan prasarana sungai yang dipelihara	m	3000	1.800.000.000	1000	1.000.000.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.03.02.1.01.61			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				742.510.000		742.510.000		
						Jumlah dokumen pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai	Dokumen	2	742.510.000	2	742.510.000	SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	4.007.671.000	100	4.007.671.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.007.671.000		4.007.671.000		
						Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	13	4.007.671.000	13	4.007.671.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				4.007.671.000		4.007.671.000		
						jumlah lokasi sarana dan prasarana sungai yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Lokasi	13	4.007.671.000	13	4.007.671.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
						Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	5.372.351.000	100	5.372.351.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.372.351.000		5.372.351.000		
						Jumlah Sungai di WS Kewenangan Provinsi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	31	5.372.351.000	31	5.372.351.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.02.1.01.53			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				5.372.351.000		5.372.351.000		
						jumlah lokasi sarana dan prasarana sungai yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Lokasi	31	5.372.351.000	31	5.372.351.000	SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)								**4.665.829.000**		**4.665.829.000**		
						Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	76.04	4.665.829.000	77.79	4.665.829.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						4.665.829.000		4.665.829.000		
						Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	21.98	2.132.845.000	28.65	2.132.845.000	Bidang Penataan Ruang	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi					2.132.845.000		2.132.845.000		
						Persentase dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	%	100	2.132.845.000	100	2.132.845.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.03			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				2.132.845.000		2.132.845.000		
						Jumlah dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun	Dokumen	1	2.132.845.000	1	2.132.845.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	%	60.14	889.547.000	77.29	889.547.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang					889.547.000		889.547.000		
						Persentase dokumen RTR Kab/Kota yang di evaluasi	%	100	889.547.000	100	889.547.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.03			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				889.547.000		889.547.000		
						Jumlah RTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Dokumen	12	889.547.000	12	889.547.000	SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	%	76.95	630.197.000	78.95	630.197.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi					630.197.000		630.197.000		
						Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	100	630.197.000	100	630.197.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				630.197.000		630.197.000		
						Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi	Dokumen	1	264.982.000	1	264.982.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	284.300.000	100	284.300.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Workshop TKPRD	Kali	1	80.915.000	1	80.915.000	SEKSI PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	75.13	530.852.000	76.63	530.852.000	Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					530.852.000		530.852.000		
						Persentase pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	100	530.852.000	100	530.852.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				530.852.000		530.852.000		
						Jumlah dokumen identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang	Dokumen	1	260.771.000	1	260.771.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan	Lokasi	3	103.324.000	3	103.324.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan	Orang	500	166.757.000	500	166.757.000	SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72.097.000	100	72.097.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.097.000		72.097.000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72.097.000	100	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.097.000		72.097.000		
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Lokasi	7	72.097.000	7	72.097.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96.321.000	100	96.321.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					96.321.000		96.321.000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96.321.000	100	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				96.321.000		96.321.000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Laporan	1	96.321.000	1	96.321.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	97.638.000	100	97.638.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					97.638.000		97.638.000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Pemali Comal	%	100	97.638.000	100	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				97.638.000		97.638.000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Laporan	1	97.638.000	1	97.638.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	72.961.000	100	72.961.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					72.961.000		72.961.000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	72.961.000	100	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				72.961.000		72.961.000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Laporan	1	72.961.000	1	72.961.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	76.171.000	100	76.171.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					76.171.000		76.171.000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	76.171.000	100	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				76.171.000		76.171.000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Laporan	1	76.171.000	1	76.171.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	67.200.000	100	67.200.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi					67.200.000		67.200.000		
						Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	67.200.000	100	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	
		1.03.12.1.04.04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				67.200.000		67.200.000		
						Jumlah laporan pemantauan Kab/Kota di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Laporan	1	67.200.000	1	67.200.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD)									**89.479.365.000**		**101.848.225.000**	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80		80		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah								**600.000.000**		**600.000.000**		
						Nilai Sakip PD	Angka	80	600.000.000	80	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						600.000.000		600.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	600.000.000	100	600.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600.000.000		600.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	7	600.000.000	7	600.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun	Dokumen	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	3	300.000.000	3	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah (PD)								**88.879.365.000**		**101.248.225.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80	88.879.365.000	80	101.248.225.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						88.879.365.000		101.248.225.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	627.506.000	100	627.506.000	Balai PSDA Pemali Comal	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					83.268.000		83.268.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	83.268.000	12	83.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24.780.000		24.780.000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Pemali Comal	Unit	1016	24.780.000	1016	24.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.648.000		17.648.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.648.000	12	17.648.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.760.000		2.760.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.760.000	12	2.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.280.000		8.280.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	8.280.000	12	8.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.800.000		29.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	29.800.000	12	29.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					242.580.000		242.580.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	242.580.000	12	242.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.176.000		1.176.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.176.000	12	1.176.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				206.904.000		206.904.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	206.904.000	12	206.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				34.500.000		34.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	34.500.000	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					301.658.000		301.658.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	301.658.000	12	301.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.664.000		118.664.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	118.664.000	12	118.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				118.666.000		118.666.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	118.666.000	1	118.666.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				64.328.000		64.328.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	64.328.000	12	64.328.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	426.118.000	100	426.118.000	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					63.491.000		63.491.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	63.491.000	12	63.491.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.977.000		15.977.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Unit	496	15.977.000	506	15.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.568.000		12.568.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.568.000	12	12.568.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.200.000		2.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan / buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.200.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.353.000		6.353.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	6.353.000	12	6.353.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.393.000		26.393.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	26.393.000	12	26.393.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					157.038.000		157.038.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	157.038.000	12	157.038.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				838.000		838.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12	838.000	12	838.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				46.200.000		46.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	46.200.000	12	46.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.589.000		205.589.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	205.589.000	12	205.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.620.000		78.620.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan Rutin / Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	78.620.000	12	78.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				78.620.000		78.620.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	78.620.000	1	78.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.349.000		48.349.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	48.349.000	12	48.349.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	517.943.000	100	517.943.000	Balai PSDA Serang Lusi Juana	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					67.904.000		67.904.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	67.904.000	12	67.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.441.000		20.441.000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Serang Lusi Juana	Unit	1572	20.441.000	1600	20.441.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.690.000		17.690.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.690.000	12	17.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.993.000		3.993.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.993.000	12	3.993.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.780.000		8.780.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	8.780.000	12	8.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000		17.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	17.000.000	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					193.779.000		193.779.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	193.779.000	12	193.779.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.179.000		1.179.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.179.000	12	1.179.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				147.000.000		147.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	147.000.000	12	147.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				45.600.000		45.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	45.600.000	12	45.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					256.260.000		256.260.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	256.260.000	12	256.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				101.024.000		101.024.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	101.024.000	12	101.024.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				101.026.000		101.026.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	101.026.000	2	101.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.210.000		54.210.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	54.210.000	12	54.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	503.003.000	100	503.003.000	Balai PSDA Serayu Citanduy.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					73.059.000		73.059.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	73.059.000	12	73.059.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.607.000		16.607.000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Serayu Citanduy	Unit	1119	16.607.000	1119	16.607.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.372.000		14.372.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	14.372.000	12	14.372.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.380.000		8.380.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	8.380.000	12	8.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.200.000		31.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	31.200.000	12	31.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162.958.000		162.958.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	162.958.000	12	162.958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				958.000		958.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	958.000	12	958.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132.000.000		132.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	132.000.000	12	132.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					266.986.000		266.986.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	266.986.000	12	266.986.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				95.634.000		95.634.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	95.634.000	12	95.634.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				95.636.000		95.636.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	95.636.000	1	95.636.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.716.000		75.716.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	75.716.000	12	75.716.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	85.620.340.000	100	97.989.200.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67.989.640.000		81.760.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	67.989.640.000	12	81.760.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				66.689.640.000		80.460.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	66.689.640.000	12	80.460.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.300.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					194.000.000		194.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	194.000.000	1	194.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				194.000.000		194.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	194.000.000	12	194.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					550.000.000		550.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	6	550.000.000	6	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	160	300.000.000	160	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	120		120		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	120	100.000.000	120	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					794.437.000		794.437.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	794.437.000	12	794.437.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				260.265.000		260.265.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	394	130.132.000	394	130.132.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	1869	130.133.000	1869	130.133.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				58.545.000		58.545.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	58.545.000	12	58.545.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.047.000		43.047.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	43.047.000	12	43.047.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.500.000		8.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184.080.000		184.080.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	184.080.000	12	184.080.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					11.402.000.000		10.000.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	11.402.000.000	3	10.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.850.000.000		4.000.000.000		
						Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	18	10.850.000.000	2	4.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.03			Pengadaan Alat Besar						6.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Alat besar	Unit	0		1	6.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				552.000.000				
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	24	552.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.926.567.000		2.926.567.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	2.926.567.000	12	2.926.567.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				68.874.000		68.874.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	68.874.000	12	68.874.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				605.000.000		605.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	605.000.000	12	605.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.898.458.000		1.898.458.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	1.898.458.000	12	1.898.458.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				354.235.000		354.235.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	354.235.000	12	354.235.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.763.696.000		1.763.696.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	1.763.696.000	12	1.763.696.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.051.295.000		1.051.295.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	1.051.295.000	12	1.051.295.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				402.780.000		402.780.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	402.780.000	1	402.780.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				309.621.000		309.621.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	309.621.000	12	309.621.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	523.673.000	100	523.673.000	Balai PSDA Bengawan Solo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					61.089.000		61.089.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	61.089.000	12	61.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.178.000		16.178.000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Bengawan Solo	Unit	1030	16.178.000	1157	16.178.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.727.000		12.727.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.727.000	12	12.727.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.584.000		1.584.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.584.000	12	1.584.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.600.000		6.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	6.600.000	12	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.000.000		24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					203.249.000		203.249.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	203.249.000	12	203.249.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				849.000		849.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	849.000	12	849.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.400.000		169.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik PD	Bulan	12	169.400.000	12	169.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				33.000.000		33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	33.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259.335.000		259.335.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	259.335.000	12	259.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				106.492.000		106.492.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	106.492.000	12	106.492.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.493.000		106.493.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	106.493.000	1	106.493.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.350.000		46.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	46.350.000	12	46.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	660.782.000	100	660.782.000	Balai PSDA Bodri Kuto	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					65.524.000		65.524.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	65.524.000	12	65.524.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.382.000		17.382.000		
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor Balai PSDA Bodri Kuto	Unit	1706	17.382.000	1786	17.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.674.000		13.674.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	13.674.000	12	13.674.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.061.000		3.061.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan /buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.061.000	12	3.061.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.610.000		11.610.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	11.610.000	12	11.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.797.000		19.797.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	19.797.000	12	19.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					233.296.000		233.296.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	12	233.296.000	12	233.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				912.000		912.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	912.000	12	912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				166.984.000		166.984.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	166.984.000	12	166.984.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				65.400.000		65.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum Kantor Perangkat Daerah	Bulan	12	65.400.000	12	65.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					361.962.000		361.962.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	361.962.000	12	361.962.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.250.000		127.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	127.250.000	12	127.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				127.250.000		127.250.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	127.250.000	2	127.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				107.462.000		107.462.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	107.462.000	12	107.462.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum									**1.550.000.000**		**1.660.000.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	
						Prosentase kepastian hukum atas bidang tanah	%	100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Meningkatnya Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum								**1.550.000.000**		**1.660.000.000**		
						Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	1.550.000.000	100	1.660.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						550.000.000		575.000.000		
						Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	550.000.000	100	575.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi					550.000.000		575.000.000		
						Persentase fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	20	550.000.000	20	575.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
		2.10.03.1.01.01			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				550.000.000		575.000.000		
						Jumlah bidang tanah penetapan lokasi	Bidang	2000	509.730.000	2000	350.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah bidang tanah yang dilakukan zonasi nilai tanah	Bidang	100	40.270.000	175	225.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						500.000.000		540.000.000		
						Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	100	500.000.000	100	540.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		540.000.000		
						Persentase fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan	%	20	500.000.000	20	540.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.01			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				350.000.000		420.000.000		
						Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	158	350.000.000	287	420.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		2.10.04.1.01.02			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000		120.000.000		
						Jumlah mediasi penyelesaian sengketa	Sengketa	6	150.000.000	6	120.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						500.000.000		545.000.000		
						Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	100	500.000.000	100	545.000.000	Bidang Pertanahan	
				Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					500.000.000		545.000.000		

						Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan	%	20	500.000.000	20	545.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.01			Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah				126.743.000		210.000.000		
						Jumlah bidang tanah yang dilaksanakan pemantauan	Bidang	420	126.743.000	420	210.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.02			Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				37.195.000		110.000.000		
						Jumlah inventarisasi dan identifikasi kebutuhan akses reforma agraria	Lokasi	2	37.195.000	2	110.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.10.06.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah				336.062.000		225.000.000		
						Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria	Bidang	200	336.062.000	200	225.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas									**22.535.000.000**		**23.879.000.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	
						Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	%	79.36		79.39		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
						Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	%	87.6		89.28		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan								**17.425.000.000**		**18.580.000.000**		
						Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	%	24.76	17.425.000.000	34.16	18.580.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						17.425.000.000		18.580.000.000		
						Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	7.39	14.497.779.000	13.36	13.975.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					140.060.000		75.000.000		
						Jumlah dokumen data masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan rumah sederhana sehat	Dokumen	1	140.060.000	1	75.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.05			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi				140.060.000		75.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima manfaat rumah sederhana sehat	Dokumen	1	140.060.000	1	75.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					166.143.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi penyediaan rumah sederhana sehat	Dokumen	1	166.143.000	1	50.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.01			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap				166.143.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi teknis penyediaan rumah	Dokumen	1	166.143.000	1	50.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					4.387.380.000		8.600.000.000		
						Jumlah unit rumah yang disediakan	Unit	62	4.387.380.000	58	8.600.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.05			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				4.387.380.000		8.600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan rumah	Dokumen	1	676.024.000	1	1.600.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit	62	3.711.356.000	58	7.000.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					9.804.196.000		5.250.000.000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang disediakan	Unit	253	9.804.196.000	100	5.250.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.01			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi				9.804.196.000		5.250.000.000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang dibangun	Unit	253	9.804.196.000	100	5.250.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	11.84	2.927.221.000	14.21	4.605.000.000	Bidang Perumahan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					324.940.000		155.000.000		
						Jumlah dokumen BNBA masyarakat calon penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	Dokumen	2	324.940.000	2	155.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.03			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				215.000.000		75.000.000		
						Jumlah dokumen penyiapan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan	Dokumen	1	215.000.000	1	75.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.01.05			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi				109.940.000		80.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima bantuan RTLH, PK, dan PB Bencana	Dokumen	1	109.940.000	1	80.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					8.857.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi penanganan rumah	Dokumen	1	8.857.000	1	50.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.01			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap				8.857.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen sosialisasi teknis rehabilitasi rumah	Dokumen	1	8.857.000	1	50.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					1.877.000.000		3.250.000.000		
						Jumlah unit rumah yang ditangani	Unit	67	1.877.000.000	90	3.250.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.01			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				881.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit	51	881.000.000	75	1.300.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.02.1.03.04			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				996.000.000		1.950.000.000		
						Jumlah unit rumah korban bencana yang direlokasi	Unit	16	996.000.000	15	1.950.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					716.424.000		1.150.000.000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang ditangani	Unit	11292	716.424.000	11292	1.150.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.01			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi				716.424.000		1.150.000.000		
						Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang direhabilitasi	Unit	11292	716.424.000	11292	1.150.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman								**5.110.000.000**		**5.299.000.000**		
						Persentase penurunan kawasan kumuh	%	25.27	5.110.000.000	18.8	5.299.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						610.000.000		655.000.000		
						Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	17.5	610.000.000	20	655.000.000	Bidang Kawasan Pemukiman	
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima					385.000.000		415.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh	Dokumen	2	385.000.000	2	415.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.01			Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				135.000.000		140.000.000		
						Jumlah dokumen pembinaan kelompok swadaya masyarakat	Dokumen	1	135.000.000	1	140.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.03.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian	Dokumen	1	250.000.000	1	275.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					225.000.000		240.000.000		
						Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Lokasi	7	225.000.000	8	240.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				225.000.000		240.000.000		
						Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	Dokumen	1	151.851.000	1	110.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi yang mendapatkan penanganan RTLH	Lokasi	7	73.149.000	8	130.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						3.300.000.000		3.300.000.000		
						Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	23.37	3.300.000.000	32.95	3.300.000.000	Bidang Kawasan Pemukiman	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman					3.300.000.000		3.300.000.000		
						Jumlah lokasi yang disediakan PSU	Lokasi	6	3.300.000.000	6	3.300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.02			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman				3.300.000.000		3.300.000.000		
						Jumlah dokumen penyediaan PSU	Dokumen	1	880.159.000	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PSU kawasan permukiman yang disediakan	Lokasi	6	2.419.841.000	6	3.200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.200.000.000		1.344.000.000		
						Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman	%	100	1.200.000.000	100	1.344.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
				Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah					1.200.000.000		1.344.000.000		
						Jumlah dokumen keterpaduan infrastruktur	Dokumen	5	625.000.000	5	700.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.06.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				625.000.000		700.000.000		
						Jumlah dokumen kebijakan dan strategi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dokumen	5	625.000.000	5	700.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi	Dokumen	3	225.000.000	3	280.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				225.000.000		280.000.000		
						Jumlah dokumen pembinaan, monitoring, dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	Dokumen	3	225.000.000	3	280.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengelolaan data	Dokumen	5	350.000.000	4	364.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.06.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah				350.000.000		364.000.000		
						Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan	Dokumen	5	350.000.000	4	364.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**17.439.693.000**		**22.461.000.000**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75		75		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**810.000.000**		**900.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.1	810.000.000	72.25	900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						810.000.000		900.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	810.000.000	100	900.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					810.000.000		900.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	16	810.000.000	16	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				460.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	9	460.000.000	9	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000		400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	7	350.000.000	7	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**16.629.693.000**		**21.561.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75	16.629.693.000	75	21.561.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.629.693.000		21.561.000.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	16.629.693.000	100	21.561.000.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.057.693.000		16.564.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	6	12.057.693.000	6	16.564.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.524.693.000		16.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.524.693.000	12	16.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				450.000.000		475.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	450.000.000	12	475.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35.000.000		37.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	35.000.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.000.000		4.500.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	4.000.000	1	4.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4.000.000		5.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	4.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				40.000.000		42.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	1	40.000.000	1	42.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	150.000.000	4	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	50.000.000	20	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.255.000.000		1.286.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.255.000.000	1	1.286.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	45.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				120.000.000		135.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	120.000.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000		225.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	250.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		21.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	20.000.000	12	21.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000		750.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah vv	Bulan	12	700.000.000	12	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				80.000.000		65.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	14	80.000.000	14	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					907.000.000		1.346.500.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	4	907.000.000	4	1.346.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						600.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0		2	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	13	50.000.000	13	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				857.000.000		696.500.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	35	857.000.000	42	696.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.520.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.520.000.000	1	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				95.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	95.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		650.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	600.000.000	12	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				825.000.000		800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	825.000.000	12	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					690.000.000		659.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	690.000.000	1	659.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				550.000.000		520.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	550.000.000	12	520.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	65.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000		52.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	65.000.000	12	52.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**14.433.559.000**		**21.166.800.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	76		77		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**53.228.000**		**100.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	71	53.228.000	71.25	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						53.228.000		100.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	53.228.000	100	100.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					53.228.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	12	53.228.000	13	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				31.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	8	31.000.000	9	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.228.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	22.228.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**14.380.331.000**		**21.066.800.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Skor	76	14.380.331.000	77	21.066.800.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14.380.331.000		21.066.800.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	14.380.331.000	100	21.066.800.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.718.453.000		13.750.920.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	10.718.453.000	1	13.750.920.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.467.653.000		13.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	10.467.653.000	12	13.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200.000		230.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	200.000	1	230.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				200.000		230.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	200.000	1	230.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				200.000		230.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	200.000	1	230.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000		230.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	18	200.000	18	230.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					139.100.000		226.090.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	139.100.000	1	226.090.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				139.100.000		226.090.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	139.100.000	12	226.090.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					84.500.000		2.450.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	84.500.000	1	2.450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				84.500.000		400.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	130	84.500.000	120	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						50.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0		12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2.000.000.000		
						Jumlah Peserta Sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal	Orang			140	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					523.500.000		947.775.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	523.500.000	1	947.775.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		322.500.000		
						Jumlah bulan penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	150.000.000	12	172.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		10	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						15.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.000.000		86.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	75.000.000	12	86.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	250.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3.500.000		4.025.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	3.500.000	1	4.025.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit penghadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.567.278.000		3.049.545.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2.567.278.000	1	3.049.545.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.300.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.000.000	12	2.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				540.500.000		718.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	540.500.000	12	718.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.024.778.000		2.328.495.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.024.778.000	12	2.328.495.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.500.000		642.470.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	347.500.000	1	642.470.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000		450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	250.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				57.500.000		75.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	57.500.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		67.470.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	12	67.470.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Terpeliharanya Tramtibum di Jawa Tengah									**1.768.000.000**		**2.333.200.000**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
						persentase penanganan gangguan trantibum di jawa tengah	%	100		100		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kualitas Trantibum dan Linmas								**1.768.000.000**		**2.333.200.000**		
						persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	%	100	1.768.000.000	100	2.333.200.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.768.000.000		2.333.200.000		
						Persentase anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya	%	0.06	442.000.000	0.06	508.300.000	Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					442.000.000		508.300.000		
						Jumlah anggota Linmas Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya	Orang	150	297.000.000	150	341.550.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.05			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				297.000.000		341.550.000		
						Jumlah personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas	Orang	150	297.000.000	150	341.550.000	SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pelatihan Satlinmas yg bertugas dalam pengamanan pemilu	Orang	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemberdayaan Satlinmas	%	0	145.000.000	0	166.750.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	
		1.05.02.1.01.04			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				145.000.000		166.750.000		
						Jumlah pemutakhiran data Sistem Informasi Linmas	Unit	1	145.000.000	1	166.750.000	SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta Jambore Satlinmas	Orang	0		0		SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum	%	3.94	442.000.000	3.94	508.300.000	Bidang Pembinaan Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					442.000.000		508.300.000		
						Jumlah elemen masyarakat yang dibina	Unit	35	170.270.000	35	195.810.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	
		1.05.02.1.01.01			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				170.270.000		195.810.000		
						Jumlah sekolah, ormas dan BUMD yang dibina	Unit	35	170.270.000	35	195.810.000	SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.03			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi									
						Jumlah peserta konsolidasi peningkatan kesadaran masyarakat tentang tibumtranmas	Orang	0		0		SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Satpol PP Kab/Kota yang melakukan pendataan daerah rawan tramtib	%	100	271.730.000	100	312.490.000	SEKSI KEWASPADAAN	
		1.05.02.1.01.01			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				271.730.000		312.490.000		
						Jumlah buku pendataan daerah rawan tramtib	Buku	1	231.730.000	1	266.490.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemutakhiran peta daerah rawan trantib	Unit	1	40.000.000	1	46.000.000	SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.05			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia								
						Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP	Orang	0		0		SEKSI KEWASPADAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan	%	100	442.000.000	100	808.300.000	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.000.000		1.000.000		
						Persentase penerapan SPM tramtibum Linmas	%	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.01.09			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000		1.000.000		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada di provinsi	%	100	1.000.000	100	1.000.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					441.000.000		557.300.000		
						Jumlah Operasi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kali	10	320.500.000	10	417.300.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.02.01			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur								
						jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal	Orang	0		0		SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.03			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				320.500.000		417.300.000		
						Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal	Kali	0		0		SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelanggar yang ditindak	Orang	50	320.500.000	50	417.300.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelanggar Perda dan Pergub yang diinventarisasi dan diawasi	Orang	250	120.500.000	250	140.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
		1.05.02.1.02.02			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				65.000.000		75.000.000		
						Jumlah masyarakat dan Badan Usaha yang dilakukan pengawasan	Orang	100	65.000.000	100	75.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.02.03			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				55.500.000		65.000.000		
						Jumlah pelanggar perda yang dibina	Orang	0		0		SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelanggar perda yang terinventarisasi	Orang	150	55.500.000	150	65.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pemasangan tanda larangan	Buah	0		0		SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi							250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi	Orang	0		70	250.000.000	SEKSI PENINDAKAN	
		1.05.02.1.03.01			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						250.000.000		
						Jumlah PPNS di Jateng yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas	Orang	0		160	250.000.000	SEKSI PENINDAKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kab/Kota di Jawa Tengah	%	100	442.000.000	100	508.300.000	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					442.000.000		508.300.000		
						Jumlah pengendalian tramtibum di Jawa Tengah	Kegiatan	67	262.000.000	67	301.300.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
		1.05.02.1.01.01			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				197.000.000		226.550.000		
						Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	Kegiatan	13	67.000.000	13	77.050.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP	Kegiatan	25	50.000.000	25	57.500.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah patroli pengendalian tramtibum	Kali	24	80.000.000	24	92.000.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.02			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				65.000.000		74.750.000		
						Jumlah Operasi Bersama di perbatasan (JatengJabar, Jateng-Jatim, Jateng-DIY)	Kegiatan	0		0		SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi	Kegiatan	6	40.000.000	6	46.000.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unjuk rasa yang tertangani	%	100	25.000.000	100	28.750.000	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pembinaan KST dalam rangka pemeliharaan tramtibum	%	100	180.000.000	100	207.000.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
		1.05.02.1.01.01			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				120.146.000		138.168.000		
						Jumlah Kawasan tertib yg dibina	Lokasi	5	71.250.000	5	81.938.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	
						Jumlah KST yang dibina	Orang	50	48.896.000	50	56.230.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pembinaan tramtibum di Jawa Tengah	Orang	0		0		SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		1.05.02.1.01.02			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				59.854.000		68.832.000		
						Jumlah penertiban PNS	Kegiatan	7	59.854.000	7	68.832.000	SEKSI KETERTIBAN UMUM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana									**4.735.000.000**		**5.600.000.000**		
						Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3.56		3.57			
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana								**400.000.000**		**550.000.000**		
						Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	400.000.000	100	550.000.000		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						400.000.000		550.000.000		
						Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	400.000.000	100	550.000.000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					250.000.000		250.000.000		
						Persentase masyarakat terdampak yang direhab	%	100	150.000.000	100	150.000.000		
		1.05.03.1.02.07			Penanganan Pascabencana Provinsi				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	Orang	100	150.000.000	100	150.000.000		
						Persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	%	100	100.000.000	100	100.000.000		
		1.05.03.1.02.07			Penanganan Pascabencana Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah kegiatan monev rehab rekon yang dilaksanakan	Kabupaten/ Kota	35	100.000.000	35	100.000.000		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					150.000.000		300.000.000		
						Jumlah rekomendasi kerjasama yang diinisiasi dan dokumen kajian perencanaan pemulihan yang disusun	Dokumen	1	150.000.000	1	300.000.000		
		1.05.03.1.04.03			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				150.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	Dokumen	1	100.000.000	1	150.000.000		
						Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	Kegiatan	1	50.000.000	1	150.000.000		
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana								**600.000.000**		**600.000.000**		
						Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	3	600.000.000	3	600.000.000		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						600.000.000		600.000.000		
						Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	600.000.000	100	600.000.000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah pemangku kepentingan yang dilatih	Orang	600	200.000.000	600	200.000.000		
		1.05.03.1.02.08			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				200.000.000		200.000.000		
						jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	Kelompok	2	100.000.000	2	100.000.000		
						Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	Kelompok	2	100.000.000	2	100.000.000		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					400.000.000		400.000.000		
						Persentase laporan masyarakat tentang kejadian bencana yang ditindaklanjuti	%	100	400.000.000	100	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.05.03.1.03.03			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				100.000.000		100.000.000		
						jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	Kegiatan	2	100.000.000	2	100.000.000		
		1.05.03.1.03.05			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah pelatihan Pusdalops yang diselenggarakan	Kegiatan	1	100.000.000	1	100.000.000		
						Jumlah posko bencana yang diselenggarakan oleh provinsi dan kabupaten/kota	Lokasi	34	200.000.000	34	200.000.000		
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana								**2.885.000.000**		**3.500.000.000**		
						Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	5	2.885.000.000	5	3.500.000.000		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.885.000.000		3.500.000.000		
						Persentase penurunan risiko bencana	%	1	2.885.000.000	1	3.500.000.000		
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					1.250.000.000		1.400.000.000		
						Persentase desa yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	%	1	1.250.000.000	1	1.400.000.000		
		1.05.03.1.01.01			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi						150.000.000		
						Jumlah dokumen KRB yang disusun	Dokumen	0		1	150.000.000		
		1.05.03.1.01.02			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)				1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana	Desa	60	1.250.000.000	60	1.250.000.000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					1.635.000.000		2.100.000.000		
						Persentase upaya PRB Jateng	%	1	1.635.000.000	1	2.100.000.000		
		1.05.03.1.02.01			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana						150.000.000		
						Jumlah dokumen RPB yang disusun	Dokumen	0		1	150.000.000		
		1.05.03.1.02.02			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				385.000.000		300.000.000		
						Jumlah Komunitas PB yang dilatih	Kelompok	5	385.000.000	5	300.000.000		
		1.05.03.1.02.04			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				300.000.000		400.000.000		
						Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang	Unit	33	300.000.000	44	400.000.000		
		1.05.03.1.02.06			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				400.000.000		800.000.000		
						Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	Desa	7	400.000.000	15	800.000.000		
		1.05.03.1.02.09			Penyusunan Rencana Kontijensi				250.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen renkon yang disusun	Dokumen	1	250.000.000	1	150.000.000		
		1.05.03.1.02.10			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				300.000.000		300.000.000		
						jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	Orang	450	300.000.000	450	300.000.000		
	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi								**850.000.000**		**950.000.000**		
						Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	850.000.000	100	950.000.000		
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						850.000.000		950.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	850.000.000	100	950.000.000		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					300.000.000		350.000.000		
						Persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	%	100	300.000.000	100	350.000.000		
		1.05.03.1.02.03			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				300.000.000		350.000.000		
						Jumlah kegiatan pelatihan penggunaan peralatan PB yang diselenggarakan	Kegiatan	1	100.000.000	1	150.000.000		
						Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	Unit	10	200.000.000	10	200.000.000		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					550.000.000		600.000.000		
						Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	%	100	550.000.000	100	600.000.000		
		1.05.03.1.03.04			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				550.000.000		600.000.000		
						Jumlah penyediaan logistik (bulan)	Jenis	10	500.000.000	10	500.000.000		
						Persentase dapur umum yang dilaksanakan	%	100	50.000.000	100	100.000.000		
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**11.093.495.000**		**14.400.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85		90			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**250.000.000**		**250.000.000**		
						Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka	68	250.000.000	70	250.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						250.000.000		250.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	250.000.000	100	250.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.000.000		250.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen		250.000.000		250.000.000		
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5	100.000.000	5	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	150.000.000	5	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**10.843.495.000**		**14.150.000.000**		
						Nilai kepuasan masyarakat	Angka	85	10.843.495.000	90	14.150.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						10.843.495.000		14.150.000.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	10.843.495.000	100	14.150.000.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.078.495.000		10.280.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6.078.495.000	1	10.280.000.000		
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.778.495.000		8.030.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	5.778.495.000	14	8.030.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				300.000.000		2.250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	300.000.000	12	2.250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Bulan	0		0			
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen						
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD yang disusun	Laporan	0		0			
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	0		0			OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		175.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	175.000.000		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		175.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	12	175.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					30.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	70.000.000		
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	100	10.000.000	100	20.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		40.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	50	10.000.000	50	40.000.000		
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	10.000.000	50	10.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.200.000.000		1.765.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.200.000.000	1	1.765.000.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	20.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Perlengkapan Kantor	Bulan	12	60.000.000	12	100.000.000		
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		50.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	35.000.000	12	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				65.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	65.000.000	12	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		1.450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.450.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Laporan	1	15.000.000	1	25.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0			
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0			OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit						OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		0			OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0			OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.835.000.000		1.010.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.835.000.000	1	1.010.000.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	450.000.000	12	450.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.375.000.000		550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.375.000.000	12	550.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600.000.000		850.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	600.000.000	1	850.000.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0		0			OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				430.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	430.000.000	12	500.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	45.000.000	12	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		150.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	3	80.000.000	3	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	45.000.000	12	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)									**7.490.000.000**		**6.485.000.000**	**Dinas Sosial**	
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	25.74		32.62		Dinas Sosial	
	Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial								**7.490.000.000**		**6.485.000.000**		
						Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80	7.490.000.000	100	6.485.000.000	Dinas Sosial	
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						7.055.000.000		6.050.000.000		
						Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	25.74	7.055.000.000	32.62	6.050.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial	Orang	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					6.905.000.000		5.900.000.000		
						Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	7759	6.455.000.000	9832	5.550.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di tingkat Provinsi	Orang	1400	100.000.000	1750	100.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		1.06.02.1.02.02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi				5.300.000.000		5.300.000.000		
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	2304	5.300.000.000	2880	5.300.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.02.1.02.04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi				1.055.000.000		150.000.000		
						Jumlah PSKS Kelembagaan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	4588	1.055.000.000	5735	150.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan sosial	Orang	960	450.000.000	1920	350.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.02.1.02.03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi				450.000.000		350.000.000		
						Jumlah PSKS Keluarga yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Orang	2400	450.000.000	4800	350.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						435.000.000		435.000.000		
						Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	%	100	435.000.000	100	435.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi					435.000.000		435.000.000		
						Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	Unit	1	435.000.000	1	435.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	
		1.06.07.1.01.01			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				85.000.000		85.000.000		
						Jumlah sarpras TMPN Provinsi yang mendapatkan rehabilitasi sarana prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi	Unit	1	85.000.000	1	85.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.07.1.01.02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan TMPN Provinsi	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Orang	300	250.000.000	300	250.000.000	SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**134.594.423.000**		**141.214.031.000**	**Dinas Sosial**	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77		77		Dinas Sosial	
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**895.000.000**		**895.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	895.000.000	77	895.000.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						895.000.000		895.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%		895.000.000		895.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					895.000.000		895.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	895.000.000	2	895.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				495.000.000		495.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	495.000.000	1	495.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**133.699.423.000**		**140.319.031.000**		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	133.699.423.000	77	140.319.031.000	Dinas Sosial	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						133.699.423.000		140.319.031.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	126.195.823.000	100	133.075.431.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					108.143.339.000		103.627.431.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	108.143.339.000	1	103.627.431.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				106.543.339.000		101.527.431.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	106.543.339.000	12	101.527.431.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.250.000.000	12	1.250.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		650.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	150.000.000	1	650.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000		375.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	75.000.000	1	375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						300.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Paket	0		1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.077.484.000		2.115.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	2.077.484.000	1	2.115.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				95.000.000		95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/material	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				300.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	300.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.162.484.000		1.350.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.162.484.000	12	1.350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5.000.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1	5.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Paket	7		16		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						2.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Paket	3		6	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	3		5	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	5		10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	3		5	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.550.000.000		14.400.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	14.550.000.000	1	14.400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.500.000.000		12.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12.500.000.000	12	12.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				950.000.000		800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	950.000.000	12	800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.350.000.000		7.558.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.350.000.000	1	7.558.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		6.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	200.000.000	12	6.200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		8.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Bulan	12	300.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	100	389.610.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.310.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	122.310.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				40.500.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	40.500.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Bisma Upakara	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Bojong Bata	%	100	384.110.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.810.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	116.810.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	35.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan sosial Dewanata	%	100	392.610.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					125.310.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	125.310.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				43.500.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	43.500.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	100	389.610.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.310.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	122.310.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				40.500.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	40.500.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	144.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					45.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	45.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				15.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	15.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	100	149.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	50.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				20.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	20.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	100	256.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	78.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				24.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	24.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti pelayanan sosial Margo Widodo	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti Pelayanan Sosial pamardi Utomo	%	100	147.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					48.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	48.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				18.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	18.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%		266.740.000		250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	88.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				34.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	34.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial penganthi	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti pelayanan sosial Raharjo	%	100	629.350.000	100	626.850.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					183.850.000		181.350.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	183.850.000	12	181.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket					SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				22.500.000		22.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	22.500.000	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.500.000		22.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	22.500.000	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				47.500.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	47.500.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.750.000		33.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	33.750.000	12	33.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.750.000		276.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	276.750.000	12	276.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.750.000		6.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	6.750.000	12	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.000.000		270.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	270.000.000	12	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					168.750.000		168.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	168.750.000	12	168.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.750.000		33.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	33.750.000	12	33.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.500.000		22.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	22.500.000	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Samekto karti	%	100	384.110.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					116.810.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	116.810.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	35.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Sudagaran	%	100	159.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	60.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				30.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	30.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada panti Pelayanan Sosial Sukomulyo	%	100	149.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	50.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				20.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	20.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	100	387.610.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					120.310.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	120.310.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				38.500.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	38.500.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan sosial Tawangmangu	%	100	152.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					53.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	53.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				23.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	23.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	100	259.740.000	100	250.740.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.540.000		72.540.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	81.540.000	12	72.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.480.000		6.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.480.000	12	6.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	10.800.000	12	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.160.000		2.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	2.160.000	12	2.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				27.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	27.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.700.000		110.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	110.700.000	12	110.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		2.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	2.700.000	12	2.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.000.000		108.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.000.000	12	108.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.500.000		67.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	67.500.000	12	67.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	100	379.610.000	100	376.110.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.310.000		108.810.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	112.310.000	12	108.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.720.000		9.720.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	9.720.000	12	9.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	16.200.000	12	16.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.240.000		3.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3.240.000	12	3.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				30.500.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	30.500.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.050.000		166.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	166.050.000	12	166.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.050.000		4.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	4.050.000	12	4.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		162.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	162.000.000	12	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.250.000		101.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	101.250.000	12	101.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	20.250.000	12	20.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	13.500.000	12	13.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	40.500.000	12	40.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	27.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi pada Panti pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	100	144.300.000	100	139.300.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					45.300.000		40.300.000		
						Jumlah bulan ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Bulan	12	45.300.000	12	40.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.200.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	1.200.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				15.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan bahan/ material	Bulan	12	15.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.500.000		61.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	61.500.000	12	61.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	37.500.000	12	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)									**92.828.485.000**		**93.800.969.000**	**Dinas Sosial**	
						Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	1.9		2.37		Dinas Sosial	
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani								**92.828.485.000**		**93.800.969.000**		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	80	92.828.485.000	100	93.800.969.000	Dinas Sosial	
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						100.000.000		100.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah						100.000.000		100.000.000		

				Kabupaten/Kota Asal									
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.03.1.01.01			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				100.000.000		100.000.000		
						Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						49.278.485.000		50.600.969.000		
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti	%	3.28	5.888.030.000	4.1	5.738.030.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.836.000.000		2.786.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	8400	2.836.000.000	10500	2.786.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				2.416.000.000		2.416.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) panti swasta	Orang	8400	2.416.000.000	10500	2.416.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu				100.000.000		100.000.000		
						jumlah paket penyediaan alat bantu	Paket	2	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				320.000.000		270.000.000		
						Jumlah LKS penanganan penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	50	320.000.000	100	270.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					2.124.700.000		2.074.700.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	6800	2.124.700.000	8500	2.074.700.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				1.954.700.000		1.954.700.000		
						Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) Panti Swasta	Orang	6800	1.954.700.000	6800	1.954.700.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				170.000.000		120.000.000		
						Jumlah LKS penanganan anak terlantar yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	50	170.000.000	100	120.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					509.940.000		509.940.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	1600	509.940.000	2000	509.940.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				479.940.000		479.940.000		
						Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) panrti swasta	Orang	400	479.940.000	400	479.940.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah LKS penanganan Lanjut usia terlantar yang mendapatkan pembinaan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	30	30.000.000	30	30.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					417.390.000		367.390.000		
						Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	Orang	1000	417.390.000	1250	367.390.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				292.390.000		292.390.000		
						Jumlah Gelandangan dan Pengemis terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan (SOSH) panti swasta	Orang	1000	292.390.000	1250	292.390.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				125.000.000		75.000.000		
						Jumlah LKS penanganan Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pembinaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai SPM	Unit	10	125.000.000	20	75.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0.14	1.745.469.000	0.18	1.814.830.000	Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					859.145.000		895.650.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	56.400.000	500	56.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	12.000.000	500	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.400.000		24.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	24.400.000	500	24.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	2.500.000	500	2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.500.000		7.500.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	7.500.000	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	802.745.000	500	839.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				711.745.000		748.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	711.745.000	500	748.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				64.000.000		64.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	64.000.000	500	64.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	27.000.000	500	27.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					886.324.000		919.180.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	360	104.725.000	450	104.725.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				34.200.000		34.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	360	34.200.000	450	34.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				27.900.000		27.900.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	360	27.900.000	450	27.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.625.000		5.625.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	360	5.625.000	450	5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				27.000.000		27.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	27.000.000	100	27.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	360	781.599.000	450	814.455.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				640.569.000		673.425.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	360	640.569.000	450	673.425.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				116.730.000		116.730.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	360	116.730.000	450	116.730.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				24.300.000		24.300.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	360	24.300.000	450	24.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0.11	1.449.430.000	0.14	1.489.180.000	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					981.300.000		1.017.800.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	112.850.000	500	112.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				37.200.000		37.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	37.200.000	500	37.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				29.400.000		29.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	29.400.000	500	29.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.250.000		6.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	6.250.000	500	6.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	30.000.000	100	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	868.450.000	500	904.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				711.750.000		748.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	711.750.000	500	748.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				129.700.000		129.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	129.700.000	500	129.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	27.000.000	500	27.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					468.130.000		471.380.000		
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	200	63.875.000	250	48.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.600.000		12.600.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	12.600.000	250	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				19.400.000		19.400.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	19.400.000	250	19.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.125.000		3.125.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	18.125.000	250	3.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.10			Pemulangan ke Daerah Asal				3.750.000		3.750.000		
						persentase Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi pemulangan ke Daerah Asal	%	100	3.750.000	100	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti	Orang	200	404.255.000	250	422.505.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				355.875.000		374.125.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.875.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.02			Penyediaan Sandang				34.880.000		34.880.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	34.880.000	250	34.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.04.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0.11	1.457.874.000	0.14	1.499.124.000	Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.076.270.000		1.116.420.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	440	120.975.000	550	120.975.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				40.200.000		40.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	440	40.200.000	550	40.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				30.900.000		30.900.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	440	30.900.000	550	30.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.875.000		6.875.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	440	6.875.000	550	6.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				33.000.000		33.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	33.000.000	100	33.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	440	955.295.000	550	995.445.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				782.925.000		823.075.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	440	782.925.000	550	823.075.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				142.670.000		142.670.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	440	142.670.000	550	142.670.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				29.700.000		29.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	440	29.700.000	550	29.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					381.604.000		382.704.000		
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	160	58.200.000	200	44.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	160	10.800.000	200	10.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				18.400.000		18.400.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	160	18.400.000	200	18.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.04.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.000.000		2.500.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	160	16.000.000	200	2.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.10			Pemulangan ke Daerah Asal				3.000.000		3.000.000		
						persentase Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi pemulangan ke Daerah Asal	%	100	3.000.000	100	3.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti	Orang	160	323.404.000	200	338.004.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				284.700.000		299.300.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan permakanan dalam panti	Orang	160	284.700.000	200	299.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.02			Penyediaan Sandang				27.904.000		27.904.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	160	27.904.000	200	27.904.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.04.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	160	10.800.000	200	10.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0.18	2.279.530.000	0.22	2.367.370.000	Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					443.690.000		461.990.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	74.365.000	250	74.365.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				29.240.000		29.240.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	29.240.000	250	29.240.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				12.600.000		12.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	12.600.000	250	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				19.400.000		19.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	19.400.000	250	19.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				3.125.000		3.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	3.125.000	250	3.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	369.325.000	250	387.625.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				355.825.000		374.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.825.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.835.840.000		1.905.380.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	760	185.975.000	950	185.975.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				64.200.000		64.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	760	64.200.000	950	64.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				42.900.000		42.900.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	760	42.900.000	950	42.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				11.875.000		11.875.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	760	11.875.000	950	11.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				57.000.000		57.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	57.000.000	100	57.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	760	1.649.865.000	950	1.719.405.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				1.352.135.000		1.421.675.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	760	1.352.135.000	950	1.421.675.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				246.430.000		246.430.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	760	246.430.000	950	246.430.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				51.300.000		51.300.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	760	51.300.000	950	51.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0.1	1.361.180.000	0.13	1.412.280.000	Panti Pelayanan Sosial Cepiring	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.361.180.000		1.412.280.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	560	145.350.000	700	145.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				49.200.000		49.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	560	49.200.000	700	49.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				35.400.000		35.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	560	35.400.000	700	35.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				8.750.000		8.750.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	560	8.750.000	700	8.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				42.000.000		42.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	42.000.000	100	42.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	560	1.215.830.000	700	1.266.930.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				996.450.000		1.047.550.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	560	996.450.000	700	1.047.550.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				181.580.000		181.580.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	560	181.580.000	700	181.580.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				37.800.000		37.800.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	560	37.800.000	700	37.800.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0.17	2.577.854.000	0.21	2.645.554.000	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.128.424.000		1.156.374.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	520	92.025.000	650	72.525.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	520	27.000.000	650	27.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				27.400.000		27.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	520	27.400.000	650	27.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				27.625.000		8.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	520	27.625.000	650	8.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	520	1.036.399.000	650	1.083.849.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				925.275.000		972.725.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	520	925.275.000	650	972.725.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				76.024.000		76.024.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	520	76.024.000	650	76.024.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				35.100.000		35.100.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	520	35.100.000	650	35.100.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					981.300.000		1.017.800.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	112.850.000	500	112.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	400		500		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				37.200.000		37.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	37.200.000	500	37.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				29.400.000		29.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	29.400.000	500	29.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.250.000		6.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	6.250.000	500	6.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				30.000.000		30.000.000		
						persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	30.000.000	100	30.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	868.450.000	500	904.950.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				711.750.000		748.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	711.750.000	500	748.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				129.700.000		129.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	129.700.000	500	129.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	27.000.000	500	27.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					468.130.000		471.380.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	63.875.000	250	48.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				12.600.000		12.600.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	12.600.000	250	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				19.400.000		19.400.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	19.400.000	250	19.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.125.000		3.125.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	18.125.000	250	3.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.10			Pemulangan ke Daerah Asal				3.750.000		3.750.000		
						Persentase PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi Pemulangan ke Daerah Asal	%	100	3.750.000	100	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	404.255.000	250	422.505.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.01			Penyediaan Permakanan				355.875.000		374.125.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.875.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.02			Penyediaan Sandang				34.880.000		34.880.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	34.880.000	250	34.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		1.06.04.1.05.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0.14	1.859.423.000	0.17	1.926.948.000	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					443.740.000		461.990.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	45.125.000	250	45.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				12.600.000		12.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	12.600.000	250	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				19.400.000		19.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	19.400.000	250	19.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				3.125.000		3.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	3.125.000	250	3.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	398.615.000	250	416.865.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				355.875.000		374.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.875.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				29.240.000		29.240.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	29.240.000	250	29.240.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					814.263.000		841.638.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	300	212.200.000	375	212.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	300	9.000.000	375	9.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	300	7.200.000	375	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				180.375.000		180.375.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	300	180.375.000	375	180.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.625.000		5.625.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	5.625.000	100	5.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	300	602.063.000	375	629.438.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				533.813.000		561.188.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	300	533.813.000	375	561.188.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	300	48.000.000	375	48.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	300	20.250.000	375	20.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					601.420.000		623.320.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	240	601.420.000	300	623.320.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				427.050.000		448.950.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	240	427.050.000	300	448.950.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				77.820.000		77.820.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	240	77.820.000	300	77.820.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				16.200.000		16.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	240	16.200.000	300	16.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				25.200.000		25.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	240	25.200.000	300	25.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				23.400.000		23.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	240	23.400.000	300	23.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				3.750.000		3.750.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	240	3.750.000	300	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				18.000.000		18.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	18.000.000	100	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0.06	878.920.000	0.07	908.120.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					878.920.000		908.120.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	320	225.200.000	400	225.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				9.600.000		9.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	320	9.600.000	400	9.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	320	7.200.000	400	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				192.400.000		192.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	320	192.400.000	400	192.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		6.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	6.000.000	100	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	320	653.720.000	400	682.920.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				569.400.000		598.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	320	569.400.000	400	598.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				62.720.000		62.720.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	320	62.720.000	400	62.720.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	320	21.600.000	400	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0.09	1.301.140.000	0.11	1.344.940.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.301.140.000		1.344.940.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang		329.200.000		329.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				14.400.000		14.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	480	14.400.000	600	14.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	480	7.200.000	600	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				288.600.000		288.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	480	288.600.000	600	288.600.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.000.000		9.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	9.000.000	100	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang		971.940.000		1.015.740.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				854.100.000		897.900.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	480	854.100.000	600	897.900.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				85.440.000		85.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	480	85.440.000	600	85.440.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				32.400.000		32.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	480	32.400.000	600	32.400.000	Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0.13	1.613.015.000	0.16	1.675.065.000	Panti Pelayanan Sosial Mandiri	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					441.775.000		460.025.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	40.400.000	250	40.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	6.000.000	250	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				19.400.000		19.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	19.400.000	250	19.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				1.250.000		1.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	1.250.000	250	1.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.750.000		3.750.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	3.750.000	100	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	401.375.000	250	419.625.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				355.875.000		374.125.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.875.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				32.000.000		32.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	32.000.000	250	32.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.171.240.000		1.215.040.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	480	129.100.000	600	129.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				43.200.000		43.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	480	43.200.000	600	43.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				32.400.000		32.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	480	32.400.000	600	32.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	480	7.500.000	600	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				36.000.000		36.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	36.000.000	100	36.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	480	1.042.140.000	600	1.085.940.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				854.100.000		897.900.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	480	854.100.000	600	897.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				155.640.000		155.640.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	480	155.640.000	600	155.640.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				32.400.000		32.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	480	32.400.000	600	32.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo	%	0.12	1.431.026.000	0.15	1.465.426.000	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					451.240.000		461.990.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	52.625.000	250	45.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	200		250		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				12.600.000		12.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	12.600.000	250	12.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				19.400.000		19.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	19.400.000	250	19.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				10.625.000		3.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	10.625.000	250	3.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	398.615.000	250	416.865.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				355.875.000		374.125.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.875.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				29.240.000		29.240.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	29.240.000	250	29.240.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					979.786.000		1.003.436.000		
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Orang	440	90.425.000	550	73.925.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				23.400.000		23.400.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	440	23.400.000	550	23.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				25.400.000		25.400.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	440	25.400.000	550	25.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				23.375.000		6.875.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	440	23.375.000	550	6.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.10			Pemulangan ke Daerah Asal				8.250.000		8.250.000		
						persentase Gelandangan dan pengemis dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi pemulangan ke Daerah Asal	%	100	8.250.000	100	8.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapatkan penyantunan sosial dalam panti	Orang	440	889.361.000	550	929.511.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.04.01			Penyediaan Permakanan				782.925.000		823.075.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	440	782.925.000	550	823.075.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.02			Penyediaan Sandang				76.736.000		76.736.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	440	76.736.000	550	76.736.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.04.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				29.700.000		29.700.000		
						Jumlah Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	440	29.700.000	550	29.700.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0.18	2.150.675.000	0.23	2.212.600.000	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					748.259.000		765.784.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	340	70.613.000	425	57.113.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket					SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				18.900.000		18.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	340	18.900.000	425	18.900.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				22.900.000		22.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	340	22.900.000	425	22.900.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				18.813.000		5.313.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	340	18.813.000	425	5.313.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	340	677.646.000	425	708.671.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				604.988.000		636.013.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	340	604.988.000	425	636.013.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				49.708.000		49.708.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	340	49.708.000	425	49.708.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				22.950.000		22.950.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	340	22.950.000	425	22.950.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.402.416.000		1.446.816.000		
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	640	108.800.000	800	94.800.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				32.400.000		32.400.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	640	32.400.000	800	32.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				30.400.000		30.400.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	640	30.400.000	800	30.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				24.000.000		10.000.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	640	24.000.000	800	10.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.10			Pemulangan ke Daerah Asal				12.000.000		12.000.000		
						persentase PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi pemulangan ke Daerah Asal	%	100	12.000.000	100	12.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	640	1.293.616.000	800	1.352.016.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	
		1.06.04.1.05.01			Penyediaan Permakanan				1.138.800.000		1.197.200.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	640	1.138.800.000	800	1.197.200.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.02			Penyediaan Sandang				111.616.000		111.616.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	640	111.616.000	800	111.616.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.04.1.05.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				43.200.000		43.200.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	640	43.200.000	800	43.200.000	SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0.17	2.016.608.000	0.22	2.085.113.000	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.016.608.000		2.085.113.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	948	127.173.000	1185	109.173.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket					SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				46.260.000		46.260.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	948	46.260.000	1185	46.260.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				38.100.000		38.100.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	948	38.100.000	1185	38.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				32.813.000		14.813.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	948	32.813.000	1185	14.813.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	948	1.889.435.000	1185	1.975.940.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.686.848.000		1.773.353.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	948	1.686.848.000	1185	1.773.353.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				138.597.000		138.597.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	948	138.597.000	1185	138.597.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				63.990.000		63.990.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	948	63.990.000	1185	63.990.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0.06	867.400.000	0.07	896.600.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					867.400.000		896.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang		225.200.000		225.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				9.600.000		9.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	320	9.600.000	400	9.600.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	320	7.200.000	400	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				192.400.000		192.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	320	192.400.000	400	192.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.000.000		6.000.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	6.000.000	100	6.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang		642.200.000		671.400.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				569.400.000		598.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	320	569.400.000	400	598.600.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				51.200.000		51.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	320	51.200.000	400	51.200.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	320	21.600.000	400	21.600.000	Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0.13	1.501.091.000	0.16	1.546.966.000	Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.501.091.000		1.546.966.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	700	105.938.000	875	87.938.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket					SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				35.100.000		35.100.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	700	35.100.000	875	35.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				31.900.000		31.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	700	31.900.000	875	31.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				28.938.000		10.938.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	700	28.938.000	875	10.938.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	700	1.395.153.000	875	1.459.028.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.245.563.000		1.309.438.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	700	1.245.563.000	875	1.309.438.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				102.340.000		102.340.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	700	102.340.000	875	102.340.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				47.250.000		47.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	700	47.250.000	875	47.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0.08	1.002.203.000	0.11	1.026.178.000	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.002.203.000		1.026.178.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	460	85.388.000	575	67.388.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				24.300.000		24.300.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	460	24.300.000	575	24.300.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				25.900.000		25.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	460	25.900.000	575	25.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.188.000		7.188.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	460	25.188.000	575	7.188.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	460	916.815.000	575	958.790.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				818.513.000		860.488.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	460	818.513.000	575	860.488.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				67.252.000		67.252.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	460	67.252.000	575	67.252.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				31.050.000		31.050.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	460	31.050.000	575	31.050.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0.13	1.630.685.000	0.16	1.692.735.000	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					859.480.000		895.980.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	62.250.000	500	62.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	21.600.000	500	21.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				24.400.000		24.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	24.400.000	500	24.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.250.000		6.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	6.250.000	500	6.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	797.230.000	500	833.730.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				711.750.000		748.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	711.750.000	500	748.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				58.480.000		58.480.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	58.480.000	500	58.480.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	27.000.000	500	27.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					771.205.000		796.755.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	280	199.200.000	350	199.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				8.400.000		8.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	280	8.400.000	350	8.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	280	7.200.000	350	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				168.350.000		168.350.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	280	168.350.000	350	168.350.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.250.000		5.250.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	5.250.000	100	5.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	280	572.005.000	350	597.555.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				498.225.000		523.775.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	280	498.225.000	350	523.775.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				54.880.000		54.880.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	280	54.880.000	350	54.880.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				18.900.000		18.900.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	280	18.900.000	350	18.900.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0.12	1.496.544.000	0.15	1.542.944.000	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					705.184.000		722.384.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	320	67.400.000	400	55.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	320		400		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	320	18.000.000	400	18.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				22.400.000		22.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	320	22.400.000	400	22.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				17.000.000		5.000.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	320	17.000.000	400	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	320	637.784.000	400	666.984.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				569.400.000		598.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	320	569.400.000	400	598.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				46.784.000		46.784.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	320	46.784.000	400	46.784.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	320	21.600.000	400	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					791.360.000		820.560.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	320	96.600.000	400	96.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				31.200.000		31.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	320	31.200.000	400	31.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				26.400.000		26.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	320	26.400.000	400	26.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	320	5.000.000	400	5.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				24.000.000		24.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	24.000.000	100	24.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	320	694.760.000	400	723.960.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				569.400.000		598.600.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	320	569.400.000	400	598.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				103.760.000		103.760.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	320	103.760.000	400	103.760.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				21.600.000		21.600.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	320	21.600.000	400	21.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0.22	2.876.017.000	0.28	2.985.520.000	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.275.220.000		1.329.970.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	600	79.375.000	750	79.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				30.600.000		30.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	600	30.600.000	750	30.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				29.400.000		29.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	600	29.400.000	750	29.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.375.000		9.375.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	600	9.375.000	750	9.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	600	1.195.845.000	750	1.250.595.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.067.625.000		1.122.375.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	600	1.067.625.000	750	1.122.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				87.720.000		87.720.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	600	87.720.000	750	87.720.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	600	40.500.000	750	40.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.094.349.000		1.130.850.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	277.200.000	500	277.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	12.000.000	500	12.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	7.200.000	500	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				240.500.000		240.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	240.500.000	500	240.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				7.500.000		7.500.000		
						persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi Reunifikasi ke Daerah Asal	%	100	7.500.000	100	7.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	817.149.000	500	853.650.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				711.749.000		748.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	711.749.000	500	748.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				78.400.000		78.400.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	78.400.000	500	78.400.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	27.000.000	500	27.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					506.448.000		524.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	150.575.000	250	150.575.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				64.850.000		64.850.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	64.850.000	250	64.850.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				22.200.000		22.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	22.200.000	250	22.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				21.900.000		21.900.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	21.900.000	250	21.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				3.125.000		3.125.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	3.125.000	250	3.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				15.000.000		15.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	15.000.000	100	15.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	355.873.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				355.873.000		374.125.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.873.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0.14	2.178.587.000	0.18	2.251.187.000	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.622.812.000		1.677.162.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	760	108.075.000	950	93.075.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	760		950		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				37.800.000		37.800.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	760	37.800.000	950	37.800.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				33.400.000		33.400.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	760	33.400.000	950	33.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				26.875.000		11.875.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	760	26.875.000	950	11.875.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	760	1.514.737.000	950	1.584.087.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.352.325.000		1.421.675.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	760	1.352.325.000	950	1.421.675.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				111.112.000		111.112.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	760	111.112.000	950	111.112.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				51.300.000		51.300.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	760	51.300.000	950	51.300.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					555.775.000		574.025.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	200	147.200.000	250	147.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	200	6.000.000	250	6.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	200	7.200.000	250	7.200.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				120.250.000		120.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	200	120.250.000	250	120.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				3.750.000		3.750.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi Reunifikasi ke Daerah Asal	%	100	3.750.000	100	3.750.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	200	408.575.000	250	426.825.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				355.875.000		374.125.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	200	355.875.000	250	374.125.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				39.200.000		39.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	200	39.200.000	250	39.200.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				13.500.000		13.500.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	200	13.500.000	250	13.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0.07	981.300.000	0.09	1.017.800.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					981.300.000		1.017.800.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	400	112.850.000	500	112.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				37.200.000		37.200.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	400	37.200.000	500	37.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				29.400.000		29.400.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	400	29.400.000	500	29.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6.250.000		6.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	400	6.250.000	500	6.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				30.000.000		30.000.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	30.000.000	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	400	868.450.000	500	904.950.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				711.750.000		748.250.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	400	711.750.000	500	748.250.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				129.700.000		129.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	400	129.700.000	500	129.700.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	400	27.000.000	500	27.000.000	Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0.07	986.635.000	0.08	1.019.485.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					986.635.000		1.019.485.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang		251.200.000		251.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				10.800.000		10.800.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	360	10.800.000	450	10.800.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	12	7.200.000	12	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				216.450.000		216.450.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	360	216.450.000	450	216.450.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				6.750.000		6.750.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	6.750.000	100	6.750.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang		735.435.000		768.285.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				640.575.000		673.425.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	360	640.575.000	450	673.425.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				70.560.000		70.560.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	360	70.560.000	450	70.560.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				24.300.000		24.300.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	360	24.300.000	450	24.300.000	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0.18	2.148.824.000	0.23	2.228.074.000	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					1.375.361.000		1.427.236.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	300	65.688.000	375	53.688.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket					SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				17.100.000		17.100.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	300	17.100.000	375	17.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				21.900.000		21.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	300	21.900.000	375	21.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				16.688.000		4.688.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	300	16.688.000	375	4.688.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	300	1.309.673.000	375	1.373.548.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				1.245.563.000		1.309.438.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	700	1.245.563.000	875	1.309.438.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				43.860.000		43.860.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	300	43.860.000	375	43.860.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	300	20.250.000	375	20.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					773.463.000		800.838.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	700	80.400.000	875	80.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	700	21.000.000	875	21.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				31.900.000		31.900.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	700	31.900.000	875	31.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				4.375.000		4.375.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	700	4.375.000	875	4.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				13.125.000		13.125.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	13.125.000	100	13.125.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	700	693.063.000	875	720.438.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				533.813.000		561.188.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	300	533.813.000	375	561.188.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				112.000.000		112.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	700	112.000.000	875	112.000.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				47.250.000		47.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	700	47.250.000	875	47.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0.06	814.263.000	0.07	841.638.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					814.263.000		841.638.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	300	212.200.000	375	212.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	300	9.000.000	375	9.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	300	7.200.000	375	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				180.375.000		180.375.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	300	180.375.000	375	180.375.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				5.625.000		5.625.000		
						persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi Reunifikasi ke Daerah Asal	%	100	5.625.000	100	5.625.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	300	602.063.000	375	629.438.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				533.813.000		561.188.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	300	533.813.000	375	561.188.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				48.000.000		48.000.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	300	48.000.000	375	48.000.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	300	20.250.000	375	20.250.000	Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0.11	1.408.666.000	0.13	1.461.591.000	Panti Pelayanan Sosial Turusgede	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.408.666.000		1.461.591.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	580	149.413.000	725	149.413.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.03.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				50.700.000		50.700.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	580	50.700.000	725	50.700.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				36.150.000		36.150.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	580	36.150.000	725	36.150.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.09			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.063.000		9.063.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	580	9.063.000	725	9.063.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.12			Pemulasaraan				43.500.000		43.500.000		
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Pemulasaran Jenazah secara Layak dalam Panti Pemerintah	%	100	43.500.000	100	43.500.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.06.04.1.03.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	580	1.259.253.000	725	1.312.178.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.01			Penyediaan Permakanan				1.032.038.000		1.084.963.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	580	1.032.038.000	725	1.084.963.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		1.06.04.1.03.02			Penyediaan Sandang				188.065.000		188.065.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	580	188.065.000	725	188.065.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.03.03			Penyediaan Asrama yang mudah Diakses				39.150.000		39.150.000		
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	580	39.150.000	725	39.150.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0.17	1.967.961.000	0.21	2.050.086.000	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					651.611.000		678.986.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	300	53.688.000	375	53.688.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.01.04			Penyediaan Alat Bantu								
						Jumlah paket Penyediaan Alat Bantu dalam Panti Pemerintah	Paket	1		1		SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				17.100.000		17.100.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	300	17.100.000	375	17.100.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				21.900.000		21.900.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	300	21.900.000	375	21.900.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				4.688.000		4.688.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	300	4.688.000	375	4.688.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.12			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	300	597.923.000	375	625.298.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.01.01			Penyediaan Permakanan				533.813.000		561.188.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	300	533.813.000	375	561.188.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.02			Penyediaan Sandang				43.860.000		43.860.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	300	43.860.000	375	43.860.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.01.03			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				20.250.000		20.250.000		
						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	300	20.250.000	375	20.250.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.316.350.000		1.371.100.000		
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	600	90.625.000	750	90.625.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	
		1.06.04.1.05.04			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				30.600.000		30.600.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	600	30.600.000	750	30.600.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				29.400.000		29.400.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	600	29.400.000	750	29.400.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.09			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				9.375.000		9.375.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	600	9.375.000	750	9.375.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.10			Pemulangan ke Daerah Asal				11.250.000		11.250.000		
						persentase PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi pemulangan ke Daerah Asal	%	100	11.250.000	100	11.250.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.11			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	600	1.225.725.000	750	1.280.475.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	
		1.06.04.1.05.01			Penyediaan Permakanan				1.067.625.000		1.122.375.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	600	1.067.625.000	750	1.122.375.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.02			Penyediaan Sandang				117.600.000		117.600.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	600	117.600.000	750	117.600.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		1.06.04.1.05.03			Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses				40.500.000		40.500.000		
						Jumlah PMKS diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	600	40.500.000	750	40.500.000	SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0.1	1.408.135.000	0.12	1.455.585.000	Dinas Sosial	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti					1.408.135.000		1.455.585.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti	Orang	520	355.200.000	650	355.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.05			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti				15.600.000		15.600.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Pemerintah	Orang	520	15.600.000	650	15.600.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.06			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				7.200.000		7.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	520	7.200.000	650	7.200.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.09			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				312.650.000		312.650.000		
						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	520	312.650.000	650	312.650.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.11			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				9.750.000		9.750.000		
						Persentase Anak Terlantar dalam Panti Pemerintah yang mendapatkan Fasilitasi reunifikasi kepada Keluarga	%	100	9.750.000	100	9.750.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.13			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pemerintah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan penyantunan Sosial di dalam panti	Orang	520	1.052.935.000	650	1.100.385.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.02			Penyediaan Makanan				925.275.000		972.725.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan permakanan dalam Panti Pemerintah	Orang	520	925.275.000	650	972.725.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.03			Penyediaan Sandang				92.560.000		92.560.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Sandang dalam Panti Pemerintah	Orang	520	92.560.000	650	92.560.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.04.1.02.04			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				35.100.000		35.100.000		
						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan fasilitas Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses dalam Panti Pemerintah	Orang	520	35.100.000	650	35.100.000	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						41.750.000.000		41.500.000.000		
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	%	0.23	2.550.000.000	0.29	2.400.000.000	Bidang Penanganan Fakir Miskin	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					2.550.000.000		2.400.000.000		
						Persentase Fakir Miskin Wilayah I cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan	%	0.11	750.000.000	0.14	700.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
		1.06.05.1.02.03			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				750.000.000		700.000.000		
						Jumlah Fakir Miskin Wilayah I yang Mendapatkan Penanganan	Orang	4000	750.000.000	5000	700.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN	
						Persentase Fakir Miskin Wilayah II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan	%	0.11	750.000.000	0.14	700.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
		1.06.05.1.02.03			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				750.000.000		700.000.000		
						Jumlah Fakir Miskin Wilayah II yang Mendapatkan Penanganan	Orang	4000	750.000.000	5000	700.000.000	SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN	
						Pesentase data fakir miskin Kabupaten/kota cakupan daerah provinsi yang tervalidasi	%	100	1.050.000.000	100	1.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
		1.06.05.1.02.02			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam pemutakhiran data fakir miskin	Kabupaten/Kota	35	1.050.000.000	35	1.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN	
						Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	1.46	39.100.000.000	1.82	39.000.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					39.100.000.000		39.000.000.000		
						Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	51056	39.100.000.000	63820	39.000.000.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	
		1.06.05.1.02.01			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				39.100.000.000		39.000.000.000		
						Jumlah PMKS yang mendapatkan Fasilitasi bantuan Sosial	Orang	51056	39.100.000.000	63970	39.000.000.000	SEKSI JAMINAN SOSIAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					100.000.000		100.000.000		
						Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	
		1.06.05.1.01.01			Pengangkatan Anak antar WNI				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah anak yang mendapatkan Fasilitasi Pengangkatan Anak Antar WNI	Orang	150	100.000.000	150	100.000.000	SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						1.700.000.000		1.600.000.000		
						Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	1.700.000.000	100	1.600.000.000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					1.700.000.000		1.600.000.000		
						Persentase korban bencana alam yang ditangani	%	100	1.100.000.000	100	1.000.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.01			Penyediaan Permakanan				700.000.000		700.000.000		
						Persentase korban bencana alam yang mendapatkan Pemenuhan permakanan	%	100	700.000.000	100	700.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.02			Penyediaan Sandang				50.000.000		50.000.000		
						Persentase korban bencana alam yang mendapatkan Pemenuhan sandang	%	100	50.000.000	100	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				100.000.000		100.000.000		
						Persentase Korban Bencana Sosial yang mendapatkan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				150.000.000		50.000.000		
						Persentase Kelompok Rentan Korban Bencana Alam yang mandapatkan penanganan	%	100	150.000.000	100	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
		1.06.06.1.01.05			Pelayanan Dukungan Psikososial				100.000.000		100.000.000		
						Persentase Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	
						Persentase korban bencana sosial yang ditangani	%	100	600.000.000	100	600.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.01			Penyediaan Permakanan				100.000.000		100.000.000		
						Persentase korban bencana sosial yang mendapatkan Pemenuhan permakanan	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.02			Penyediaan Sandang				50.000.000		50.000.000		
						Persentase korban bencana sosial yang mendapatkan Pemenuhan sandang	%	100	50.000.000	100	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				50.000.000		50.000.000		
						Pesentase korban bencana alam yang mendapatkan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	%	100	50.000.000	100	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				350.000.000		350.000.000		
						Persentase Kelompok Rentan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan penanganan	%	100	350.000.000	100	350.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	
		1.06.06.1.01.05			Pelayanan Dukungan Psikososial				50.000.000		50.000.000		
						Persentase Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	%	100	50.000.000	100	50.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Mengurangi Jumlah Pengangguran									**18.198.124.000**		**20.984.033.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Persentase pengangguran yang ditangani	%	9.86		12.32		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja)								**3.002.524.000**		**5.197.384.000**		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	91.07	3.002.524.000	89.57	5.197.384.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						3.002.524.000		5.197.384.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%		1.072.329.000		3.113.763.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.072.329.000		3.113.763.000		
						Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3	%		298.958.000		324.556.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				298.958.000		324.556.000		
						Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja	Unit	20	133.795.000	20	144.437.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3	Orang	60	125.163.000	60	135.119.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3	Unit	1	40.000.000	1	45.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	%				2.000.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						2.000.000.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	Unit	0		0	2.000.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Persentase perusahaan dilakukan pengujian higiene, kesehatan kerja	%		773.371.000		789.207.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				773.371.000		789.207.000		
						Jumlah laboratorium yang terakreditasi	Unit	1	73.371.000	1	79.207.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja	Unit	90	700.000.000	105	710.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS	
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%		1.930.195.000		2.083.621.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.930.195.000		2.083.621.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%		334.485.000		361.092.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.02			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				334.485.000		361.092.000		
						Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP	Kasus	2	56.435.000	3	60.924.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan	Kasus	130	272.335.000	140	293.998.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus	Orang	80	2.934.000	100	3.168.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Orang	60	2.781.000	77	3.002.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%		387.141.000		417.936.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.03			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				387.141.000		417.936.000		
						Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji (pemeriksaan dan pengujian) objek K3	Unit	60	86.492.000	65	93.372.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3	Unit	150	268.858.000	175	290.244.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3	Unit	30	31.791.000	30	34.320.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%		1.208.569.000		1.304.593.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
		2.07.06.1.01.01			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				1.208.569.000		1.304.593.000		
						Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	Orang	30	356.378.000	30	757.132.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan	Unit	30	60.423.000	32	65.229.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	Unit	550	644.203.000	375	365.753.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja	Unit	30	46.470.000	30	46.592.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan	Unit	40	60.200.000	50	34.944.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan	Orang	160	15.000.000	160	6.988.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
						Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan	Orang	20	25.895.000	20	27.955.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA	
	Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja								**10.446.757.000**		**10.766.133.000**		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	5.68	8.159.756.000	5.74	8.390.964.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						8.159.756.000		8.390.964.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	3.25	115.305.000	3.94	124.477.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					115.305.000		124.477.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	0	115.305.000	0	124.477.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.01			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				115.305.000		124.477.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengikuti bimtek Akreditasi	Unit	20	115.305.000	25	124.477.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	5.68	607.308.000	5.74	655.616.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					607.308.000		655.616.000		
						Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	%	26	607.308.000	30	655.616.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				607.308.000		655.616.000		
						Jumlah Kab/kota yang dimonitoring hasil pelatihannya di Lembaga Pelatihan kerja Pemerintah dan Swasta	Orang	35	43.160.000	35	46.593.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Jumlah Peserta Magang Luar Negeri	Orang	700	227.277.000	725	245.356.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	Orang	75	241.953.000	80	261.199.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Jumlah Peserta Sinergitas Peningkatan Pelatihan	Orang	40	28.452.000	40	30.715.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Jumlah SDM Pelatihan Kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Orang	20	66.466.000	25	71.753.000	SEKSI PELATIHAN DAN PEMAGANGAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%		3.327.259.000		3.339.590.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					3.327.259.000		3.339.590.000		
						Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang industri	%		142.426.000		153.757.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				142.426.000		153.757.000		
						Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri	Orang	2015	67.039.000	2220	72.373.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						jumlah dokumen training need assesment (TNA)	Dokumen	30	41.537.000	35	44.841.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja	Dokumen	1	33.850.000	1	36.543.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%		150.000.000		151.000.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				150.000.000		151.000.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja	Orang	100	150.000.000	100	151.000.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	%		3.034.833.000		3.034.833.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				3.034.833.000		3.034.833.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja - (DBHCHT)	Orang	580	3.034.833.000	580	3.034.833.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%					SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Cilacap	Unit	0		0		SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%		1.589.169.000		1.692.171.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.589.169.000		1.692.171.000		
						Persentase Identifikasi kebutuhan pelatihan dan promosi di bidang bidang jasa, pemagangan, bahasa asing dan pekerja migran	%		289.169.000		312.171.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				289.169.000		312.171.000		
						Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran Indonesia	Orang	320	194.218.000	340	209.667.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen training need assestment (TNA)	Dokumen	1	86.319.000	1	93.186.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja	Dokumen	1	8.632.000	1	9.318.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	%		1.300.000.000		1.380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.300.000.000		1.380.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa	Orang	60	500.000.000	60	530.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran Indonesia	Orang	40	300.000.000	40	330.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pra magang	Orang	60	500.000.000	60	520.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%					SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1	Unit	36		45		SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%		1.977.744.000		1.992.950.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.977.744.000		1.992.950.000		
						Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian	%		78.548.000		84.798.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				78.548.000		84.798.000		
						Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang pertanian mendukung pertanian mendukung penempatan melalui mekanismeAKL , AKAD dan AKAN	Orang	480	41.001.000	480	44.263.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment)	Dokumen	1	33.232.000	1	35.876.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama dengan duniaindustri/pelaku usaha	Dokumen	1	4.315.000	1	4.659.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	%		1.786.597.000		1.786.597.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.786.597.000		1.786.597.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN (DBHCHT)	Orang	480	1.786.597.000	480	1.786.597.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%		112.599.000		121.555.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				112.599.000		121.555.000		
						Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN	Orang	48	112.599.000	48	121.555.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%					SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi	Unit	0		0		SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	0.74	542.971.000	0.77	586.160.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					542.971.000		586.160.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	66.66	542.971.000	83.33	586.160.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				542.971.000		586.160.000		
						Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penilaian akreditasi lembaga	Orang	25	90.711.000	30	157.409.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Jumlah peserta yang tersertifikasi	Orang	200	452.260.000	200	428.751.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	29.39	2.287.001.000	30.37	2.375.169.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.287.001.000		2.375.169.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	29.39	634.448.000	30.37	684.914.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					634.448.000		684.914.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	25	634.448.000	30	684.914.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.01			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				634.448.000		684.914.000		
						Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Kabupaten/Kota	35	73.371.000	35	79.208.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Jumlah Lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan mengikuti bimbingan teknis peningkatan produktivitas	Orang	50	64.740.000	50	69.889.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Jumlah peserta yang mengikuti Penyebaran informasi produktivitas baik kepada pemerintah, komunitas desa potensial, pelaku usaha melalui konvensi, festival produktivitas & penghargaan produktivitas	Orang	350	431.597.000	350	465.928.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa	Orang	50	64.740.000	50	69.889.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	%		1.652.553.000		1.690.255.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.356.354.000		1.370.495.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	%		1.178.570.000		1.178.570.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.178.570.000		1.178.570.000		
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (DBHCHT)	Orang	676	1.178.570.000	700	1.178.570.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%		177.784.000		191.925.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				177.784.000		191.925.000		
						Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan pelatihan	Dokumen	2	18.990.000	2	20.500.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah naskah kerjasama dengan pelaku usaha yang akan melaksanakan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Dokumen	2	30.415.000	2	32.834.000	SEKSI PELATIHAN	
						Jumlah tenaga kerja yang dilakukan pemasaran tools, teknik, dan metode peningkatan produktivitas	Orang	150	128.379.000	160	138.591.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%					SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.03			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2	Unit	0		0		SEKSI PELATIHAN	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					291.687.000		314.889.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%		291.687.000		314.889.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.03.01			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				291.687.000		314.889.000		
						Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan konsultasi produktivitas dan klinik produktivitas	Unit	1	2.755.000	1	2.974.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas	Orang	700	288.932.000	720	311.915.000	SEKSI PEMASARAN	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					4.512.000		4.871.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%		4.512.000		4.871.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.01			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				4.512.000		4.871.000		
						Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya	Unit	1	4.512.000	1	4.871.000	SEKSI PELATIHAN	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah								**400.000.000**		**420.000.000**		
						Persentase Kab/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	28.57	400.000.000	57.14	420.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						400.000.000		420.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	28.57	400.000.000	57.14	420.000.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					400.000.000		420.000.000		
						Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	80	400.000.000	90	420.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				200.000.000		210.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi	Dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro	Kabupaten/ Kota	10	100.000.000	10	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.07.02.1.01.02			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				200.000.000		210.000.000		
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Kabupaten/ Kota	35	100.000.000	35	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro	Unit	35	100.000.000	35	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja								**1.835.434.000**		**1.940.456.000**		
						Persentase pencari tenaga kerja yang ditempatkan	%	24.24	1.835.434.000	30.3	1.940.456.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.835.434.000		1.940.456.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal	%	24.24	91.210.000	30.3	177.890.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					61.250.000		72.218.000		
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19	61.250.000	19.25	72.218.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.03.02			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				61.250.000		72.218.000		
						Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online	Orang	200	61.250.000	200	72.218.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					29.960.000		105.672.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	Dokumen		29.960.000		105.672.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam				29.960.000		105.672.000		

					1 (satu) Daerah Provinsi								
						Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA	Dokumen	25	3.000.000	30	70.728.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA	Orang	50	26.960.000	60	34.944.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%		1.744.224.000		1.762.566.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.428.519.000		1.371.795.000		
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	54.5	649.879.000	58.33	545.082.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.01			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				61.807.000		76.000.000		
						Jumlah Petugas Pengelola BKK dan Petugas IPK mengikuti Bimbingan Teknis / Pemanduan / Pembinaan Antar Kerja	Orang	75	61.807.000	80	76.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.02			Pelayanan Antar Kerja				473.133.000		247.193.000		
						Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD	Orang	75	30.783.000	80	34.105.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja	Orang	750	424.270.000	150	162.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Orang	35	18.080.000	40	51.088.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.03			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				61.589.000		69.889.000		
						Jumlah Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja yang mendapatkan PBJ	Orang	100	61.589.000	100	69.889.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.01.04			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				53.350.000		152.000.000		
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja	Unit	100	53.350.000	100	152.000.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	50	778.640.000	55	826.713.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.01.05			Perluasan Kesempatan Kerja				778.640.000		826.713.000		
						Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya	Orang	40	217.222.000	40	463.132.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah masyarakat mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	300	551.785.000	300	310.000.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah masyarakat mengikuti penyuluhan/ sosialisasi perluasan kesempatan kerja	Orang	0		0		SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan	Orang	35	9.633.000	35	53.581.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam upaya perluasan kesempatan kerja	Orang	0		0		SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course	Orang	0		0		SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah wirausaha binaan terfasilitasi dalam mengakses pasar	Orang	0		0		SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					315.705.000		390.771.000		
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	66	239.535.000	70	258.588.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.04			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				239.535.000		258.588.000		
						Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	20	41.907.000	20	32.614.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Jumlah PMI Purna mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	Orang	80	167.628.000	59	163.074.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif	Orang	75	30.000.000	75	62.900.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	0.17	76.170.000	0.34	132.183.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.04.01			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				63.630.000		108.654.000		
						Jumlah CPMI mengikuti Pembekalan Pra Keberangkatan	Orang	50	26.860.000	50	34.106.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI	Orang	50	36.770.000	50	74.548.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.04.03			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				12.540.000		23.529.000		
						Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal	Unit	9	12.540.000	9	23.529.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi								**295.000.000**		**296.000.000**		
						Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3.18	295.000.000	3.6	296.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						295.000.000		296.000.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.18	75.000.000	3.6	76.000.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					75.000.000		76.000.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	3.18	75.000.000	3.6	76.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.06			Pelatihan Transmigrasi				75.000.000		76.000.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	40	75.000.000	40	76.000.000	SEKSI PELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.18	220.000.000	3.6	220.000.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					220.000.000		220.000.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	3.18	220.000.000	3.6	220.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				220.000.000		220.000.000		
						Jumlah dokumen ketransmigrasian	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
						Jumlah pemerintah daerah kab/kota difasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerjasama bidang ketransmigrasian	Kabupaten/ Kota	60	200.000.000	60	200.000.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial dan jaminan sosial								**2.218.409.000**		**2.364.060.000**		
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	90.56	2.218.409.000	91.67	2.364.060.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						2.218.409.000		2.364.060.000		
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	87.56	343.609.000	87.7	370.942.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					343.609.000		370.942.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%		343.609.000		370.942.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.01.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				133.794.000		144.437.000		
						jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	Orang	100	133.794.000	100	144.437.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.01.02			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				35.606.000		38.439.000		
						Jumlah perusahaan yang teridentifikasi belum memenuhi ketentuan pp/pkb	Unit	100	35.606.000	100	38.439.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.01.03			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				174.209.000		188.066.000		
						Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos	Orang	70	107.312.000	70	115.848.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial	Orang	80	66.897.000	80	72.218.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	46.62	688.085.000	47.61	742.819.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					688.085.000		742.819.000		
						Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	%	0	688.085.000	0	742.819.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				241.997.000		261.247.000		
						Jumlah kab/kota yang mengikuti diseminasi/ sosialiasi/ bimtek Koordinasi dan Konsolidasi HI	Kabupaten/Kota	20	61.404.000	20	66.289.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah Mediator dan Pegawai HI yang mengikuti Koordinasi Teknis HI	Orang	80	41.047.000	80	44.312.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi/ sosialiasi/ bimtek LKS Bipartit	Orang	90	52.261.000	90	56.418.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi/ sosialiasi/ bimtek Pemberdayaan SP/SB	Orang	60	35.607.000	60	38.439.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi/ sosialiasi/ bimtek Pembinaan Hubungan Industrial Bagi PUK SP/SB dan Manajemen di Perusahaan	Orang	70	51.678.000	70	55.789.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.02.03			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				172.638.000		186.371.000		
						Jumlah Unit Kerja yang terdata dalam Verifikasi SP/SB	Unit	2000	172.638.000	2000	186.371.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.02.04			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				273.450.000		295.201.000		
						Jumlah anggota LKS Tripartit Kabupaten/ Kota yang mengikutiForum Komunikasi LKS Tripartit	Orang	60	23.082.000	60	24.918.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah anggota LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengikuti Pembinaan SDM LKS Tripartit Kabupaten/ Kota	Orang	40	26.536.000	40	28.647.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah anggota LKS Tripartit yang mengikuti Pemberdayaan LKS Tripartit	Orang	120	223.832.000	120	241.636.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	90.56	515.543.000	91.67	525.740.000	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				515.543.000		525.740.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial	%		322.221.000		347.851.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.02.01			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				322.221.000		347.851.000		
						Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota	Dokumen	1	119.029.000	1	128.497.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI	Dokumen	1	34.610.000	1	37.363.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasuskasus PHI/PHK	Kabupaten/Kota	20	45.577.000	25	49.202.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisihan hubungan industrial	Orang	35	89.422.000	40	96.535.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial	Unit	20	33.583.000	25	36.254.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit	%		193.322.000		177.889.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.02			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				193.322.000		177.889.000		
						jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi	Kasus	2	31.714.000	1	3.426.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri	Kasus	30	64.689.000	35	69.835.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota	Kasus	7	25.389.000	8	27.408.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia)	Kasus	25	71.530.000	30	77.220.000	SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	16.11	671.172.000	16.53	724.559.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				319.379.000		344.784.000		
						Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	15	319.379.000	0	344.784.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.05			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				319.379.000		344.784.000		
						Jumlah Perusahaan yang dilakukan pendampingan dalam penyususnan Struktur dan skala upah	Unit	60	71.213.000	65	76.878.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Peserta workshop sistem pengupahan	Orang	150	103.583.000	160	111.822.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI	Orang	120	60.423.000	120	65.229.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pengupahan	Orang	75	56.107.000	75	60.570.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Petugas Survey identifikasi struktur sekala upah	Orang	70	28.053.000	70	30.285.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					351.793.000		379.775.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%		351.793.000		379.775.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.03			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				213.251.000		230.214.000		
						Jumlah dokumen penetapan UMP & UMK	Dokumen	2	199.872.000	2	215.771.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						JUMLAH PESERTA YG MENGIKUTI SOSIALISASI UMK (Dinas Kab/Kota yg membidangi KK, SP Tk. Prov, Apindo Tk. Prov)	Orang	50	13.379.000	50	14.443.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.05			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				138.542.000		149.561.000		
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja	Orang	105	131.637.000	120	142.107.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
						Jumlah petugas data yg melakukan identifikasai Data Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja	Orang	20	6.905.000	20	7.454.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**83.122.869.000**		**90.015.967.000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.8		79		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**1.100.843.000**		**1.117.421.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.8	1.100.843.000	80	1.117.421.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.100.843.000		1.117.421.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.100.843.000	100	1.117.421.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					30.270.000		30.983.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	30.270.000	1	30.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30.270.000		30.983.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	30.270.000	12	30.983.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					210.892.000		215.573.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	210.892.000	1	215.573.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.137.000		25.429.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	25.137.000	12	25.429.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				34.846.000		35.542.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	34.846.000	12	35.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.163.000		30.694.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	29.163.000	12	30.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				32.614.000		33.127.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	32.614.000	12	33.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.085.000		70.252.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	70.085.000	12	70.252.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				19.047.000		20.529.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12	19.047.000	12	20.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					526.216.000		532.545.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	526.216.000	1	532.545.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.009.000		8.105.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.009.000	12	8.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				92.990.000		94.109.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	92.990.000	12	94.109.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				425.217.000		430.331.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	425.217.000	12	430.331.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					333.465.000		338.320.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	333.465.000	1	338.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.218.000		34.630.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	34.218.000	12	34.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				12.135.000		12.281.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12.135.000	12	12.281.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.182.000		61.147.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	60.182.000	12	61.147.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				32.017.000		32.643.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	32.017.000	12	32.643.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				153.718.000		155.567.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	153.718.000	1	155.567.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.195.000		42.052.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	41.195.000	12	42.052.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**82.022.026.000**		**88.898.546.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.5	82.022.026.000	84.8	88.898.546.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						82.022.026.000		88.898.546.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.574.591.000	100	1.600.712.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.421.000		43.303.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	42.421.000	1	43.303.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37.280.000		38.089.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	37.280.000	12	38.089.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5.141.000		5.214.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	5.141.000	1	5.214.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					17.799.000		18.013.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	17.799.000	1	18.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				17.799.000		18.013.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	17.799.000	12	18.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					408.363.000		423.171.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	408.363.000	1	423.171.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.689.000		18.914.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	19.689.000	12	18.914.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		36.390.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	3	35.000.000	12	36.390.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.569.000		11.708.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	11.569.000	12	11.708.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		16.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.139.000		32.417.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	23.139.000	12	32.417.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				16.698.000		17.020.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	16.698.000	12	17.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				287.268.000		290.722.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	0	287.268.000	0	290.722.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					716.070.000		724.315.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	716.070.000	1	724.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.854.000		30.859.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.854.000	12	30.859.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.789.000		198.143.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	195.789.000	12	198.143.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				489.427.000		495.313.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	489.427.000	12	495.313.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					389.938.000		391.910.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	389.938.000	1	391.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.627.000		126.686.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	125.627.000	12	126.686.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.629.000		5.697.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.629.000	12	5.697.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.229.000		32.617.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	32.229.000	12	32.617.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				75.645.000		76.555.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	75.645.000	12	76.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.808.000		150.355.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.808.000	12	150.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.369.791.000	100	1.397.058.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		30.719.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	45.000.000	1	30.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		30.719.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	45.000.000	12	30.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					268.989.000		287.360.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	268.989.000	1	287.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				59.265.000		55.796.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	59.265.000	12	55.796.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.225.000		29.383.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.225.000	12	29.383.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				33.000.000		16.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	33.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.280.000		27.440.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.280.000	12	27.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				32.634.000		48.741.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	32.634.000	12	48.741.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103.585.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	103.585.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					840.600.000		868.664.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	840.600.000	1	868.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		7.664.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.500.000	12	7.664.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				281.400.000		251.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	281.400.000	12	251.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				555.700.000		610.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	555.700.000	12	610.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					215.202.000		210.315.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	215.202.000	1	210.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.700.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	22.700.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						5.697.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12	5.697.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.618.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		12	22.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				117.502.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	117.502.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						51.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		12	51.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		81.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	75.000.000	1	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	995.397.000	100	634.988.000	Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					34.936.000		35.837.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	34.936.000	12	35.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				31.200.000		17.336.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	31.200.000	12	17.336.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3.736.000		18.501.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	3.736.000	1	18.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.899.000		9.007.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	8.899.000	12	9.007.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.899.000		9.007.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	8.899.000	12	9.007.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					249.732.000		253.370.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	249.732.000	12	253.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.679.000		10.809.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.679.000	12	10.809.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.397.000		34.039.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	3	33.397.000	3	34.039.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.698.000		17.020.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	16.698.000	12	17.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.148.000		15.553.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.148.000	12	15.553.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.029.000		20.318.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.029.000	12	20.318.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				14.797.000				
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	14.797.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.800.000		21.857.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	6.800.000	12	21.857.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				132.184.000		133.774.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	132.184.000	12	133.774.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					501.381.000		133.749.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	501.381.000	12	133.749.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.767.000		6.848.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	6.767.000	12	6.848.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				84.367.000		85.382.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	84.367.000	12	85.382.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				410.247.000		41.519.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	410.247.000	12	41.519.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.449.000		203.025.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	200.449.000	12	203.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.646.000		36.555.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.646.000	12	36.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.698.000		17.020.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	16.698.000	12	17.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				8.899.000		9.007.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	8.899.000	12	9.007.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.211.000		80.378.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	80.211.000	1	80.378.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.196.000		42.052.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	41.196.000	12	42.052.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.799.000		18.013.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	17.799.000	12	18.013.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.550.170.000	100	1.684.306.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67.800.000		16.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	67.800.000	1	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				67.800.000		16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	67.800.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					208.020.000		231.384.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	208.020.000	1	231.384.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.650.000		36.845.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	45.650.000	12	36.845.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.082.000		16.606.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	1	15.082.000	1	16.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.273.000		25.746.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	11.273.000	12	25.746.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.360.000				
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	18.360.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.701.000		21.210.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	3.701.000	12	21.210.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				31.458.000		49.977.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	31.458.000	12	49.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.780.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	6.780.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.716.000		81.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	75.716.000	12	81.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000		285.629.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	25.000.000	1	285.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor / bangunan lainnya	Unit	1		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		285.629.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	177	25.000.000	177	285.629.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.001.800.000		809.316.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.001.800.000	1	809.316.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.684.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.684.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				264.000.000		210.632.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	264.000.000	12	210.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				734.800.000		595.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	734.800.000	12	595.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					247.550.000		341.977.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	247.550.000	1	341.977.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.350.000		30.757.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	52.350.000	12	30.757.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				79.150.000		76.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	79.150.000	12	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				77.250.000		53.220.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	77.250.000	12	53.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						152.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	5		5	152.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.800.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	38.800.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.518.667.000	100	1.386.705.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.297.000		37.445.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	32.297.000	12	37.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12.297.000		12.445.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	12.297.000	1	12.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					242.856.000		260.427.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	242.856.000	12	260.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	15.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		78.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	19	75.000.000	19	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.856.000		3.427.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.856.000	12	3.427.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	120.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					175.000.000				
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	175.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat tak bermotor	Unit	11		11		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	17		17		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	6		6		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit Aset tetap	Unit	90		90		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				175.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	1	175.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	16		16		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					841.882.000		854.219.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	841.882.000	12	854.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		103.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	100.000.000	12	103.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				734.882.000		743.719.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	734.882.000	12	743.719.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					226.632.000		234.614.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	226.632.000	12	234.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.879.000		43.395.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	42.879.000	12	43.395.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	15.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				30.000.000		31.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	30.000.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		105.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	100.000.000	12	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.753.000		39.219.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	38.753.000	0	39.219.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	75.013.410.000	100	82.194.777.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.033.468.000		1.107.007.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	10	1.033.468.000	10	1.107.007.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				343.578.000		383.935.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5	274.523.000	5	309.387.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta rakor bidang nakertrans	Orang	105	69.055.000	105	74.548.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100.000.000		110.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12.181.000		16.375.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	12.181.000	1	16.375.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				24.271.000		24.563.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	24.271.000	1	24.563.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				12.181.000		16.375.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	12.181.000	1	16.375.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				153.719.000		155.567.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	153.719.000	1	155.567.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				387.538.000		400.192.000		
						Jumlah dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	1	137.538.000	1	139.192.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	150.000.000	2	151.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen monitoring bidang nakertrans	Dokumen	3	100.000.000	3	110.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					66.961.980.000		73.996.699.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	66.961.980.000	1	73.996.699.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				66.329.540.000		73.361.259.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	66.329.540.000	14	73.361.259.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				432.440.000		432.440.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	432.440.000	12	432.440.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100.000.000		101.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	100.000.000	12	101.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				30.000.000		31.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	30.000.000	1	31.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				70.000.000		71.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	13	70.000.000	13	71.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					95.000.000		95.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	95.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				95.000.000		95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					78.000.000		83.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	78.000.000	1	83.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				30.000.000		33.000.000		
						Jumlah Data Objek Retribusi Daerah	Laporan	1	30.000.000	1	33.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				48.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12	48.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	Orang	100	25.000.000	100	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.819.997.000		1.792.232.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.819.997.000	1	1.792.232.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				64.362.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	64.362.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				105.000.000		106.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	105.000.000	12	106.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000		126.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	125.000.000	12	126.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000				
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				150.000.000		151.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	150.000.000	12	151.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				75.000.000		83.597.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	75.000.000	12	83.597.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		820.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	800.000.000	12	820.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				494.635.000		440.635.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	494.635.000	1	440.635.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	0		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Unit	5		5		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.817.954.000		3.883.954.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	3.817.954.000	1	3.883.954.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.284.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.284.000.000	12	1.350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.433.954.000		2.433.954.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.433.954.000	12	2.433.954.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.032.011.000		1.061.885.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.032.011.000	1	1.061.885.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				322.161.000		326.035.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	322.161.000	12	326.035.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				384.850.000		390.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	384.850.000	12	390.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		270.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	7	250.000.000	7	270.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Ketahanan Pangan									**17.221.000.000**		**19.537.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88.44		88.8		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas								**17.221.000.000**		**19.537.000.000**		
						Angka Konsumsi Energi	kkal/kapita/h	2100	17.221.000.000	2100	19.537.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						471.000.000		657.000.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	471.000.000	100	657.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		40.000.000		40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.000.000		179.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	138.000.000	12	179.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5	70.000.000	7	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	10.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	8.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					217.800.000		218.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		217.800.000		218.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	120.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				94.800.000		90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	94.800.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.200.000		220.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	75.200.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.200.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	1	55.200.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						10.855.000.000		12.030.000.000		
						Angka Konsumsi Beras	kg/kapita/tahun	92.3	2.800.000.000	91.4	3.050.000.000	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					2.800.000.000		3.050.000.000		
						Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	kg/kapita/tahun	86	350.000.000	87	400.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.01			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				350.000.000		400.000.000		
						Jumlah Promosi dan Edukasi Pangan B2SA yang dilaksanakan	Kali	3	350.000.000	4	400.000.000	SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Konsumsi kelompok pangan hewani	kg/kapita/tahu	33	1.250.000.000	34	1.350.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	
		2.09.03.1.04.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1.250.000.000		1.350.000.000		
						Analisa PPH	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	Kelompok	30	1.200.000.000	32	1.300.000.000	SEKSI KONSUMSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0.14	1.200.000.000	0.15	1.300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	
		2.09.03.1.04.01			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.200.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Kelompok	25	1.200.000.000	28	1.300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						CV harga pangan strategis (beras)	%	4.9	4.005.000.000	4.8	4.180.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					4.005.000.000		4.180.000.000		
						Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	3.555.000.000	5	3.680.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	
		2.09.03.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				2.675.000.000		2.700.000.000		
						Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	Laporan	1	2.483.800.000	1	2.500.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Paket	1	191.200.000	1	200.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.09.03.1.01.05			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				880.000.000		980.000.000		
						Jumlah lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi	Lokasi	6	275.750.000	6	180.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Kelompok	28	604.250.000	30	800.000.000	SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Presentase peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk intervensi harga pangan	%	5	450.000.000	5	500.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	
		2.09.03.1.01.01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				450.000.000		500.000.000		
						Jumlah informasi dan intervensi harga pangan strategis	Kali	4	450.000.000	5	500.000.000	SEKSI HARGA PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	3731	800.000.000	3732	1.000.000.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					800.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	Laporan	2	300.000.000	2	400.000.000	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	
		2.09.03.1.01.01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				300.000.000		400.000.000		
						Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan	Laporan	2	300.000.000	2	400.000.000	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah kelompok pangan pokok lokal subtitusi beras yang di fasilitasi	Kelompok	10	500.000.000	15	600.000.000	SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	
		2.09.03.1.01.02			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				500.000.000		600.000.000		
						Jumlah bibit/benih pangan pokok lokal subtitusi beras yang di fasilitasi	Paket	5	500.000.000	7	600.000.000	SEKSI SUMBERDAYA PANGAN	
						Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Ton	0.61	3.250.000.000	0.67	3.800.000.000	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					3.250.000.000		3.800.000.000		
						Persentase peningkatan volume cadangan pangan	%	3	3.250.000.000	3	3.800.000.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	
		2.09.03.1.02.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi				3.250.000.000		3.800.000.000		
						Jumlah Cadangan Pangan Provinsi yang disediakan (beras)	Ton	200	2.500.000.000	250	3.000.000.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	28	750.000.000	30	800.000.000	SEKSI CADANGAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						2.830.000.000		3.440.000.000		
						Prosentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	2.830.000.000	1	3.440.000.000	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					2.830.000.000		3.440.000.000		
						Prosentase penanganan daerah rawan pangan	%	4.45	2.830.000.000	4.91	3.440.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				2.830.000.000		3.440.000.000		
						Jumlah desa mandiri pangan yang difasilitasi	Desa	30	2.790.000.000	34	3.400.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Peta SKPG dan atau FSVA	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI KERAWANAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						3.065.000.000		3.410.000.000		
						Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	1.525.000.000	80	1.750.000.000	Bidang Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.525.000.000		1.750.000.000		
						Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	Laporan	1	400.000.000	1	450.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.04			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		450.000.000		
						Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	225	400.000.000	250	450.000.000	SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN	
						Persentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	%	10	675.000.000	10	700.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.01			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				675.000.000		700.000.000		
						Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	Kelompok	20	675.000.000	25	700.000.000	SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase PSAT Teregistrasi di Peredaran	%	22	450.000.000	23	600.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01.04			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000		600.000.000		
						Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Laporan	2	22.500.000	3	150.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	sampel	250	427.500.000	300	450.000.000	SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan	%	80	1.540.000.000	80	1.660.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.540.000.000		1.660.000.000		
						Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	Angka	67.5	698.000.000	70	750.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	
		2.09.05.1.01.05			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				698.000.000		750.000.000		
						Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana Laboraturium BPMKP	Paket	0		0		SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah sampel pangan yang diuji	sampel	60	698.000.000	70	750.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	Angka	83	842.000.000	83.5	910.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.09.05.1.01.03			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				842.000.000		910.000.000		
						Jumlah Layanan sertifikasi dan registrasi	Sertifikat	35	842.000.000	38	910.000.000	SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**17.922.885.000**		**21.963.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	75		76		Dinas Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**638.800.000**		**750.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80.01	638.800.000	80.02	750.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						638.800.000		750.000.000		
						Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	638.800.000	100	750.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					638.800.000		750.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen		638.800.000		750.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				306.800.000		350.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	2	306.800.000	2	350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				332.000.000		400.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	332.000.000	2	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**17.284.085.000**		**21.213.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	75	17.284.085.000	76	21.213.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						17.284.085.000		21.213.000.000		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	17.284.085.000	100	21.213.000.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.675.085.000		17.771.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	13.675.085.000	12	17.771.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.943.885.000		17.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12.943.885.000	12	17.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				335.760.000		340.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	335.760.000	12	340.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				395.440.000		431.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	2	395.440.000	2	431.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					130.000.000		134.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	130.000.000	12	134.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000		34.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	Laporan	1	30.000.000	1	34.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					261.600.000		271.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	261.600.000	12	271.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				231.600.000		231.600.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	231.600.000	12	231.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		40.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	15	30.000.000	20	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.070.200.000		1.149.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.070.200.000	12	1.149.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	25	250.000.000	25	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		525.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	500.000.000	12	525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				98.200.000		137.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	1	98.200.000	1	137.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					999.200.000		1.037.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	999.200.000	12	1.037.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				362.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	362.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				625.200.000		625.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	625.200.000	12	625.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.148.000.000		850.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.148.000.000	12	850.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				710.000.000		400.000.000		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	2	710.000.000	2	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	88.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah									**13.169.810.000**		**24.669.810.000**		
						Indeks Kualitas Air	Angka	50.6		50.65		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Indeks Kualitas Udara	Angka	84.95		85			
	Menurunnya pencemaran air permukaan								**7.616.920.000**		**7.616.920.000**		
						Indeks Pencemaran Air	Angka	3.452	7.616.920.000	3.452	7.616.920.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						719.600.000		719.600.000		
						Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	%	100	719.600.000	100	719.600.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					569.600.000		369.600.000		
						Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	5	569.600.000	4	369.600.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi				250.000.000				
						Jumlah PERDA yang disusun	Dokumen	1	250.000.000	0		SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.01.02			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi				319.600.000		369.600.000		
						Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	4	319.600.000	4	369.600.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi					150.000.000		350.000.000		
						Jumlah Dokumen KLHS yang disusun atau difasilitasi	Dokumen	1	150.000.000	2	350.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.02.1.02.01			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				100.000.000				
						Jumlah KLHS dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen	1	100.000.000	0		SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02.02			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						250.000.000		
						Jumlah KLHS dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	Dokumen	0		2	250.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.02.1.02.04			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				50.000.000		100.000.000		
						Jumlah Kab / Kota yang difasilitasi dokumen KLHS-nya	Kabupaten/ Kota	35	50.000.000	35	100.000.000	SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						3.570.000.000		3.570.000.000		
						Persentase pengujian kualitas air	%	100	1.570.000.000	100	1.570.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					1.570.000.000		1.570.000.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	Dokumen	1	650.000.000	1	650.000.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				650.000.000		650.000.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas air	sampel	1150	650.000.000	1150	650.000.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan Penerapan ISO 17025 dan Permen LHK P.23 Tahun 2020 Tentang Laboratorium Lingkungan	Dokumen	1	920.000.000	1	920.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.03			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi				920.000.000		920.000.000		
						Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan ISO 17025	Unit	66	620.000.000	66	650.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
						Jumlah peralatan lab yang terpelihara/terkalibrasi	Unit	70	300.000.000	70	270.000.000	SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
						Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau	Lokasi	25	2.000.000.000	25	2.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2.000.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	Kegiatan	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						850.000.000		850.000.000		
						Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	74.87	400.000.000	77.38	400.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					400.000.000		400.000.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	Unit	149	400.000.000	154	400.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.03			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah pelaku usaha berijin yang diawasi	Unit	25	400.000.000	25	400.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	450.000.000	100	450.000.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					450.000.000		450.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Lingkungan hidup yang dikeluarkan	Dokumen	6	450.000.000	6	450.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.06.1.01.01			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai	Dokumen	6	450.000.000	6	450.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						2.097.320.000		2.097.320.000		
						Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	50	374.700.000	50	374.700.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					374.700.000		374.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	Kelompok	3	374.700.000	3	374.700.000	SEKSI PENYULUHAN	
		2.11.08.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				221.900.000		221.900.000		
						Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitas nya	Orang	90	221.900.000	90	221.900.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.08.1.01.02			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				152.800.000		152.800.000		
						Jumlah sasaran suluh pada gerakan peduli lingkungan yang didampingi	Orang	300	152.800.000	300	152.800.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	1.722.620.000	100	1.722.620.000	Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					1.722.620.000		1.722.620.000		
						Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya	Unit	93	1.722.620.000	103	1.722.620.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				927.000.000		927.000.000		
						Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH	Unit	3	927.000.000	3	927.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.02			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				795.620.000		795.620.000		
						Jumlah sekolah peduli lingkungan	Unit	90	795.620.000	100	795.620.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						380.000.000		380.000.000		
						Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	380.000.000	100	380.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi					380.000.000		380.000.000		
						Jumlah pengaduan yang ditangani	Laporan	25	380.000.000	25	380.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.10.1.01.01			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi				380.000.000		380.000.000		
						Jumlah pengaduan yang dilakukan verifikasi lapangan	Laporan	25	380.000.000	25	380.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Menurunnya pencemaran udara								**5.552.890.000**		**17.052.890.000**		
						Indeks Pencemar SO2 dan NO2	Angka	0.2	5.552.890.000	0.2	17.052.890.000		
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.300.000.000		1.423.000.000		
						Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	8.57	820.000.000	8.57	943.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					820.000.000		943.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien	Kabupaten/ Kota	35	820.000.000	35	943.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.03.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				820.000.000		943.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan	Dokumen	1	102.000.000	1	117.300.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	Lokasi	535	718.000.000	550	825.700.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	100	480.000.000	100	480.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup					480.000.000		480.000.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	Dokumen	1	480.000.000	1	480.000.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	
		2.11.03.1.01.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			480.000.000		480.000.000		
						Jumlah titik pengujian kualitas udara	sampel	1000	480.000.000	1000	480.000.000	SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1.760.000.000		1.868.955.000		
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	1.91	760.000.000	1.91	868.955.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					760.000.000		868.955.000		
						Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	Ha	50	760.000.000	50	868.955.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.04.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				100.890.000		110.979.000		
						Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dievaluasi	Dokumen	1	100.890.000	1	110.979.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.04.1.01.04			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				659.110.000		757.976.000		
						Luas RTH yang ditangani	Ha	50	659.110.000	50	757.976.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	%	0.14	1.000.000.000	0.14	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi					1.000.000.000		1.000.000.000		
						Luas pelestarian Kehati yang ditangani di Kebun Raya Baturraden	Ha	3.74	1.000.000.000	3.74	1.000.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		2.11.04.1.01.03			Pengelolaan Kebun Raya				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya	Unit	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						1.470.475.000		888.000.000		
						Persentase kab/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya	%	17.14	1.470.475.000	17.14	888.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					1.470.475.000		888.000.000		
						Jumlah kab/kota yang meningkat kapasitas kader lingkungannya	Kabupaten/Kota	6	120.000.000	6	138.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		2.11.08.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				120.000.000		138.000.000		
						Jumlah SDM Lingkungan Hidup yang mengikuti pelatihan/sertifikasi	Orang	60	120.000.000	60	138.000.000	SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kab/Kota yang meningkat pengelolaan sampahnya	Kabupaten/Kota	2	1.350.475.000	2	750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.08.1.01.02			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				1.350.475.000		750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah	Kelompok	2	1.350.475.000	2	750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.022.415.000		12.872.935.000		
						Persentase sampah yang dikelola	%	80	1.022.415.000	89	12.872.935.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					1.022.415.000		12.872.935.000		
						Jumlah sampah yang dikurangi dan ditangani	Ton	4456124	1.022.415.000	4991975	12.872.935.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	
		2.11.11.1.01.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				1.022.415.000		12.872.935.000		
						Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pendukung penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Dokumen	6	1.022.415.000	3	12.872.935.000	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari									**46.120.513.000**		**55.345.648.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51.2		51.25		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
						Kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0.43		0.43		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan (LTL)								**41.783.888.000**		**50.985.373.000**		
						Luas Tutupan Lahan / LTV	km2	10223.65	41.783.888.000	10224.19	50.985.373.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						30.871.470.000		40.113.935.000		
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH	%	0.91	2.178.700.000	0.91	2.178.700.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.807.400.000		1.807.400.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang ditanam	Batang	1000000	1.807.400.000	1000000	1.807.400.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	
		3.28.03.1.04.06			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				1.807.400.000		1.807.400.000		
						Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	Batang	1000000	1.500.000.000	1000000	1.500.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah sumber benih yang dikembangkan	Unit	1	307.400.000	1	307.400.000	SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Perbenihan Tanaman Hutan					371.300.000		371.300.000		
						Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan	Dokumen	75	371.300.000	75	371.300.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	
		3.28.03.1.09.01			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar				26.700.000		26.700.000		
						Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Dokumen	5	26.700.000	5	26.700.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.02			Sertifikasi Sumber Benih				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah sertifikasi sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	5	20.000.000	5	20.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.03			Sertifikasi Mutu Benih				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah sertifikasi mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	10	30.000.000	10	30.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.04			Sertifikasi Mutu Bibit				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah sertifikasi mutu bibit yang diterbitkan	Dokumen	60	75.000.000	60	75.000.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.28.03.1.09.05			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				219.600.000		219.600.000		
						Jumlah pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar yang diawasi	Dokumen	10	219.600.000	10	219.600.000	SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I	%	1.18	11.460.343.000	1.27	20.752.808.000	CDK 1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					11.460.343.000		20.752.808.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil I	Ha	5164	11.460.343.000	5564	20.752.808.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil I	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				207.176.000		207.176.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil I	Ha	300	207.176.000	300	207.176.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				173.756.000		173.756.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil I	Ha	100	173.756.000	100	173.756.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				10.999.411.000		20.291.876.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil I	Unit	62	10.999.411.000	62	20.291.876.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil I	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II	%	1.33	3.205.928.000	1.56	3.205.928.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					3.205.928.000		3.205.928.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil II	Ha	5854	3.205.928.000	6854	3.205.928.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				33.000.000		33.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil II	Dokumen	1	33.000.000	1	33.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				396.528.000		396.528.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil II	Ha	250	396.528.000	250	396.528.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				50.000.000		50.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil II	Ha	750	50.000.000	750	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				2.726.400.000		2.726.400.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil II	Unit	87	2.726.400.000	55	2.726.400.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan								
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil II	Dokumen	1		1		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III	%	1.21	1.200.000.000	1.39	1.200.000.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil III	Ha	5321	1.200.000.000	6121	1.200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil III	Dokumen	4	40.000.000	4	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				400.000.000		400.000.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil III	Ha	500	400.000.000	500	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				300.000.000		300.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil III	Ha	300	300.000.000	300	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				420.000.000		420.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil III	Unit	25	420.000.000	25	420.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil III	Dokumen	4	40.000.000	4	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV	%	1.53	2.023.376.000	1.71	2.023.376.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					2.023.376.000		2.023.376.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IV	Ha	6705	2.023.376.000	7505	2.023.376.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil IV	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				298.801.000		298.801.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil IV	Ha	300	298.801.000	300	298.801.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		150.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil IV	Ha	500	150.000.000	500	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				1.504.575.000		1.504.575.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil IV	Unit	62	1.504.575.000	62	1.504.575.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil IV	Dokumen	4	30.000.000	4	30.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX	%	1.96	910.000.000	2.23	910.000.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					910.000.000		910.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil IX	Ha	8590	910.000.000	9790	910.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil IX	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				175.000.000		175.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil IX	Ha	1000	175.000.000	1000	175.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				175.000.000		175.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil IX	Ha	200	175.000.000	200	175.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil IX	Unit	28	450.000.000	28	450.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				40.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil IX	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V	%	1.19	1.971.635.000	1.4	1.931.635.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.971.635.000		1.931.635.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil V	Ha	5235	1.971.635.000	6135	1.931.635.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil V	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				450.000.000		450.000.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil V	Ha	800	450.000.000	800	450.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				101.635.000		61.635.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil V	Ha	100	101.635.000	100	61.635.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				1.350.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil V	Unit	62	1.350.000.000	62	1.350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil V	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI	%	1.57	1.788.704.000	1.84	1.788.704.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.788.704.000		1.788.704.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VI	Ha	6892	1.788.704.000	8092	1.788.704.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil VI	Dokumen	2	60.000.000	2	60.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				528.704.000		528.704.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil VI	Ha	600	528.704.000	600	528.704.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				200.000.000		200.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil VI	Ha	600	200.000.000	600	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				900.000.000		900.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil VI	Unit	62	900.000.000	62	900.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil VI	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII	%	3.01	1.606.038.000	3.29	1.606.038.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.606.038.000		1.606.038.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VII	Ha	13235	1.606.038.000	14435	1.606.038.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil VII	Dokumen	15	50.000.000	15	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				1.006.038.000		1.006.038.000		
						luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil VII	Ha	450	1.006.038.000	500	1.006.038.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				150.000.000		150.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil VII	Ha	750	150.000.000	700	150.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil VII	Unit	25	300.000.000	25	300.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil VII	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII	%	1.37	1.035.166.000	1.53	1.035.166.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.035.166.000		1.035.166.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil VIII	Ha	6010	1.035.166.000	6710	1.035.166.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil VIII	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				450.000.000		450.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil VIII	Ha	600	450.000.000	600	450.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				125.166.000		125.166.000		
						Luas penghijauan di CDK Wil VIII	Ha	100	125.166.000	100	125.166.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil VIII	Unit	20	350.000.000	20	350.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil VIII	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X	%	1.84	1.080.000.000	2.02	1.080.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.080.000.000		1.080.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil X	Ha	8089	1.080.000.000	8889	1.080.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil X	Dokumen	64	50.000.000	104	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				280.000.000		280.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil X	Ha	700	280.000.000	700	280.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				250.000.000		250.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil X	Ha	100	250.000.000	100	250.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil X	Unit	36	450.000.000	36	450.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil X	Dokumen	10	50.000.000	10	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI	%	1.28	1.460.000.000	1.5	1.445.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					1.460.000.000		1.445.000.000		
						Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di CDK Wil XI	Ha	5604	1.460.000.000	6604	1.445.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.03.1.04.01			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)				65.000.000		70.000.000		
						Jumlah dokumen Rantek RHL yang disusun di CDK Wil XI	Dokumen	1	65.000.000	1	70.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.03.1.04.02			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara				400.000.000		400.000.000		
						Luas hutan rakyat yang direhabilitasi di CDK Wil XI	Ha	800	400.000.000	800	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.03.1.04.04			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				575.000.000		550.000.000		
						Luas penghijauan lingkungan di CDK Wil XI	Ha	200	575.000.000	200	550.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.03.1.04.05			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di CDK Wil XI	Unit	23	400.000.000	23	400.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.03.1.04.08			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian RHL di CDK Wil XI	Dokumen	1	20.000.000	1	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani	%	100	350.000.000	100	350.000.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					350.000.000		350.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan	Kasus	3	350.000.000	3	350.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum	Dokumen	3	350.000.000	3	350.000.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I	%	100	50.000.000	100	50.000.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil I	Kasus	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil I	Kelompok	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II	%	100	31.580.000	100	31.580.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					31.580.000		31.580.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di di CDK Wil II	Kasus	2	31.580.000	2	31.580.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				31.580.000		31.580.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil II	Kelompok	2	31.580.000	2	31.580.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III	%	100	40.000.000	100	40.000.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					40.000.000		40.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil III	Kasus	2	40.000.000	2	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil III	Kelompok	2	40.000.000	2	40.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	50.000.000	100	50.000.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IV	Kasus	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil IV	Kelompok	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	50.000.000	100	50.000.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil IX	Kasus	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil IX	Kelompok	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V	%	100	50.000.000	100	50.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil V	Kasus	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil V	Kelompok	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	100.000.000	100	100.000.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VI	Kasus	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil VI	Kelompok	2	100.000.000	2	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII	%	100	75.000.000	100	75.000.000	CDK 7	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					75.000.000		75.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VII	Kasus	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil VII	Kelompok	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	75.000.000	100	75.000.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					75.000.000		75.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil VIII	Kasus	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil VIII	Kelompok	2	75.000.000	2	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X	%	100	35.000.000	100	35.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil X	Kasus	2	35.000.000	2	35.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil X	Kelompok	2	35.000.000	2	35.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI	%	100	45.000.000	100	50.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					45.000.000		50.000.000		
						Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di CDK Wil XI	Kasus	2	45.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.05.04			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				45.000.000		50.000.000		
						Jumlah MMP/MPA yang diberdayakan di CDK Wil XI	Kelompok	2	45.000.000	2	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						3.304.944.000		3.304.614.000		
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif	%	100	117.400.000	100	117.400.000		
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					117.400.000		117.400.000		
						Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	Dokumen	9	117.400.000	9	117.400.000		
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				117.400.000		117.400.000		
						Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dokumen	2	117.400.000	2	117.400.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I	%	100	404.820.000	100	404.820.000	CDK 1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					404.820.000		404.820.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil I	Unit	2	404.820.000	2	404.820.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				369.820.000		369.820.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil I	Unit	1	369.820.000	1	369.820.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil I	Kelompok	1	35.000.000	1	35.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II	%	100	295.212.000	100	165.212.000	CDK 2	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					295.212.000		165.212.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil II	Unit	2	295.212.000	2	165.212.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				295.212.000		165.212.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil II	Unit	1	295.212.000	1	165.212.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi								
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil II	Kelompok	3		3		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III	%	100	200.000.000	100	200.000.000	CDK 3	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil III	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				120.000.000		120.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil III	Unit	1	120.000.000	1	120.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil III	Kelompok	1	80.000.000	1	80.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV	%	100	100.000.000	100	100.000.000	CDK 4	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IV	Unit	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				60.000.000		60.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil IV	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil IV	Kelompok	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX	%	100	50.000.000	100	50.000.000	CDK 9	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil IX	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil IX	Kelompok	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil V	%	100	70.000.000	100	70.000.000	CDK 5	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil V	Unit	2	70.000.000	2	70.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				30.000.000		30.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil V	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil V	Kelompok	1	40.000.000	1	40.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI	%	100	100.000.000	100	100.000.000	CDK 6	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VI	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				100.000.000		100.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil VI	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII	%	100	75.000.000	100	75.000.000	CDK 8	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil VIII	Unit	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.04			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				50.000.000		50.000.000		
						Tertanganinya/terehabilitasinya ekosistem lahan basah di CDK Wil VIII	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil VIII	Kelompok	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil X	%	100		100		CDK 10	
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam									
						Jumlah unit kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola di CDK Wil X	Unit	1		1		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.03.05			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi								
						Jumlah kelompok masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan dalam provinsi yang diberdayakan di CDK Wil X	Kelompok	1		1		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden	%	0.09	265.000.000	0.09	265.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					265.000.000		265.000.000		
						Jumlah jenis tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	Jenis	10	265.000.000	10	265.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				265.000.000		265.000.000		
						Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturaden	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturaden	Unit	10	205.000.000	10	205.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I	%	0.14	1.186.700.000	0.14	1.186.370.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					1.186.700.000		1.186.370.000		
						Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro	Dokumen	2	365.000.000	2	365.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.03			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi				215.000.000		215.000.000		
						Jumlah tumbuhan dan satwa tahura yang diawetkan	Jenis	4	215.000.000	4	215.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.05			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi				150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan tahura yang disusun	Dokumen	2	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (kegiatan)	Unit	3	366.700.000	3	366.370.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	
		3.28.04.1.01.06			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.07			Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi				115.000.000		115.000.000		
						Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan	Dokumen	2	115.000.000	2	115.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.28.04.1.01.08			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi				151.700.000		151.370.000		
						Jumlah kelompok masyarakat sekitar tahura yang ditingkatkan / diberdayakan	Kelompok	1	151.700.000	1	151.370.000	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	455.000.000	231.3	455.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.01.02			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi				455.000.000		455.000.000		
						Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	Ha	231.3	455.000.000	231.3	455.000.000	SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani	%	100	60.600.000	100	60.600.000		
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					60.600.000		60.600.000		
						Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Dokumen	1	60.600.000	1	60.600.000		
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				60.600.000		60.600.000		
						Jumlah dokumen pengendalian TSL	Dokumen	2	60.600.000	2	60.600.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I	%	100	50.000.000	100	50.000.000	CDK 1	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					50.000.000		50.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil I	Unit	2	50.000.000	2	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil I	Kasus	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II	%	100	35.212.000	100	165.212.000	CDK 2	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					35.212.000		165.212.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil II	Unit	2	35.212.000	2	165.212.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				35.212.000		165.212.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil II	Kasus	1	35.212.000	1	165.212.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III	%	100	25.000.000	100	25.000.000	CDK 3	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil III	Unit	2	25.000.000	2	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil III	Kasus	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV	%	100	20.000.000	100	20.000.000	CDK 4	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IV	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil IV	Kasus	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX	%	100	60.000.000	100	60.000.000	CDK 9	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					60.000.000		60.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil IX	Unit	2	60.000.000	2	60.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil IX	Kasus	1	60.000.000	1	60.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil V	%	100		100		CDK 5	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil V	Unit	2		2		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil V	Kasus	1		1		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI	%	100	130.000.000	100	130.000.000	CDK 6	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					130.000.000		130.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VI	Unit	2	130.000.000	2	130.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				130.000.000		130.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil VI	Kasus	1	130.000.000	1	130.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VII	%	100		100		CDK 7	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi									
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VII	Unit	2		2		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil VII	Kasus	1		1		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII	%	100	25.000.000	100	25.000.000	CDK 8	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil VIII	Unit		25.000.000		25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil VIII	Kasus	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X	%	100	35.000.000	100	35.000.000	CDK 10	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi					35.000.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil X	Unit	2	35.000.000	2	35.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil X	Kasus	1	35.000.000	1	35.000.000	SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil XI	%	100		100		CDK 11	
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi									
						Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola di CDK Wil XI	Unit	2		2		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
		3.28.04.1.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES								
						Jumlah kasus konflik TSL yang tertangani di CDK Wil XI	Kasus	0		0		SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						6.592.804.000		6.552.154.000		
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	20	839.529.000	25	839.529.000	Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					839.529.000		839.529.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	Kelompok	25	839.529.000	25	839.529.000	SEKSI PENYULUHAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				150.268.000		150.268.000		
						Jumlah penyuluh kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya (bidang)	Orang	60	150.268.000	60	150.268.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				504.261.000		504.261.000		
						Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	Dokumen	3	504.261.000	3	504.261.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				185.000.000		185.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	Dokumen	2	185.000.000	2	185.000.000	SEKSI PENYULUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I	%	2.4	480.000.000	3	480.000.000	CDK 1	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					480.000.000		480.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil I	Kelompok	3	355.000.000	3	355.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				105.000.000		105.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil I	Orang	60	105.000.000	60	105.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil I	Kelompok	130	250.000.000	130	250.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil I	Unit	5	125.000.000	5	125.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil I	Unit	5	125.000.000	5	125.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II	%	1.6	360.480.000	2	279.830.000	CDK 2	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					360.480.000		279.830.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil II	Kelompok	2	279.830.000	2	279.830.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				109.430.000		109.430.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil II	Orang	60	109.430.000	60	109.430.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				170.400.000		170.400.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil II	Kelompok	101	170.400.000	101	170.400.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil II	Kelompok	5	80.650.000	5		SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				80.650.000				
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil II	Unit	5	80.650.000	5		SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil III	%	1.6	388.500.000	2	388.500.000	CDK 3	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					388.500.000		388.500.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil III	Kelompok	2	323.500.000	2	323.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil III	Orang	60	125.000.000	60	125.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				198.500.000		198.500.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil III	Kelompok	109	198.500.000	109	198.500.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil III	Unit	5	65.000.000	5	65.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil III	Unit	5	65.000.000	5	65.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV	%	1.6	675.000.000	2	675.000.000	CDK 4	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					675.000.000		675.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IV	Kelompok	2	475.000.000	2	475.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil IV	Orang	60	175.000.000	60	175.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				300.000.000		300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil IV	Kelompok	54	300.000.000	54	300.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil IV	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil IV	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX	%	1.6	746.665.000	2	746.665.000	CDK 9	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					746.665.000		746.665.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil IX	Kelompok	2	641.665.000	2	641.665.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				155.000.000		155.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil IX	Orang	60	155.000.000	60	155.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				486.665.000		486.665.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil IX	Kelompok	69	486.665.000	69	486.665.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX	Unit	5	105.000.000	5	105.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				105.000.000		105.000.000		
						Jumlah unit perhutanan sosial yang dikembangkan di CDK Wil IX	Unit	5	105.000.000	5	105.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V	%	2.4	575.000.000	3	575.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					575.000.000		575.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil V	Kelompok	3	200.000.000	3	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil V	Kelompok	75	200.000.000	75	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil V	Unit	5	375.000.000	5	375.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil V	Orang	60	175.000.000	60	175.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangkan di CDK Wil V	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI	%	1.6	477.630.000	2	477.630.000	CDK 6	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					477.630.000		477.630.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VI	Kelompok	2	400.000.000	2	400.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil VI	Kelompok	107	200.000.000	107	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				200.000.000		200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangan di CDK Wil VI	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VI	Unit	5	77.630.000	5	77.630.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				77.630.000		77.630.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil VI	Orang	60	77.630.000	60	77.630.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII	%	2.4	615.000.000	3	615.000.000	CDK 7	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					615.000.000		615.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VII	Kelompok	3	565.000.000	3	565.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil VII	Orang	60	60.000.000	60	60.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				505.000.000		505.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil VII	Kelompok	121	505.000.000	121	505.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VII	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangan di CDK Wil VII	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII	%	1.6	800.000.000	2	800.000.000	CDK 8	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					800.000.000		800.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil VIII	Kelompok	2	600.000.000	2	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil VIII	Kelompok	72	600.000.000	72	600.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil VIII	Unit	5	200.000.000	5	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil VIII	Orang	60	100.000.000	60	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangan di CDK Wil VIII	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X	%	1.6	400.000.000	2	400.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					400.000.000		400.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil X	Kelompok	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil X	Orang	60	100.000.000	60	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil X	Kelompok	105	200.000.000	105	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil X	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangan di CDK Wil X	Unit	5	100.000.000	5	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI	%	1.6	235.000.000	2	275.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					235.000.000		275.000.000		
						Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di CDK Wil XI	Kelompok	2	160.000.000	2	185.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.01			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan				60.000.000		70.000.000		
						Jumlah penyuluh / SDM kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya di CDK Wil XI	Orang	60	60.000.000	60	70.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.05.1.01.02			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan				100.000.000		115.000.000		
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan di CDK Wil XI	Kelompok	57	100.000.000	57	115.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan di CDK Wil XI	Unit	5	75.000.000	5	90.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.05.1.01.03			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				75.000.000		90.000.000		
						Jumlah unit Perhutanan Sosial yang dikembangan di CDK Wil XI	Unit	5	75.000.000	5	90.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						1.014.670.000		1.014.670.000		
						Persentase jumlah DAS yang tertangani	%	5	303.047.000	5	303.047.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					303.047.000		303.047.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	Dokumen	2	303.047.000	2	303.047.000		
		3.28.06.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS				144.547.000		144.547.000		
						Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS	Dokumen	1	144.547.000	1	144.547.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.06			Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS				158.500.000		158.500.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pengelolaan DAS	Dokumen	1	158.500.000	1	158.500.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	17.46	711.623.000	19.73	711.623.000		
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					711.623.000		711.623.000		
						Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	Unit	19	711.623.000	19	711.623.000		
		3.28.06.1.01.02			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS				105.423.000		105.423.000		
						Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS	Dokumen	2	105.423.000	2	105.423.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.06.1.01.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				606.200.000		606.200.000		
						Jumlah lembaga masyarakat yang peduli DAS yang difasilitasi	Kelompok	6	606.200.000	6	606.200.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan								**4.336.625.000**		**4.360.275.000**		
						Pertumbuhan PDRB subsektor Kehutanan	%	0.47	4.336.625.000	0.47	4.360.275.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						4.336.625.000		4.360.275.000		
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	7.28	977.421.000	7.9	977.421.000		
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					335.175.000		335.175.000		
						Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	Unit	6	335.175.000	2	335.175.000		
		3.28.03.1.03.01			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				115.786.000		115.786.000		
						Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun	Dokumen	1	115.786.000	1	115.786.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.03.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				219.389.000		219.389.000		
						Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban	Unit	6	219.389.000	2	219.389.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan (HHBK)PengolahanHasilHutanBukanKayu					300.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	Unit	1	300.000.000	1	300.000.000		
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian pengolahan HHBK	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pengendalian produksi Budidaya HHBK (bidang)	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.06.04			Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit usaha HHBK yang tertib (Bidang)	Unit	2	100.000.000	2	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					342.246.000		342.246.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	Unit	6	342.246.000	3	342.246.000		
		3.28.03.1.07.01			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				137.037.000		137.037.000		
						Jumlah pengendalian pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban	Laporan	3	137.037.000	1	137.037.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				121.427.000		121.427.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas 2000-6000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya	Laporan	3	121.427.000	2	121.427.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.28.03.1.07.03			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				83.782.000		83.782.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) kapasitas < 6.000 m3 per tahun	Dokumen	4	83.782.000	4	83.782.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I	%	1.85	370.000.000	2.67	298.000.000	CDK 1	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					350.000.000		278.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil I	Unit	1	350.000.000	1	278.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				250.000.000		178.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil I	Unit	1	250.000.000	1	178.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil I	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil I	Unit	6	20.000.000	7	20.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil I	Unit	6	20.000.000	7	20.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II	%	1.85	550.588.000	2.67	631.238.000	CDK 2	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					497.968.000		578.618.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil II	Unit	1	497.968.000	1	578.618.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				334.788.000		415.438.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil II	Unit	1	334.788.000	1	415.438.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				163.180.000		163.180.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil II	Unit	1	163.180.000	1	163.180.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					52.620.000		52.620.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil II	Unit	6	52.620.000	7	52.620.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				52.620.000		52.620.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil II	Unit	6	52.620.000	7	52.620.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III	%	1.44	170.316.000	2.15	170.316.000	CDK 3	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					125.316.000		125.316.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil III	Unit	1	125.316.000	1	125.316.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				63.000.000		63.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil III	Unit	1	63.000.000	1	63.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				62.316.000		62.316.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil III	Unit	1	62.316.000	1	62.316.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil III	Unit	5	45.000.000	6	45.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil III	Unit	5	45.000.000	6	45.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV	%	1.85	250.000.000	2.67	250.000.000	CDK 4	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di di CDK Wil IV	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi di CDK Wil IV	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil IV	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IV	Unit	6	100.000.000	7	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil IV	Unit	6	100.000.000	7	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX	%	1.85	153.300.000	2.67	153.300.000	CDK 9	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil IX	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi di CDK Wil IX	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil IX	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					53.300.000		53.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil IX	Unit	6	53.300.000	7	53.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				53.300.000		53.300.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil IX	Unit	6	53.300.000	7	53.300.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V	%	2.26	275.000.000	3.18	275.000.000	CDK 5	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					175.000.000		175.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil V	Unit	1	175.000.000	1	175.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil V	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil V	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil V	Unit	7	100.000.000	8	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil V	Unit	7	100.000.000	8	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI	%	2.26	230.000.000	3.18	230.000.000	CDK 6	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VI	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VI	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VI	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					80.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VI	Unit	7	80.000.000	8	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil VI	Unit	7	80.000.000	8	80.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII	%	2.26	210.000.000	3.18	210.000.000	CDK 7	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					175.000.000		175.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VII	Unit	1	175.000.000	1	175.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VII	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi CDK VII	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VII	Unit	7	35.000.000	8	35.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil VII	Unit	7	35.000.000	8	35.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII	%	1.44	200.000.000	2.15	200.000.000	CDK 8	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil VIII	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasitasi di CDK Wil VIII	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil VIII	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil VIII	Unit	5	50.000.000	6	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil VIII	Unit	5	50.000.000	6	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X	%	1.44	265.000.000	2.15	265.000.000	CDK 10	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil X	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil X	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil X	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					65.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil X	Unit	5	65.000.000	6	65.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil X	Unit	5	65.000.000	6	65.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil XI	%	1.44	685.000.000	2.15	700.000.000	CDK 11	
				Pelaksanaan (HHBK)Pengolahan HasilHutanBukanKayu					655.000.000		665.000.000		
						Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di CDK Wil XI	Unit	1	655.000.000	1	665.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.06.01			Pengolahan HayatiBahan BakuHasilHutanBukanKayu				325.000.000		330.000.000		
						Jumlah unit pengolah bahan baku HHBK yang dibina / difasilitasi di CDK Wil XI	Unit	1	325.000.000	1	330.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.28.03.1.06.03			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya				330.000.000		335.000.000		
						Jumlah unit pembudidaya HHBK yang dibina/difasilitasi di CDK Wil XI	Unit	1	330.000.000	1	335.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					30.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan di CDK Wil XI	Unit	5	30.000.000	6	35.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	
		3.28.03.1.07.02			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				30.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas ? 2000 m3/tahun yang meningkat kinerjanya di CDK Wil XI	Unit	5	30.000.000	6	35.000.000	SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**143.495.528.000**		**155.302.513.000**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	
						NIlai kepuasan masyarakat	%	83		85		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**511.527.000**		**511.527.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81	511.527.000	81	511.527.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						511.527.000		511.527.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	511.527.000	100	511.527.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					511.527.000		511.527.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	511.527.000	1	511.527.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	9	250.000.000	9	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				261.527.000		261.527.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	261.527.000	5	261.527.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**142.984.001.000**		**154.790.986.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	83	142.984.001.000	85	154.790.986.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						142.984.001.000		154.790.986.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	912.047.000	100	912.047.000	CDK 9	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					7.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	7.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					201.000.000		191.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	201.000.000	1	191.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	135.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				35.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	6	35.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	8	60.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	15.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					314.047.000		324.047.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	314.047.000	1	324.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.047.000		79.047.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	79.047.000	12	79.047.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	15.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				210.000.000		210.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	210.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					255.000.000		260.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	255.000.000	1	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	35.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	445.000.000	100	445.000.000	CDK 3	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.500.000		8.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Laporan	1	8.500.000	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.500.000		8.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.500.000		56.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	56.500.000	1	56.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					231.000.000		231.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	231.000.000	1	231.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				170.000.000		170.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	170.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.000.000		149.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	149.000.000	1	149.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.000.000		52.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12	52.000.000	12	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	815.693.000	100	815.693.000	CDK 11	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					173.000.000		173.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	173.000.000	1	173.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	40.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					117.693.000		117.693.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	117.693.000	1	117.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	5	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.693.000		17.693.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	3	17.693.000	1	17.693.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					215.000.000		215.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	215.000.000	1	215.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					280.000.000		280.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	280.000.000	1	280.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	7.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.594.510.000	100	1.594.510.000	CDK 6	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					215.500.000		215.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	215.500.000	1	215.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.500.000		17.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	17.500.000	12	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.000.000		23.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	23.000.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	55.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000		95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					691.750.000		691.750.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	691.750.000	1	691.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	75.000.000	2	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				541.750.000		541.750.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	541.750.000	1	541.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					292.260.000		292.260.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	292.260.000	1	292.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.200.000		66.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	66.200.000	12	66.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				219.060.000		219.060.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	219.060.000	12	219.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					365.000.000		365.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	365.000.000	1	365.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				220.000.000		220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	220.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	856.000.000	100	856.000.000	Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.000.000		13.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.000.000	1	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	13.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					126.700.000		111.150.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	126.700.000	1	111.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.035.000		15.035.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	15.035.000	12	15.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				16.860.000		16.860.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	16.860.000	12	16.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.205.000		5.205.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	5.205.000	12	5.205.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.600.000		9.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.600.000	12	9.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				22.500.000		18.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	22.500.000	12	18.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					159.550.000		168.800.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	159.550.000	1	168.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	14		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				114.500.000		114.500.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	114.500.000	1	114.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.050.000		54.300.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	45.050.000	1	54.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					352.250.000		358.550.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	352.250.000	1	358.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.450.000		2.450.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.450.000	12	2.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.200.000		121.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	121.200.000	12	121.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.600.000		234.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	228.600.000	12	234.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					204.500.000		204.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	204.500.000	1	204.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				99.000.000		99.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	99.000.000	12	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.500.000		80.500.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	80.500.000	1	80.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	471.000.000	100	471.000.000	Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					99.000.000		129.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	99.000.000	1	129.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					159.000.000		129.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	159.000.000	1	129.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				65.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	65.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					158.000.000		158.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	158.000.000	1	158.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	946.000.000	100	946.000.000	CDK 4	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.000.000		162.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	162.000.000	1	162.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					105.000.000		105.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	105.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	8	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	3	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.000.000		264.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	264.000.000	1	264.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					403.000.000		403.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	403.000.000	1	403.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	654.100.000	100	654.100.000	CDK 8	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					139.000.000		139.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	139.000.000	1	139.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.500.000		12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		3.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.500.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					70.000.000		55.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	70.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				15.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	15.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	35.000.000	2	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					237.600.000		237.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	237.600.000	1	237.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				189.000.000		189.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	189.000.000	12	189.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					197.500.000		212.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	197.500.000	1	212.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.500.000		12.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		65.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	8.886.000.000	100	8.791.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	40.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	40.000.000	12	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					179.900.000		185.960.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	179.900.000	1	185.960.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		0		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.400.000		30.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	29.400.000	12	30.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.500.000		18.150.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	16.500.000	12	18.150.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		24.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	21.000.000	12	24.200.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.300.000		3.610.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.300.000	12	3.610.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.700.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	74.700.000	12	75.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7.683.000.000		7.313.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	7.683.000.000	1	7.313.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		1		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	20.000.000	1	25.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.613.000.000		7.238.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	7.613.000.000	1	7.238.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.100.000		252.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	235.100.000	1	252.650.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.300.000		3.650.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.300.000	12	3.650.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				66.000.000		72.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	66.000.000	12	72.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.800.000		17.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	15.800.000	12	17.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	150.000.000	12	160.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					748.000.000		989.390.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	748.000.000	1	989.390.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				85.000.000		85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	85.000.000	12	85.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	60.000.000	12	65.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				339.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	339.000.000	1	200.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				195.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	195.000.000	12	50.000.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				64.000.000		584.390.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	64.000.000	12	584.390.000	Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	717.275.000	100	717.605.000	Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	35.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	35.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					131.475.000		110.105.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	131.475.000	1	110.105.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.675.000		14.675.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	14.675.000	12	14.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		1.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		3.630.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.800.000	12	3.630.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.500.000		160.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	135.500.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	2	10.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.500.000		45.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	6	35.500.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260.300.000		227.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	260.300.000	1	227.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				51.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	51.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				191.800.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	191.800.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					155.000.000		175.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	155.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	1.187.320.000	100	1.187.320.000	CDK 10	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.320.000		10.320.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.320.000	1	10.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.320.000		10.320.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	10.320.000	12	10.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.000.000		204.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	204.000.000	1	204.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145.000.000		145.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	145.000.000	12	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					220.000.000		220.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	220.000.000	1	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	10	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					405.000.000		405.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	405.000.000	1	405.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				275.000.000		275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	275.000.000	12	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					348.000.000		348.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	348.000.000	1	348.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				98.000.000		98.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	98.000.000	1	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0	35.000.000	0	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	500.000.000	100	500.000.000	CDK 7	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.000.000		76.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	76.000.000	1	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					199.000.000		199.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	199.000.000	1	199.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				126.000.000		126.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	126.000.000	12	126.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	826.500.000	100	866.500.000	CDK 5	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					162.500.000		197.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	162.500.000	1	197.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	7.500.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					305.000.000		307.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	305.000.000	1	307.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	6	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		27.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	35.000.000	1	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					231.000.000		237.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	231.000.000	1	237.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	65.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				133.000.000		133.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	133.000.000	12	133.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.000.000		105.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	108.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12	5.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	829.898.000	100	854.898.000	CDK 2	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					156.998.000		150.998.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	156.998.000	1	150.998.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000				
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	6.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.498.000		4.498.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	4.498.000	12	4.498.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.000.000		115.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	115.000.000	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		2		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	50.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					212.900.000		218.900.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	212.900.000	1	218.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	7.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				158.400.000		158.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	158.400.000	12	158.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					380.000.000		405.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	380.000.000	1	405.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				58.000.000		58.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak	Bulan	12	58.000.000	12	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				275.000.000		300.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	275.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	122.292.658.000	100	134.104.313.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					118.253.493.000		130.065.148.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	118.253.493.000	1	130.065.148.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				118.084.883.000		129.896.538.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	118.084.883.000	12	129.896.538.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				53.460.000		53.460.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	53.460.000	1	53.460.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				115.150.000		115.150.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	115.150.000	1	115.150.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	768		768		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	240	50.000.000	250	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	30		30		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	30		30		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					486.000.000		486.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	486.000.000	1	486.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	11.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	225.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					245.000.000		245.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	245.000.000	1	245.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	4	30.000.000	5	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	175.000.000	1	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.874.165.000		1.874.165.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.874.165.000	1	1.874.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.299.165.000		1.299.165.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.299.165.000	12	1.299.165.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.234.000.000		1.234.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.234.000.000	1	1.234.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				575.000.000		575.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	575.000.000	12	575.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.000.000		69.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	69.000.000	12	69.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	400.000.000	2	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentaseketercapaian administrasi pelayananPerangkat Daerah	%	100	1.050.000.000	100	1.075.000.000	CDK 1	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					218.000.000		218.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	218.000.000	1	218.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.800.000		26.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	26.800.000	12	26.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.200.000		12.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.200.000	12	12.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.000.000		39.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	39.000.000	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000		95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					278.000.000		278.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	278.000.000	1	278.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000		85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				168.000.000		168.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	168.000.000	12	168.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					479.000.000		504.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	479.000.000	1	504.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				65.000.000		65.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.000.000		54.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	54.000.000	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				175.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	175.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah									**5.500.000.000**		**7.065.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Tingkat Kemandirian Desa (Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM))	%	1.86		1.92		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah								**5.500.000.000**		**7.065.000.000**		
						Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	50.34	5.500.000.000	52	7.065.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						200.000.000		325.000.000		
						Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	87.01	200.000.000	100	325.000.000	Bidang Penataan Desa	
				Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					200.000.000		325.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	Desa	15	200.000.000	15	325.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.02.1.01.02			Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat				200.000.000		325.000.000		
						Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk	Kelompok	35	200.000.000	50	325.000.000	SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						800.000.000		1.050.000.000		
						Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	86	800.000.000	100	1.050.000.000	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					800.000.000		1.050.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD	Unit	24	800.000.000	29	1.050.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	
		2.13.03.1.01.01			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				200.000.000		300.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembentukan LKD/BKAD	Desa	24	200.000.000	29	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.03.1.01.03			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				600.000.000		750.000.000		
						Jumlah Desa yang difasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Desa	12	600.000.000	12	750.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA	OPD Provinsi
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						1.675.000.000		2.200.000.000		
						Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	%	2.85	775.000.000	3.08	1.000.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					775.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Kabupaten/ Kota	29	775.000.000	29	1.000.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	
		2.13.04.1.01.04			Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa								
						Jumlah aparatur Kabupaten dan Kecamatan yang dilatih P3MD/Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Orang	0		0		SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.11			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				100.000.000		200.000.000		
						Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa	Orang	58	100.000.000	87	200.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.12			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis				675.000.000		800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Lokasi	29	675.000.000	29	800.000.000	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA	OPD Provinsi
						Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa	%	14.61	400.000.000	16.84	500.000.000	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					400.000.000		500.000.000		
						Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa	Desa	87	400.000.000	145	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	
		2.13.04.1.01.18			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota				400.000.000		500.000.000		
						Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	145	400.000.000	174	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA	OPD Provinsi
						Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	100	300.000.000	100	425.000.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					300.000.000		425.000.000		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam manajemen keuangan Desa	Kabupaten/Kota	0	300.000.000	29	425.000.000		
		2.13.04.1.01.05			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
						Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa	Orang	0		29			OPD Provinsi
		2.13.04.1.01.06			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				300.000.000		425.000.000		
						Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum	Dokumen	30	300.000.000	35	425.000.000		OPD Provinsi
						Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa	%	100	200.000.000	100	275.000.000	Bidang Penataan Desa	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					200.000.000		275.000.000		
						Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi evaluasi pembangunan Desa	Kabupaten/Kota	0		29		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	
		2.13.04.1.01.08			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								
						Jumlah Daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan	Kabupaten/Kota	0		0		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.04.1.01.09			Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan								
						Jumlah lokasi penyusunan data base Pemerintahan Desa	Kabupaten/Kota	0		0		SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi raperda/raperbub yang berkaitan tentang desa	Dokumen	10	200.000.000	7	275.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	
		2.13.04.1.01.01			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa				200.000.000		275.000.000		
						Jumlah Raperda/ Raperbup tentang Desa yang difasilitasi	Dokumen	10	200.000.000	7	275.000.000	SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						2.825.000.000		3.490.000.000		
						Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa	%	70.43	1.950.000.000	73.63	2.200.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.950.000.000		2.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa (LEM dan BUMDes) yang difasilitasi	%	58.16	1.950.000.000	66.42	2.200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	
		2.13.05.1.01.05			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1.950.000.000		2.200.000.000		
						Jumlah BUMDes yang difasilitasi	Unit	500	1.800.000.000	500	2.000.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difailitasi	Unit	116	150.000.000	145	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT	OPD Provinsi
						Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	2.62	875.000.000	2.96	1.290.000.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					875.000.000		1.290.000.000		
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya	%	100	875.000.000	100	1.290.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
		2.13.05.1.01.02			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				200.000.000		320.000.000		
						Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat	Orang	116	200.000.000	145	320.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
						Jumlah KPMD yang dilatih dalam fasilitasi proses pembangunan desa	Orang	0		29		SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.03			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						100.000.000		
						Kelembagaan posyandu yang mengikuti perlombaan pada tahun berjalan	Kabupaten/Kota	0		0	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.06			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
						Jumlah partisipasi provinsi pada Gelar TTG pada tahun berjalan	Kali	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.07			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				150.000.000		220.000.000		
						Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten/Kota	35	150.000.000	35	220.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
		2.13.05.1.01.09			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				525.000.000		650.000.000		
						Jumlah TP PKK Aktif yang dibina	Kabupaten/Kota	35	525.000.000	35	650.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	OPD Provinsi
Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah									**15.794.751.000**		**20.790.020.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	75		80		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah								**290.000.000**		**365.000.000**		
						Nilai SAKIP PD	Angka	83	290.000.000	83.5	365.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						290.000.000		365.000.000		
						Persentase ketercapaian nilai SAKIP Dispermades	Angka	83	290.000.000	83.5	365.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					290.000.000		365.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	290.000.000	12	365.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				195.000.000		240.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	195.000.000	6	240.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.000.000		125.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	95.000.000	5	125.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**15.504.751.000**		**20.425.020.000**		
						Nilai kepuasan Masyarakat	%	86	15.504.751.000	88	20.425.020.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.504.751.000		20.425.020.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	15.504.751.000	100	20.425.020.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.338.251.000		16.662.500.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12.338.251.000	12	16.662.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.979.251.000		16.300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.979.251.000	12	16.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				355.000.000		355.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12	355.000.000	12	355.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.000.000		7.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	12	4.000.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Buah	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Buah	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					94.000.000		96.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	94.000.000	12	96.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				94.000.000		96.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	94.000.000	12	96.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya laporan penatausahaan aset di SKPD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50.000.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12		12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Buah	120		120		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	Orang	130		130	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					614.800.000		1.048.520.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	614.800.000	12	1.048.520.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.500.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.500.000		118.520.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Unit	30	18.500.000	35	118.520.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				48.800.000		150.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	48.800.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya Penyediaan barang cetak dan penggandaan perangkat daerah	Bulan	12	40.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				80.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	80.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				225.000.000		325.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	225.000.000	12	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000		175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Buah	35	100.000.000	35	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Unit	1		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	11		10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah meubelair yang diadakan	Buah	65		70		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya pendukung	Buah	2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Buah	30		40		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.154.500.000		2.163.000.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2.154.500.000	12	2.163.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				751.500.000		755.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	751.500.000	12	755.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.375.000.000		1.375.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.375.000.000	12	1.375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.200.000		405.000.000		
						Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	303.200.000	12	405.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				60.000.000		75.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas	Bulan	12	60.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		60.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		35.000.000		
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	25.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.000.000		200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	137.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				41.200.000		35.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	41.200.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah									**565.000.000**		**2.371.335.000**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
						Tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan	%	100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan								**565.000.000**		**2.371.335.000**		
						Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	565.000.000	100	2.371.335.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						190.000.000		800.000.000		
						Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el	%	95	190.000.000	97	800.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					190.000.000		800.000.000		
						Persentase penduduk yang terfasilitasi Perekaman KTP-el per wajib KTP-el	%	95	190.000.000	97	800.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	
		2.12.02.1.01.03			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				190.000.000		800.000.000		
						Penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el	%	95	190.000.000	97	800.000.000	SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						175.000.000		751.335.000		
						Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95%	%	92	175.000.000	92	751.335.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Pelayanan Pencatatan Sipil					175.000.000		751.335.000		
						presentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	92	175.000.000	95	751.335.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	
		2.12.03.1.01.04			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				175.000.000		751.335.000		
						Penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi kepemilikan akta kelahiran	%	92	175.000.000	95	751.335.000	SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						200.000.000		820.000.000		
						Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	75	200.000.000	100	820.000.000	Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					200.000.000		820.000.000		
						Persentase Institusi yang memanfaatkan data kependudukan	%	95	200.000.000	100	820.000.000	SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	
		2.12.04.1.02.05			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				200.000.000		820.000.000		
						Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten/ Kota	10	200.000.000	10	820.000.000	SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah									**109.865.995.000**		**113.485.443.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	%	39.18		44.37		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi								**5.425.264.000**		**5.630.264.000**		
						Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23.49	5.425.264.000	28.22	5.630.264.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						3.283.240.000		3.488.240.000		
						Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	24.48	1.245.320.000	25.09	1.450.320.000	Bidang Lalu Lintas	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.005.000.000		1.210.000.000		
						Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi	Unit	2252	1.005.000.000	2502	1.210.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				1.005.000.000		1.210.000.000		
						Jumlah Pengadaan Aplikator Marka	Unit	0		0		SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan APILL	Unit	0		0		SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan ITS	Unit	0		0		SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan LPJU	Unit	30	790.000.000	50	995.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu	Buah	200	215.000.000	200	215.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Buah	0		0		SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Unit	0		0		SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					115.320.000		115.320.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang dinilai pelaksanaanmanajemen dan rekayasa lalu lintas di ProvinsiJateng	Kabupaten/ Kota	18	46.320.000	18	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.05.03			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				46.320.000		46.320.000		
						Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional	Kabupaten/ Kota	16	46.320.000	18	46.320.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaksanaan Supervisi MRLL untuk Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Kali	12	30.000.000	12	30.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.04			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Lokasi	6	30.000.000	6	30.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	Dokumen	20	39.000.000	26	39.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.05.05			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				39.000.000		39.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	Kegiatan	6	39.000.000	6	39.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					125.000.000		125.000.000		
						Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin diJalan Provinsi	Dokumen	95	125.000.000	119	125.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	
		2.15.02.1.06.01			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah penilaian dan pengawasan Andalalin di Ruas Jalan Provinsi	Dokumen	22	125.000.000	24	125.000.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	8.67	235.000.000	11.42	235.000.000	Bidang Lalu Lintas	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					235.000.000		235.000.000		
						Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	Orang	252	200.000.000	302	200.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.04			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah peserta Abdi Yasa yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan	Orang	35	130.000.000	35	130.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta Pelajar Pelopor yang mengikuti pemahaman keselamatan jalan	Orang	35	70.000.000	35	70.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum	Kegiatan	12	35.000.000	12	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Bidang Lalu Lintas)	Unit	0		0		SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar	Unit	20	35.000.000	20	35.000.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	43.75	326.840.000	50	326.840.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					326.840.000		326.840.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Lokasi	7	120.000.000	8	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah III Kelas A)	m	5000	120.000.000	5000	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Km	8.45	206.840.000	9.45	206.840.000	SEKSI LALU LINTAS	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				206.840.000		206.840.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Orang	76	91.200.000	76	91.200.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	20	115.640.000	20	115.640.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Kegiatan	0		0		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	35	294.680.000	40	294.680.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					294.680.000		294.680.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Lokasi	7	120.000.000	8	120.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah II Kelas B)	m	5000	120.000.000	5000	120.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Km	7.3	174.680.000	8.3	174.680.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				174.680.000		174.680.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Orang	52	62.400.000	52	62.400.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	20	112.280.000	20	112.280.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Kegiatan	0		0		KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	21.88	292.000.000	25	292.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					292.000.000		292.000.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Lokasi	7	120.000.000	8	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				120.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah I Kelas A)	m	5000	120.000.000	5000	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Km	7.75	172.000.000	8.75	172.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				172.000.000		172.000.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Orang	50	60.000.000	50	60.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	20	112.000.000	20	112.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Kegiatan	0		0		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	19.23	310.760.000	23.08	310.760.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					310.760.000		310.760.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Lokasi	5	120.000.000	6	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	m	5000	120.000.000	5000	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Km	6.75	190.760.000	7.75	190.760.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				190.760.000		190.760.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Orang	62	76.800.000	62	76.800.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	20	113.960.000	20	113.960.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Kegiatan	0		0		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	20.69	283.960.000	24.14	283.960.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					283.960.000		283.960.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Lokasi	6	120.000.000	7	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	m	5000	120.000.000	5000	120.000.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Km	7.5	163.960.000	8.5	163.960.000	SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				163.960.000		163.960.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Orang	44	52.800.000	44	52.800.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	20	111.160.000	20	111.160.000	SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Kegiatan	0		0		SEKSI LALU LINTAS	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	0		0		SEKSI LALU LINTAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	53.85	294.680.000	61.54	294.680.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					294.680.000		294.680.000		
						Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Lokasi	7	120.000.000	8	120.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah V Kelas B)	m	5000	120.000.000	5000	120.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Buah	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Km	7.25	174.680.000	8.25	174.680.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.02.04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				174.680.000		174.680.000		
						Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Orang	52	62.400.000	52	62.400.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	20	112.280.000	20	112.280.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
						Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Ruas Jalan Provinsi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Kegiatan	0		0		KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.05			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								
						Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	0		0		KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						442.000.000		442.000.000		
						Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	37.5	442.000.000	50	442.000.000	Bidang Pelayaran	
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang beroperasi	Lokasi	4	150.000.000	4	150.000.000	SEKSI KEPELABUHANAN	
		2.15.03.1.09.03			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan	Lokasi	13	110.265.000	13	110.265.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Pemasangan & pelepasan mooring buoy	Lokasi	0		0		SEKSI KEPELABUHANAN	
						Jumlah Pemeliharaan SBNP	Lokasi	0		0		SEKSI KEPELABUHANAN	
						Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng	Buku	10	8.585.000	10	8.585.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan	Lokasi	3	20.250.000	3	20.250.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sosialisasi keselamatan pelayaran & pengadaan alat keselamatan pelayaran	Lokasi	0		0		SEKSI KEPELABUHANAN	
						Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan	Lokasi	2	10.900.000	2	10.900.000	SEKSI KEPELABUHANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					292.000.000		292.000.000		
						Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan	Lokasi	3	292.000.000	4	292.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	
		2.15.03.1.10.01			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah SK Gubernur terkait Penetapan trayek penyeberangan sungai lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.15.03.1.10.02			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				215.000.000		215.000.000		
						Jumlah Pembangunan Plengsengan Sungai	Lokasi	0		0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai	Unit	8	215.000.000	8	215.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		2.15.03.1.10.04			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				47.000.000		47.000.000		
						Jumlah alat keselamatan ASDP	Buah	0		0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP	Dokumen	12	47.000.000	12	47.000.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan ASDP	Orang	0		0		SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						1.700.024.000		1.700.024.000		
						Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	15.73	1.700.024.000	20.52	1.700.024.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					1.700.024.000		1.700.024.000		
						Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian								
						Jumlah Penyusunan, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Kegiatan	0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan	Lokasi	3.93	1.700.024.000	5.13	1.700.024.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	
		2.15.05.1.01.03			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian				1.700.024.000		1.700.024.000		
						Jumlah FGD Revitalisasi Jalur KA	Lokasi	0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	
						Jumlah Pengadaan dan pemasangan Early Warning System	Lokasi	1	581.000.000	1	581.000.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang	Lokasi	3	242.000.000	3	242.000.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU di Perlintasan sebidang	Lokasi	0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengadan Gazon di perlintasan Sebidang	Buah	0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang	Lokasi	4	877.024.000	4	877.024.000	SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang	Lokasi	0		0		SEKSI PERKERETAAPIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi								**94.943.700.000**		**100.751.639.000**		
						Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46.67	94.943.700.000	53.33	100.751.639.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						94.943.700.000		100.751.639.000		
						Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	31.92	94.943.700.000	36.48	100.751.639.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					1.018.700.000		1.618.700.000		
						Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional	Unit	165	1.018.700.000	210	1.618.700.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	
		2.15.02.1.02.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				1.018.700.000		1.618.700.000		
						Jumlah Pemeliharaan dan Pembangunan Shelter BRT Trans Jateng	Paket	1	1.018.700.000	2	1.618.700.000	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					93.925.000.000		99.132.939.000		
						Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan	Unit	98	93.925.000.000	112	99.132.939.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.02.1.08.01			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				93.925.000.000		99.132.939.000		
						Jumlah koridor angkutan umum massal di Kawasan Aglomerasi Perkotaan	Trayek	6	93.925.000.000	7	99.132.939.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi								**9.497.031.000**		**7.103.540.000**		
						Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47.38	9.497.031.000	51.56	7.103.540.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						7.559.815.000		5.306.324.000		
						Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5.03	50.000.000	5.21	50.000.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM	Dokumen	324	50.000.000	336	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.13.01			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Evaluasi Trayek AKDP	Dokumen	0		0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
						Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang	Unit	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
						Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor	Unit	0		0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.15.03			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah evaluasi tarif dan load factor Trayek angkutan AKDP kelas Ekonomi	Trayek	0		0		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	58.33	110.000.000	75	110.000.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi					110.000.000		110.000.000		
						Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	0	110.000.000	0	110.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	
		2.15.02.1.01.01			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi strategis	Lokasi	2	110.000.000	2	110.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan (Review) dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	0		0		SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	49.91	241.250.000	50.74	241.250.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					50.400.000		50.400.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Unit	754668	50.400.000	754668	50.400.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				50.400.000		50.400.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Kali	365	50.400.000	365	50.400.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Kegiatan	22	150.000.000	22	150.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah III Kelas A	Lokasi	11	150.000.000	11	150.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.850.000		40.850.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Dokumen	541	40.850.000	550	40.850.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				40.850.000		40.850.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	10	20.000.000	10	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	10	20.850.000	10	20.850.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	40.88	90.750.000	41.75	90.750.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					10.500.000		10.500.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Unit	18697	10.500.000	18697	10.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				10.500.000		10.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Kali	365	10.500.000	365	10.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					60.250.000		60.250.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Kegiatan	4	60.250.000	4	60.250.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				60.250.000		60.250.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah II Kelas B	Lokasi	2	60.250.000	2	60.250.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Dokumen	280	20.000.000	286	20.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	6	10.000.000	6	10.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	6	10.000.000	6	10.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	50.97	140.625.000	51.49	140.625.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					15.625.000		15.625.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Unit	86247	15.625.000	86247	15.625.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				15.625.000		15.625.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Kali	365	15.625.000	365	15.625.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Kegiatan	8	100.000.000	8	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah I Kelas A	Lokasi	4	100.000.000	4	100.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					25.000.000		25.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Dokumen	497	25.000.000	502	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	9	12.500.000	9	12.500.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	9	12.500.000	9	12.500.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	78.71	130.000.000	79.08	130.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Unit	70024	25.000.000	70024	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Kali	365	25.000.000	365	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Kegiatan	6	75.000.000	6	75.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Lokasi	3	75.000.000	3	75.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Dokumen	869	30.000.000	873	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	7	15.000.000	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	7	15.000.000	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	82.72	201.990.000	83.17	201.990.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					21.990.000		21.990.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Unit	152025	21.990.000	152025	21.990.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				21.990.000		21.990.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Kali	365	21.990.000	365	21.990.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Kegiatan	10	150.000.000	10	150.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				150.000.000		150.000.000		

						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Lokasi	5	150.000.000	5	150.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Dokumen	1096	30.000.000	1102	30.000.000	SEKSI ANGKUTAN	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	7	15.000.000	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	7	15.000.000	7	15.000.000	SEKSI ANGKUTAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	65.49	195.500.000	65.96	195.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					15.500.000		15.500.000		
						Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Unit	174662	15.500.000	174662	15.500.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.07.03			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				15.500.000		15.500.000		
						Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Kali	365	15.500.000	365	15.500.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Kegiatan	8	150.000.000	8	150.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP Wilayah V Kelas B	Lokasi	4	150.000.000	4	150.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Dokumen	833	30.000.000	839	30.000.000	KEPALA BALAI	
		2.15.02.1.13.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah pembaharuan izin yang diterbitkan untuk Perusahaan Bus AKDP (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	6	15.000.000	6	15.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	6	15.000.000	6	15.000.000	KEPALA BALAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	87.65	1.590.000.000	89.8	1.590.000.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Orang	4088901	1.500.000.000	4189401	1.500.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.08.02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				1.500.000.000		1.500.000.000		

						Jumlah Pelayanan Posko Terpadu Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Lokasi	28	1.500.000.000	28	1.500.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					40.000.000		40.000.000		
						Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan	Unit	15	40.000.000	15	40.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.12.02			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah fasilitasi dan sosialisasi angkutan lanjutan di simpul transportasi	Lokasi	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah fasilitasi dan sosialisasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis	Lokasi	1	20.000.000	1	20.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi	Unit	15	50.000.000	15	50.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	
		2.15.02.1.14.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek	Trayek	1	25.000.000	1	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek	Unit	15	25.000.000	15	25.000.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%	21.62	4.684.700.000	26.19	2.376.209.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					4.684.700.000		2.376.209.000		
						Jumlah Terminal Tipe B yang sesuai standar pelayanan berdasarkan tingkat pemenuhan per aspek	Lokasi	6.92	4.684.700.000	8.38	2.376.209.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
		2.15.02.1.03.01			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B								
						Jumlah studi rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	0		0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.15.02.1.03.02			Pembangunan Gedung Terminal				2.500.000.000		1.791.509.000		
						Jumlah Pembangunan Terminal	Kegiatan	1	2.430.000.000	1	1.709.448.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah Pengadan Tanah Terminal	Paket	0		0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
						Jumlah Pengawasan Pembangunan Terminal	Paket	1	70.000.000	1	82.061.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		2.15.02.1.03.03			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal				2.150.000.000		550.000.000		
						Jumlah Penerapan Sistem Informasi	Lokasi	0		0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
						Jumlah Pengadaan dan Pemasangan CCTV	Lokasi	0		0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
						Jumlah Pengawasan Pengembangan Terminal	Paket	3	70.000.000	2	20.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah Pengembangan Terminal	Lokasi	3	2.080.000.000	2	530.000.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.15.02.1.03.05			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B				34.700.000		34.700.000		
						Jumlah Pembinaan penyelenggaraan Terminal Type B	Kali	0		0		SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	
						Jumlah Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B	Kali	4	34.700.000	4	34.700.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	28.57	125.000.000	33.33	180.000.000	Bidang Angkutan Jalan	
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					125.000.000		180.000.000		
						Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani	Trayek	4	125.000.000	5	180.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.09.01			Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi						70.000.000		
						Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi Jateng	Paket	0		0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
						Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi	Dokumen	0		1	70.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal	Dokumen	0		0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.15.02.1.09.02			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				125.000.000		110.000.000		
						Jumlah Peserta sosialisasi angkutan aglomerasi	Orang	300	125.000.000	300	110.000.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Sosialisasi Dokumen review masterplan SAUM	Lokasi	0		0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
						Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani	Trayek	0		0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	
		2.15.02.1.11.02			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi								
						Jumlah Pelaksanaan fasilitasi angkutan perintis	Kali	0		0		SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						1.937.216.000		1.797.216.000		
						Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	66.96	1.732.216.000	69.64	1.732.216.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.732.216.000		1.732.216.000		
						Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa	Trip	14	1.732.216.000	14	1.732.216.000	SEKSI OPERASIONAL	
		2.15.03.1.05.02			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1.732.216.000		1.732.216.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan KMC Kartini 1	Paket	1	1.732.216.000	1	1.732.216.000	SEKSI OPERASIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	47.01	205.000.000	48.88	65.000.000	Bidang Pelayaran	
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas					205.000.000		65.000.000		
						Jumlah penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	Dokumen	252	205.000.000	262	65.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	
		2.15.03.1.06.01			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi izin yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	Dokumen	50	65.000.000	50	65.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.15.03.1.06.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				140.000.000				
						Jumlah Appraisal KMC. Kartini I	Paket	1	140.000.000	0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	
						Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang	Orang	0		0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan pengusahaan Depo Peti Kemas	Orang	0		0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi di perairan	Orang	0		0		SEKSI ANGKUTAN LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah									**58.645.915.000**		**68.560.758.000**	**Dinas Perhubungan**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.5		79		Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah								**450.000.000**		**400.000.000**		
						Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	77.51	450.000.000	77.71	400.000.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						450.000.000		400.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	450.000.000	100	400.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					450.000.000		400.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	14	450.000.000	13	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				350.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	10	350.000.000	9	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah								**58.195.915.000**		**68.160.758.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.5	58.195.915.000	79	68.160.758.000	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						58.195.915.000		68.160.758.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	234.000.000	100	434.000.000	Balai Transportasi Jawa Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.500.000		26.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	26.500.000	12	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Unit	120	6.000.000	120	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.500.000		10.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	10.500.000	12	10.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							200.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	0		12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Aset Tak Berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Unit	0		1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.500.000		202.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	202.500.000	12	202.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	%	100	139.700.000	100	178.100.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					49.500.000		87.900.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	49.500.000	12	87.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	11.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	240	12.000.000	240	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	11.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.500.000		5.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	5.500.000	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		48.400.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	10.000.000	12	48.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					43.200.000		43.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	43.200.000	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.200.000		43.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	43.200.000	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	45.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	%	100	54.500.000	100	58.612.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					9.500.000		13.612.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	9.500.000	12	13.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	60	3.000.000	60	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000		1.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	0	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000		5.612.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	1.500.000	12	5.612.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.000.000		7.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.000.000		36.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000		1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	%	100	78.500.000	100	85.340.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.500.000		24.340.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	17.500.000	12	24.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		9.840.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	3.000.000	12	9.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		39.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	39.000.000	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	%	100	83.500.000	100	94.700.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.500.000		28.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	17.500.000	12	28.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	100	5.000.000	100	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000		14.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	3.000.000	12	14.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		39.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	39.000.000	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	%	100	90.400.000	100	108.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	22.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	120	6.000.000	120	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.000.000		22.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	4.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.400.000		26.400.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				26.400.000		26.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	%	100	72.500.000	100	84.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					13.500.000		25.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12	13.500.000	12	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	80	4.000.000	80	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		14.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	2.000.000	12	14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.000.000		19.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12	19.000.000	12	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.000.000		19.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	19.000.000	12	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.000.000		38.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12	38.000.000	12	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	%	100	57.442.815.000	100	67.117.106.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.768.909.000		52.303.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	42.768.909.000	12	52.303.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				41.878.709.000		51.413.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	41.878.709.000	12	51.413.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				820.200.000		820.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	820.200.000	12	820.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				70.000.000		70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					165.000.000		165.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	165.000.000	12	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				165.000.000		165.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	165.000.000	12	165.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	30.000.000	20	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.061.000.000		2.061.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	2.061.000.000	12	2.061.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Unit	800	40.000.000	800	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				126.000.000		126.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	126.000.000	12	126.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	3000	60.000.000	3000	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								
						Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.110.506.000		11.250.506.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	11.110.506.000	12	11.250.506.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.660.000.000		1.800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.660.000.000	12	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.446.506.000		9.446.506.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	9.446.506.000	12	9.446.506.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.287.400.000		1.287.400.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	1.287.400.000	12	1.287.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				687.400.000		687.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	687.400.000	12	687.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (Kantor Dinas Perhubungan)	Unit	8	200.000.000	8	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor (Kantor Dinas Perhubungan)	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah									**120.005.132.000**		**66.855.132.000**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						Indeks SPBE	Angka	3.27		3.33		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)								**3.500.000.000**		**3.500.000.000**		
						Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	3	3.500.000.000	3	3.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						3.500.000.000		3.500.000.000		
						Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80	%	66.67	3.500.000.000	83.33	3.500.000.000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					1.906.180.000		1.906.180.000		
						Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	%	75	1.016.189.000	80	1.016.189.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				313.992.000		313.992.000		
						Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya	Buah	198	313.992.000	247	313.992.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	
		2.21.02.1.01.04			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				702.197.000		702.197.000		
						Persentase Layanan Pengamanan Informasi	%	72	702.197.000	75	702.197.000	SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase SDM Pengelola persandian yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	75	889.991.000	80	889.991.000	SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	
		2.21.02.1.01.01			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				337.797.000		337.797.000		
						Jumlah kebijakan/peraturan penyelenggara persandian dan pengamanan informasi	Dokumen	1	337.797.000	1	337.797.000	SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	
		2.21.02.1.01.02			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				552.194.000		552.194.000		
						Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	201	552.194.000	201	552.194.000	SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					1.593.820.000		1.593.820.000		
						Persentase Layanan Penggunaan Jaring Komunikasi Sandi	%	72	1.593.820.000	75	1.593.820.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
		2.21.02.1.02.01			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi				1.593.820.000		1.593.820.000		
						Jumlah Informasi Yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Buah	27297	1.593.820.000	39317	1.593.820.000	SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH	
	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral								**1.500.000.000**		**1.500.000.000**		
						Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	81.76	1.500.000.000	95.65	1.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						1.500.000.000		1.500.000.000		
						Persentase Ketersediaan data sektoral	%	95	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Bidang Statistik	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					1.500.000.000		1.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Data Sektoral Ekonomi dan Infrastruktur yang Tersedia	Jenis	15000	300.000.000	18000	300.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
		2.20.02.1.01.02			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			300.000.000		300.000.000		
						Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota yang Telah Mengikuti Bimtek Pengolahan Data	Kabupaten/Kota	58	300.000.000	58	300.000.000	SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	
						Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan HAM yang tersedia	Jenis	21000	1.200.000.000	23000	1.200.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
		2.20.02.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah Forum Satu data	Kali	2		2		SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
						Jumlah Kab/Kota Yang Terafiliasi dan Terintegrasi dengan Satu Data Jawa Tengah	Kabupaten/Kota	35	1.200.000.000	35	1.200.000.000	SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
	Meningkatnya Tehnologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah								**115.005.132.000**		**61.855.132.000**		
						Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	%	3.53	7.000.000.000	3.65	7.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						7.000.000.000		7.000.000.000		
						Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan	%	70	7.000.000.000	85	7.000.000.000	Bidang E-Government	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					7.000.000.000		7.000.000.000		
						Penerbitan Dokumen Tata Kelola E-Government	Dokumen	5	1.000.000.000	7	1.000.000.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.01			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Regulasi Aplikasi Yang Terbit	Buah	5	1.000.000.000	6	1.000.000.000	SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Yang Terintegrasi	%	70	5.500.000.000	80	5.500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	
		2.16.03.1.02.07			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				5.500.000.000		5.500.000.000		
						Jumlah Aplikasi Berbagai Pakai Yang Dikembangkan/Dikelola	Unit	14	5.500.000.000	15	5.500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem E-Government yang terintegrasi	%	70	500.000.000	80	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	
		2.16.03.1.02.09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Penyelenggara E-Government yang Ditingkatkan kapasitasnya	Orang	1100	500.000.000	1100	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Indeks Domain Layanan SPBE	%	4.17	47.750.000.000	4.3	37.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						47.750.000.000		37.600.000.000		
						Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik	%	78	45.000.000.000	85	34.850.000.000	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					45.000.000.000		34.850.000.000		
						Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	75	5.364.420.000	85	4.950.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.10			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				300.000.000		220.000.000		
						Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan	Kelompok	38	300.000.000	44	220.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				5.064.420.000		4.730.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Komunitas Yang DiKoordinasikankan	Kelompok	38	5.064.420.000	44	4.730.000.000	SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	186	24.750.000.000	240	17.575.654.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.04			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				3.731.995.000		4.407.769.000		
						Jumlah Konten Informasi yang Disebarkan	Konten	46	3.731.995.000	60	4.407.769.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12.419.140.000		6.789.277.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Konten	46	12.419.140.000	60	6.789.277.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.07			Layanan Hubungan Media				3.943.705.000		2.669.947.000		
						Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Konten	46	3.943.705.000	60	2.669.947.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.08			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				4.655.160.000		3.708.661.000		
						Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Konten	46	4.655.160.000	60	3.708.661.000	SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Buah	186	14.885.580.000	240	12.324.346.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.02			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				700.461.000		695.960.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Pendapat Umum	Buah	91	700.461.000	117	695.960.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.03			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1.441.211.000		1.628.386.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Buah	91	1.441.211.000	117	1.628.386.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.09			Manajemen Komunikasi Krisis				12.743.908.000		10.000.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Analisis Agenda Publik	Konten	4	12.743.908.000	6	10.000.000.000	SEKSI OPINI PUBLIK	
						Persentase badan publik yang terbuka	%	92	2.750.000.000	100	2.750.000.000	Bidang Statistik	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					2.750.000.000		2.750.000.000		
						Keterbukaan Informasi Publik	Angka	36	2.750.000.000	41	2.750.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.06			Pelayanan Informasi Publik				750.000.000		750.000.000		
						Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dipublikasikan badan Publik	Kelompok	75	750.000.000	80	750.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
		2.16.02.1.01.11			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				2.000.000.000		2.000.000.000		
						Persentase Penyelesaian Sengketa Publik	%	84	2.000.000.000	85	2.000.000.000	SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	
						Indeks Domain Tata Kelola SPBE	%	3.83	60.255.132.000	3.95	17.255.132.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						60.255.132.000		17.255.132.000		
						Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi Informasi dan Komunikasi	%	70	60.255.132.000	80	17.255.132.000	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						9.931.975.000		9.931.975.000		
						Persentase Sub Domain yang Aktif	%	80	9.931.975.000	100	9.931.975.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.01			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				17.325.000		17.325.000		
						Jumlah Domain Pemprov Jateng	Buah	1	17.325.000	1	17.325.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.02			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				110.650.000		110.650.000		
						Jumlah Domain dan Sub Domain	Buah	150	110.650.000	150	110.650.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
		2.16.03.1.01.03			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				9.804.000.000		9.804.000.000		
						Jumlah Banwith Yang Tersedia	MBps	6500	9.804.000.000	8500	9.804.000.000	SEKSI INTERNET DAN INTRANET	
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					50.323.157.000		7.323.157.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Perangkat daerah Terhubung dengan Data Center	Lokasi	139	49.756.537.000	151	6.756.537.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.03			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				45.956.537.000		2.956.537.000		
						Jumlah Server/Storage	Buah	21	45.956.537.000	23	2.956.537.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
		2.16.03.1.02.08			Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah				3.800.000.000		3.800.000.000		
						Jumlah Lokasi Yang Terhubung Jaringan FO Milik Prov. Jateng	Lokasi	79	3.800.000.000	86	3.800.000.000	SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
						jumlah SKPD yang Terintegrasi Infrastruktur TIK	%	70	566.620.000	80	566.620.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.06			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				347.500.000		347.500.000		
						Jumlah Perangkat daerah yang terintegrasi Infrastuktur TIK	OPD	60	347.500.000	65	347.500.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
		2.16.03.1.02.10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				219.120.000		219.120.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan TIK	Dokumen	8	219.120.000	10	219.120.000	SEKSI DATA DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**25.105.761.000**		**27.700.000.000**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	72.5		81.25		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**750.000.000**		**950.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat daerah	%	72	750.000.000	81	950.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						750.000.000		950.000.000		
						Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%	100	750.000.000	100	950.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					750.000.000		950.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	5	750.000.000	5	950.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000.000		650.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	5	500.000.000	5	650.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja OPD yang disusun	Dokumen	2	250.000.000	2	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**24.355.761.000**		**26.750.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarkat	%	72.5	24.355.761.000	81.25	26.750.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						24.355.761.000		26.750.000.000		
						Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat daerah	%	100	24.355.761.000	100	26.750.000.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.805.761.000		19.200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah.	Dokumen	1	16.805.761.000	1	19.200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.105.761.000		18.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN.	Bulan	12	16.105.761.000	12	18.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				550.000.000		550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN.	Bulan	12	550.000.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan.	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah.	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan yang di susun.	Dokumen	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran PD yang disusun.	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					160.000.000		160.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang perangkat daerah.	Dokumen	1	160.000.000	1	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000		120.000.000		
						jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		20.000.000		
						jumlah bulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		20.000.000		
						jumlah laporan penatausahaan aset perangkat daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					240.000.000		240.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah.	Dokumen	1	240.000.000	1	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah pakaian dinas yang diadakan.	Paket	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai.	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat/Workshop/seminar.	Orang	44	200.000.000	48	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan.	Orang	2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
						Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis.	Orang	2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.555.000.000		1.555.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah.	Dokumen	1	1.555.000.000	1	1.555.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor.	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				280.000.000		280.000.000		
						Jumlah unit penyediaan dan perlengkapan gedung kantor.	Unit	1	280.000.000	1	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		100.000.000		
						jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah.	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.000.000		65.000.000		
						jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.	Bulan	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor.	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah.	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan ternuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu.	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah.	Bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip.	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE.	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah.	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit pengedaaan kendaraan dinas jabatan.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengedaaan kendaraan dinas operasional.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaaan meubelair.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengedaaan peralatan mesin.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengedaaan aset tetap lainnya.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah unit pengedaaan aset tak berwujud.	Paket	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengedaaan gedung kantor/bangunan lainnya.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit pengedaaansarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengedaaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya.	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.915.000.000		2.915.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah.	Dokumen	1	2.915.000.000	1	2.915.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Surat Menyurat perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				900.000.000		900.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	900.000.000	12	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.982.000.000		1.982.000.000		
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	Bulan	12	1.982.000.000	12	1.982.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.480.000.000		2.480.000.000		
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah.	Dokumen	1	2.480.000.000	1	2.480.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas jabatan.	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional.	Paket	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan meubelair.	Unit	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan mesin lainnya.	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya.	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan aset tak berwujud.	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.740.000.000		1.740.000.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab.	Unit	12	1.740.000.000	12	1.740.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya.	Paket	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya.	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam perekonomian Jawa Tengah									**34.907.964.000**		**70.559.800.000**	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
						Presentase Kontribusi sektor KUKM terhadap PDRB Jawa Tengah	%	4.96		5.02		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah								**28.015.000.000**		**63.675.000.000**		
						Persentase Pertumbuhan Omzet KUKM Jawa Tengah	%	9.88	28.015.000.000	10.13	63.675.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						2.250.000.000		2.300.000.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi	%	66	2.250.000.000	67	2.300.000.000	Bidang Pengawasan	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					650.000.000		650.000.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diawasi	%	100	650.000.000	100	650.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.01.01			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah Koperasi Provinsi yang ditingkatkan akuntabilitasnya	Unit	450	450.000.000	450	450.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.03.1.01.02			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Koperasi Provinsi yang ditingkatkan kepatuhannya	Unit	450	200.000.000	450	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.600.000.000		1.650.000.000		
						Presentase KSP/USP yang sudah diawasi	%	100	1.600.000.000	100	1.650.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.17.03.1.02.01			Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				1.600.000.000		1.650.000.000		
						Jumlah KSP/USP yang ditingkatkan akuntabilitasnya	Unit	500	1.600.000.000	531	1.650.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						2.000.000.000		2.100.000.000		
						Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat	%	23.5	2.000.000.000	24.5	2.100.000.000	Bidang Pengawasan	
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.000.000.000		2.100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Presentase KSP/USP Provinsi yang sudah Dinilai Kesehatannya	%	100	2.000.000.000	100	2.100.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	
		2.17.04.1.01.01			Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP Provinsi yang ditingkatkan kualitas kesehatannya	Orang	228	500.000.000	260	500.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.04.1.01.02			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi				1.500.000.000		1.600.000.000		
						Jumlah KSP/USP Provinsi yang diukur tingkat kesehatannya	Unit	375	1.500.000.000	390	1.600.000.000	SEKSI PENILAIAN KESEHATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						7.275.000.000		42.425.000.000		
						Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas	%	18	7.275.000.000	20	42.425.000.000	Bidang Kelembagaan	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					7.275.000.000		42.425.000.000		
						Persentase Jumlah Koperasi Provinsi difasilitasi peningkatan usahanya	%	13	3.585.000.000	14	38.660.000.000	SEKSI TATALAKSANA	
		2.17.06.1.01.01			Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				3.585.000.000		38.660.000.000		
						Jumlah Koperasi Prov yang difasilitasi pengembangan usahanya	Unit	154	3.585.000.000	157	38.660.000.000	SEKSI TATALAKSANA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Kop Prov yg difasilitasi penguatan manaj & kelembagaanya	%	16	3.690.000.000	17	3.765.000.000	SEKSI ORGANISASI	
		2.17.06.1.01.02			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				3.690.000.000		3.765.000.000		
						Jumlah Kop Prov yg difasilitasi penguatan manajemen dan kelembagaanya	Unit	194	3.690.000.000	198	3.765.000.000	SEKSI ORGANISASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						7.840.000.000		8.100.000.000		
						Persentase Usaha Mikro menuju kecil	%	12.59	7.840.000.000	12.77	8.100.000.000	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					7.840.000.000		8.100.000.000		
						persentase pelaku Usaha Mikro mengakses pembiayaan	%	13.2	1.700.000.000	13.43	1.800.000.000	SEKSI PEMBIAYAAN	
		2.17.07.1.01.01			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				1.700.000.000		1.800.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha MIkro yang ditingkatkan akses pembiayaannya	Orang	900	1.700.000.000	925	1.800.000.000	SEKSI PEMBIAYAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						persentase pelaku Usaha mikro yg sudah ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya	%	20.24	6.140.000.000	20.47	6.300.000.000	SEKSI RESTRUKTURISASI USAHA	
		2.17.07.1.01.01			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				6.140.000.000		6.300.000.000		

						Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kapasitas ush dan perlindungan produknya	Orang	2030	6.140.000.000	2060	6.300.000.000	SEKSI RESTRUKTURISASI USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						8.650.000.000		8.750.000.000		
						Persentase Usaha Kecil menuju Menengah	%	23	8.650.000.000	25	8.750.000.000	Bidang Bina Usaha	
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					8.650.000.000		8.750.000.000		
						Persentase pelaku Usaha Kecil yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain dan Teknologi	%	12	5.622.500.000	14	5.687.500.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.17.08.1.01.01			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				5.622.500.000		5.687.500.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang ditingkatkan Akses Pemasaran Jaringan Usaha, serta Desain Teknologi	Orang	420	5.622.500.000	450	5.687.500.000	SEKSI PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase pelaku usaha kecil yg ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya	%	10	3.027.500.000	11	3.062.500.000	SEKSI PRODUKSI	
		2.17.08.1.01.01			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				3.027.500.000		3.062.500.000		
						Jumlah Pelaku UMKM yang ditingkatkan kualitas produksi dan pengolahannya	Orang	300	3.027.500.000	320	3.062.500.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah.								**6.892.964.000**		**6.884.800.000**		
						Presentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Koperasi KUKM yg dibina	%	21.1	6.892.964.000	21.35	6.884.800.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						6.892.964.000		6.884.800.000		
						Persentase SDM KUMKM yang Terampil	%	82	6.892.964.000	83	6.884.800.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					6.892.964.000		6.884.800.000		
						Jumlah dokumen instrumen pelatihan, evaluasi dan pengembangan pelatihan yang disusun	Dokumen	4	648.600.000	4	297.370.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
		2.17.05.1.01.01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				648.600.000		297.370.000		
						jumlah dokumen evaluasi dan pengembangan pelatihan	Dokumen	1	500.000.000	1	121.760.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah dokumen instrumen pelatihan	Dokumen	3	148.600.000	3	175.610.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						persentase Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space	%	50	947.660.000	100	1.536.144.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	
		2.17.05.1.01.01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				947.660.000		1.536.144.000		
						Jumlah SDM KUMKM start-up bisnis yang difasilitasi coworking space	Orang	1100	767.460.000	1100	913.840.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Pendamping Pasca Pelatihan yang ditingkatkan kualitasnya	Orang	60	180.200.000	60	622.304.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						persentase SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat pengetahuan & ketrampilan ush nya	%	85	5.296.704.000	87	5.051.286.000	SEKSI PENYELENGGARA	
		2.17.05.1.01.01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				5.296.704.000		5.051.286.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih melalui pelatihan reguler	Orang	975	2.887.584.000	975	2.463.866.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah SDM UMKM yang dilatih melalui pelatihan berjenjang	Orang	575	2.409.120.000	575	2.587.420.000	SEKSI PENYELENGGARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah									**26.619.388.000**		**32.225.000.000**	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	84		86		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**1.000.000.000**		**1.015.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77.11	1.000.000.000	77.51	1.015.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.000.000.000		1.015.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	77.11	1.000.000.000	77.51	1.015.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		1.015.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	1.000.000.000	6	1.015.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				465.000.000		475.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	3	465.000.000	3	475.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				535.000.000		540.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	3	535.000.000	3	540.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								**25.619.388.000**		**31.210.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	84	25.619.388.000	86	31.210.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25.619.388.000		31.210.000.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	84	4.000.000.000	86	4.100.000.000	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					557.600.000		557.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan		557.600.000	0	557.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	20	300.000.000	20	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah pada Balatkop UKM	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.600.000		7.600.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	7.600.000	12	7.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD pada Balatkop UKM	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000		650.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		650.000.000		650.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	15	200.000.000	15	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	15	400.000.000	15	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.382.400.000		2.482.400.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		2.382.400.000		2.482.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD pada Balatkop UKM	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				900.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD pada Balatkop UKM	Bulan	12	900.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.435.400.000		1.435.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.435.400.000	12	1.435.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.000.000		410.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		410.000.000		410.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	200.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	84	21.619.388.000	86	27.110.000.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.011.948.000		21.465.316.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	7	16.011.948.000	7	21.465.316.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.811.948.000		20.215.316.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	14.811.948.000	12	20.215.316.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				750.000.000		800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	750.000.000	12	800.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				350.000.000		350.000.000		
						umlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	5	25.000.000	5	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					95.000.000		95.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	26	95.000.000	26	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				95.000.000		95.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	95.000.000	12	95.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90.000.000		90.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	100	50.000.000	100	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	20	20.000.000	20	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.235.000.000		2.272.284.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	2.235.000.000	12	2.272.284.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				70.000.000		70.000.000		
						umlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				210.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	8	210.000.000	8	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				240.000.000		240.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	240.000.000	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000.000		1.097.284.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.097.284.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	4	100.000.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	50.000.000	6	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.286.440.000		2.286.400.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	2.286.440.000	12	2.286.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.440.000		600.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	600.440.000	12	600.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.606.000.000		1.606.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.606.000.000	12	1.606.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					701.000.000		701.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	701.000.000	12	701.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.000.000		41.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	41.000.000	12	41.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera									**3.112.627.000**		**3.838.322.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	%	4		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN								**1.802.451.000**		**2.113.322.000**		
						Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	1.802.451.000	100	2.113.322.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						242.800.000		400.000.000		
						Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan	%	100	242.800.000	100	400.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					92.800.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	92.800.000	1	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.01.01			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				92.800.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen kajian kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	92.800.000	1	100.000.000	SEKSI PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					150.000.000		300.000.000		
						Jumlah Kajian/Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	1	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN	
		2.18.02.1.02.01			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				50.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen kajian perencanaan penanaman modal daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	150.000.000	SEKSI PERENCANAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kajian Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	2	100.000.000	2	150.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	
		2.18.02.1.02.02			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen prospektus investasi di Jawa Tengah yang disusun	Dokumen	2	100.000.000	2	150.000.000	SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						565.000.000		620.000.000		
						Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal	%	8	465.000.000	20	500.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					465.000.000		500.000.000		
						Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	Dokumen	15	365.000.000	20	350.000.000	SEKSI PROMOSI	
		2.18.03.1.01.02			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				365.000.000		350.000.000		
						Jumlah promosi penanaman modal	Kali	6	365.000.000	8	350.000.000	SEKSI PROMOSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal yang Menjadi Izin Usaha	Dokumen	7	100.000.000	7	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN	
		2.18.03.1.01.02			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				100.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang dilakukan fasilitasi pendampingan	Unit	12	100.000.000	15	150.000.000	SEKSI PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha	%	20	100.000.000	26	120.000.000	Bidang Promosi PM	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					100.000.000		120.000.000		
						Jumlah realisasi kemitraan usaha	Dokumen	7	100.000.000	8	120.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	
		2.18.03.1.01.01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				100.000.000		120.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan fasilitasi temu usaha	Unit	30	100.000.000	35	120.000.000	SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						994.651.000		1.093.322.000		
						Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	15	994.651.000	15	1.093.322.000	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					994.651.000		1.093.322.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	Unit	650	386.900.000	700	443.522.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				386.900.000		443.522.000		
						Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	12	386.900.000	12	443.522.000	SEKSI PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	Buah	1320	364.761.000	1500	280.860.000	SEKSI PENGAWASAN	
		2.18.05.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				364.761.000		280.860.000		
						Jumlah perusahaan yang ditinjau perizinannya	Unit	1320	364.761.000	1500	280.860.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disetujui	%	100	41.400.000	100	168.940.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	
		2.18.05.1.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				41.400.000		168.940.000		
						Jumlah proyek yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Unit	7500	41.400.000	10000	168.940.000	SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	%	85	201.590.000	90	200.000.000	SEKSI PENGENDALIAN	
		2.18.05.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				201.590.000		200.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Dokumen	12	201.590.000	12	200.000.000	SEKSI PENGENDALIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan								**1.310.176.000**		**1.725.000.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90	1.310.176.000	90	1.725.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						1.010.176.000		1.350.000.000		
						Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan	%	92	187.816.000	93	236.000.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					187.816.000		236.000.000		
						Jumlah prosentase standar pelayanan yang dilakukan evaluasi	%	40	54.000.000	40	72.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	
		2.18.04.1.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				54.000.000		72.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	Dokumen	1	19.000.000	1	32.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen ISO yang diterapkan	Dokumen	1	35.000.000	1	40.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sarana Prasarana Layanan yang Dikembangkan	Buah	1	133.816.000	1	164.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.18.04.1.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				133.816.000		164.000.000		
						Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi teknis pelayanan	Orang	25	62.592.000	25	79.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana dan prasarana layanan yang disusun	Dokumen	9	71.224.000	9	85.000.000	SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	132.184.000	100	164.000.000	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					132.184.000		164.000.000		
						Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	132.184.000	100	164.000.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	
		2.18.04.1.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				132.184.000		164.000.000		
						Jumlah pelayanan fasilitasi	Buah	60	79.592.000	60	100.000.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelayanan informasi perizinan dan non perizinan oleh masyarakat	Buah	500	52.592.000	500	64.000.000	SEKSI PENANGANAN PENGADUAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	%	94	690.176.000	95	950.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan	
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					690.176.000		950.000.000		
						Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	Dokumen	1600	82.800.000	1760	100.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				82.800.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan yang penerbitannya terdigitalisasi	Dokumen	1600	82.800.000	1760	100.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah notifikasi Online Single Submission	Buah	1500	96.746.000	1650	115.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				13.946.000		15.000.000		
						Jumlah klinik pemenuhan komitmen perizinan	Kali	10	13.946.000	11	15.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.04.1.02.02			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				82.800.000		100.000.000		
						Jumlah pemohon perizinan berusaha/komitmen yang dilakukan pemantauan proses penerbitan	Unit	1000	82.800.000	1100	100.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan	Unit	2300	510.630.000	2530	735.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	
		2.18.04.1.02.01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				510.630.000		735.000.000		
						Jumlah layanan perizinan yang masuk pada mall pelayanan publik, gerai dan layanan keliling yang dilaksanakan	Unit	1050	74.040.000	1155	200.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah layanan perizinan yang terlayani dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	Dokumen	1250	436.590.000	1375	535.000.000	SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						300.000.000		375.000.000		
						Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	80	300.000.000	90	375.000.000	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					300.000.000		375.000.000		

						Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Unit	1	199.846.000	1	250.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		2.18.06.1.01.01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				199.846.000		250.000.000		
						Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	Dokumen	2	61.070.000	2	80.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sistem aplikasi pendukung perizinan dan/atau penanaman modal yang dilakukan pengintegrasian	Dokumen	1	138.776.000	1	170.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang dipublikasikan kepada publik	Dokumen	4	100.154.000	4	125.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	
		2.18.06.1.01.01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.154.000		125.000.000		
						Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	Dokumen	4	100.154.000	4	125.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**14.005.783.000**		**17.708.322.000**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		80		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Nilai Kepuasan Masyarakat								**13.863.391.000**		**17.457.735.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80	13.863.391.000	80	17.457.735.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13.863.391.000		17.457.735.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	13.863.391.000	100	17.457.735.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.292.432.000		14.445.735.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	11.292.432.000	4	14.445.735.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.092.432.000		14.245.735.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	11.092.432.000	12	14.245.735.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80.000.000		107.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	80.000.000	1	107.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		107.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	80.000.000	12	107.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.100.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	10.100.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.100.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	10	10.100.000	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					567.900.000		740.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	567.900.000	1	740.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	9.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	70.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				69.900.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	69.900.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		150.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	35.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000		40.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	30.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	70.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	280.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	2	4.000.000	2	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.722.959.000		1.825.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.722.959.000	1	1.825.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				592.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	592.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	33.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.067.959.000		1.140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.067.959.000	12	1.140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.000.000		290.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	190.000.000	1	290.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	60.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	75.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)								**142.392.000**		**250.587.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	%	73	142.392.000	74	250.587.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						142.392.000		250.587.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	142.392.000	100	250.587.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					142.392.000		250.587.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	4	142.392.000	4	250.587.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				73.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	2	73.000.000	2	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.392.000		100.587.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	2	69.392.000	2	100.587.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah									**233.275.950.000**		**236.145.200.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0.63		0.65		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah								**233.275.950.000**		**236.145.200.000**		
						Tingkat Prestasi Olahraga	Peringkat	4	233.275.950.000	4	236.145.200.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						233.275.950.000		236.145.200.000		
						Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	13.89	10.350.000.000	15	13.750.000.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga							500.000.000		
						Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga antar pplop	%	0		100	500.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	
		2.19.03.1.02.03			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event						500.000.000		
						Jumlah atlet yang mengikuti Kejuaraan Nasional dan Internasional antar PPLOP/ pelajar	Orang	0		10	500.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					10.350.000.000		13.250.000.000		
						Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Antar PPLOP	%	33.33	10.350.000.000	100	13.250.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	
		2.19.03.1.03.02			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				10.030.000.000		12.500.000.000		
						Jumlah Atlet PPLOP yang berintegritas	Orang	185	10.030.000.000	185	12.500.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.03.03			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi				320.000.000		750.000.000		
						Jumlah Atlet PPLOP yang dibina	Orang	70	320.000.000	185	750.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	43.33	106.725.950.000	45	92.395.200.000	Bidang Keolahragaan	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					4.450.000.000		300.000.000		
						Persentase Jumlah peserta yang mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	%	50	4.450.000.000	100	300.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	
		2.19.03.1.02.01			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi				3.350.000.000		300.000.000		
						Jumlah Event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	Kegiatan	3	1.250.000.000	1	100.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penyelenggaraan event olehraga pendidikan dan prestasi	Kegiatan	1	2.100.000.000	1	200.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.02.03			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event				1.100.000.000				
						Jumlah event Olahraga yang diikuti	Kegiatan	1	1.100.000.000	0		SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					101.975.950.000		91.995.200.000		
						Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	%	50	101.975.950.000	100	91.995.200.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	
		2.19.03.1.03.02			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				285.750.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta yang dilakukan pengukuran kebugaran jasmani	Orang	0		0		SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga	Orang	50	165.750.000	0		SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Unit	1	120.000.000	1	250.000.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.03.03			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi				101.517.600.000		91.572.600.000		
						Jumlah Atlet dan pelatih berprestasi yang dibina	Orang	100	101.517.600.000	100	91.572.600.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.03.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				172.600.000		172.600.000		
						Dokumen profil data keolahragaan	Dokumen	1	172.600.000	1	172.600.000	SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA PRESTASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					300.000.000		100.000.000		
						Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%	50	300.000.000	100	100.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA	
		2.19.03.1.04.01			Standardisasi Organisasi Keolahragaan				200.000.000				
						Jumlah SDM Olahraga yang bersertifikasi kepelatihan	Orang	50	200.000.000	0		SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.03.1.04.03			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen/ Kerjasama/MOU Bidang Keolahragaan	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	100	116.200.000.000	100	130.000.000.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					116.200.000.000		130.000.000.000		
						Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri	%	50	116.200.000.000	100	130.000.000.000	SEKSI KEPELATIHAN	
		2.19.03.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi				116.200.000.000		130.000.000.000		
						Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi, renovasi dan atau dibangun	Unit	1	116.200.000.000	1	130.000.000.000	SEKSI KEPELATIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pemuda									**23.729.750.000**		**26.908.172.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Indeks Pembangunan Pemuda	%	55.15		55.95		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda								**23.729.750.000**		**26.908.172.000**		
						Persentase Capaian Kapasitas Kepemudaan dan Kemandirian Ekonomi Pemuda	%	38.55	23.729.750.000	51.04	26.908.172.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						23.729.750.000		26.908.172.000		
						Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	64.06	16.579.750.000	85.78	15.683.172.000	Bidang Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					2.970.000.000		2.107.422.000		
						Persentase Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda	%	50	2.970.000.000	100	2.107.422.000	SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA	
		2.19.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				1.850.000.000		1.850.000.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Kepecintaalaman)	Orang	2000	1.850.000.000	2000	1.850.000.000	SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.19.02.1.01.04			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				1.120.000.000		257.422.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN)	Orang	105	1.120.000.000	35	257.422.000	SEKSI PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					13.609.750.000		13.575.750.000		
						Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	%	50	13.609.750.000	100	13.575.750.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA	
		2.19.02.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha				65.750.000		35.750.000		
						Jumlah organisasi pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan	Unit	1	65.750.000	1	35.750.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.02.1.02.02			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				13.544.000.000		13.540.000.000		
						Jumlah dokumen kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan	Dokumen	1	13.544.000.000	1	13.540.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	13.04	7.150.000.000	16.3	11.225.000.000	Bidang Kepemudaan	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					7.150.000.000		11.225.000.000		
						Persentase pengembangan dan kemandirian pemuda	%	50	7.150.000.000	100	11.225.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	
		2.19.02.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi				2.300.000.000		4.725.000.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan	Orang	1000	2.300.000.000	1000	4.725.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.19.02.1.01.09			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				4.850.000.000		6.500.000.000		
						Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP	Orang	200	4.850.000.000	200	6.500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan									**3.534.050.000**		**9.020.930.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3.23		3.25		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan								**3.534.050.000**		**9.020.930.000**		
						Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Ribu Rupiah	5753034	3.534.050.000	6040686	9.020.930.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.367.100.000		7.087.853.000		
						Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	69.57	963.100.000	78.26	6.808.853.000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi					309.350.000		159.350.000		
						Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi	2	309.350.000	2	159.350.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	
		3.26.02.1.01.03			Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				309.350.000		159.350.000		
						Jumlah Desa Wisata Yang dikembangkan	Desa	21	309.350.000	20	159.350.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Potensi Keunikan Lokal Budaya yang Dikembangkan sebagai Atraksi Wisata	Kegiatan	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produk pariwisata yang dikembangkan / diverifikasi	Kegiatan	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					653.750.000		378.750.000		
						Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata	Dokumen	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.02.02			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi								
						Jumlah dokumen perencanaan pengembangan KSPP/ KPPP	Dokumen	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan	Lokasi	1	653.750.000	1	378.750.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.02.03			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				653.750.000		378.750.000		
						Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata	Kegiatan	1	275.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Daya Tarik Wisata pada KSPP/ KPPP yang dikembangkan (fisik)	Lokasi	1	378.750.000	1	378.750.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)	Kegiatan	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi							6.270.753.000		
						Jumlah fasilitasi pengelolaan destinasi pariwisata	Unit	1		1	6.270.753.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.03			Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi						246.451.000		
						Jumlah pengelola destinasi pariwisata/daya tarik wisata yang dilatih	Orang	80		80	246.451.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	
		3.26.02.1.03.04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						6.024.302.000		
						Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Unit	1		1	6.024.302.000	SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	56	404.000.000	70	279.000.000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					404.000.000		279.000.000		
						Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata	Jenis	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	
		3.26.02.1.04.03			Pengelolaan Investasi Pariwisata								
						Jenis media informasi investasi industri pariwisata	Unit	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Travel Pattern (Pola Perjalanan Wisata) yang dikembangkan	Kegiatan	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	Unit	150	404.000.000	100	279.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	
		3.26.02.1.04.02			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota				404.000.000		279.000.000		
						jumlah industri pariwisata yang dibina	Unit	150	404.000.000	100	279.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1.014.500.000		764.500.000		
						Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	11530429	1.014.500.000	17295375	764.500.000	Bidang Pemasaran Pariwisata	
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					1.014.500.000		764.500.000		
						Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kelompok	12	271.500.000	12	271.500.000	SEKSI PROMOSI	
		3.26.03.1.01.02			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				271.500.000		271.500.000		
						Jumlah Event Pariwisata yang diselenggarakan	Kegiatan	0		0		SEKSI PROMOSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti dan difasilitasi	Kegiatan	12	271.500.000	12	271.500.000	SEKSI PROMOSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata	Orang	300000	305.750.000	350000	205.750.000	SEKSI SARANA PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.26.03.1.01.01			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				305.750.000		205.750.000		
						Jumlah media promosi pariwisata	Jenis	1	305.750.000	1	205.750.000	SEKSI SARANA PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial	Kegiatan	1	437.250.000	1	287.250.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR	
		3.26.03.1.01.03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri				437.250.000		287.250.000		
						Jumlah Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata Jawa Tengah	Dokumen	1	287.250.000	1	287.250.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Mitra Pengenalan dan Pengembangan Pasar Wisata Potensial Jawa Tengah	Kegiatan	1	150.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN PASAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						50.000.000		50.000.000		
						Persentase Kota Kreatif	%	5.71	50.000.000	5.71	50.000.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Kota Kreatif yang teruji petik	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	
		3.26.04.1.01.01			Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Kota Kreatif Yang difasilitasi	Kabupaten/Kota	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1.102.450.000		1.118.577.000		
						Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi	%	50.69	1.102.450.000	59.72	1.118.577.000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					1.102.450.000		1.118.577.000		
						Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang berkembang (dari rintisan ke mandiri)	Kelompok	1	107.350.000	1	230.575.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.03			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan						123.225.000		
						Jumlah pengelola homestay dan pemandu wisata (tour guide) yang dilatih	Orang	40		40	123.225.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.08			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				107.350.000		107.350.000		
						Jumlah dokumen Pengembangan ekonomi kreatif	Dokumen	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah komunitas Ekonomi Kreatif yang difasilitasi publikasi karya ekraf	Kelompok	1	107.350.000	1	107.350.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lembaga/ organisasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang	Kelompok	2	350.000.000	2	469.677.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	
		3.26.05.1.01.02			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				350.000.000		469.677.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lembaga/kelompok/organisasi pariwisata yang dibina	Orang	50	250.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah masyarakat yang sadar wisata dan Sapta Pesona	Orang	50	50.000.000	50	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata	Orang	120		120	369.677.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi	Orang	50	310.750.000	50	135.750.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.26.05.1.01.09			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				310.750.000		135.750.000		
						Jumlah pelaku ekonomi Kreatif yang dilatih	Orang	50	135.750.000	50	135.750.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi	Orang	50	175.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi kreatif yang difasilitasi Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Orang	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	Orang	240	334.350.000	240	282.575.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.01			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				334.350.000		282.575.000		
						Jumlah dokumen Pengembangan SDM Pariwisata	Dokumen	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Duta Wisata yang terpilih dan diikutsertakan dalam event pariwisata	Orang	0		0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku Pariwisata yang disertifikasi	Orang	50	175.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku pariwista yang dilatih	Orang	240	159.350.000	240	282.575.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**40.228.751.000**		**41.812.578.000**	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	100		100		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**456.000.000**		**1.032.778.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	73.5	456.000.000	76.46	1.032.778.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						456.000.000		1.032.778.000		
						Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	%	100	456.000.000	100	1.032.778.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					456.000.000		1.032.778.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	1	456.000.000	1	1.032.778.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		732.778.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	300.000.000	1	732.778.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				156.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	156.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**39.772.751.000**		**40.779.800.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Laporan	100	39.772.751.000	100	40.779.800.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						39.772.751.000		40.779.800.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	2.865.000.000	100	1.665.000.000	Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	Orang	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.665.000.000		1.265.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Bulan	12	1.665.000.000	12	1.265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				800.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	800.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				865.000.000		865.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	865.000.000	12	865.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.050.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.050.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000				
						Jumlah terpenuhinya bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	0	100.000.000	0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				950.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	950.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	36.907.751.000	100	39.114.800.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.983.501.000		30.300.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	26.983.501.000	12	30.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.183.501.000		30.300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	26.183.501.000	12	30.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				800.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung palaksanaan tugas ASN	Bulan	0	800.000.000	0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					260.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	260.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				260.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	260.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Bulan	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	Orang	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					670.000.000		600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	670.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000				
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	0	20.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit penghadaan kendaraan dinas jabatan	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.674.250.000		8.014.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Bulan	12	8.674.250.000	12	8.014.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.719.250.000		1.059.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.719.250.000	12	1.059.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.955.000.000		6.955.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	6.955.000.000	12	6.955.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					320.000.000				
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	320.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	70.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	100.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	50.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**28.268.750.000**		**31.694.000.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	79.09		79.24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**28.268.750.000**		**31.694.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	79.09	28.268.750.000	79.24	31.694.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28.268.750.000		31.694.000.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	79.09	28.268.750.000	79.24	31.694.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.000.000		103.850.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	5	100.000.000	5	103.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		53.850.000		
						Jumlah dokumen Renja, renstra PD yg disusun	Dokumen	1	50.000.000	1	53.850.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah dokumen RKA PD yang disusun	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah dokumen Perubahan RKA PD yang disusun	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah dokumen DPA PD yang disusun	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah dokumen Perubahan DPA PD yg disusun	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah dokumen LKJIP yang disusun	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.773.177.000		27.992.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	24.773.177.000	1	27.992.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.773.177.000		27.992.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	24.773.177.000	12	27.992.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	12		12		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	235		235		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					210.000.000		223.970.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	210.000.000	1	223.970.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	7		7		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000		52.850.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	50.000.000	12	52.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		36.995.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan		35.000.000		36.995.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		52.850.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	50.000.000	12	52.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		27.425.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	25.000.000	12	27.425.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		53.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	12	53.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit	2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Paket	2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin	Paket	4		4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	7		7		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.095.573.000		3.279.050.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	3.095.573.000	1	3.279.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.570.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.570.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.590.629.000		1.694.261.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.590.629.000	12	1.694.261.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.494.944.000		1.574.219.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.494.944.000	12	1.574.219.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					90.000.000		95.130.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	90.000.000	1	95.130.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		95.130.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	90.000.000	12	95.130.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan Di Jawa Tengah									**710.950.000**		**755.000.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Nilai Standar Kepuasan Pengunjung Terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai	79.09		79.24		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan Bagi Masyarakat								**710.950.000**		**755.000.000**		
						Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	79	710.950.000	100	755.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						710.950.000		755.000.000		
						Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka	%	85.18	53.400.000	100	53.400.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					53.400.000		53.400.000		
						Jumlah Alihmedia koleksi Deposit	halaman	2000	15.000.000	2500	15.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.08			Pengembangan Perpustakaan Deposit				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah pelestarian bahan pustaka	halaman	2000	15.000.000	2500	15.000.000	SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	Eks	4000	38.400.000	4500	38.400.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				38.400.000		38.400.000		
						Jumlah Bahan Pustaka Yang Diolah	Eks	5000	38.400.000	5500	38.400.000	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
						Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kab/Kota dalam pembudayaan gemar membaca	%	0	22.000.000	0	26.000.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					22.000.000		26.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan	Unit	0	22.000.000	0	26.000.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		2.23.02.1.02.01			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat				22.000.000		26.000.000		
						Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pd satuan pendidikan menengah & khusus	Jenis	3	22.000.000	3	26.000.000	SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		2.23.02.1.02.04			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial								
						Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jenis	0		0		SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	80	591.450.000	100	621.600.000	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					591.450.000		621.600.000		
						Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah	Orang	100000	591.450.000	100000	603.400.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.07			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				591.450.000		603.400.000		
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jenis	8	591.450.000	8	603.400.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengunjung perpustakaan online	Orang	1000000		1000000	18.200.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	
		2.23.02.1.01.01			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						18.200.000		
						Jumlah layanan perpustakaan elektronik	Jenis	2		2	18.200.000	SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan	%	80	22.100.000	100	28.000.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					22.100.000		28.000.000		
						Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi	Orang	15	22.100.000	15	28.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.06			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				22.100.000		28.000.000		
						Jumlah SDM Perpustakaan yg mengikuti pelatihan	Orang	190	22.100.000	105	28.000.000	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan	%	80	22.000.000	100	26.000.000	Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					22.000.000		26.000.000		
						Jumlah mitra perpustakaan	Unit	3	22.000.000	3	26.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	
		2.23.02.1.01.02			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				22.000.000		26.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kerjasama	Unit	3	22.000.000	3	26.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
Penyelenggaraan Kearsipan Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Tertib Arsip									**321.905.000**		**351.156.000**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	
						Nilai indeks kearsipan	Nilai	75		78		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Kearsipan Menuju Tertib Arsip								**321.905.000**		**351.156.000**		
						Nilai pengelolaan kearsipan LKD Provinsi	Nilai	79	321.905.000	80	351.156.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						321.905.000		351.156.000		
						Persentase Pengelolaan arsip yg diselamatkan	%	79	160.387.000	100	174.000.000	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					160.387.000		174.000.000		
						Persentase arsip yg dilestarikan	%	78	160.387.000	100	174.000.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	
		2.24.02.1.02.02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				160.387.000		174.000.000		
						Jumlah arsip yang di akuisisi	Berkas	20000	60.064.000	20000	63.920.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah arsip yang dilestarikan	Lembar	50000	57.482.000	50000	58.930.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah arsip yang diolah	Berkas	13000	42.841.000	18000	51.150.000	SEKSI PELESTARIAN ARSIP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	%	92.78	66.556.000	100	75.156.000		
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi					66.556.000		75.156.000		
						Jumlah pengunjung layanan kearsipan	Orang	1000	27.996.000	1000	27.996.000		
		2.24.02.1.02.02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				27.996.000		27.996.000		
						Jumlah arsip yang terlayankan	Arsip	450	27.996.000	450	27.996.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase publikasi kearsipan	%	80	38.560.000	100	47.160.000		
		2.24.02.1.02.02			Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				38.560.000		47.160.000		
						Jumlah promosi kearsipan	Jenis	2	38.560.000	2	47.160.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	85	94.962.000	100	102.000.000	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi					31.800.000		35.500.000		
						Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik	OPD	20	31.800.000	25	35.500.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.01.03			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				31.800.000		35.500.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	OPD	41	31.800.000	41	35.500.000	SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi					63.162.000		66.500.000		
						Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan	OPD	41	63.162.000	41	66.500.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	
		2.24.02.1.03.02			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				63.162.000		66.500.000		
						Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan	OPD	8	63.162.000	7	66.500.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan									**70.554.065.000**		**53.856.849.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	%	1.4		1.5		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan								**65.333.445.000**		**48.616.229.000**		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	38.18	2.484.000.000	39.33	2.484.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						2.484.000.000		2.484.000.000		
						Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	2	1.184.000.000	2	1.184.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.184.000.000		1.184.000.000		
						Jumlah reakreditasi ISO	Dokumen	2	1.184.000.000	1	1.184.000.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.01			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				484.000.000		484.000.000		
						Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan	Dokumen	140	355.950.000	140	355.950.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan dokumen	Dokumen	1	128.050.000	1	128.050.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.02.02			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan	Dokumen	400	700.000.000	800	700.000.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan	%	2	1.300.000.000	2	1.300.000.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					250.000.000		250.000.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar	Dokumen	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.02			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha	Orang	10	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Unit	6500	150.000.000	6550	150.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.03			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen statistik pengolah dan pemasar perikanan	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.050.000.000		1.050.000.000		
						Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	50000	1.050.000.000	55000	1.050.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.01			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Poklahsar yang dibina	Kelompok	10	250.000.000	10	250.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.02.02			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				800.000.000		800.000.000		
						Jumlah kerjasama dalam mengakomodir menu Ikan dalam jamuan	Jenis	3	21.000.000	3	16.500.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	2000	416.197.000	2000	396.657.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Poklahsar yang difasilitasi pemasaran e commerce	Kelompok	5	362.803.000	5	386.843.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Garam	Ton	373463.29	1.500.000.000	392136.46	1.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						1.500.000.000		1.500.000.000		
						Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	5	253.290.000	5	246.090.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					253.290.000		246.090.000		
						Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya	Kelompok	2	253.290.000	2	246.090.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.01			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				253.290.000		246.090.000		
						Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan	Orang	100	253.290.000	100	246.090.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Produksi Garam	%	0.1	1.246.710.000	0.2	1.253.910.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					1.246.710.000		1.253.910.000		
						Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	5	1.246.710.000	5	1.253.910.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.01			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				1.246.710.000		1.253.910.000		
						Jumlah dokumen data statistik garam rakyat	Dokumen	1	32.600.000	1	32.600.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas tambak garam yang menerapkan teknologi	Ha	20	1.214.110.000	20	1.221.310.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi Perikanan	Ton	1018833.92	61.349.445.000	1023928.09	44.632.229.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						50.411.857.000		36.028.069.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	592.360.000	100	592.360.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					592.360.000		592.360.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	592.360.000	11	592.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3	250.000.000	3	250.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				342.360.000		342.360.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	342.360.000	8	342.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	1.115.000.000	100	19.231.549.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.115.000.000		19.231.549.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	880.000.000	11	18.231.549.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				880.000.000		18.231.549.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	600	135.125.000	600	195.125.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	1800	744.875.000	1800	18.036.424.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	45	235.000.000	50	1.000.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				235.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	235.000.000	10	1.000.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	100	1.675.720.000	100	2.675.720.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.675.720.000		2.675.720.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	250.000.000	11	250.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	20	146.685.000	20	146.685.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	15	103.315.000	15	103.315.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	36	1.425.720.000	40	2.425.720.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.425.720.000		2.425.720.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	1.425.720.000	8	2.425.720.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	72.73	750.000.000	81.82	650.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					750.000.000		650.000.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	36	750.000.000	40	650.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				350.000.000		250.000.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	34	227.000.000	34	227.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	12	123.000.000	12	23.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	400.000.000	8	400.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90.91	800.000.000	100	800.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					800.000.000		800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	800.000.000	11	800.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	170	216.920.000	170	216.920.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	3350	283.080.000	3350	283.080.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	300.000.000	10	300.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90.91	1.842.360.000	100	1.542.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.842.360.000		1.542.360.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	45	1.842.360.000	50	1.542.360.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				842.360.000		842.360.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	280	60.360.000	280	60.360.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	2600	782.000.000	2600	782.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.000.000.000		700.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	1.000.000.000	10	700.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90.91	1.200.000.000	100	1.200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.200.000.000		1.200.000.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	45	1.200.000.000	50	1.200.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	110	392.380.000	110	392.380.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	7	307.620.000	7	307.620.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	500.000.000	10	500.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	72.73	742.360.000	81.82	1.956.111.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					742.360.000		1.956.111.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	36	742.360.000	40	1.956.111.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				442.360.000		442.360.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	10	89.860.000	10	89.860.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	5	352.500.000	5	352.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				300.000.000		1.513.751.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	300.000.000	8	1.513.751.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90.91	742.360.000	100	742.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					742.360.000		742.360.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	45	742.360.000	50	742.360.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				534.160.000		442.360.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	85	330.450.000	85	217.780.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	625	203.710.000	625	224.580.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				208.200.000		300.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	208.200.000	10	300.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	63.64	570.000.000	63.64	570.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					570.000.000		570.000.000		
						Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	36	570.000.000	40	570.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				409.000.000		409.000.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	30	124.942.000	30	124.942.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	700	284.058.000	700	284.058.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				161.000.000		161.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	8	161.000.000	8	161.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	%	90.91	1.438.448.000	100	1.968.451.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.438.448.000		1.968.451.000		
						Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan	Jenis	11	1.438.448.000	11	1.968.451.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.02			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				738.448.000		1.268.451.000		
						Jumlah Pelayanan Perijinan	Unit	1000	561.533.000	600	1.268.451.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah SPB yang diterbitkan	Lembar	5000	176.915.000	6500		SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		3.25.03.1.06.03			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	Jenis	10	700.000.000	10	700.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0.1	38.943.249.000	0.1	4.099.158.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					36.787.249.000		2.247.609.000		
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	500322.17	36.787.249.000	502823.78	2.247.609.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.02			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				36.787.249.000		2.247.609.000		
						Jumlah KUB yang terfasilitasi	Kelompok	5	74.320.000	5	104.080.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	10000	1.394.344.000	10000	1.525.304.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran	Lokasi	11	35.118.420.000	11	328.780.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO	Lokasi	1	55.500.000	1	85.260.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI	Lokasi	1	70.345.000	1	100.105.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha	Orang	10	74.320.000	10	104.080.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2.156.000.000		1.851.549.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap	Dokumen	100	2.156.000.000	150	1.851.549.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.01			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				150.000.000		151.549.000		
						Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusun	Dokumen	1	150.000.000	1	151.549.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.25.03.1.02.03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				2.006.000.000		1.700.000.000		
						Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat	Paket	75	1.549.000.000	75	1.393.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami pengelolaan sumberdaya ikan berkenlanjutan (Orang)	Orang	250	457.000.000	1000	307.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						10.937.588.000		8.604.160.000		
						Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	%	100	1.256.320.000	100	834.720.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1.256.320.000		834.720.000		
						Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	Kasus	250	521.600.000	300	350.000.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.07			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				521.600.000		350.000.000		
						Data peredaran Obat Ikan yang Terdaftar/Belum Terdaftar	Dokumen	1	427.055.000	1	255.455.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan	Lokasi	35	54.045.000	35	54.045.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang terakses informasi pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan	Orang	350	40.500.000	350	40.500.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu	%	1	734.720.000	1	484.720.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.06			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				734.720.000		484.720.000		
						Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis	Unit	1	121.065.000	1	121.065.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling	sampel	400	86.730.000	400	86.730.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Penambahan Ruang Lingkup Pengujian	Jenis	1	526.925.000	1	276.925.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Produksi Benih	%	2	6.141.268.000	3	5.469.440.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					6.141.268.000		5.469.440.000		
						Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau)	%	60	5.441.268.000	60	4.769.440.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.05.03			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5.441.268.000		4.769.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Broodstock Center	Lokasi	3	1.002.086.000	3	1.002.086.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Benih Ikan Air Payau dan Tawar Bermutu	Ekor	8000000	343.380.000	8000000	343.380.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Jumlah Produksi Calon Induk Unggul	Ekor	7000	2.139.182.000	7000	1.667.354.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Tawar	Ton	5	1.515.120.000	5	1.515.120.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Jumlah rehabilitasi sarana prasarana loka	Unit	10	441.500.000	10	241.500.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
						Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut)	%	40	700.000.000	40	700.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.04			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah Produksi Benih Ikan Air Laut Bermutu	Ekor	14000000	140.000.000	14000000	140.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Ekor	7	422.240.000	7	422.240.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah rehabilitasi sarana prasarana loka	Unit	1	137.760.000	1	137.760.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0.2	3.540.000.000	0.2	2.300.000.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					250.000.000		300.000.000		
						Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya	Unit	3	250.000.000	3	300.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.02			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				150.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	Unit	5	75.584.000	5	58.284.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	Unit	10	59.516.000	15	129.476.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	Unit	1	14.900.000	1	12.240.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.03			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					3.290.000.000		2.000.000.000		
						Produksi Perikanan Budidaya	Ton	518522.75	3.290.000.000	521104.31	2.000.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.05			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.290.000.000		2.000.000.000		
						Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya tawar/payau/laut	Kelompok	25	3.290.000.000	25	2.000.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan partisipatif								**5.220.620.000**		**5.240.620.000**		
						Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	%	60	5.220.620.000	61	5.240.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						2.751.180.000		2.771.180.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	2.5	1.700.000.000	2.5	1.750.000.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					1.700.000.000		1.750.000.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Lokasi	1	1.700.000.000	1	1.750.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.01			Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				1.150.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah dokumen integrasi RZWP3K kedalam RTRWP dan Tindak Lanjutnya	Dokumen	1	786.450.000	1	1.000.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut	Orang	200	363.550.000	250	200.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.02.1.01.02			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				550.000.000		550.000.000		
						Jumlah aktifitas pengelolaan kawasan konservasi	Kegiatan	4	550.000.000	4	550.000.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	0.5	330.000.000	0.5	300.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					330.000.000		300.000.000		
						Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi	Ha	2	330.000.000	2	300.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				330.000.000		300.000.000		
						Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	20000	240.000.000	20000	210.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah TKB dan rumah ikan yg ditenggelamkan tahun berjalan	Unit	5	90.000.000	5	90.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	1	271.180.000	1	271.180.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					271.180.000		271.180.000		
						Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi	Ha	3	271.180.000	3	271.180.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				271.180.000		271.180.000		
						Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	30000	150.000.000	30000	150.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah TKB dan rumah ikan yg ditenggelamkan	Unit	5	121.180.000	5	121.180.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya	%	1	300.000.000	1	300.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					300.000.000		300.000.000		
						Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi	Ha	2	300.000.000	2	300.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.03			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan	Batang	20000	300.000.000	20000	300.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	50.000.000	1	50.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan	Dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.03			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	50.000.000	1	50.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.03			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya	Dokumen	10	25.200.000	1	16.020.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1	8.780.000	1	8.780.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan	Dokumen	1	16.020.000	10	25.200.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha	%	1	50.000.000	1	50.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan	Dokumen	12	50.000.000	12	50.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.03			Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi ijin usaha budidaya	Dokumen	10	44.280.000	10	44.280.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pemanfaatan ruang laut	Dokumen	1	2.860.000	1	2.860.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolahan	Dokumen	1	2.860.000	1	2.860.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.469.440.000		2.469.440.000		
						Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan (%)	%	71	1.000.000.000	72	1.000.000.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					800.000.000		800.000.000		
						Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	9	800.000.000	250	800.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pelaku usaha ruang laut yang memahami perundangan	Orang	50	16.965.000	50	16.965.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha pemanfaatan ruang laut	Kasus	3	83.035.000	20	83.035.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				500.000.000		500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memahami perundangan	Orang	100	73.225.000	100	73.225.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus Usaha perikanan tangkap	Kasus	3	426.775.000	150	426.775.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan payau dan laut yang memahami perundangan	Orang	100	34.020.000	100	34.020.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus Pembudidayaan ikan payau dan laut	Kasus	3	165.980.000	18	165.980.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan	Kasus	9	200.000.000	40	200.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang memahami perundangan	Orang	30	35.670.000	30	35.670.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha perikanan tangkap di PUD	Kasus	3	64.330.000	8	64.330.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang memahami perundangan	Orang	30	9.785.000	30	9.785.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha Pembudidayaan ikan air tawar	Kasus	3	40.215.000	15	40.215.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memahami perundangan	Orang	30	9.785.000	30	9.785.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penanganan kasus usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kasus	3	40.215.000	18	40.215.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	442.360.000	2	442.360.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					386.760.000		368.768.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	5	386.760.000	4	368.768.000	SEKSI PENGAWASAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				147.344.000		103.992.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	Orang	30	147.344.000	30	103.992.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				225.796.000		248.138.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diperiksa	Orang	30	225.796.000	30	248.138.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				13.620.000		16.638.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut yang diperiksa	Orang	30	13.620.000	30	16.638.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					55.600.000		73.592.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	5	55.600.000	4	73.592.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				22.900.000		41.491.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang diperiksa	Orang	30	22.900.000	30	41.491.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				10.260.000				
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang diperiksa	Orang	30	10.260.000	0		SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				22.440.000		32.101.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diperiksa	Orang	30	22.440.000	30	32.101.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	442.360.000	2	442.360.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					300.000.000		300.000.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	5	300.000.000	4	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	Orang	30	100.000.000	30	100.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diperiksa	Orang	30	150.000.000	30	150.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					142.360.000		142.360.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	5	142.360.000	4	142.360.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				42.360.000		42.360.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diperiksa	Orang	30	42.360.000	30	42.360.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	%	2	384.720.000	2	384.720.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					234.720.000		234.720.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	5	234.720.000	4	234.720.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.01.02			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				134.720.000		134.720.000		
						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diperiksa	Orang	30	134.720.000	30	134.720.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di laut yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	5	150.000.000	4	150.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				50.000.000		50.000.000		

						Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di PUD yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.02.02			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha Pembudidayaan ikan air tawar yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.25.05.1.02.03			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diperiksa	Orang	30	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peran aktif kelompok masyaraka pengawas dalam pengawasan sdkp	%	40	200.000.000	45	200.000.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	Kelompok	40	200.000.000	45	200.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.04			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Kelompok	80	200.000.000	90	200.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**85.551.712.000**		**61.874.700.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	80		81		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**550.000.000**		**500.000.000**		
						Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	80	550.000.000	81	500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						550.000.000		500.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	550.000.000	100	500.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					550.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	550.000.000	2	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				350.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	350.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**85.001.712.000**		**61.374.700.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka	80	85.001.712.000	81	61.374.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						85.001.712.000		61.374.700.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	610.000.000	100	610.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					505.000.000		505.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	505.000.000	1	505.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	500.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	150.000.000	100	150.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen		20.000.000		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		35.000.000		35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	114.500.000	100	114.500.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.500.000		19.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	19.500.000	1	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.600.000	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	150.000.000	100	150.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	710.000.000	100	710.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					605.000.000		605.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	605.000.000	1	605.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				600.000.000		600.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	600.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	180.000.000	100	180.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	125.000.000	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	227.000.000	100	227.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.000.000		22.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.600.000	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.000.000		185.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	185.000.000	1	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	184.500.000	100	184.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.500.000		19.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	19.500.000	1	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.600.000	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.000.000		95.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	95.000.000	1	95.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	94.000.000	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					19.000.000		19.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	19.000.000	1	19.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.600.000	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.200.000		28.200.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	28.200.000	1	28.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.200.000		23.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	23.200.000	12	23.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.800.000		46.800.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	46.800.000	1	46.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.800.000		36.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	36.800.000	12	36.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	125.000.000	100	125.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.000.000	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	410.000.000	100	410.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000		305.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	305.000.000	1	305.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	170.000.000	100	170.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.000.000		65.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					70.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	117.000.000	100	117.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					22.000.000		22.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	22.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	2.400.000	1	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	4.600.000	1	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	108.000.000	100	108.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.500.000		25.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	25.500.000	1	25.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.500.000		10.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	7.500.000	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.500.000		37.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	37.500.000	1	37.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	81.351.712.000	100	57.724.700.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.170.840.000		52.494.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	76.170.840.000	1	52.494.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				74.860.840.000		51.184.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	74.860.840.000	12	51.184.700.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.300.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	0		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	0		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah								
						Jumlah laporan pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	0		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	0		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					280.000.000		280.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	280.000.000	1	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	250.000.000	30	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0		300		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	0		20		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.475.300.000		1.495.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.475.300.000	1	1.495.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				365.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	215.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				615.300.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	615.300.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.135.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1.135.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0		2	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				565.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	565.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				270.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	270.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.660.572.000		1.775.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.660.572.000	1	1.775.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				885.572.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	885.572.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					530.000.000		580.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	530.000.000	1	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		300.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	250.000.000	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan pertumbuhan laju PDRB ADHK (atas harga konstan) sub sektor peternakan									**62.364.088.000**		**62.880.768.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	Nilai	5.5		5.5		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya produksi daging, susu dan telur								**62.364.088.000**		**62.880.768.000**		
						Persentase kenaikan produksi daging, susu dan telur	%	3.92	62.364.088.000	4.06	62.880.768.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						28.682.003.000		28.708.683.000		
						Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	3819014	16.622.000.000	4013001	16.622.000.000	Bidang Budidaya	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					6.589.000.000		6.589.000.000		
						Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak	%	1	6.589.000.000	1	6.589.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.03.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				6.589.000.000		6.589.000.000		
						Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak	Kelompok	62	6.589.000.000	68	6.589.000.000	SEKSI PRODUKSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					10.033.000.000		10.033.000.000		
						Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan Pakan ternak	Kelompok	20	4.872.000.000	20	4.872.000.000	SEKSI PAKAN TERNAK	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				4.872.000.000		4.872.000.000		
						Jumlah Pakan ternak yang difasilitasi	Kg	10000	4.713.870.000	12000	4.713.870.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak	Laporan	10	158.130.000	11	158.130.000	SEKSI PAKAN TERNAK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak	%	1	5.161.000.000	1	5.161.000.000	SEKSI PERBIBITAN	
		3.27.02.1.04.02			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				5.161.000.000		5.161.000.000		
						Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan ternak	Kelompok	14	5.161.000.000	15	5.161.000.000	SEKSI PERBIBITAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan	%	1	920.000.000	1	920.000.000	Bidang Veteriner	
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor					920.000.000		920.000.000		
						Jumlah distributor obat hewan yang sesuai standar	Unit	5	920.000.000	5	920.000.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	
		3.27.02.1.06.01			Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				920.000.000		920.000.000		
						Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan	Kali	5	70.000.000	5	70.000.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengawasan Obat hewan dan produk hewan	Unit	5	850.000.000	5	850.000.000	SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	1	5.269.545.000	1	5.296.225.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					5.269.545.000		5.296.225.000		
						Jumlah Produksi semen Beku	Dosis	500000	1.796.225.000	500000	1.796.225.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	
		3.27.02.1.04.02			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1.796.225.000		1.796.225.000		
						Jumlah semen beku yang terdistribusi	Dosis	425000	219.050.000	450000	219.050.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	Ekor	38	1.577.175.000	39	1.577.175.000	SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						S/C hasil IB dari straw produksi BIB Ungaran	Nilai	2	3.473.320.000	2	3.500.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3.473.320.000		3.500.000.000		
						Jumlah ternak bunting dari IB Straw BIB Ungaran	Ekor	50000	3.473.320.000	50000	3.500.000.000	SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan produksi ternak	%	1	5.870.458.000	1	5.870.458.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi					5.870.458.000		5.870.458.000		
						Jumlah produksi ternak nonruminansia	(ST)/(AU)	185	2.406.086.000	188	2.406.086.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2.406.086.000		2.406.086.000		
						Jumlah produksi telur	Butir	476280	1.015.350.000	500094	1.015.350.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah produksi ternak nonruminansia	Ekor	44945	1.390.736.000	45630	1.390.736.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah produksi ternak ruminansia	(ST)/(AU)		3.464.372.000		3.464.372.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	
		3.27.02.1.04.01			Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3.464.372.000		3.464.372.000		
						Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB	Ekor	60	1.150.995.000	65	1.150.995.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah produksi susu	Liter	37000	1.101.270.000	38000	1.101.270.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Jumlah produksi ternak ruminansia	Ekor	152	1.212.107.000	154	1.212.107.000	SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						5.310.000.000		5.310.000.000		
						Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	1	5.310.000.000	1	5.310.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Penataan Prasarana Pertanian					5.310.000.000		5.310.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi	Unit	10	1.181.000.000	10	1.181.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	
		3.27.03.1.01.02			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1.181.000.000		1.181.000.000		
						Jumlah pengolahan dan pemasaran yang terfasilitasi	Unit	10	1.181.000.000	10	1.181.000.000	SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang terfasilitasi	Orang	100	4.129.000.000	100	4.129.000.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.27.03.1.01.09			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4.129.000.000		4.129.000.000		
						Jumlah inovasi peternakan yang terfasilitasi	Unit	8	1.514.500.000	8	1.514.500.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah prasarana peternakan yang terfasilitasi	Unit	8	2.614.500.000	8	2.614.500.000	SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						15.741.085.000		16.231.085.000		
						Persentase penurunan pemotongan betina produktif	%	10	500.000.000	10	600.000.000	Bidang Veteriner	
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					500.000.000		600.000.000		
						Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif	Ekor	500	500.000.000	500	600.000.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.01			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				500.000.000		600.000.000		
						Jumlah pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif	Ekor	500	500.000.000	500	600.000.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	1.240.000.000	5	1.240.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					1.240.000.000		1.240.000.000		
						IK: Tingkat Kepuasan Pelanggan	%	81	1.240.000.000	81	1.240.000.000	Balai veteriner semarang	
		3.27.04.1.02.02			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1.240.000.000		1.240.000.000		
						Jumlah Pengawasan lalulintas hewan di Jawa Tengah Utara	(ST)/(AU)	500000	250.000.000	500000	250.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji di Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	Kali	23800	790.000.000	24500	790.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak yang terlayani Kesehatan hewan Wilayah Jateng Utara	Ekor	13550	200.000.000	13850	200.000.000	Balai veteriner semarang	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	12.641.085.000	5	12.841.085.000	Bidang Veteriner	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					12.141.085.000		12.141.085.000		
						Persentase laporan penyakit yang tertangani	%	75	12.141.085.000	75	12.141.085.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.1.01.01			Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				12.141.085.000		12.141.085.000		
						Jumlah Laporan Kasus Penyakit yang direspon	Laporan	255571	800.000.000	258981	800.000.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis	Buah	1	11.341.085.000	1	11.341.085.000	SEKSI KESEHATAN HEWAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan					500.000.000		700.000.000		
						Jumlah produk hewan yang terjamin Mutu dan keamanannya	Buah	10	500.000.000	10	700.000.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		3.27.04.1.03.01			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				500.000.000		700.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	Unit	20	500.000.000	20	700.000.000	SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	5	1.360.000.000	5	1.550.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi					1.360.000.000		1.550.000.000		
						Tingkat Kepuasan Pelanggan	Nilai	81	1.360.000.000	81	1.550.000.000	Balai veteriner boyolali	
		3.27.04.1.02.02			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1.360.000.000		1.550.000.000		
						Jumlah Pengawasan lalulintas hewan di Jawa Tengah Selatan	(ST)/(AU)	500000	210.000.000	500000	300.000.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji di Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	Kali	27800	850.000.000	28600	850.000.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ternak yang terlayani Kesehatan hewan Wilayah Jateng Selatan	Ekor	13750	300.000.000	14000	400.000.000	Balai veteriner boyolali	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						12.631.000.000		12.631.000.000		
						Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	14	12.631.000.000	15	12.631.000.000	Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					12.631.000.000		12.631.000.000		
						Jumlah Kelompok Ternak yang Terfasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan	Kelompok	35	12.631.000.000	35	12.631.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani				12.631.000.000		12.631.000.000		
						Jumlah Kelompok yang Didampingi Pengembangan Penguatan kelembagaan dan kemitraan peternakan	Kelompok	32	11.551.000.000	37	11.551.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peternak yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	500	1.080.000.000	500	1.080.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**62.381.461.000**		**67.484.777.000**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80		80		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**1.459.500.000**		**1.459.500.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	1.459.500.000	71	1.459.500.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.459.500.000		1.459.500.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	1.459.500.000	100	1.459.500.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.459.500.000		1.459.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	16	1.459.500.000	16	1.459.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				733.600.000		733.600.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	10	733.600.000	10	733.600.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				725.900.000		725.900.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	6	725.900.000	6	725.900.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**60.921.961.000**		**66.025.277.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80	60.921.961.000	80	66.025.277.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						60.921.961.000		66.025.277.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	41.754.904.000	100	45.064.904.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.419.829.000		29.419.829.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	29.419.829.000	2	29.419.829.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				29.100.629.000		29.100.629.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	29.100.629.000	12	29.100.629.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				274.200.000		274.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	274.200.000	12	274.200.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	2		2		SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					528.850.000		528.850.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	528.850.000	1	528.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	450.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				18.850.000		18.850.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	1	18.850.000	1	18.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					105.000.000		105.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	1	105.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah								
						Jumlah laporan pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				105.000.000		105.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	1	105.000.000	1	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					295.000.000		495.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	295.000.000	1	495.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Paket	100		100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				155.000.000		155.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	100	155.000.000	100	155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				140.000.000		140.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	140.000.000	20	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.924.350.000		1.874.350.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.924.350.000	1	1.874.350.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.500.000		200.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	5	60.500.000	5	60.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	5	140.000.000	5	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000.000		450.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	350.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	175.000.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				240.000.000		140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	240.000.000	12	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				733.850.000		733.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	733.850.000	12	733.850.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.316.275.000		3.586.275.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	2.316.275.000	1	3.586.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	2		2	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	4		4		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.04			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						300.000.000		
						Jumlah Unit pengadaan Alat Angkutan Darat tak bermotor	Unit	5		5	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				400.000.000		400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Paket	10	400.000.000	10	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	700.000.000	1	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya						200.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1		1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud						70.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1		1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				866.275.000		866.275.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	866.275.000	1	866.275.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	350.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.366.000.000		4.366.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	4.366.000.000	1	4.366.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19.500.000		19.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	19.500.000	12	19.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				778.000.000		778.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	778.000.000	12	778.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				490.000.000		490.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	490.000.000	12	490.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.078.500.000		3.078.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	3.012.100.000	12	3.012.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	66.400.000	1	66.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.799.600.000		4.689.600.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2.799.600.000	1	4.689.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	700.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12		12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.04			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Bulan	12		12	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				379.600.000		379.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	379.600.000	12	379.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12		12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				905.000.000		905.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	905.000.000	12	905.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				605.000.000		605.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	605.000.000	12	605.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	6.736.737.000	100	6.844.113.000	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.399.621.000		1.451.077.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.399.621.000	1	1.451.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				80.000.000		88.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	80.000.000	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				176.500.000		176.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	46.800.000	1	46.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	129.700.000	1	129.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				92.054.000		92.054.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	92.054.000	12	92.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				459.523.000		459.523.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	459.523.000	12	459.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				172.350.000		175.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	172.350.000	12	175.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				92.250.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	92.250.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		330.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	300.000.000	12	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				26.944.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	26.944.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.070.000.000		1.070.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1.070.000.000	1	1.070.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1	700.000.000	1	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				370.000.000		370.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	370.000.000	1	370.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.744.616.000		2.789.536.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	2.744.616.000	1	2.789.536.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.200.000		20.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	15.200.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	250.000.000	12	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.880.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	34.880.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.444.536.000		2.444.536.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.284.400.000	12	2.284.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	160.136.000	1	160.136.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.522.500.000		1.533.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.522.500.000	1	1.533.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.700.000		113.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	113.700.000	12	113.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				297.000.000		297.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	297.000.000	12	297.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				330.000.000		340.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	330.000.000	12	340.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				700.000.000		700.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	700.000.000	1	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				71.800.000		71.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	71.800.000	12	71.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.313.800.000	100	3.405.800.000	Balai veteriner boyolali	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					755.000.000		805.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	755.000.000	1	805.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	300.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	25.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					725.000.000		725.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	725.000.000	1	725.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1	350.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		350.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	350.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.173.800.000		1.194.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	1.173.800.000	1	1.194.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				823.800.000		824.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	813.800.000	12	813.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	10.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					660.000.000		681.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	660.000.000	1	681.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	80.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	5.748.720.000	100	6.647.660.000	Balai Inseminasi Buatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.212.820.000		1.521.180.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.212.820.000	1	1.521.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				80.000.000		88.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	80.000.000	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				284.500.000		284.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	206.500.000	1	206.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	78.000.000	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				103.680.000		103.680.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	103.680.000	12	103.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				287.660.000		550.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	287.660.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				106.980.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	106.980.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	250.000.000	12	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.420.000.000		1.805.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	1.420.000.000	1	1.805.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1.100.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1	1.100.000.000	1	1.000.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				70.000.000		55.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1	70.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		700.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	200.000.000	1	700.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.438.800.000		1.483.880.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	1.438.800.000	1	1.483.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.840.000		55.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.840.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	260.000.000	12	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.119.960.000		1.098.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.104.960.000	12	998.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	15.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.677.100.000		1.837.600.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.677.100.000	1	1.837.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		220.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	200.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				481.600.000		481.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	481.600.000	12	481.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				410.500.000		550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	410.500.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				310.000.000		310.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	310.000.000	1	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				265.000.000		265.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	265.000.000	12	265.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	3.367.800.000	100	4.062.800.000	Balai veteriner semarang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					785.000.000		1.118.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	785.000.000	1	1.118.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	40.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000		140.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Paket	1	50.000.000	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Paket	1	40.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	80.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				400.000.000		600.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	400.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	80.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	20.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					320.000.000		320.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	320.000.000	1	320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.552.800.000		1.553.800.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	1.552.800.000	1	1.553.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	50.000.000	121	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.202.800.000		1.203.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.192.800.000	12	1.192.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Paket	1	10.000.000	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.000.000		1.071.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	710.000.000	1	1.071.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				200.000.000		550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	200.000.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		110.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Paket	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Memantapkan produksi pertanian dan pertanian berkelanjutan									**67.021.800.000**		**79.300.715.000**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan	%	1.12		1.15		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan								**8.393.658.000**		**6.000.000.000**		
						Jumlah Peningkatan SDM Pertanian	Angka	3600	8.393.658.000	3690	6.000.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						8.393.658.000		6.000.000.000		
						Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	7	6.393.658.000	7	4.000.000.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					3.196.829.000		500.000.000		
						- Peningkatan SDM Penyuluhan bidang pertanian	Orang	250	3.196.829.000	1500	500.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
		3.27.07.1.01.01			Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN				3.196.829.000		500.000.000		
						Adopsi teknologi	Orang	1630	2.796.829.000	250	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
						Penyuluh yang ditingkatkan kapasitas nya	Orang	250	200.000.000	1250	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
						Penyusunan programa penyuluhan	Dokumen	1	50.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
						Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh	Dokumen	1	50.000.000	1	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
						Terinputnya data petani di simluhtan dan e-RDKK	Kabupaten/ Kota	35	100.000.000	35	100.000.000	SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					3.196.829.000		3.500.000.000		
						- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (Kelompok	Kelompok	40	1.396.829.000	40	1.500.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani				1.396.829.000		1.500.000.000		
						Kelompok petani tembakau dengan pengembangan usaha terpadu	Kelompok	40	1.396.829.000	40	1.500.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Fasilitasi Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha	Kelompok	30	1.300.000.000	30	1.500.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani				1.300.000.000		1.500.000.000		
						Kelompok petani tembakau melalui pengembangan kemitraan usaha	Kelompok	30	1.300.000.000	30	1.500.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Penumbuhan dan pengembangan korporasi	Unit	3	500.000.000	6	500.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.07.1.03.01			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani				500.000.000		500.000.000		
						Pembentukan dan pengembangan korporasi	Unit	3	500.000.000	3	500.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					2.000.000.000		2.000.000.000		
						Tercapainya sasaran teknis Sumberdaya Manusia Pertanian	Orang	750	940.000.000	960	1.000.000.000	SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI	
		3.27.07.1.02.02			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				940.000.000		1.000.000.000		
						Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM Pertanian	Orang	750	940.000.000	960	1.000.000.000	SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI	
						Terlatihnya sumberdaya manusia pertanian	Orang	480	1.060.000.000	2190	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.27.07.1.02.02			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				1.060.000.000		1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Pertanian	Orang	480	1.060.000.000	2190	1.000.000.000	SEKSI PELATIHAN	
	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan								**58.628.142.000**		**73.300.715.000**		
						Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	11.6	58.628.142.000	11.6	73.300.715.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						53.049.570.000		67.550.715.000		
						Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.150.000.000		2.150.000.000		
						Pengawasan peredaran benih	Bulan	12	750.000.000	12	850.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				210.000.000		200.000.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	Bulan	12	210.000.000	12	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				380.000.000		200.000.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	Bulan	12	380.000.000	12	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.04			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				160.000.000		450.000.000		
						Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	Bulan	12	80.000.000	12	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Tersedianya benih tanaman perkebunan	Batang	775000	80.000.000	800000	250.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Pengujian laboratorium	Lembar	110	110.000.000	110	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				110.000.000		300.000.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	Lembar	1010	110.000.000	1015	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Pengujian laboratprium	Lembar	1010	60.000.000	1015	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.01			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				60.000.000		200.000.000		
						Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	Lembar	110	60.000.000	110	200.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Sertifikasi benih hortikultura sayuran	Ha	100	300.000.000	60	250.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				300.000.000		250.000.000		
						Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	Ton	465000	200.000.000	470000	100.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	Ton	505	100.000.000	385	150.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Sertifikasi benih padi	Ha	5400	780.000.000	5500	250.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				780.000.000		250.000.000		
						Tersedianya benih padi bersertifikat	Ton	15930	780.000.000	16225	250.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Sertifikasi Benih palawija	Ha	1050	150.000.000	5500	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				150.000.000		300.000.000		
						Tersedianya benih palawija bersertifikat	Ton	1260	150.000.000	1320	300.000.000	SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase Penambahan Jumlah Alsintan	%	1.98	14.145.000.000	1.98	14.100.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					14.145.000.000		14.100.000.000		
						- Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan	Ha	75	600.000.000	75	500.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				600.000.000		500.000.000		
						Pupuk organik mendukung optimasi lahan pertanian dan perkebunan	Ton	150	600.000.000	150	500.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Penambahan sarana pra panen	Unit	100	12.545.000.000	100	12.750.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				12.545.000.000		12.750.000.000		
						Alat mesin pertanian	Unit	295	12.545.000.000	100	12.750.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
						Pengembangan/pembinaan kelembagaan UPJA dan bengkel	Unit	100	1.000.000.000	100	850.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.000.000.000		850.000.000		
						Pengembangan/pembinaan SDM UPJA dan bengkel	Orang	220	1.000.000.000	300	850.000.000	SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
						Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan usaha tani di Jawa Tengah	%	5	1.565.000.000	5	1.000.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.565.000.000		1.000.000.000		
						Asuransi pertanian	Ha	15000	1.565.000.000	21000	1.000.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1.465.000.000		900.000.000		
						Premi asuransi pertanian	Ha	15000	1.465.000.000	21000	900.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				100.000.000		100.000.000		
						Koordinasi pelaksanaan kegiatan Asuransi Pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Kabupaten/Kota	1	50.000.000	30	50.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Pembinaan/monitoring/Evaluasi Asuransi Pertanian	Kabupaten/Kota	1	50.000.000	29	50.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil	%	2.5	5.107.057.000	2.5	11.500.000.000	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					5.107.057.000		11.500.000.000		
						Informasi harga pasar	Kabupaten/Ko	35	300.000.000	35	200.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				300.000.000		200.000.000		
						Terfasilitasinya petugas informasi pasar komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kabupaten/Kota	35	300.000.000	35	200.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil	Kelompok	200	4.507.057.000	200	11.100.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				4.507.057.000		11.100.000.000		
						Alat pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit	84	3.907.057.000	400	10.700.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Alat pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura	Unit	2	275.000.000	3	200.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Alat pasca panen tanaman pangan	Unit	2	325.000.000	10	200.000.000	SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU	
						Starup kewirausahaan	Unit	6	300.000.000	35	200.000.000	SEKSI BINA USAHA	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				300.000.000		200.000.000		
						Jumlah startup kewirausahaan pertanian yang tumbuh	Unit	6	300.000.000	35	200.000.000	SEKSI BINA USAHA	
						Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe	%	10.8	1.835.000.000	10.8	995.000.000	Bidang Hortikultura	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.835.000.000		995.000.000		
						Pengembangan Bawang merah	Ha	2	218.800.000	2	95.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				218.800.000		95.000.000		
						Benih bawang merah	Ton	2	218.800.000	2	95.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Pengembangan Buah durian	Ha	10	60.000.000	15	100.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				60.000.000		100.000.000		
						Benih Durian	Batang	1000	60.000.000	1500	100.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Pengembangan Buah Lainnya	Ha	20	575.000.000	35	200.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				575.000.000		200.000.000		
						Benih Buah Lainnya	Batang	13625	575.000.000	17625	200.000.000	SEKSI TANAMAN BUAH	
						Pengembangan Cabe	Ha	15	91.000.000	15	100.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				91.000.000		100.000.000		
						Benih Cabe	Ha	15	91.000.000	15	100.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Pengembangan jahe	Ha	4	170.000.000	4	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				170.000.000		100.000.000		
						Benih jahe	Ton	2.8	170.000.000	2.8	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Pengembangan melati	Ha	1	80.000.000	1	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				80.000.000		100.000.000		
						Benih melati	Batang	10000	80.000.000	10000	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Pengembangan Sayuran lainnya	Ha	6	385.200.000	6	100.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				385.200.000		100.000.000		
						Benih Sayuran Lainnya	Kg	6000	385.200.000	6000	100.000.000	SEKSI TANAMAN SAYURAN	
						Pengembangan Tanaman Hias Lainnya	Ha	4	166.000.000	4	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				166.000.000		100.000.000		
						Benih Tanaman Hias Lainnya	Ton	4	166.000.000	4	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Pengembangan Tanaman obat Lainnya	Ha	1	89.000.000	1	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				89.000.000		100.000.000		
						Benih Tanaman Obat Lainnya	Ton	1	89.000.000	1	100.000.000	SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT	
						Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	3	1.910.000.000	3	2.000.000.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.910.000.000		2.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (lokasi kebun dinas)	Lokasi	15	910.000.000	33	750.000.000	SEKSI PRODUKSI	
		3.27.02.1.02.04			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				910.000.000		750.000.000		
						Peremajaan/penambahan /penggantian tanaman , tumpangsari/tanaman sela/ tanaman musiman	Lokasi	15	910.000.000	33	750.000.000	SEKSI PRODUKSI	
						Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan	Lokasi	1	750.000.000	1	750.000.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.04			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				750.000.000		750.000.000		
						Terbangunnya calon kebun induk tanaman perkebunan	Lokasi	1	750.000.000	1	750.000.000	SEKSI BENIH	
						Perbanyakan benih tanaman perkebunan	Batang	12000	250.000.000	146000	500.000.000	SEKSI BENIH	
		3.27.02.1.02.04			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan				250.000.000		500.000.000		
						Tersedianya benih tanaman perkebunan siap tanam	Batang	12000	250.000.000	146000	500.000.000	SEKSI BENIH	
						Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	1.5	3.000.000.000	1.5	2.250.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.000.000.000		2.250.000.000		
						Pengembangan tanaman hias	Batang	2000	50.000.000	3000	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				50.000.000		150.000.000		
						Jumlah produksi tanaman hias	Batang	2000	50.000.000	3000	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan bawang merah	Ha	1	120.000.000	3	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				120.000.000		150.000.000		
						Jumlah produksi benih bawang merah	Ton	5	120.000.000	15	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan benih buah-buahan	Pohon	1000	830.000.000	5000	450.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				830.000.000		450.000.000		
						Jumlah produksi benih buah-buahan	Batang	1000	830.000.000	5000	450.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan benih padi	Ha	72	1.736.400.000	84	500.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				1.736.400.000		500.000.000		
						Jumlah produksi benih padi	Ton	144.3	1.736.400.000	306.9	500.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan palawija	Ha	8	263.600.000	21	350.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				263.600.000		350.000.000		
						Jumlah produksi benih palawija	Ton	6.8	263.600.000	18	350.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Revitalisasi Kebun	Unit	0		2	650.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						650.000.000		
						Jumlah kebun benih yang direvitalisasi	Unit	0		2	650.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	1.5	3.080.000.000	1.5	2.250.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.080.000.000		2.250.000.000		
						Pengembangan sayuran	Ha	0.3	100.000.000	3	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	1	100.000.000	0.1	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Pengembangan tanaman hias	Batang	0.1	100.000.000	12500	200.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				100.000.000		200.000.000		
						Jumlah produksi tanaman hias	Batang	10000	100.000.000	4000	200.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan Benih Padi	Ha	70	2.080.000.000	96.5	800.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				2.080.000.000		800.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Produksi benih Padi	Ton	259	2.080.000.000	210	800.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan Benih sayuran	Ha	0.7	100.000.000	0.7	200.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				100.000.000		200.000.000		
						Jumlah produksi sayuran	Ton	0.6	100.000.000	1	200.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan /pengembangan benih buah-buahan	Batang	6000	700.000.000	7300	200.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				700.000.000		200.000.000		
						Jumlah produksi benih buah	Batang	6000	700.000.000	5000	200.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan/pengembangan palawija	Ha	0		6	700.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						700.000.000		
						Jumlah kebun benih yang diperbaiki	Unit	0		0	200.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Jumlah Produksi benih Palawija	Ton	0		2	500.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	1.5	3.000.000.000	1.5	2.250.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					3.000.000.000		2.250.000.000		
						Perbanyakan benih kedelai	Ha	2	36.133.000	2	200.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				36.133.000		200.000.000		
						Jumlah produksi benih kedelai	Ton	2.4	36.133.000	2.4	200.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan benih padi	Ha	67	1.963.867.000	67	800.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan				1.963.867.000		800.000.000		
						Jumlah produksi benih padi	Ton	254.6	1.963.867.000	254.6	800.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Perbanyakan benih sayuran	Ha	3	462.213.000	3	600.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				462.213.000		600.000.000		
						Jumlah produksi benih kultur jaringan	Unit	5000	118.342.000	5000	500.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Jumlah produksi benih sayuran	Ton	15	343.871.000	15	100.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Perbanyakan tanaman buah	Unit	15	537.787.000	15	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				537.787.000		150.000.000		
						Jumlah produksi tanaman buah	Batang	15000	537.787.000	15000	150.000.000	SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Revitalisasi kebun benih hortikultura	Unit	0		0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
		3.27.02.1.02.02			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura								
						Jumlah kebun benih hortikultura yang direvitalisasi	Unit	0		0		SEKSI BENIH HORTIKULTURA	
						Revitalisasi kebun benih tanaman pangan	Unit	2		0	500.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
		3.27.02.1.02.03			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						500.000.000		
						Jumlah kebun benih tanaman pangan yang direvitalisasi	Unit	2		2	500.000.000	SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN	
						Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa	%	3.1	15.217.513.000	3.1	27.955.715.000	Bidang Perkebunan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					15.217.513.000		27.955.715.000		
						Fasilitasi sarana penanaman dan intensifikasi tebu	Ha	350	550.000.000	750	100.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				550.000.000		100.000.000		
						Bantuan pupuk anorganik yang diberikan	Ton	70000	550.000.000	450	100.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kelapa	Ha	100	450.002.000	200	100.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				450.002.000		100.000.000		
						Benih kelapa yang diberikan	Batang	6500	450.002.000	19995	100.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman kopi	Ha	100	500.000.000	170	400.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				500.000.000		400.000.000		
						Benih kopi arabika yang diberikan	Batang	14000		21000	300.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih kopi yang diberikan	Batang	26000	500.000.000	170000	100.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman rempah dan penyegar lainnya	Ha	0		175	450.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						450.000.000		
						Jumlah benih cengkeh yang diberikan	Batang	0		11500	100.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih kakao yang diberikan	Batang	0		8000	100.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih lada yang diberikan	Batang	0		10000	100.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih pala yang diberikan	Batang	0		1000	100.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Jumlah benih teh yang diberikan	Batang	0		200000	50.000.000	SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR	
						Fasilitasi sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya	Ha	0		125	150.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						150.000.000		
						Benih jambu mete yang diberikan	Batang	0		10000	50.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
						Benih karet yang diberikan	Batang	0		2500	100.000.000	SEKSI TANAMAN TAHUNAN	
						Fasiltasi sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya	Ha	2500	13.717.511.000	2720	26.755.715.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				13.717.511.000		26.755.715.000		
						Benih nilam yang diberikan	Batang	0		400000	50.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Benih vanili yang diberikan	Batang	0	275.000.000	20000	50.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Pupuk anorganik yang diberikan	Ton	750000	13.142.511.000	1202	26.455.715.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Pupuk organik yang diberikan	Ton	0	300.000.000	120000	200.000.000	SEKSI TANAMAN SEMUSIM	
						Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai	%	2.9	1.940.000.000	2.9	1.000.000.000	Bidang Tanaman Pangan	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					1.940.000.000		1.000.000.000		
						Pengembangan Jagung dan serealia	Ha	800	665.000.000	800	300.000.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				665.000.000		300.000.000		
						Benih jagung dan serealia yang diberikan	Kg	12000	665.000.000	12000	300.000.000	SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA	
						Pengembangan kedelai	Ha	330	575.000.000	600	200.000.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				575.000.000		200.000.000		
						Benih kedelai yang diberikan	Kg	22500	575.000.000	22500	200.000.000	SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI	
						Pengembangan Padi	Ha	2000	700.000.000	2000	500.000.000	SEKSI PADI	
		3.27.02.1.01.01			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				700.000.000		500.000.000		
						Benih padi yang diberikan	Kg	50000	700.000.000	50000	500.000.000	SEKSI PADI	
						Persentase penyaluran pupuk subsidi	%	100	100.000.000	100	100.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					100.000.000		100.000.000		
						Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubdidi (Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota	35	100.000.000	35	100.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
		3.27.02.1.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				100.000.000		100.000.000		
						Koordinasi pelaksanaan kegiatan pupuk subsidi	Kali	1	50.000.000	8	50.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	
						Pembinaan/monitoring/evaluasi penyaluran pupuk subsidi	Kabupaten/Kota	1	50.000.000	35	50.000.000	SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						4.125.000.000		3.750.000.000		
						Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	%	0.5	4.125.000.000	0.5	3.750.000.000	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	
				Penataan Prasarana Pertanian					4.125.000.000		3.750.000.000		
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Unit	8	4.125.000.000	8	3.750.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.03.1.01.01			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4.125.000.000		3.750.000.000		
						Luas lahan yang terairi jaringan irigasi tersier	Ha	200	1.125.000.000	225	750.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
						Sarana irigasi	Unit	80	3.000.000.000	85	3.000.000.000	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						1.453.572.000		2.000.000.000		
						Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT)	%	0.15	1.453.572.000	0.15	2.000.000.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					1.453.572.000		2.000.000.000		
						Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Unit	40	400.000.000	50	500.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				400.000.000		500.000.000		
						Gerakan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Unit	35	400.000.000	50	500.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Unit	134	500.000.000	148	900.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				500.000.000		900.000.000		
						Gerakan pengendali OPT Tanaman Pangan	Unit	134	500.000.000	148	900.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
						Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Unit	40	300.000.000	50	400.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				300.000.000		400.000.000		
						Gerakan pengendalian OPT Perkebunan	Unit	45	300.000.000	50	400.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
						Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida nabati	Kg	3500	253.572.000	3600	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				253.572.000		200.000.000		
						Perbanyakan Agens pengendali hayati dan pestisida nabati	Kg	3500	253.572.000	3600	200.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**103.744.023.000**		**145.545.378.000**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	63.5		64		Dinas Pertanian dan Perkebunan	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**610.000.000**		**832.687.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76	610.000.000	76.2	832.687.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						610.000.000		832.687.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	610.000.000	100	832.687.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					610.000.000		832.687.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	8	610.000.000	8	832.687.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		632.687.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	6	400.000.000	6	632.687.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				210.000.000		200.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	2	210.000.000	2	200.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**103.134.023.000**		**144.712.691.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	63.5	103.134.023.000	64	144.712.691.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						103.134.023.000		144.712.691.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	555.000.000	100	555.000.000	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	40.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					72.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	72.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	32.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					329.000.000		430.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	329.000.000	1	430.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.600.000		325.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik	Bulan	12	129.600.000	12	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				194.400.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	194.400.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	114.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				114.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	114.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	515.000.000	100	5.173.099.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	3.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	3.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	88.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	25.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000				
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000		390.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	305.000.000	1	390.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	165.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				135.000.000		135.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	135.000.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.000.000		4.688.099.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	119.000.000	1	4.688.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.658.099.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		1	4.658.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	29.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	405.000.000	100	405.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.000.000		60.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					275.000.000		275.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	275.000.000	1	275.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	450.000.000	100	450.000.000	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	5.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	5.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					80.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	80.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					314.000.000		325.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	314.000.000	1	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.000.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	210.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000		90.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	100.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	51.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	21.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	520.000.000	100	520.000.000	Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					65.000.000		65.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	65.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	20.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					405.000.000		405.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	405.000.000	1	405.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	121	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	610.000.000	100	610.000.000	BALAI PELATIHAN PERTANIAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					69.300.000		70.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	69.300.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	20.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.300.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	4.300.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000		480.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	305.000.000	1	480.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		375.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	375.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.700.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	235.700.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.700.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	25.700.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000				
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	75.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	585.000.000	100	545.000.000	Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	0		0	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.000.000		65.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	0		0	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					300.000.000		430.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	430.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		325.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	325.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				95.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	95.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	235.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	5.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000				
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	200.000.000	1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	99.494.023.000	100	136.454.592.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					97.038.956.000		133.644.592.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	97.038.956.000	1	133.644.592.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				93.538.956.000		129.844.592.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	93.538.956.000	12	129.844.592.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.500.000.000		3.800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	3.500.000.000	12	3.800.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					35.000.000		35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	50		50		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						'Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	40		40		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					255.000.000		560.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	255.000.000	1	560.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	200.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	2		2		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5		5		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5		5		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.715.000.000		1.715.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.715.000.000	1	1.715.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				900.000.000		900.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik	Bulan	12	900.000.000	12	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.000.000		750.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	750.000.000	12	750.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					450.067.000		500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	450.067.000	1	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.067.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	300.067.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**51.006.873.000**		**54.103.727.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Nilai kepuasan masyarakat	%	87		88.5		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**805.158.000**		**755.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80.5	805.158.000	81	755.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						805.158.000		755.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	805.158.000	100	755.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					805.158.000		755.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	27	805.158.000	27	755.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				518.500.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9	518.500.000	9	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				286.658.000		255.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	18	286.658.000	18	255.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**50.201.715.000**		**53.348.727.000**		
						Nilai kepuasan masyarakat	%	87	50.201.715.000	88.5	53.348.727.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						50.201.715.000		53.348.727.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.054.920.000	100	782.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.500.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	48.500.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.500.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	48.500.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.170.000		291.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	309.170.000	1	291.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				67.500.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	52.500.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.400.000		17.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.400.000	12	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.200.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	31.200.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		11.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	11.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				146.070.000		135.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	146.070.000	12	135.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					210.650.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	210.650.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				210.650.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	210.650.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					292.500.000		313.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	292.500.000	1	313.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				204.500.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	204.500.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.100.000		77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	194.100.000	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.600.000		2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.600.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				145.500.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	145.500.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	37.771.973.000	100	42.766.300.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					30.769.773.000		36.575.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.769.773.000	1	36.575.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.161.973.000		36.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	30.161.973.000	12	36.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				332.200.000		325.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	332.200.000	12	325.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				87.600.000		70.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	87.600.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				148.000.000		140.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Dokumen	12	148.000.000	12	140.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					360.000.000		360.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Dokumen	1	360.000.000	1	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				335.000.000		335.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	335.000.000	12	335.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					419.800.000		249.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	419.800.000	1	249.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				70.000.000				
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	210	70.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				89.800.000		89.800.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	89.800.000	12	89.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		100.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	200.000.000	20	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	15	30.000.000	15	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	10	30.000.000	10	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.937.200.000		1.934.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1.937.200.000	1	1.934.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				207.700.000		150.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	162.700.000	5	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	45.000.000	10	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	24.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				52.500.000		22.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	52.500.000	12	22.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				43.000.000		73.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	43.000.000	12	73.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				920.000.000		975.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	920.000.000	12	975.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					860.000.000		430.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	860.000.000	1	430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				720.000.000				
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	1	720.000.000	0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		5	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				140.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3	140.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.480.200.000		2.532.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Dokumen	1	2.480.200.000	1	2.532.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				525.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	525.000.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.873.200.000		1.950.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.873.200.000	12	1.950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					945.000.000		685.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	945.000.000	1	685.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	0		12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	350.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				315.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	315.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	889.200.000	100	892.200.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.040.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.040.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.040.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.040.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					298.660.000		268.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	298.660.000	1	268.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				55.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1	15.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	40.000.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.860.000		15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	14.860.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.100.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.100.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.700.000		10.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.700.000	12	10.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	170.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					420.500.000		446.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	420.500.000	1	446.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.000.000		88.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	88.000.000	12	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				324.500.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	324.500.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					75.000.000		77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	75.000.000	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	936.250.000	100	689.500.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					123.750.000		127.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	123.750.000	1	127.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.750.000		10.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	6.750.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.000.000		17.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	17.000.000	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					300.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	5	300.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					362.500.000		362.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	362.500.000	1	362.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		1.300.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.300.000	12	1.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				361.200.000		361.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	361.200.000	12	361.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	737.600.000	100	825.100.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					217.240.000		264.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	217.240.000	1	264.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.000.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	30.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	24.000.000	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.200.000		13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.200.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				23.540.000		28.800.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	23.540.000	12	28.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.500.000		8.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.500.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000		7.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.000.000	12	7.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.000.000		118.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	99.000.000	12	118.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					47.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	47.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	47.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.100.000		378.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	350.100.000	1	378.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				262.100.000		290.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	262.100.000	12	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.260.000		82.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	73.260.000	1	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	25.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.760.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.760.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.087.380.000	100	813.580.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					253.080.000		238.080.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	253.080.000	1	238.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.700.000		7.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.700.000	12	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	62.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.880.000		11.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	11.880.000	12	11.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.500.000		112.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	112.500.000	12	112.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					302.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	302.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				302.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	302.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					386.300.000		398.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	386.300.000	1	398.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				298.300.000		310.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	298.300.000	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					96.000.000		77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	96.000.000	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	48.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.763.192.000	100	825.192.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.600.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	43.600.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.600.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	43.600.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					266.342.000		258.342.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	266.342.000	1	258.342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.420.000		9.420.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.420.000	12	9.420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76.182.000		61.182.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	65.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	11.182.000	10	11.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.050.000		8.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	8.050.000	12	8.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121.690.000		121.690.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	121.690.000	12	121.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	45.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					348.200.000		388.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	348.200.000	1	388.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.500.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				68.400.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	68.400.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				274.300.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	274.300.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.060.050.000		78.850.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.060.050.000	1	78.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.350.000		31.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	31.350.000	12	31.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.600.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.600.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	1.000.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.100.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	24.100.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	909.345.000	100	840.295.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.800.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	48.800.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48.800.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	48.800.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					254.975.000		249.795.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	254.975.000	1	249.795.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.330.000		20.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.330.000	12	20.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.045.000		63.045.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	65.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	13.045.000	10	13.045.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.500.000		5.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.500.000	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	135.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				135.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	135.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					371.500.000		418.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	371.500.000	1	418.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				283.500.000		330.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	283.500.000	12	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					99.070.000		72.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	99.070.000	1	72.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.250.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	34.250.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.000.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.820.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	39.820.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	788.670.000	100	860.470.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					263.470.000		253.470.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	263.470.000	1	253.470.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	11.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.670.000		61.670.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	60.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	11.670.000	10	11.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.500.000		9.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	9.500.000	12	9.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.300.000		6.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	6.300.000	12	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	125.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					406.500.000		438.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	406.500.000	1	438.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.500.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	318.500.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.700.000		69.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	68.700.000	1	69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.500.000		21.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	21.500.000	12	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.200.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	2.200.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	894.100.000	100	809.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					208.150.000		229.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	208.150.000	1	229.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.900.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	7.900.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.690.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	27.500.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	13.190.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.550.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	22.550.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				19.160.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	19.160.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.200.000		7.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.200.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				7.650.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	7.650.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					141.750.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	141.750.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				141.750.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	141.750.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					434.200.000		418.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	434.200.000	1	418.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				346.200.000		330.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	346.200.000	12	330.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					60.000.000		62.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	60.000.000	1	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	939.350.000	100	798.450.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					328.274.000		277.950.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	328.274.000	1	277.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.050.000		16.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	16.050.000	12	16.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.900.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	95.900.000	10	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	3	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				17.624.000		13.200.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	17.624.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		35.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.200.000		5.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.200.000	12	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	130.000.000	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					114.676.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	114.676.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				114.676.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	114.676.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					316.000.000		343.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	316.000.000	1	343.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				228.000.000		255.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	228.000.000	12	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130.400.000		77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	130.400.000	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.400.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	5.400.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	80.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	747.200.000	100	810.300.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					259.800.000		254.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	259.800.000	1	254.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.400.000		15.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.400.000	12	15.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	55.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.200.000		13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.200.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.200.000		5.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	5.200.000	12	5.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					348.000.000		378.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	348.000.000	1	378.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				260.000.000		290.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	260.000.000	12	290.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.400.000		77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	89.400.000	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	40.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.400.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.400.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	979.840.000	100	913.140.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					286.140.000		282.640.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	286.140.000	1	282.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.300.000		8.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	8.300.000	12	8.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	65.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				13.200.000		13.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	13.200.000	12	13.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.200.000		25.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	25.200.000	12	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.400.000		13.400.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	13.400.000	12	13.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		6.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.000.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.040.000		11.040.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	11.040.000	12	11.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130.000.000		140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	130.000.000	12	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000		115.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	150.000.000	1	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel						65.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		30	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	150.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.700.000		388.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	350.700.000	1	388.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.500.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				265.200.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	265.200.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					143.000.000		77.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	143.000.000	1	77.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.000.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				94.000.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	94.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	702.695.000	100	722.700.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.000.000		45.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	43.000.000	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	43.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					207.200.000		222.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	207.200.000	1	222.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.700.000		5.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.700.000	12	5.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	3	35.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	10	15.000.000	10	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000		4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	4.500.000	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					44.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	44.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				44.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1	44.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					345.400.000		343.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	345.400.000	1	343.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				56.000.000		56.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	56.000.000	12	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				281.400.000		279.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	281.400.000	12	279.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.095.000		62.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	63.095.000	1	62.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		15.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	0		12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				38.095.000		30.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	38.095.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan									**32.754.367.000**		**35.376.816.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Konsumsi listrik per kapita	KWh/Kapita	795		800		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi								**12.181.982.000**		**12.619.596.000**		
						Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	14.85	12.181.982.000	15.96	12.619.596.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN						12.181.982.000		12.619.596.000		
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	tCO2e	29144	4.319.027.000	30199	5.279.596.000		
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					4.319.027.000		5.279.596.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT	SBM	3369	4.319.027.000	3717	5.279.596.000		
		3.29.05.1.04.01			Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi				297.540.000		209.545.000		
						Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi	%	21	250.000.000	22	192.445.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi	Kali	2	47.540.000	2	17.100.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				4.021.487.000		5.070.051.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT	Unit	14	4.021.487.000	10	5.070.051.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria	tCO2e	503.78	514.820.000	618.44	670.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					514.820.000		670.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Muria	SBM	239	514.820.000	312	670.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				514.820.000		670.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Kendeng Muria	Unit	9	514.820.000	9	670.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	300.64	590.000.000	402.56	670.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					590.000.000		670.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Kendeng Selatan	SBM	312	590.000.000	312	670.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				590.000.000		670.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Kendeng Selatan	Unit	10	590.000.000	9	670.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi	tCO2e	989.02	695.000.000	1103.68	670.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					695.000.000		670.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Merapi	SBM	312	695.000.000	312	670.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				695.000.000		670.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Merapi	Unit	13	695.000.000	9	670.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak	tCO2e	5014.16	170.000.000	5052.38	820.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					170.000.000		820.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Semarang Demak	SBM	138	170.000.000	138	820.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				170.000.000		820.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Semarang Demak	Unit	4	170.000.000	3	820.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan	tCO2e	89	1.678.780.000	103	670.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					1.678.780.000		670.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Selatan	SBM	68	1.678.780.000	68	670.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				1.678.780.000		670.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Selatan	Unit	8	1.678.780.000	1	670.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah	tCO2e	229	213.000.000	267	245.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					213.000.000		245.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Tengah	SBM	69	213.000.000	104	245.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				213.000.000		245.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Tengah	Unit	5	213.000.000	3	245.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara	tCO2e	784.93	675.000.000	874.91	670.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					675.000.000		670.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Serayu Utara	SBM	394	675.000.000	475	670.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				675.000.000		670.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Serayu Utara	Unit	21	675.000.000	16	670.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu	tCO2e	347	1.090.000.000	474	720.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					1.090.000.000		720.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Sewu Lawu	SBM	270	1.090.000.000	347	720.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				1.090.000.000		720.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Sewu Lawu	Unit	8	1.090.000.000	10	720.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan	tCO2e	19959	300.000.000	20035	470.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					300.000.000		470.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Selatan	SBM	139	300.000.000	208	470.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				300.000.000		470.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Slamet Selatan	Unit	6	300.000.000	6	470.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara	tCO2e	211.55	365.000.000	249.77	470.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					365.000.000		470.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Slamet Utara	SBM	208	365.000.000	208	470.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				365.000.000		470.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Slamet Utara	Unit	7	365.000.000	6	470.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo	tCO2e	293.19	824.000.000	369.63	445.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					824.000.000		445.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Solo	SBM	208	824.000.000	208	445.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				824.000.000		445.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Solo	Unit	14	824.000.000	6	445.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e	298.83	747.355.000	400.75	820.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi					747.355.000		820.000.000		
						Energi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur EBT Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	451	747.355.000	451	820.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.05.1.04.04			Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi				747.355.000		820.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	Unit	39	747.355.000	34	820.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat								**20.572.385.000**		**22.757.220.000**		
						Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	20.572.385.000	1	22.757.220.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						20.572.385.000		22.757.220.000		
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	29.7	1.350.000.000	36.23	696.800.000		
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					1.350.000.000		696.800.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2)	%	63.11	1.350.000.000	73.11	696.800.000		
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1.350.000.000		696.800.000		
						Jumlah pembinaan usaha ketenagalistrikan	Paket	1	726.360.000	1	546.800.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Jumlah peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan	Paket	2	623.640.000	2	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	2.06	1.112.650.000	2.53	1.330.100.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					138.750.000		192.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	6.89	138.750.000	7.98	192.600.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				48.750.000		48.750.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	40	48.750.000	40	48.750.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				90.000.000		143.850.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria	Lokasi	50	90.000.000	50	143.850.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				973.900.000		1.137.500.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Muria	%	100	973.900.000	100	1.137.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				25.500.000		25.500.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Kendeng Muria	Dokumen	1	25.500.000	1	25.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				948.400.000		1.112.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria	RT/KK	850	948.400.000	850	1.112.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	3.86	2.097.450.000	4.63	2.269.150.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					147.450.000		169.150.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	2.76	147.450.000	3.19	169.150.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				50.000.000		71.700.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	20	50.000.000	20	71.700.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				97.450.000		97.450.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan	Lokasi	65	97.450.000	65	97.450.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.950.000.000		2.100.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Kendeng Selatan	%	100	1.950.000.000	100	2.100.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				48.000.000		48.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.902.000.000		2.052.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan	RT/KK	1600	1.902.000.000	1600	2.052.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	2.98	1.679.235.000	3.73	2.084.235.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					159.235.000		159.235.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	6.2	159.235.000	7.18	159.235.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				82.615.000		82.615.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Merapi	Dokumen	50	82.615.000	50	82.615.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				76.620.000		76.620.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi	Lokasi	50	76.620.000	50	76.620.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.520.000.000		1.925.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Merapi	%	100	1.520.000.000	100	1.925.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				50.640.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Merapi	Dokumen	1	50.640.000	1	45.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.469.360.000		1.880.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi	RT/KK	1500	1.469.360.000	1500	1.880.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak	%	1.45	993.000.000	1.73	1.048.585.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					190.000.000		208.585.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	9.65	190.000.000	11.17	208.585.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				100.000.000		118.585.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	Dokumen	80	100.000.000	80	118.585.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang Demak	Lokasi	60	90.000.000	60	90.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					803.000.000		840.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Semarang Demak	%	100	803.000.000	100	840.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Semarang Demak	Dokumen	1	18.000.000	1	18.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				785.000.000		822.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang Demak	RT/KK	600	785.000.000	600	822.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	3.39	1.672.000.000	4.15	2.012.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					87.000.000		87.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	2.48	87.000.000	2.87	87.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				27.000.000		27.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	18	27.000.000	18	27.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan	Lokasi	35	60.000.000	35	60.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.585.000.000		1.925.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Selatan	%	100	1.585.000.000	100	1.925.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				45.000.000		45.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Serayu Selatan	Dokumen	1	45.000.000	1	45.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.540.000.000		1.880.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan	RT/KK	1500	1.540.000.000	1500	1.880.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	2.21	1.296.000.000	2.73	1.540.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					105.000.000		105.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	2.76	105.000.000	3.19	105.000.000	SEKSI ENERGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	20	30.000.000	20	30.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah	Lokasi	50	75.000.000	50	75.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.191.000.000		1.435.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Tengah	%	100	1.191.000.000	100	1.435.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				33.000.000		33.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Serayu Tengah	Dokumen	1	33.000.000	1	33.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.158.000.000		1.402.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah	RT/KK	1100	1.158.000.000	1100	1.402.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	1.62	2.068.700.000	1.95	2.509.300.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					188.100.000		234.300.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	5.51	188.100.000	6.39	234.300.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				73.100.000		83.100.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	Dokumen	45	73.100.000	45	83.100.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				115.000.000		151.200.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara	Lokasi	100	115.000.000	100	151.200.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.880.600.000		2.275.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Serayu Utara	%	100	1.880.600.000	100	2.275.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				51.000.000		51.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Serayu Utara	Dokumen	1	51.000.000	1	51.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.829.600.000		2.224.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara	RT/KK	1700	1.829.600.000	1700	2.224.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	1.51	1.629.800.000	1.82	1.721.400.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					130.000.000		171.600.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	4.13	130.000.000	4.79	171.600.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				60.000.000		81.600.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	35	60.000.000	35	81.600.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				70.000.000		90.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu	Lokasi	35	70.000.000	35	90.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.499.800.000		1.549.800.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Sewu Lawu	%	100	1.499.800.000	100	1.549.800.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Sewu Lawu	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.469.800.000		1.519.800.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu	RT/KK	1000	1.469.800.000	1000	1.519.800.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	4.02	2.525.000.000	5.01	2.845.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					175.000.000		185.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	4.13	175.000.000	4.79	185.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	50	75.000.000	50	75.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				100.000.000		110.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan	Lokasi	60	100.000.000	60	110.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					2.350.000.000		2.660.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Selatan	%	100	2.350.000.000	100	2.660.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Slamet Selatan	Dokumen	1	60.000.000	1	60.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				2.290.000.000		2.600.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan	RT/KK	2000	2.290.000.000	2000	2.600.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	3.66	1.805.000.000	4.41	2.200.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	5.51	100.000.000	6.39	100.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	Dokumen	40	50.000.000	40	50.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara	Lokasi	40	50.000.000	40	50.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan					1.705.000.000		2.100.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Slamet Utara	%	100	1.705.000.000	100	2.100.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				48.000.000		48.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Slamet Utara	Dokumen	1	48.000.000	1	48.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.657.000.000		2.052.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara	RT/KK	1600	1.657.000.000	1600	2.052.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	1.59	1.495.500.000	1.92	1.613.150.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					135.000.000		143.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	5.51	135.000.000	6.39	143.150.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo	Dokumen	40	60.000.000	40	60.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				75.000.000		83.150.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo	Lokasi	51	75.000.000	51	83.150.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1.360.500.000		1.470.000.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Solo	%	100	1.360.500.000	100	1.470.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Solo	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1.330.500.000		1.440.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo	RT/KK	1000	1.330.500.000	1000	1.440.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1.36	848.050.000	1.62	887.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					215.000.000		240.000.000		
						Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	7.58	215.000.000	8.78	240.000.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	60	90.000.000	60	90.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.29.06.1.02.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				125.000.000		150.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo	Lokasi	100	125.000.000	100	150.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				633.050.000		647.500.000		
						Persentase pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin di Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	633.050.000	100	647.500.000	SEKSI ENERGI	
		3.29.06.1.06.01			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				16.500.000		16.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen calon penerima bantuan sambungan listrik murah dan hemat di wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	1	16.500.000	1	16.500.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.29.06.1.06.03			Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				616.550.000		631.000.000		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo	RT/KK	550	616.550.000	550	631.000.000	SEKSI ENERGI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan									**11.734.291.000**		**9.519.457.000**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	
						Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.1		2.1		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Meningkatnya konservasi air tanah								**6.206.560.000**		**5.038.840.000**		
						Indeks Ketersediaan Air tanah	Angka	3.05	6.206.560.000	3.08	5.038.840.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						6.206.560.000		5.038.840.000		
						Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	650.000.000	100	650.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						650.000.000		650.000.000	
						Persentase pemenuhan persyaratan pengujian air tanah	%	100	650.000.000	100	650.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	
		3.29.02.1.02.01			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				650.000.000		650.000.000		
						Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah	Dokumen	1000	625.000.000	1000	625.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi	Eks	425	25.000.000	425	25.000.000	SEKSI PENGUJIAN AIR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase pengambilan air tanah	%	55.48	3.408.440.000	55.76	2.200.000.000		
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					3.408.440.000		2.200.000.000		
						Persentase updating peta zona konservasi Air Tanah	%	12	3.408.440.000	16	2.200.000.000		
		3.29.02.1.01.02			Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				288.400.000		1.200.000.000		
						Jumlah Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi pada CAT di Jawa Tengah	Dokumen	3	288.400.000	4	1.200.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		3.29.02.1.01.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				3.120.040.000		1.000.000.000		
						Jumlah pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah	Unit	100	3.120.040.000	90	1.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12.54	210.000.000	12.6	210.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						60.000.000		60.000.000	
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	100	60.000.000	100	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	60	60.000.000	60	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Muria	%	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria	Lokasi	72	150.000.000	72	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0.6	113.720.000	0.61	117.180.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					35.000.000		38.460.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	100	35.000.000	100	38.460.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				35.000.000		38.460.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	20	35.000.000	20	38.460.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					78.720.000		78.720.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Kendeng Selatan	%	100	78.720.000	100	78.720.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				78.720.000		78.720.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Lokasi	40	78.720.000	40	78.720.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	5.33	169.000.000	5.36	169.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					75.000.000		75.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Merapi	%	100	75.000.000	100	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi	Dokumen	50	75.000.000	50	75.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					94.000.000		94.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Merapi	%	100	94.000.000	100	94.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				94.000.000		94.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi	Lokasi	50	94.000.000	50	94.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	14.74	250.000.000	14.81	250.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	%	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	120	150.000.000	120	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Semarang Demak	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang Demak	Lokasi	60	100.000.000	60	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1.16	145.000.000	1.17	130.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					35.000.000		30.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	100	35.000.000	100	30.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				35.000.000		30.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	20	35.000.000	20	30.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					110.000.000		100.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Selatan	%	100	110.000.000	100	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				110.000.000		100.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan	Lokasi	50	110.000.000	50	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0.25	136.120.000	0.25	103.380.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					36.470.000		36.470.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	100	36.470.000	100	36.470.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				36.470.000		36.470.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	22	36.470.000	22	36.470.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					99.650.000		66.910.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Tengah	%	100	99.650.000	100	66.910.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				99.650.000		66.910.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah	Lokasi	33	99.650.000	33	66.910.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2.89	140.000.000	2.91	160.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					40.000.000		60.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	%	100	40.000.000	100	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				40.000.000		60.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	40	40.000.000	40	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					100.000.000		100.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Serayu Utara	%	100	100.000.000	100	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara	Lokasi	32	100.000.000	32	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	3.29	200.000.000	3.31	210.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					50.000.000		60.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	100	50.000.000	100	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	40	50.000.000	40	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					150.000.000		150.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Sewu Lawu	%	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu	Lokasi	82	150.000.000	82	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1.1	155.000.000	1.1	155.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					70.000.000		70.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	100	70.000.000	100	70.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	46	70.000.000	46	70.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					85.000.000		85.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Selatan	%	100	85.000.000	100	85.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				85.000.000		85.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan	Lokasi	40	85.000.000	40	85.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0.97	154.280.000	0.97	164.280.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					50.000.000		60.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	%	100	50.000.000	100	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	40	50.000.000	40	60.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					104.280.000		104.280.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Slamet Utara	%	100	104.280.000	100	104.280.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				104.280.000		104.280.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara	Lokasi	50	104.280.000	50	104.280.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	4.17	245.000.000	4.2	280.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					70.000.000		105.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Solo	%	100	70.000.000	100	105.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				70.000.000		105.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo	Dokumen	70	70.000.000	70	105.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					175.000.000		175.000.000		
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Solo	%	100	175.000.000	100	175.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				175.000.000		175.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo	Lokasi	71	175.000.000	71	175.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	8.43	230.000.000	8.47	240.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					110.000.000		120.000.000		
						Persentase realisasi rekomendasi pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	110.000.000	100	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.02.02			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				110.000.000		120.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	80	110.000.000	80	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi					120.000.000		120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA Wilayah Ungaran Telomoyo	%	100	120.000.000	100	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.02.1.03.03			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				120.000.000		120.000.000		
						Jumlah pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo	Lokasi	80	120.000.000	80	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
	Meningkatnya produktifitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan								**5.527.731.000**		**4.480.617.000**		
						Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Melaksanakan Good Mining Practice (GMP)	%	43.5	5.527.731.000	55	4.480.617.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						5.527.731.000		4.480.617.000		
						Persentase Good Mining Practice	%	43.5	2.564.720.000	45.57	1.925.000.000		
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					1.473.175.000		1.500.000.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan	M3/Ha	25269	1.473.175.000	27796	1.500.000.000		
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					1.473.175.000		1.500.000.000		
						Jumlah paket pembinaan pertambangan minerba	Paket	3	1.473.175.000	3	1.500.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.091.545.000		425.000.000		
						Tingkat kesesuaian pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	34	1.091.545.000	35	425.000.000		
		3.29.03.1.07.03			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				1.091.545.000		425.000.000		
						Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen	1	1.091.545.000	1	425.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Muria	%	3.2	181.500.000	3.35	180.500.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					181.500.000		180.500.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	M3/Ha	527.29	181.500.000	580.02	180.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan									

		3.29.03.1.03.03			Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				46.500.000		46.500.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Dokumen	20	46.500.000	20	46.500.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				135.000.000		134.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Lokasi	35	135.000.000	35	134.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan	%	5.97	189.250.000	6.25	236.350.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	
					Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				189.250.000		236.350.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	M3/Ha	17632.05	189.250.000	19395.26	236.350.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				64.250.000		64.250.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Dokumen	34	64.250.000	34	64.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				125.000.000		172.100.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Lokasi	60	125.000.000	60	172.100.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase good mining practice Wilayah Merapi	%	2.99	597.690.000	3.13	275.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
					Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1				597.690.000		275.000.000		

				(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	M3/Ha	1376.29	597.690.000	1513.91	275.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.000.000		125.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Dokumen	55	100.000.000	55	125.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				497.690.000		150.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Lokasi	50	497.690.000	50	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak	%	3.41	200.000.000	3.57	200.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						200.000.000		200.000.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	M3/Ha	641.63	200.000.000	705.79	200.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	Dokumen	55	100.000.000	55	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	Lokasi	35	100.000.000	35	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan	%	3.41	130.000.000	3.57	150.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					130.000.000		150.000.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	M3/Ha	400.71	130.000.000	440.78	150.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				40.000.000		30.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Dokumen	10	40.000.000	10	30.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				90.000.000		120.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Lokasi	24	90.000.000	24	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah	%	3.41	95.000.000	3.57	146.520.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					95.000.000		146.520.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	M3/Ha	329.58	95.000.000	362.54	146.520.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				35.000.000		47.640.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Dokumen	15	35.000.000	15	47.640.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				60.000.000		98.880.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Lokasi	22	60.000.000	22	98.880.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara	%	2.77	160.000.000	2.9	190.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				160.000.000		190.000.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	M3/Ha	1079.13	160.000.000	1187.04	190.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				60.000.000		90.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Dokumen	30	60.000.000	30	90.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Lokasi	35	100.000.000	35	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu	%	2.99	89.155.000	3.13	110.405.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				89.155.000		110.405.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	M3/Ha	897.94	89.155.000	987.73	110.405.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk				29.155.000		29.155.000		

					Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	Dokumen	15	29.155.000	15	29.155.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				60.000.000		81.250.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	Lokasi	20	60.000.000	20	81.250.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan	%	5.33	175.000.000	5.58	223.060.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					175.000.000		223.060.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	M3/Ha	937.83	175.000.000	1031.62	223.060.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Dokumen	33	75.000.000	33	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100.000.000		123.060.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	Lokasi	46	100.000.000	46	123.060.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara	%	4.69	212.826.000	4.91	228.782.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					212.826.000		228.782.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	M3/Ha	250.83	212.826.000	275.91	228.782.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin				80.000.000		95.956.000		

					Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Dokumen	40	80.000.000	40	95.956.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				132.826.000		132.826.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Lokasi	60	132.826.000	60	132.826.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase good mining practice Wilayah Solo	%	2.56	170.000.000	2.68	195.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					170.000.000		195.000.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	M3/Ha	155.92	170.000.000	171.52	195.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
		3.29.03.1.03.03			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Dokumen	40	80.000.000	40	100.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				90.000.000		95.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Lokasi	30	90.000.000	30	95.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	2.77	147.590.000	2.9	120.000.000	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					147.590.000		120.000.000		
						Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	M3/Ha	1040.12	147.590.000	1144.14	120.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
					Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam								

		3.29.03.1.03.03			rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				35.000.000		50.000.000		
						Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	Dokumen	15	35.000.000	15	50.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		3.29.03.1.03.04			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				112.590.000		70.000.000		
						Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	Lokasi	21	112.590.000	21	70.000.000	SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	
						Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	615.000.000	100	300.000.000	Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut					615.000.000		300.000.000		
						Persentase pemenuhan persyaratan pengujian geologi dan mineral	%	100	615.000.000	100	300.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	
		3.29.03.1.03.01			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				615.000.000		300.000.000		
						Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan serta analisa kimia tanah dan batuan	Dokumen	11	615.000.000	11	300.000.000	SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah									**74.558.633.000**		**15.715.049.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	%	34.19		34.33		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri								**74.558.633.000**		**15.715.049.000**		
						Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	2.93	74.558.633.000	3.15	15.715.049.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						73.460.581.000		14.616.997.000		
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4.31	1.265.130.000	4.35	1.265.130.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.265.130.000		1.265.130.000		
						Jumlah pelaku usaha yang meningkatkan kualitas kemasan	Orang	142	1.002.800.000	518	1.002.800.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.002.800.000		1.002.800.000		
						Jumlah IKM yang difasilitasi kemasan	Industri Kecil	72	100.000.000	72	100.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan	Orang	70	902.800.000	70	902.800.000	SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	Orang	66	262.330.000	440	262.330.000	SEKSI INDUSTRI KREATIF DIGITAL	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				262.330.000		262.330.000		
						Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce	Orang	0		0		SEKSI INDUSTRI KREATIF DIGITAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan dan magang industri kreatif digital	Orang	66	262.330.000	66	262.330.000	SEKSI INDUSTRI KREATIF DIGITAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3.17	1.810.888.000	3.17	1.810.888.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					1.810.888.000		1.810.888.000		
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	Orang	250	150.000.000	250	150.000.000	SEKSI PENERAPAN DAN REKAYASA	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan	Orang	125	150.000.000	125	150.000.000	SEKSI PENERAPAN DAN REKAYASA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan	Orang	135	1.660.888.000	140	1.660.888.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.660.888.000		1.660.888.000		
						Jumlah pelaku usaha yang dilayani	Orang	135	1.660.888.000	140	1.660.888.000	SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	3	63.237.489.000	3.2	4.818.575.000	Bidang Industri Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					63.237.489.000		4.818.575.000		
						Jumlah Pelaku Industri agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	46	2.020.405.000	305	1.285.405.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3.31.02.1.01.04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.835.405.000		1.100.405.000		
						Jumlah Pelaku IKM industri agro binaan	Orang	53	1.835.405.000	43	1.100.405.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.02.1.01.05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				185.000.000		185.000.000		
						Jumlah pendampingan kemitraan	Kegiatan	3	185.000.000	5	185.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Industri Agro Yang Dilatih	Orang	875	61.217.084.000	875	3.533.170.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				61.217.084.000		3.533.170.000		
						Jumlah peserta Bintek	Orang	180	518.040.000	180	518.040.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan	Unit	30	59.767.044.000	30	2.083.130.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Peserta Yang Difasilitasi Peningkatan Kapabilitas SDM Industri Agro	Orang	125	932.000.000	100	932.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	1.5	2.991.140.000	1.8	2.406.140.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					2.991.140.000		2.406.140.000		
						Jumlah fasilitasi berbasis perwilayahan industri	Kegiatan	3	260.000.000	3	260.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.02			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				260.000.000		260.000.000		
						Jumlah informasi industri Non Agro yg tersedia	Dokumen	3	260.000.000	3	260.000.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Industri non agro yang mendapatkan fasilitasi	Orang	5	1.355.460.000	600	840.460.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.165.460.000		650.460.000		
						Jumlah industri non agro binaan	Unit	5	1.165.460.000	5	650.460.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.31.02.1.01.05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				190.000.000		190.000.000		
						Jumlah fasilitasi industri non agro	Kegiatan	7	190.000.000	7	190.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SDM Industri Non Agro Yang Dilatih	Orang	150	1.375.680.000	720	1.305.680.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.375.680.000		1.305.680.000		
						Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan	Orang	0	70.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM industri	Orang	150	1.305.680.000	450	1.305.680.000	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO	
						Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	70	4.155.934.000	70	4.316.264.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					4.155.934.000		4.316.264.000		
						Jumlah peserta pelatihan industri alas kaki yang tersertifikasi profesi	Orang	25	2.159.934.000	50	2.159.934.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK ALAS KAKI	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2.159.934.000		2.159.934.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah peserta yang dilatih pelatihan alas kaki	Orang	500	2.109.934.000	500	2.109.934.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK ALAS KAKI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang disalurkan pelatihan alas kaki	Orang	375	50.000.000	375	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK ALAS KAKI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta pelatihan industri tekstil yang tersertifikasi profesi	Orang	50	1.996.000.000	100	2.156.330.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	
		3.31.02.1.01.03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.996.000.000		2.156.330.000		
						Jumlah peserta yang dilatih Pelatihan Produk Tekstil	Orang	900	1.946.000.000	900	2.106.330.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah peserta yang disalurkan Pelatihan Produk Tekstil	Orang	540	50.000.000	540	50.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						1.098.052.000		1.098.052.000		
						Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	499.600.000	1	499.600.000	Bidang Industri Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					499.600.000		499.600.000		
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Agro dalam SIINAS	Unit	15	499.600.000	20	499.600.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
		3.31.04.1.01.01			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				499.600.000		499.600.000		
						Jumlah kegiatan pengumpulan, pengolaham data industri agro	Kegiatan	1	499.600.000	1	499.600.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO	
						Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	598.452.000	2	598.452.000	Bidang Industri Non Agro	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					598.452.000		598.452.000		
						Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	Unit	20	598.452.000	25	598.452.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	
		3.31.04.1.01.01			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				598.452.000		598.452.000		
						Jumlah industri non agro binaan	Unit	315	598.452.000	250	598.452.000	SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah									**32.252.479.000**		**32.833.314.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Persentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB	%	13.08		13.18		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan								**32.252.479.000**		**32.833.314.000**		
						Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	2.82	32.252.479.000	3.93	32.833.314.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						100.000.000		100.000.000		
						Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah	%	7	100.000.000	7	100.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase kenaikan penerbitan SKA danPembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB)	%	3	100.000.000	3	100.000.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.02.1.04.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah perusahaan pengguna layanan IPSKA yang terverifikasi	Unit	58	100.000.000	58	100.000.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						1.069.089.000		1.019.089.000		
						Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi	%	0.19	1.069.089.000	0.21	1.019.089.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas					1.069.089.000		1.019.089.000		
						Persentase Peningkatan Kemitraan UDKM dan UMB	%	16.7	531.789.000	28.6	481.789.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	
		3.30.03.1.01.02			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				531.789.000		481.789.000		
						Jumlah Kemitraan UDKM dan UMB	Kegiatan	0	50.000.000	0		SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Pasar Rakyat Revitaliasasi yang Dilatih	Orang	100	481.789.000	100	481.789.000	SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi transaksi	%	10	537.300.000	60	537.300.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.03.1.01.03			Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				537.300.000		537.300.000		
						Jumlah Pelaku Pasar lelang Komoditas yang bertransaksi	Orang	10	537.300.000	15	537.300.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						23.296.800.000		23.296.800.000		
						Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	12	23.296.800.000	11.5	23.296.800.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					23.072.280.000		23.072.280.000		
						Jumlah pasar yang dilakukan pemantauan harga kepokmas	Unit	108	23.072.280.000	108	23.072.280.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.04.1.02.01			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				23.072.280.000		23.072.280.000		
						Jumlah informasi harga kepokmas	Komoditi	25	23.072.280.000	25	23.072.280.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					224.520.000		224.520.000		
						Persentase pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan	%	14.29	224.520.000	10	224.520.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
		3.30.04.1.03.03			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				224.520.000		224.520.000		
						Jumlah pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi	Unit	35	224.520.000	35	224.520.000	SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						4.600.325.000		5.122.125.000		
						Nilai ekspor non migas	Juta US$	7076	4.600.325.000	7430	5.122.125.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)					4.600.325.000		5.122.125.000		

				Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									
						Jumlah binaan yang melakukan ekspor	Orang	15	1.296.015.000	15	1.296.015.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
		3.30.05.1.01.05			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				1.296.015.000		1.296.015.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Eskpor Impor	Orang	175	1.296.015.000	175	1.296.015.000	SEKSI EKSPOR DAN IMPOR	
						Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	Dokumen	4	361.460.000	4	361.460.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	
		3.30.05.1.01.05			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				361.460.000		361.460.000		
						Jumlah Informasi Ekspor Impor Neraca perdagangan dan Peluang Pasar	Dokumen	2	273.550.000	2	273.550.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta forum Peluang Pasar Ekspor	Orang	100	87.910.000	100	87.910.000	SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	Dokumen	2	2.942.850.000	2	3.464.650.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.01			Pameran Dagang Internasional/Nasional				890.000.000		890.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi luar negeri	Orang	4	890.000.000	4	890.000.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.03			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				2.052.850.000		2.052.850.000		
						Jumlah event promosi (offline/ online)	Kegiatan	3	2.052.850.000	3	2.052.850.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.05.1.01.04			Peningkatan Citra Produk Ekspor						521.800.000		
						Jumlah Komoditi Potensi Ekspor yang ditingkatkan citra produknya	Komoditi	0		5	521.800.000	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						2.899.580.000		2.674.580.000		
						Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	4	1.307.420.000	3	1.307.420.000	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		
						Persentase peningkatan masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen	%	100	150.000.000	100	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.30.06.1.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi tentang perlindungan konsumen	Orang	70	150.000.000	70	150.000.000	SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					915.000.000		915.000.000		
						Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standarisasi industri	Industri Kecil Menengah	24	915.000.000	12	915.000.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	
		3.30.06.1.02.03			Pengembangan Layanan Sertifikasi				915.000.000		915.000.000		
						Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI	Orang	24	915.000.000	13	915.000.000	SEKSI STANDARISASI INDUSTRI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					242.420.000		242.420.000		
						Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	Kali	100	242.420.000	110	242.420.000	SEKSI TERTIB NIAGA	
		3.30.06.1.03.01			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen				242.420.000		242.420.000		
						Jumlah barang beredar yang diawasi	Buah	250	142.420.000	250	142.420.000	SEKSI TERTIB NIAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit usaha yang diawasi	Unit	125	100.000.000	125	100.000.000	SEKSI TERTIB NIAGA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang)	%	4.17	810.860.000	4	585.860.000		
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					810.860.000		585.860.000		
						Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	%	10	585.860.000	10	510.860.000		
		3.30.06.1.02.03			Pengembangan Layanan Sertifikasi				435.860.000		435.860.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang	Kegiatan	1	435.860.000	1	435.860.000		
		3.30.06.1.02.04			Pengembangan Layanan Kalibrasi				150.000.000		75.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi	Sertifikat	500	150.000.000	550	75.000.000		
						Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan	%	10	225.000.000	10	75.000.000		
		3.30.06.1.02.02			Pengembangan Layanan Pengujian				225.000.000		75.000.000		
						Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang	Sertifikat	45	225.000.000	55	75.000.000		
						Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta)	%	5	781.300.000	5	781.300.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					781.300.000		781.300.000		
						Persentase kenaikan sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	%	2.5	75.000.000	2.7	75.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.01			Verifikasi Mutu Produk								
						Jumlah pendampingan dan uji produk	Sertifikat	0		0		SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.04			Pengembangan Layanan Kalibrasi				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah Sertifikat Kalibrasi	Lembar	875	75.000.000	935	75.000.000	SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
						Persentase kenaikan sertifikat pengujian yang diterbitkan	%	2.5	706.300.000	2.7	706.300.000	SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.02			Pengembangan Layanan Pengujian				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta	Sertifikat	1250	200.000.000	1700	200.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.06.1.02.03			Pengembangan Layanan Sertifikasi				506.300.000		506.300.000		
						Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta	Kegiatan	1	506.300.000	1	506.300.000	SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI	
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						286.685.000		620.720.000		
						Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	%	8	286.685.000	10	620.720.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri					286.685.000		620.720.000		
						Jumlah Pelaku IKM yang difasilitasi promosi	Orang	62	286.685.000	62	620.720.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	
		3.30.07.1.01.01			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				286.685.000		620.720.000		
						Jumlah partisipasi promosi	Kali	2	286.685.000	2	620.720.000	SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**49.704.444.000**		**57.853.190.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	
						Nilai Kepuasan masyarakat	Skor	86		88		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**311.214.000**		**311.214.000**		
						Nilai SAKIP PD	Skor	80	311.214.000	80	311.214.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						311.214.000		311.214.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	311.214.000	100	311.214.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					311.214.000		311.214.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	12	311.214.000	14	311.214.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				105.607.000		105.607.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	7	105.607.000	8	105.607.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				205.607.000		205.607.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	205.607.000	6	205.607.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**49.393.230.000**		**57.541.976.000**		
						Nilai Kepuasan masyarakat	Skor	86	49.393.230.000	88	57.541.976.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						49.393.230.000		57.541.976.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.275.800.000	100	2.139.155.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.800.000		73.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	70.800.000	12	73.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				70.800.000		73.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	70.800.000	12	73.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	40.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	40.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.000.000		159.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	9	155.000.000	9	159.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.000.000		28.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	26.000.000	12	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Unit	4	10.000.000	4	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				25.000.000		26.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	1	25.000.000	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					89.000.000		89.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6	89.000.000	6	89.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	20	10.000.000	10	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	2	10.000.000	2	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3	24.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		27.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	25.000.000	4	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					648.000.000		674.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	648.000.000	4	674.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		210.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	200.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				71.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	71.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				373.000.000		384.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	373.000.000	12	384.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					273.000.000		1.102.155.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	273.000.000	7	1.102.155.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	20.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				8.000.000		8.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	8.000.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		47.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	45.000.000	12	47.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				40.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	40.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		889.655.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	70.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		1	814.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		32.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	30.000.000	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	35.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.505.475.000	100	4.326.555.000	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.400.000		57.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	57.400.000	12	57.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.400.000		57.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.400.000	12	57.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					383.875.000		401.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	9	383.875.000	9	401.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				38.500.000		38.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	38.500.000	12	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				123.100.000		125.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	3	23.100.000	3	25.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.500.000		27.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	26.500.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.000.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	27.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.775.000		6.300.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.775.000	12	6.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				48.000.000		49.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	40	48.000.000	50	49.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					444.000.000		408.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6	444.000.000	6	408.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				24.000.000		24.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	15	24.000.000	10	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				294.000.000		294.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	6	294.000.000	2	294.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				76.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	1	76.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	0		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	2	20.000.000	3	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	30.000.000	6	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.180.200.000		1.266.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	1.180.200.000	4	1.266.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.700.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.700.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				385.000.000		420.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	385.000.000	12	420.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				792.500.000		843.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	792.500.000	12	843.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.410.000.000		2.158.655.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	1.410.000.000	7	2.158.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.000.000		63.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	56.000.000	12	63.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				11.600.000		12.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	11.600.000	12	12.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				362.400.000		362.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	362.400.000	12	362.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	5.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				875.000.000		1.609.655.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	125.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	750.000.000	5	1.484.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	23.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				77.000.000		77.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	77.000.000	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.233.400.000	100	2.512.000.000	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74.400.000		110.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	74.400.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				74.400.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	74.400.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					317.400.000		363.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	8	317.400.000	8	363.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	60.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	5	60.000.000	4	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	0		12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		45.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	40.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.400.000		3.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	2.400.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					65.600.000		100.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	65.600.000	4	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	20.000.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	5.000.000	2	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.600.000		20.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	25	20.600.000	2	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	20.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.036.000.000		1.099.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		1.036.000.000		1.099.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.000.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	320.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				711.000.000		741.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	711.000.000	12	741.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					710.000.000		805.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	710.000.000	7	805.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	25.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	100.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				260.000.000		280.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	160.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000		180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	150.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	2.145.600.000	100	2.523.000.000	Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					91.200.000		120.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	91.200.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				91.200.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	91.200.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		27.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	25.000.000	12	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		27.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	25.000.000	12	27.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					405.900.000		500.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	10	405.900.000	10	500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				161.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	8	111.000.000	8	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	30.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.000.000		55.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	47.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	20.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	3.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	3	10.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79.900.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	79.900.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					303.500.000		212.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	303.500.000	4	212.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	71.000.000	3	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.500.000		22.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	8	57.500.000	3	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				175.000.000		140.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	175.000.000	2	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					615.000.000		883.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	615.000.000	4	883.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		7.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	5.000.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				170.000.000		180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	170.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				440.000.000		546.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	440.000.000	12	546.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					705.000.000		780.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	9	705.000.000	9	780.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	25.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	35.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				40.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	40.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	95.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	15.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	100.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180.000.000		180.000.000		
						Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				115.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	115.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan keuangan perangkat daerah	%	100	3.796.000.000	100	4.306.900.000	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.000.000		62.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	57.000.000	12	62.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				57.000.000		62.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	57.000.000	12	62.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					515.000.000		546.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	9	515.000.000	9	546.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		16.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	15.000.000	12	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan peralatan Kantor	Unit	3	70.000.000	4	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				46.000.000		50.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	46.000.000	12	50.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		4.400.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	4.000.000	12	4.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				150.000.000		165.000.000		
						Jumlah penyediaan bahan material	Unit	1	150.000.000	1	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	65.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.341.000.000		2.759.600.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	5	2.341.000.000	5	2.759.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				86.000.000		94.600.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	2	86.000.000	2	94.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.095.000.000		2.500.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1	2.095.000.000	1	2.500.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	10	50.000.000	10	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	3	60.000.000	3	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					467.000.000		509.100.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	467.000.000	4	509.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000		9.900.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	9.000.000	12	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132.000.000		145.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	132.000.000	12	145.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				326.000.000		354.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	326.000.000	12	354.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					391.000.000		404.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	7	391.000.000	7	404.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46.000.000		50.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	46.000.000	12	50.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				4.000.000		4.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	4.000.000	12	4.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	30.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.000.000		26.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	26.000.000	12	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				110.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	36.436.955.000	100	41.734.366.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					29.380.854.000		35.161.440.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	8	29.380.854.000	8	35.161.440.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				28.224.414.000		34.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	28.224.414.000	14	34.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.006.440.000		1.006.440.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.006.440.000	12	1.006.440.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				55.000.000		60.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	55.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				35.000.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	35.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					140.000.000		140.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	140.000.000	2	140.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				125.000.000		125.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	125.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	4	15.000.000	4	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					10.000.000		12.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	2	10.000.000	2	12.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000		12.500.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12	10.000.000	12	12.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					710.675.000		45.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	3	710.675.000	3	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	150	15.000.000	150	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	30.000.000	20	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				665.675.000				
						Jumlah orang yang mendapat sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang	500	665.675.000	750		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.230.426.000		900.426.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	10	1.230.426.000	10	900.426.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				43.250.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	43.250.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.350.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	59.350.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	5	30.000.000	5	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.500.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga perangkat daerah	Unit	12	40.500.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000		90.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				46.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	46.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				755.426.000		405.426.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	755.426.000	12	405.426.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.900.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	40.900.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	4	25.000.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6	25.000.000	6	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	25.000.000	5	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.875.000.000		4.375.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	3.875.000.000	4	4.375.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.750.000.000		1.800.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	1.750.000.000	12	1.800.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.100.000.000		2.550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.100.000.000	12	2.550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.065.000.000		1.075.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	8	1.065.000.000	8	1.075.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	235.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				25.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				288.450.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	288.450.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.050.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	20.050.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				65.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	65.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				81.500.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	81.500.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**261.230.000**		**369.259.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**261.230.000**		**369.259.000**		
						Nilai IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Angka	78	261.230.000	78.5	369.259.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						261.230.000		369.259.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	261.230.000	100	369.259.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.230.000		369.259.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Laporan	4	261.230.000	4	369.259.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				238.230.000		327.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	12	112.000.000	12	156.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro ISDA	Bulan	12	126.230.000	12	171.600.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.000.000		41.659.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	12	14.000.000	12	23.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro ISDA	Bulan	12	9.000.000	12	18.659.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**99.339.735.000**		**99.678.085.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**99.339.735.000**		**99.678.085.000**		
						Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	80	99.339.735.000	82	99.678.085.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						99.339.735.000		99.678.085.000		
						Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	95	557.100.000	96	636.300.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					557.100.000		636.300.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	2	300.400.000	2	340.000.000		
		4.01.06.1.02.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				300.400.000		340.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	300.400.000	4	340.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	256.700.000	2	296.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4.01.06.1.02.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				256.700.000		296.300.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	256.700.000	4	296.300.000		
						Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	90	497.750.000	95	611.300.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					497.750.000		611.300.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	3	270.700.000	2	327.500.000		
		4.01.06.1.02.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				270.700.000		327.500.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	270.700.000	4	327.500.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	3	227.050.000	2	283.800.000		
		4.01.06.1.02.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				227.050.000		283.800.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	227.050.000	4	283.800.000		
						Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	98.284.885.000	90	98.430.485.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					98.284.885.000		98.430.485.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	199.000.000	2	252.600.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				199.000.000		252.600.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	199.000.000	4	252.600.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	183.000.000	2	252.600.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				183.000.000		252.600.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	183.000.000	4	252.600.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	3	97.902.885.000	3	97.925.285.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				97.902.885.000		97.925.285.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	2	97.660.185.000	2	97.660.185.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	242.700.000	4	265.100.000		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO HUKUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**481.707.000**		**650.949.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**481.707.000**		**650.949.000**		
						Nilai IKM Biro Hukum	Angka	78	481.707.000	78.5	650.949.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						481.707.000		650.949.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	481.707.000	100	650.949.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.000.000		300.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	300.000.000	1	300.000.000		
		4.01.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					181.707.000		350.949.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	Dokumen	2	181.707.000	2	350.949.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		275.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	12	150.000.000	12	275.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				31.707.000		75.949.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Hukum	Bulan	12	31.707.000	12	75.949.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**2.315.000.000**		**2.720.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah								**2.315.000.000**		**2.720.000.000**		
						Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	95	1.400.000.000	95	1.700.000.000		
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1.400.000.000		1.700.000.000		
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	95	775.000.000	96	990.000.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					775.000.000		990.000.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	275.000.000	12	340.000.000		
		4.01.05.1.01.03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				275.000.000		340.000.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	100.000.000	12	140.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	175.000.000	12	200.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	100.000.000	12	125.000.000		
		4.01.05.1.01.02			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				100.000.000		125.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	100.000.000	12	125.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	400.000.000	12	525.000.000		
		4.01.05.1.01.01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				400.000.000		525.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	125.000.000	12	175.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	15	275.000.000	15	350.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	95	625.000.000	95	710.000.000		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					625.000.000		710.000.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		625.000.000	12	710.000.000		
		4.01.05.1.01.04			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				625.000.000		710.000.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	90	200.000.000	95	230.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	95	225.000.000	100	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	95	200.000.000	100	230.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	95	915.000.000	95	1.020.000.000		
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						915.000.000		1.020.000.000		
						Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	95	665.000.000	96	715.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					665.000.000		715.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	665.000.000	12	715.000.000		
		4.01.05.1.02.01			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				665.000.000		715.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	10	440.000.000	10	465.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	225.000.000	200	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	95	250.000.000	96	305.000.000		
				Fasilitasi Bantuan Hukum					250.000.000		305.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	250.000.000	12	305.000.000		
		4.01.05.1.02.02			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				250.000.000		305.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	35	105.000.000	35	130.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	7	145.000.000	7	175.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**628.006.000**		**808.947.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**250.000.000**		**300.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	90	250.000.000	95	300.000.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						250.000.000		300.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	250.000.000	100	300.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.000.000		300.000.000		
						Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Dokumen	6	250.000.000	6	300.000.000		
		4.01.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		175.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun	Dokumen	6	150.000.000	8	175.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		125.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda	Dokumen	4	100.000.000	4	125.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**378.006.000**		**508.947.000**		
						Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	Angka	78	378.006.000	78.5	508.947.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						378.006.000		508.947.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100	378.006.000	100	508.947.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					378.006.000		508.947.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen	2	378.006.000	2	508.947.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340.000.000		450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan	Bulan	12	340.000.000	12	450.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				38.006.000		58.947.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Administrasi Pembangunan	Bulan	12	38.006.000	12	58.947.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**1.675.000.000**		**2.035.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**1.675.000.000**		**2.035.000.000**		
						Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	88	1.675.000.000	89	2.035.000.000		
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						1.675.000.000		2.035.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Capaian Pelaksanaan APBD	%	98	325.000.000	98.5	360.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					325.000.000		360.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	3	245.000.000	3	260.000.000		
		4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				245.000.000		260.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	245.000.000	4	260.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	3	80.000.000	3	100.000.000		
		4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	80.000.000	4	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Capaian Pelaksanaan APBN	%	95	225.000.000	95.5	300.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					225.000.000		300.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	2	225.000.000	2	300.000.000		
		4.01.08.1.01.02			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				225.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	225.000.000	4	300.000.000		
						Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	80	650.000.000	85	750.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					650.000.000		750.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	300.000.000	4	350.000.000		
		4.01.08.1.02.01			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				300.000.000		350.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	300.000.000	4	350.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	88	350.000.000	90	400.000.000		
		4.01.08.1.02.02			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				350.000.000		400.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	350.000.000	12	400.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	83	375.000.000	85	475.000.000		
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					375.000.000		475.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	125.000.000	8	158.400.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				125.000.000		158.400.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	8	125.000.000	8	158.400.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	125.000.000	8	158.300.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				125.000.000		158.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	125.000.000	8	158.300.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	125.000.000	8	158.300.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				125.000.000		158.300.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	125.000.000	8	158.300.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100.000.000	100	150.000.000		
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					100.000.000		150.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan	4	100.000.000	4	150.000.000		
		4.01.08.1.02.03			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	4	100.000.000	4	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**214.980.000**		**238.675.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**214.980.000**		**238.675.000**		
						Nilai IKM Biro Perekonomian	Angka	78	214.980.000	78.5	238.675.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						214.980.000		238.675.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	214.980.000	100	238.675.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					214.980.000		238.675.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	Laporan	2	214.980.000	2	238.675.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184.980.000		200.675.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	12	184.980.000	12	200.675.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		38.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian	Bulan	12	30.000.000	12	38.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**1.375.000.000**		**1.717.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**595.000.000**		**720.000.000**		
						Ketercapaian Laba BUMD	%	70	595.000.000	75	720.000.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						595.000.000		720.000.000		
						Nilai kemandirian BLUD	%	50	52.000.000	55	75.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					52.000.000		75.000.000		
						Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000		
		4.01.06.1.03.05			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	27.000.000	2	50.000.000		
		4.01.06.1.03.04			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				27.000.000		50.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD	Laporan	4	27.000.000	4	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	75	225.000.000	80	250.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					225.000.000		250.000.000		
						Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000		
		4.01.06.1.03.02			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan				100.000.000		100.000.000		

					Sanitasi								
						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Laporan	2	100.000.000	2	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	Dokumen	3	125.000.000	3	150.000.000		
		4.01.06.1.03.02			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				125.000.000		150.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	125.000.000	4	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	80	318.000.000	85	395.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					318.000.000		395.000.000		
						Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	50.000.000	2	75.000.000		
		4.01.06.1.03.03			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan				50.000.000		75.000.000		
						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Laporan	2	50.000.000	2	75.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	4	268.000.000	4	320.000.000		
		4.01.06.1.03.01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				268.000.000		320.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	268.000.000	4	320.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah								**780.000.000**		**997.000.000**		
						Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	76	780.000.000	78	997.000.000		
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN						780.000.000		997.000.000		
						persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	80	305.000.000	82	372.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					305.000.000		372.000.000		
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	2	145.000.000	2	176.000.000		
		4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				145.000.000		176.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan	Laporan	4	145.000.000	4	176.000.000		
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	4	160.000.000	4	196.000.000		
		4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				160.000.000		196.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro	Laporan	4	160.000.000	4	196.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	75	475.000.000	77	625.000.000		
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					475.000.000		625.000.000		
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	2	250.000.000	2	325.000.000		
		4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				250.000.000		325.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro	Laporan	4	250.000.000	4	325.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	225.000.000	3	300.000.000		
		4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				225.000.000		300.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	4	225.000.000	4	300.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**349.674.000**		**350.000.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**349.674.000**		**350.000.000**		
						Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Angka	78	349.674.000	78.5	350.000.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						349.674.000		350.000.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	349.674.000	100	350.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					349.674.000		350.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	2	349.674.000	2	350.000.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280.000.000		280.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	280.000.000	12	280.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				69.674.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	69.674.000	12	70.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**425.470.610.000**		**327.674.109.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**1.515.000.000**		**1.810.999.000**		
						Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	85	1.515.000.000	90	1.810.999.000		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.515.000.000		1.810.999.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	90	765.000.000	95	910.999.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					765.000.000		910.999.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	4	300.000.000	4	375.000.000		
		4.01.04.1.02.02			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				300.000.000		375.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Laporan	3	300.000.000	3	375.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	4	250.000.000	4	275.000.000		
		4.01.04.1.02.01			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Laporan	3	250.000.000	3	275.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	4	215.000.000	4	260.999.000		
		4.01.04.1.02.03			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				215.000.000		260.999.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Laporan	3	215.000.000	3	260.999.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	90	750.000.000	95	900.000.000		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					750.000.000		900.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Dokumen	4	195.000.000	4	225.000.000		
		4.01.04.1.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				195.000.000		225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Laporan	3	195.000.000	3	225.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dokumen	4	370.000.000	4	450.000.000		
		4.01.04.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				370.000.000		450.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan	3	370.000.000	3	450.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan	Dokumen	4	185.000.000	4	225.000.000		
		4.01.04.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				185.000.000		225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Laporan	3	185.000.000	3	225.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah								**423.955.610.000**		**325.863.110.000**		
						Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	40	423.955.610.000	45	325.863.110.000		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						423.955.610.000		325.863.110.000		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	40	423.955.610.000	42	325.863.110.000		
				Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					423.955.610.000		325.863.110.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	3	423.155.610.000	3	324.813.110.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4.01.04.1.01.01			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				423.155.610.000		324.813.110.000		
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Kegiatan	3	423.155.610.000	3	324.813.110.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	2	800.000.000	2	1.050.000.000		
		4.01.04.1.01.02			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				800.000.000		1.050.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	200.000.000	1	225.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	10	600.000.000	10	825.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**489.116.000**		**525.612.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**489.116.000**		**525.612.000**		
						Nilai IKM Biro Organisasi	Angka	78	489.116.000	78.5	525.612.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						489.116.000		525.612.000		
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	195.000.000	100	205.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					195.000.000		205.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	195.000.000	4	205.000.000		
		4.01.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit						
		4.01.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				121.000.000		130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	121.000.000	12	130.000.000		
		4.01.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				74.000.000		75.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	12	74.000.000	12	75.000.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	294.116.000	100	320.612.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.116.000		320.612.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Laporan	4	294.116.000	4	320.612.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				241.000.000		257.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi	Bulan	12	100.000.000	12	109.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	Bulan	12	141.000.000	12	148.050.000		
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				53.116.000		63.562.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi	Bulan	12	11.000.000	12	14.062.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Organisasi	Bulan	12	42.116.000	12	49.500.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**1.800.000.000**		**2.290.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**1.800.000.000**		**2.290.000.000**		
						Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	83.67	285.000.000	87.76	399.250.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						285.000.000		399.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	85.71	155.000.000	91.42	212.750.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					155.000.000		212.750.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	155.000.000	3	212.750.000		
		4.01.02.1.02.01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				155.000.000		212.750.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	155.000.000	4	212.750.000		
						Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	91.84	130.000.000	95.92	186.500.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					130.000.000		186.500.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	8	130.000.000	8	186.500.000		
		4.01.02.1.02.01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				130.000.000		186.500.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4	130.000.000	4	186.500.000		
						Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	60.98	990.000.000	85.37	1.189.500.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						990.000.000		1.189.500.000		
						Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	81.58	353.000.000	89.47	420.650.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					353.000.000		420.650.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	353.000.000	2	420.650.000		
		4.01.02.1.02.04			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				353.000.000		420.650.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	4	353.000.000	4	420.650.000		
						Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	73.17	298.000.000	85.37	362.900.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					298.000.000		362.900.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	298.000.000	2	362.900.000		
		4.01.02.1.02.02			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				298.000.000		362.900.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	76	298.000.000	76	362.900.000		
						Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	73.65	339.000.000	85.63	405.950.000		
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					339.000.000		405.950.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	339.000.000	2	405.950.000		
		4.01.02.1.02.05			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				339.000.000		405.950.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	2	339.000.000	2	405.950.000		
						Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	75.61	525.000.000	85.37	701.250.000		
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						525.000.000		701.250.000		
						Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	85.36	171.000.000	87.8	229.550.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					171.000.000		229.550.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	2	171.000.000	2	229.550.000		
		4.01.02.1.01.03			Penataan Analisis Jabatan				171.000.000		229.550.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	8	171.000.000	8	229.550.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	77.14	143.000.000	80	200.150.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					143.000.000		200.150.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4	143.000.000	4	200.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4.01.02.1.01.02			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				143.000.000		200.150.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4	143.000.000	4	200.150.000		
						Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	29.27	211.000.000	34.15	271.550.000		
				Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					211.000.000		271.550.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2	211.000.000	2	271.550.000		
		4.01.02.1.01.01			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				211.000.000		271.550.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi	Laporan	8	211.000.000	8	271.550.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO UMUM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**168.450.508.000**		**185.831.982.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**168.450.508.000**		**185.831.982.000**		
						Nilai IKM Layanan Biro Umum	Angka	78	168.450.508.000	78.5	185.831.982.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						168.450.508.000		185.831.982.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	19.066.000.000	100	16.230.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					56.000.000		80.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	Laporan	12	56.000.000	12	80.000.000		
		4.01.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				36.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	36.000.000	12	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	4	20.000.000	4	30.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					17.770.000.000		14.600.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	17.470.000.000	12	14.200.000.000		
		4.01.01.1.13.02			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				15.500.000.000		12.400.000.000		
						Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	Dokumen	12	15.500.000.000	12	12.400.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.13.03			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				1.970.000.000		1.800.000.000		
						Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	Laporan	12	1.970.000.000	12	1.800.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan	Laporan	12	300.000.000	12	400.000.000		
		4.01.01.1.13.01			Penyiapan Materi Pimpinan				300.000.000		400.000.000		
						Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun	Laporan	12	300.000.000	12	400.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Keprotokolan					1.240.000.000		1.550.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	Laporan	12	1.240.000.000	12	1.550.000.000		
		4.01.01.1.14.01			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1.120.000.000		1.300.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	1.120.000.000	12	1.300.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.14.02			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH	Bulan	12	100.000.000	12	200.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.14.03			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				20.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan	Bulan	12	20.000.000	12	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	123.897.083.000	100	139.446.982.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					86.189.459.000		100.593.880.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	86.189.459.000	12	100.593.880.000		
		4.01.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				85.085.042.000		99.136.898.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	85.085.042.000	12	99.136.898.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				800.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	800.000.000	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				254.417.000		356.982.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	254.417.000	12	356.982.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000		100.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	50.000.000	12	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					250.000.000		350.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	250.000.000	12	350.000.000		
		4.01.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	200.000.000	12	300.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		40.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	20.000.000	12	40.000.000		
		4.01.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		40.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12	20.000.000	12	40.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.731.575.000		7.650.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	Laporan	12	5.731.575.000	12	7.650.000.000		
		4.01.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				375.000.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	375.000.000	12	350.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				420.000.000		500.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	175.000.000	12	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	245.000.000	12	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				425.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	425.000.000	12	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		150.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	120.000.000	12	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.300.000.000		5.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	3.300.000.000	12	5.000.000.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				891.575.000		1.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum	Bulan	12	891.575.000	12	1.200.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.100.000.000		1.550.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	1.100.000.000	12	1.550.000.000		
		4.01.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				300.000.000		550.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	12	300.000.000	12	550.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				800.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	12	800.000.000	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	12		12			OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		75.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	Laporan	12	30.000.000	12	75.000.000		
		4.01.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000	12	75.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.200.000.000		5.825.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	6.200.000.000	12	5.825.000.000		
		4.01.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	250.000.000	12	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.250.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	1.250.000.000	12	1.500.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4.01.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				50.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	50.000.000	12	75.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.300.000.000		2.500.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	3.300.000.000	12	2.500.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000		500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	350.000.000	12	500.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					24.376.049.000		23.363.102.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	Laporan	12	24.376.049.000	12	23.363.102.000		
		4.01.01.1.11.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				241.829.000		241.829.000		
						Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH	Bulan	12	241.829.000	12	241.829.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11.04			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24.134.220.000		23.121.273.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH`	Bulan	12	24.134.220.000	12	23.121.273.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	25.487.425.000	100	30.155.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	25.000.000	12	30.000.000		
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.562.425.000		25.225.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	21.562.425.000	12	25.225.000.000		
		4.01.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.700.000.000		7.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	5.700.000.000	12	7.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				712.425.000		1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	712.425.000	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.150.000.000		17.225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	15.000.000.000	12	17.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	2	50.000.000	2	75.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Kegiatan	3	100.000.000	3	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					150.000.000		400.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	Laporan	12	150.000.000	12	400.000.000		
		4.01.01.1.11.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000		300.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	Unit	15	50.000.000	15	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	Unit	15	50.000.000	15	150.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11.03			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur	Bulan	1	25.000.000	1	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur	Bulan	1	25.000.000	1	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					3.750.000.000		4.500.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	Laporan	12	2.000.000.000	12	2.250.000.000		
		4.01.01.1.12.01			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.000.000.000		2.250.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH	Bulan	12	2.000.000.000	12	2.250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	12	350.000.000	12	450.000.000		
		4.01.01.1.12.03			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				350.000.000		450.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	12	350.000.000	12	450.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	Laporan	12	1.400.000.000	12	1.800.000.000		
		4.01.01.1.12.02			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.400.000.000		1.800.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH	Bulan	12	1.400.000.000	12	1.800.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**271.076.000**		**385.000.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**271.076.000**		**385.000.000**		
						Nilai IKM Biro Pemotdaker	Angka	78	271.076.000	78.5	385.000.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						271.076.000		385.000.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	271.076.000	100	385.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					271.076.000		385.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra	Dokumen	2	271.076.000	4	385.000.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				246.076.000		350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	60.000.000	12	100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemotdaker	Bulan	12	186.076.000	12	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemotdaker	Bulan	12	15.000.000	12	20.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**3.326.130.000**		**3.732.063.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah								**3.326.130.000**		**3.732.063.000**		
						Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90	3.326.130.000	90	3.732.063.000		
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.326.130.000		3.732.063.000		
						Efektivitas kerjasama daerah	%	90	1.231.450.000	95	1.517.063.000		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.231.450.000		1.517.063.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	90	571.450.000	95	697.063.000		
		4.01.03.1.03.01			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				571.450.000		697.063.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU	Laporan	1	310.000.000	1	327.063.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah	Laporan	12	261.450.000	14	370.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	90	250.000.000	95	290.000.000		
		4.01.03.1.03.02			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				250.000.000		290.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Dokumen	10	250.000.000	15	290.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	90	410.000.000	95	530.000.000		
		4.01.03.1.03.03			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				410.000.000		530.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan	Laporan	4	130.000.000	4	170.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Laporan	4	130.000.000	4	170.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	150.000.000	100	190.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	870.790.000	90	1.005.000.000		
				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					870.790.000		1.005.000.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	8	870.790.000	8	1.005.000.000		
		4.01.03.1.01.01			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				500.000.000		550.000.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ	Laporan	4	500.000.000	4	550.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.02			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				175.000.000		225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan	4	175.000.000	4	225.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.03			Fasilitasi Penataan Wilayah				195.790.000		230.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	Laporan	4	195.790.000	4	230.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	90	1.223.890.000	95	1.210.000.000		
				Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.223.890.000		1.210.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	223.890.000	3	280.000.000		
		4.01.03.1.02.02			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				223.890.000		280.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Laporan	4	223.890.000	4	280.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	90	700.000.000	95	550.000.000		
		4.01.03.1.02.01			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				700.000.000		550.000.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD	Dokumen	32	700.000.000	29	550.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	300.000.000	100	380.000.000		
		4.01.03.1.02.03			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				300.000.000		380.000.000		
						Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	39	300.000.000	39	380.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**300.000.000**		**437.500.000**		
						Nilai IKM Setda	Angka	78		78.5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73.77		73.97			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**300.000.000**		**437.500.000**		
						Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Angka	78	300.000.000	78.5	437.500.000		
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						300.000.000		437.500.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	300.000.000	100	437.500.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					300.000.000		437.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	300.000.000	2	437.500.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270.000.000		395.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	12	270.000.000	12	395.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		42.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	12	30.000.000	12	42.500.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**3.450.000.000**		**4.175.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85		85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80		80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**3.450.000.000**		**4.175.000.000**		
						Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	85	3.450.000.000	90	4.175.000.000		
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						3.450.000.000		4.175.000.000		
						Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	85	875.000.000	90	1.030.000.000		
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					875.000.000		1.030.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	875.000.000	3	1.030.000.000		
		4.01.07.1.02.01			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				270.000.000		325.000.000		
						Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	12	270.000.000	12	325.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.02			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				430.000.000		505.000.000		
						Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa	Laporan	12	430.000.000	12	505.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.03			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				175.000.000		200.000.000		
						Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa	Laporan	12	175.000.000	12	200.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	93	1.900.000.000	95	2.325.000.000		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.900.000.000		2.325.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	5	1.900.000.000	5	2.325.000.000		
		4.01.07.1.01.01			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				400.000.000		500.000.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	200.000.000	4	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan SHB	Laporan	2	200.000.000	2	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.02			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.200.000.000		1.450.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa	Laporan	12	900.000.000	12	1.100.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	2	300.000.000	2	350.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.03			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.000.000		375.000.000		
						Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa	Laporan	4	300.000.000	4	375.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	90	675.000.000	92	820.000.000		
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					675.000.000		820.000.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	675.000.000	3	820.000.000		
		4.01.07.1.03.01			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				225.000.000		270.000.000		
						Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	225.000.000	2	270.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.02			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				225.000.000		250.000.000		
						Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	225.000.000	4	250.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.03			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				225.000.000		300.000.000		
						Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	225.000.000	4	300.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah									**165.495.350.000**		**185.217.830.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Indeks Kepuasaan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	%	88.5		89		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya Ketercapaian Kinerja Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah								**165.495.350.000**		**185.217.830.000**		
						Persentase capaian tingkat Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	%	74	165.495.350.000	75	185.217.830.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						165.495.350.000		185.217.830.000		
						Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA	%	95	146.844.150.000	95	166.566.630.000	Bagian Persidangan	
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD					30.000.000.000		31.000.000.000		
						Jumlah fasilitasi penyusunan RAPERDA	Laporan	12	30.000.000.000	12	31.000.000.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	
		4.02.02.1.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				30.000.000.000		31.000.000.000		
						Jumlah laporan fasilitasi penyusunan RAPERDA	Laporan	120	30.000.000.000	120	31.000.000.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					1.233.600.000		1.233.600.000		
						Jumlah laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan	12	1.233.600.000	12	1.233.600.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	
		4.02.02.1.02.03			Pembahasan APBD				1.233.600.000		1.233.600.000		
						Jumlah laporan pembahasan APBD	Laporan	12	1.233.600.000	12	1.233.600.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					26.472.430.000		28.972.430.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	268	26.472.430.000	268	28.972.430.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.01			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5.036.056.000		5.536.056.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	48	5.036.056.000	48	5.536.056.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.03.02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5.036.056.000		5.536.056.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	48	5.036.056.000	48	5.536.056.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.03.03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5.036.056.000		5.536.056.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	48	5.036.056.000	48	5.536.056.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.03.04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5.036.056.000		5.536.056.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	48	5.036.056.000	48	5.536.056.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi
		4.02.02.1.03.05			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				5.036.056.000		5.536.056.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	48	5.036.056.000	48	5.536.056.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4.02.02.1.03.06			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				792.150.000		792.150.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	2	792.150.000	2	792.150.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.03.07			Pengawasan Penggunaan Anggaran				500.000.000		500.000.000		
						Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan	26	500.000.000	26	500.000.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Peningkatan Kapasitas DPRD					9.605.050.000		9.605.050.000		
						Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	6	9.605.050.000	6	9.605.050.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.04.02			Pendalaman Tugas DPRD				9.605.050.000		9.605.050.000		
						Jumlah laporan Pendalaman Tugas DPRD	Laporan	6	9.605.050.000	6	9.605.050.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					48.073.110.000		50.109.183.000		
						Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	51	48.073.110.000	51	50.109.183.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	
		4.02.02.1.05.01			Kunjungan Kerja dalam Daerah				13.149.840.000		15.185.913.000		
						Jumlah laporan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan	24	13.149.840.000	24	15.185.913.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.05.02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	24	150.000.000	24	150.000.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.05.03			Pelaksanaan Reses				34.773.270.000		34.773.270.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan reses	Laporan	3	34.773.270.000	3	34.773.270.000	SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Laporan	16	1.000.000.000	16	1.000.000.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	
		4.02.02.1.06.01			Penyusunan Kode Etik DPRD				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyusunan kode etik DPRD	Laporan	16	1.000.000.000	16	1.000.000.000	SUB BAGIAN PER-UU-AN DAN PENGKAJIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Fasilitasi Tugas DPRD					30.459.960.000		44.646.367.000		
						Jumlah laporan kegiatan fasilitas tugas DPRD	Laporan	37	30.459.960.000	37	44.646.367.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	
		4.02.02.1.08.01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				30.459.960.000		44.646.367.000		
						Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Laporan	37	30.459.960.000	37	44.646.367.000	SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Layanan Bagian Humas	%	95	18.651.200.000	95	18.651.200.000	Bagian Humas	
				Peningkatan Kapasitas DPRD					11.651.200.000		11.651.200.000		
						Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Bag. Humas)	Laporan	709	11.651.200.000	709	11.651.200.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
		4.02.02.1.04.04			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2.793.000.000		2.793.000.000		
						Jumlah laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan	36	2.793.000.000	36	2.793.000.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				480.000.000		480.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Laporan	12	480.000.000	12	480.000.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.02.1.04.06			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				6.068.800.000		6.068.800.000		
						Jumlah laporan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Laporan	406	6.068.800.000	406	6.068.800.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.02.1.04.07			Penyusunan Program Kerja DPRD				2.309.400.000		2.309.400.000		
						Jumlah laporan Penyusunan Program Kerja DPRD	Laporan	255	2.309.400.000	255	2.309.400.000	SUB BAGIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pembahasan Kerja Sama Daerah					7.000.000.000		7.000.000.000		
						Jumlah media masa pembahasan kerjasama daerah	Angka	81	7.000.000.000	81	7.000.000.000	SUB BAGIAN PUBLIKASI	
		4.02.02.1.07.02			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				7.000.000.000		7.000.000.000		
						Jumlah media masa yang diajak kerjasama / jumlah website	Angka	81	7.000.000.000	81	7.000.000.000	SUB BAGIAN PUBLIKASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah									**168.930.054.000**		**173.782.170.000**	**Sekretariat DPRD**	
						Nilai kepuasan masyarakat	%	74		75		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**135.120.382.000**		**139.694.978.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68	135.120.382.000	69	139.694.978.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI						135.120.382.000		139.694.978.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	%	100	135.120.382.000	100	139.694.978.000	BAGIAN KEUANGAN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD yang disusun	Dokumen	13	1.000.000.000	13	1.000.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	
		4.02.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				700.000.000		700.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD	Dokumen	9	700.000.000	9	700.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	Dokumen	4	300.000.000	4	300.000.000	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.760.906.000		23.335.502.000		
						Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	48	18.760.906.000	48	23.335.502.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
		4.02.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.910.906.000		22.485.502.000		
						Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	Laporan	24	17.910.906.000	24	22.485.502.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				850.000.000		850.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sekretariat DPRD	Laporan	24	850.000.000	24	850.000.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					115.359.476.000		115.359.476.000		
						Jumlah laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan	36	115.359.476.000	36	115.359.476.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	
		4.02.01.1.15.01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				115.359.476.000		115.359.476.000		
						Jumlah laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Laporan	36	115.359.476.000	36	115.359.476.000	SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**33.809.672.000**		**34.087.192.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	74	33.809.672.000	75	34.087.192.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI						33.809.672.000		34.087.192.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	33.809.672.000	100	34.087.192.000	Bagian Umum	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					853.674.000		853.674.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD	Bulan	12	853.674.000	12	853.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				853.674.000		853.674.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	853.674.000	12	853.674.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					281.600.000		781.600.000		
						Jumlah orang yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD	Orang	60	281.600.000	60	781.600.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4.02.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				122.217.000		122.217.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian	Bulan	12	122.217.000	12	122.217.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				159.383.000		159.383.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar	Orang	40	159.383.000	40	159.383.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						500.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	20		20	500.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.853.343.000		7.853.343.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Bulan	12	7.853.343.000	12	7.853.343.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	
		4.02.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				92.394.000		92.394.000		
						Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	390	92.394.000	390	92.394.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.879.000		133.879.000		
						Jumlah orang yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	422	133.879.000	422	133.879.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				438.450.000		438.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bulan	12	438.450.000	12	438.450.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.200.000.000		1.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Sekretariat DPRD	Bulan	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.933.620.000		5.933.620.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12	5.933.620.000	12	5.933.620.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				55.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya arsip Sekretariat DPRD	Bulan	12	55.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.612.323.000		10.389.843.000		
						Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4622	10.612.323.000	4622	10.389.843.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit					SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.222.480.000				
						Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Unit	5	2.222.480.000			SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				3.000.000.000		4.000.000.000		
						Jumlah Unit Mebel yang diadakan	Unit	1737	3.000.000.000	1737	4.000.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000.000		5.000.000.000		
						Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	1335	4.000.000.000	1335	5.000.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.389.843.000		1.389.843.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1545	1.389.843.000	1545	1.389.843.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.065.309.000		6.065.309.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	6.065.309.000	12	6.065.309.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	
		4.02.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110.923.000		110.923.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	Bulan	12	110.923.000	12	110.923.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				682.050.000		682.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	682.050.000	12	682.050.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.772.336.000		3.772.336.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	3.772.336.000	12	3.772.336.000	SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.327.302.000		6.327.302.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	6.327.302.000	12	6.327.302.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				502.800.000		502.800.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Bulan	12	502.800.000	12	502.800.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.963.876.000		2.963.876.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan oprasional	Bulan	12	2.963.876.000	12	2.963.876.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya mebelair	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.457.391.000		1.457.391.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	1.457.391.000	12	1.457.391.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		4.02.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.363.235.000		1.363.235.000		
						Jumlah bulan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	1.363.235.000	12	1.363.235.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					1.816.121.000		1.816.121.000		
						Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Orang	120	1.816.121.000	120	1.816.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
		4.02.01.1.15.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.250.000.000		1.250.000.000		
						Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang memperoleh Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Orang	120	1.250.000.000	120	1.250.000.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		4.02.01.1.15.03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				566.121.000		566.121.000		
						Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up DPRD	Orang	120	566.121.000	120	566.121.000	SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kontribusi Iptek untuk meningkatkan Daya Saing Daerah									**4.400.000.000**		**4.900.000.000**		
						Indek Daya Saing Daerah	Nilai	4		4.2			
	Implementasi hasil riset dalam pembangunan daerah								**4.400.000.000**		**4.900.000.000**		
						Persentase urusan pemerintah daerah yang mengimplementasikan hasil riset	%	20	4.400.000.000	20	4.900.000.000		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.400.000.000		4.900.000.000		
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri	%	20	1.500.000.000	20	1.700.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					1.500.000.000		1.700.000.000		
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20	1.500.000.000	20	1.700.000.000		
		5.05.02.1.03.02			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				750.000.000		850.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen	3	750.000.000	3	850.000.000		
		5.05.02.1.03.04			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				750.000.000		850.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	Dokumen	3	750.000.000	3	850.000.000		
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	20	1.200.000.000	20	1.400.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					600.000.000		700.000.000		
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemsosbud sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20	600.000.000	20	700.000.000		
		5.05.02.1.01.02			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				600.000.000		700.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor pemerintahan umum	Dokumen	3	600.000.000	3	700.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					600.000.000		700.000.000		
						persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20	600.000.000	20	700.000.000		
		5.05.02.1.02.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				600.000.000		700.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor sosial budaya	Dokumen	3	600.000.000	3	700.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	20	1.700.000.000	20	1.800.000.000		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					1.700.000.000		1.800.000.000		
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang SDA dan LH sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional	%	20	1.700.000.000	20	1.800.000.000		
		5.05.02.1.03.07			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				850.000.000		900.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor lingkungan hidup	Dokumen	3	850.000.000	3	900.000.000		
		5.05.02.1.03.09			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				850.000.000		900.000.000		
						jumlah penelitian dan pengembangan sektor pekerjaan umum	Dokumen	3	850.000.000	3	900.000.000		
Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan inovasi daerah									**4.350.000.000**		**4.540.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
						Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67		71		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Meningkatnya inovasi daerah yang diterapkan								**4.350.000.000**		**4.540.000.000**		
						Persentase inovasi daerah yang diterapkan	%	90	4.350.000.000	100	4.540.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						4.350.000.000		4.540.000.000		
						Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri	%	84	1.740.000.000	100	1.790.000.000	UPT BRIDA	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					1.740.000.000		1.790.000.000		
						persentase inovasi daerah bidang ekonomi dan industri yang difasilitasi	%	100	1.740.000.000	100	1.790.000.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				261.000.000		265.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi bidang ekonomi dan industri	Buah	3	261.000.000	3	265.000.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				174.000.000		200.000.000		
						Jumlahinovasi yang difasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Bidang ekonomi industri	Buah	2	174.000.000	2	200.000.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1.305.000.000		1.325.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Sosialisasi dan Diseminasi bidang ekonomi industri	Buah	126	1.305.000.000	126	1.325.000.000	SUB BIDANG PEREKAYASAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	
						Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	%	84	1.740.000.000	100	1.825.000.000	UPT BRIDA	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					1.740.000.000		1.825.000.000		
						persentase inovasi daerah bidang pemsosbud yang difasilitasi	%	100	1.740.000.000	100	1.825.000.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				348.000.000		350.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi bidang Pemsosbud	Buah	4	348.000.000	4	350.000.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.05.02.1.04.02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				174.000.000		175.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi bidang Pemsosbud	Buah	2	174.000.000	2	175.000.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.03			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				487.200.000		500.000.000		
						Jumlah kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif bidang Pemsosbud	Kegiatan	49	487.200.000	49	500.000.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				226.200.000		250.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Sosialisasi dan Diseminasi bidang Pemsosbud	Buah	4	226.200.000	4	250.000.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.05			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				504.600.000		550.000.000		
						Jumlah Inovasi yang terfasilitasi KI	Buah	100	504.600.000	100	550.000.000	SUB BIDANG PENERAPAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
						Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	84	870.000.000	100	925.000.000	UPT BRIDA	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					870.000.000		925.000.000		
						persentase inovasi daerah bidang SDA, LH, pertanian dan kehutanan yang difasilitasi	%	100	870.000.000	100	925.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.01			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				217.500.000		250.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi bidang SDA, LH, Pertanian dan Kehutanan	Buah	2	217.500.000	2	250.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				261.000.000		275.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi SDA, LH, Pertanian dan Kehutanan	Buah	2	261.000.000	2	275.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
		5.05.02.1.04.04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				391.500.000		400.000.000		
						Jumlah inovasi yang difasilitasi Sosialisasi dan Diseminasi bidang SDA, LH, Pertanian dan Kehutanan	Buah	6	391.500.000	6	400.000.000	SUB BIDANG PELAYANAN INOVASI DAN TAKNOLOGI	
Meningkatkan tata kelola organisasi BRIDA									**4.000.000.000**		**4.368.300.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84		85			
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**50.000.000**		**75.000.000**		
						Nilai Sakip OPD	Nilai	81.5	50.000.000	82	75.000.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						50.000.000		75.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	50.000.000	100	75.000.000		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50.000.000		75.000.000		
						Jumlah usulan dokumen perencanaan	Dokumen	2	50.000.000	2	75.000.000		
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						jumlah usulan dokumen perencanaan	Dokumen	2	50.000.000	2	75.000.000		
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi BRIDA								**3.950.000.000**		**4.293.300.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	3.950.000.000	85	4.293.300.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.950.000.000		4.293.300.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Organisasi BRIDA	%	100	3.950.000.000	100	4.293.300.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					205.560.000		225.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	205.560.000	1	225.000.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				205.560.000		225.000.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	205.560.000	12	225.000.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					78.500.000		100.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	78.500.000	1	100.000.000		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				78.500.000		100.000.000		
						Jumlah bulan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	78.500.000	12	100.000.000		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					160.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	160.000.000	1	200.000.000		
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						jumlah unit Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Unit						
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				160.000.000		200.000.000		
						jumlah bulan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bulan	12	160.000.000	12	200.000.000		
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah orang ASN yang melaksanakan Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0		0			
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
						Jumlah orang ASN yang melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0		0			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.275.000.000		1.315.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.275.000.000	1	1.315.000.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		35.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	25.000.000	12	35.000.000		
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				750.000.000		750.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	750.000.000	12	750.000.000		
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	0		0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		10.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000		
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		75.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	50.000.000	12	75.000.000		
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000		5.000.000		
						jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000		
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		
						jumlah bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000		
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		400.000.000		
						jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000		
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		10.000.000		
						jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000		125.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	100.000.000	1	125.000.000		
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				100.000.000		125.000.000		
						jumlah paket pengadaaan Mebel	Paket	1	100.000.000	1	125.000.000		
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						jumlah unit pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit						
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						jumlah unit pengadaaan sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit						
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						jumlah unit pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit						
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					975.000.000		1.033.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	975.000.000	1	1.033.300.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000		
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				325.800.000		325.800.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	325.800.000	12	325.800.000		
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	75.000.000		
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				591.700.000		625.000.000		
						Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	591.700.000	12	625.000.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.155.940.000		1.295.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.155.940.000	1	1.295.000.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dikenai Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	0		0			
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000		175.000.000		
						jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikenai Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	10	150.000.000	10	175.000.000		
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000		
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	0		0			
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	75.000.000	12	100.000.000		
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				825.940.000		900.000.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	825.940.000	12	900.000.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				85.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	85.000.000	12	100.000.000		
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**32.088.065.000**		**36.185.000.000**	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84		85		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**400.000.000**		**500.000.000**		
						Nilai SAKIP	Nilai	81.5	400.000.000	82	500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						400.000.000		500.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	400.000.000	100	500.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					400.000.000		500.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	400.000.000	2	500.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				300.000.000		350.000.000		
						Jumlah dokumen Renja PD; Renja Perubahan; RKA; RKAP; DPA; DPPA	Dokumen	1	300.000.000	1	350.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen LKjIP; Laporan pengendalian, evaluasi triwulanan, Laporan Kinerja.	Dokumen	1	100.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**31.688.065.000**		**35.685.000.000**		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	31.688.065.000	85	35.685.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						31.688.065.000		35.685.000.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	31.688.065.000	100	35.685.000.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.138.065.000		28.390.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	25.138.065.000	12	28.390.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.453.185.000		27.685.120.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	24.453.185.000	12	27.685.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				461.880.000		461.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	461.880.000	12	461.880.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				103.000.000		103.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	103.000.000	12	103.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60.000.000		80.000.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Laporan	12	60.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					166.250.000		224.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Laporan	1	166.250.000	1	224.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				142.250.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	142.250.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24.000.000		24.000.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	4	24.000.000	4	24.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.000.000		420.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	300.000.000	1	420.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				150.000.000		250.000.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	150.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	60	30.000.000	90	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	200	60.000.000	200	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	36	60.000.000	60	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.457.000.000		1.666.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.457.000.000	1	1.666.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				36.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	36.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	75.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		250.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	200.000.000	12	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				120.000.000		150.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	120.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000		36.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	36.000.000	12	36.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000.000		700.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	600.000.000	12	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					520.750.000		338.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	520.750.000	2	338.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				33.000.000		50.000.000		
						Jumlah paket pengadaan meubelair	Paket	10	33.000.000	15	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		188.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	15	100.000.000	150	188.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				387.750.000		100.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	5	387.750.000	5	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah unit pengadaan Aset Tak Berwujud	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Gedung Kantor / bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.472.000.000		3.080.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Laporan	1	2.472.000.000	1	3.080.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	60.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				942.000.000		1.220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	942.000.000	12	1.220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		300.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	200.000.000	12	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.270.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Bulan	12	1.270.000.000	12	1.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.634.000.000		1.567.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	1.634.000.000	4	1.567.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				514.000.000		525.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	514.000.000	12	525.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				270.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	270.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				340.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	340.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				24.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap tak berwujud	Bulan	12	24.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000		150.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	300.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	90.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	66.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas									**9.259.800.000**		**11.504.800.000**		
						Persentase perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	90		90			
	Mewujudkan Konsistensi , keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah								**9.259.800.000**		**11.504.800.000**		
						Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	90	900.000.000	90	975.000.000		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						900.000.000		975.000.000		
						Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor	%	90	900.000.000	90	975.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					300.000.000		300.000.000		
						Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	90	300.000.000	90	300.000.000		
		5.01.03.1.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup pemerintahan yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000		
		5.01.03.1.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup pembangunan manusia yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					300.000.000		325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sector lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	90	300.000.000	90	325.000.000		
		5.01.03.1.02.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			150.000.000		175.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup perekonomian yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000		
		5.01.03.1.02.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup SDA yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					300.000.000		350.000.000		
						Persentase keselarasan dan ketercapaian sasaran pembangunan lintas sektor lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	90	300.000.000	90	350.000.000		
		5.01.03.1.03.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			150.000.000		175.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup infrastruktur yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000		
		5.01.03.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			150.000.000		175.000.000		
						Jumlah dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan strategis lintas sektor lingkup kewilayahan yang diimplementasikan dalam dokumen RPJMD/RKPD	Dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000		
						Persentase Konsistensi , keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	90	8.359.800.000	90	10.529.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						4.000.000.000		4.700.000.000		
						Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan	%	90	4.000.000.000	90	4.700.000.000	Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					2.650.000.000		3.200.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	Dokumen	2	2.650.000.000	3	3.200.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.01.06			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				2.650.000.000		3.200.000.000		
						Jumlah dokumen RKPD yang disusun	Dokumen	2	2.650.000.000	2	2.700.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	Dokumen	0		1	500.000.000	SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					350.000.000		400.000.000		
						Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah	Dokumen	1	350.000.000	1	400.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.01.02.1.02.01			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah laporan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan yang disusun	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.02.04			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah buku profil pembangunan daerah yang disusun	Buku	1	100.000.000	1	150.000.000	SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					1.000.000.000		1.100.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	
		5.01.02.1.03.03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				600.000.000		700.000.000		
						Jumlah laporan monev pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	1	600.000.000	1	700.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.02.1.03.04			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah kabupaten/kota yang di fasilitasi dokumen perencanaannya	Kabupaten/Kota	35	400.000.000	35	400.000.000	SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						4.359.800.000		5.829.800.000		
						Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	90	1.300.000.000	90	1.850.000.000	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.300.000.000		1.850.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup infrastruktur dan perhubungan	Dokumen	1	450.000.000	1	625.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000		450.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup infrast pembangunan	Laporan	1	300.000.000	1	450.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
		5.01.03.1.03.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				150.000.000		175.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup infrastruktur pembangunan	Laporan	1	150.000.000	1	175.000.000	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan	Dokumen	1	425.000.000	1	625.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000		425.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup pengembangan wilayah , pertanahan & pemukiman	Laporan	1	300.000.000	1	425.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		5.01.03.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				125.000.000		200.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pengembangan wilayah , pertanahan & pemukiman	Laporan	1	125.000.000	1	200.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup SDA dan LH	Dokumen	1	425.000.000	1	600.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000		400.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup SDA & LH	Laporan	1	300.000.000	1	400.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		5.01.03.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				125.000.000		200.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup SDA & LH	Laporan	1	125.000.000	1	200.000.000	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
						Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	90	1.459.800.000	90	1.929.800.000	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					1.459.800.000		1.929.800.000		
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan sosial	Dokumen	1	450.000.000	1	625.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		5.01.03.1.01.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75.000.000		425.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup Kesos	Laporan	1	75.000.000	1	425.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03.1.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				375.000.000		200.000.000		
						laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup kesos	Laporan	1	375.000.000	1	200.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	Dokumen	1	534.800.000	1	679.800.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		5.01.03.1.01.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah laporan rencana pembangunan lingkup pembermasdes	Laporan	1	75.000.000	1	100.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03.1.01.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				459.800.000		579.800.000		
						laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pembermasdes	Dokumen	1	459.800.000	1	579.800.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pendidikan dan mental spiritual	Dokumen	1	475.000.000	1	625.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
		5.01.03.1.01.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75.000.000		425.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup PMS	Laporan	1	75.000.000	1	425.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		5.01.03.1.01.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				400.000.000		200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup PMS	Laporan	1	400.000.000	1	200.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian	%	90	1.600.000.000	90	2.050.000.000	Bidang Perekonomian	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					1.600.000.000		2.050.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan	Dokumen	1	475.000.000	1	625.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				350.000.000		425.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup eknaker	Laporan	1	350.000.000	1	425.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
		5.01.03.1.02.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				125.000.000		200.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup eknaker	Laporan	1	125.000.000	1	200.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi	Dokumen	1	675.000.000	1	750.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				400.000.000		475.000.000		
						jumlah laporan rencana pembangunan lingkup keuangan kerjasama & investasi	Laporan	1	400.000.000	1	475.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
		5.01.03.1.02.04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				275.000.000		275.000.000		
						jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup keuangan kerjasama & investasi	Laporan	1	275.000.000	1	275.000.000	SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI	
						Jumlah dokumen perencanaan lingkup pertanian dan kelautan	Dokumen	1	450.000.000	1	675.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				325.000.000		500.000.000		
						Jumlah laporan rencana pembangunan lingkup pertanian & kelautan	Laporan	1	325.000.000	1	500.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	
		5.01.03.1.02.08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				125.000.000		175.000.000		
						Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pertanian & Kelautan	Laporan	1	125.000.000	1	175.000.000	SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah									**33.853.659.000**		**31.231.704.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	7.44		5		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Pajak Daerah								**23.462.218.000**		**22.515.455.000**		
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	8.61	23.462.218.000	3.3	22.515.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						23.462.218.000		22.515.455.000		
						Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	%	8	1.286.286.000	12	1.216.119.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.286.286.000		1.216.119.000		
						jumlah obyek piutang pajak kendaraan bermotor yang tertangani	Unit	419024	1.286.286.000	476563	1.216.119.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.10			Penagihan Pajak Daerah				1.286.286.000		1.216.119.000		
						Jumlah Dokumen pelaporan Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani	Dokumen	1	1.286.286.000	1	1.216.119.000	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah	%	95	12.588.689.000	95	9.548.689.000	Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.588.689.000		9.548.689.000		
						Jumlah Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah	Dokumen	1	550.000.000	2	600.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				550.000.000		600.000.000		
						Jumlah Jenis Potensi pendapatan yang Dikaji	Dokumen	1	550.000.000	1	600.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Pemetaan PAD	Dokumen	2	462.817.000	3	562.817.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	
		5.02.04.1.01.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				462.817.000		562.817.000		
						Jumlah Lokasi Pemetaan PAD di UPPD	Dokumen	1	462.817.000	1	562.817.000	SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Unit	2	11.575.872.000	21	8.385.872.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	
		5.02.04.1.01.04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				11.575.872.000		8.385.872.000		
						Jumlah Lokasi Penerapan Aplikasi yang Dikembangkan di UPPD	Unit	37	11.575.872.000	37	8.385.872.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah	%	90	1.200.000.000	90	1.500.000.000	Bidang Evaluasi dan Pembinaan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.200.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	Laporan	37	400.000.000	37	500.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.12			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				400.000.000		500.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kinerja Pendapatan PKB dan BBNKB	Dokumen	1	50.000.000	1	75.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah lokasi evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB di UPPD	Lokasi	37	350.000.000	37	425.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	Laporan	37	400.000.000	37	500.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				400.000.000		500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kinerja Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain lain	Dokumen	1	50.000.000	1	75.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Jumlah lokasi evaluasi pendapatan Retribusi dan pendapatan lain di UPPD	Lokasi	37	350.000.000	37	425.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	Laporan	37	400.000.000	37	500.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	
		5.02.04.1.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				400.000.000		500.000.000		
						Jumlah lokasi Evaluasi Sumber Daya di UPPD	Lokasi	37	400.000.000	37	500.000.000	SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB	%	6.35	1.456.917.000	2.34	1.719.815.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.456.917.000		1.719.815.000		
						Realiasai Penerimaan BBNKB	Ribu Rupiah	3350000000	1.456.917.000	3110738784000	1.719.815.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.456.917.000		1.719.815.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan PKB	Dokumen	1	1.456.917.000	1	1.719.815.000	SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	8.56	64.140.000	8.05	83.544.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					64.140.000		83.544.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	54743848	64.140.000	54487576	83.544.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				64.140.000		83.544.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	1	64.140.000	1	83.544.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	7.16	77.500.000	8.05	80.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					77.500.000		80.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	125311263	77.500.000	126361126	80.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				77.500.000		80.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	77.500.000	1	80.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	%	6	20.000.000	8.05	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	66609340	20.000.000	67900385	30.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	20.000.000	1	30.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	%	6	75.230.000	8.05	86.890.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					75.230.000		86.890.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	55676500	75.230.000	56755641	86.890.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				75.230.000		86.890.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1	75.230.000	1	86.890.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	8.28	24.250.000	8.05	24.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					24.250.000		24.250.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	84800561	24.250.000	84621823	24.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				24.250.000		24.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	1	24.250.000	1	24.250.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	%	4.39	8.750.000	8.05	8.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.750.000		8.750.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	114139488	8.750.000	118150063	8.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				8.750.000		8.750.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	1	8.750.000	1	8.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	4.1	20.600.000	8.05	34.504.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.600.000		34.504.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	136518712	20.600.000	141705950	34.504.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.600.000		34.504.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	1	20.600.000	1	34.504.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	%	4.34	27.275.000	8.05	42.694.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.275.000		42.694.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	131321988	27.275.000	135996349	42.694.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				27.275.000		42.694.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	27.275.000	1	42.694.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	7.31	20.000.000	8.05	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	107457447	20.000.000	108202563	30.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	1	20.000.000	1	30.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	%	4.52	17.750.000	8.05	34.034.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.750.000		34.034.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	126137013	17.750.000	130403446	34.034.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				17.750.000		34.034.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	1	17.750.000	1	34.034.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	6.6	27.785.000	8.05	32.430.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.785.000		32.430.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	93823888	27.785.000	95099871	32.430.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				27.785.000		32.430.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	1	27.785.000	1	32.430.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	6.4	62.906.000	8.05	74.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					62.906.000		74.200.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	69998484	62.906.000	71086913	74.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				62.906.000		74.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	12	62.906.000	12	74.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	%	4.64	38.875.000	8.05	55.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					38.875.000		55.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	92774190	38.875.000	95803306	55.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				38.875.000		55.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	1	38.875.000	1	55.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	%	4.39	19.050.000	8.05	27.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.050.000		27.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	122723270	19.050.000	127029984	27.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19.050.000		27.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	1	19.050.000	1	27.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	%	6.47	10.650.000	8.05	13.845.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.650.000		13.845.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	110160978	10.650.000	111799698	13.845.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.650.000		13.845.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	1	10.650.000	1	13.845.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	%	6	32.000.000	8.05	58.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.000.000		58.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	94240360	32.000.000	96066959	58.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.000.000		58.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	1	32.000.000	1	58.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	%	6	39.000.000	8.05	45.595.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					39.000.000		45.595.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	146213220	39.000.000	149047174	45.595.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				39.000.000		45.595.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	1	39.000.000	1	45.595.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	8.45	20.000.000	8.05	35.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.000.000		35.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	69805900	20.000.000	69553619	35.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.000.000		35.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	1	20.000.000	1	35.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	4.58	20.400.000	8.05	45.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.400.000		45.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	96296861	20.400.000	99495529	45.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.400.000		45.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	1	20.400.000	1	45.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	7.98	67.000.000	8.05	40.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					67.000.000		40.150.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	53473100	67.000.000	141705950	40.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				67.000.000		40.150.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1	67.000.000	1	40.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	6	14.580.000	8.05	18.340.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.580.000		18.340.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	47810240	14.580.000	48736914	18.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				14.580.000		18.340.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	1	14.580.000	1	18.340.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	%	8.34	30.000.000	8.05	35.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					30.000.000		35.540.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	55133052	30.000.000	54986788	35.540.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30.000.000		35.540.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	1	30.000.000	1	35.540.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	%	8.57	25.525.000	8.05	32.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.525.000		32.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	105241445	25.525.000	104744818	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				25.525.000		32.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	1	25.525.000	1	32.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	%	8.97	43.850.000	8.05	49.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					43.850.000		49.500.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	89582828	43.850.000	88833789	49.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				43.850.000		49.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	1	43.850.000	1	49.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8.7	5.640.000	8.05	15.660.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.640.000		15.660.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	105346885	5.640.000	104717804	15.660.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5.640.000		15.660.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	1	5.640.000	1	15.660.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	%	7.82	19.000.000	8.05	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.000.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	109842888	19.000.000	110079470	30.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	1	19.000.000	1	30.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	8.39	51.750.000	8.05	59.605.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.750.000		59.605.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	47467075	51.750.000	47321400	59.605.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				51.750.000		59.605.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	1	51.750.000	1	59.605.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8.98	51.540.000	8.05	71.540.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.540.000		71.540.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	56368567	51.540.000	55887963	71.540.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				51.540.000		71.540.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	51.540.000	1	71.540.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	6.55	50.000.000	8.05	55.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					50.000.000		55.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	50830222	50.000.000	51546332	55.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	%	8.46	69.100.000	8.05	76.562.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.100.000		76.562.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	21466438	69.100.000	21386152	76.562.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				69.100.000		76.562.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang	Dokumen	1	69.100.000	1	76.562.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	%	6.95	12.150.000	8.05	12.150.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.150.000		12.150.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	35116300	12.150.000	35477543	12.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12.150.000		12.150.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	1	12.150.000	1	12.150.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	%	6	20.400.000	8.05	43.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					20.400.000		43.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	29713920	20.400.000	30289845	43.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20.400.000		43.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga	Dokumen	1	20.400.000	1	43.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	%	5.52	16.000.000	8.05	16.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					16.000.000		16.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	181125114	16.000.000	185474517517	16.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				16.000.000		16.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I	Dokumen	1	16.000.000	1	16.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	%	5.66	18.400.000	8.05	53.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.400.000		53.400.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	154441721	18.400.000	157941143	53.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				18.400.000		53.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II	Dokumen	1	18.400.000	1	53.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	%	5.3	32.335.000	2.86	31.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.335.000		31.400.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	153485280	32.335.000	157941143	31.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				32.335.000		31.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III	Dokumen	1	32.335.000	1	31.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	%	7.59	29.000.000	8.05	33.350.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					29.000.000		33.350.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	118953712	29.000.000	119462925	33.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				29.000.000		33.350.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta	Dokumen	1	29.000.000	1	33.350.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	%	6.85	10.000.000	8.05	25.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.000.000		25.000.000		
						Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	35847902	10.000.000	36252294	25.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10.000.000		25.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal	Dokumen	1	10.000.000	1	25.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	%	21.15	53.548.000	4.28	73.548.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					53.548.000		73.548.000		
						Realisasi Penerimaan Pajak Rokok	Ribu Rupiah	2834423506	53.548.000	2460008	73.548.000		
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				53.548.000		73.548.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Rokok	Dokumen	1	53.548.000	1	73.548.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan PAP	%	13.26	436.710.000	6.85	476.710.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					436.710.000		476.710.000		
						Realisasi Penerimaan PAP	Ribu Rupiah	17243453	436.710.000	18425	476.710.000		
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				436.710.000		476.710.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PAP	Dokumen	1	436.710.000	1	476.710.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB	%	8	129.490.000	7.01	169.490.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					129.490.000		169.490.000		
						Realisasi Penerimaan PBBKB	Ribu Rupiah	2156225094	129.490.000	2125375	169.490.000		
		5.02.04.1.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.				129.490.000		169.490.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PBBKB	Dokumen	1	129.490.000	1	169.490.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan PKB	%	4.52	1.456.797.000	6.3	1.634.066.000	Bidang Pajak Kendaraan Bermotor	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.456.797.000		1.634.066.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Realisasi Penerimaan PKB	Ribu Rupiah	5388146487	1.456.797.000	5416060806000	1.634.066.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.01			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1.456.797.000		1.634.066.000		
						Jumlah dokumen rencana penepatan PKB dan BBNKB	Dokumen	1	1.456.797.000	1	1.634.066.000	SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	22.91	53.900.000	2.86	51.480.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					53.900.000		51.480.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	94891451	53.900.000	81894374	51.480.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				53.900.000		51.480.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	1	53.900.000	1	51.480.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	%	8.04	92.500.000	2.86	115.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					92.500.000		115.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	221734967	92.500.000	217690214	115.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				92.500.000		115.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	92.500.000	1	115.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	%	25.26	104.000.000	2.86	125.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					104.000.000		125.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	94092815	104.000.000	79682733	125.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				104.000.000		125.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	104.000.000	1	125.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	%	-1.21	72.000.000	2.86	83.160.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					72.000.000		83.160.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	88966188	72.000.000	95524874	83.160.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				72.000.000		83.160.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1	72.000.000	1	83.160.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	%	12.62	31.250.000	2.86	100.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					31.250.000		100.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	150652795	31.250.000	141889787	100.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				31.250.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	1	31.250.000	1	100.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	%	18.41	69.500.000	2.86	67.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					69.500.000		67.100.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	155062966	69.500.000	138909109	67.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				69.500.000		67.100.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	1	69.500.000	1	67.100.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	%	8.71	88.850.000	2.86	107.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					88.850.000		107.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	217764426	88.850.000	212492591	107.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				88.850.000		107.300.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	1	88.850.000	1	107.300.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	%	8.42	186.120.000	2.86	220.110.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					186.120.000		220.110.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	164940665	186.120.000	161364959	220.110.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				186.120.000		220.110.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	186.120.000	1	220.110.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	%	8.69	66.000.000	2.86	70.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					66.000.000		70.400.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	154446966	66.000.000	1507363520	70.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				66.000.000		70.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	1	66.000.000	1	70.400.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	%	12.52	83.100.000	2.86	81.682.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					83.100.000		81.682.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	169915903	83.100.000	160176931	81.682.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				83.100.000		81.682.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	1	83.100.000	1	81.682.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	%	14.23	111.300.000	2.86	129.908.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					111.300.000		129.908.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	169415867	111.300.000	157312935	129.908.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				111.300.000		129.908.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	1	111.300.000	1	129.908.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	%	8.54	105.800.000	2.86	158.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					105.800.000		158.800.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	124343681	105.800.000	121523593	158.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				105.800.000		158.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	12	105.800.000	12	158.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	%	16.46	124.150.000	2.86	145.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					124.150.000		145.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	140772593	124.150.000	128216857	145.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				124.150.000		145.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	1	124.150.000	1	145.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	%	4.87	109.950.000	2.86	154.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					109.950.000		154.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	212560799	109.950.000	215006544	154.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				109.950.000		154.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	1	109.950.000	1	154.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	%	-0.92	72.050.000	2.86	93.665.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					72.050.000		93.665.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	166563859	72.050.000	178315573	93.665.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				72.050.000		93.665.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	1	72.050.000	1	93.665.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	%	15.54	118.000.000	2.86	116.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					118.000.000		116.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	153675480	118.000.000	141083625	116.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				118.000.000		116.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	1	118.000.000	1	116.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	%	2.34	50.650.000	2.86	52.610.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					50.650.000		52.610.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	208786231	50.650.000	216396112	52.610.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				50.650.000		52.610.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	1	50.650.000	1	52.610.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	%	28.09	73.800.000	2.86	83.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.800.000		83.800.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	102450478	73.800.000	84843229	83.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				73.800.000		83.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	1	73.800.000	1	83.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	%	16.86	111.000.000	2.86	150.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					111.000.000		150.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	141519738	111.000.000	128460828	150.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				111.000.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	1	111.000.000	1	150.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-1.83	73.000.000	2.86	159.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.000.000		159.600.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	97143457	73.000.000	104965453	159.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				73.000.000		159.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1	73.000.000	1	159.600.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	%	-6.58	107.510.000	2.86	163.460.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					107.510.000		163.460.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	83016411	107.510.000	94262594	163.460.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				107.510.000		163.460.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	1	107.510.000	1	163.460.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	%	-3.22	199.900.000	2.86	235.482.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					199.900.000		235.482.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	78297590	199.900.000	85815927	235.482.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				199.900.000		235.482.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	1	199.900.000	1	235.482.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	%	-3.29	120.750.000	2.86	120.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					120.750.000		120.750.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	171462864	120.750.000	188074373	120.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				120.750.000		120.750.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	1	120.750.000	1	120.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	%	6.26	115.300.000	2.86	112.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					115.300.000		112.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	164700819	115.300.000	164419888	112.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				115.300.000		112.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	1	115.300.000	1	112.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	15.08	88.560.000	2.86	132.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					88.560.000		132.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	181572709	88.560.000	167368744	132.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				88.560.000		132.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	1	88.560.000	1	132.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	%	41.55	37.950.000	2.86	59.028.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					37.950.000		59.028.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	160566254	37.950.000	120324958	59.028.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				37.950.000		59.028.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	1	37.950.000	1	59.028.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	%	9.25	70.000.000	2.86	105.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					70.000.000		105.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	85643656	70.000.000	83156654	105.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				70.000.000		105.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	1	70.000.000	1	105.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-4.41	93.700.000	2.86	152.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					93.700.000		152.800.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	115558058	93.700.000	128232768	152.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				93.700.000		152.800.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	93.700.000	1	152.800.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10.22	18.150.000	2.86	23.480.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					18.150.000		23.480.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	87691280	18.150.000	84393259	23.480.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				18.150.000		23.480.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	1	18.150.000	1	23.480.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	%	-56.06	53.550.000	2.86	108.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					53.550.000		108.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	42010333	53.550.000	101411976	108.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				53.550.000		108.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang	Dokumen	1	53.550.000	1	108.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	%	-29.65	83.850.000	2.86	118.850.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					83.850.000		118.850.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	59587766	83.850.000	89849919	118.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				83.850.000		118.850.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	1	83.850.000	1	118.850.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	%	-15.72	171.750.000	2.86	214.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					171.750.000		214.200.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	55883252	171.750.000	70332316	214.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				171.750.000		214.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga	Dokumen	1	171.750.000	1	214.200.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	%	2.67	134.800.000	2.86	143.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					134.800.000		143.750.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	307861338	134.800.000	318062667	143.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				134.800.000		143.750.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I	Dokumen	1	134.800.000	1	143.750.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	%	1.96	212.500.000	2.86	260.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					212.500.000		260.500.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	253220914	212.500.000	263434594	260.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				212.500.000		260.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II	Dokumen	1	212.500.000	1	260.500.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	%	-0.6	121.800.000	8.05	198.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					121.800.000		198.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	229423808	121.800.000	244818620	198.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				121.800.000		198.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III	Dokumen	1	121.800.000	1	198.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	%	-8.16	125.800.000	2.86	144.670.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					125.800.000		144.670.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	225378357	125.800.000	260310717	144.670.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				125.800.000		144.670.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta	Dokumen	1	125.800.000	1	144.670.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	%	-31.27	108.560.000	2.86	80.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					108.560.000		80.000.000		
						Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	56569753	108.560.000	87304144	80.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
		5.02.04.1.01.08			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				108.560.000		80.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal	Dokumen	1	108.560.000	1	80.000.000	SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
	Meningkatnya Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain yg Sah								**10.391.441.000**		**8.716.249.000**		
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain yg sah	%	1.06	10.391.441.000	2.3	8.716.249.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						10.391.441.000		8.716.249.000		
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	8	177.100.000	12.99	112.081.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					177.100.000		112.081.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	9552	177.100.000	10413	112.081.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				177.100.000		112.081.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	1	177.100.000	1	112.081.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	%	8	238.500.000	13.58	115.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					238.500.000		115.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	19840	238.500.000	22725	115.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				238.500.000		115.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	238.500.000	1	115.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	%	8	199.100.000	13.08	150.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					199.100.000		150.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Unit	9416	199.100.000	10195	150.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				199.100.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	199.100.000	1	150.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	%	8	288.400.000	10.11	242.203.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					288.400.000		242.203.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	8568	288.400.000	7670	242.203.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				288.400.000		242.203.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1	288.400.000	1	242.203.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	%	8	218.050.000	14.2	160.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					218.050.000		160.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Unit	11272	218.050.000	13150	160.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				218.050.000		160.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	1	218.050.000	1	160.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	%	8	355.700.000	12.76	250.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					355.700.000		250.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Unit	18056	355.700.000	17270	250.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				355.700.000		250.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	1	355.700.000	1	250.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	%	8	245.529.000	12.18	92.629.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					245.529.000		92.629.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	20296	245.529.000	20067	92.629.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				245.529.000		92.629.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	1	245.529.000	1	92.629.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	%	8	227.050.000	12.48	156.545.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					227.050.000		156.545.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Unit	14272	227.050.000	14419	156.545.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				227.050.000		156.545.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	227.050.000	1	156.545.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	%	8	336.200.000	11.89	237.380.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					336.200.000		237.380.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	15144	336.200.000	14730	237.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				336.200.000		237.380.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	1	336.200.000	1	237.380.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	%	8	278.200.000	11.48	170.524.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					278.200.000		170.524.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Unit	16408	278.200.000	16499	170.524.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				278.200.000		170.524.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	1	278.200.000	1	170.524.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	%	8	263.900.000	15.35	215.930.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					263.900.000		215.930.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	10792	263.900.000	13419	215.930.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				263.900.000		215.930.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	1	263.900.000	1	215.930.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	%	8	237.870.000	1	173.300.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					237.870.000		173.300.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	11568	237.870.000	13227	173.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				237.870.000		173.300.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	237.870.000	1	173.300.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	%	8	223.580.000	13.96	150.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					223.580.000		150.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Unit	12688	223.580.000	14496	150.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				223.580.000		150.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	1	223.580.000	1	150.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	%	8	278.600.000	14.89	132.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					278.600.000		132.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Unit	16584	278.600.000	20091	132.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				278.600.000		132.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	1	278.600.000	1	132.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	%	8	227.550.000	13.55	189.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					227.550.000		189.475.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Unit	10184	227.550.000	11474	189.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				227.550.000		189.475.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	1	227.550.000	1	189.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	%	8	218.800.000	16.96	272.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					218.800.000		272.600.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Unit	9888	218.800.000	13132	272.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				218.800.000		272.600.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	1	218.800.000	1	272.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	%	8	347.550.000	14.04	253.221.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					347.550.000		253.221.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Unit	13608	347.550.000	16629	253.221.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				347.550.000		253.221.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	1	347.550.000	1	253.221.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	%	8	237.800.000	13.48	193.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					237.800.000		193.800.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	10832	237.800.000	11784	193.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				237.800.000		193.800.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	1	237.800.000	1	193.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	%	8	315.100.000	13.57	185.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					315.100.000		185.700.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	14744	315.100.000	15586	185.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				315.100.000		185.700.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	1	315.100.000	1	185.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	%	8	257.250.000	11.08	125.245.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					257.250.000		125.245.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	10368	257.250.000	11085	125.245.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				257.250.000		125.245.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1	257.250.000	1	125.245.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	%	8	162.470.000	14.99	171.990.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					162.470.000		171.990.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	6256	162.470.000	7344	171.990.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				162.470.000		171.990.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	1	162.470.000	1	171.990.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	%	8	189.580.000	12.7	166.899.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					189.580.000		166.899.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	6640	189.580.000	7174	166.899.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				189.580.000		166.899.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	1	189.580.000	1	166.899.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	%	8	270.850.000	13.95	192.845.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					270.850.000		192.845.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Unit	13104	270.850.000	15313	192.845.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				270.850.000		192.845.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	1	270.850.000	1	192.845.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	%	8	276.760.000	13.62	235.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					276.760.000		235.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Unit	12704	276.760.000	14658	235.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				276.760.000		235.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	1	276.760.000	1	235.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	8	240.100.000	15.42	141.800.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					240.100.000		141.800.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Unit	11832	240.100.000	14996	141.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				240.100.000		141.800.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	1	240.100.000	1	141.800.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	%	8	287.910.000	13.7	200.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					287.910.000		200.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Unit	17136	287.910.000	18338	200.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				287.910.000		200.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	1	287.910.000	1	200.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	%	8	144.000.000	13.1	112.145.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					144.000.000		112.145.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	5952	144.000.000	6159	112.145.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				144.000.000		112.145.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	1	144.000.000	1	112.145.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	%	8	279.900.000	13.85	210.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					279.900.000		210.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	9392	279.900.000	11038	210.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				279.900.000		210.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	279.900.000	1	210.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	%	8	149.420.000	13.42	115.082.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					149.420.000		115.082.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	6536	149.420.000	6918	115.082.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				149.420.000		115.082.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	1	149.420.000	1	115.082.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	%	8	254.900.000	14.14	312.824.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					254.900.000		312.824.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Unit	2160	254.900.000	2477	312.824.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				254.900.000		312.824.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	Dokumen	1	254.900.000	1	312.824.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	%	8	138.550.000	14.61	147.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					138.550.000		147.450.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Unit	4728	138.550.000	5702	147.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				138.550.000		147.450.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	1	138.550.000	1	147.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	%	8	86.810.000	17	100.060.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					86.810.000		100.060.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Unit	3144	86.810.000	3747	100.060.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				86.810.000		100.060.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	Dokumen	1	86.810.000	1	100.060.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	%	8	241.820.000	13	125.285.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					241.820.000		125.285.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	Unit	15624	241.820.000	18909	125.285.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				241.820.000		125.285.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I	Dokumen	1	241.820.000	1	125.285.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	%	8	237.120.000	13.99	198.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					237.120.000		198.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Unit	12152	237.120.000	16782	198.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				237.120.000		198.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	Dokumen	1	237.120.000	1	198.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	%	8	73.000.000	15.06	68.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					73.000.000		68.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Unit	10704	73.000.000	13663	68.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				73.000.000		68.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	Dokumen	1	73.000.000	1	68.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	%	8	322.400.000	16.26	302.910.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					322.400.000		302.910.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Unit	12064	322.400.000	16865	302.910.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				322.400.000		302.910.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	Dokumen	1	322.400.000	1	302.910.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	%	8	163.100.000	14.34	130.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					163.100.000		130.000.000		
						Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Unit	4816	163.100.000	5643	130.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				163.100.000		130.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Kayada Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	Dokumen	1	163.100.000	1	130.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	%	7.28	4.500.000	4.03	472.141.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.500.000		472.141.000		
						Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan	Ribu Rupiah	547584985	4.500.000	575013	472.141.000		
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.500.000		472.141.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	Dokumen	1	4.500.000	1	472.141.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah	%	-0.83	389.512.000	0.08	489.512.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					389.512.000		489.512.000		
						Realisasi penerimaan pendapatan lain lain	Ribu Rupiah	1678883763	389.512.000	1771299	489.512.000		
		5.02.04.1.01.01			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				389.512.000		489.512.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain	Dokumen	1	389.512.000	1	489.512.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-8.48	6.625.000	6.79	7.287.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.625.000		7.287.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	2537820	6.625.000	3163000	7.287.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.625.000		7.287.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	1	6.625.000	1	7.287.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	%	0.63	25.000.000	6.09	28.750.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					25.000.000		28.750.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	699360	25.000.000	801000	28.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				25.000.000		28.750.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	25.000.000	1	28.750.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	%	49.04	32.000.000	4.38	42.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					32.000.000		42.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	342800	32.000.000	334000	42.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				32.000.000		42.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	32.000.000	1	42.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	%	38.06	11.600.000	6.1	14.784.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.600.000		14.784.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	92500	11.600.000	87000	14.784.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.600.000		14.784.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1	11.600.000	1	14.784.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	%	14.47	3.600.000	4	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		5.400.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	164840	3.600.000	182000	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	1	3.600.000	1	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	%	1.73	3.000.000	1.86	24.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.000.000		24.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	212100	3.000.000	219000	24.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.000.000		24.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	1	3.000.000	1	24.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	%	14.48	3.600.000	8.5	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	4130000	3.600.000	4340000	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	1	3.600.000	1	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	%	26.32	5.400.000	6.88	7.245.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		7.245.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	224600	5.400.000	233000	7.245.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.400.000		7.245.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	5.400.000	1	7.245.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	%	21.78	5.000.000	6.56	2.475.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.000.000		2.475.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	888990	5.000.000	975000	2.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000		2.475.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	1	5.000.000	1	2.475.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	%	19	2.250.000	10	12.734.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		12.734.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	11900	2.250.000	11000	12.734.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		12.734.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	1	2.250.000	1	12.734.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	%	32.44	7.825.000	6.84	9.133.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.825.000		9.133.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	417200	7.825.000	422000	9.133.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7.825.000		9.133.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	1	7.825.000	1	9.133.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	%	27.04	2.250.000	0.33	2.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		2.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	793970	2.250.000	630000	2.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		2.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	2.250.000	1	2.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	%	25.97	17.055.000	5	27.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					17.055.000		27.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	48500	17.055.000	42000	27.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				17.055.000		27.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	1	17.055.000	1	27.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	%	10.96	19.900.000	6.54	11.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					19.900.000		11.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	554800	19.900.000	554000	11.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				19.900.000		11.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	1	19.900.000	1	11.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	%	10	3.600.000	9.09	4.680.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		4.680.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	5500	3.600.000	6000	4.680.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		4.680.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	1	3.600.000	1	4.680.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	%	22.62	5.400.000	6.89	8.410.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		8.410.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	717300	5.400.000	791000	8.410.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.400.000		8.410.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	1	5.400.000	1	8.410.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	%	18.26	13.050.000	6.49	15.257.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					13.050.000		15.257.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	78700	13.050.000	82000	15.257.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				13.050.000		15.257.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	1	13.050.000	1	15.257.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	%	160.36	4.950.000	6.47	9.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.950.000		9.500.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	468640	4.950.000	362000	9.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.950.000		9.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	1	4.950.000	1	9.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	%	11.2	11.600.000	8.23	15.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.600.000		15.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	213500	11.600.000	250000	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.600.000		15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	1	11.600.000	1	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	%	38.28	11.700.000	6.38	7.425.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.700.000		7.425.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	297300	11.700.000	250000	7.425.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.700.000		7.425.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1	11.700.000	1	7.425.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	%	13.3	600.000	8.11	900.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					600.000		900.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	113300	600.000	120000	900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				600.000		900.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	1	600.000	1	900.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	%	21.43	6.625.000	7.59	7.804.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.625.000		7.804.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	85000	6.625.000	85000	7.804.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.625.000		7.804.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	1	6.625.000	1	7.804.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	%	16.14	12.500.000	6.83	17.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.500.000		17.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	1242743	12.500.000	1351445	17.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12.500.000		17.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	1	12.500.000	1	17.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	%	-53.33	5.400.000	6.25	10.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		10.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	7000	5.400.000	17000	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.400.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	1	5.400.000	1	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	5.29	2.250.000	6.78	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		5.400.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	358000	2.250.000	394000	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	1	2.250.000	1	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	%	10.14	4.725.000	7.8	15.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.725.000		15.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	313900	4.725.000	318000	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.725.000		15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	1	4.725.000	1	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	%	1.76	27.250.000	7.94	9.185.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.250.000		9.185.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	237100	27.250.000	272000	9.185.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				27.250.000		9.185.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	1	27.250.000	1	9.185.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	%	32.18	5.400.000	6.85	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.400.000		5.400.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	339690	5.400.000	343000	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	5.400.000	1	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	%	2.1	27.700.000	7.29	30.470.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.700.000		30.470.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	579900	27.700.000	662000	30.470.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				27.700.000		30.470.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	1	27.700.000	1	30.470.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	%	42.86	3.600.000	7.29	4.320.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		4.320.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	100000	3.600.000	103000	4.320.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		4.320.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Magelang	Dokumen	1	3.600.000	1	4.320.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	%	8.91	15.490.000	7.69	18.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.490.000		18.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	50100	15.490.000	56000	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.490.000		18.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Salatiga	Dokumen	1	15.490.000	1	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	%	1.61	1.500.000	6.96	2.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.500.000		2.000.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	630000	1.500.000	722000	2.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.500.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Semarang II	Dokumen	1	1.500.000	1	2.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	%	76.92	6.600.000	7.43	6.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.600.000		6.600.000		
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	230000	6.600.000	188000	6.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.600.000		6.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Semarang III	Dokumen	1	6.600.000	1	6.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	%	2.55		5.26		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	56400		60000		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Surakarta	Dokumen	1		1		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Tegal	%	0		0		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
						Realisasi Penerimaan PAP UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	0		0		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah								
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Pajak Air Permukaan UPPD Kota Tegal	Dokumen	1		1		SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	%	1.36	637.240.000	2.3	269.599.000		
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					637.240.000		269.599.000		
						Realisasi penerimaan retribusi Daerah	Ribu Rupiah	116972412	637.240.000	113629	269.599.000		
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				637.240.000		269.599.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	637.240.000	1	269.599.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	0.82	3.300.000	1	3.630.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.300.000		3.630.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Ribu Rupiah	81312	3.300.000	82125	3.630.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.300.000		3.630.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara	Dokumen	1	3.300.000	1	3.630.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	%	0	15.000.000	1	23.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					15.000.000		23.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	Ribu Rupiah	179051	15.000.000	180842	23.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15.000.000		23.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	15.000.000	1	23.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	%	0	30.000.000	1	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					30.000.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	Ribu Rupiah	66059	30.000.000	66719	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	%	6.49	12.500.000	1	88.473.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.500.000		88.473.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	Ribu Rupiah	98460	12.500.000	99445	88.473.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12.500.000		88.473.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora	Dokumen	1	12.500.000	1	88.473.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	%	8.91	2.400.000	1	2.700.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.400.000		2.700.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	Ribu Rupiah	95370	2.400.000	96324	2.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.400.000		2.700.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali	Dokumen	1	2.400.000	1	2.700.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	%	9.16	1.800.000	1	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.800.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	Ribu Rupiah	121500	1.800.000	122715	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.800.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes	Dokumen	1	1.800.000	1	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	%	1.4	3.600.000	1	3.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		3.600.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	Ribu Rupiah	120320	3.600.000	121523	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap	Dokumen	1	3.600.000	1	3.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	%	0.86	1.650.000	1	5.520.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.650.000		5.520.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	Ribu Rupiah	82691	1.650.000	83519	5.520.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.650.000		5.520.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak	Dokumen	1	1.650.000	1	5.520.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	%	3	3.750.000	1	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.750.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	Ribu Rupiah	137874	3.750.000	139253	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.750.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan	Dokumen	1	3.750.000	1	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	%	1.41	2.250.000	1	5.222.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		5.222.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	Ribu Rupiah	215579	2.250.000	217735	5.222.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		5.222.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara	Dokumen	1	2.250.000	1	5.222.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	%	0.46	2.925.000	1	3.414.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.925.000		3.414.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	Ribu Rupiah	76181	2.925.000	76943	3.414.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.925.000		3.414.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar	Dokumen	1	2.925.000	1	3.414.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	%	11.15	6.700.000	1	29.250.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.700.000		29.250.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	Ribu Rupiah	108125	6.700.000	109206	29.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.700.000		29.250.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen	Dokumen	1	6.700.000	1	29.250.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	%	1	14.000.000	1	22.500.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					14.000.000		22.500.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	Ribu Rupiah	74720	14.000.000	75467	22.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				14.000.000		22.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal	Dokumen	1	14.000.000	1	22.500.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	%	9.84	13.000.000	1	10.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					13.000.000		10.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	Ribu Rupiah	163189	13.000.000	164821	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				13.000.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten	Dokumen	1	13.000.000	1	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	%	1.62	5.850.000	1	7.605.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.850.000		7.605.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	Ribu Rupiah	103129	5.850.000	104160	7.605.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.850.000		7.605.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kudus	Dokumen	1	5.850.000	1	7.605.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	%	1.35	48.255.000	1	8.990.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					48.255.000		8.990.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	Ribu Rupiah	154835	48.255.000	156384	8.990.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				48.255.000		8.990.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang	Dokumen	1	48.255.000	1	8.990.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	%	-26.09	5.895.000	1	12.100.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.895.000		12.100.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	Ribu Rupiah	107453	5.895.000	108528	12.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.895.000		12.100.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati	Dokumen	1	5.895.000	1	12.100.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	%	2.49	4.950.000	1	7.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.950.000		7.600.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	Ribu Rupiah	64140	4.950.000	64781	7.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.950.000		7.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan	Dokumen	1	4.950.000	1	7.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	%	10	11.100.000	1	15.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.100.000		15.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	Ribu Rupiah	109457	11.100.000	110551	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.100.000		15.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang	Dokumen	1	11.100.000	1	15.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	%	1.11	2.250.000	1	7.425.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		7.425.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	Ribu Rupiah	69579	2.250.000	70275	7.425.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		7.425.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga	Dokumen	1	2.250.000	1	7.425.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	%	6.5	5.550.000	1	6.450.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.550.000		6.450.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	Ribu Rupiah	65400	5.550.000	66054	6.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.550.000		6.450.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purworejo	Dokumen	1	5.550.000	1	6.450.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	%	2.03	3.800.000	1	4.476.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.800.000		4.476.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	Ribu Rupiah	80887	3.800.000	81696	4.476.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.800.000		4.476.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang	Dokumen	1	3.800.000	1	4.476.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	%	2.02	8.700.000	1	13.200.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					8.700.000		13.200.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	Ribu Rupiah	136965	8.700.000	138335	13.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				8.700.000		13.200.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang	Dokumen	1	8.700.000	1	13.200.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	%	9.18	2.250.000	1	10.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		10.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	Ribu Rupiah	64370	2.250.000	65013	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		10.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sragen	Dokumen	1	2.250.000	1	10.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	2.19	2.250.000	1	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.250.000		5.400.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Ribu Rupiah	103740	2.250.000	104777	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2.250.000		5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	1	2.250.000	1	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	%	1.76	11.550.000	1	20.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					11.550.000		20.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	Ribu Rupiah	73526	11.550.000	74261	20.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11.550.000		20.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Tegal	Dokumen	1	11.550.000	1	20.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	%	3.68	1.350.000	1	50.480.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.350.000		50.480.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	Ribu Rupiah	68608	1.350.000	69294	50.480.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.350.000		50.480.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Temanggung	Dokumen	1	1.350.000	1	50.480.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	%	1.72	3.600.000	1	5.400.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		5.400.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	Ribu Rupiah	135004	3.600.000	136354	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		5.400.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri	Dokumen	1	3.600.000	1	5.400.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	%	10.95	12.800.000	1	14.080.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					12.800.000		14.080.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	Ribu Rupiah	103200	12.800.000	104232	14.080.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12.800.000		14.080.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonosobo	Dokumen	1	12.800.000	1	14.080.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	%	7.27	3.600.000	1	4.320.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.600.000		4.320.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	Ribu Rupiah	58440	3.600.000	59024	4.320.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3.600.000		4.320.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang	Dokumen	1	3.600.000	1	4.320.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	%	1.29	6.600.000	1	6.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					6.600.000		6.600.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	Ribu Rupiah	61140	6.600.000	61751	6.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.600.000		6.600.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan	Dokumen	1	6.600.000	1	6.600.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	%	1.09	4.350.000	1	18.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.350.000		18.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	Ribu Rupiah	67615	4.350.000	68291	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.350.000		18.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga	Dokumen	1	4.350.000	1	18.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	%	2.74	4.100.000	1	7.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					4.100.000		7.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	Ribu Rupiah	330391	4.100.000	333698	7.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.100.000		7.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I	Dokumen	1	4.100.000	1	7.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	%	3.4	9.250.000	1	2.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					9.250.000		2.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	Ribu Rupiah	226325	9.250.000	228588	2.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				9.250.000		2.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II	Dokumen	1	9.250.000	1	2.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	%	7.38	51.500.000	1	30.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					51.500.000		30.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	Ribu Rupiah	285781	51.500.000	288639	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				51.500.000		30.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang III	Dokumen	1	51.500.000	1	30.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	%	9.94	27.200.000	1	31.280.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					27.200.000		31.280.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	Ribu Rupiah	168740	27.200.000	170427	31.280.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				27.200.000		31.280.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta	Dokumen	1	27.200.000	1	31.280.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
						Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	%	14.29	5.000.000	1	11.000.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					5.000.000		11.000.000		
						Realisasi Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	Ribu Rupiah	262092	5.000.000	264713	11.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	
		5.02.04.1.01.13			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				5.000.000		11.000.000		
						Jumlah Dokumen Pelaporan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal	Dokumen	1	5.000.000	1	11.000.000	SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**246.762.036.000**		**258.768.296.000**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	95		95		Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**1.201.736.000**		**1.370.058.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	176381900	1.201.736.000	206381900	1.370.058.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.201.736.000		1.370.058.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Nilai	90	1.201.736.000	90	1.370.058.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.201.736.000		1.370.058.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja Yang disusun	Dokumen	1	1.201.736.000	1	1.370.058.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				400.000.000		440.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	1	400.000.000	1	440.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				801.736.000		930.058.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	801.736.000	1	930.058.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**245.560.300.000**		**257.398.238.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	245.560.300.000	90	257.398.238.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						245.560.300.000		257.398.238.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.303.403.000	95	1.427.661.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		112.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	42.000.000	1	112.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Magelang	Bulan	12	42.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						67.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Magelang	Laporan	1		1	67.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					433.270.000		433.455.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	433.270.000	1	433.455.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.500.000		26.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Magelang	Unit	1	23.500.000	1	26.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12	4.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.680.000		40.680.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12	24.680.000	12	40.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.400.000		5.400.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12	5.400.000	12	5.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				111.400.000		120.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Magelang	Unit	1	111.400.000	1	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				37.500.000		40.875.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Magelang	Bulan	12	37.500.000	12	40.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				219.290.000		185.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12	219.290.000	12	185.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Magelang	Bulan	12	2.500.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					581.833.000		596.186.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	581.833.000	1	596.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12	1.200.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				142.446.000		153.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kota Magelang	Bulan	12	142.446.000	12	153.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12		12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				438.187.000		416.186.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12	438.187.000	12	416.186.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.300.000		280.320.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Magelang	Laporan	1	241.300.000	1	280.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.580.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Magelang	Bulan	12	17.580.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				78.420.000		80.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Magelang	Bulan	12	78.420.000	12	80.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Magelang	Bulan	12	3.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.500.000		58.520.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Magelang	Bulan	12	41.500.000	12	58.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Magelang	Bulan	12	2.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Magelang	Unit	1	70.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.750.000		30.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12	22.750.000	12	30.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		6.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Magelang	Bulan	12	6.050.000	12	6.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.528.107.000	95	1.695.467.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.740.000		54.642.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1	46.740.000	1	54.642.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		49.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	42.000.000	12	49.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.740.000		5.542.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1	4.740.000	1	5.542.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19.754.000		23.095.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1	19.754.000	1	23.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				19.754.000		23.095.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	19.754.000	12	23.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					245.021.000		291.658.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1	245.021.000	1	291.658.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.468.000		5.224.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	4.468.000	12	5.224.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.020.000		2.572.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	3.020.000	12	2.572.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.200.000		14.614.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	12.200.000	12	14.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.975.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	3.600.000	12	3.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				50.388.000		65.514.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	50.388.000	1	65.514.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.005.000		38.586.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	Bulan	1	33.005.000	1	38.586.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.360.000		159.419.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Pati	Bulan	1	136.360.000	1	159.419.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.980.000		1.754.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Pati	Bulan	1	1.980.000	1	1.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Pati	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					961.222.000		1.027.518.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1	961.222.000	1	1.027.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.700.000		1.988.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	1.700.000	12	1.988.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				231.900.000		271.086.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	231.900.000	12	271.086.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				727.622.000		754.444.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	727.622.000	12	754.444.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					255.370.000		298.554.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Pati	Laporan	1	255.370.000	1	298.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.870.000		127.280.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	108.870.000	12	127.280.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				1.000.000		1.169.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	1.000.000	12	1.169.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		70.146.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	60.000.000	12	70.146.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		11.691.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	10.000.000	12	11.691.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.000.000		56.117.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Pati	Unit	1	48.000.000	1	56.117.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.500.000		14.614.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	12.500.000	12	14.614.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		17.537.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pati	Bulan	12	15.000.000	12	17.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.440.592.000	95	1.530.970.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.640.000		60.060.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	50.640.000	1	60.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		49.865.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	42.000.000	12	49.865.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.640.000		10.195.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	8.640.000	1	10.195.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000		9.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	8.000.000	1	9.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000		9.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	8.000.000	12	9.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					237.903.000		280.333.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	237.903.000	1	280.333.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.490.000		7.670.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	6.490.000	12	7.670.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.100.000		34.338.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	29.100.000	12	34.338.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.300.000		14.473.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	12.300.000	12	14.473.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.609.000		7.788.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	6.609.000	12	7.788.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				65.060.000		76.770.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	1	65.060.000	1	76.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.300.000		18.054.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	15.300.000	12	18.054.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103.044.000		121.240.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	103.044.000	12	121.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					827.049.000		873.810.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	827.049.000	1	873.810.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.360.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	2.000.000	12	2.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				194.027.000		228.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	194.027.000	12	228.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				631.022.000		642.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	631.022.000	12	642.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					317.000.000		307.367.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	Laporan	1	317.000.000	1	307.367.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.850.000		36.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	30.850.000	12	36.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.900.000		83.632.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	70.900.000	12	83.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	5.000.000	12	5.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.500.000		71.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	60.500.000	12	71.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	5.000.000	12	5.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				116.500.000		70.800.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Kebumen	Unit	1	116.500.000	1	70.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		23.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	20.000.000	12	23.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.250.000		9.735.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kebumen	Bulan	12	8.250.000	12	9.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.457.176.000	95	1.604.983.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					72.100.000		72.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	1	72.100.000	1	72.100.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.100.000		30.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	1	30.100.000	1	30.100.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.700.000		8.710.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah"UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	1	6.700.000	1	8.710.000		
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.700.000		8.710.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	6.700.000	12	8.710.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					289.953.000		330.350.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	1	289.953.000	1	330.350.000		
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.100.000		7.930.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	6.100.000	12	7.930.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1		1			OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.000.000		28.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	24.000.000	12	28.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.204.000		15.865.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	12.204.000	12	15.865.000		
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.600.000		12.480.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	9.600.000	12	12.480.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				69.699.000		70.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	69.699.000	1	70.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.500.000		34.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	26.500.000	12	34.450.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140.600.000		160.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	140.600.000	12	160.000.000		
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		1.625.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	1.250.000	12	1.625.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					823.423.000		904.973.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	1	823.423.000	1	904.973.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	2.000.000	12	2.600.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				214.800.000		230.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	214.800.000	12	230.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	1.500.000	12	1.950.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				605.123.000		670.423.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	605.123.000	12	670.423.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					265.000.000		288.850.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Kudus	Laporan	1	265.000.000	1	288.850.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	17.000.000	12	20.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.700.000		92.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	88.700.000	12	92.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		3.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	2.500.000	12	3.250.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	39.800.000	12	45.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		15.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	12.000.000	12	15.600.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		65.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Kudus	Unit	1	60.000.000	1	65.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	37.000.000	12	40.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kudus	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.439.778.000	95	1.686.888.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.350.000		58.685.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	53.350.000	1	58.685.000		
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.350.000		47.685.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	43.350.000	12	47.685.000		
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	10.000.000	1	11.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					432.480.000		482.263.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	432.480.000	1	482.263.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	7.000.000	12	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				41.500.000		45.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	41.500.000	12	45.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.530.000		24.618.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	25.530.000	12	24.618.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				17.200.000		18.920.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	17.200.000	12	18.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		110.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	100.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.250.000		27.775.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	25.250.000	12	27.775.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216.000.000		247.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	216.000.000	12	247.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1		1			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					642.948.000		676.390.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	642.948.000	1	676.390.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	5.000.000	12	5.500.000		
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				122.600.000		134.860.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	122.600.000	12	134.860.000		
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				515.348.000		536.030.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	515.348.000	12	536.030.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					311.000.000		469.550.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	Laporan	1	311.000.000	1	469.550.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	30.000.000	12	33.000.000		
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				97.000.000		106.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	97.000.000	12	106.700.000		
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72.000.000		79.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	72.000.000	12	79.250.000		
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		6.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	6.000.000	12	6.600.000		
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				66.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Wonosobo	Unit	1	66.000.000	1	200.000.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000		39.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	36.000.000	12	39.600.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonosobo	Bulan	12	4.000.000	12	4.400.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.433.206.000	95	1.587.583.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					52.080.000		54.544.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	1	52.080.000	1	54.544.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		49.438.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	42.000.000	12	49.438.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.080.000		5.106.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	10.080.000	12	5.106.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							9.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak"	Laporan	1		1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					247.922.000		306.354.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Demak	Laporan	1	247.922.000	1	306.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		8.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	7.000.000	12	8.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	2.000.000	12	2.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.550.000		28.200.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	24.550.000	12	28.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.800.000		12.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	10.800.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				95.132.000		109.400.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	95.132.000	12	109.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.100.000		30.015.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	26.100.000	12	30.015.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				82.340.000		111.389.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	82.340.000	12	111.389.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					830.404.000		866.465.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak"	Laporan	1	830.404.000	1	866.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.450.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	3.000.000	12	3.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.500.000		154.675.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	149.500.000	12	154.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				677.904.000		703.340.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	677.904.000	12	703.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					302.800.000		351.220.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Demak"	Laporan	1	302.800.000	1	351.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.550.000		11.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	30.550.000	12	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				123.250.000		165.370.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	123.250.000	12	165.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		11.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	10.000.000	12	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.000.000		66.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	58.000.000	12	66.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12		12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		57.500.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	50.000.000	12	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		28.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	25.000.000	12	28.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Demak	Bulan	12	6.000.000	12	6.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	2.025.061.000	95	2.286.665.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.000.000		46.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I"	Laporan	1	43.000.000	1	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	42.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000		1.000.000		
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	5.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000				
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	5.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					502.766.000		517.615.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang I	Laporan	1	502.766.000	1	517.615.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.010.000		5.010.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	5.010.000	12	5.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				270.000.000		270.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	270.000.000	12	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.940.000		3.990.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	12.940.000	12	3.990.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.300.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	17.300.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.500.000		4.000.000		
						pengamaan barang milik daerah UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	3.500.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				104.016.000		120.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	104.016.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		22.855.000		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	20.000.000	12	22.855.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000		71.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	70.000.000	12	71.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang I	Laporan	1		1			
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Pengadaan Mebel UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.238.496.000		1.311.050.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I"	Laporan	1	1.238.496.000	1	1.311.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.465.000		8.000.000		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	6.465.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				337.400.000		431.700.000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	337.400.000	12	431.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				894.631.000		871.350.000		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	894.631.000	12	871.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					235.799.000		412.000.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang I"	Laporan	1	235.799.000	1	412.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				75.000.000		75.000.000		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.900.000		110.000.000		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	25.900.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				72.000.000		100.000.000		
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	72.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				39.899.000		100.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	39.899.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		12.000.000		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang I	Bulan	12	8.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.836.347.000	95	1.953.131.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.200.000		79.580.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1	69.200.000	1	79.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.200.000		56.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	49.200.000	12	56.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		23.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1	20.000.000	1	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		11.500.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1	10.000.000	1	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		11.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	10.000.000	12	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					279.380.000		339.200.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1	279.380.000	1	339.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	5.000.000	12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.480.000		23.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	18.480.000	12	23.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		17.250.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	15.000.000	12	17.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		5.750.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	7.200.000	12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				75.000.000		86.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	75.000.000	1	86.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.700.000		23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	16.700.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.000.000		172.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	137.000.000	12	172.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	5.000.000	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.207.767.000		1.209.101.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1	1.207.767.000	1	1.209.101.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	3.000.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.001.000		209.931.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	210.001.000	12	209.931.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		12	2.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				994.766.000		993.370.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	994.766.000	12	993.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.000.000		313.750.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banyumas	Laporan	1	270.000.000	1	313.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	20.000.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		86.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	75.000.000	12	86.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12		12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		57.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	50.000.000	12	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000		23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	20.000.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Banyumas	Unit	1	50.000.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		57.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	50.000.000	12	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banyumas	Bulan	12	5.000.000	12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	2.079.825.000	95	2.259.260.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.560.000		65.160.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	1	58.560.000	1	65.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.160.000		50.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	50.160.000	12	50.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.400.000		15.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	8.400.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					244.115.000		341.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Semarang	Laporan	1	244.115.000	1	341.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.350.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	7.350.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				36.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	36.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.765.000		32.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	29.765.000	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	1.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				85.000.000		115.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	85.000.000	12	115.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				20.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	20.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	65.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.461.180.000		1.448.100.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang"	Laporan	1	1.461.180.000	1	1.448.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.800.000		7.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	5.800.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				360.000.000		380.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	360.000.000	12	380.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		24.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	20.000.000	12	24.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.075.380.000		1.037.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	1.075.380.000	12	1.037.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					315.970.000		405.000.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Semarang"	Laporan	1	315.970.000	1	405.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				107.970.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	107.970.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	60.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	3.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		125.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	75.000.000	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	25.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Semarang	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.428.606.000	95	1.616.950.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					52.680.000		55.970.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1	52.680.000	1	55.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		46.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	42.000.000	12	46.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.680.000		9.770.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1	10.680.000	1	9.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					284.135.000		328.537.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1	284.135.000	1	328.537.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		7.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	7.000.000	12	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.600.000		3.960.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	3.600.000	12	3.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.300.000		11.110.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	17.300.000	12	11.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				2.486.000		7.056.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	2.486.000	12	7.056.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				70.000.000		86.250.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	70.000.000	1	86.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.580.000		34.188.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	27.580.000	12	34.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				156.169.000		178.273.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	156.169.000	12	178.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					878.041.000		936.475.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1	878.041.000	1	936.475.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		14.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	4.000.000	12	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				145.200.000		155.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	145.200.000	12	155.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				728.841.000		766.975.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	728.841.000	12	766.975.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					213.750.000		295.968.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	Laporan	1	213.750.000	1	295.968.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.700.000		42.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	21.700.000	12	42.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.200.000		99.770.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	87.200.000	12	99.770.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		2.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	2.500.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.800.000		25.848.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	22.800.000	12	25.848.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		2.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	2.000.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				53.550.000		85.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Temanggung	Unit	1	53.550.000	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		29.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	20.000.000	12	29.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		8.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Temanggung	Bulan	12	4.000.000	12	8.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.525.994.000	95	1.686.819.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					46.290.000		56.290.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	46.290.000	1	56.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				46.290.000		56.290.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	46.290.000	12	56.290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Batang	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		15.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	5.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					315.529.000		400.529.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	315.529.000	1	400.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	10.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	1.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000		35.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	25.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				8.250.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	8.250.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	80.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	30.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				161.279.000		200.529.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	161.279.000	12	200.529.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Batang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					892.175.000		867.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	892.175.000	1	867.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	2.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.000.000		220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	190.000.000	12	220.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.175.000		644.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	700.175.000	12	644.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					267.000.000		348.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	267.000.000	1	348.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.500.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	52.500.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				66.500.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	66.500.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	50.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12		12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Batang	Unit	1	40.000.000	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	40.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Batang	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.336.407.000	95	1.541.907.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.835.000		56.910.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga	Laporan	1	50.835.000	1	56.910.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50.160.000		50.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	50.160.000	12	50.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				675.000		6.750.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	675.000	12	6.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					330.822.000		434.072.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Salatiga	Laporan	1	330.822.000	1	434.072.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.100.000		3.850.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	3.100.000	12	3.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.100.000		22.822.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	29.100.000	12	22.822.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	3.600.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				31.800.000		47.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	31.800.000	12	47.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.222.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	148.222.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	10.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					607.750.000		622.700.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1	607.750.000	1	622.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	3.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				132.000.000		127.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	132.000.000	12	127.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				472.750.000		482.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	472.750.000	12	482.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					347.000.000		428.225.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Salatiga"	Laporan	1	347.000.000	1	428.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.500.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	29.500.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		117.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	75.000.000	12	117.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		11.225.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	10.000.000	12	11.225.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.500.000		65.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	65.500.000	12	65.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.000.000		120.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	85.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				64.000.000		64.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	64.000.000	12	64.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Salatiga	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.627.420.000	95	1.743.815.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.000.000		83.665.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	68.000.000	1	83.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		50.025.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	42.000.000	12	50.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.000.000		33.640.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	26.000.000	1	33.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	5.000.000	1	5.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	5.000.000	12	5.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					282.705.000		313.660.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	282.705.000	1	313.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	9.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.350.000		31.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	31.350.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.080.000		23.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	20.080.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.200.000		8.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	4.200.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				75.656.000		85.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	75.656.000	1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				51.560.000		58.160.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	51.560.000	12	58.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.859.000		98.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	90.859.000	12	98.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.000.260.000		1.042.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	1.000.260.000	1	1.042.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.600.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	4.000.000	12	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				194.000.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	194.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		1.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	1.000.000	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				801.260.000		812.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	801.260.000	12	812.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					271.455.000		298.090.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Magelang	Laporan	1	271.455.000	1	298.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		29.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	25.000.000	12	29.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				69.455.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	69.455.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		34.090.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	55.000.000	12	34.090.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	3.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		87.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Magelang	Unit	1	60.000.000	1	87.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		58.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	50.000.000	12	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Magelang	Bulan	12	9.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.716.690.000	95	1.813.055.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					76.390.000		81.890.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	76.390.000	1	81.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				34.390.000		39.890.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	34.390.000	1	39.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					11.000.000		12.760.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	11.000.000	1	12.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11.000.000		12.760.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	11.000.000	12	12.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					332.090.000		381.920.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	332.090.000	1	381.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				42.650.000		49.480.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	42.650.000	12	49.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				60.190.000		66.490.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	60.190.000	12	66.490.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.000.000		12.760.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	11.000.000	12	12.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.500.000		7.540.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	6.500.000	12	7.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				100.000.000		116.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	1	100.000.000	1	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.700.000		31.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	26.700.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.050.000		98.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	85.050.000	12	98.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					972.960.000		990.735.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	972.960.000	1	990.735.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.875.000		2.175.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	1.875.000	12	2.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				119.700.000		139.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	119.700.000	12	139.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				851.385.000		849.560.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	851.385.000	12	849.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					324.250.000		345.750.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	Laporan	1	324.250.000	1	345.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.400.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	23.400.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				103.150.000		105.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	103.150.000	12	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	5.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.300.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	38.300.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.350.000		1.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	5.350.000	12	1.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000		104.500.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Purworejo	Unit	1	90.000.000	1	104.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.000.000		65.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	53.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.050.000		11.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purworejo	Bulan	12	6.050.000	12	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.321.885.000	95	1.534.931.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		51.079.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1	43.360.000	1	51.079.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		51.079.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	43.360.000	12	51.079.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		11.780.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1	10.000.000	1	11.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		11.780.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	10.000.000	12	11.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					332.767.000		402.001.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1	332.767.000	1	402.001.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.534.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	3.000.000	12	3.534.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.005.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		1	39.005.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.110.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	33.110.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.890.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000	12	5.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.800.000		5.655.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	4.800.000	12	5.655.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				75.857.000		89.359.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	75.857.000	1	89.359.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				36.000.000		42.408.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	36.000.000	12	42.408.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		200.260.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	170.000.000	12	200.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.890.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000	12	5.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					625.958.000		705.127.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1	625.958.000	1	705.127.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.580.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	3.000.000	12	3.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		166.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	150.000.000	12	166.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		23.560.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	20.000.000	12	23.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				452.958.000		511.487.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	452.958.000	12	511.487.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.800.000		364.944.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Rembang	Laporan	1	309.800.000	1	364.944.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		23.560.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	20.000.000	12	23.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.000.000		153.140.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	130.000.000	12	153.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				7.000.000		8.246.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	7.000.000	12	8.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		53.010.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	45.000.000	12	53.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.890.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	5.000.000	12	5.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		58.900.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Rembang	Unit	1	50.000.000	1	58.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		53.010.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	45.000.000	12	53.010.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.800.000		9.188.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Rembang	Bulan	12	7.800.000	12	9.188.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.573.383.000	95	1.707.308.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.720.000		78.720.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	78.720.000	1	78.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; PEMALANG --> PEMALANG --> KELURAHAN MULYOHARJO
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36.720.000		36.720.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Pemalang	Laporan	1	36.720.000	1	36.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					306.938.000		406.649.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	306.938.000	1	406.649.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	10.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				26.250.000		26.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	26.250.000	12	26.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		15.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	7.500.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	7.200.000	12	7.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				68.199.000		68.199.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	68.199.000	1	68.199.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				40.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	40.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142.789.000		225.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	142.789.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					888.475.000		804.300.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	888.475.000	1	804.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	2.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000		198.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	198.000.000	12	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	2.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				686.475.000		596.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	686.475.000	12	596.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					289.250.000		397.639.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	289.250.000	1	397.639.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.000.000		17.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	17.000.000	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				118.700.000		88.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	118.700.000	12	88.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.500.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	2.500.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.800.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	41.800.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	12.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		111.689.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Pemalang	Unit	1	50.000.000	1	111.689.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.250.000		50.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	40.250.000	12	50.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pemalang	Bulan	12	7.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.560.916.000	95	1.723.509.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		51.685.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1	42.000.000	1	51.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		51.685.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	42.000.000	12	51.685.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		5.868.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1	5.000.000	1	5.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		5.868.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	5.000.000	12	5.868.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					318.361.000		374.933.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1	318.361.000	1	374.933.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.004.000		4.699.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	4.004.000	12	4.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				35.505.000		41.668.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	35.505.000	12	41.668.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.633.000		20.694.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	17.633.000	12	20.694.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.920.000		3.966.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.920.000	12	3.966.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				69.192.000		85.492.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1	69.192.000	1	85.492.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.575.000		30.014.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	25.575.000	12	30.014.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160.532.000		188.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	160.532.000	12	188.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					898.635.000		942.558.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1	898.635.000	1	942.558.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		1.173.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	2.400.000	12	1.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.084.000		232.472.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	198.084.000	12	232.472.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				698.151.000		708.913.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	698.151.000	12	708.913.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					296.920.000		348.465.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Jepara	Laporan	1	296.920.000	1	348.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.100.000		9.682.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	20.100.000	12	9.682.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				134.170.000		171.370.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	134.170.000	12	171.370.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.800.000		64.314.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	54.800.000	12	64.314.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				45.000.000		52.812.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Jepara	Unit	1	45.000.000	1	52.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.850.000		40.899.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	34.850.000	12	40.899.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		9.388.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Jepara	Bulan	12	8.000.000	12	9.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.473.205.000	95	1.703.674.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.000.000		62.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1	57.000.000	1	62.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		46.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	42.000.000	12	46.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000		16.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1	15.000.000	1	16.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							11.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1		1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12		12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					342.079.000		450.654.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1	342.079.000	1	450.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.190.000		7.909.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	7.190.000	12	7.909.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.500.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.200.000		3.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	39.200.000	12	3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.800.000		11.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	10.800.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1.800.000		8.500.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	1.800.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	80.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.750.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	30.750.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167.339.000		269.445.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	167.339.000	12	269.445.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					823.426.000		886.820.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1	823.426.000	1	886.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	1.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				226.200.000		248.680.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	226.200.000	12	248.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				596.226.000		635.140.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	596.226.000	12	635.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					250.700.000		292.500.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Grobogan	Laporan	1	250.700.000	1	292.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.000.000		27.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	24.000.000	12	27.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.500.000		80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	70.500.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	5.000.000	12	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				52.700.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	52.700.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000				
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	5.000.000	12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		75.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Grobogan	Unit	1	60.000.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.500.000		35.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	25.500.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Grobogan	Bulan	12	8.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.952.705.000	95	2.128.935.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.400.000		69.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	58.400.000	1	69.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				55.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	55.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.400.000		14.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	3.400.000	12	14.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					372.875.000		378.025.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	372.875.000	1	378.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	7.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Semarang III	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				74.800.000		77.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	74.800.000	1	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.300.000		26.100.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Semarang III	Laporan	1	24.300.000	1	26.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.050.000		8.050.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	7.050.000	12	8.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				85.700.000		80.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	85.700.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				38.425.000		43.275.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	38.425.000	12	43.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.600.000		135.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	135.600.000	12	135.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Semarang III	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.132.930.000		1.132.510.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III"	Laporan	1	1.132.930.000	1	1.132.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.010.000		7.560.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	8.010.000	12	7.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				318.965.000		316.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	318.965.000	12	316.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.500.000		16.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	14.500.000	12	16.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				791.455.000		792.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	791.455.000	12	792.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					388.500.000		549.000.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang III"	Laporan	1	388.500.000	1	549.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.900.000		167.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	150.900.000	12	167.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	5.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.900.000		103.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	93.900.000	12	103.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				18.000.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	18.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		170.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	50.000.000	12	170.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.700.000		53.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	53.700.000	12	53.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang III	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	2.077.926.000	95	2.219.762.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					42.000.000		42.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	42.000.000	1	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					312.632.000		427.850.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	312.632.000	1	427.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		4.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	4.500.000	12	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Brebes	Unit	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.500.000		29.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	29.500.000	12	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	12.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				11.250.000		11.250.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	11.250.000	12	11.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				74.000.000		130.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Brebes	Unit	12	74.000.000	12	130.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				32.600.000		32.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	32.600.000	12	32.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148.782.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	148.782.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Brebes	Bulan					SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Brebes	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Brebes	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Brebes	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.367.664.000		1.374.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	1.367.664.000	1	1.374.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	1.500.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				296.000.000		310.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	296.000.000	12	310.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.070.164.000		1.062.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	1.070.164.000	12	1.062.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					345.630.000		365.912.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Brebes	Laporan	1	345.630.000	1	365.912.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.450.000		20.450.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	20.450.000	12	20.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				117.100.000		117.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	117.100.000	12	117.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				76.080.000		76.080.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	76.080.000	12	76.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Brebes	Unit	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		50.282.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	30.000.000	12	50.282.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Brebes	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.468.254.000	95	1.617.892.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.160.000		54.050.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	1	50.160.000	1	54.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		48.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	42.000.000	12	48.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.160.000		5.750.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	8.160.000	12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5.750.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1		1	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					327.350.000		381.270.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Kendal	Laporan	1	327.350.000	1	381.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.960.000		6.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	5.960.000	12	6.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.500.000		27.025.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	23.500.000	12	27.025.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.760.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		12	3.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.750.000		19.125.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	15.750.000	12	19.125.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.490.000		8.613.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	7.490.000	12	8.613.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				99.500.000		114.425.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	99.500.000	12	114.425.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.150.000		40.422.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	35.150.000	12	40.422.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135.000.000		155.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	135.000.000	12	155.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	5.000.000	12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					859.564.000		878.216.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1	859.564.000	1	878.216.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.999.000		2.298.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	1.999.000	12	2.298.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				214.960.000		220.208.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	214.960.000	12	220.208.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.500.000		14.375.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	12.500.000	12	14.375.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				630.105.000		641.335.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	630.105.000	12	641.335.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					231.180.000		298.606.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kabupaten Kendal"	Laporan	1	231.180.000	1	298.606.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000		34.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	30.000.000	12	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.747.000		85.360.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Kendal	Bulan		50.747.000		85.360.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12		12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.550.000		50.082.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	43.550.000	12	50.082.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	5.000.000	12	5.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		63.250.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	55.000.000	12	63.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.883.000		49.314.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	42.883.000	12	49.314.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Kendal	Bulan	12	4.000.000	12	4.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.614.745.000	95	1.803.363.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.000.000		57.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	47.000.000	1	57.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	Bulan	12	42.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Tegal	Laporan	1	5.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Tegal	Bulan	12	20.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					358.353.000		478.863.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	358.353.000	1	478.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	7.500.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Tegal	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				73.863.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Tegal	Bulan	12	73.863.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		20.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	15.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Tegal	Bulan	12	7.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		110.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Tegal	Unit	1	80.000.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				19.990.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	Bulan	12	19.990.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000		180.863.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Tegal	Bulan	12	150.000.000	12	180.863.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kota Tegal	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kota Tegal	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.024.842.000		987.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1.024.842.000	1	987.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				264.000.000		300.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Tegal	Bulan	12	264.000.000	12	300.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				750.842.000		676.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	750.842.000	12	676.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.550.000		255.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	164.550.000	1	255.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Tegal	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.000.000		85.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Tegal	Bulan	12	60.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Tegal	Bulan	12	40.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Tegal	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.550.000		55.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Tegal	Unit	1	19.550.000	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	15.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Tegal	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.588.399.000	95	1.720.403.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					61.080.000		70.547.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	1	61.080.000	1	70.547.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52.200.000		60.291.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	52.200.000	12	60.291.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8.880.000		10.256.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Blora	Laporan	1	8.880.000	1	10.256.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		11.550.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Blora	Laporan	1	10.000.000	1	11.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		11.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	10.000.000	12	11.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.503.000		297.418.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Blora	Laporan	1	257.503.000	1	297.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		11.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	10.000.000	12	11.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Blora	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.000.000		13.860.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	12.000.000	12	13.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.330.000		14.242.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	12.330.000	12	14.242.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.000.000		6.930.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	6.000.000	12	6.930.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				69.695.000		80.498.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	69.695.000	1	80.498.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				27.075.000		31.272.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	27.075.000	12	31.272.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.403.000		139.066.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	120.403.000	12	139.066.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.032.316.000		1.078.193.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora	Laporan	1	1.032.316.000	1	1.078.193.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.620.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	4.000.000	12	4.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.000.000		155.925.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	135.000.000	12	155.925.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000		4.620.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	4.000.000	12	4.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				889.316.000		913.028.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	889.316.000	12	913.028.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					227.500.000		262.695.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Blora	Laporan	1	227.500.000	1	262.695.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.000.000		24.255.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	21.000.000	12	24.255.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				46.900.000		54.170.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	46.900.000	12	54.170.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		5.775.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	5.000.000	12	5.775.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.100.000		35.921.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	31.100.000	12	35.921.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		11.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	10.000.000	12	11.550.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				75.000.000		86.625.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Blora	Unit	1	75.000.000	1	86.625.000		
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.500.000		35.159.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	30.500.000	12	35.159.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		9.240.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Blora	Bulan	12	8.000.000	12	9.240.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.468.418.000	95	1.654.096.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					52.000.000		62.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	52.000.000	1	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	42.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Pekalongan	Laporan	12	10.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					5.000.000		8.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	5.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					322.196.000		405.596.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	322.196.000	1	405.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.500.000		7.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	6.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				70.000.000		77.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	70.000.000	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		40.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	20.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.200.000		8.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	7.200.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				69.600.000		80.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	1	69.600.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		40.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	30.000.000	12	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				117.396.000		150.096.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	117.396.000	12	150.096.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.500.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	1.500.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					795.022.000		787.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	795.022.000	1	787.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	2.400.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000		165.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	150.000.000	12	165.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	2.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				640.622.000		616.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	640.622.000	12	616.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					294.200.000		391.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	294.200.000	1	391.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas JabatanJumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	25.000.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000		120.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	90.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				68.700.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	68.700.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	5.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		70.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Pekalongan	Unit	12	50.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.000.000		65.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	45.000.000	12	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.500.000		6.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Pekalongan	Bulan	12	5.500.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.529.706.000	95	1.701.600.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		74.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	54.000.000	1	74.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		52.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	42.000.000	12	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000		22.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Tegal	Laporan	1	12.000.000	1	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		30.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	10.000.000	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					333.293.000		421.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	333.293.000	1	421.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	3.000.000	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.600.000		42.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	25.600.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		25.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	15.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	3.600.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				50.000.000		65.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	50.000.000	1	65.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.940.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	14.940.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.153.000		260.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	221.153.000	12	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					851.113.000		859.600.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	851.113.000	1	859.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	1.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				144.000.000		160.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	144.000.000	12	160.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				706.113.000		697.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	706.113.000	12	697.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					281.300.000		317.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	281.300.000	1	317.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				33.100.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	33.100.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	116.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.300.000		70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	47.300.000	12	70.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12		12			OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		60.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Tegal	Unit	1	50.000.000	1	60.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	30.000.000	12	70.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.900.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Tegal	Bulan	12	4.900.000	12	7.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.401.271.000	95	1.654.893.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					49.990.000		54.430.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1	49.990.000	1	54.430.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.050.000		43.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	43.050.000	12	43.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; PURBALINGGA --> KALIMANAH --> KELURAHAN KALIKABONG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.940.000		11.380.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1	6.940.000	1	11.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		10.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					325.408.000		423.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1	325.408.000	1	423.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	1.500.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.100.000		56.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	38.100.000	12	56.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	21.000.000	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				80.041.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1	80.041.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.600.000		35.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	35.600.000	12	35.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.300.000		169.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	137.300.000	12	169.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.867.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	1.867.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					751.733.000		807.723.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1	751.733.000	1	807.723.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		4.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	7.000.000	12	4.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				195.000.000		278.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	195.000.000	12	278.580.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	3.000.000	12	6.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				546.733.000		519.143.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	546.733.000	12	519.143.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					264.140.000		359.740.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Purbalingga	Laporan	1	264.140.000	1	359.740.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.100.000		135.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	100.100.000	12	135.100.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	2.000.000	12	6.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.000.000		64.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	64.000.000	12	64.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.200.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	3.200.000	12	10.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		70.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	40.000.000	12	70.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22.640.000		42.440.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	22.640.000	12	42.440.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.200.000		7.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Purbalingga	Bulan	12	7.200.000	12	7.200.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.597.915.000	95	1.738.818.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		51.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	48.000.000	1	51.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				46.200.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	46.200.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.800.000		1.800.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	1.800.000	12	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1		1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					329.448.000		352.518.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	329.448.000	1	352.518.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	8.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.780.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	37.780.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.500.000		50.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	38.500.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.500.000		15.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	7.500.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				75.000.000		80.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	75.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.610.000		38.610.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	35.610.000	12	38.610.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.058.000		138.908.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	122.058.000	12	138.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1		1			
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kota Semarang II	Laporan	12		12			
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12		12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					943.767.000		982.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	943.767.000	1	982.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				273.600.000		295.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	273.600.000	12	295.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.600.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	21.600.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				646.567.000		660.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	646.567.000	12	660.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					276.700.000		347.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah UPPD Kota Semarang II	Laporan	1	276.700.000	1	347.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	47.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.000.000		52.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	52.000.000	12	52.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				54.850.000		78.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	54.850.000	12	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	50.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.850.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	30.850.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Semarang II	Bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.448.821.000	95	1.679.878.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74.820.000		79.292.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1	74.820.000	1	79.292.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.720.000		49.192.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	44.720.000	12	49.192.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.100.000		30.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1	30.100.000	1	30.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000		6.600.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1	6.000.000	1	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000		6.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	6.000.000	12	6.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					344.665.000		453.231.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1	344.665.000	1	453.231.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.270.000		5.797.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	5.270.000	12	5.797.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1		1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				43.340.000		47.674.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	43.340.000	1	47.674.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.600.000		17.160.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	15.600.000	12	17.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		9.900.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	9.000.000	12	9.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		88.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	80.000.000	1	88.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				21.075.000		23.182.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	21.075.000	12	23.182.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				167.880.000		209.018.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	167.880.000	12	209.018.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000		2.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit					SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					781.386.000		820.110.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1	781.386.000	1	820.110.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	2.000.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				134.400.000		197.840.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	134.400.000	12	197.840.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.500.000		4.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	4.500.000	12	4.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				640.486.000		615.120.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	640.486.000	12	615.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					241.950.000		320.645.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Banjarnegara	Laporan	1	241.950.000	1	320.645.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.800.000		21.780.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	19.800.000	12	21.780.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				113.400.000		154.740.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	113.400.000	12	154.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.750.000		39.325.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	35.750.000	12	39.325.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000		69.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Banjarnegara	Unit	1	40.000.000	1	69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.000.000		26.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	24.000.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Banjarnegara	Bulan	12	4.000.000	12	4.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.491.393.000	95	1.665.284.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					72.100.000		72.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	72.100.000	1	72.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.100.000		30.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kota Pekalongan	Laporan	1	30.100.000	1	30.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	10.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					291.184.000		331.184.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	291.184.000	1	331.184.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kota Pekalongan	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				22.500.000		22.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	22.500.000	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.500.000		7.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	7.500.000	12	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.600.000		9.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	9.600.000	12	9.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				72.699.000		72.699.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	72.699.000	1	72.699.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.250.000		33.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	33.250.000	12	33.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				134.385.000		174.385.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	134.385.000	12	174.385.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000		1.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	1.250.000	12	1.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					856.259.000		820.150.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	856.259.000	1	820.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.000.000		206.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	186.000.000	12	206.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.500.000		1.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	1.500.000	12	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				666.759.000		610.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	666.759.000	12	610.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.850.000		416.850.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	261.850.000	1	416.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.000.000		17.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	17.000.000	12	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.700.000		88.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	88.700.000	12	88.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				12.500.000		17.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	12.500.000	12	17.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.800.000		89.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	39.800.000	12	89.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.000.000		31.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	6.000.000	12	31.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.850.000		102.850.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kota Pekalongan	Unit	1	52.850.000	1	102.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.000.000		62.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	37.000.000	12	62.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kota Pekalongan	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	95	1.849.733.000	95	2.004.301.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.000.000		70.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1	62.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	42.000.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20.000.000		25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1	20.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		19.500.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1	15.000.000	1	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		19.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	15.000.000	12	19.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					284.146.000		325.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1	284.146.000	1	325.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		13.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	10.000.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.900.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	3.000.000	1	3.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				38.400.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	38.400.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.950.000		8.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	6.950.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				4.000.000		5.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	4.000.000	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				109.502.000		109.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	109.502.000	1	109.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.844.000		35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	29.844.000	12	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				77.450.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	77.450.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		6.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	5.000.000	12	6.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.077.038.000		1.122.071.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1	1.077.038.000	1	1.122.071.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		2.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	1.500.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				156.060.000		265.371.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	156.060.000	12	265.371.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		3.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	3.000.000	12	3.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				916.478.000		851.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	916.478.000	12	851.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					411.549.000		467.330.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Cilacap	Laporan	1	411.549.000	1	467.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				70.000.000		70.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				157.699.000		192.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	157.699.000	12	192.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.100.000		63.130.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	48.100.000	12	63.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	15.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		78.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Cilacap	Unit	1	60.000.000	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.750.000		32.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	49.750.000	12	32.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		11.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Cilacap	Bulan	12	9.000.000	12	11.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	95	186.144.055.000	95	191.672.404.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					144.275.088.000		151.386.687.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	144.275.088.000	1	151.386.687.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				143.342.653.000		150.361.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	143.342.653.000	12	150.361.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				732.970.000		806.276.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	732.970.000	12	806.276.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				199.465.000		219.411.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	2	199.465.000	2	219.411.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					883.455.000		883.455.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Laporan	1	883.455.000	1	883.455.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				883.455.000		883.455.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	883.455.000	12	883.455.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					255.251.000		273.505.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	255.251.000	1	273.505.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				187.746.000		204.250.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	187.746.000	12	204.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				67.505.000		69.255.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	10	67.505.000	10	69.255.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100		100		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	10		10		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.415.526.000		17.461.849.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	17.415.526.000	1	17.461.849.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				450.000.000		450.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	450.000.000	12	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.950.609.000		2.027.109.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Bulan	12	1.950.609.000	12	2.027.109.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.357.500.000		12.287.500.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12.357.500.000	12	12.287.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				128.140.000		128.140.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	128.140.000	12	128.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material								
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.300.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.154.277.000		1.144.100.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	1.154.277.000	12	1.144.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.380.000.000		1.410.000.000		
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	3.380.000.000	1	1.410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.380.000.000		1.410.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	3.380.000.000	5	1.410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.664.735.000		13.659.408.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	13.664.735.000	1	13.659.408.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				113.135.000		113.135.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	113.135.000	12	113.135.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.125.000.000		2.130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	2.125.000.000	12	2.130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.105.600.000		9.105.600.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	9.105.600.000	12	9.105.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.321.000.000		2.310.673.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.321.000.000	12	2.310.673.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.270.000.000		6.597.500.000		
						Jumlah Laporan Pemeliharaan BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	6.270.000.000	1	6.597.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.480.000.000		1.577.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	1.480.000.000	12	1.577.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				75.000.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	75.000.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.125.000.000		2.130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	2.125.000.000	12	2.130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				190.000.000		190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	190.000.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Yang direhab	Unit	1		1		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.400.000.000		2.625.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	2.400.000.000	12	2.625.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	95	1.486.763.000	95	1.623.753.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					51.320.000		51.320.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	51.320.000	1	51.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				51.320.000		51.320.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	51.320.000	12	51.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah"	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					321.214.000		345.624.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	321.214.000	1	345.624.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.831.000		6.831.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.831.000	12	6.831.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				32.723.000		42.098.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	32.723.000	12	42.098.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				42.220.000		42.220.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	42.220.000	12	42.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.265.000		5.265.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	5.265.000	12	5.265.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				84.965.000		100.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	84.965.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.640.000		10.640.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	10.640.000	12	10.640.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				138.570.000		138.570.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	138.570.000	12	138.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					829.250.000		823.120.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	1	829.250.000	1	823.120.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				175.190.000		213.320.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	175.190.000	12	213.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				651.060.000		606.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	651.060.000	12	606.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.979.000		403.689.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Laporan	1	284.979.000	1	403.689.000		
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.900.000		25.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	22.900.000	12	25.500.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				133.890.000		180.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	133.890.000	12	180.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12			
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.064.000		57.064.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	57.064.000	12	57.064.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12		12			OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		120.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	50.000.000	1	120.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.125.000		19.125.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	19.125.000	12	19.125.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	95	1.523.196.000	95	1.703.465.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.360.000		50.609.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1	43.360.000	1	50.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.360.000		50.609.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	43.360.000	12	50.609.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					330.100.000		385.286.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1	330.100.000	1	385.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.100.000		5.952.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	5.100.000	12	5.952.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.200.000		36.416.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	31.200.000	12	36.416.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.750.000		13.714.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	11.750.000	12	13.714.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		4.201.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	3.600.000	12	4.201.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				86.251.000		100.671.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	86.251.000	1	100.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.400.000		34.315.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	29.400.000	12	34.315.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				162.799.000		190.017.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	162.799.000	12	190.017.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						"Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					926.126.000		1.006.563.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1	926.126.000	1	1.006.563.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		3.510.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	3.000.000	12	3.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.000.000		189.084.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	162.000.000	12	189.084.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				761.126.000		813.969.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	761.126.000	12	813.969.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.610.000		261.007.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Karanganyar	Laporan	1	223.610.000	1	261.007.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				126.000.000		147.065.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	126.000.000	12	147.065.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.501.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	3.000.000	12	3.501.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.200.000		43.419.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	37.200.000	12	43.419.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.410.000		40.163.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Karanganyar	Unit	1	34.410.000	1	40.163.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.500.000		22.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	19.500.000	12	22.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.500.000		4.099.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Karanganyar	Bulan	12	3.500.000	12	4.099.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	95	2.224.801.000	95	2.425.522.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.000.000		52.300.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	1	48.000.000	1	52.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43.000.000		47.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	43.000.000	12	47.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000		5.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000		12.000.000		
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	1	10.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	10.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					267.822.000		330.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	1	267.822.000	1	330.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		11.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	10.000.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.400.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		1	4.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000		2.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	2.000.000	12	2.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.822.000		11.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	15.822.000	12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						11.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				90.000.000		99.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	90.000.000	1	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.000.000		49.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	45.000.000	12	49.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.000.000		132.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	105.000.000	12	132.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.575.479.000		1.673.200.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	1	1.575.479.000	1	1.673.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		1.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	2.000.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				267.200.000		352.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	267.200.000	12	352.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.306.279.000		1.320.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	1.306.279.000	12	1.320.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					323.500.000		357.922.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Klaten	Laporan	1	323.500.000	1	357.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				57.290.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	57.290.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.000.000		99.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	74.000.000	12	99.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.500.000		54.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	71.500.000	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				6.280.000		7.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	6.280.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				68.350.000		70.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	68.350.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.080.000		46.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	28.080.000	12	46.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		11.922.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	8.000.000	12	11.922.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	95	1.372.667.000	95	1.581.888.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					61.880.000		75.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	1	61.880.000	1	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				61.880.000		75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	61.880.000	12	75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					326.727.000		420.738.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	1	326.727.000	1	420.738.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.308.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	7.308.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				580.000		1.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	580.000	12	1.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.750.000		9.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	8.750.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				7.000.000		7.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				96.169.000		110.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Sragen	Unit	1	96.169.000	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				34.400.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	34.400.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168.520.000		223.538.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	168.520.000	12	223.538.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000		12.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	4.000.000	12	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					760.220.000		769.400.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	1	760.220.000	1	769.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.550.000		2.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	2.550.000	12	2.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.800.000		190.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	162.800.000	12	190.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				594.870.000		577.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	594.870.000	12	577.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					223.840.000		316.750.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sragen	Laporan	1	223.840.000	1	316.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.450.000		45.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	38.450.000	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.750.000		97.250.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	86.750.000	12	97.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	3.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.080.000		76.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	37.080.000	12	76.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000		6.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	2.000.000	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Sragen	Unit	2	25.000.000	2	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				23.860.000		28.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	23.860.000	12	28.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.700.000		8.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Sragen	Bulan	12	7.700.000	12	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	95	1.590.639.000	95	1.788.223.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.990.000		61.140.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	1	53.990.000	1	61.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.540.000		44.540.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	44.540.000	12	44.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				9.450.000		16.600.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	9.450.000	12	16.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					297.846.000		304.657.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	1	297.846.000	1	304.657.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.840.000		8.570.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	6.840.000	12	8.570.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				37.300.000		42.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	37.300.000	12	42.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.326.000		18.020.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	16.326.000	12	18.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				9.000.000		9.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	9.000.000	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				94.530.000		80.637.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	94.530.000	1	80.637.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				29.000.000		30.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	29.000.000	12	30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				104.850.000		115.730.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	104.850.000	12	115.730.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					931.431.000		993.675.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	1	931.431.000	1	993.675.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.400.000		3.400.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	3.400.000	12	3.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				177.675.000		174.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	177.675.000	12	174.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	96.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				654.356.000		616.275.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	654.356.000	12	616.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					307.372.000		428.751.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Sukoharjo	Laporan	1	307.372.000	1	428.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.000.000		29.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	38.000.000	12	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.700.000		57.700.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	67.700.000	12	57.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				6.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	6.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000.000		83.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	80.000.000	12	83.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				7.172.000		10.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	7.172.000	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		200.051.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	70.000.000	1	200.051.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.500.000		32.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	30.500.000	12	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.000.000		8.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	8.000.000	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	95	2.003.005.000	95	2.123.786.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000		54.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	54.000.000	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.000.000		42.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	42.000.000	12	42.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.000.000		12.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					337.866.000		367.966.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	337.866.000	1	367.966.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.000.000		46.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	39.000.000	12	46.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.975.000		13.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	11.975.000	12	13.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				3.600.000		3.600.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	3.600.000	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				117.891.000		131.266.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	117.891.000	1	131.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				26.400.000		26.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	26.400.000	12	26.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				119.000.000		126.900.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	119.000.000	12	126.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.336.939.000		1.247.620.000		
						"Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	1.336.939.000	1	1.247.620.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.760.000		3.760.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	3.760.000	12	3.760.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000		260.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	260.000.000	12	260.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.073.179.000		983.860.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	1.073.179.000	12	983.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					274.200.000		454.200.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kabupaten Wonogiri	Laporan	1	274.200.000	1	454.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				22.000.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	22.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.200.000		87.200.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	87.200.000	12	87.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel						20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.000.000		60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	55.000.000	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		200.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab UPPD Kabupaten Wonogiri	Unit	1	50.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor UPPD Kabupaten Wonogiri	Bulan	12	10.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	%	95	1.617.887.000	95	1.785.396.000	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.240.000		65.830.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	1	57.240.000	1	65.830.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				44.040.000		50.650.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	44.040.000	12	50.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.200.000		15.180.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	13.200.000	1	15.180.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
						"Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah" UPPD Kota Surakarta	Laporan	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.078.000		338.141.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah UPPD Kota Surakarta	Laporan	1	294.078.000	1	338.141.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		10.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	9.000.000	12	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	1		1		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.000.000		1.150.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	1.000.000	12	1.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.380.000		18.837.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	16.380.000	12	18.837.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				6.300.000		7.245.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	6.300.000	12	7.245.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.07			Penyediaan Bahan/Material				104.500.000		120.175.000		
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	1	104.500.000	1	120.175.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				33.000.000		37.950.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	33.000.000	12	37.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				123.898.000		142.434.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	123.898.000	12	142.434.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					993.769.000		1.067.725.000		
						Jumlah laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPPD Kota Surakarta	Bulan	12	993.769.000	12	1.067.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.725.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	1.500.000	12	1.725.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				234.800.000		270.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	234.800.000	12	270.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				757.469.000		796.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	757.469.000	12	796.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					272.800.000		313.700.000		
						"Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah" UPPD Kota Surakarta	Laporan	1	272.800.000	1	313.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		23.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	20.000.000	12	23.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				84.200.000		96.800.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	84.200.000	12	96.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12		12		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.600.000		74.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	64.600.000	12	74.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000		11.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	10.000.000	12	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		69.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	60.000.000	1	69.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		28.750.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	25.000.000	12	28.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		10.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	9.000.000	12	10.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**30.660.576.000**		**33.371.972.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75		80		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								**2.750.458.000**		**2.924.735.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	75	2.750.458.000	80	2.924.735.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.750.458.000		2.924.735.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	75	2.485.708.000	80	2.609.735.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					213.050.000		263.050.000		
						Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen		213.050.000	1	263.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit					Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit					Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.050.000		13.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	13.050.000	12	13.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	100.000.000	12	150.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.757.795.000		1.830.185.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		1.757.795.000	1	1.830.185.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600.000		1.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	600.000	12	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.600.000		722.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	700.600.000	12	722.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.056.595.000		1.106.985.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.056.595.000	12	1.106.985.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					514.863.000		516.500.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		514.863.000	1	516.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.000.000		130.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	130.000.000	12	130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.500.000		181.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	181.500.000	12	181.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan					Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				173.363.000		175.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	173.363.000	12	175.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Dokumen	73.5	264.750.000	74	315.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					264.750.000		315.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen		264.750.000		315.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		165.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5	150.000.000	5	165.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				114.750.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	114.750.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**27.910.118.000**		**30.447.237.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75	27.910.118.000	80	30.447.237.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.910.118.000		30.447.237.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	75	27.910.118.000	80	30.447.237.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.731.409.000		27.140.933.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		24.731.409.000		27.140.933.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.791.949.000		23.004.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	20.791.949.000	12	23.004.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.869.460.000		4.062.933.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	3.869.460.000	12	4.062.933.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30.000.000		31.500.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	31.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.500.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	10.000.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000		15.750.000		
						Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan Keuangan yang disusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.750.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15.000.000		15.750.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	18	15.000.000	18	15.750.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					150.000.000		155.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		150.000.000		155.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit Pakaian Dinas yang diadakan	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.04			Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				100.000.000		105.000.000		
						Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan	2	100.000.000	2	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/seminar	Orang	20	50.000.000	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
						Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.700.000.000		1.769.804.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen		1.700.000.000		1.769.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000		734.804.000		
						Jumlah unit Penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	700.000.000	12	734.804.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300.000.000		315.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	300.000.000	12	315.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.000		210.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	200.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		360.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	350.000.000	12	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.03			Pengadaan Alat Besar								
						Jumlah Unit Pengadaan Alat Besar	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah Unit Pengadaan Meubelair	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					667.600.000		693.500.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		667.600.000		693.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				365.000.000		380.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	365.000.000	12	380.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		63.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	60.000.000	12	63.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				232.600.000		240.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	232.600.000	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					661.109.000		688.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	661.109.000	1	688.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				423.309.000		440.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	423.309.000	12	440.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		105.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	100.000.000	12	105.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Tak Berwujud	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.800.000		143.000.000		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	4	137.800.000	4	143.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah									**4.051.822.000**		**4.253.992.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Persentase pengelolaan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah	%	70		72.5		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah								**4.051.822.000**		**4.253.992.000**		
						Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan.	%	70	4.051.822.000	72.5	4.253.992.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						4.051.822.000		4.253.992.000		
						Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	70	4.051.822.000	72.5	4.253.992.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					4.051.822.000		4.253.992.000		
						Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	Unit	60	100.000.000	62	100.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah pada aset pengelola yang termanfaatkan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	42	375.000.000	42	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.06			Inventarisasi Barang Milik Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Provisi Jawa Tengah	Dokumen	41	300.000.000	41	300.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.12			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	75.000.000	42	100.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	41	750.000.000	41	900.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.03			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				600.000.000		700.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	41	600.000.000	41	700.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.08			Penilaian Barang Milik Daerah				150.000.000		200.000.000		
						Jumlah Dokumen hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	2	150.000.000	2	200.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	Dokumen	4	675.000.000	4	700.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.05			Penatausahaan Barang Milik Daerah				425.000.000		450.000.000		
						Jumlah Updating system Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Jenis	41	425.000.000	41	450.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.11			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				250.000.000		250.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	OPD	41	250.000.000	41	250.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit	177	2.151.822.000	233	2.153.992.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.04			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.07			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.300.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang label kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Unit	15	200.000.000	15	200.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang pagar kepemilikan	Unit	2	200.000.000	3	200.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang patok	Unit	10	200.000.000	15	200.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah tersertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sertifikat	150	700.000.000	200	750.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.09			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	41	150.000.000	41	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.02.03.1.01.10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				401.822.000		353.992.000		
						Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah lingkup Pemeintah Provinsi	Dokumen	1	101.822.000	1	53.992.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	250.000.000	1	250.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik									**8.738.436.697.000**		**8.741.040.229.000**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
						Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	%	100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan								**8.738.436.697.000**		**8.741.040.229.000**		
						Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	%	100	8.738.436.697.000	100	8.741.040.229.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						8.738.436.697.000		8.741.040.229.000		
						Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	1	8.726.166.193.000	1	8.728.166.193.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					8.726.166.193.000		8.728.166.193.000		
						Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	1	8.726.166.193.000	1	8.728.166.193.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.07			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi								
						Jumlah dokumen kebijakan dan alokasi subsidi	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.08			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.581.646.500.000		2.581.646.500.000		
						Jumlah dokumen alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Dokumen	1	2.581.646.500.000	1	2.581.646.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.09			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				21.000.000.000		23.000.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan dana darurat dan mendesak	Dokumen	1	21.000.000.000	1	23.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1.05.10			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				6.123.519.693.000		6.123.519.693.000		
						Jumlah dokumen dana bagi hasil Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.123.519.693.000	1	6.123.519.693.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
						Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	470.250.000	100	485.000.000	SEKRETARIAT	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					470.250.000		485.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105	470.250.000	105	485.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		5.02.02.1.02.02			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				106.750.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD induk Kabupaten/Kota	Dokumen	35	106.750.000	35	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.02.02.1.02.03			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				106.750.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Perubahan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	106.750.000	35	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.04			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				106.750.000		100.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	Dokumen	35	106.750.000	35	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.05			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				100.000.000		125.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten/Kota	35	100.000.000	35	125.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.08			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	10.000.000	35	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.09			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	10.000.000	35	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.10			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	10.000.000	35	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.12			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				20.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.500.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	18.500.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	6.107.590.000	100	6.412.335.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					6.107.590.000		6.412.335.000		
						Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	12	1.751.400.000	12	1.880.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangungan yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0		0		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				70.000.000		80.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangungan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	15	70.000.000	15	80.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1.597.400.000		1.700.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	15	1.597.400.000	15	1.700.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				84.000.000		100.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	15	84.000.000	15	100.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.13			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang mendapatkan pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	15	1.736.190.000	15	1.782.335.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0		0		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintah	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				720.000.000		740.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	12	720.000.000	12	740.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				460.000.000		480.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	12	460.000.000	12	480.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				556.190.000		562.335.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	12	556.190.000	12	562.335.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Pengganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	14	2.620.000.000	14	2.750.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0		0		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2.200.000.000		2.300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	14	2.200.000.000	14	2.300.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				350.000.000		360.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	14	350.000.000	14	360.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				70.000.000		90.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	14	70.000.000	14	90.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	3.867.780.000	100	4.060.763.000	Bidang Akuntansi	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.867.780.000		4.060.763.000		
						Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	597.654.000	1	606.904.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.08			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				597.654.000		606.904.000		
						Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	597.654.000	1	606.904.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	194.488.000	3	194.488.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				47.834.000		47.834.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	17	47.834.000	17	47.834.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				146.654.000		146.654.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	146.654.000	3	146.654.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	12	661.045.000	12	663.913.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				114.500.000		104.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	12	114.500.000	12	104.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				30.000.000		30.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	12	30.000.000	12	30.000.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				39.009.000		72.009.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	12	39.009.000	12	72.009.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				46.486.000		49.354.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	12	46.486.000	12	49.354.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				431.050.000		408.550.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	12	431.050.000	12	408.550.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	17	550.609.000	17	657.289.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				8.000.000		12.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	17	8.000.000	17	12.000.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				188.250.000		133.250.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	OPD	17	188.250.000	17	133.250.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

						Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi							
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				277.600.000		427.030.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	17	277.600.000	17	427.030.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				76.759.000		85.009.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	17	76.759.000	17	85.009.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	15	1.660.006.000	15	1.734.191.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				66.454.000		76.954.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	15	66.454.000	15	76.954.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				151.400.000		151.400.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	15	151.400.000	15	151.400.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.297.650.000		1.319.650.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	15	1.297.650.000	15	1.319.650.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				37.502.000		31.187.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	15	37.502.000	15	31.187.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				107.000.000		155.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	15	107.000.000	15	155.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	5	103.124.000	3	103.124.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.07			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				103.124.000		103.124.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	5	103.124.000	3	103.124.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	100.854.000	7	100.854.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.12			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				100.854.000		100.854.000		
						Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	100.854.000	7	100.854.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi serapan APBD	%	92	1.824.884.000	93	1.915.938.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1.674.884.000		1.760.938.000		
						Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD		471.384.000		476.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1.03.06			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				421.384.000		425.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	OPD	35	421.384.000	35	425.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.08			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								
						Jumlah Dokumen Analisis Pembiayaan Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Kebijakan Analisis Kas Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				50.000.000		51.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2	50.000.000	2	51.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD		584.500.000		613.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.03.03			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi penerbitan Dokumen Anggaran Kas dan SPD	OPD	0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.09			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait								
						Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait pada Perangkat Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.11			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				584.500.000		613.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	24	584.500.000	24	613.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.	OPD	41	619.000.000	41	671.938.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.03.01			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				544.000.000		589.438.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Daerah	Dokumen	41	544.000.000	41	589.438.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.04			Penatausahaan Pembiayaan Daerah								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.05			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				75.000.000		82.500.000		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah	Dokumen	12	75.000.000	12	82.500.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					150.000.000		155.000.000		
						Jumlah OPD yang diproses Pencairan	OPD	41	150.000.000	41	155.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.06.01			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah								
						Jumlah Dokumen Analisis Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.02			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				100.000.000		105.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41	100.000.000	41	105.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.03			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41	50.000.000	41	50.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah									**80.053.162.000**		**88.040.749.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	88		89		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								**350.000.000**		**385.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75	350.000.000	76	385.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						350.000.000		385.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	350.000.000	100	385.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					350.000.000		385.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	350.000.000	6	385.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				170.000.000		187.000.000		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	170.000.000	3	187.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				180.000.000		198.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	180.000.000	3	198.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								**79.703.162.000**		**87.655.749.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	88	79.703.162.000	89	87.655.749.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						79.703.162.000		87.655.749.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	79.618.162.000	100	87.562.249.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.869.372.000		79.056.309.000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	17	71.869.372.000	17	79.056.309.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				70.337.722.000		77.371.494.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	70.337.722.000	12	77.371.494.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.471.650.000		1.618.815.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.471.650.000	12	1.618.815.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.000.000		66.000.000		
						Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	Laporan	17	60.000.000	17	66.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					154.000.000		169.400.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	154.000.000	1	169.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				154.000.000		169.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	154.000.000	12	169.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					500.000.000		550.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	500.000.000	1	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000		220.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	200	200.000.000	200	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				300.000.000		330.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	30	300.000.000	30	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.425.500.000		3.768.050.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	3.425.500.000	1	3.768.050.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.300.000.000		1.430.000.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	1.300.000.000	12	1.430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		44.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	40.000.000	12	44.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				247.500.000		272.250.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	247.500.000	12	272.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				400.000.000		440.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	400.000.000	12	440.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				18.000.000		19.800.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	18.000.000	12	19.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				340.000.000		374.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	340.000.000	12	374.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		880.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	800.000.000	12	880.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	250.000.000	1	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					280.000.000		308.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	280.000.000	1	308.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000		33.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	30.000.000	3	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	6	250.000.000	6	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.775.900.000		1.953.490.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.775.900.000	1	1.953.490.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60.000.000		66.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	60.000.000	12	66.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				750.000.000		825.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	750.000.000	12	825.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		110.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	100.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				865.900.000		952.490.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	865.900.000	12	952.490.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.613.390.000		1.757.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.613.390.000	1	1.757.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		385.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	350.000.000	12	385.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				20.000.000		22.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12	22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				886.100.000		960.000.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	886.100.000	2	960.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				357.290.000		390.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	357.290.000	12	390.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	85.000.000	100	93.500.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.000.000		93.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	85.000.000	12	93.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		38.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	35.000.000	12	38.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000		55.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam Manajemen ASN									**17.274.560.000**		**19.222.016.000**	**Badan Kepegawaian Daerah**	
						Nilai Sistem Merit	Nilai	280		284		Badan Kepegawaian Daerah	
	Distribusi penempatan PNS dalam jabatan								**6.907.280.000**		**7.598.008.000**		
						Persentase distribusi penempatan PNS dalam jabatan	%	100	6.907.280.000	100	7.598.008.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						6.907.280.000		7.598.008.000		
						Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	1.967.440.000	100	2.164.181.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Mutasi dan Promosi ASN					935.450.000		1.028.995.000		
						Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	%	100	935.450.000	100	1.028.995.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.02.03			Pengelolaan Promosi ASN				935.450.000		1.028.995.000		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	Orang	6	918.590.000	1	1.010.449.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	Orang	170	16.860.000	160	18.546.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					500.000.000		550.002.000		
						Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	%	100	500.000.000	100	550.002.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.03.02.1.03.13			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				58.762.000		64.639.000		
						Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	Orang	2000	58.762.000	2000	64.639.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.14			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				441.238.000		485.363.000		
						Jumlah PAK yang ditetapkan	Lembar	500	11.435.000	500	12.579.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	250	25.100.000	250	27.610.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Sertifikat	1862	404.703.000	1850	445.174.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					531.990.000		585.184.000		
						Persentase ASN yang dinilai PKSP	%	100	531.990.000	100	585.184.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				531.990.000		585.184.000		
						Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	Orang	768	383.750.000	940	422.120.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	Orang	270	6.200.000	200	6.820.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	Orang	678	142.040.000	600	156.244.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	80	3.795.000.000	100	4.174.503.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					331.390.000		364.529.000		
						Persentase usulan formasi ASN	%	100	331.390.000	100	364.529.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.01.02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				331.390.000		364.529.000		
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	Dokumen	1	284.000.000	1	312.400.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	Dokumen	1	47.390.000	1	52.129.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					3.463.610.000		3.809.974.000		
						Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	%	100	3.463.610.000	100	3.809.974.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.04			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				3.463.610.000		3.809.974.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	Orang	1	49.764.000	1	54.741.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	Orang	1	113.846.000	1	125.231.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	Orang	300	253.474.000	300	278.822.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	Orang	800	148.184.000	800	163.003.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	Orang	50	120.214.000	50	132.236.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	Orang	13	2.778.128.000	13	3.055.941.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	80	1.144.840.000	100	1.259.324.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Pengembangan Kompetensi ASN					1.144.840.000		1.259.324.000		
						Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	%	100	594.840.000	100	654.324.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	
		5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center				594.840.000		654.324.000		
						Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	Orang	5150	385.000.000	2000	423.500.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	Dokumen	2	45.000.000	2	49.500.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	Dokumen	1	164.840.000	1	181.324.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	%	100	550.000.000	100	605.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center				550.000.000		605.000.000		
						Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	Orang	225	180.000.000	250	198.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	40	200.000.000	50	220.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	260	170.000.000	280	187.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi								**10.367.280.000**		**11.624.008.000**		
						Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	10.367.280.000	100	11.624.008.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						10.367.280.000		11.624.008.000		
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	7.889.000.000	100	8.897.900.000	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					7.290.000.000		8.239.000.000		
						Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	%	90	6.925.000.000	90	7.837.500.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				6.925.000.000		7.837.500.000		
						Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	3000	56.880.000	3000	62.568.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	135	18.120.000	135	19.932.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	Orang	150	146.020.000	150	160.622.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	Kegiatan	1	6.703.980.000	1	7.594.378.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100	365.000.000	100	401.500.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				365.000.000		401.500.000		
						Jumlah pelayanan administrasi pensiun	Sertifikat	2395	215.000.000	2300	236.500.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Kegiatan	6	150.000.000	5	165.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Mutasi dan Promosi ASN					599.000.000		658.900.000		
						Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100	494.000.000	100	543.400.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.02.02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				494.000.000		543.400.000		
						Jumlah fasilitasi Izin Cuti	Orang	400	13.180.000	400	14.498.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembuatan Karis/Karsu	Orang	400	18.540.000	400	20.394.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembuatan Karpeg	Orang	300	15.910.000	300	17.501.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah penerbitan SPTKG	Orang	20	1.700.000	20	1.870.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	Sertifikat	10000	396.730.000	10000	436.403.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	Orang	750	47.940.000	750	52.734.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	%	75	105.000.000	75	115.500.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.02.01			Pengelolaan Mutasi ASN				105.000.000		115.500.000		
						Jumlah OPD yang dievalusi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49	12.000.000	49	13.200.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	Orang	200	60.000.000	200	66.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Dokumen			0		SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Test Mutasi PNS	Orang	100	33.000.000	100	36.300.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	1.340.000.000	100	1.474.000.000	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					258.000.000		283.800.000		
						Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	%	100	258.000.000	100	283.800.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	
		5.03.02.1.01.08			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				258.000.000		283.800.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	Orang	150	165.000.000	150	181.500.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta apel siaga KORPRI	Orang	900	93.000.000	900	102.300.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1.082.000.000		1.190.200.000		
						Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	%	100	600.000.000	100	660.000.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
		5.03.02.1.04.07			Pembinaan Disiplin ASN				263.000.000		289.300.000		
						Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	Dokumen	2	3.400.000	1	3.740.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	Orang	80	141.600.000	80	155.760.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	115	118.000.000	120	129.800.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.08			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				337.000.000		370.700.000		
						Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	Kasus	30	33.750.000	30	37.125.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	Berkas	65	2.700.000	70	2.970.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	Kasus	60	300.550.000	60	330.605.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	%	100	482.000.000	100	530.200.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				347.025.000		381.727.000		
						Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	Orang	50	74.398.000	50	81.838.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	Dokumen	2	72.052.000	2	79.258.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	Orang	50	200.575.000	50	220.631.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.05			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				134.975.000		148.473.000		
						Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	Orang	100	62.110.000	100	68.321.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	Berkas	2000	72.865.000	2000	80.152.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	80	1.138.280.000	100	1.252.108.000	Bidang Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.138.280.000		1.252.108.000		
						Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	%	100	340.000.000	100	374.000.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.11			Pengelolaan Data Kepegawaian				340.000.000		374.000.000		
						Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	Dokumen	352500	69.600.000	352500	76.560.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	Buah	1800	162.660.000	1800	178.926.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	Kegiatan	1	107.740.000	1	118.514.000	SUB BIDANG DOKUMENTASI DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	%	100	798.280.000	100	878.108.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	
		5.03.02.1.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				798.280.000		878.108.000		
						Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	Buah	1	46.000.000	1	50.600.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	Kali	6	284.000.000	5	312.400.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	Kegiatan	1	232.380.000	1	255.618.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	Buku	60	6.600.000	60	7.260.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	Kegiatan	1	96.280.000	1	105.908.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	Kegiatan	6	133.020.000	6	146.322.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**47.761.545.000**		**48.250.000.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80.5		81		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**457.000.000**		**457.000.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.7	457.000.000	72.8	457.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						457.000.000		457.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	457.000.000	100	457.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					457.000.000		457.000.000		
						jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	31	457.000.000	31	457.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				171.763.000		171.763.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	171.763.000	10	171.763.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.237.000		285.237.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	21	285.237.000	21	285.237.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**47.304.545.000**		**47.793.000.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	47.304.545.000	81.5	47.793.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						47.304.545.000		47.793.000.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	47.304.545.000	100	47.793.000.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					35.422.870.000		35.911.325.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	6	35.422.870.000	6	35.911.325.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.398.768.000		30.393.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	27.398.768.000	12	30.393.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7.728.777.000		5.223.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	7.728.777.000	12	5.223.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42.471.000		42.471.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	42.471.000	1	42.471.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				43.124.000		43.124.000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah	Dokumen	1	43.124.000	1	43.124.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				65.340.000		65.340.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	65.340.000	1	65.340.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				144.390.000		144.390.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	144.390.000	1	144.390.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.000.000		200.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				200.000.000		200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					81.675.000		81.675.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Dokumen	1	81.675.000	1	81.675.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				81.675.000		81.675.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	1	81.675.000	1	81.675.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					99.520.000		99.520.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1	99.520.000	1	99.520.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Unit Pakaian Dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				49.520.000		49.520.000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	49.520.000	12	49.520.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	60	50.000.000	60	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.504.484.000		1.504.484.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	1	1.504.484.000	1	1.504.484.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				145.095.000		145.095.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	145.095.000	12	145.095.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000		150.000.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	3255	150.000.000	3255	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				400.000.000		400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	400.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				177.242.000		177.242.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	Bulan	12	177.242.000	12	177.242.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.971.000		80.971.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	80.971.000	12	80.971.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				34.630.000		34.630.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	Bulan	12	34.630.000	12	34.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				70.500.000		70.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	70.500.000	12	70.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.690.000		120.690.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	120.690.000	12	120.690.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.721.000		9.721.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	9.721.000	12	9.721.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				315.635.000		315.635.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	4	315.635.000	4	315.635.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					638.000.000		638.000.000		
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	638.000.000	1	638.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				377.000.000		377.000.000		
						Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	Unit	84	377.000.000	84	377.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan aset tetap	Paket	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.08			Pengadaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah unit pengadaan aset tak berwujud	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				261.000.000		261.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Unit	6	261.000.000	6	261.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.680.630.000		7.680.630.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	1	7.680.630.000	1	7.680.630.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.750.000		4.750.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	Bulan	12	4.750.000	12	4.750.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.849.000.000		1.849.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	1.849.000.000	12	1.849.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.826.880.000		5.826.880.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	5.826.880.000	12	5.826.880.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.677.366.000		1.677.366.000		
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dokumen	1	1.677.366.000	1	1.677.366.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				217.965.000		217.965.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	Bulan	12	217.965.000	12	217.965.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000.000		1.000.000.000		
						Jumlah unit gedung yang direhab	Unit	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				434.401.000		434.401.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	Bulan	12	434.401.000	12	434.401.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan									**22.569.078.000**		**18.250.000.000**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
						Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	94.29		99.29		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Meningkatnya kompetensi ASN								**21.889.078.000**		**17.570.000.000**		
						Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	25	21.889.078.000	30	17.570.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						21.889.078.000		17.570.000.000		
						Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3.5	593.500.000	3.5	593.500.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					196.462.000		196.462.000		
						Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	Dokumen	3	196.462.000	3	196.462.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.02			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara				157.814.000		157.814.000		

					Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	7.814.000	1	7.814.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	25	150.000.000	25	150.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		5.04.02.1.01.04			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				38.648.000		38.648.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	28	8.409.000	28	8.409.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angkatan	60	30.239.000	60	30.239.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					397.038.000		397.038.000		
						Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi	Dokumen	2	187.358.000	2	187.358.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.04			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				187.358.000		187.358.000		
						Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	Dokumen	1	84.419.000	1	84.419.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah pelatihan yang diakreditasi	Jenis	1	55.439.000	1	55.439.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	4	47.500.000	4	47.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	Dokumen	3	209.680.000	3	209.680.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.06			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional				42.736.000		42.736.000		
						Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	Dokumen	1	6.736.000	1	6.736.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	Dokumen	5	36.000.000	5	36.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		5.04.02.1.02.08			Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				166.944.000		166.944.000		
						Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	Dokumen	32	35.539.000	32	35.539.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	Angkatan	122	131.405.000	122	131.405.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100	9.941.000.000	100	5.038.500.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					9.941.000.000		5.038.500.000		
						Jumlah Peserta Latsar CPNS	Orang	600	9.941.000.000	600	5.038.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	
		5.04.02.1.02.07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				9.941.000.000		5.038.500.000		
						Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	Orang	2920	9.941.000.000	1500	5.038.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100	1.732.928.000	100	1.400.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					1.732.928.000		1.400.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Orang	785	1.732.928.000	785	1.400.000.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.04.02.1.02.07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.732.928.000		1.400.000.000		
						Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	Orang	140	797.626.000	80	464.698.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	Orang	170	516.350.000	170	516.350.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Orang	535	418.952.000	535	418.952.000	SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100	7.995.150.000	100	8.911.500.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					7.995.150.000		8.911.500.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Orang	510	7.995.150.000	510	8.911.500.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	
		5.04.02.1.02.07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				7.995.150.000		8.911.500.000		
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Orang	120	2.300.190.000	160	2.650.240.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Orang	120	2.165.300.000	160	2.431.600.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	Orang	120	2.964.840.000	120	2.964.840.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	Orang	40	89.760.000	160	289.760.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah	Orang	280	475.060.000	280	575.060.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	1010	1.500.000.000	1010	1.500.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	
		5.04.02.1.01.03			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.500.000.000		1.500.000.000		
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	Orang	430	500.000.000	430	500.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	Orang	320	500.000.000	320	500.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	Orang	340	500.000.000	340	500.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	79	126.500.000	80	126.500.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Pengembangan Kompetensi Teknis					44.500.000		44.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	Dokumen	3	44.500.000	3	44.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.01.01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			44.500.000		44.500.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	6.500.000	1	6.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	OPD	36	38.000.000	36	38.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					82.000.000		82.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	Dokumen	3	82.000.000	3	82.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional			82.000.000		82.000.000		
						Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	Dokumen	1	6.500.000	1	6.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	OPD	36	75.500.000	36	75.500.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
	Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN								**680.000.000**		**680.000.000**		
						Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35.92	680.000.000	36.26	680.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						680.000.000		680.000.000		
						Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	80	680.000.000	80	680.000.000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					680.000.000		680.000.000		
						Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi	Dokumen	1	680.000.000	1	680.000.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	
		5.04.02.1.02.02			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi				49.138.000		49.138.000		
						Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki	Orang	3	42.150.000	3	42.150.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
						Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	Jenis	2	6.988.000	2	6.988.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON
		5.04.02.1.02.03			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota				630.862.000		630.862.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Orang	211	630.862.000	211	630.862.000	SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; KOTA SEMARANG --> BANYUMANIK --> KELURAHAN SRONDOL KULON

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta serta Tata Kelola Organisasi Badan Penghubung									**17.156.635.000**		**18.500.000.000**		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84		85			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung								**44.500.000**		**44.500.000**		
						Nilai SAKIP Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Nilai	70	44.500.000	75	44.500.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						44.500.000		44.500.000		
						Presentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi kinerja OPD	%	100	44.500.000	100	44.500.000	Badan Penghubung	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					44.500.000		44.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	44.500.000	3	44.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.500.000		29.500.000		
						Jumlah dokumen perencanaan PD yg disusun	Dokumen	3	29.500.000	3	29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	5	15.000.000	5	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								**15.959.360.000**		**16.816.414.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	84	15.959.360.000	85	16.816.414.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						15.959.360.000		16.816.414.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	15.959.360.000	100	16.816.414.000	Badan Penghubung	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.619.190.000		8.812.555.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	8.619.190.000	1	8.812.555.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.548.670.000		8.742.035.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	8.548.670.000	12	8.742.035.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				35.400.000		35.400.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	35.400.000	12	35.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.820.000		4.820.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Dokumen	1	4.820.000	1	4.820.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				7.320.000		7.320.000		
						Jumlah dokumen tanggapan pemeriksanaan keuangan yang disusun	Dokumen	1	7.320.000	1	7.320.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				22.980.000		22.980.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Laporan	1	22.980.000	1	22.980.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					191.580.000		191.580.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	191.580.000	1	191.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				191.580.000		191.580.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	191.580.000	12	191.580.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							145.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	0		1	145.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	0		10	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						110.000.000		
						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	0		68	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.810.460.000		2.040.440.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.810.460.000	1	2.040.440.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.941.000		50.941.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.941.000	12	50.941.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.927.000		155.927.000		
						Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Unit	0		1	85.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	Unit	1	70.927.000	1	70.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				207.872.000		207.872.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	207.872.000	12	207.872.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.000.000		21.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	21.000.000	12	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				18.000.000		18.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				580.020.000		675.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	580.020.000	12	675.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				850.000.000		900.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	850.000.000	12	900.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				11.700.000		11.700.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Dokumen	1	11.700.000	1	11.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					21.000.000		21.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	21.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				21.000.000		21.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	21.000.000	1	21.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	0		0		SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.925.000.000		4.040.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	3.925.000.000	1	4.040.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		15.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				759.000.000		759.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	759.000.000	12	759.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				116.000.000		116.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	116.000.000	12	116.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.035.000.000		3.150.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	3.035.000.000	12	3.150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.392.130.000		1.565.839.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.392.130.000	1	1.565.839.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				468.640.000		550.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	468.640.000	12	550.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				30.500.000		33.550.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	12	30.500.000	12	33.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				315.930.000		347.523.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	315.930.000	12	347.523.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				71.260.000		78.386.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Bulan	12	71.260.000	12	78.386.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				505.800.000		556.380.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Dipelihara / Direhab	Unit	4	505.800.000	4	556.380.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
	Meningkatnya Pelayanan Publik Bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah								**1.152.775.000**		**1.639.086.000**		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84	1.152.775.000	85	1.639.086.000		
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						1.152.775.000		1.639.086.000		
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung	%	100	1.152.775.000	100	1.639.086.000	Badan Penghubung	
				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					1.152.775.000		1.639.086.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan , dan Pelestarian Seni Budaya	%	100	525.895.000	100	684.756.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.03			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				525.895.000		684.756.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Promosi Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	324.135.000	35	482.996.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	Kabupaten/ Kota	35	201.760.000	35	201.760.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Keikutsertaan dalam Kegiatan HUT TMII	%	100	34.860.000	100	34.860.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	
		5.07.02.1.01.03			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				34.860.000		34.860.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah keikusertaan dalam Kegiatan HUT TMII	Kali	1	34.860.000	1	34.860.000	SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	%	100	592.020.000	100	919.470.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	
		5.07.02.1.01.01			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				592.020.000		919.470.000		
						Jumlah Paguyuban yang difasilitasi	Kelompok	35	44.470.000	35	44.470.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Jumlah Pemudik lebaran Gratis Masyarakat Perantau Asal Jawa Tengah di Jakarta	Orang	550	547.550.000	700	875.000.000	SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; DKI JAKARTA

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik									**8.982.012.000**		**9.817.256.000**		
						Level Kapabilitas APIP	Level	3		3			
						Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.18		3.19			
	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola								**6.272.457.000**		**6.834.249.000**		
						Level pada tiga elemen : 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	3	6.272.457.000	3	6.834.249.000		
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						6.272.457.000		6.834.249.000		
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	85	1.476.600.000	85	1.624.747.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					780.000.000		835.103.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	54	780.000.000	54	835.103.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.04			Reviu Laporan Keuangan				780.000.000		835.103.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	54	780.000.000	54	835.103.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					696.600.000		789.644.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan	Laporan	12	696.600.000	12	789.644.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
		6.01.02.1.02.02			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				696.600.000		789.644.000		
						Jumlah Laporan Hasil Audit Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	10	696.600.000	10	789.644.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Monitoring Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	Laporan	2		2		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH	
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	%	85	1.153.200.000	85	1.230.118.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					1.153.200.000		1.230.118.000		
						Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan	Laporan	24	1.153.200.000	24	1.230.118.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	
		6.01.02.1.02.02			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1.153.200.000		1.230.118.000		
						Jumlah Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan	Laporan	24	1.153.200.000	24	1.230.118.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	85	1.422.914.000	85	1.542.022.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.422.914.000		1.542.022.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Laporan	22	1.422.914.000	22	1.542.022.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	
		6.01.02.1.01.01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.422.914.000		1.542.022.000		
						Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Laporan	22	1.422.914.000	22	1.542.022.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	85	1.625.150.000	85	1.781.147.000	INSPEKTORAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.625.150.000		1.781.147.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	79	1.625.150.000	79	1.781.147.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		6.01.02.1.01.01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				493.500.000		532.416.000		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	47	493.500.000	47	532.416.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	0		0		INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.03			Reviu Laporan Kinerja				46.250.000		49.334.000		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	Laporan	25	46.250.000	25	49.334.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		6.01.02.1.01.05			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				1.085.400.000		1.199.397.000		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis di Kab/Kota yang dihasilkan	Laporan	8	1.085.400.000	8	1.199.397.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	594.593.000	85	656.215.000	SEKRETARIAT	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					594.593.000		656.215.000		
						Jumlah Dokumen IHPS	Dokumen	2	594.593.000	2	656.215.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
		6.01.02.1.01.07			Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil				594.593.000		656.215.000		
						Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan	Laporan	85	594.593.000	85	656.215.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	
	Meningkatnya Skor pada 3 (Tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP								**2.709.555.000**		**2.983.007.000**		
						Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian 2.Penilaian Risiko 3.Kegiatan Pengendalian 4.Informasi dan Komunikasi 5.Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3.18	2.709.555.000	3.19	2.983.007.000	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.709.555.000		2.983.007.000		
						Nilai Self Assessment RB Provinsi	Nilai	85	115.274.000	86	125.962.000	INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi					115.274.000		125.962.000		
						Jumlah OPD yang dievaluasi RB	OPD	41	115.274.000	41	125.962.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				115.274.000		125.962.000		
						Jumlah OPD yang dievaluasi	OPD	41	115.274.000	41	125.962.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Capaian Aksi Stranas PK	%	75	292.780.000	85	319.308.000	INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi					292.780.000		319.308.000		
						Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli	Laporan	1	292.780.000	1	319.308.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				292.780.000		319.308.000		
						Jumlah Dokumen pemetaan kegiatan saber pungli	Dokumen	1	292.780.000	1	319.308.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	%	100	956.006.000	100	1.045.927.000	SEKRETARIAT	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					637.112.000		704.710.000		
						Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	1	637.112.000	1	704.710.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.01.02			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				637.112.000		704.710.000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko	Dokumen	4	637.112.000	4	704.710.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pendampingan dan Asistensi					318.894.000		341.217.000		
						Jumlah Dokumen Surveilance ISO	Dokumen	1	92.624.000	1	99.108.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		6.01.03.1.02.01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				92.624.000		99.108.000		
						Jumlah Dokumen Surveilance ISO	Dokumen	1	92.624.000	1	99.108.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	Laporan	1	226.270.000	1	242.109.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				226.270.000		242.109.000		
						Jumlah APIP yang berlisensi nasional/internasional	Orang	2	226.270.000	2	242.109.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Nilai MCP korsupgah	%	85	809.713.000	90	920.292.000	INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi					809.713.000		920.292.000		
						Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	4	72.280.000	4	11.605.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				72.280.000		11.605.000		
						Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	Laporan	4	72.280.000	4	11.605.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaporan LHKASN	%	100	431.001.000	100	547.592.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				431.001.000		547.592.000		
						Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKASN	OPD	41	431.001.000	41	547.592.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pelaporan LHKPN	%	100	306.432.000	100	361.095.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				306.432.000		361.095.000		
						Jumlah Pendampingan dan Fasilitasi LHKPN	OPD	41	306.432.000	41	361.095.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penerapan MR di OPD	%	10	535.782.000	12	571.518.000	INSPEKTORAT	
				Pendampingan dan Asistensi					535.782.000		571.518.000		
						Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	4	535.782.000	5	571.518.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	
		6.01.03.1.02.02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				535.782.000		571.518.000		
						Jumlah Pendampingan MR ke OPD	OPD	4	535.782.000	5	571.518.000	INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									**24.771.554.000**		**27.682.744.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.35		87.35			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah								**108.116.000**		**115.326.000**		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87	108.116.000	88	115.326.000	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						108.116.000		115.326.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	108.116.000	100	115.326.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					108.116.000		115.326.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	11	108.116.000	11	115.326.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.118.000		64.126.000		
						Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Dokumen	5	60.118.000	5	64.126.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47.998.000		51.200.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6	47.998.000	6	51.200.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**24.663.438.000**		**27.567.418.000**		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.35	24.663.438.000	87.35	27.567.418.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						24.663.438.000		27.567.418.000		
						Persentase Ketercapain Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	24.663.438.000	100	27.567.418.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.539.559.000		23.311.013.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	20.539.559.000	1	23.311.013.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.539.559.000		23.311.013.000		
						Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	Bulan	14	20.539.559.000	14	23.311.013.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					194.100.000		206.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	194.100.000	1	206.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				194.100.000		206.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	194.100.000	12	206.000.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					378.907.000		402.884.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	3	378.907.000	3	402.884.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		150		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				249.407.000		265.034.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	249.407.000	12	265.034.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				129.500.000		137.850.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar	Orang	250	129.500.000	250	137.850.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					276.851.000		294.100.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	4	276.851.000	4	294.100.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		5.200.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.200.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				134.769.000		143.180.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	134.769.000	12	143.180.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				137.082.000		145.720.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	137.082.000	12	145.720.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	1		1		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					136.736.000		200.907.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	136.736.000	2	200.907.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Unit	0		1		SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				136.736.000		200.907.000		
						Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Unit	195	136.736.000	195	200.907.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.574.471.000		2.742.378.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	2.574.471.000	4	2.742.378.000		
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				228.151.000		241.353.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	Bulan	12	228.151.000	12	241.353.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				784.900.000		836.350.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	Bulan	12	784.900.000	12	836.350.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.323.820.000		1.411.675.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	1.323.820.000	12	1.411.675.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				237.600.000		253.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	237.600.000	12	253.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562.814.000		410.136.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	562.814.000	3	410.136.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				225.530.000		90.156.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	225.530.000	12	90.156.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				238.594.000		215.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	238.594.000	12	215.300.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				98.690.000		104.680.000		
						Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	98.690.000	12	104.680.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah													**15.780.942.000**		**19.669.732.000**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	Nilai Kepuasan Masyarakat										Angka	75		80		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah											**2.408.062.000**		**3.603.462.000**		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah								Angka	73,19	2.408.062.000	78,44	3.603.462.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								2.408.062.000		3.603.462.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD					%	100	2.408.062.000	100	3.603.462.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.408.062.000		3.603.462.000		
								Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun			Dokumen	36	2.408.062.000	36	3.603.462.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.606.086.000		2.645.782.000		
										Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	16	1.606.086.000	17	2.645.782.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				801.976.000		957.680.000		
										Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20	801.976.000	21	957.680.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah											**13.372.880.000**		**16.066.270.000**		
			Nilai Kepuasan Masyarakat								Angka	75	13.372.880.000	80	16.066.270.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								13.372.880.000		16.066.270.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	100	13.372.880.000	100	16.066.270.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.450.574.000		10.925.120.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			Laporan	1	8.450.574.000	1	10.925.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.225.454.000		10.700.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	8.225.454.000	12	10.700.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				222.120.000		222.120.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	222.120.000	12	222.120.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.02.03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.500.000		1.500.000		
										Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.02.04					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.500.000		1.500.000		
										Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						80.000.000		80.000.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	1	80.000.000	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.03.02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80.000.000		80.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						320.500.000		320.500.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Laporan	1	320.500.000	1	320.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-		-		
										Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.03					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.05					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		
										Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.05.09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		60.000.000		
										Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	100	60.000.000	100	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				X.XX.01.1.05.10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230.500.000		230.500.000		
										'Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130	230.500.000	130	230.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.196.806.000		1.310.650.000		
								Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Laporan	1	1.196.806.000	1	1.310.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		200.000.000		
										Jumlah bulan penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	200.000.000	12	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		120.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	100.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		180.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				85.000.000		85.000.000		
										Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	85.000.000	12	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				25.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				55.650.000		55.650.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	55.650.000	12	55.650.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				426.156.000		500.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	426.156.000	12	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000		25.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	15.000.000	12	25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60.000.000		70.000.000		
										Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	60.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						260.000.000		305.000.000		
								Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah			Laporan	1	260.000.000	1	305.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.01					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		
										Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.05					Pengadaan Mebel				50.000.000		70.000.000		
										Jumlah paket pengadaan meubelair	Paket	1	50.000.000	1	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.000.000		200.000.000		
										Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	1	175.000.000	1	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		35.000.000		
										Jumlah paket Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	35.000.000	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.457.000.000		2.457.000.000		
								Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah			Laporan	1	2.457.000.000	1	2.457.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		7.000.000		
										Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000		350.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	350.000.000	12	350.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.100.000.000		2.100.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2.100.000.000	12	2.100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						608.000.000		668.000.000		
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			Laporan	1	608.000.000	1	668.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				225.000.000		225.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	225.000.000	12	225.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				3.000.000		3.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3.000.000	12	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110.000.000		120.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	110.000.000	12	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		250.000.000		
										Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	200.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				X.XX.01.1.09.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70.000.000		70.000.000		
										Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik													**90.544.512.000**		**557.330.268.000**		
	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik										Nilai	3,04		3,25			
		Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik											**62.927.400.000**		**28.541.400.000**		
			Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik								Nilai	2,97	62.927.400.000	3,15	28.541.400.000		
				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								42.575.000.000		8.425.000.000		
						Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					Nilai	2,92	42.575.000.000	3,11	8.425.000.000		
				8.01.04.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						42.575.000.000		8.425.000.000		
								Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			%	90,5	2.850.000.000	91,5	3.600.000.000		
				8.01.04.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2.850.000.000		3.600.000.000		
										Jumlah masyarakat yang mengikuti mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Orang	250	250.000.000	500	600.000.000		
										Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Orang	3350	2.600.000.000	4000	3.000.000.000		
								Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan			%	100	39.725.000.000	100	4.825.000.000		
				8.01.04.1.01.01					Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang tersusun	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				8.01.04.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				475.000.000		775.000.000		
										Jumlah Laporan Hasil Desk dan Verifikasi Ormas	Laporan	7	200.000.000	7	300.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										Jumlah Laporan pemberdayaan dan pengawasan ormas	Laporan	6	275.000.000	6	475.000.000		
				8.01.04.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				39.200.000.000		4.000.000.000		
										Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	Laporan	35	39.200.000.000	35	4.000.000.000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								3.106.000.000		3.420.000.000		
						Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					Nilai	3,23	3.106.000.000	3,39	3.420.000.000		
				8.01.05.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						3.106.000.000		3.420.000.000		
								Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)			%	90,5	2.586.000.000	91,5	2.665.000.000		
				8.01.05.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2.586.000.000		2.665.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)	Orang	283	230.000.000	300	309.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)	Orang	220	256.000.000	500	256.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (orang)	Orang	3000	2.100.000.000	3000	2.100.000.000		
								Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			%	100	520.000.000	100	755.000.000		
				8.01.05.1.01.01					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50.000.000		75.000.000		
										Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	1	50.000.000	1	75.000.000		
				8.01.05.1.01.02					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				55.000.000		205.000.000		
										Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa (laporan)	Laporan	1	55.000.000	1	205.000.000		
				8.01.05.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				340.000.000		340.000.000		
										Jumlah laporan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (laporan)	Laporan	1	60.000.000	1	60.000.000		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (laporan)	Laporan	1	280.000.000	1	280.000.000		
				8.01.05.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				75.000.000		135.000.000		
										Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (laporan)	Laporan	1	75.000.000	1	135.000.000		
				8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								17.246.400.000		16.696.400.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					Nilai	2,7	17.246.400.000	2,9	16.696.400.000		
				8.01.06.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						17.246.400.000		16.696.400.000		
								Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan)			Laporan	1	13.196.400.000	1	12.346.400.000		
				8.01.06.1.01.01					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000		
				8.01.06.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				700.000.000		900.000.000		
										Jumlah laporan kunjungan VIP/VVIP (laporan)	Laporan	1	500.000.000	1	700.000.000		
										Jumlah laporan pantauan kunjungan orang asing (laporan)	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000		
				8.01.06.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10.946.400.000		9.796.400.000		
										Jumlah Dukungan Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pilpres/Kepala Daerah	Laporan	0	-	1	300.000.000		
										Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan (laporan)	Laporan	1	10.946.400.000	1	9.496.400.000		
				8.01.06.1.01.06					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1.500.000.000		1.600.000.000		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Forkopimda (laporan)	Laporan	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000		
								Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)			%	75	2.700.000.000	85	2.700.000.000		
				8.01.06.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2.700.000.000		2.700.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (orang)	Orang	3000	2.100.000.000	3000	2.100.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini (orang)	Orang	380	600.000.000	380	600.000.000		
								Persentase penanganan konflik sosial (%)			%	100	1.350.000.000	100	1.650.000.000		
				8.01.06.1.01.02					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				850.000.000		1.000.000.000		
										Jumlah kajian perumusan Penanganan Konflik Sosial (laporan)	Laporan	58	850.000.000	60	1.000.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				8.01.06.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			500.000.000		650.000.000		
										Jumlah laporan deteksi dini (laporan)	Laporan	1	200.000.000	1	250.000.000		
										Jumlah laporan penanganan konflik sosial (laporan)	Laporan	3	300.000.000	3	400.000.000		
		Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik											**27.617.112.000**		**528.788.868.000**		
			Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik								Nilai	3,12	27.617.112.000	3,35	528.788.868.000		
				8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								2.985.500.000		3.449.050.000		
						Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					Nilai	3,14	2.985.500.000	3,4	3.449.050.000		
				8.01.02.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						2.985.500.000		3.449.050.000		
								Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)			%	80	2.512.665.000	90	2.674.181.000		
				8.01.02.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				2.372.500.000		2.520.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis (orang)	Orang	100	105.000.000	100	105.000.000		
										Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)	Orang	3150	2.267.500.000	3350	2.415.000.000		
				8.01.02.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				140.165.000		154.181.000		
										Jumlah Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Prov dan Kab/Kota (laporan)	Laporan	1	110.165.000	1	121.181.000		
										Jumlah laporan Pembinaan Etnisitas dengan negara (laporan)	Laporan	1	30.000.000	1	33.000.000		
								Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%)			%	80	472.835.000	85	774.869.000		
				8.01.02.1.01.01					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				50.000.000		50.000.000		
										Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ideologi yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000		
				8.01.02.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				147.500.000		422.068.000		
										Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (orang)	Orang	100	147.500.000	400	422.068.000		
				8.01.02.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				8.925.000		9.750.000		
										Jumlah laporan pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks napiter dan masyarakat rentan (laporan)	Laporan	1	8.925.000	1	9.750.000		
				8.01.02.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				266.410.000		293.051.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										"Jumlah Laporan Monev Bidang Bidang Ideologi dan Pembauran Kebangsaan (laporan)"	Laporan	1	266.410.000	1	293.051.000		
				8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								24.631.612.000		525.339.818.000		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik					Nilai	3,1	24.631.612.000	3,3	525.339.818.000		
				8.01.03.1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						24.631.612.000		525.339.818.000		
								Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)			Laporan	1	21.119.520.000	1	21.257.490.000		
				8.01.03.1.01.01					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			50.000.000		50.000.000		
										Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50.000.000	1	50.000.000		
				8.01.03.1.01.04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			355.030.000		472.900.000		
										Jumlah laporan Perkembangan Demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	355.030.000	1	472.900.000		
				8.01.03.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			20.714.490.000		20.734.590.000		
										Jumlah laporan pelaksanaan bantuan partai politik (laporan)	Laporan	1	149.790.000	1	163.500.000		
										Jumlah Laporan Pendataan Parpol (laporan)	Laporan	1	20.564.700.000	1	20.571.090.000		
								Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)			%	89,5	382.110.000	90,5	445.000.000		
				8.01.03.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			382.110.000		445.000.000		
										Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan pemahaman keterbukaan informasi publik (orang)	Orang	100	57.110.000	160	100.000.000		
										Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan penatausahaan bantuan keuangan partai politik (orang)	Orang	320	245.000.000	320	245.000.000		
										Jumlah kader parpol yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	100	80.000.000	160	100.000.000		
								Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)			%	89,5	2.402.920.000	90,5	502.735.308.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2022		2023			
												Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				8.01.03.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2.402.920.000		502.735.308.000		
										Jumlah masyarakat media/pers yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik	Orang	100	80.000.000	100	92.388.000		
										Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	3340	2.322.920.000	3640	502.642.920.000		
								Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)			%	89,5	727.062.000	90,5	902.020.000		
				8.01.03.1.01.02					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				54.950.000		80.000.000		
										Jumlah kajian strategik pengembangan politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	54.950.000	1	80.000.000		
				8.01.03.1.01.03					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				557.020.000		697.020.000		
										Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem dan implementasi politik (orang)	Orang	240	444.360.000	320	544.360.000		
										Jumlah perguruan tinggi yang terlibat dakam kemitraan pengembangan demokrasi (kab/kota)	Kabupaten/ Kota	160	112.660.000	240	152.660.000		
				8.01.03.1.01.05					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				115.092.000		125.000.000		
										Jumlah laporan situasi dan kondisi politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	115.092.000	1	125.000.000		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id